Edisi Pemutakhiran

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia

Tim Nasional Penulisan
Sejarah Indonesia

Balai Pustaka

III

KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Sejarah Nasional Indonesia
III

Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia

BHINNEKA TUNGGAL IKA

Edisi
Pemutakhiran

Sejarah Nasional Indonesia
III

Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia

Editor Umum

Marwati Djoened Poesponegoro
Nugroho Notosusanto

Editor Umum Pemutakhiran

R.P. Soedjono
K.Z. Leirissa

Balai Pustaka

PT (Persero) Penerbitan dan Percetakan
BALAI PUSTAKA

BP No. 2704

Hak pengarang dilindungi undang-undang

Edisi Pemutakhiran
Cetakan Pertama – 2008
Cetakan Ketujuh – Juli 2019
130719

959.8
Poe
s

Poesponegoro, Marwati Djoened
Sejarah Nasional Indonesia III/Marwati Djoened Poesponegoro: Nugroho. – cet.7 – Edisi Pemutakhiran.– Jakarta: Balai Pustaka, 2019

xxxii, 422 hlm. ilus. ; bibl. ; indeks. ; 24,5 cm. – (Seri BP no. 2704).

1. Sejarah Indonesia. I. Notosusanto, Nugroho. II. Judul. III. Seri.
ISBN 979 – 407 – 409 – 8

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta

Pasal 2

(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penyelaras Bahasa : Huri Yani
Desain Isi : Pambudi Utomo
Desain Sampul : Alivia Dian dan Gatot. S
Sumber Foto : Tim Pemutakhiran

Kata Pengantar

Edisi Pemutakhiran

Buku *Sejarah Nasional Indonesia* (SNI) Edisi Pemutakhiran ini terbit dalam cetakan ketujuh. Sejak awal penerbitan *SNI* pada tahun 1975, buku *SNI* ini belum pernah dimutakhirkan sesuai dengan temuan-temuan baru dan perkembangan teori sejarah yang baru. Sudah hampir tiga puluh tiga tahun, banyak naskah perbaikan masih tersimpan di laci para penulis sejarah Indonesia.

Keunikan pertama dari *SNI* adalah bahwa buku ini merupakan hasil karya bangsa Indonesia sendiri, ilmuwan/-wati Indonesia yang sebagian besar masih hidup. Keunikan kedua dari buku *SNI* ini adalah ditulis dengan latar belakang Indonesia atau bersifat indonesiasentris. Untuk mengetahui latar belakang penulisan buku *SNI* sebanyak enam jilid ini perlu dibaca Prakata Editor Umum pada edisi pertama yang ditulis oleh Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo.

Buku *SNI* telah mendapat julukan dari masyarakat Indonesia sebagai "buku standar" sejarah Indonesia. Oleh karena itu, isi buku *SNI* sering dipakai sebagai sumber rujukan penulisan dan pembicaraan tentang sejarah Indonesia, baik secara langsung dikatakan maupun secara tersirat.

Balai Pustaka sebagai pemegang hak penerbitan buku *SNI* telah berusaha keras untuk menghidupkan kembali semangat nasional para pencetus dan penulis awal buku *SNI*. Dengan menghimpun semua mereka yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam penulisan buku *SNI*, Balai Pustaka berhasil memutakhirkan isi buku *SNI* walaupun memang terlambat. Kepada para penulis buku *SNI*, baik yang masih hidup dan terus terlibat dalam pemutakhiran buku *SNI* ini dan kepada yang telah meninggal, Balai Pustaka mengucapkan terima kasih dan penghormatan besar atas karya dan jasa mereka.

Dengan ini, *SNI* Edisi Pemutakhiran ini hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga *SNI* Edisi Pemutakhiran ini menyadarkan bangsa Indonesia akan sejarah bangsanya dan buku ini berguna bagi bangsa Indonesia.

Terima kasih.

Balai Pustaka

Kata Pengantar

Edisi ke-4

Sejarah nasional menggambarkan pertumbuhan kita sebagai suatu bangsa. Sejak zaman purba dengan tanda-tanda pertama akan akar-akar kehidupan bangsa, kemudian melalui perkembangan suku-suku tiap daerah, kita telah tumbuh menjadi kesatuan bangsa dengan tanggapan dan sikap hidup nasional yang khas.

Perkembangan nasional mengingatkan kita kepada pertumbuhan pohon dengan pokok kesatuan yang makin kukuh dan besar. Kata *sejarah* yang berasal dari bahasa Arab berarti "pohon".

Sudah cukup banyak ditulis tentang sejarah nasional kita, baik oleh ahli sejarah bangsa kita maupun oleh orang-orang asing, masing-masing mengenakan pandangan dan tafsirannya terhadap pertumbuhan bangsa kita. Di tengah pelbagai uraian itu diperlukan karangan sejarah *babon*, yang dapat menjadi dasar dan rujukan penulisan sejarah nasional. Buku ini mengandung sejarah nasional Indonesia yang baku, yang ditulis dan disunting oleh ahli-ahli sejarah bangsa kita.

Balai Pustaka sebagai Penerbit Pemerintah merasa bangga dapat menerbitkan keenam jilid *Sejarah Nasional Indonesia* Edisi ke-4 cetakan ke-8 ini.

Balai Pustaka

SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Kita semua mengetahui bahwa penulisan buku sejarah Indonesia sampai sekarang masih menggunakan bahan-bahan dan versi asing. Karena itu sudah lama dirasakan bahwa penulisan buku Sejarah Indonesia perlu ditangani oleh sejarawan Indonesia yang mempunyai keahlian dalam bidang itu. Usaha-usaha ke arah penyusunan buku sejarah Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1950, tetapi mengalami berbagai kesulitan dan hambatan sehingga baru sekarang dapat disusun Buku Standar Sejarah Nasional Indonesia.

Buku standar Sejarah Nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan "babon" sejarah Indonesia, yang disusun oleh sejarawan Indonesia, berdasarkan penelitian ilmiah dan orientasi nasional. Tim sejarawan Indonesia, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo telah bekerja dengan penuh ketekunan dan dedikasi. Hasil pekerjaannya sangat berguna bagi dunia pendidikan pada khususnya dan bagi pengetahuan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena mempergunakan fakta-fakta ilmiah yang objektif, dan orientasi yang sesuai dengan kepentingan nasional. Karena itu, kita sekarang tidak lagi menggunakan bahan-bahan dan versi asing dalam sejarah Indonesia.

Selain buku standar Sejarah Nasional Indonesia, telah pula disusun buku Sejarah Nasional untuk sekolah lanjutan tingkat pertama yang terdiri atas tiga jilid, dan untuk tahun 1976 telah direncanakan menyusun buku Sejarah Nasional untuk sekolah lanjutan tingkat atas.

Penulisan buku Sejarah Indonesia bukan merupakan tugas yang mudah, apalagi jika diselesaikan dalam waktu yang relatif pendek.

Karena itu, usaha-usaha penulisan sejarah Indonesia yang telah dilakukan itu perlu kita sempurnakan dan kembangkan terus sehingga anak didik dan masyarakat Indonesia akan dapat memetik manfaatnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 5 Maret 1975
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Sjarif Thayeb

Prakata Editor Umum

Edisi Pemutakhiran

Buku *Sejarah Nasional Indonesia* (SNI) mungkin telah dianggap sebagai dokumen historis dan telah dimakan waktu sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 1975 dengan pelanjutannya pada tahun 1977 (sampul hijau) dan pada tahun 1981–1983 (sampul biru). Tiga puluh tiga tahun dan/atau 25 tahun perjalanan sebuah buku sejarah tentu memerlukan pemutakhiran baik secara materi, teori, dan konsep, maupun secara perbukuan dan pembahasaan. Jika sebagian penulis (SNI) pada awalnya berumur 40 tahun, sekarang sebagian dari mereka telah berumur 75 tahun atau telah meninggal.

Dalam perjalanan waktu ini, buku *SNI* telah menjadi sumber penulisan sejarah yang beredar dan menjadi rujukan para cendekia dari luar dan dalam negeri. Di samping itu, kebutuhan masyarakat Indonesia akan sebuah sumber sejarah yang terpercaya didasarkan pada keterpercayaan kepada para penulis yang memang pakar dalam bidang sejarah dan bobot kepakaran mereka menjadi jaminan keakuratan sejarah nasional Indonesia. Kelangkaan buku sejarah yang menjadi sumber rujukan masyarakat, khususnya para pelajar/siswa dan mahasiswa, mendorong para pakar yang terlibat dalam penulisan buku *SNI* berkumpul kembali (tentu yang masih hidup) untuk *memutakhirkan* buku *SNI* dari segi materi, teori, dan konsep, selain editorial yang menarik dan bertanggung jawab. Lahirlah SNI Edisi Pemutakhiran ini.

Edisi Pemutakhiran ini tetap mempertahankan *SNI* dalam enam jilid seperti edisi awal dengan beberapa perubahan susunan subbab, pengaturan kembali urutan subbab, serta perbaikan redaksional pada setiap jilid. Pemutakhiran ini telah berlangsung satu setengah tahun di tengah kesibukan para penulis baik yang lama maupun yang baru.

Bagaimanapun juga yang tetap dijaga dalam edisi pemutakhiran ini adalah bahwa buku ini ditulis oleh pakar Indonesia dengan pandangan orang Indonesia sendiri mengenai kisah bangsanya. Pandangan Prof. Dr. Sartono Kartodirejo tetap relevan dan aktual seperti dalam "Prakata Editor Umum" Edisi I yang tetap dimuat dalam Edisi Pemutakhiran ini.

Dalam Edisi Pemutakhiran ini setiap jilid buku *SNI* mendapatkan pula prakata sebagai pertanggungjawaban para penulis. Ada prakata yang pendek dan ada prakata yang panjang, dan semuanya menjadi pintu masuk setiap jilid.

Akhirulkalam, para penulis mengucapkan terima kasih kepada PT Balai Pustaka (Persero) sebagai penanggung jawab penerbitan, kepada mereka yang membantu memberikan dana kegiatan penulisan dan penerbitan, dan kepada para Konsultan PT Balai Pustaka (Persero) yang tetap pada usaha dan dorongan untuk penerbitan dan pemutakhiran buku *SNI* ini. Inilah jasa dan sumbangsih kita bangsa Indonesia dalam bentuk penulisan buku *SNI*.

Semoga buku ini berguna bagi para anak bangsa sekarang dan pada masa yang akan datang datang.

Semoga Tuhan memberkati kita semua yang terlibat.

Terima kasih.

Akhir 2007

R.P. Soedjono
R.Z. Leirissa

Kata Pengantar Editor Umum

untuk Edisi 1984

Sejak buku *Sejarah Nasional Indonesia* ini terbit untuk pertama kali pada tahun 1975 dan selanjutnya pada tahun 1977 (sampul hijau) dan pada tahun 1981–1983 (sampul biru), kehadirannya sudah mantap dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan dalam sebutan masyarakat mendapat nama-julukan "Buku Standar".

Memang hingga kini buku ini masih unik karena merupakan buku sejarah Indonesia pertama yang substansial hasil karya orang Indonesia. Dengan segala kekurangannya, buku ini dapat menyampaikan suatu *view from within*, pandangan orang Indonesia sendiri mengenai kisah bangsanya.

Para pengarang sendiri merasa bahwa buku ini sudah perlu diterbitkan dalam suatu edisi revisi, yang telah disesuaikan dengan hasil penelitian mutakhir. Namun, usaha semacam itu memerlukan waktu yang lebih lama dan koordinasi yang tidak mudah. Oleh karena itu, telah diputuskan untuk menerbitkan edisi ini yang telah mulai mengalami perbaikan-perbaikan, tetapi belum sepenuhnya. Selanjutnya, usaha melakukan revisi besar akan diusahakan terus.

Hal itu adalah semata-mata karena edisi-edisi sebelumnya telah lama habis. Padahal permintaan masyarakat sudah sangat mendesak karena sementara ini telah timbul satu generasi baru cendekiawan yang belum sempat memiliki buku standar Sejarah Nasional Indonesia. Generasi baru itu meliputi pula sejumlah besar guru sejarah pada SD, SMTP, dan SMTA yang perlu memantapkan pemahamannya terhadap sejarah nasional Indonesia untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan memadai.

Diharapkan pula agar supaya masyarakat luas dapat menggunakan edisi ini untuk mengerti masa kini bangsa dan negaranya melalui pemahaman masa lampaunya. Dengan demikian, mudah-mudahan dapat dilaksanakan pembangunan masa depannya yang cemerlang.

11 Agustus 1984

Marwati Djoened Poesponegoro
Nugroho Notosusanto

Prakata Editor Umum

Edisi ke-1

Setelah bangsa Indonesia berhasil memerdekakan dirinya, munul keinginan di kalangan cendekiawan untuk menulis kembali sejarah Indonesia, tidak lain karena penulisan-penulisan sejarah yang diwariskan oleh sejarawan Belanda sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat Indonesia dewasa ini. Sudut penglihatan yang tercermin dalam karya-karya mereka terutama memusatkan perhatian kepada peranan bangsanya, *neerlando-sentrisme* semacam itu perlu diganti dengan *Indonesia-sentrisme*, yaitu pandangan dari sudut penglihatan yang berpusat pada Indonesia sendiri. Pemikiran sekitar pandangan baru ini telah dikemukakan oleh beberapa ahli pikir sebagai salah satu usaha untuk mengarahkan usaha pemikiran serta penulisan sejarah Indonesia yang lebih memadai.

Untuk melaksanakan gagasan tentang penulisan kembali sejarah Indonesia, pada tahun 1951 telah dibentuk suatu Panitia Sejarah Nasional yang bertugas menyusun kitab sejarah nasional Indonesia dengan dasar luas dan jiwa nasional bersendi pada ilmu pengetahuan dipandang dari sudut politik, sosial ekonomi dan kebudayaan mulai dari zaman purba sampai sekarang. Keadaan dewasa itu rupanya belum memungkinkan Panitia itu untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Sebagai langkah yang sangat penting dapat disebut penyelenggaraan Seminar Sejarah Nasional yang pertama di Yogyakarta pada tahun 1957. Selain untuk memperdalam pemikiran tentang sejarah Indonesia sebagai sejarah nasional, diperbincangkan pula keperluan yang sangat mendesak, yaitu penulisan buku-buku sejarah untuk sekolah-sekolah. Kenyataannya adalah bahwa buku-buku sekolah yang dipakai, kalau bukan terjemahan atau saduran dari buku-buku sejarah karangan sejarawan Belanda, belum mewujudkan sejarah nasional dalam arti yang sebenarnya. Meskipun hasil dari seminar tidak memenuhi harapan para peserta, tetapi tidak sedikit manfaatnya untuk memperdalam kesadaran akan peranan sejarah nasional sebagai sarana penting pendidikan warga negara Indonesia, terutama untuk menimbulkan kesadaran nasionalnya dengan mengenal identitas bangsanya melalui sejarahnya.

Sekitar tahun 1963 telah dibentuk panitia untuk melaksanakan penulisan kembali sejarah Indonesia, tetapi tahun-tahun berikutnya, yang penuh ketegangan sosial dan krisis politik tidak memberi kesempatan kepada panitia untuk menghasilkan karya.

Suatu titik terang dalam perkembangan studi sejarah di Indonesia adalah Seminar Sejarah Nasional kedua yang diselenggarakan di Yogyakarta pada Agustus 1970, yaitu suatu generasi baru sejarawan memajukan kertas kerjanya dalam jumlah yang cukup besar. Pokok-pokok kertas kerja itu mencakup periode prasejarah sampai dengan periode yang paling modern. Hal ini dapat dianggap suatu langkah yang cukup maju jika dibandingkan dengan seminar yang pertama, tambahan pula dapat dipandang sebagai suatu tanda bahwa sudah ada kemungkinan yang lebih besar untuk meneruskan usaha penulisan sejarah nasional. Jumlah tenaga kerja, meskipun kebanyakan belum banyak pengalaman dalam penulisan, telah memadai untuk membentuk kelompok yang akan bertugas melaksanakan usaha itu. Ditambahkan lagi bahwa keperluan penulisan buku sejarah untuk sekolah semakin terasa mendesak. Kedua hal itu mendorong para sejarawan untuk mengusulkan kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar diangkat suatu regu yang ditugaskan menulis kembali Sejarah Indonesia. Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0173/1970, 4 April 1970, mengangkat Panitia Penyusun Buku Standar Sejarah Nasional Indonesia berdasarkan Pancasila yang dapat dipakai di perguruan tinggi dan sekaligus akan dijadikan bahan *textbook* sejarah untuk sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas.

Panel pertama mencakup seluruh periode yang lazim disebut *prasejarah*. Panel kedua akan membahas periode akhir Prasejarah sampai kedatangan pengaruh Islam di Indonesia. Panel ketiga bertolak dari awal zaman ini sampai akhir abad ke-17. Panel keempat mulai sekitar tahun 1700 sampai 1900. Panel berikutnya meliputi periode pergerakan nasional (1900–1942). Panel yang terakhir menggarap masa pendudukan Jepang sampai dengan kira-kira pertengahan tahun enam puluhan.

Tidak berbeda dengan tugas pujangga di masa lampau, sejarawan dewasa ini juga mempunyai kewajiban untuk menafsirkan serta meneruskan tradisi bangsanya dengan menyusun kembali riwayatnya termasuk garis perkembangan masyarakatnya serta kebudayaannya.

Dalam menunaikan fungsinya itu, sejarawan Indonesia perlu menyadari sepenuhnya bahwa dengan gambaran sejarahnya, bangsa Indonesia mampu menempatkan diri dalam waktu serta memahami diri sehingga secara lebih mendalam dikenal identitasnya.

Kesadaran akan tanggung jawab yang berat ini pada satu pihak menimbulkan pada sejarawan suatu keragu-raguan apakah kemampuan serta pengetahuannya telah memadai untuk melaksanakan tugas itu, pada pihak lain keadaan pengajaran sejarah sebagai sendi pendidikan nasional sangat menyedihkan sehingga di dalam keadaan itu tidak dapat diharapkan penanaman perasaan kepribadian nasional serta pemupukan konsensus pada generasi muda melalui pengajaran sejarah itu.

Dengan diperolehnya kemerdekaan, bangsa Indonesia mulai menyadari akan situasinya serta hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Proses dekolonisasi dalam bidang politik diikuti oleh proses yang sama dalam penulisan sejarah. Di dalam masa penjajahan bangsa Indonesia "terasing" dari sejarahnya sendiri, apa yang diajarkannya lebih merupakan sejarah dari negeri perantauan bangsa penjajah di mana ditonjolkan peranan tokoh-tokoh penjajah sedang peranan bangsa Indonesia ada di latar belakang belaka. Pelukisan dari sudut penglihatan Barat jelas-jelas berat sebelah karena subjektivitas yang timbul dari kepentingan perdagangan khususnya dan penjajahan pada umumnya. Masalah dekolonisasi dalam penulisan sejarah tidak cukup dengan mengubah peranan pemberontak menjadi pahlawan, akan tetapi perlu diungkapkan segala kekuatan sosial yang menciptakan masyarakat Indonesia serta memberikan arah perkembangannya. Untuk melengkapi gambaran serta menerangkan proses sejarah perlu diuraikan pelbagai faktor yang mendorong pertumbuhan bangsa Indonesia.

Penyusunan kembali sejarah Indonesia perlu memenuhi beberapa syarat yang dituntut oleh proses dekolonisasi itu.

(1) Sejarah Indonesia yang wajar ialah sejarah yang mengungkapkan "sejarah dari dalam" di mana bangsa Indonesia sendiri memegang peranan pokok.

(2) Proses perkembangan masyarakat Indonesia hanya dapat diterangkan sejelas-jelasnya dengan menguraikan faktor atau kekuatan yang memengaruhinya, baik ekonomis, sosial, maupun politik atau kultural.

(3) Berhubungan erat dengan kedua pokok di atas perlu ada pengungkapan akitivitas dari pelbagai golongan masyarakat, tidak hanya para bangsawan atau kesatria, tetapi juga dari kaum ulama dan petani serta golongan-golongan lainnya.

(4) Untuk menyusun sejarah Indonesia sebagai suatu sintesis, di mana digambarkan proses yang menunjukkan perkembangan ke arah kesatuan geopolitik seperti yang kita hadapi dewasa ini, prinsip integrasi perlu dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh integrasi itu dalam masa-masa tertentu telah tercapai.

Penulisan ini berpangkal pada paham bahwa Indonesia dengan pelbagai kelompok penduduknya dapat dipandang sebagai suatu kesatuan yang tumbuh bersama dengan perkembangan wilayah Indonesia sebagai daerah politik-geografis. Paham itu kemudian diperkuat dengan munculnya gerakan nasional yang semakin memperkuat kesadaran nasional, yaitu kesadaran bahwa penduduk kepulauan Indonesia merupakan satu bangsa.

Perkembangan kesatuan nasional itu sendiri tidak dapat dipahami tanpa mengetahui perkembangan sejarah Indonesia.

Penulisan sejarah pada tahun tujuh puluhan seyogianya didasarkan atas beberapa anggapan tentang perkembangan masyarakat Indonesia serta sejarahnya.

Anggapan pertama adalah proses integrasi yang memuat pengertian bahwa ada kelangsungan dari kesatuan-kesatuan masyarakat dan kebudayaan lokal sampai yang nasional. Ini berarti bahwa sejarah lokal atau daerah perlu ditulis dalam hubungannya dengan atau peranannya dalam kesatuan besar.

Anggapan kedua berhubungan dengan perubahan sosial dan kebudayaan yang merupakan proses yang kompleks. Lembaga-lembaga kebudayaan mendapat pengaruh dari proses perubahan yang bergerak dengan pelbagai kekuatan, serta mencakup pelbagai aspek kehidupan.

Anggapan ketiga menunjuk kepada kenyataan bahwa setiap kesatuan etnis serta kebudayaannya perlu dipahami menurut jasa-jasa atau sumbangan yang diberikan kepada sejarah Indonesia serta perlu dimengerti berdasarkan nilainya sendiri. Setiap kesatuan sejarah menghasilkan warisan untuk masa depan.

Salah satu sebab yang mendorong panitia untuk menerima tugas penulisan sejarah ini ialah karena buku-buku sejarah untuk sekolah-sekolah dasar dan menengah sangat rendah mutunya. Beberapa kali usaha untuk memperbaikinya telah gagal, antara lain karena tidak ada buku *babon* atau pedoman yang dapat memberi kerangkanya. Diharapkan agar tulisan ini akan dapat dipergunakan sebagai kerangka untuk penulisan buku sekolah itu.

Disadari sepenuhnya oleh panitia bahwa pengajaran sejarah merupakan dasar bagi pendidikan dalam masa pembangunan nasional, terutama untuk menggembleng jiwa generasi muda dengan membangkitkan pada mereka suatu kesadaran bahwa mereka anggota dari suatu *nasion*. Meskipun dirasakan bahwa tenaga ahli masih sangat kurang untuk melaksanakan pekerjaan raksasa itu, keperluan yang

mendesak menghilangkan keragu-raguan sehingga kelompok tidak mau mengelakkan kewajiban menulis kembali sejarah Indonesia.

Setiap usaha kolektif semacam ini tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan dari pelbagai pihak, baik lembaga maupun perseorangan. Pertama-tama perlu disebut Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sejak semula memberikan dorongan yang kuat untuk menjalankan penulisan ini, dorongan itu berupa fasilitas-fasilitas serta prasarana-prasarana yang amat memudahkan pekerjaan Panitia. Lagi pula kepercayaan serta perhatian yang ditaruh pada usaha ini merupakan dukungan moril yang sangat berharga sehingga pelbagai kesulitan dapat diatasi. Kepada beliau beserta pembantu-pembantu beliau di lingkungan Departemen, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan itu.

Semua anggota panitia, tanpa terkecuali, adalah tenaga dari universitas, lembaga ilmiah, dan lembaga pemerintah. Selain tugas pokoknya, mereka diberi kesempatan menyumbangkan tenaga serta pikirannya kepada karya penulisan ini. Atas kelonggaran itu Panitia perlu menyatakan rasa terima kasih sebesar-besarnya.

Perhatian terhadap usaha ini, yang sering disertai bantuan materil yang konkret tidak hanya datang dari pihak lembaga-lembaga Pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Tidak sedikit bantuan diterima dari *The Ford Foundation* yang diberikan lewat perwakilannya di Indonesia, terutama dengan memberikan kesempatan bagi para ketua panel untuk memperdalam pengetahuannya dalam bidang teori dan metodologi sejarah.

Selama perantauan di Amerika Serikat dan Nederland, perhatian serta bantuan diberikan kepada rombongan ketua-ketua panel dengan sangat leluasa sehingga tidak ternilai manfaat yang diperolehnya, terutama bagi penyusunan karya ini. Para sarjana atau sejarawan yang tersohor dari Universitas California di Berkeley, dan dari universitas-universitas lain, seperti Cornell, Ohio, Wisconsin, Yale, kemudian dari Universitas Leiden dan Koninklijk Instituut van Taal–, Land–en Volkenkunde, kesemuanya sangat terbuka dalam membahas masalah dan rencana penulisan sejarah ini. Fasilitas-fasilitas diperoleh dari arsip-arsip di negeri Belanda sehingga bahan menjadi semakin lengkap. Panitia merasa beruntung mendapat kesempatan yang luar biasa itu, lagi pula banyak yang secara perorangan dengan tulus ikhlas memberikan segala macam bantuan sehingga memperingan tugas rombongan selama merantau, sesungguhnya terlalu banyak untuk disebut satu per satu.

Kepada segenap anggota panitia di sini kami selaku ketua menyatakan rasa terima kasih atas segala jerih payah dan daya upaya, pengorbanan waktu, tenaga serta pikiran yang kesemuanya memungkinkan pelaksanaan tugas yang diletakkan pada Panitia. Yang perlu mendapat penghargaan sebesar-besarnya tidak lain ialah segala kesediaan serta kemauan baik yang ditunjukkan sehingga selama kira-kira tiga tahun terjalin hubungan yang cukup akrab serta kerja sama yang baik. Tanpa sumbangan itu pekerjaan Panitia tidak akan dapat diselesaikan dengan semestinya.

Meskipun panitia sebagai suatu wadah telah mengatur serta sekadar mengarahkan dan mengoordinasikan penulisan kolektif ini, tetapi tanggung jawab terletak pada pengarang masing-masing.

Meskipun banyak fasilitas yang diperoleh selama menjalankan penulisan itu, mulai dari pengumpulan bahan sampai penerbitannya, tetapi oleh panitia dirasakan bahwa karya belum dapat memenuhi harapan seperti yang telah diutarakan di mana-mana, jangankan tuntutan seperti yang lazim diadakan terhadap karangan ilmiah. Mungkin dirasakan pula bahwa karya ini belum memadai biaya dan tenaga yang dicurahkan bagi pelaksanaannya. Karya kolektif seperti ini memang memerlukan organisasi, permusyawarahan, dan penyerasian pelbagai kondisi anggota sehingga sukar diharapkan bahwa semua nilai input dapat dicerminkan dalam nilai hasilnya. Kecuali kurang pengalaman menulis, pengalaman pertama dalam usaha kolektif, kurang kemahiran penulisan ini membawa akibat ketidakrataan serta serba kurangnya susunan penulisan ini.

Dalam hal ini tidak ada seorang pun anggota panitia yang mempunyai anggapan bahwa karya ini merupakan suatu standar, karena masih jauh dari kelaikan sebuah buku standar. Pada hemat kami, ini baru merupakan usaha permulaan, sekadar memenuhi keperluan yang mendesak. Besar harapan kami bahwa setelah karya ini terbit banyak yang didorong menghasilkan penulisan sejarah Indonesia, dalam keseluruhan atau hanya sebagian, yang lebih tinggi mutunya serta lebih memenuhi syarat-syarat sebagai sejarah nasional yang ilmiah.

Panitia masih mencari-cari gaya bahasa serta tingkat penguraian yang sesuai dengan sidang pembaca karya ini. Yang dimaksud dengan sidang pembaca di sini terutama para kaum terpelajar serta cendekiawan Indonesia yang memiliki minat pada sejarah tanah airnya, sekadar sebagai bacaan pendahuluan. Untuk mempelajari sejarah yang lebih mendalam serta terperinci sudah barang tentu diperlukan karya-karya khusus. Meskipun

lingkup waktu serta rangkuman karya ini mencakup periode dari prasejarah sampai sejarah terbaru, tetapi Panitia terpaksa membatasi diri pada pasal-pasal pilihan, ialah yang meliputi bagian-bagian dari perkembangan sejarah yang merupakan gejala-gejala penting, terutama dalam hubungannya dengan proses integrasi serta yang menjelaskan sistem dan struktur masyarakat sekarang.

Selanjutnya sejarah yang disajikan di sini tidak meliputi semua bidang kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau, beberapa segi dengan sengaja tidak dicakup, seperti sejarah kesenian dan sejarah kebudayaan dengan alasan bahwa (1) jenis sejarah itu sudah sejak lama mandiri dan (2) ruang lingkup penulisan ini terpaksa dibatasi. Hal ini dilakukan dengan harapan agar pada kesempatan lain ada penulisan tersendiri mengenai sejarah kesenian dan kebudayaan itu.

Keterbatasan karya ini juga disebabkan oleh kenyataan bahwa belum cukup tersedia hasil penelitian, pengkajian, serta penulisan dari sudut penglihatan baru pada waktu karya ini dimulai. Yang jelas adalah bahwa karya ini tidak didasarkan atas penelitian yang asli dan mendalam.

Tidak ada penulisan sejarah yang tidak memuat sifat-sifat subjektif. Meskipun dalam penulisan ini diusahakan agar segala tuntutan metodologi ilmu sejarah dipenuhi, termasuk kritik sejarah, tetapi tidak ada anggapan bahwa hasil penulisan telah mencapai objektivitas sepenuhnya. Dalam menghayati penulisan sejarah Indonesia dari dalam, atau juga sering disebut penulisan yang Indonesia-sentris, mau tidak mau panitia membatasi sudut penglihatannya atau titik pendirian. Dianggapnya hal itu yang paling memadai dalam situasi yang kita hadapi, ialah kenyataan bahwa pengertian "Indonesia" memang mewujudkan realitas bagi bangsa Indonesia, yaitu negara nasional yang mengikat sebagai suatu kesatuan kelompok-kelompok etnis sebagai satu bangsa dengan satu bahasa nasional. Di sini perlu kita akui bahwa pangkal tolak penggarapan penulisan sejarah ini terikat pada zaman kita sekarang ini, suatu ikatan yang tidak dapat kita lepaskan begitu saja.

Sejarah Nasional seperti yang dikonsepsikan di sini sama sekali tidak menyangkut pengertian bahwa sejarah bangsa Indonesia harus digambarkan dalam serta keagungannya belaka sehingga objektivitas harus dikorbankan demi penggambaran yang demikian itu. Pasang surut kegiatannya, maju-mundur karya kebudayaannya, timbul tenggelam lembaga-lembaganya, unggul-kalahnya perjuangannya, kesemuanya secara bersama-sama menyusun irama sejarah Indonesia yang sebagai nasib bersama akan mempertinggi kesadaran bangsa Indonesia sebagai nasional. Panitia

berkeyakinan bahwa sejarah Indonesia yang menggambarkan nasib bersama, dalam suka duka, kegemilangan dan kesuraman, selain kepahlawanan serta kewibawaan tokoh-tokoh sejarah, mampu membangkitkan rasa kebanggaan pada generasi muda, perasaan mana akan memantapkan kepribadian bangsa, serta identitasnya. Dengan demikian, akan tercapai pula apa yang diharapkan dari pelajaran Sejarah Nasional, tanpa mengurangi tuntutan-tuntutan ilmu sejarah.

Akhirulkalam, harapan yang terkandung dalam hati panitia tidak lain adalah semoga karya yang tidak sepertinya ini menambah bahan bacaan bagi kaum terpelajar yang berminat pada sejarah Indonesia, baik yang hendak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di masa lampau maupun yang ingin mengambil pelajaran dari suri teladan para tokoh sejarah atau dari pengalaman-pengalaman bangsa Indonesia sepanjang masa.

Yogyakarta, akhir 1974
Sartono Kartodirdjo

Prakata Editor Jilid

Edisi Pemutakhiran

Assalamualaikum wr. wb.

Edisi Pemutakhiran buku *Sejarah Nasional Indonesia* jilid III yang diberi judul "Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia" terbitan Balai Pustaka telah mengalami perbaikan baik susunan maupun isinya jika dibandingkan dengan edisi-edisi sebelumnya. Dalam perubahan penempatan bab-bab juga telah diberi bab baru tentang Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di enam Kepulauan Indonesia secara singkat mengenai awal, memuncak, dan kemunduranya akibat kekuasaan politik penjajahan VOC sampai Hindia Belanda. Uraian dalam bab Perkembangan Kebudayaan dan Keagamaan juga mendapat penambahan tentang pemikiran dan pendidikan Islam.

Penempatan gambar dan foto telah diusahakan sesuai dengan narasinya. Perlu kami kemukakan bahwa penulisan sejarah ini tetap dengan pendekatan ilmu sosial lainnya dan dalam beberapa hal dipakai juga sumber naskah-naskah yang terkait.

Dengan terbitnya Edisi Pemutakhiran buku *Sejarah Nasional Indonesia* jilid III ini, kami selaku editor dan penulis beserta anggota-anggota lainnya: M.P.B Manus, AB. Lapian, Abdul Chair, dan Hasan Muarif Ambary (alm.), ingin menyampaikan terima kasih kepada Balai Pustaka dan pada perseorangan maupun instansi yang telah memberikan bantuannya. Akhirnya, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, dan dengan segala kekurangan serta ketidaksempurnaan kami mohonkan kritik dan sarannya bagi penyempurnaan kemudian.

Wassalam,

Uka Tjandrasasmita

Prakata Editor Jilid

Edisi ke-4

Edisi ke-4 buku *Sejarah Nasional Indonesia* jilid III ini telah mengalami beberapa perbaikan, baik mengenai susunannya maupun mengenai isinya jika dibandingkan dengan edisi ke-2 yang pernah diterbitkan Balai Pustaka.

Susunan yang menguraikan proses peristiwa-peristiwa sejarah diletakkan di bagian muka buku ini, sedangkan peristiwa-peristiwa sejarah yang uraiannya bersifat struktural diletakkan di bagian belakang.

Isi buku mengalami juga penambahan, terutama pada bab-bab yang menguraikan proses peristiwa-peristiwa sejarah di bagian depan. Namun, perlu dimaklumi bahwa isi mengenai peristiwa-peristiwa sejarah yang bersifat struktural pada dasarnya tidak mengalami perubahan.

Dengan terbitnya edisi ke-4 buku *Sejarah Nasional Indonesia* jilid III ini, kami, selaku editor mengharapkan semoga buku ini dapat melengkapi kepustakaan masyarakat dan bangsa di bidang pengetahuan sejarah. Kami menyadari bahwa edisi ke-4 ini masih jauh dari sempurna, karenanya kami harapkan akan ada saran-saran dan kritik-kritik untuk perbaikan penerbitan di masa-masa mendatang.

Uka Tjandrasasmita

Prakata

Edisi ke-1

Dalam buku *Sejarah Nasional Indonesia* III yang berjudul *Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia* ini diuraikan peristiwa-peristiwa sejarah dari masa kedatangan Islam, serta pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di pesisir-pesisir kepulauan Indonesia. Jangkauan waktu peristiwa-peristiwa sejarah yang diuraikan itu pada umumnya sejak abad ke-16 sampai abad ke-18.

Peristiwa-peristiwa sejarah tersebut sebagian diuraikan secara struktural dan sebagian lagi secara prosesual. Hal ini dimaksudkan agar peristiwa-peristiwa sejarah tersebut dapat memberikan gambaran struktur kehidupan sosial-ekonomi dan sosial-budaya bangsa Indonesia, khususnya pada masa-masa tersebut di atas.

Perlu kami kemukakan bahwa sumber-sumber yang dipergunakan untuk menyusun buku ini sebagian besar ialah sumber-sumber kedua baik berupa buku, artikel, dan bahan-bahan bacaan lainnya maupun naskah-naskah, hikayat daerah-daerah, serta berita-berita asing yang pernah diterbitkan. Oleh karena itu, baik mengenai materi maupun isi buku ini sudah tentu mempunyai banyak kekurangan serta jauh dari sempurna. Namun, kami atas nama tim penyusun dan redaksi untuk buku III ini merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa dengan segala kekurangannya dapat menyajikan suatu bahan bacaan sejarah guna melengkapi perbendaharaan pustaka bangsa Indonesia yang tengah membangun masyarakat dan negaranya.

Baik kepada perseorangan maupun instansi di dalam dan di luar negeri yang telah memberikan bantuan serta fasilitas sehingga terbitnya buku ini, kami ucapkan terima kasih.

Semoga buku ini memberikan manfaat bagi pembacanya, dan segala kritik akan kekurangan serta ketidaksempurnaan dalam penyajian tersebut kami terima dengan senang hati.

Uka Tjandrasasmita

Sejarah Nasional Indonesia

Edisi Pemutakhiran

Jilid I Zaman Prasejarah di Indonesia

Jilid II Zaman Kuno (awal M – 1500 M)

Jilid III Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia (±1500–1800)

Jilid IV Kemunculan Penjajahan di Indonesia (±1700–1900)

Jilid V Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (±1900–1942)

Jilid VI Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (±1942–1998)

Tim Redaksi Edisi Pemutakhiran

1. Uka Tjandrasasmita (Editor Jilid)
2. M.P.B. Manus

Sejarah Nasional Indonesia

Jilid I Jaman Prasejarah di Indonesia

Jilid II Jaman Kuna (awal M – 1500 M)

Jilid III Jaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia (±1500–1800)

Jilid IV Abad Kesembilanbelas (±1800–1900)

Jilid V Jaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (±1900–1942)

Jilid VI Jaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (±1942–1984)

Tim Redaksi

Ketua : Uka Tjandrasasmita

Anggota : M.P.B. Manus

A.B. Lapian

Hasan Muarif Ambary

Daftar Isi

Kata Pengantar Edisi Pemutakhiran v
Kata Pengantar Edisi ke-4 vi
Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia vii
Prakata Editor Umum Edisi Pemutakhiran ix
Kata Pengantar Editor Umum untuk Edisi 1984 xi
Prakata Editor Umum Edisi ke-1 xii
Prakata Editor Jilid Edisi Pemutakhiran xxi
Prakata Editor Jilid Edisi ke-4 xxii
Prakata Edisi ke-1 xxiii
Daftar Isi xxvii
Daftar Gambar xxxi

Bab I **Situasi dan Kondisi Politik serta Kebudayaan Masa Kedatangan dan Penyebarannya** 1
A. Situasi dan Kondisi Politik Masa Kedatangan Islam 1
B. Situasi Sosial Budaya Masa Kedatangan Islam 14

Bab II **Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam** 21
A. Kerajaan-Kerajaan Islam di Sumatra 21
1. Kerajaan Samudra Pasai 21
2. Kerajaan Aceh Darussalam 28
3. Kerajaan-Kerajaan Islam di Riau 37
4. Kerajaan Islam di Jambi 40
5. Kerajaan Islam di Sumatra Selatan 44
6. Kerajaan Islam di Sumatra Barat 47
B. Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa 50
1. Kerajaan Demak 52
2. Kerajaan Pajang 54
3. Kerajaan Mataram 55
4. Kerajaan Cirebon 59
5. Kerajaan Banten 65
C. Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusa Tenggara 72
1. Kerajaan Lombok dan Sumbawa 72
2. Kerajaan Bima 73

D. Kerajaan-Kerajaan Islam di Maluku 74
1. Kerajaan Ternate 74
2. Kerajaan Tidore 76
E. Kerajaan-Kerajaan Islam di Sulawesi 78
1. Kerajaan Gowa-Tallo 78
2. Kerajaan Bone 82
3. Kerajaan Wajo 83
F. Kerajaan-Kerajaan Islam di Kalimantan 85
1. Kerajaan Banjar (Banjarmasin) 85
2. Kerajaan Kutai 88
3. Kerajaan Pontianak 89

Bab III Pelayaran dan Perdagangan 91
A. Teknologi dan Pusat-Pusat Pelayaran 91
1. Sistem Angin untuk Pelayaran 91
2. Jenis Kapal dan Tempat-Tempat Pembuatannya 99
3. Jalan dan Pusat-Pusat Pelayaran 111
B. Pola Pelayaran dan Perdagangan 120
1. Pemilik Modal Pelayaran dan Perdagangan 120
2. Pelaksana Pelayaran dan Perdagangan 126
3. Jenis Barang Ekspor dan Impor 132
4. Tempat Penghasil Barang Perdagangan 137
C. Pelabuhan 141
1. Letak dan Fungsi Pelabuhan 141
2. Organisasi Pelabuhan 146
3. Sistem Pemungutan Bea Cukai 153

Bab IV Perkembangan Agama dan Kebudayaan Islam 161
A. Saluran-Saluran Islamisasi 161
1. Golongan Pembawa dan Penerima Islam 161
2. Saluran-Saluran dan Islamisasi 169
B. Aliran-Aliran Islam 175
1. Mazhab-Mazhab 175
2. Sekte-Sekte 177
C. Pemikiran Islam dan Pengaruhnya 179
1. Figh (Syari'ah) 179
2. Tasawuf 183
3. Tarekat 190
D. Lembaga Pendidikan 193
1. Pesantren dan Kehidupannya 193
2. Sistem Pendidikan dan Kitab-Kitabnya 194

E. Kesenian 196
1. Seni Sastra 196
2. Seni Bangunan 200
3. Ragam Hias 203

Bab V Struktur Organisasi Kerajaan-Kerajaan 205

A. Kekuasaan Pusat dan Daerah 205
1. Raja-Raja dan Bangsawan Sekitarnya 205
2. Sistem Pengangkatan Raja 207
3. Kewajiban-Kewajiban dan Hak-Hak Raja 212
4. Kekuasaan Raja dan Pangeran terhadap Raja 212
5. Tanda Perlambang Raja dan Bangsawan 214
6. Birokrasi Pusat dan Daerah 215
7. Mobilitas Golongan Birokrat 221

B. Hubungan Pusat dan Daerah 224
1. Sistem Pengawasan Pusat dan Daerah 224
2. Kewajiban Daerah terhadap Pusat 230
3. Sistem Komunikasi antara Pusat dan Daerah 234

C. Hubungan Kerajaan-Kerajaan 237
1. Hubungan antara Kerajaan di Indonesia 237
2. Hubungan Kerajaan dengan Negeri-Negeri Asing 245

Bab VI Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota 253

A. Kota dan Corak Kehidupan 253
1. Kota Pusat Kerajaan dan Kota di Luar Pusat Kerajaan 253
2. Jumlah Penduduk Kota 268
3. Lapisan Penduduk dan Corak Kehidupannya 273

B. Pasar, Pusat Perekonomian Kota 303
1. Pasar dalam Struktur Birokrasi 303
2. Penyelenggaraan Hari-Hari Pasar 306
3. Barang-Barang Perdagangan 309
4. Sistem Jual Beli Barang-Barang 316

C. Tempat Peribadatan dan Upacara 321
1. Tempat Peribadatan dan Fungsinya 321
2. Organisasi Tempat-Tempat Peribadatan 326
3. Upacara-Upacara 328

Bab VII Reaksi Kerajaan-Kerajaan Islam terhadap Penetrasi Barat 331

A. Situasi Kerajaan-Kerajaan dan Penetrasi Bangsa-Bangsa Eropa 331
1. Situasi dan Kondisi Kerajaan-Kerajaan Masa Kedatangan Orang-Orang Barat 331
2. Penetrasi Politik Barat 344

B. Reaksi dan Perang 351
1. Malaka dan Aceh Menghadapi Portugis dan Belanda 351
2. Maluku Menghadapi Portugis, Spanyol, dan Belanda 363

3. Banten dan Mataram Menghadapi Belanda 368
4. Banjar dan Gowa Menghadapi Belanda 382
C. Teknik Perang 391
1. Meluasnya Kekuasaan Belanda di Nusantara 391
2. Teknik Perang di Nusantara 399

Daftar Pustaka 407

Indeks 417

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Salah satu sisi nisan Sultan Malik as-Salih di Samudra Pasai tahun 1927 M di Kabupaten Aceh Utara 24

Gambar 2.2 Makam Sultan Nahrisah 1428 M di Samudra Pasai, Kabupaten Aceh Utara 25

Gambar 2.3 Mata uang dari Kerajaan Samudra Pasai, Kabupaten Aceh Utara 27

Gambar 2.4 Salah sebuah makam raja-raja Aceh, di Banda Aceh 29

Gambar 2.5 Armada Cornelis Matelief di depan Malaka (1606) 32

Gambar 2.6 Gunungan di bekas Taman Kesultanan Aceh, Banda Aceh 35

Gambar 2.7 Genta perunggu "Cakra Donya" dari kerajaan Aceh, Banda Aceh 36

Gambar 2.8 Sisa-Sisa Keraton Riau di Pulau Penyengat 41

Gambar 2.9 Masjid di Pulau Penyengat 42

Gambar 2.10 Makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 M di Gresik, Jawa Timur 51

Gambar 2.11 Menara Kudus dari abad ke-16 M

Gambar 2.12 Masjid Agung Kesepuhan di Cirebon abad ke-16 61

Gambar 2.13 Masjid Agung Kesepuhan di Cirebon aslinya abad ke-16 M

Gambar 2.14 Ukiran batu pada makam Sunan Gunung Jati 62

Gambar 2.15 Pedang dan baju jitah dari keraton Cirebon 63

Gambar 2.16 Sitinggil keraton di Cirebon 63

Gambar 2.17 Gua Sunyaragi Taman Peristirahatan Sultan di Cirebon abad ke-18 M 64

Gambar 2.18 Pintu gerbang keraton Kaibon Banten 66

Gambar 2.19 Meriam Ki Amok di Banten 69

Gambar 2.20 Masjid Agung di Banten 70

Gambar 2.21 Kompleks makam Sultan Hasanuddin abad ke-17 M di Tamalatte Goa, Sulawesi Selatan 81

Gambar 2.22 Nisan Kubur Khatib Dayan abad ke-16 di kompleks makam Sultan Suryan Syah di Kuin 3 Banjarmasin 87

Gambar 3.1 Jenis kapal kora-kora yang dipakai berperang oleh orang-orang Portugis untuk melawan musuh 102

Gambar 7.1 Wilayah-wilayah perdagangan di Samudra Hindia 332
Gambar 7.2 Benteng Victoria di Pulau Ambon 348
Gambar 7.3 Peta Sketsa Nusantara sebelum terbentuk perusahaan-perusahaan dagang Eropa 352
Gambar 7.4 Pada tanggal 7 September 1596 sekitar dua puluh perahu berawak masing-masing sekitar lima puluh orang menyerang kapal "Duifken" di teluk Banten 369
Gambar 7.5 Sebuah kapal Kompeni dari abad ke-17 393

Bab I
Situasi dan Kondisi Politik serta Kebudayaan Masa Kedatangan dan Penyebarannya

A. Situasi serta Kondisi Masa Kedatangan Islam

Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya mempunyai situasi politik dan sosial-budaya yang berlainan. Pada waktu kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya pada sekitar abad ke-7 dan ke-8, Selat Malaka sudah mulai dilalui oleh pedagang-pedagang muslim dalam pelayarannya ke negeri-negeri di Asia Tenggara dan Asia Timur. Berdasarkan berita Cina zaman T'ang, pada abad-abad tersebut diduga masyarakat muslim telah ada, baik di Kanfu (Kanton) maupun di daerah Sumatra sendiri.[1] Perkembangan pelayaran dan perdagangan yang bersifat internasional antara negeri-negeri di Asia bagian barat dan timur mungkin disebabkan oleh kegiatan kerajaan Islam di bawah Banu Umayyah di bagian barat maupun kerajaan Cina zaman dinasti T'ang di Asia Timur[2] serta kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara.

Usaha-usaha kerajaan Sriwijaya dalam meluaskan kekuasaannya ke daerah Semenanjung Malaka sampai Kedah dapat dihubungkan dengan bukti-bukti Prasasti Ligor 775, berita-berita Cina dan Arab abad ke-8 sampai ke-10.[3] Hal itu erat hubungannya dengan usaha penguasaan Selat Malaka yang merupakan kunci bagi pelayaran dan perdagangan internasional itu. Kedatangan orang-orang Islam di Asia Tenggara dan Asia Timur pada taraf permulaannya mungkin belum terasa akibat-akibatnya bagi kerajaan-kerajaan di negeri-negeri tersebut. Karena usaha-usaha mereka itu baru pada taraf menjelajahi masalah-masalah di bidang pelayaran dan perdagangan. Akan tetapi, pada abad ke-9 dengan terjadinya pemberontakan petani-petani Cina Selatan terhadap kekuasaan T'ang masa pemerintahan Kaisar Hi-Tsung (878–

---

1 W.P. Groeneveldt, *Historical Notes on Indonesia & Malaya Compiled from Chinese Sources*, Bhratara, 1960, hlm. 14: George Fadlo Houraini, *Arab Scafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early Medieval Times*, Princenton, New Jersey, University Press, 1951, hlm. 62

2 Houraini, *ibid.*, hlm. 61–62

3 *Ibid.*, hlm. 67–72, berita Arab antara lain dari Ibn Khurdadhbih (850 M), al Mas'ud (947 M), al Maqdin (985/986 M), Ibn al Faqih dan Ibn Rusteh (+ 903 M). Prasasti Ligor 775 lebih dijelaskan hubungan sejarahnya antara sisi A dan B oleh J. G. de Casparis dalam *Inscripties uit de Cailendra Tijd. Prasasti Indonesia I*, Djawatan Purbakala RI, 1950, hlm. 98–100

889) di mana orang-orang muslim turut serta, dan akibatnya banyak orang-orang muslim dibunuh, dan mereka mencari perlindungan ke Kedah, maka bagi orang-orang muslim berarti telah melakukan kegiatan-kegiatan politik pula. Kegiatan mereka jelas mempunyai akibat bagi kekuasaan T'ang dan Sriwijaya. Sriwijaya yang kekuasaannya ketika itu meliputi daerah Kedah, melindungi orang-orang muslim tersebut. Syed Naguib al-Attas mengatakan bahwa orang-orang muslim, yang diperkirakan sejak abad ke-7 telah memiliki perkampungan di Kanton, menunjukkan kegembiraannya menyaksikan derajat keagamaan yang tinggi dan otonomi pemerintahan; di mana mereka akan memelihara kelangsungan perkampungan serta organisasi masyarakatnya di Kedah dan di Palembang.[4]

Apabila kerajaan Sriwijaya dari abad ke-7 sampai abad ke-12 di bidang ekonomi dan politik masih menunjukkan kemajuannya, sejak akhir abad ke-12 mulai menunjukkan kemundurannya yang prosesnya terbukti pada abad ke-13. Tanda-tanda kemunduran Sriwijaya di bidang perdagangan mungkin kita dapat hubungan dengan berita Chou Ku-Fei tahun 1178, dalam *Ling-wai-tai-ta* yang menceritakan bahwa persediaan barang-barang perdagangan di Sriwijaya mahal-mahal, karena negeri itu tidak lagi menghasilkan banyak hasil alam. Dikatakan bahwa Cho-po (Jawa) lebih kaya daripada Sriwijaya dan yang kedua ialah Ta-shih.[5] Untuk mencegah kemunduran kerajaan Sriwijaya di bidang perdagangan yang mungkin ada pengaruhnya di bidang politik, kerajaan tersebut antara lain membuat peraturan cukai yang lebih berat lagi bagi kapal-kapal dagang yang singgah di pelabuhan-pelabuhannya. Apabila pedagang-pedagang asing itu berusaha menyingkiri pelabuhannya, di pelabuhan-pelabuhan lainnya mereka dipaksa berlabuh oleh penguasa-penguasa setempat. Dengan demikian, pedagang-pedagang asing yang tujuannya berlayar ke Cina mengalami rintangan-rintangan. Persediaan keperluan-keperluan untuk pelayaran dan perdagangan yang lebih jauh sudah diambil di pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai kerajaan Sriwijaya seperti tersebut di atas bukan mendatangkan hasil pendapatan yang lebih menguntungkan tetapi lebih merugikan, karena kapal-kapal dagang itu sering kali menyingkiri pelabuhan-pelabuhan, menembus blokadenya dan menuju tempat-tempat yang mereka ketahui banyak menghasilkan barang-barang dagangan.

---

4 Syed Naguib Al-Attas, *Preliminary Statement on A General Theory of the Islamisation the Malay-Indonesian Archipelago*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur, 1969, hlm. 11

5 B. Schrieke dalam *Indonesian Sociological Studies*, part one, The Hague, 1955, hlm. 15, mentafsirkan Ta-shih pada abad ke-12 M, ialah kekhalifahan Abbasiah; Rita R. Meglio, "Arab Tréde with Indonesia and the Malay Peninsula" (editor Richardo), 1970, hlm. 115, dalam catatannya no. 29 mengatakan bahwa akhir abad ke-7 istilah Ta-shih dipakai untuk menyebutkan orang-orang Arab, tetapi masa kemudian dipakai untuk menyebutkan seluruh kerajaan Abbasiah yang dalam suatu waktu meluas hingga istilah tersebut dipakai untuk menyebutkan orang-orang muslim umumnya

Kemunduran di bidang perdagangan serta politik kerajaan Sriwijaya itu dipercepat pula oleh usaha-usaha kerajaan Singasari di Jawa yang mulai mengadakan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275. Pengiriman area Amoghapaca sebagai perlambangan ayah raja Kertanegara sekitar tahun 1286, merupakan pengukuhan kekuasaannya terhadap kerajaan Melayu di Sumatra.[6] Pengaruh politik Kertanegara terhadap kerajaan Melayu itu sebenarnya suatu usaha mengecilkan politik dan perdagangan Sriwijaya yang semula menguasai kunci pelayaran dan perdagangan internasional, melalui Selat Malaka. Kecuali itu, mengecilkan kekuasaan politik dan perekonomian oleh kerajaan Jawa, bagi daerah-daerah, terutama bandar-bandar yang dikuasai Sriwijaya, merupakan kesempatan untuk menyatakan dirinya lepas dari kekuasaan kerajaan tersebut.

Sejalan dengan kelemahan yang dialami kerajaan Sriwijaya, pedagang-pedagang muslim yang mungkin disertai pula oleh mubalig-mubalignya lebih berkesempatan untuk mendapatkan keuntungan dagang dan keuntungan politik. Mereka menjadi pendukung daerah-daerah yang muncul; dan yang menyatakan dirinya sebagai kerajaan yang bercorak Islam ialah Samudra Pasai di pesisir timur laut Aceh, Kabupaten Lhok Seumawe atau Aceh Utara kini. Munculnya daerah tersebut sebagai kerajaan Islam yang pertama-tama di Indonesia diperkirakan mulai abad ke-13. Hal itu mungkin hasil islamisasi di daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang muslim sejak abad-abad ke-7, ke-8, dan seterusnya, seperti telah dikemukakan di atas. Daerah lainnya yang diperkirakan masyarakatnya sudah banyak yang memeluk agama Islam adalah Perlak, seperti kita ketahui dari berita Marco Polo yang singgah di daerah itu pada tahun 1292.[7]

Kerajaan Samudra Pasai makin berkembang baik di bidang politik maupun perdagangan dan pelayaran. Hubungan dengan Malaka makin ramai sehingga di tempat itu pun sejak abad ke-14 timbul masyarakat muslim. Perkembangan masyarakat muslim di Malaka makin lama makin meluas dan akhirnya pada awal abad ke-15 muncul suatu pusat kerajaan Islam. Perkembangan-perkembangan kerajaan Islam itu jelas berhubungan dengan keruntuhan Sriwijaya, yang dipercepat oleh pengaruh kekuasaan kerajaan Majapahit sejak pertengahan abad ke-14.

Kemunduran dan keruntuhan kekuasaan Sriwijaya itu kecuali akibat ekspansi politik Singasari-Majapahit, juga karena ekspansi Cina pada masa Kubilai Khan di abad ke-13 dan masa pemerintahan dinasti Ming abad ke-14–15, ke daerah Asia Tenggara. Pengaruh politik kerajaan Majapahit ke Samudra

---

6 N.J. Krom, *Hindoe-Javaansche Geschiedenis*, s' Gravenhage, Martinus Nyhoff, E.J. Brill, 1931, hlm. 335–337, dan 339

7 Paul Peliot, *Notes on Marco Polo, I*, Imprimerie Nationale Librairie Adrien Maisoneuve, Paris, 1959, hlm. 86; R.A. Kern, "De Verbreiding van den Islam", *Geschiedenis van Nederlandsch-Indie*, deel I, (Stapel) NV Uitgevers Maatschappij, Joost van den Vondel, Amsterdam, 1938, hlm. 310

Pasai dan Malaka setelah keruntuhan Sriwijaya itu mulai kurang, terutama setelah di pusat Majapahit sendiri timbul kekacauan-kekacauan politik akibat perebutan-perebutan kekuasaan di kalangan raja-raja. Dengan demikian, kerajaan-kerajaan yang jauh dari pengawasan pusat kerajaan Majapahit, seperti Samudra Pasai dan Malaka, berhasil mencapai puncak kekuasaannya hingga abad ke-16.

Berdasarkan berita Tomé Pires (1512–1515) dalam *Suma Oriental*-nya dapat kita ketahui bahwa daerah-daerah di bagian pesisir Sumatra Utara dan timur Selat Malaka yaitu dari Aceh sampai Palembang, sudah banyak terdapat masyarakat dan kerajaan-kerajaan Islam. Akan tetapi, kerajaan-kerajaan yang belum Islam banyak pula, yaitu antara Palembang dan ke Gamispola, dan di daerah-daerah pedalaman.[8] Islamisasi ke daerah-daerah pedalaman Aceh dan Sumatra Barat, terutama terjadi sejak Aceh melakukan ekspansi politiknya pada abad-abad ke-16–17.

Demikian situasi politik kerajaan-kerajaan di daerah Sumatra ketika pengaruh Islam datang ke daerah-daerah itu. Kedatangan Islam yang pertama ke Jawa tidak pula diketahui dengan pasti. Batu nisan kubur Fatimah binti Maimun di Leran (Gresik) yang berangka tahun 475 H (1082 M) mungkin merupakan bukti yang konkret bagi kedatangan Islam di Jawa.[9] Meskipun demikian, hal itu belum berarti adanya islamisasi yang meluas di daerah Jawa Timur.

Sejak akhir abad ke-11 sampai ke-13 baik bukti-bukti peninggalan kepurbakalaan maupun berita-berita asing tentang kedatangan Islam di Jawa Timur itu sangat sedikit. Sejak akhir abad ke-13 hingga abad-abad berikutnya, terutama ketika Majapahit mencapai puncak kebesarannya, bukti-bukti islamisasi dapat kita ketahui lebih banyak. Hal itu didasarkan atas penemuan beberapa puluh nisan kubur di Troloyo,[10] Trowulan, dan Gresik. Kecuali itu, berita Ma-huan tahun 1416 yang menceritakan orang-orang muslim yang bertempat tinggal di Gresik, membuktikan bahwa baik di pusat Majapahit maupun di pesisir, terutama di kota-kota pelabuhan, telah terjadi islamisasi dan terbentuknya masyarakat muslim.

Pertumbuhan masyarakat muslim di sekitar Majapahit dan terutama di beberapa kota pelabuhannya erat pula hubungannya dengan perkembangan pelayaran dan perdagangan yang dilakukan orang-orang muslim yang telah mempunyai kekuasaan ekonomi dan politik di Samudra Pasai dan Malaka. Pada taraf permulaan masuknya Islam di pesisir utara Jawa terutama di daerah

---

8 Armando Cortesao, *The Suma Oriental of Tomé Pires*, Vol. I, London Reprinted for the Hakluyt, 1944, hlm. 137

9 J.P. Moquette, "Mohammedaansche inscriptie of Java n.m. de Grafsteen to Leren", *Handelingen Eerste Congress v.d. T.L. en Volkenkunde van Java*, Weltevreden, 1921, hlm. 391–399

10 L.Ch. Damais, "Etudes Javanaises, I, Les Tombes Musulmans datees de Tralaja", *BEFEO*, KLVII, fasc. 2, Paris, 1957, hlm. 353, 415

kekuasaan Majapahit, mungkin belum dapat dirasakan akibatnya di bidang politik oleh kerajaan Indonesia–Hindu itu. Kedua belah pihak waktu itu mungkin mementingkan usaha untuk memperoleh keuntungan dagang. Islamisasi hingga mencapai bentuk kekuasaan politik seperti munculnya Demak, dipercepat oleh karena kelemahan-kelemahan yang dialami pusat kerajaan Majapahit sendiri, akibat pemberontakan serta perang perebutan kekuasaan di kalangan keluarga raja-raja.

Sebenarnya sejak Jayanegara menggantikan Kertarajasa, telah terjadi serentetan pemberontakan. Pemberontakan Ranggalawe di Tuban tahun 1295, kemudian Sadeng dan Keta yang baru berhasil ditumpas pada tahun 1331, berkat usaha Gajah Mada, memberikan peluang bagi proses kedatangan Islam dan perkembangan masyarakat muslim di pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai Majapahit. Ketika Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Mada masih berkuasa, situasi politik pusat kerajaan Majapahit boleh dikatakan tenang sehingga banyak daerah di kepulauan Nusantara mengakui berada di bawah perlindungannya. Akan tetapi, sejak kedua tokoh tersebut wafat, Hayam Wuruk pada tahun 1389 dan Gajah Mada tahun 1364, situasi politik Majapahit kembali menunjukkan keguncangan, kelemahan-kelemahan yang makin lama makin memuncak mengakibatkan keruntuhannya.

Pergantian Hayam Wuruk oleh Wikramawhardana karena pertalian perkawinan dengan putri mahkota Kusumawhardani menimbulkan ketidaksenangan bagi Bhre Wirabumi. Perasaan tidak senang Bhre Wirabumi itu lebih nyata setelah putra mahkota dari Kusumawhardani meninggal tahun 1399. Bhre Wirabumi merasa lebih berhak atas takhta kerajaan Majapahit daripada putra-putra Wikramawhardana yang bukan dari Kusumawhardani. Faktor inilah yang mungkin menjadi sumber perpecahan terutama antara Wikramawhardana dengan Bhre Wirabumi. *Pararaton* yang menceritakan bahwa pada tahun 1400 Kusumawhardani menjadi prabu mungkin dapat dianggap sebagai balasan terhadap tuntutan yang dinyatakan Bhre Wirabumi.[11]

Setelah Bhre Wirabumi wafat, kelihatannya daerah kesatuan Majapahit itu telah pulih kembali. Akan tetapi, kenyataannya tidak demikian, karena segera timbul lagi perpecahan di kalangan keluarga raja-raja yang menyebabkan perang dan akhirnya menyebabkan keruntuhan pusat kerajaan Majapahit. Kertajaya mencoba mencegah keruntuhan daerah-daerah Majapahit itu dengan cara memberikan Kadiri kepada Bhre Daha VIII dan Kahuripan kepada suaminya, yaitu Rajasawardhana.[12] Akan tetapi, setelah Kertajaya wafat pada tahun 1451, kekacauan politik itu timbul lagi.

Bhre Pamotan yang bergelar Rajasawardhana atau Sinagara berusaha memegang pemerintahan antara tahun 1451–1453, tetapi tidak berhasil,

---

11 B. Schrieke, part two, 1957, *op. cit.*, hlm. 40–41
12 *Ibid.*, hlm. 65

karena pada tahun 1453 beliau wafat dalam peperangan. Selama tiga tahun, sejak tahun 1453, keadaan kacau dan tidak ada yang memegang pemerintahan. Kekacauan politik yang berkecamuk pada tahun 1466 itu mengakibatkan Bhre Wengker atau Bhre Hyang Purwawisesa wafat. Oleh karena itu, pada tahun 1468 pusat kerajaan Majapahit diserang oleh Girindrawardhana Bhatara ring Dhahanapura. Ia berhasil menyingkirkan kemenakannya, yaitu Singhawikramawardhana atau yang disebut pula Pandan Salas putra Bhre Wengker, dari keraton Majapahit. Namun, tidak lama kemudian Girindrawardhana wafat di keraton Majapahit pada tahun 1474. Putranya, yakni Girindrawardana, yang disebut pada prasasti tahun 1486 dengan nama Ranawijaya, menyebutkan dirinya pula Sri Wilwatikta Daha Janggala Kadiri yang berarti raja Majapahit–Daha–Kadiri. Tradisi menempatkan keruntuhan Majapahit itu pada tahun 1478. Setelah itu, Sengguruh juga terpaksa tunduk kepada kekuasaan muslim. Akan tetapi, setelah kemenangan tahun 1168, yaitu satu kali penyerangan keraton Majapahit itu tidak pernah dianggap lagi sebagai pusat pemerintahan yang tetap.[13]

Dari uraian di atas jelaslah bahwa keruntuhan pusat Majapahit bukan oleh muslim semata-mata, melainkan oleh dinasti Girindrawardhana dari Kadiri, karena Tomé Pires (1512–1515) sama sekali tidak lagi menyebut-nyebut nama Majapahit. Hal ini berarti pula bahwa pada waktu Tomé Pires datang, kerajaan tidak lagi disebut Majapahit dan pusatnya tidak lagi di Trowulan, tetapi sangat besar kemungkinannya di Daha atau Kadiri. Hal ini jelas disebutkan oleh Tomé Pires bahwa Dayo (Daha) adalah ibu kota kerajaan berhala (Hindu) yang letaknya dapat dicapai dengan berjalan kaki yang kuat selama dua hari dari Tuban.[14]

Sangat menarik perhatian bahwa Tomé Pires menceritakan tentang masih adanya kerajaan-kerajaan yang bercorak Indonesia-Hindu, baik di daerah pedalaman Jawa Timur maupun di Jawa Barat, di samping sudah adanya kerajaan yang bercorak Islam di Demak dan daerah-daerah lainnya di pesisir utara Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai Jawa Barat. Tomé Pires menyebutkan raja Daha ialah Vigiaya dan "kapten utama" mungkin patihnya. Patih Gusti Pate, yang lebih berkuasa daripada rajanya dalam menjalankan pemerintahan. H.J. de Graaf menduga bahwa yang dimaksud dengan Batara Vigiaya itu adalah Bra Wijaya yang namanya terkenal dalam babad-babad,[15] dan yang lebih kurang setengah abad sebelumnya telah meninggalkan Majapahit sebagai pusat pemerintahannya dan pindah ke Daha atau ke Kadiri. Karenanya mungkin keraton Indonesia-Hindu yang besar di Kadiri itu telah jatuh dari

13 *Ibid.*, hlm. 69

14 H.J. de Graaf, 'Tomé Pires, Suma Oriental, en het Tijd–perk van Godsdiensto vergang op Java", *BKI*, 108, 1952, hlm. 140–141: Armando Cortesao, *op. cit*, hlm. 190

15 *Ibid.*, hlm. 141, 170–171

tangan raja Bra Wijaya kepada orang muslim pada tahun 1526).[16] Meskipun kerajaan Indonesia-Hindu yang berpusat di Kadiri, sekitar tahun 1526, sudah tumbang, kerajaan-kerajaan kecil seperti Pasuruan, Panarukan dengan pusat kerajaan Balambangan, belumlah bercorak Islam. Pasuruan tunduk kepada kekuasaan Islam sejak tahun 1546, yaitu waktu diserang Demak di bawah pimpinan Trenggono. Balambangan senantiasa diinginkan bukan oleh Susuhunan Mataram saja melainkan juga oleh Pasuruan yang terdekat.

Karena ancaman-ancaman dari kekuasaan Islam itu, Balambangan mencari kekuatan dari luar, yaitu dari Portugis yang menguntungkan kedua belah pihak. Portugis yang berkedudukan di Malaka sejak tahun 1511 memerlukan hasil-hasil produksi Balambangan, yang sebagian dapat mengisi barang-barang keperluan hidupnya dan perdagangan kota Malaka. Kecuali itu, persekutuan itu dapat memperkuat kedua belah pihak terhadap kekuatan-kekuatan kerajaan Islam. Raja Balambangan mengundang pendeta-pendeta Kristen ke negerinya bukanlah karena ia tertarik dan menginginkan perubahan agama, melainkan karena dengan adanya para misionaris tersebut, ia dapat pula mendatangkan tentara Portugis serta persenjataannya.[17] Kerajaan Balambangan dapat bertahan sampai pada masa serangan-serangan Sultan Agung dan Amangkurat pada abad ke-17.

Dari berita Tomé Pires dan babad-babad kita ketahui bahwa sejak Demak berdiri sebagai kerajaan dengan Pate Rodim (Sr) dengan Raden Patah sebagai rajanya, daerah Jawa Barat pesisir utara terutama Cirebon telah ada di bawah pengaruh Islam dari Cirebon. Jika didasarkan pada berita Tomé Pires, hal itu sudah ada sejak lebih kurang 1470–1475 M.[18] Kemudian Dipati Unus dari Jepara menguatkan kedudukan pengaruhnya di pesisir utara Jawa Barat, sebagaimana yang diberitakan oleh de Barros, bahwa Dipati Unus juga menjadi raja di Sunda.[19]

Bahwa kerajaan Demak menempatkan pengaruhnya di pesisir utara Jawa Barat, hal ini tidak dapat dipisahkan dari tujuannya yang bersifat politis dan ekonomis. *Politis*, dengan memutuskan hubungan kerajaan Pajajaran yang masih berkuasa di daerah pedalaman, dengan Portugis di Malaka. Dari sudut *ekonomi*, pelabuhan-pelabuhan Sunda, seperti Cirebon, Kalapa, dan Banten mempunyai potensi besar dalam mengekspor hasil buminya, terutama lada yang juga diambil dari daerah Lampung. Kalau Balambangan berhubungan dengan Portugis, kerajaan Sunda Pajajaran pun demikian. Hal ini ternyata dari perjanjiannya dengan Portugis pada tanggal 21 Agustus 1522. Akan tetapi, usaha-usaha Pajajaran segera dipatahkan oleh Faletehan atau Fatahillah atau Fadhillah Khan seorang yang berasal dari Pasai, yang

16 *Ibid.*, hlm. 141, 170–171
17 Fr. Achilles Meersman O.F.M., *The Franciscan in the Indonesian Archipelago 1300–1775*, Belgium, 1967
18 H.J. de Graaf, *op. cit.*, hlm. 153
19 R.A. Kern, "Pati Unus en Sunda", *BKI*, 1952, hlm. 124–131

mendapat perintah dari raja Demak dan Sunan Gunung Jati untuk merebut Sunda Kelapa pada sekitar tahun 1527.[20]

Banten merupakan pelabuhan yang penting jika dilihat dari sudut geografi dan ekonomi karena letaknya yang strategis dalam penguasaan Selat Sunda, yang juga menjadi mata rantai dalam pelayaran dan perdagangan melalui lautan Indonesia di bagian selatan dan barat Sumatra. Keberadaan Banten lebih dirasakan terutama waktu Selat Malaka berada di bawah pengawasan politik Portugis di Malaka.

Meskipun sejak tahun 1526/1527 pelabuhan-pelabuhan Pajajaran sudah ada di tangan kaum muslim, pedalaman masih bertahan dengan sepintas kembali di atas. Akan tetapi, akhirnya pusat kerajaan Pajajaran jatuh pada sekitar tahun 1579/1580, karena serangan kerajaan Banten di bawah pimpinan Maulana Yusuf.[21]

Jika kita tinjau kembali uraian-uraian di atas, jelaslah bahwa kedatangan dan penyebaran Islam di Pulau Jawa mempunyai aspek-aspek ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Sebagaimana telah dikatakan, bahwa situasi dan kondisi politik di Majapahit yang lemah karena perpecahan dan perang di kalangan keluarga raja-raja dalam perebutan kekuasaan, kedatangan, dan penyebaran Islam makin dipercepat. Bupati-bupati pesisir merasa bebas dari pengaruh kekuasaan raja-raja Majapahit. Mereka makin lama makin yakin akan kekuasaannya sendiri di bidang ekonomi daerah-daerahnya. Daerah pesisir merasa makin lama makin merdeka justru oleh karena kelemahan pendukung-pendukung kerajaan yang sedang mengalami keruntuhan. Perjuangan antara kota-kota perdagangan di pesisir dengan daerah-daerah agraris di pedalaman sedang dimulai. Perkembangan ekonomi dan politik mempunyai tujuannya sendiri, dan melalui bupati-bupati pesisir yang memeluk agama Islam, agama menjadi kekuatan baru dalam proses perkembangan masyarakat.[22] Dalam hubungan ini, J.C. van Leur berpendapat bahwa pertentangan antara keluarga bangsawan dengan kekuasaan pusat Majapahit serta aspirasi-aspirasi keluarga bangsawan untuk berkuasa sendiri atas negara, maka islamisasi menjadi alat politik.[23] Kedatangan pengaruh Islam ke Indonesia bagian timur, yaitu ke daerah Maluku tidak dapat dipisahkan dari jalur perdagangan yang terbentang antara pusat lalu lintas pelayaran internasional di Malaka, Jawa, dan Maluku. Menurut tradisi setempat, sejak abad ke-14, Islam datang di daerah

---

20 R.A. Hoesein Djajadiningrat menyamakan Faletehan dengan Sunan Gunung Jati dan yang sama pula dengan Tagaril, Syarif Hidayatullah, Makdum Jati; Mazkurullah, Fatahillah (*Critische Beschouwing van de Sedjarah Banten Bijdrage ter kentschetsing van de Javaansche Gescheidschrijving*), (Diss), Haarlem Joh. Enschede en Zonen, 1913, hlm. 76, 87: R.A. Hoesein Djajadiningrat, De Naam van den eersten Mohammedaanschen vorst in West Java, *TBG*, LXXIII, 1933, hlm. 401–404; Dalam naskah *Purwaka Coruban Nagari* nama Fathillahkhan dapat disamakan dengan Faletehan menurut berita Portugis.

21 *Ibid.*, hlm. 90

22 B. Schrieke, part one, *op. cit.*, hlm. 27–28

23 J.C. van Leur, *Indonesian Trade and Society*, The Hague, Bandung, 1955, hlm. 113

Maluku; Raja Ternate yang kedua belas, Molomateya, (1350–1357) bersahabat karib dengan orang Arab yang memberinya petunjuk dalam pembuatan kapal-kapal, tetapi agaknya bukan dalam kepercayaan.[24]

Pada masa pemerintahan Marhum di Ternate datanglah seorang raja dari Jawa bernama Maulana Husayn yang menunjukkan kemahiran menulis huruf Arab yang ajaib seperti di dalam Alquran dan hal ini sangat menarik hati Marhum dan orang-orang di Maluku. Kemudian ia diminta oleh mereka agar mau mengajarkan huruf-huruf yang indah itu. Sebaliknya permintaan Maulana adalah agar mereka tidak hanya mempelajari huruf Arab, tetapi mereka juga diharuskan mempelajari agama Islam. Demikianlah Maulana Husayn berhasil mengislamkan banyak orang-orang di daerah itu.

Raja Ternate yang dianggap benar-benar memeluk agama Islam adalah Zainal Abidin (1486–1500). Ia mendapat ajaran agama tersebut dari madrasah Giri, mungkin dari Prabu Satmata. Di Jawa, Zainal Abidin terkenal sebagai Raja Bulawa, artinya raja cengkih, karena ia membawa cengkih dari Maluku sebagai persembahan. Sekembalinya dari Jawa, Zainal Abidin membawa mubalig yang bernama Tuhubahalul. Menurut *Hikayat Tanah Hitu* yang ditulis oleh Rijali, yang mengantar raja Zainal Abidin ke Giri adalah Perdana Jamilu dari Hitu.[25] Hubungan Ternate, Hitu dengan Giri di Jawa Timur pada masa itu erat sekali.

Hubungan perdagangan antara daerah Maluku dengan Jawa dan Maluku telah diberitakan oleh Tomé Pires dan Antonio Galvao. Kedua orang Portugis itu menceritakan pula tentang perkiraan masuknya Islam ke daerah itu. Tomé Pires mengatakan bahwa kapal-kapal dagang dari Gresik adalah milik Pate Cucuf. Raja Ternate yang sudah memeluk agama Islam bernama Sultan Bem Acorala dan hanya raja Ternate yang disebut sultan sedangkan lain-lainnya digelari raja. Dikatakan bahwa ia sedang berperang dengan mertuanya yang menjadi raja Tidore, yaitu Raja Almancor.

Di Banda, Hitu, Maluku, Makyan, dan Bacan sudah terdapat masyarakat muslim. Di daerah Maluku itu raja yang mula-mula memeluk Islam dikatakan Tomé Pires sejak kira-kira 50 tahun yang lalu, hal ini berarti antara 1460–1465. Tahun tersebut boleh dikatakan sama dengan berita Antonio Galvao yang mengatakan bahwa Islam di daerah ini dimulai 80 atau 90 tahun yang lalu, yang kalau dihitung dari waktu Galvao di sana sekitar tahun 1540–1545 menjadi 1460–1465 M.[26]

Hubungan antara Maluku dan Giri seperti telah disebut di atas terus berlangsung sampai abad ke-18. Hal itu ternyata dari surat raja-pendeta Giri

---

24 H.J. de Graaf, *Cambridge History of Islam*, 1970, hlm. 135

25 *Ibid.*, hlm. 136

26 Hubert Th. Th. M. Jacobs S.J., *Source and Studies for the History of the Jesuits*, Vol. III," A Treatise on the Moluccas (C. 1544)", Probably the preliminary verston of Antonius Galvao last historia and Moluccas, edited from the Portuguese manuscript on the Archivo General de Indie Sevilla, Italy, 1970; 1971, hlm. 83, 85, catatan 14; Armando Coetesao, *op. cit.*, hlm. 312

yang diterima oleh orang-orang Hitu dengan bangga. Peci dari Giri yang diberikan kepada masyarakat Hitu dianggap magis dan sangat dihormati serta ditukar dengan rempah-rempah terutama cengkih. Kemudian untuk waktu yang lama anak-anak orang terkemuka meneruskan dan menerima petunjuk-petunjuk dari madrasah (pesantren) Giri. Jadi, pada masa itu ikatan politik dan ekonomi antara Maluku dengan Jawa terus hidup. Demak dengan Japara merupakan sekutu Hitu dalam memerangi Portugis di Leitimor dan Ambon dalam memperkenalkan agama Kristen.[27]

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa situasi politik di kepulauan Maluku ketika pengaruh Islam datang, tidak seperti di Jawa. Di sana orang-orang muslim tidak menghadapi kerajaan-kerajaan yang sedang mengalami perpecahan karena perebutan kekuasaan. Mereka datang dan menyebarkan agama Islam melalui perdagangan dakwah dan perkawinan. Waktu Tomé Pires dan Galvao datang ke daerah itu masih banyak penduduk yang belum menganut agama Islam. Mereka menganut kepercayaan nenek moyangnya dan hidup dalam kelompok-kelompok masyarakat yang dipimpin oleh ketua-ketua kampung. Menurut Antonio Galvao sering terjadi perkelahian antara suku-suku itu. Pada waktu Galvao di Maluku, ia pernah menghadapi persaingan antara raja-raja muslim, yaitu Ternate dan Tidore. Perluasan kerajaan Islam di Maluku terjadi pada masa pemerintahan Sultan Khairun. Dalam islamisasi itu Maluku menghadapi persaingan politik dan monopoli perdagangan di antara orang-orang Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Persaingan di antara pedagang-pedagang asing itu juga menyebabkan persaingan antara kerajaan-kerajaan Islam sendiri sehingga akhirnya daerah Maluku jatuh ke tangan kekuasaan politik dan ekonomi Kompeni Belanda.

Situasi politik di daerah Kalimantan Selatan menjelang masa kedatangan Islam dapat kita ketahui dari *Hikayat Banjar*. Kerajaan yang bercorak Indonesia-Hindu di Kalimantan menjelang kedatangan Islam berpusat di Nagara Dipa. Daha dan Kahuripan terletak di hulu Sungai Nagara, di daerah Amuntai kini. Kerajaan tersebut sudah mempunyai hubungan dengan kerajaan Majapahit semasa pemerintahan Suryanata, karena perkawinannya dengan putri Jungjung Buih. Kitab *Nagarakertagama* telah menyebut-nyebut pengaruh kekuasaan Majapahit di daerah-daerah sepanjang Sungai Nagara dan Batang Tabalung, Barito, dan sebagainya.[28]

Menjelang kedatangan Islam ke daerah itu kerajaan yang disebut Nagara Daha, diperintah Maharaja Sukarama. Setelah meninggal, ia digantikan oleh

---

27 H.J. de Graaf, "South-East Asian Islam To The Eighteenth Century", *Cambridge History of Islam*, 1970, hlm. 136–137; B. Schrieke, part two, *op. cit.*, hlm. 33–35

28 Th. Pigeaud, *Java in the 14th Century: A Study in Cultural History: The Nagara Kertagama by Rakawi Prapanca of Majapahit, 1365 AD* Vol. III, The Hague, 1960, hlm. 16, Canto 14, Stanza 1

Pangeran Tumenggung, tetapi beberapa tahun kemudian timbul perpecahan dengan Raden Samudra, cucu Maharaja Sukarama yang lebih berhak atas takhta kerajaan. Raden Samudra sejak kecil mengasingkan diri dan setelah dewasa ia dinobatkan sebagai Raja Banjar oleh Patih Masih, Balit, Muhur, Kuwin, dan Balitung. Kerajaan Banjar di daerah pantai dengan Nagara Daha di hulu sungai kemudian berperang. Hikayat Banjar selanjutnya menceritakan bahwa Pangeran Samudra minta bantuan Raja Demak, dengan perjanjian untuk menganut agama Islam beserta rakyatnya. Dengan bantuan tentara Demak, kerajaan Nagara Daha dikalahkan dan Pangeran Tumenggung tunduk kepada Raden Samudra. Sejak itulah kerajaan Banjar mengalami perkembangan dan daerah-daerah lainnya tunduk kepada Banjar. Dikatakan pula bahwa orang yang mengajarkan agama Islam kepada Raden Samudra dan patih-patihnya adalah Panghulu Demak. Setelah masuk Islam, Raden Samudra mendapat gelar baru, yaitu Sultan Suryanullah, yang diberikan seorang Arab. Menurut A.A. Cense, islamisasi di daerah Banjarmasin itu terjadi kira-kira tahun 1550.[29]

Dari uraian di atas kita lihat bahwa situasi politik di Jawa Timur mengakibatkan proses islamisasi berlangsung dipercepat karena di kalangan keluarga raja-raja terjadi perpecahan dalam perebutan kekuasaan. Bagi Demak, pemberian bantuan tentara kepada kerajaan Banjar juga merupakan usaha perluasan pengaruhnya. Banjarmasin dianggap penting sebagai sekutu untuk membendung ekspansi Portugis yang sedang berusaha membuat mata rantai di daerah-daerah antara Malaka dan Maluku.

Di Kalimantan Timur keadaan politik ketika pengaruh Islam datang agak berbeda dengan di Kalimantan Selatan. *Hikayat Kutai* tidak menyebut adanya perpecahan di lingkungan keluarga raja karena perebutan kekuasaan. Sebelum kedatangan Islam, kerajaan Kutai bercorak Indonesia–Hindu, sedang di pedalaman kebanyakan penduduk masih menganut animisme dan dinamisme. Di dalam hikayat itu diceritakan mengenai hubungan-hubungan dengan Majapahit, dan hal ini diperkuat oleh berita dalam *Nagarakertagama*.[30]

Pada masa pemerintahan Raja Mahkota datanglah dua orang muslim, masing-masing bernama Tuan di Bandang dan Tunggang Parangan. Kedua mubalig itu datang ke Kutai setelah orang-orang Makassar masuk Islam, tetapi beberapa waktu kemudian keluar lagi dari Islam. Karena itu, Tuan di Bandang kembali ke Makassar, sedang Tuan Tunggang Parangan menetap di Kutai. Raja Mahkota masuk Islam setelah ia merasa kalah dalam kesaktiannya.[31]

Islamisasi di Kutai dan daerah sekitarnya diperkirakan terjadi pada sekitar tahun 1575.[32] Penyebaran lebih jauh ke daerah-daerah pedalaman

---

29 A.A. Cense, *De Kroniek van Bandjarmasin*, (Diss.), Leiden, 1928, hlm. 107, 109

30 Th. Pigeaud, *op. cit.*, III, hlm. 16, Canto 14 stanza 1 baris 2, 3 ; C.A. Mees, *De Kroniek van Koetai*, Disertasi, Leiden, 1935, hlm. 90–93

31 *Ibid.*, hlm. 54–55, 99–101

32 *Ibid.*, hlm. 100, teks hikayat: hlm. 241–244

terjadi terutama pada waktu putranya, yaitu Aji di Langgar dan penggantipenggantinya, meneruskan perang ke daerah Muara Kaman.

Sulawesi, terutama bagian selatan, sejak abad ke-15 sudah didatangi pedagang muslim, mungkin dari Malaka, Jawa, dan Sumatra. Pada awal abad ke-16 di Sulawesi banyak sekali kerajaan, menurut Tomé Pires lebih kurang 50 jumlahnya, yang penduduknya masih menganut berhala.[33] Di antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi yang terkenal ialah Gowa-Tallo, Bone, Wajo, Soppeng, dan Luwu. Pada abad ke-16 di daerah Gowa telah terdapat masyarakat muslim dan orang-orang Portugis yang juga telah melakukan hubungan dagang dengan Gowa. Hubungan dagang dengan Portugis itu bahkan lebih berkembang setelah islamisasi.[34] Meskipun raja-raja di Gowa dan Tallo telah memeluk agama Islam secara resmi pada tanggal 22 September 1605,[35] ternyata pada masa-masa berikutnya hubungan dengan orang-orang Portugis itu tetap erat dan agama Kristen Katolik yang dianut orang-orang Portugis tidak menjadi halangan. Sultan Gowa, Muhammad Said (14 Juni 1639–16 November 1653) dan putra yang menggantikannya, Hasanuddin (16 November 1653–29 Agustus 1669), memberikan bantuan kepada orang-orang Portugis pada umumnya, dan kepada Francisco Viera pada khususnya yang pernah menjadi utusan raja Gowa ke Banten dan Batavia. Bahkan, Sultan Muhammad Said, Karaeng Pattingaloang turut memberikan saham dalam perdagangan yang dilakukan Fr. Vieira itu.[36]

Menurut C.R. Boxer, hubungan erat orang-orang muslim di Makassar dengan orang-orang Portugis yang beragama Katolik karena adanya ancaman perluasan kekuasaan Kompeni Belanda di perairan Indonesia dan terutama, karena tidak disenanginya usaha-usaha Belanda untuk mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah dari Maluku.[37]

Islamisasi di daerah Sulawesi Selatan kita ketahui dari hikayat-hikayat Gowa– Tallo dan Wajo. Islamisasi pada taraf pertama di daerah kerajaan Gowa dilakukan pula dengan cara damai. Hal itu kita ketahui dari hikayat setempat yang antara lain menceritakan bagaimana cara-cara yang ditempuh oleh mubalig Dato' ri Bandan dan Dato' Sulaemana dalam memberikan ajaran Islam kepada masyarakat dan raja-rajanya. Nama Dato'ri Bandang telah kita ketahui pula dari *Hikayat Kutai* yang mengatakan bahwa orang alim itu telah ke Kutai bersama-sama Tuan Tunggang Parangan, tetapi ia kembali lagi ke Makassar. Menurut cerita Bugis dan Makassar Dato' ri Bandang berasal dari Minangkabau, sedang menurut cerita Jawa ia adalah murid Sunan Giri.[38]

---

33 Armando Cortesao, *op. cit.*, hlm. 226

34 C.R. Boxer, Francisco Viera de Figueiredo: "A Portuguese Merchant Adventurer in South East Asia, 1624–1667," *VKI*, 52, 1967, hlm. 3

35 J. Noorduyn, "De Islamisering van Makassar", *BKI*, 1956, hlm. 247

36 C.R. Boxer, *op. cit.*, hlm. 4–8

37 *Ibid.*, hlm. 3–4

38 J. Noorduyn, *Een Achttiende-Eeuwse Kroniek van Wadjo*, (Dis.), Leiden, 1955, hlm. 99–103, catatan 12

Setelah secara resmi merupakan kerajaan bercorak Islam, Gowa melakukan perang terhadap Soppeng, Wajo, dan akhirnya terhadap Bone. Kerajaan-kerajaan tersebut secara resmi masuk Islam. Wajo pada tanggal 10 Mei 1610 dan Bone pada tanggal 23 November 1611.[39]

J. Noorduyn berpendapat bahwa perang Islam tersebut pada satu pihak sesuai dengan pola dan penyesuaiannya dalam serangkaian perang-perang Gowa untuk mendapatkan kekuasaan di seluruh Sulawesi Selatan. Pada pihak lain, Islam memberi motif dan tujuan bagi penyerangan-penyerangan itu. Harkat agama yang baru mendorong keruntuhan yang cepat dari kerajaan-kerajaan takluk Gowa dan negeri-negeri yang memusuhi Gowa, dan membawa Gowa kepada kekuasaan dengan cepat dan pasti daripada sebelumnya.[40]

Pada umumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kedatangan Islam dan cara menyebarkannya kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya, adalah dengan cara damai, melalui perdagangan dan dakwah oleh mubalig-mubalig atau orang-orang alim. Kemudian apabila situasi politik di kerajaan-kerajaan itu mengalami kekacauan, dan kelemahan disebabkan perebutan kekuasaan di kalangan keluarga raja-raja, agama Islam dijadikan alat politik bagi golongan bangsawan atau raja-raja yang menghendaki kekuasaan itu. Mereka berhubungan dengan pedagang-pedagang muslim yang posisi ekonominya kuat karena penguasaan pelayaran di lautan dan perdagangan. Apabila telah terwujud kerajaan Islam, barulah mereka melancarkan perang terhadap kerajaan bukan Islam. Hal itu bukan semata-mata karena masalah agamanya, melainkan karena dorongan politik untuk menguasai kerajaan-kerajaan di sekitarnya, misalnya Gowa terhadap kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, Demak, dan Banten terhadap kerajaan Jawa–Hindu.

Agama pada mulanya dipergunakan untuk memperkuat diri dalam menghadapi pihak-pihak atau kerajaan-kerajaan yang bukan Islam, terutama yang mengancam kehidupan politik maupun ekonomi. Salah satu contoh adalah persekutuan kerajaan-kerajaan Islam dalam menghadapi Portugis, Kompeni Belanda, dan kekuatan-kekuatan lain, yang berusaha memonopoli pelayaran dan perdagangan yang dapat merugikan kerajaan Islam itu. Perluasan kekuasaan politik Portugis dan Kompeni Belanda, pada abad-abad kedatangannya ke Indonesia, biasanya disertai pula dengan penyebaran agama Kristen. Meskipun demikian, kalau kepentingan politik dan ekonomi antarkerajaan-kerajaan Islam itu sendiri terancam, persamaan agama tidak menjamin bahwa permusuhan tidak terjadi. Pernah terjadi perang antarkerajaan-kerajaan Islam itu sendiri: Pajang terhadap Demak, Aceh terhadap Aru, Banten

39 *Ibid.*, hlm. 98
40 *Ibid.*, hlm. 98

terhadap Palembang, Ternate terhadap Tidore, dan Gowa terhadap Bone. Contoh lain adalah kebijakan raja-raja Gowa dalam memberikan keleluasaan bagi orang-orang Portugis untuk menganut agama Katolik di pusat kerajaannya. Bahkan, Gowa menjalin persahabatan dengan kerajaan Portugis justru karena adanya kepentingan bersama di bidang politik dan ekonomi yang terancam oleh politik monopoli Kompeni Belanda.

B. Situasi Sosial–Budaya Masa Kedatangan Islam

Pada masa kedatangan dan penyebaran Islam di Indonesia terdapat aneka ragam suku bangsa, organisasi pemerintahan, struktur ekonomi, dan sosial-budaya. Suku bangsa Indonesia yang bertempat tinggal di daerah-daerah pedalaman, dilihat dari sudut antropologi budaya, belum banyak mengalami percampuran jenis-jenis bangsa dan budaya dari luar, seperti India, Persia, Arab, dan Eropa. Struktur sosial, ekonomi, dan budayanya agak statis dibandingkan dengan suku bangsa yang mendiami daerah pesisir. Mereka yang berdiam di pesisir lebih-lebih di kota-kota pelabuhan, menunjukkan ciri-ciri fisik dan sosial budaya yang lebih berkembang yang disebabkan percampuran dengan bangsa dan budaya dari luar. Kita telah mengetahui bahwa dalam masa kedatangan dan penyebaran Islam, di Indonesia terdapat negara-negara yang bercorak Indonesia–Hindu. Di Sumatra terdapat kerajaan Sriwijaya dan Melayu, di Jawa terdapat Majapahit dan Sunda-Pajajaran, di Kalimantan terdapat kerajaan Negara–Daha dan Kutai. Di Bali, kerajaan yang bercorak Hindu itu masih terus sampai abad ke-20. Pada waktu itu di beberapa daerah lainnya masih terdapat banyak kerajaan yang sedikit atau sama sekali tidak mendapat pengaruh dari kerajaan-kerajaan Hindu tersebut di atas. Kerajaan-kerajaan semacam itu di Sulawesi ialah Gowa, Wajo, Bone, dan lain-lainnya. Seperti diberitakan oleh Tomé Pires (1512–1515), di sana terdapat lebih kurang 50 kerajaan yang subur, tetapi masih berhala.[41]

Kerajaan-kerajaan di Sulawesi tersebut tidak menunjukkan pengaruh India atau Indonesia–Hindu, hal ini terlihat dari struktur birokrasi pemerintahannya yang merupakan federasi *limpo-limpo* di bawah pimpinan Arungmatoa yang biasanya dipilih dari *arung-arung*, dan sistem pemerintahannya mengenal unsur-unsur demokrasi. Contoh untuk struktur birokrasi dan sistem pemerintahan demikian ialah kerajaan Wajo.[42] Cara-cara penguburan pada masyarakat kerajaan di Gowa pada umumnya berdasarkan tradisi masa prasejarah, yaitu dikubur arah timur-barat dengan bekal kubur, seperti mangkuk, cepuk, tempayan buatan setempat, dan barang-barang impor

41 Armando Cortesao, *op. cit.*, hlm. 226
42 J. Noorduyn, *op. cit.*, hlm. 53, 310

dari Cina, Annam, dan lain-lainnya. Demikian pula ada kebiasaan untuk memberi penutup mata dari emas atau kedok bagi jenazah bangsawan atau orang terkemuka. Bukti cara penguburan tersebut diperoleh dari penggalian-penggalian kepurbakalaan di daerah Takalar dan Pangkajene Kepulauan. Dilihat dari usia keramik, maka usia kerangka manusia diperkirakan berasal dari abad ke-14, 15, 16, bahkan 17.[43]

Dari berita Tomé Pires itu kita ketahui pula bahwa di daerah Sumatra di samping banyak kerajaan yang sudah bercorak Islam juga banyak yang belum dan karena itu sering kali disebut *cafre*. Mungkin di antaranya banyak yang tidak memperoleh pengaruh budaya Hindu. Menarik perhatian kita bahwa Tomé Pires menyebutkan bahwa di sepanjang pantai Banda terdapat pedagang-pedagang muslim, tetapi di pedalamannya banyak yang menganut berhala, dan mereka tidak mempunyai kerajaan tetapi desa-desanya diperintah oleh *cabila* dan orang tua-tua.[44] Struktur pemerintahan seperti telah diberitakan oleh Tomé Pires itu diperkuat lagi oleh Antonio Galvao yang menyebutkan bahwa di Maluku, setiap tempat merdeka dengan daerah dan batas-batasnya sendiri. Penduduknya hidup bersama dalam masyarakat-masyarakat yang memenuhi keperluannya sendiri-sendiri. Masyarakat-masyarakat tersebut diperintah oleh orang tua yang dianggap lebih baik daripada yang lain.[45]

Pada beberapa kelompok masyarakat di Kalimantan dan Sumatra jelas masih terdapat suku bangsa yang struktur pemerintahannya tidak terkena pengaruh India atau Indonesia–Hindu. Contoh-contohnya hingga kini masih ada, antara lain di pedalaman Kalimantan, di Irian yang organisasi sosial, kehidupan ekonomi, dan sosial–budayanya masih menunjukkan corak pra-Hindu dan pra-Islam.

Kita telah mengenal berbagai teori dari ahli-ahli mengenai budaya bangsa Indonesia zaman sebelum pengaruh budaya India (Hindu-Buddha). Teori Brandes dan H. Kern yang didasarkan atas ilmu bahasa dan teori R. Von Heine-Geldern dan P.V. van Stein Callenfels yang didasarkan pada peninggalan alat-alat prasejarah, sebelum pengaruh budaya India, nenek moyang bangsa Indonesia sudah mengenal budaya yang tinggi. J.C. van Leur menekankan hal-hal yang penting di antara budaya bangsa Indonesia sebelum pengaruh Hindu, yaitu mengenai organisasi politik, pertanian dengan irigasi, pelayaran, dan pengolahan logam.

Berdasarkan bukti beberapa unsur bentuk-bentuk ini, masyarakat-masyarakat pra-Hindu agaknya sudah memiliki tingkat hidup yang sama dengan apa yang terdapat dalam struktur sosial dan kehidupan sosial–ekonomi bangsa Indonesia di berbagai daerah pada masa sekarang. Dari

---

43 Uka Tjandrasasmita, *Proyek Penggalian di Sulawesi Selatan (The South Sulawesi Excavation (Final Report)*, Yayasan Purbakala, 1970, hlm. 24–29

44 Armando Cortesao, *op. cit.*, hlm. 206

45 Hubert Th. Th. M. Jacobs S.J., *op. cit.*, hlm. 77

adanya pertanian yang menggunakan irigasi dan sistem administrasi yang berhubungan dengannya, muncullah negara-negara patrimonial–birokratis dalam ukuran lebih besar atau kecil, dan pada saat yang sama terdapat pula bentuk-bentuk organisasi desa-desa yang sangat berkembang dengan keluarga-keluarga sebagai intinya, dan orang tua-tua desa sebagai pengawas terhadap tanah-tanah, dan barangkali kepala-kepala yang patrimonial.

Dari pelayaran dan perdagangan dapat diketahui adanya suatu struktur sosial, hubungan satu dengan lain, dan wibawa yang berhubungan dengan hal itu. Dari adanya pengolahan logam di desa-desa yang benar-benar teratur, di bawah kewibawaan yang stabil, dapat diketahui adanya kerajinan-kerajinan, dan hasilnya serba-bentuk dalam organisasi masyarakat dan rakyat. J.C. van Leur mengatakan sudah tentu bahwa hal itu masih bersifat hipotesis. Penelitian abad ke-19 di Indonesia mengungkapkan bahwa sejumlah bentuk organisasi rakyat, lembaga-lembaga politik, dan kehidupan sosial-ekonomi, meskipun beraneka ragam, tetapi tetap memberi gambaran kesatuan bangsa Indonesia. Bukti kedua, meskipun bermacam-macam budaya asing dan agama dunia berhasil memasukkan pengaruhnya ke Indonesia, pendapat-pendapat pada umumnya mengatakan bahwa pengaruh-pengaruh itu tetap lemah, sekalipun kegiatannya telah berlangsung berabad-abad lamanya. Pengaruh-pengaruh yang fundamental dalam setiap bagian tata sosial dan politik bangsa Indonesia, yaitu radiasi dari agama-agama dunia dan bentuk-bentuk budaya asing hanyalah merupakan lapisan yang tipis dan penghalus, sedangkan di bawahnya terdapat seluruh bentuk asli dan kuno yang tetap berlanjut, terutama dengan banyak ragam dan tingkatan yang muncul menurut tingkat budaya itu sendiri.[46]

Berdasarkan uraian-uraian di atas itu jelaslah bahwa meskipun sejak abad-abad pertama hingga lebih kurang akhir abad ke-15, di Indonesia terdapat beberapa kerajaan yang menerima pengaruh Hindu–Buddha, pengaruh tersebut hanyalah merupakan lapisan yang tipis dan penghalus semata-mata. Karena itulah, dari sudut kebudayaan istilah "Indonesia–Hindu" mungkin lebih tepat untuk menyebut masyarakat kerajaan-kerajaan yang mendapat pengaruh Hindu–Buddha yang muncul dan berkembang di beberapa bagian Indonesia sejak abad-abad pertama sampai lebih kurang akhir abad ke-15 itu.

Pengaruh kebudayaan yang dibawa oleh orang-orang India terutama golongan Brahmana atau pendeta-pendeta agama Hindu dan Buddha lebih meresap kepada golongan elite dan bangsawan daripada kepada masyarakat umum. Karena itu pula masyarakat umum yang hidupnya jauh dari pusat-pusat kerajaan tetap hidup dalam kebudayaan aslinya.

---

46 J.C. van Leur, *op. cit.*, hlm. 93–96

Peninggalan-peninggalan purbakala, seperti bangunan-bangunan candi, patung-patung, prasasti-prasasti, dan ukiran-ukiran pada umumnya menunjukkan sifat kebudayaan Indonesia yang dilapisi oleh unsur-unsur Hindu-Buddha. Administrasi pemerintahan Jawa Kuno menunjukkan perbedaan-perbedaan dengan di India.[47] Candi-candi di Jawa, di Sumatra, dan di Bali ternyata tidak ada yang menunjukkan *proto tipe* candi-candi di India. Lebih-lebih apabila kita perhatikan bentuk-bentuk candi di Jawa Timur, antara lain, candi Jago atau Tumpang, Panataran, Sukuh, dan Penanggungan, semuanya mengingatkan kita kepada punden-punden berundak megalit zaman pra–Hindu. Kecuali itu, beberapa seni pahat dan hias dari kebudayaan Indonesia-Hindu seperti patung-patung candi Sukuh, patung-patung corak "Pajajaran", pola hiasan segitiga tumpul, pilin tunggal, dan berganda merupakan contoh yang masih mengingatkan kepada tradisi pahatan patung-patung megalit dan kebudayaan perunggu-besi, sebelum kedatangan pengaruh kebudayaan India.

Fungsi candi-candi Indonesia–Hindu adalah antara lain sebagai tempat penguburan abu jenazah raja-raja. Raja-raja yang meninggal dibuatkan patung dan perwujudannya melambangkan dewa-dewa yang mereka puja semasa hidupnya. Candi Borobudur yang bertingkat sepuluh mungkin merupakan tempat pemujaan dan perlambangan raja-raja dinasti Sailendra.[48]

Masyarakat Indonesia–Hindu menganggap rajanya sebagai dewa yang memerintah di dunia. Kultus Dewa Raja pada zaman pengaruh kebudayaan India tidak hanya terdapat di Indonesia, tetapi juga di masyarakat kerajaan-kerajaan tradisional di dataran Asia Tenggara seperti di Kamboja dan Campa. Gelar-gelar kedewaan diberikan kepada raja-raja terutama setelah mereka meninggal dunia. Kepercayaan demikian menunjukkan adanya hubungan dengan tradisi kepercayaan pada masa pra-Hindu, ketika mereka menuju ruh-ruh nenek moyang yang biasanya diwujudkan dalam patung-patung dan menhir-menhir di atas punden-punden berundak. Pembuatan patung-patung megalit masih dilakukan pula pada beberapa masyarakat hingga kini misalnya di Nias dan Flores.[49]

Menurut Antonio Galvao, pada abad-abad kedatangan dan penyebaran Islam di daerah Maluku masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang membuat patung-patung untuk menghormati para bapak dan para nenek moyang. Patung-patung tersebut dibuat dari kayu atau batu dengan wajah

---

47 Boechari, "A Preliminary Note on the Study of the Old Javanese Civil Administrasi, *MISI*, 1963, Jilid I No. 2, hlm. 122–133

48 J.G. de Casparis, *op. cit.*, hlm. 167–174

49 H.R. van Heekeren, "The Bronze – Iron Age of Indonesia," *VKI*, 1958, XXII, hlm. 44

orang laki-laki, anjing, kucing, dan binatang-binatang lain yang mereka sukai. Mereka memuja benda-benda langit, matahari, bulan, dan bintang-bintang.[50]

Dari berita itu jelaslah bahwa pemujaan yang digambarkan bukanlah bercorak Hindu-Buddha, tetapi kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan alam. Kepercayaan tersebut juga masih terdapat pada suku-suku di Kalimantan, antara lain pada upacara *Tiwah*. Jelaslah bahwa dasar kepercayaan suku-suku bangsa Indonesia pra-Hindu diteruskan masa Indonesia-Hindu. Perhitungan waktu yang telah dikenal oleh bangsa Indonesia sebelum pengaruh Hindu adalah pasaran yang terdiri dari lima hari. Pada masa Indonesia-Hindu perhitungan pasaran digabung dengan perhitungan tujuh hari dan menjadi satu minggu itu, seperti yang kita ketahui dari istilah *pancawara* dan *saptawara* yang digunakan dalam prasasti-prasasti.

Bahasa-bahasa yang digunakan di kepulauan Indonesia pada waktu sebelum dan masa kedatangan serta penyebaran Islam bermacam-macam. Di Jawa bahasa yang dipergunakan adalah Jawa Kuno, Sunda Kuno, dan di daerah-daerah Sumatra dan semenanjung Malayu dipergunakan bahasa Melayu. Selain itu, terdapat bahasa-bahasa daerah lain seperti bahasa Batak, Kubu, Nias, Minangkabau, dan Padang. Hampir setiap suku bangsa memakai bahasanya sendiri. Demikian pula di Kalimantan terdapat bahasa Banjar, Melayu, dan Dayak, di Sulawesi bahasa Bugis, Makassar, dan di Maluku juga terdapat bermacam-macam bahasa. Antonio Galvao pada pertengahan abad ke-16 menceritakan bahwa di daerah tersebut masyarakat yang bertetangga jarang sekali saling mengerti. Di samping itu, raja-raja, putra-putra, dan orang-orang yang dekat padanya mem-punyai cara berbicara sendiri yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain.[51]

Bahasa Sanskerta yang biasanya hanya dipakai oleh golongan kecil kaum Brahmana dan beberapa prasasti yang dikeluarkan oleh raja-raja, mungkin sejak kerajaan-kerajaan Indonesia–Hindu yang terakhir, seperti Majapahit, Sunda Pajajaran, Sriwijaya, dan Melayu, sudah tidak dipergunakan lagi.

Penggunaan bahasa Melayu telah kita ketahui sejak abad ke-17, misalnya dalam prasasti-prasasti Sriwijaya yang rupa-rupanya makin lama makin berkembang, tersebar di beberapa daerah pesisir kepulauan Indonesia. Penyebaran bahasa tersebut mungkin disebabkan oleh hubungan lalu lintas pelayaran dan perdagangan, yaitu sebagai alat komunikasi antarsuku bangsa yang semula sudah menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Dengan perdagangan itulah bahasa Melayu yang kemudian disebut bahasa Indonesia meluas menjadi bahasa yang umum yang dipakai sebagai *linguafranca*. Kedatangan orang-orang muslim mengembangkan dan memperbanyak

---

50 Hubert Th. Th. M.M. Jacobs S.J., *op. cit.*, hlm. 75–77
51 *Ibid.*, hlm. 75

perbendaharaan bahasa Melayu dengan kata-kata yang diambil dari bahasa Arab.

Pada bagian terdahulu telah dikatakan bahwa situasi dan kondisi politik bahkan ekonomi kerajaan-kerajaan Indonesia-Hindu pada masa kedatangan orang-orang muslim ke daerah Sumatra dan Jawa, Sriwijaya dan Majapahit mulai mengalami kemunduran. Hal itu antara lain disebabkan politik kerajaan-kerajaan di Sumatra dan Jawa sendiri dan mungkin juga oleh pengaruh politik peluasan kekuasaan Cina ke kerajaan-kerajaan di dataran Asia Tenggara.

Kemunduran Sriwijaya disebabkan faktor politik ekspansi dari kerajaan Singasari dan Majapahit, di samping kemungkinan peluasan pengaruh Cina dan kerajaan-kerajaan di dataran Asia Tenggara. Untuk Majapahit faktor politik dalam negeri sendiri, yaitu pemberontakan-pemberontakan dan sengketa di antara anggota keluarga raja dalam perebutan kekuasaan.

Situasi politik demikian mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan ekonomi dan sosial budaya. Adanya pemberontakan, perang perebutan kekuasaan di kalangan keluarga raja-raja itu mengakibatkan pula kelemahan bagi perekonomian rakyat, bahkan juga perekonomian segolongan bangsawan sendiri yang tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan itu, karena perang-perang itu jelas menghabiskan waktu, tenaga, dan bahan-bahan keperluan hidup. Bupati-bupati Majapahit yang ditempatkan di pesisir utara Jawa melepaskan diri bukan karena faktor politik saja, melainkan juga faktor hubungan ekonomi dengan pedagang-pedagang muslim.

Keguncangan dalam kehidupan politik dan ekonomi mengakibatkan pula keguncangan pada kehidupan sosial–budaya. Keperluan-keperluan upacara keagamaan, kreasi-kreasi dalam kerajinan tangan, seni bangun, seni patung dan ukir, serta cabang-cabang seni lainnya terpengaruh oleh situasi politik dan ekonomi yang kacau itu. Sementara itu, dalam suasana politik yang kacau, banyak pedagang muslim yang ramai mengunjungi Nusantara, di antaranya mungkin terdapat juga mubalig-mubalig. Mereka juga berdiam dalam perkampungan-perkampungan. Sudah tentu di antara mereka terdapat pula orang-orang kaya, dan orang muslim tersebut menerima dan memakai bahasa penduduk setempat. Mereka juga menerima adat kebiasaan setempat, dan melakukan perkawinan dengan perempuan-perempuan setempat yang mereka islamkan.

Untuk kepentingan pribadi atau untuk sebab-sebab lain, mereka mencari budak-budak dan budak-budak tersebut menjadi muslim. Dengan cara ini, tiap keluarga muslim menjadi inti masyarakat muslim dan pusat kegiatan peng-islam-an. Dengan cara perkawinan pula Islam memasuki lapisan masyarakat bangsawan. Kemudian orang-orang dari daerah sekitar tertarik akan Islam karena pedagang-pedagang muslim dapat menunjukkan sifat-sifat

dan tingkah laku yang baik dan pengetahuan keagamaan yang tinggi. Pada kesempatan itu pula raja-raja dan bangsawan-bangsawan Indonesia mengumpulkan kekayaan melalui perdagangan dengan pedagang-pedagang asing. Rakyat umumnya memandang pemimpin-pemimpin dan bangsawan-bangsawannya sebagai contoh-contoh yang baik untuk diikuti. Dengan demikian, apabila seorang pemimpin atau bangsawan memeluk agama Islam, maka rakyat mengikutinya.[52]

Kecuali itu, agama Islam dipandang oleh rakyat yang semula menganut agama Hindu lebih baik karena tidak mengenal kasta, Islam tidak mengenal perbedaan golongan dalam masyarakat. Daya penarik Islam bagi pedagang-pedagang yang hidup di bawah kekuasaan raja-raja Indonesia–Hindu agaknya ditemukan pada pemikiran orang kecil, Islam memberi suatu persamaan bagi pribadinya sebagai angggota masyarakat muslim. Menurut alam pikiran agama Hindu ia hanyalah suatu makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada kasta-kasta lain. Di dalam Islam ia merasa dirinya sama atau bahkan lebih tinggi daripada orang-orang yang bukan muslim, meskipun dalam struktur masyarakat ia masih menempati kedudukan bawahan.[53]

Jelaslah bahwa islamisasi di Indonesia terjadi dan dipermudah karena adanya dua pihak, yakni orang-orang muslim yang datang dan mengajarkan agama Islam dan golongan masyarakat Indonesia sendiri yang menerimanya. Dalam masa-masa keguncangan politik, ekonomi, dan sosial budaya itu, Islam sebagai agama dan budaya dengan mudah pula memasuki dan mengisi masyarakat Indonesia yang sedang mencari pegangan hidup, lebih-lebih cara-cara yang ditempuh oleh orang-orang muslim dalam menyebarkan Islam disesuaikan dengan kondisi sosial–budaya yang telah ada. Jadi, pada taraf permulaan islamisasi dilakukan dengan saling pengertian akan kebutuhan dan kondisinya. Cara dan saluran-saluran islamisasi sehingga terbentuk masyarakat dan kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia, akan dibicarakan pada bagian tersendiri.

---

52 A. Mukti Ali, *The Spread of Islam in Indonesia*, Jajasan "NIDA" Jogjakarta, 1970, hlm. 9
53 *Ibid.*, hlm. 28

Bab II
Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam

Setelah kedatangan Islam, terjadi proses penyebarannya seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya. Akibatnya, tumbuh dan berkembanglah kerajaan-kerajaan Islam di kepulauan Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam yang demikian banyak, tetapi dalam bab ini hanya akan dibicarakan secara garis besar perihal pertumbuhan dan perkembangannya termasuk puncaknya sampai mengalami kemunduran akibat kekuasaan bangsa Barat terutama VOC sampai Hindia Belanda. Kerajaan-kerajaan Islam itu tumbuh dan berkembang di berbagai daerah, yaitu di Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

A. Kerajaan-Kerajaan Islam di Sumatra

Berita awal abad ke-16 M dari Tomé Pires dalam *Suma Oriental* (1512–1515) mengatakan bahwa di Sumatra, terutama di sepanjang pesisir Selat Malaka dan pesisir barat Sumatra, telah banyak kerajaan Islam baik yang besar maupun yang kecil. Kerajaan-kerajaan tersebut, antara lain Aceh, Bican, Lambri, Pedir, Pirada, Pase, Aru, Arcat, Rupat, Siak, Kampar, Tongkal, Indragiri, Jambi, Palembang, Andalas, Pariaman, Minangkabau, Tiku, Panchur, Barus, dan lainnya.[1] Kerajaan kerajaan tersebut ada yang tengah mengalami pertumbuhan dan ada pula yang tengah mengalami perkembangan bahkan ada yang sedang mengalami keruntuhan karena pergeseran politik satu dengan lainnya. Berdasarkan sumber-sumber sejarah lainnya bahkan data arkeologis ada kerajaan Islam yang sudah tumbuh sejak dua abad sebelum kehadiran Tomé Pires, yaitu kerajaan Islam Samudra Pasai.

1. Kerajaan Samudra Pasai

Letak kerajaan Samudra Pasai lebih kurang 15 km di sebelah timur Lhokseumawe, Nangro Aceh, diperkirakan tumbuh antara tahun

1 Cortesao, Armando, *The Suma Oriental of Tomé Pires An Account of The East, From The Red Sea to Japan Written in Malacca and India* (1512–1515), Volume I, Hakluyt Society, 1944 Kraus Reprint Limited Nendeln/Liechtenstein, 1967, hlm. 135–136

1270–1275 M atau pertengahan abad ke-13 M.[2] Kerajaan Samudra Pasai di bawah pemerintahan sultan pertamanya yang bernama Sultan Malik as-Shalih, wafat tahun 696 H (1297 M). Nama Sultan Malik as-Shalih sebagai sultan pertama kerajaan tersebut diceritakan pula dalam *Sejarah Melayu* dan *Hikayat Raja-Raja Pasai*, yang sebelumnya hanya seorang Kepala Gampong Samudra, benama Marah Silu.[3]

Tumbuhnya kerajaan Islam Samudra Pasai tidak dapat dipisahkan dari letak geografisnya yang senantiasa tersentuh pelayaran dan perdagangan internasional melalui Selat Malaka yang sudah ada sejak abad-abad pertama Masehi.[4] Sejak abad ke-7 dan ke-8 Masehi para pedagang muslim dari Arabia, Persi (Iran), dan dari negeri-negeri Timur Tengah lainnya mulai memegang peran penting, turut serta dalam jaringan pelayaran dan perdagangan internasional yang waktu itu jaraknya lebih jauh, yaitu dari Teluk Aden, Teluk Persi, melalui Samudra India–Selat Malaka sampai Lautan Cina. Perkembangan jaringan pelayaran dan perdagangan melalui Selat Malaka sejak abad-abad tersebut disebabkan pula oleh upaya-upaya perkembangan kekuasaan di Asia Barat di bawah Banu Umayyah (660–749), di Asia Timur di bawah Dinasti T'ang (618–907), dan di Asia Tenggara di bawah kerajaan Sriwijaya (abad ke-7–14 M).[5]

Keberadaan jaringan pelayaran dan perdagangan antarbangsa itu bukan hanya didasarkan berita-berita Cina, tetapi sejak abad ke-9 M sampai ke-11 M berita-berita para pelayar dan geografi bangsa Arab juga telah menambah sumber-sumber sejarah. Berita-berita itu, antara lain dari Ibn Khurdazbih (850), Ya'Qubi (875–880), Ibn Faqih (902), Ibn Rusteh (903), Ishaq Ibn Iman (lk. 907), Muhammad Ibn Zakariya al Razi, Abu Zayd dari Sirat (lk. 916), Abu Dulaf (lk. 940), Mas'udi (943), dan Buzurg Ibn Syahriyar (awal abad ke-10). Dalam berita mereka itu sering disebut nama-nama tempat yang ada di Selat Malaka seperti sebutan Salahit (Selat), Kalah (Kedah), Jawah (Sumatra), Sribuza dan Ramni, Qaqulah, Fansur, Lambri (Lamuri), dan sebagainya.[6] Oleh karena itu, sejak abad ke-7 dan ke-8 sampai

---

2 J.P. Moquette, De grafsteen to Pase en Grissee vergeleken met dergelijke monumenten uit Hindoestan, *TBG.*, 1912, *LIV*, hlm. 536–553

3 J.P. Moquette, *De Eerste Vorsten van Samudra-Pase, R.O.D.*, 1913, hlm. 1–12

4 Leur, J.C. van, *Indonesian Trade and Society Essays in Social Ecomic History*, The Hague-Bandung, 1955, hlm. 90

5 George Fadlo Houran, *Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early Mediaval Times, Princeton , New Jersey University Press*, 1951, hlm. 62.; Uka Tjandrasasmita, "The Introduction of Islam and The Growth of Moslem Coastal Cities in The Indonesian-Archipelago", *Dynamics of Indonesian History*, Edited by Haryati Soebadio and Carine A. du Marchie Sarvaas, North-Holland Publishing Company (Amsterdam–New York-Oxford, 1978, hlm. 143 (141–160)

6 Rita Rose Di Meglio, Arab Trade with Indonesia and the Malay Peninsula From the 8th to the 16th Century (Papers on Islamic History II) *Islam and the Trade of Asian a Collogium*, Edited by D.S. Richards, Published The Near Eastern History Group-Oxford and The Near East Centre University of Pennsylvania, Burno Cassia Oxford and University of Pennsylvania Press, 1970, hlm. 105–135, (110–112)

abad ke-11 M di daerah pesisir Selat Malaka dan juga di Cina Selatan tumbuh komunitas-komunitas muslim akibat islamisasi. Sesuai dengan situasi dan kondisi kerajaan Sriwijaya yang sedang mengalami kelemahan disebabkan peluasan kekuasaan kerajaan Singasari dari Jawa, menyebabkan kekurangmampuan kerajaan Sriwijaya melakukan kontrol sejak awal abad ke-13 M, lambat laun muncul komunitas muslim yang akhirnya tumbuhlah Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia bahkan di Asia Tenggara.

Sultan-sultan yang memerintah kerajaan Samudra Pasai berturut-turut adalah Sultan Malik as-Shalih (wafat 696 H/1297 M), Sultan Muhammad Malik az-Zahir (1297–1326), Sultan Mahmud Malik az-Zahir (lk. 1346-1383), Sultan Zain al-'Abidin Malik az-Zahir (1383–1405), Sultanah Nahrisyah (1405–1412), wafat 27 September 1428), Abu Zaid Malik az-Zahir (1412–?), dan Mahmud Malik az-Zahir (1513–1524). Nama-nama sultan yang telah disebutkan itu selain terdapat pada sumber *Sejarah Melayu* dan *Hikayat Raja-Raja Pasai* juga tercantum pada mata uang, kecuali sampai kini nama Sultan Malik as-Shalih belum didapatkan pada mata uang, emas yang disebut *dirham* itu.[7] Pada masa kerajaan Samudra Pasai hal-hal yang perlu dicatat, antara lain di bidang politik dan hubungan antarkerajaan serta di bidang keagamaan dan bidang perekonomian perdagangan.

Kemungkinan pada masa pemerintahan Sultan Malik as-Shalih sudah ada hubungan dengan Cina sebagaimana diberitakan dalam sejarah dinasti Yuan bahwa tahun 1282 M seorang utusan Cina bertemu dengan salah seorang menteri dari kerajaan Sumatra di Quilon yang meminta agar raja Sumatra (Samudra) mengirimkan dutanya ke Cina. Ternyata pada tahun itu ada dua orang utusan dari Samudra yang bernama Sulaeman dan Snams-ad-Din Hubungan dengan negeri-negeri Timur Tengah selalu ada bahkan sekitar tahun 1346 M berdasarkan berita Ibn Battutah yang berkunjung pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik az-Zahir (1346–1383), ahli-ahli agama berdatangan antara lain dari Persi (Iran) bernama Qadi Sharif Amir Sayyid dari Shiraz, dan Taj-al-Din dari Isfahan.[8] Pada awal abad ke-16 M mungkin masa memuncaknya kerajaan Samudra Pasai sebagaimana diberitakan Tomé Pires (1512–1515) tengah mengalami berbagai kemajuan di bidang politik pemerintahan, di bidang keagamaan, terutama di bidang perekonomian dan perdagangan.[9] Diceritakan tentang

---

7 T. Ibrahim Alfian, *Mata Uang Emas Kerajaan-Kerajaan di Aceh*,Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Museum Daerah Istimewa Aceh, 1979, hlm. 15–27

8 Megilio, Rita Rose D., *Arab Trade* .... 1970, hlm. 116–117

9 Cortesao, Armando, *Suma Oriental of Tomé Pires*, 1944, 1967, hlm. 142–145; Uka Tjandrasasmita telah membicarakan, "Pasai dalam Dunia Perdagangan", Diskusi Ilmiah tentang Pasai tgl. 25–27 September 1992 diselenggarakan Direktorat Senitra Ditjen Kebudayaan di Cisarua, Bogor

Gambar 2.1 Salah satu sisi Nisan Sultan Malik as-Salih di Samudra tahun 1297 M di Kabupaten Aceh Utara

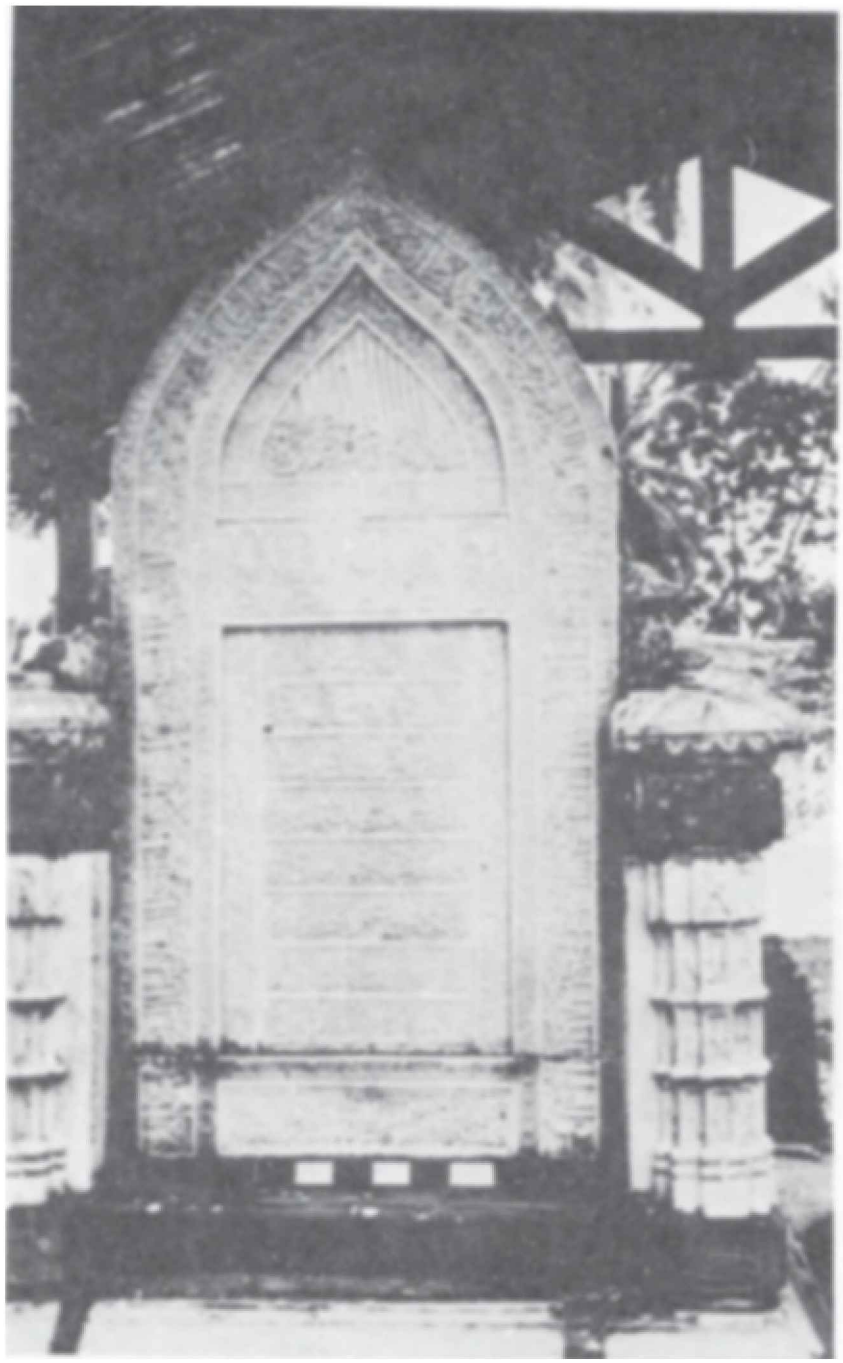

Gambar 2.2 Makam Sultanah Nahrisah 1428 M
di Samudra Pasai, Kabupaten Aceh Utara

kerajaan Pasai selalu mengadakan hubungan persahabatan dengan Malaka bahkan mengikat hubungan perkawinan. Para pedagang yang hadir di Pasai dari berbagai negeri, seperti Rumi, Turki, Arab, Persia (Iran), Gujarat, Keling, Bengali, Malayu, Jawa, Bruas, Siam, Kedah, dan Pegu.

Diberitakan pula bahwa kerajaan Samudra Pasai telah menggunakan mata uang seperti uang kecil yang disebut *ceitis*, ada yang dibuat dari emas yang disebut *dramas* yang dibandingkan dengan harga mata uang Portugis *crusade*, yaitu 9 *drama* sama dengan 1 *crusado* yang juga sama dengan 500 *cash*. Mata uang emas itu dibuat dari serbukan emas dan perak. Bahkan kerajaan Samudra Pasai menghasilkan komoditas perdagangan ekspor, seperti lada, sutra, kapur barus, dan banyak lagi komoditas yang dapat diperoleh karena tempat itu sebagai pengumpul berbagai barang perdagangan dari berbagai daerah. Kecuali itu, juga yang berkaitan dengan masalah pendapatan kerajaan-kerajaan ialah pajak dari barang-barang yang diekspor dan diimpor.[10] Di bidang keagamaan sebagaimana telah diberitakan Ibn Batuttah tentang kehadiran para ulama dari Persia, Syria, dan Isfahan. Ibn Battutah menceritakan bagaimana taatnya Sultan Samudra Pasai terhadap agama Islam dari madzhab Syafi'i, dan ia selalu dikelilingi oleh ahli-ahli teologi Islam.

Kerajaan Samudra Pasai mempunyai peran penting di dalam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara.[11] Malaka menjadi kerajaan yang bercorak Islam karena amat erat hubungannya dengan Kerajaan Samudra Pasai lebih-lebih dengan mengadakan hubungan pernikahan antara putra-putra Sultan dari Pasai dengan Malaka sehingga pada awal abad ke-15 M atau sekitar 1414 M tumbuhlah kerajaan Islam Malaka, dimulai pemerintahan Paramisora. Tomé Pires menceritakan hubungan antara Pasai dengan Malaka terutama pada masa pemerintahan Saquem Darxa yang dapat disamakan dengan nama Sultan Muhammad Iskandar Syah raja kedua Malaka.[12]

Dalam *Hikayat Patani* terdapat cerita tentang peng-islam-an raja Patani yang bernama Paya Tu Naqpa dilakukan oleh seorang dari Pasai yang bernama Syaikh Sa'id karena berhasil menyembuhkan raja Patani itu. Setelah masuk Islam raja berganti nama yaitu Sultan Ismail Syah Zillullah Fil'Alam dan juga ketiga orang putra dan putrinya yaitu Sultan Mudhaffar Syah, Siti Aisyah, dan Sultan Mansur. Pada masa pemerintahan Sultan

---

10 Cortesao, Armando, *Suma Oriental of Tomé Pires*, 1944, 1967, hlm. 144–145

11 Uka Tjandarasasmita, "Peranan Samudra Pasai dalam Perkembangan Islam di Beberapa Daerah Asia Tenggara", *Aceh dalam Retropeksi dan Refleksi Budaya Nusantara*, INTIM Jakarta Selatan, 1988, hlm. 67–82

12 Cortesao, Armando, *Suma Oriental of Tomé Pires ...*, 1944, 1967, hlm. 242

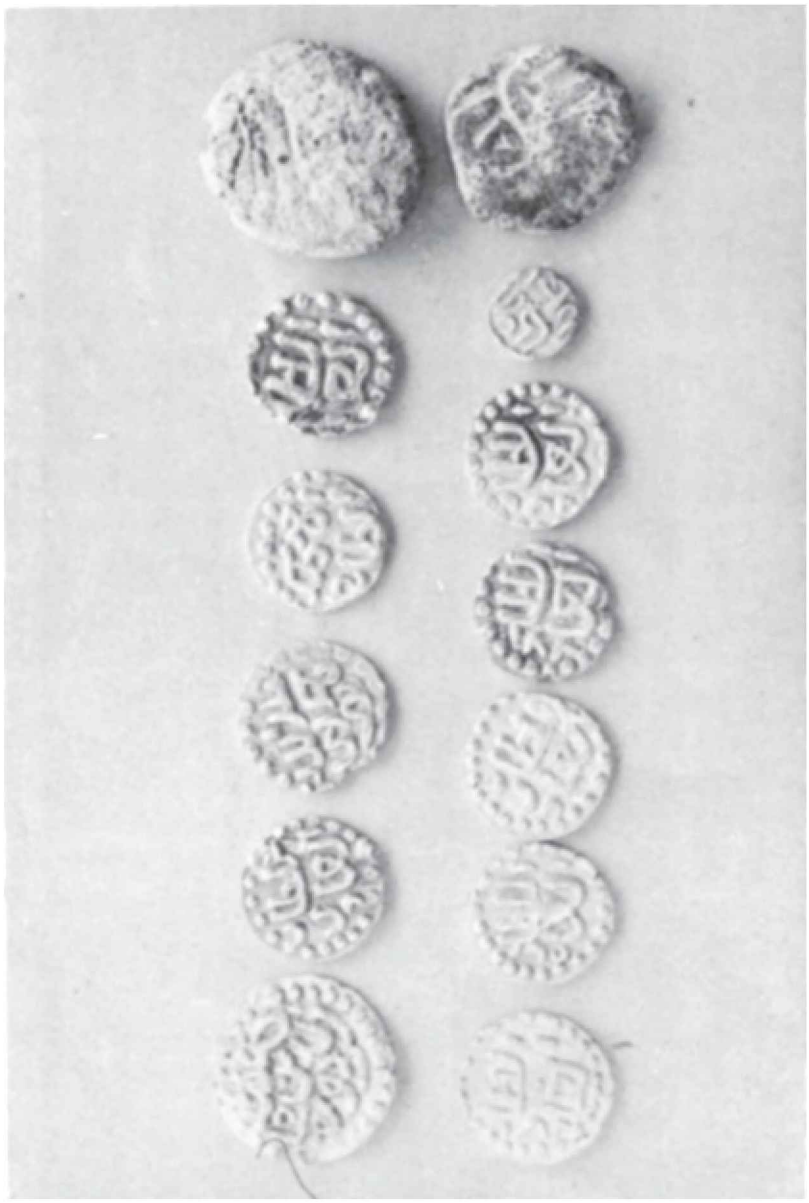

Gambar 2.3 Mata uang emas dari kerajaan Samudra Pasai, Kabupaten Aceh Utara

Mudhaffar Syah datang seorang ulama lagi dari Pasai yang bernama Syaikh Safiuddin yang atas perintah raja ia mendirikan masjid untuk orang-orang muslim di Patani.[13] Demikian pula dengan banyaknya jenis nisan kubur yang disebut *Batu Aceh* yang menjadi nisan kubur raja-raja di Patani, Malaka, dan Malaysia pada umumnya terutama yang bentuknya menyerupai nisan kubur Sultan Malik as-Shalih dan nisan-nisan kubur dari abad-abad sebelum ke-17 M ditambah dengan kesamaan jenis batu serta penulisan dan huruf-huruf bahkan dengan pengisian ayat-ayat Alquran dan nuansa kesufiannya,[14] jelas Samudra Pasai mempunyai peran penting dalam persebaran Islam di beberapa tempat di Asia Tenggara, demikian pula di bidang perekonomian dan perdagangan. Namun, sejak Portugis menguasai Malaka tahun 1511 M dan meluaskan kekuasaannya, kerajaan Islam Samudra Pasai mulai dikuasai sejak tahun 1521 M. Kemudian kerajaan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Al Mughayat Syah lebih berhasil menguasai Samudra Pasai.[15] Kerajaan-kerajaan Islam yang terletak di pesisir, seperti Aru, Pedir, dan lainnya berada di bawah kekuasaan kerajaan Islam Aceh Darussalam yang sejak abad ke-16 M makin mengalami perkembangan politik, ekonomi–perdagangan, kebudayaan, dan keagamaan.

2. Kerajaan Aceh Darussalam

Baik berdasarkan sumber-sumber Cina maupun hikayat-hikayat serta legenda-legenda bahkan berita Portugis, Tomé Pires, bahwa sebelum kerajaan Islam Aceh Darussalam, telah ada kerajaan-kerajaan. Menurut berita Cina dari Chau-Ju-Kua dan Kitab *Negarakartagama* karya Prapanca, Lambri atau Lamuri atau Ramni suatu kerajaan yang pada abad ke-13–14 M berada di bawah Sriwijaya dan Majapahit. Seperti telah dikatakan di atas bahwa Kerajaan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah yang namanya dalam berita Portugis disebut Raja Brahim, berhasil melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Pedir pada tahun 1520, dan pada tahun itu juga mengambil kerajaan Daya ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam. Pada tahun 1524 Pedir dan Samudra Pasai ditaklukkan. Kerajaan Banda Aceh Darussalam di bawah Sultan Ali Mughayat Syah menyerang kapal Portugis di bawah komandan Simao de Souza Galvao di bandar Aceh. Tahun 1529 kerajaan Aceh mengadakan persiapan untuk

13 A. Teeuw–D.K. Wyatt, *Hikayat Patani*, Bibliotheka Indonesia KTLV. 5 The Hague-Martinus Nijhoff, 1970, hlm. 71–78 (Malay Text)

14 Wayne A. Bogas, *Islamic Cemetries in Patani*, Published by the Malaysian Historical Society, J.I. Hose Kuala Lumpur-Malaysia, 1988, hlm. 31.; Othman Yatim, *Batu Aceh Early Islamic Grave-Stones in Peninsular Malaysia*, Museum Association of Malaysia, 1988, hlm. 105–106

15 Raden Hoesein Djajadiningrat, alih bahasa oleh Teuku Hamid, *Kesultanan Aceh (Suatu Pembahasan tentang Sejarah Kesultanan Aceh Berdasarkan Bahan-Bahan yang Terdapat dalam Karya Melayu*, Proyek Pengembangan Permuseuman DI Aceh, 1982/1984, hlm. 20

Gambar 2.4 Salah sebuah makam raja-raja Aceh, di Banda Aceh

menyerang Portugis di Malaka, tetapi tidak jadi karena Sultan Ali Mughayat Syah wafat pada tahun 1530 M dan dimakamkan di Kandang XII Banda Aceh.[16] Di antara pengganti-penggantinya yang terkenal adalah Sultan Alauddin Ri'ayat Syah al-Kahar (1537–1571). Usaha-usahanya adalah mengembangkan kekuatan angkatan perang, mengembangkan perdagangan, dan mengadakan hubungan internasional dengan kerajaan Islam di Timur Tengah, seperti dengan Turki, Abysinia, dan Mesir. Pada tahun 1563 ia mengirimkan utusannya ke Konstantinopel meminta bantuan dalam usaha melawan kekuasaan Portugis. Dua tahun kemudian datang bantuan dari Turki berupa teknisi-teknisi. Dengan kekuatan tentaranya Sultan Alauddin Ri'ayat Syah al-Kahar menyerang dan menaklukkan banyak kerajaan, seperti Batak, Aru, dan Barus. Untuk menjaga keutuhan kerajaan Aceh, Sultan Alauddin Ri'ayat Syah menempatkan suami saudara perempuannya di Barus dengan gelar Sultan Barus, dua orang putra Sultan diangkat menjadi Sultan Aru dan Sultan Pariaman dengan gelar resmi Sultan Ghori dan Sultan Mughal, dan di daerah-daerah pengaruh Kesultanan Aceh ditempatkan wakil-wakil dari Aceh.[17]

Demikian Johor dan Malaka diserang pada tahun 1537, 1547, dan 1568 dengan kekuatan tentaranya yang besar dan tidak hanya terdiri dari pasukan-pasukan Aceh, tetapi juga tentara Turki yang diperbantukan dengan sejumlah meriam berukuran kecil dan besar. Peluasan politik Kesultanan Aceh Darussalam diteruskan oleh penggantinya Sultan Ali Ri'ayat Syah seorang keturunan Sultan Pariaman yang memerintah antara tahun 1568 hingga 1588 dan mengadakan penyerangan ke Malaka tahun 1573, dan terhadap Perak pada tahun 1575. Di samping itu, mengadakan hubungan dengan Ratu Kalinyamat dari Japara. Ketika tentara Aceh menyerang Perak tahun 1579 Sultan Ahmad gugur, tetapi istri dan anaknya yang bernama Mansur dibawa ke Aceh yang kemudian dinikahkan dengan putri Sultan Ali Ri'ayat Syah. Setelah Sultan wafat menantunya itulah yang menggantikannya dengan gelar Sultan Alauddin Mansur Syah.

Meskipun Sultan Alauddin Mansur Syah seorang Sultan Aceh dari luar, menurut *Hikayat Bustan as-Salatin*, ia adalah orang yang sangat baik dan jujur dan ia mencintai ulama. Karena itulah pada masa pemerintahannya banyak ulama yang berkunjung ke Aceh. Sultan Alauddin Mansur Syah yang wafat tahun 1585 digantikan oleh Sultan Alauddin Ri'ayat Syah ibn Sultan Munawar Syah yang memerintah hingga tahun 1588, yang selanjutnya diganti oleh Sultan Alauddin Ri'ayat Syah ibn Firman Syah.

---

16 J.P. Moquette; Verslag van mijn voorlopig onderzoek de Mohammedaansehe oudheden in Atjeh en onderhoorigheden, *O.V.*, 1914, kwt. 2, Bijlage, hlm. 73, 80

17 J. Kathirithamby-Wells; Achenese control over West Sumatra up to the treaty of 1663, *J.S.A.H* Vol. X No. 3, Desember, 1969, hlm. 457

Pada masa pemerintahan Sultan inilah orang-orang Eropa yaitu Kompeni Inggris yang dipimpin oleh James Lancaster tahun 1599 dan 1602, dan orang Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, tanggal 30 Juni 1599 yang keduanya diterima baik untuk membeli lada. Sultan Ri'ayat Syah ibn Munawar Syah yang wafat tahun 1604 digantikan oleh Sultan Muda yang memerintah kerajaan Aceh sampai tahun 1607.

Kerajaan Aceh Darussalam mengalami puncak kekuasaan di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607–1636). Kesultanan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan yang terkenal itu terjadi di bidang politik, ekonomi–perdagangan, hubungan internasional, memperkuat angkatan perangnya, dan mengembangkan kebudayaan dan memperkuat kehidupan keagamaan Islam. Kemajuan-kemajuan kerajaan Islam Aceh Darussalam masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, telah menarik perhatian Dennys Lombard dan diuraikan secara mendalam.[18] Di bidang politik Sultan Iskandar Muda telah menundukkan daerah-daerah di sepanjang pesisir Timur dan Barat. Demikian pula Johor di Semenanjung Malaysia telah diserang yang kemudian mengakui kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Kedudukan Portugis di Malaka terus-menerus mengalami ancaman dan serangan, meskipun keruntuhan Malaka sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara baru sekitar tahun 1641 oleh VOC Belanda. Peluasan kekuasaan politik VOC sampai Hindia Belanda dekade abad ke-20 tetap menjadi ancaman Kerajaan Aceh, tetapi selalu menjadi sasaran perlawanan.[19]

Hubungan politik dengan negeri-negeri di Timur Tengah makin ditingkatkan dan demikian pula hubungan perdagangan kecuali dengan Mesir, Turki, Arab, juga dengan Prancis, Inggris, Afrika, India, Cina, dan Jepang. Komoditas-komoditas yang diimpor antara lain: beras, guci, gula (sakar), sakar lumat, anggur, kurma, timah putih dan hitam, besi, tekstil dari katun, kain batik mori, pinggan dan mangkuk, kipas, kertas, opium, air mawar, dan lain-lain yang disebut-sebut dalam *Kitab Adat Aceh*.[20] Komoditas yang diekspor dari Aceh sendiri antara lain kayu cendana, saapan, gandarukem (resin), damar, getah perca, obat-obatan dan parfum, rasamala, kapur barus, bunga lawang, lada, gading, lilin, tali sabuk, sutra, porselin, pakaian, minyak, dan emas. Demikian kemajuan Aceh dalam bidang perdagangan yang sebelum kedatangan

---

18 Denys Lombard; *Le Sultanat D'Ajeh Au Temps D'Iskandar Muda (1607–1636)*, Ecole Prancaise D'Extreme Orient, Paris, 1967

19 Uka Tjandrasasmita, "Jaringan Perdagangan Kesultanan Indonesia Abad XV–XVIII", *Seminar Nasional Sumbangan Islam terhadap Kebangkitan Bangsa*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 24–25 September, 2002

20 Dennys Lombard, *Ibid.*, 1967, hlm. 110–111

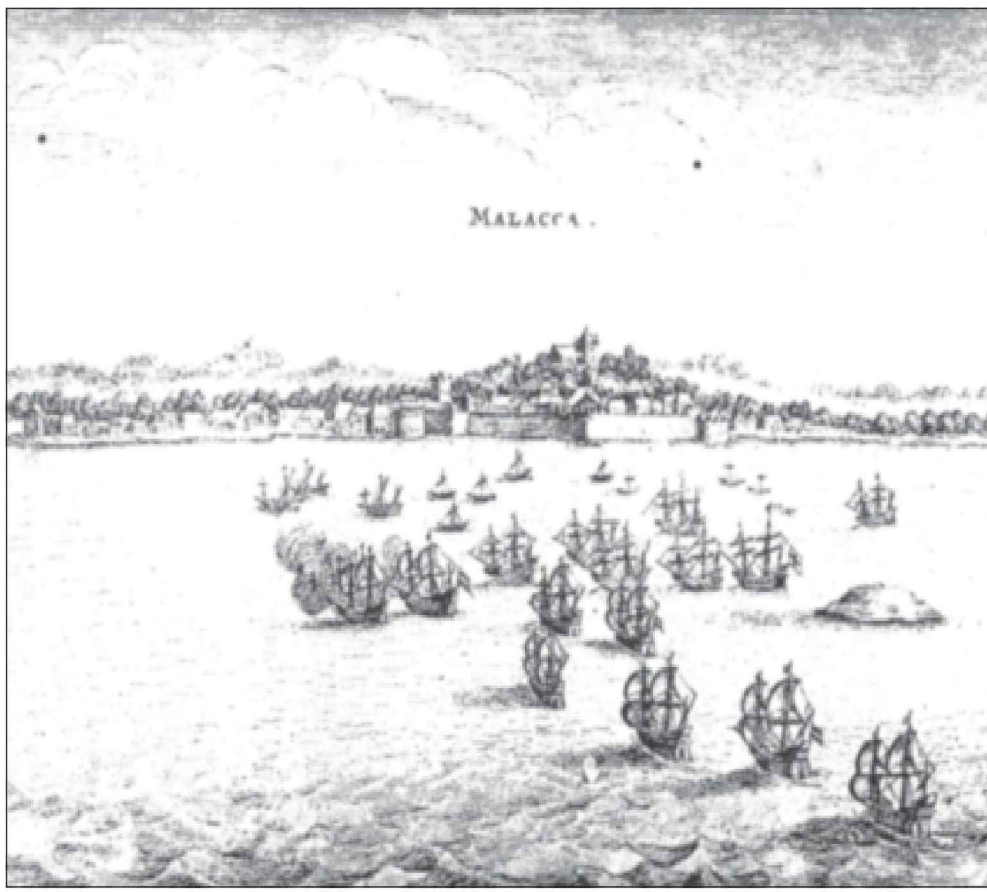

Gambar 2.5 Armada Cornelis Matelief di depan Malaka (1606)
Armada ini terdiri dari 7 kapal layar dan tiba di Malaka pada akhir April dan pada 17 Mei atas nama VOC ia membuat perjanjian dengan raja Johor untuk menyerang Portugis di Malaka

orang Inggris dan Belanda sudah mapan, tetapi sesudah kehadiran kedua pedagang bangsa Barat itu, politik dan sistem perdagangan kerajaan Islam Aceh mengalami perubahan karena sistem perdagangan kedua bangsa itu melalui perantara dan pedagang-pedagang asing itu tidak paham dengan cara perdagangan setempat.[21] Sultan Iskandar Muda sendiri diberitakan sebagai seorang raja yang terkaya dari hasil keuntungan perdagangannya, penghasilan dari pajak dan lainnya.

Kerajaan Aceh Darussalam pada masa itu mempunyai sistem birokrasi yang baik dan peraturan hukum yang dicantumkan dalam *Adat Makeuta Alam* atau *Kanun Makeuta Alam*.Iskandar Muda juga mendukung perkembangan keagamaan yang diajarkan oleh ulama-ulama terutama sufisme atau tasawuf *Wandatul Wujud* atau *Wujudiyyah*, pemikiran mistiko–filosofis yang diajarkan oleh Hamzah al-Fansuri.

Pada awal abad ke-19 kerajaan Islam Aceh Darussalam terus-menerus mengalami ancaman kolonialisme Belanda yang terus-menerus meluaskan kekuasaan politiknya, tetapi di berbagai daerah di Nusantara tetap mengalami perlawanan. Di kerajaan Aceh Darussalam sejak tahun 1873–1904 terjadi peperangan yang hebat yang terkenal dengan Perang Aceh dan merupakan peperangan yang terlama, terkuat, dan terbesar, karena didorong pula dengan motivasi keagamaan melawan kafir yang dikenal sebagai *Perang Sabil*. Dalam peperangan tersebut, Jenderal Kohler berhasil ditembak pada 14 April 1873. Pada tanggal 9 Desember 1873 tentara Belanda mendarat lagi di Aceh dan berhasil mendudukinya. Akan tetapi, Sultan dengan putranya yang masih kecil, keluarganya, disertai Panglima Polim dapat mengungsi. Tentara Belanda di bawah pimpinan Letnan Jenderal J. van Swieten, tanggal 11 Januari 1874 mengumumkan bahwa Banda Aceh telah dikuasai pemerintah Hindia Belanda. Namun kenyataannya, pasukan-pasukan Aceh tetap mengadakan serangan-serangan terhadap kedudukan militer Belanda baik yang ada di Aceh Besar maupun di luarnya. Serangan pasukan-pasukan Aceh dipimpin oleh para ulueebalang dan ulama, antara lain, Panglima Polim, Habib Abdurrahman, Teuku Cik Di Tiro, dan Teuku Umar dengan istrinya, Cut Nyak Din. Di kampung Tunga, pasukan Aceh dapat mengalahkan tentara Belanda hingga pimpinannya Jenderal Pel ditembak mati pada tahun 1878. Pada tahun 1880 tentara Belanda merasa kedudukannya tidak aman, lalu mundur. Akan tetapi, pada tahun 1884 mereka kembali melakukan serangan-serangan yang lambat laun dirasakan tidak berhasil dengan pengerahan-pengerahan besar tentaranya.

---

21 Dasgupta, A.K., *Aceh In Indonesian Trade And Politics*: 1600–1641, University Microfilm Ann Arbor-Michigan, USA, 1962, hlm. 202

Dengan politik barunya atas nasihat ahli Belanda, Ch. Snouck Hurgronje, pemerintah Hindia Belanda mengubah politiknya dengan cara memisahkan kesatuan kekuatan antara kaum bangsawan dengan kaum ulama Aceh. Belanda merasakan mulai berhasil dengan adanya perpecahan di antara pemimpin pasukan kerajaan Aceh. Satu per satu pemimpin pasukan Aceh jatuh ke tangan militer Belanda, seperti Cik Di Tiro dan Muhammad Syaman, pemimpin pasukan Aceh Teuku Umar walaupun kembali kelak bergabung dengan Panglima Polim dan Teuku Usen. Penyerangan tentara Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hazeu, yang menggantikan kedudukan Van Vliet sebagai Gubernur Militer dan Sipil, bulan Maret 1898 makin mendesak pasukan Aceh. Dengan tertangkapnya istri Sultan dan anaknya pada tanggal 26 November 1902 dan Panglima Polim dengan istrinya tanggal 6 September 1903, akhirnya Sultan Muhammad Daud Syah menyerah serta menandatangani perjanjian perdamaian tanggal 10 Januari 1903. Perlawanan pasukan Aceh di daerah Meulaboh di bawah pimpinan Syamsuddin as-Sumatrani. Ajaran tasawuf tersebut mendapat pengaruh ajaran Ibn'-Arabi dan Al-Jili. Tasawuf ini bukan hanya di kerajaan Aceh Darussalam, melainkan juga ke Semenanjung Melayu. Akan tetapi, setelah Sultan Iskandar Muda wafat dan digantikan Iskandar Thani (1636–1641), ajaran tasawuf *Wujudiyyah* itu terdesak oleh ajaran tasawuf *Wandatul Shuhud* yang diajarkan Nur-al-Din al-Raniri yang kembali ke Aceh tahun 1636. Ajarannya didukung oleh Sultan Iskandar Thani. Ajaran al-Raniri menurut Azyumadi Azra adalah ajaran neosufisme yang menitikberatkan kepada syariah Islam, dan diikuti oleh ulama-ulama lainnya yang menjadi muridnya antara lain Abd Al-Rauf Al-Sinkili (1615–1630), Muhammad Yusuf Al-Magasari.[22] Al-Raniri kecuali banyak karyanya dalam keagamaan juga membuat karya sastra sejarah seperti *Bustan-as-Salatin* dan *Taj-us-Salatin*. Setelah Sultan Iskandar Thani mangkat tanpa mempunyai keturunan pada tanggal 15 Februari 1641, namanya dikenal Marhum Dar as-Salam. Penggantinya ialah jandanya, putri Iskandar Muda yang bergelar Taj Al-Alam Safiatuddin Syah, tetapi Kerajaan Aceh sejak itu mulai terbatas daerah kekuasaannya. Setelah ia wafat tanggal 23 Oktober 1675, ia digantikan oleh seorang perempuan lagi yang bergelar Sri Sultanah Nur Al-Alam Naqiat ad-Din Syah. Dalam *Bustan as-Salatin* diceritakan bahwa pada masa pemerintahannya Mesjid Bait ar-Rahman dan istana mengalami kebakaran. Cerita ini dibenarkan oleh pemberitaan dalam *Daghregister* tahun 1677. Pemerintahannya hanya dua tahun

22 Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepuluaan Nusantara Abad XVII dan XVIII Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, Penerbit Mizan Khazanah Ilmu-Ilmu Islam, Bandung, September 1994, lihat uraian secara rinci riwayat dan ajaran serta kitab-kitab: *Nur Al-Din Al-Raniri, 'Abd Al-Rauf Al-Sankili, Muhammad Yusuf Al Maqasaei*, hlm. 166–239

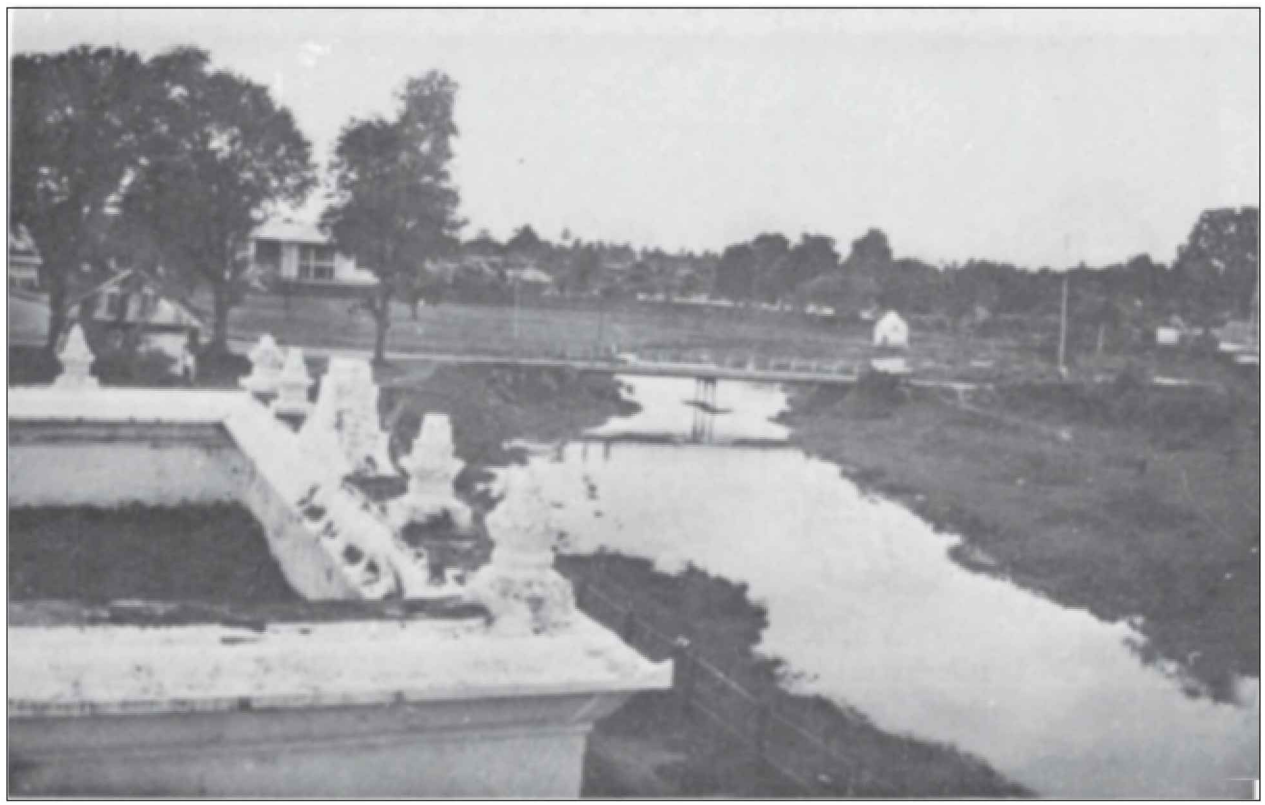

Gambar 2.6 Gunungan di bekas Taman Kesultanan Aceh, Banda Aceh

Gambar 2.7 Genta perunggu "Cakra Donya" dari kerajaan Aceh, Banda Aceh

karena pada tanggal 22 Januari 1678 ia wafat yang kemudian diganti oleh seorang putri Muhammad Syah dengan memakai gelar Sultanah Inayat Syah Zakiat ad-Din Syah yang memerintah sampai tanggal 3 Oktober 1688 dan kemudian digantikan oleh Sutanah Kamalat Syah. Dengan pengangkatan kembali Sultan Aceh dari kaum perempuan, timbul ketidaksenangan dari golongan yang menentangnya dan akhirnya diturunkan dari takhta pada bulan Oktober 1699.[23] Selanjutnya kerajaan Islam Aceh diperintah oleh keturunan orang Arab dan Bugis (1699–1735) yang sejak awal abad ke-18 kerajaan tersebut rupa-rupanya mulai mengalami keruntuhan. Teuku Umar terlebih dahulu lumpuh setelah ia wafat tanggal 11 Februari 1899, sedang istrinya Cut Nyak Din ditangkap dan kemudian tahun 1906 diasingkan ke Sumedang.[24]

3. Kerajaan-Kerajaan Islam di Riau

Kerajaan-kerajaan Islam yang disebut-sebut dalam berita Tomé Pires (1512–1515) ialah Siak, Kampar, Inderagiri[25] kini berada di daerah Riau. Jika kerajaan-kerajaan tersebut mulai bercorak Islam belum dapat dipastikan meskipun para pedagang muslim dari Arab dan negeri-negeri Timur Tengah lainnya sejak abad ke-7 atau ke-8 M sudah memegang peran dalam pelayaran dan perdagangan melalui Selat Malaka. Mengingat kerajaan-kerajaan Kampar, Inderagiri, dan Siak pada abad ke-13 dan ke-14 M masih ada dalam kekuasaan kerajaan Melayu dan Singasari-Majapahit, yang mendekati kepastian kerajaan-kerajaan tersebut tumbuh menjadi kerajaan-kerajaan bercorak Islam sejak abad ke-15 M. Pengaruh Islam yang sampai ke daerah-daerah itu mungkin akibat perkembangan kerajaan Islam Samudra Pasai dan Malaka. Jika kita dasarkan berita Tomé Pires, ketiga kerajaan itu, Kampar, Inderagiri, dan Siak senantiasa melakukan perdagangan dengan Malaka bahkan memberikan upeti kepada kerajaan Malaka. Ketiga kerajaan di pesisir Sumatra Timur ini dikuasai kerajaan Malaka pada masa pemerintahan Sultan Mansyur Syah (wafat 1477). Bahkan, pada masa pemerintahan putranya, Sultan Alauddin Riayat Syah (wafat 1488) banyak pulau di Selat Malaka (orang laut) termasuk Lingga - Riau, masuk kekuasaan Kerajaan Malaka.[26] Tomé Pires menyebutkan

23 Q.R. Raden Hoesein Djajadiningrat, *Kesultanan Aceh (Suatu Pembahasan tentang Sejarah Kesultanan Aceh Berdasarkan Bahan-Bahan yang Terdapat dalam Karya Melayu*, Alih Bahasa Teuku Hamid, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh, 1982/1983, hlm. 45–60

24 F.A. Sutjipto (Editor Khusus), Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegro, Nugroho Notosusanto (Editor Umum); *Indonesia dalam Abad 18 dan 19, Sejarah Nasional Indonesia IV*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1976, "Perlawanan di Aceh", hlm. 210–223

25 Cortesao, *Suma Oriental of Tomé Pires*, Hakluyt Society, 1944, hlm. 149–153

26 Barbara Watson Andaya and Leonard Y. Andaya; *A History of Malaysia*, The McMillan Press, London and Basingstoke, 1982, hlm. 51

barang-barang yang dihasilkan dari negeri-negeri itu. Siak menghasilkan padi, madu, kitin, rotan, bahan-bahan apotek, dan banyak emas. Kampar menghasilkan barang dagangan: emas, lilin, madu, biji-bijian, dan kayu gaharu. Inderagiri menghasilkan barang-barang perdagangan seperti halnya Kampar, tetapi emas dibeli dari pedalaman Minangkabau. Siak menjadi daerah kekuasaan Malaka sejak penaklukannya oleh Sultan Mansyur Syah di mana ditempatkan raja-raja sebagai wakil Kemaharajaan Melayu. Ketika Sultan Mahmud Syah I berada di Bintan, di Siak diangkat Raja Abdullah yang bergelar Sultan Khoja Ahmad Syah. Setelah itu, yang menjadi raja di Siak adalah Raja Hasan putra Ali Jalla Abdul Jalil, sedang saudara-saudaranya yang ditempatkan di Kelantan bernama Raja Husein, dan di Kampar ditempatkan Raja Muhammad. Ketiga kerajaan, yaitu Siak, Kampar, dan Inderagiri, sejak VOC. Belanda menguasai Malaka tahun 1641, yaitu sejak abad ke-17 sampai abad-abad ke-18, praktis kerajaan tersebut berada di bawah pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi perdagangan VOC, terikat perjanjian pada tanggal 14 Januari 1676 yang isinya hasil timah harus dijual hanya kepada VOC. Demikian pula dengan ditemukan tambang emas dari Petapahan, kerajaan Siak juga terikat oleh ikatan perjanjian monopoli perdagangan sehingga Raja Kecil tahun 1723 mendirikan kerajaan baru di Kuantan dekat Sabak Auh di Sungai Jantan Siak yang kemudian disebut juga Kerajaan Siak. Raja Kecil kemudian sebagai sultan memakai gelar Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah (1723–1748), dan selama pemerintahannya ia meluaskan daerah kekuasaannya sambil melakukan perlawanan-perlawan terhadap kekuasaan politik VOC. Bahkan sering muncul armadanya di Selat Malaka. Pada tahun 1750 Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah memindahkan ibu kota kerajaan dari Kuantan ke Mempura yang terletak di tepi Sungai Mempura Besar. Sungai Jantan diubah namanya menjadi Sungai Siak dan kerajaannya disebut Kerajaan Siak Sri Indrapura. Karena orang-orang VOC yang kantor dagangnya berada di Pulau Guntung, di mulut Sungai Siak, sering kali mengganggu lalu lintas kapal-kapal kerajaan Siak Sri Indrapura, Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah dengan pasukannya tahun 1760 menyerang benteng VOC.[27]

Kerajaan Siak di bawah pemerintahan Sultan Said Ali (1784–1811) banyak berjasa bagi rakyatnya, berhasil memakmurkan kerajaan dan ia seorang sultan yang jujur serta daerah-daerah yang pada masa Raja Kecil melepaskan diri dari kerajaan Siak berhasil dikuasai lagi. Sultan Said Ali pada tahun 1811 mengundurkan diri sebagai Sultan Siak dan kemudian

27 Tim Penulis, Drs. Anwar Syair dkk., *Sejarah Daerah Riau*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudadayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978, hlm. 92

pemerintahannya digantikan oleh putranya, Tengku Ibrahim. Di bawah pemerintahan Tengku Ibrahim inilah kerajaan Siak mengalami kemunduran sehingga banyak orang yang pindah ke Bintan, Lingga Tambelan, Trenggano, dan Pontianak. Ditambah lagi dengan adanya perjanjian dengan VOC pada tahun 1822 di Bukit Batu yang isinya menekankan kerajaan Siak tidak boleh mengadakan ikatan-ikatan atau perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain kecuali dengan Belanda. Dengan demikian, kerajaan Siak Sri Indrapura semakin sempit geraknya dan semakin banyak dipengaruhi politik penjajahan Hindia Belanda.[28]

Sebagaimana telah disebutkan bahwa kerajaan Kampar sejak abad ke-15 berada di bawah kerajaan Malaka. Pada masa pemerintahan Sultan Abdulah di Kampar, raja Kampar tidak mau menghadap Sultan Mahmud Syah I di Bintan selaku pemegang kekuasaan Kemaharajaan Melayu. Akibatnya, Sultan Mahmud Syah I mengirimkan pasukannya ke Kampar. Sultan Abdullah minta bantuan Portugis dan berhasil mempertahankan Kampar. Ketika Sultan Abdullah dibawa ke Malaka oleh Portugis, Kampar ada di bawah pembesar-pembesar kerajaan, di antaranya Mangkubumi Tun Perkasa yang mengirimkan utusan ke Kemaharajaan Melayu di bawah pimpinan Sultan Abdul Jalil Syah I yang memohon agar di Kampar ditempatkan raja. Hasil permohonan tersebut dikirimlah seorang pembesar dari Kemaharajaan Melayu, yaitu Raja Abdurrahman bergelar Maharaja Dinda I dan berkedudukan di Pekantua. Hubungan antara kerajaan Kampar di bawah pemerintahan Maharaja Lela Utama dengan Siak dan Kuantan, adalah perdagangan. Akan tetapi, pada masa pemerintahan penggantinya, Maharaja Dinda II memindahkan ibu kota kerajaan Kampar tahun 1725 ke Pelalawan yang kemudian mengganti kerajaan Kampar menjadi kerajaan Pelalawan. Kemudian kerajaan tersebut tunduk kepada kerajaan Siak dan pada tanggal 4 Februari 1879, dengan terjadinya perjanjian pengakuannya, Kampar berada di bawah pemerintah Hindia Belanda.[29]

Kerajaan Inderagiri sebelum tahun 1641 yang berada di bawah Kemaharajaan Malayu berhubungan erat dengan Portugis, tetapi setelah Malaka diduduki VOC, kerajaan Inderagiri mulai berhubungan dengan VOC yang mendirikan kantor dagangnya di Inderagiri berdasarkan perjanjian 28 Oktober 1664. Pada masa pemerintahan Sultan Inderagiri XVII, Undang-Undang Inderagiri disusun. Sultan Inderagiri I adalah Sultan Abdul Jalil Syah. Pada tahun 1765 Sultan Hasan Salahuddin Kramat Syah memindahkan ibu kotanya ke Japura, tetapi tanggal 5 Januari 1815 dipindahkan lagi ke Rengat oleh Sultan Ibrahim atau Raja Inderagiri XVII.

---

28 *Ibid.*, 1977/1978, hlm. 94
29 *Ibid.*, hlm. 96–97

Sultan Ibrahim inilah yang ikut serta berperang dengan Raja Haji di Teluk Ketapang tahun 1784.

Demikianlah, kekuasaan politik kerajaan ini sama sekali hilang berdasarkan "*Tractat Van Vrede en Vriendschap*" 27 September 1838, berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda, yang berarti jalannya pemerintahan kerajaan Inderagiri ditentukan oleh pemeritah Hindia Belanda.[30]

4. Kerajaan Islam di Jambi

Letak geografis Jambi dengan DAS Batanghari dengan sungai-sungai lainnya memberikan kemudahan untuk kegiatan perdagangan baik lokal, regional, maupun internasional. Hubungan pelayaran dan perdagangannya dengan tempat-tempat di pesisir timur yaitu di Selat Malaka ditandai meunculnya kontak dengan pelayaran dan perdagangan yang bersifat internasional yang sudah ada sejak abad-abad pertama Masehi. Dengan adanya kegiatan pedagang muslim dalam pelayaran dan perdagangan internasional sejak abad ke-7 dan ke-8 M, kemungkinan mereka sudah dapat berhubungan satu dengan lainnya. Meskipun demikian, berita Cina, kitab *Pei-hu-lu* tahun 875 M[31] menyebutkan nama Chan-pei yang didatangi oleh para pedagang Po'sse (orang-orang Persi) untuk mengumpulkan barang dagangan berupa buah-buah *pinang* (*areca nuts*), yang dalam bahasa Sunda disebut *jambe* (mungkin sekali menjadi sebutan *jambi*). Oleh karena pedagang Po'sse adalah pedagang Persi yang tentunya sudah Islam sehingga mungkin pedagang muslim dari Persi atau Iran sudah sampai ke Jambi.[32] Berita Cina tersebut mungkin dapat diperkuat data arkeologi berupa temuan pecahan kaca berwarna gelap dan hijau muda dari Muara Saba, dan juga dari Muara Jambi berupa pecahan kaca berwarna biru tua dan biru muda, hijau, kuning, dan merah tua serta sejumlah permata yang diperkirakan dari abad ke-10–13 M dari Timur Tengah, yaitu dari Arab dan Persi (Iran). Demikian pula temuan pecahan kaca dari dan Wonorejo (Kabupaten Tanjung Jabung), yang diperkirakan dari masa yang sama. Berdasarkan temuan-temuan arkeologis tersebut kemungkinan kehadiran Islam di daerah Jambi itu sejak abad ke-9 dan ke-10–13 M.[33] Jika sejak itu sudah ada islamisasi, mungkin masih terbatas pada perseorangan. Karena islamisasi besar-besaran

30 *Ibid.*, hlm. 94–96

31 O.W. Wolters, *Early Indonesian Commerce. A study of the Origins of Sriwijaya*, Cornell University Press, Ithaca-New York, 1967, hlm. 144

32 Uka Tjandrasasmita, Beberapa Catatan tentang Perdagangan di DAS Batanghari Hubungannya dengan Jaringan Perdagangan Internasional pada Abad-Abad Pertama Sampai Abad XVI, dalam Seminar *Sejarah Melayu Kuno*, Jambi, 7–8 Desember 1992, Pemerintah Daerah Tk. I Jambi bekerja sama dengan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jambi, tahun 316–317 (310–317)

33 Edward Mac Kinnon, *Melayu Jambi Interlocal and Intenational Trade* (11 th to 13th Century). *Ibid.*, 1992, hlm. 125–141

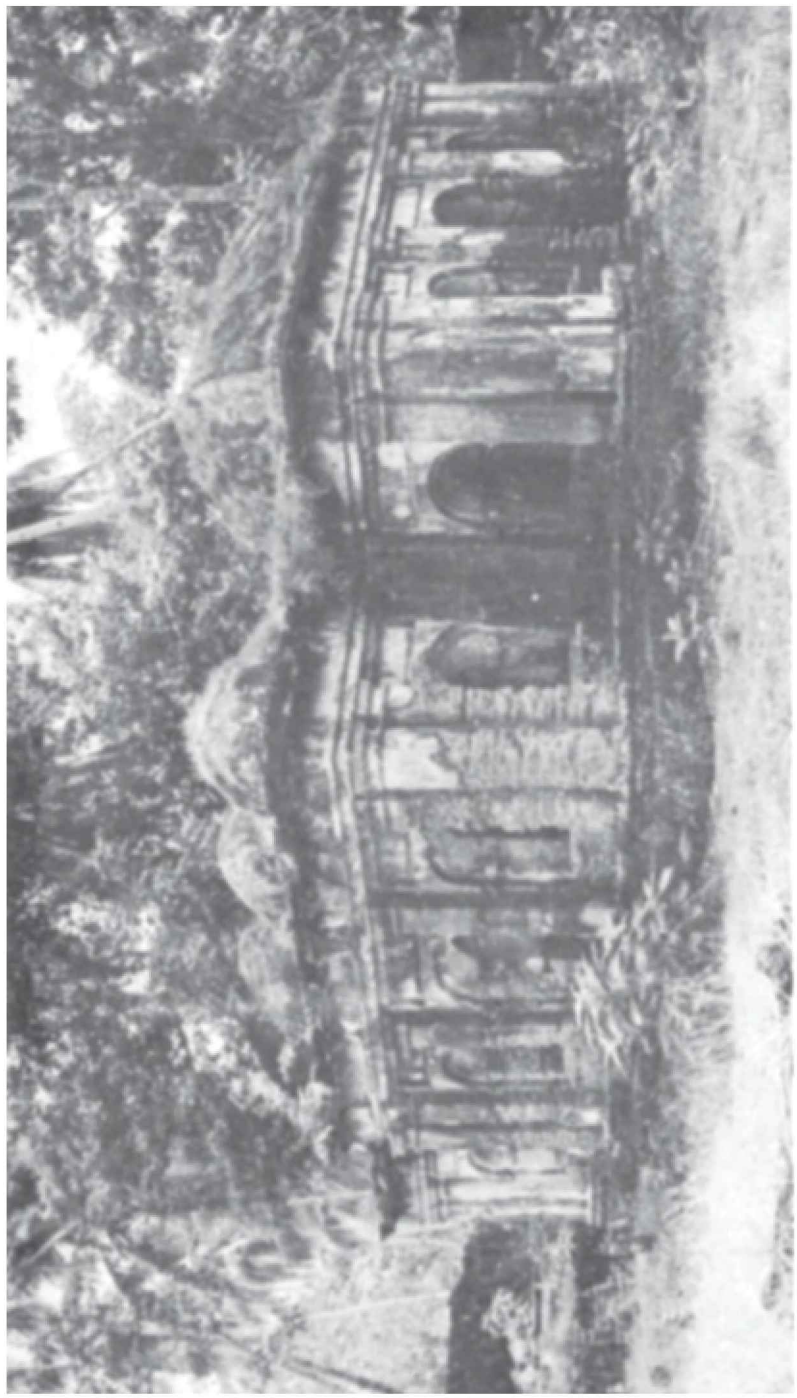

Gambar 2.8 Sisa-sisa keraton Riau di Pulau Penyengat

Gambar 2.9 Masjid di Pulau Penyengat

bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam Jambi sekitar 1500 M di bawah pemerintahan Orang Kayo Hitam yang juga yang meluaskan "Bangsa XII" dari "Bangsa IX" [34] anak Datuk Paduka Berhala. Konon, menurut *Undang-Undang Jambi* Datuk Paduka Berhala adalah seorang dari Turki yang terdampar di Pulau Berhala yang kemudian namanya disebut juga Ahmad Salim yang menikah dengan Putri Salaro Pinang Masak yang sudah muslim, turunan raja-raja Pagarruyung yang kemudian melahirkan Orang Kayo Hitam, Sultan Kerajaan Jambi yang terkenal. Karena itu, kemungkinan besar penyebaran Islam sudah sejak orang tuanya sekitar tahun 1460 M atau pertengahan abad ke-15 M.

Menurut *Sila-Sila Keturunan Raja Jambi*, pernikahan antara Datuk Paduka Berhala dengan Putri Pinang Masak, kecuali Orang Kayo Hitam, juga melahirkan tiga saudaranya, yaitu Orang Kayo Pingai, Orang Kayo Pedataran/Kedataran, dan Orang Kayo Gemuk (seorang putri). Yang menjadi pengganti Datuk Paduka Berhala adalah Orang Kayo Hitam yang beristri salah seorang putri dari saudara ibunya , yaitu Putri Panjang Rambut. Pengganti Orang Kayo Hitam adalah Panembahan Hang di Aer yang setelah wafat dimakamkan di Rantau Kapas sehingga terkenal pula dengan Panembahan Rantau Kapas. Tahun-tahun pemerintahan raja-raja Jambi yang tidak dicantumkan dalam naskah *Sila-Sila Keturunan Raja Jambi*,[35] oleh J. Tideman, berdasarkan catatan dari M.M. Menes, dicoba disusun.[36] Masa pemerintahan Datuk Paduka Berhala beserta Putri Pinang Masak sekitar tahun 1460 M, Orang Kayo Pingai sekitar 1480 M, Orang Kayo Pedataran sekitar 1490 M, sedang masa pemerintahan Orang Kayo Hitam sendiri sekitar 1500 M, Panembahan Rantau Kapas antara 1500–1540 M, Panembahan Rengas Pandak cucu Orang Kayo Hitam sekitar 1540 M. Panembahan Bawah Sawoh cicit Orang Kayo Hitam sekitar 1565 M. Setelah Panembahan Bawah Sawoh meninggal diganti Panembahan Kota Baru sekitar tahun 1590 M dan kemudian diganti lagi oleh Pangeran Keda yang bergelar Sultan Abdul Khar tahun 1615 M. Sejak masa pemerintahan kerajaan Islam Jambi di bawah Sultan Abdul Kahar itulah mulai kedatangan orang-orang VOC untuk hubungan perdagangan, pembelian hasil-hasil kerajaan Jambi terutama lada.[37] Dengan izin Sultan Jambi tahun 1616 M

34 J. Tideman met medewerking van Ph.F.L. Sigar, *Djambi*, "Uitgegeven met de steun van het Zuid Sumatra Instituut Koninklijke Vereeniging", Kolonial Instituut Amsterdam, Mededeeling No.XLIII, Amsterdam, 1938, hlm. 29

35 Iskandar Zakaria (Ketua Tim) dkk., *Kajian dan Analisa Undang-Undang dan Piagam dan Kisah Negeri Jambi*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, Tahun 1991/1992, hlm. 22–34

36 J. Tideman; *Djambi*, Amsterdam, 1938, hlm. 28–30, Lihat 'Stamboom van he Djambische Vorsten Geslacht, Bijiage V, hlm. 82–83

37 *Ibid*.

Kompeni Belanda (VOC) mendirikan lojinya di Muara Kompeh. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian, tahun 1636, loji tersebut ditanggalkan karena rakyat Jambi tidak mau menjual hasil-hasil buminya antara lain lada kepada VOC. Sejak itu, hubungan kerajaan Jambi dengan VOC makin renggang dan tahun 1642 VOC masa pemerintahan Gubernur Jenderal Antonio van Diemn menuduh Jambi bekerja sama dengan Mataram. Kompeni Belanda jelas sudah mulai campur tangan urusan kerajaan Jambi. Dengan menyodorkan suatu perjanjian tahun 1643 yang hakikatnya memaksakan monopoli perdagangan, tetapi ditolak, akhirnya Sultan Abdul Kahar berhenti dan digantikan oleh Sultan Abdul Jalil yang dapat mengikuti kehendak VOC.

Pada masa pemerintahan Sultan Sri Ingalogo (1665–1690) terjadi peperangan antara Kerajaan Jambi dengan Kerajaan Johor di mana kerajaan Jambi mendapat bantuan VOC dan akhirnya menang. Meskipun demikian, sebagai upah bantuan itu VOC berturut-turut menyodorkan perjanjian tanggal 12 Juli 1681, 20 Agustus 1681, 11 Agustus 1683, 20 Agustus 1683 yang pada hakikatnya perjanjian-perjanjian tersebut menguatkan monopoli pembelian lada dan sebaliknya VOC memaksakan untuk penjualan kain dan opium.[38] Setelah penyerangan kantor dagang VOC oleh rakyat Jambi, dan terbunuhnya kepala pedagang VOC, Sybrandt Swart tahun 1690 yang dituduhkan Sultan Jambi terlibat, maka Sultan Sri Ingalogo ditangkap dan diasingkan. Mula-mula ke Batavia dan akhirnya ke Pulau Banda. Sultan penggantinya adalah Pangeran Dipati Cakraningrat yang bergelar Sultan Kyai Gede. Dengan demikian, Sultan Ratu yang lebih berhak disingkirkan dan ia dengan sejumlah pengikutnya pindah ke Muaratebo, membawa keris pusaka *Sigenjei*, keris lambang bagi raja-raja Jambi yang mempunyai hak atas kerajaan. Sejak itulah terus-menerus terjadi konflik yang memuncak dengan pemberontakan dan perlawanan terhadap Sultan Taha Saifuddin yang dipusatkan terutama di daerah Batanghari Hulu. Di daerah inilah, pada pertempuran yang sengit, Sultan Taha gugur tanggal 1 April 1904 dan dimakamkan di Muaratebo.[39]

5. Kerajaan Islam di Sumatra Selatan

Sebagaimana telah disebut-sebut di bagian muka bahwa para pedagang muslim dari Arab, Persi (Iran), dan dari negeri-negeri di Timur Tengah lainnya sejak abad ke-7 dan ke-8 M sudah berperan aktif dalam pelayaran dan perdagangan internasional melalui Selat Malaka. Masa itu sesuai

38 Lihat perjanjian-perjanjian dalam *Corpus Diplomatic Nederlandsch Indicum*, Derde Deel (1676–1691), hlm. 275–280, 281–282, 324–328

39 J. Tideman; *Ibid.*, 1938, hlm. 40

dengan tumbuh kembangnya kerajaan Sriwijaya dari segi politik, ekonomi–perdagangan, dan kebudayaan. Karena itulah tidak mustahil para pedagang muslim tidak singgah di ibu kota kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddhis, paling tidak untuk melakukan hubungan perdagangan. Berita dari I-Thing seorang musafir dan agama Buddhis Cina dalam perjalanannya ke India menceritakan tentang kehadiran kapal-kapal para pedagang muslim dari Arab (Ta-shih dan Persi (Posse) di pelabuhan Bhoga (Palembang). Berita itu diperkuat oleh berita-berita Arab dan bahkan pada masa itu ada dua buah surat dari Maharaja Sriwijaya kepada dua khalifah di Timur Tengah, yaitu yang ditujukan kepada Khalifah Mu'awiyah (41 H/661 M) dan yang ditujukan kepada Khalifah Umar ibn. Abd Al-'Aziz (99–102 H/717–20 M.)[40] Meskipun kemungkinan para pedagang muslim dari Arab dan Persi (Iran) bahkan dari negeri-negeri lainnya di Timur Tengah, belum dapat dikatakan di daerah Palembang yang dianggap sebagai pusat kerajaan Sriwijaya terjadi islamisasi secara besar-besaran mengingat kerajaan Sriwijaya yang bercorak Budddis kekuasaan politiknya masih kuat. Sejak kerajaan tersebut mengalami kelemahan bahkan runtuh pada sekitar abad ke-14 M mulailah islamisasi sehingga pada akhir abad ke-15 M muncul komunitas muslim di Palembang.

Raden Patah menurut tradisi historis adalah anak raja Majapahit, Brawijaya dengan putri Cina. Karena itulah setidak-tidaknya Palembang pada akhir abad ke-l6 sudah merupakan *enclaave* Islam terpenting atau bahkan pusat Islam di bagian selatan Pulau Emas. Bukan saja karena reputasinya sebagai pusat perdagangan yang banyak dikunjungi pedagang Arab/Islam pada abad-abad kejayaan Sriwijaya, melainkan juga dibantu oleh kebesaran Malaka yang tidak pernah melepaskan keterlibatannya dengan Palembang sebagai tanah asalnya.[41] Bagaimanapun Palembang sekitar awal abad ke 16 M sudah ada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Demak masa pemerintahan Pate Rodim seperti diberitakan Tomé Pires (1512–1515) bahkan waktu itu penduduk Palembang lebih kurang 10.000 orang, tetapi banyak yang mati dalam serangan membantu Demak terhadap Portugis di Malaka. Mereka berdagang dengan Malaka dan Pahang dengan jung-jung sebanyak 10 atau 12 setiap tahun membawa beras dan bahan makanan, katun, rotan, lilin, madu, anggur, emas, besi, dan kapur barus.[42] Meskipun kedudukan Palembang sebagai pusat penguasa muslim mungkin sudah sejak 1550 M, nama tokoh yang tercatat menjadi sultan pertama Kesultanan

40 Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama ...*, Penerbit Mizan, Bandung, 1994, hlm. 38–43

41 Taufik Abdullah, *Beberapa Aspek Perkembangan Islam di Sumatra Selatan*, Editor K.H.D., *Gajahmada*, Sri Edi Swasono, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1986, hlm. 53–66

42 Armando Cortesao, *Suma Oriental of Tomé Pires*, 1944/1967, hlm. 154–156

Palembang adalah Susuhunan Sultan Abdurrahman Khalifat al-Mukminin Sayidil Iman/ Pangeran Kusumo Abdurrahim/Kyai Mas Endi. Sejak tahun 1659 sampai I706. Palembang berturut-turut diperintah oleh 11 sultan sejak tahun 1706 dan sultan yang terakhir, Pangeran Kromojoyo/Raden Abdul Azim Purbolinggo (1823–1825).[43] Perlu dicatat bahwa dalam *Sajarah Banten* Palembang pada tahun 1596 pernah diserang Kesultanan Banten di bawah pimpinan Maulana Muhammad yang gugur dan karenanya ia digelari Pangeran Seda ing Palembang atau Pangeran Seta ing Rana.[44] Penyerangan oleh Banten ke Palembang bukan masalah agama melainkan ekonomi untuk menambah penghasilan bahan ekspor dari Kesultanan Banten.

Kontak pertama Kesultanan Palembang dengan VOC ialah pada tahun 1610. Akan tetapi, dengan tidak memedulikan kepentingannya, selalu terjadi kerenggangan. Pada tahun 1658 wakil dagang VOC, Ockersz beserta pasukannya dibunuh dan dua buah kapalnya yaitu Wachter dan Jacatra tanggal 4 November 1659 terjadi peperangan antara Kesultanan Palembang dengan VOC di bawah pimpinan Laksamana Joan van der Laen. Keraton dibakar. Demikian pula Kuta dan permukiman penduduk Cina, Portugis, Arab, dan bangsa-bangsa lainnya yang berada di seberang Kuta. Kota Palembang dapat direbut lagi oleh pasukan Palembang dan kemudian dilakukan pembangunan-pembangunan kecuali Masjid Agung yang hingga kini masih dapat dipastikan meskipun sudah ada beberapa perubahan mulai dibangun 28 Jumadil Awal 1151 H/26 Mei 1748 pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I (1724–1758). Pada masa pemerintahan putranya yaitu Sultan Ahmad Najmuddin (1758–1774) syiar agama Islam makin pesat. Pada waktu itu berkembanglah hasil-hasil sastra keagamaan dari tokoh-tokoh antara lain Abdul al-Sammad al-Palembani, Kemas Fachr Al-Din, Kemas Muhamamad bin Ahmad, Muhammad Muhyi Al-Din bin Syeikh Shibab Al-Din, dan Muhammad Makruf bin Abdullah.[45] Mengenai ulama terkenal yang namanya secara lengkap ialah 'Abd Al-Shamad bin 'Abd Allah Al-Jawi Al-Palimbani (1704–1789), telah dibicarakan Dr. Azyumardi Azra secara lengkap tentang riwayatnya, ajarannya serta kitab-kitabnya dan guru-guru sufi serta tarekatnya.[46]

Dalam perjalanan sejarah Kesultanan Palembang, sejak pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II, mendapat serangan dari pasukan Hindia Belanda Juli 1819 yang antara lain dikenal sebagai Perang Menteng (diambil dari kata Muntinghe), serangan besar-besaran oleh pasukan Belanda yang armadanya dipimpin J.C. Wolterboek pada bulan Oktober 1819 juga dapat

43 H. Muhammad Syamsu As., Drg., *Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya*, Penerbit Lentera, Jakarta, 1999, hlm. 28–29

44 Hoesein Djajadiningrat, *Tinjauan Kritis tentang Sajarah Banten*, Penerbit Djambatan, 1983, hlm. 169

45 Djohan Hanafiah, *Palembang Zaman Bari. Clint Palembang Tempo Doeloe*, Humas Pemerintah Kota Madya Daerah Tk. 11 Palembang, 1988, hlm. 6–10

46 Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama* ..., 1994, hlm. 243–251

dipukul mundur oleh prajurit-prajurit Kesultanan Palembang. Akan tetapi, pihak Belanda pada bulan Juni 1821 mencoba lagi melakukan penyerangan dengan banyak armadanya di bawah pimpinan panglima Jenderal de Kock. Sultan Mahmud Badaruddin II ditangkap kemudian dibuang ke Ternate. Kesultanan Palembang sejak 7 Oktober 1823 dihapuskan dan langsung di bawah pemerintah Hindia Belanda dengan penempatan Residen Jon Cornelis Reijnst yang tidak diterima Sultan Ahmad Najaruddin Prabu Anom yang karena memberontak akhirnya ia tangkap kemudian diasingkan ke Banda, seterusnya ke Manado.[47]

6. Kerajaan Islam di Sumatra Barat

Islam di daerah Lampung tidak akan dibicarakan karena daerah ini sudah sejak awal masuk kekuasaan Kesultanan Banten. Pada bagian ini akan diuraikan penyebaran Islam di kerajaan Islam yang ada di Sumatra Barat. Awal masuk dan berkembangnya Islam di daerah Sumatra Barat masih sukar dipastikan. Berita Cina dari dinasti T'ang menyebutkan bahwa pada sekitar abad ke-7 M (674 M) ada kelompok orang Arab (Ta-shih) dan yang oleh W.P. Goeneveldt perkampungan mereka ada di pesisir barat Sumatra.[48] Berita permukiman orang-orang Arab di sana anehnya pada abad-abad berikutnya sama sekali tidak ada sehingga masih memerlukan pembuktian baik data historis maupun data arkeologis. Selain pendapat tersebut, ada juga yang berpendapat bahwa Islam datang dan berkembang di daerah Sumatra Barat baru sekitar akhir abad ke-14 M atau abad ke-15 M, dan Islam sudah memperoleh pengaruhnya di kerajaan besar Minangkabau.[49] Bahwa Islam sudah masuk ke daerah Minangkabau pada sekitar akhir abad ke-15 M mungkin dapat dihubungkan dengan cerita yang terdapat dalam naskah kuno dari Kerinci tentang Siak Lenih Malin Sabiyatullah asal Minangkabau yang mengenalkan Islam di daerah Kerinci,[50] semasa dengan Putri Unduk Pinang Masak, Dayang Baranai, dan Parpatih Nan Sabatang, yang kesemuanya berada di daerah Kerinci. Tomé Pires (1512–1515) juga mencatat keberadaan tempat-tempat, seperti Pariaman, Tiku, bahkan Barus, di daerah Minangkabau ada tiga raja yang ia ragukan apakah salah seorang sudah beragama Islam atau yang kedua lainnya masih belum Islam. Yang lebih jelas beritanya tentang peran perdagangan yang dilakukan melalui pelabuhan Pariaman, Tiku, dan

47 Djohan Hanafiah, *Palembang Zaman Bari*, 1988, hlm. 13–17

48 W.P. Groenveldt, *Historical Notes ...*, Bhratara, Jakarta, 1960, hlm. 14 catatan 4

49 Thomas W. Arnold, *Sejarah Da'wah Islam*, Penerbit Wijaya Jayakarta, 1981, hlm. 322

50 Iskadar Zakaria B.A. (Ketua Yim), *Penelitian dan Pengkajian Naskah Kuno Daerah Jambi I*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, Jakarta, hlm. 86, 124

Barus. Ketiga tempat itu dikatakan Pires sebagai kunci untuk ke tanah Minangkabau. Dari ketiga tempat ini dihasilkan barang-barang perdagangan, seperti emas, sutra, damar, lilin, madu, kamper, dan kapur barus. Setiap tahun ketiga daerah tersebut didatangi kapal kapal Gujarat dua atau tiga kapal yang membawa barang dagangannya antara lain pakaian.[51]

Sejak abad ke-15 dan ke-16 hubungan antara daerah Sumatra Barat melalui pelabuhan-pelabuhannya dengan berbagai negeri jelas dalam hubungan perdagangan antara lain dengan Aceh. Pada masa Iskandar Muda, Pariaman merupakan salah satu daerah yang berada di bawah pengaruh kerajaan Aceh dan demikian pula sejak penggantinya. Pada abad ke-17 M ada ulama terkenal di Sumatra Barat yang merupakan salah seorang murid Abd Al-Rauf Al-Sinkili yang bernama Syekh Burhan Al-Din (1646–1692) di Ulakan. Ia mendirikan surau, dan tidak salah lagi Ulakan merupakan pusat keilmuan Islam di Minangkabau. Tarikat Syathariyyah yang diajarkannya tersebar di daerah Minangkabau dan ajaran tasawufnya cenderung kepada syariat dan dapat dikatakan sebagai ajaran neosufisme. Syekh Burhan Al-Din dalam masyarakat setempat dikenal sebagai Tuanku Ulakan. Penyebaran Islam yang sifatnya pembaruan dan berjangkauan lebih jauh lagi yang mencapai klimaksnya pada awal abad ke-19.[52]

Sejak awal abad ke-16 sampai awal abad ke-19 itu di daerah Minangkabau senantiasa terdapat kedamaian sama-sama saling menghargai antara Kaum Adat dan Kaum Agama antara hukum adat dan syariat Islam sebagaimana tercetus dalam pepatah, "Adat bersandi Syara, Syara bersandi Adat." Sejak awal abad ke-19 timbul pembaruan Islam di daerah Sumatra Barat pengaruh Wahabiah di mana terjadi "Perang Padri", yakni perang antara Golongan Adat dan Golongan Agama. Wilayah Minangkabau mempunyai seorang raja yang berkedudukan di Pagarruyung. Raja tetap dihormati sebagai lambang negara, tetapi tidak mempunyai kekuasaan karena hakikatnya kekuasaan ada di tangan para Penghulu yang tergabung dalam Dewan Penghulu atau Dewan Nagari. Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau lambat laun terjadi kebisaan buruk: main judi, nyabung ayam, minum madat, dan minum minuman keras. Para pembesarnya tidak dapat mencegah bahkan di antaranya turut serta. Dalam pada itu kaum ulamanya yang kelak menamakan diri mereka kaum "Padri" berkeinginan mengadakan perbaikan mengembalikan kepada kehidupan kemurnian Islam. Di antara kaum ulama itu Tuanku Kota Tua dari kampung Kota Tua di dataran Agam mengajarkan kemurnian Islam berdasarkan Alquran dan Hadis. Sementara itu, tahun 1803 tiga orang haji kembali dari Mekah, yaitu Haji Miskin dari Pandai Sikat, Haji Sumanik dari Delapan Kota, dan Haji Piobang dari Tanah Datar. Ketika

51 Armando Cortesao, *Suma Oriental* .... Hakluyt Society, 1944, hlm. 161,164–165
52 Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama* ..., Penerbit Mizan, Bandung, 1944, hlm. 109–110

Haji Miskin melarang penyabungan ayam di kampungnya, Kaum Adat melawan sehingga Haji Miskin dikejar-kejar sampai ke Kota Lawas. Di daerah ini ia mendapat perlindungan dari Tuanku Mensiangan. Dari sini Haji Miskin lari ke Kamang bertemu dengan Tuanku Renceh yang akhirnya melalui pertemuan beberapa tokoh ulama terutama di daerah Luhak Agam dibentuklah kelompok yang disebut "Padri" yang tujuan utamanya memperjuangkan tegaknya sara dan membasmi kemaksiatan. Mereka itu terdiri dari Tuanku nan Renceh, Tuanku Basa, Tuanku Galung, Tuanku Lubuk Air, Tuanku Padang Lawas, Tuanku Padang Luar, Tuanku Kubu Ambelan, dan Tuanku Kubu Senang. Kedelapan ulama Padri itu disebut *Harimau nan Salapan*.[53] Perjuangan Kaum Padri itu makin kuat, tetapi pihak Kaum Adat dibantu Belanda untuk keuntungan politik dan ekonominya sehingga Kaum Padri melawan dua kelompok Kaum Adat dan Kaum Penjajah Belanda termasuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme Belanda. Apabila pada abad ke-17–18 VOC selalu membantu mengusir pengaruh kekuasaan kerajaan Aceh di daerah Minangkabau, meskipun terkadang terjadi antara lain perlawanan rakyat Pauh yang mencoba menyerang kota Padang pada tahun 1665 sampai 1740 tidak kurang dari 20 kali pemberontakan. Karena itulah Pauh mendapat julukan *Kota Pahlawan*.[54] Pada awal abad ke-19 Belanda dengan celah pertentangan antara Kaum Adat dengan Kaum Ulama dalam Perang Padri, memakai kesempatan demi keuntungan politik dan ekonominya. Perang Padri yang cukup lama itu dapat dibagi atas tiga masa, yaitu masa pertama berlangsung antara 1821–1825, ditandai dengan meluasnya perlawanan Padri dengan seluruh rakyatnya ke seluruh daerah Minangkabau. Masa kedua antara tahun 1825–1830, ditandai dengan meredanya pertempuran karena Belanda berhasil mengadakan perjanjian-perjanjian dengan gerakan Padri mulai melemah. Masa ketiga antara tahun 1830–1838, ditandai dengan perlawanan Padri yang meningkat dan penyerbuan Belanda secara besar-besaran, dan diakhiri dengan tertangkapnya pemimpin-pemimpin Padri terutama Tuanku Imam Bonjol dalam pertempuran Benteng Bonjol tanggal 25 Oktober 1837. Dengan demikian, pemerintah Hindia Belanda pada akhir tahun 1838 berhasil mengukuhkan kekuasaan politik dan ekonominya di daerah Minangkabau atau di Sumatra Barat. Tuanku Imam Bonjol kemudian diasingkan ke Cianjur, tanggal 19 Januari 1839 dibuang ke Ambon, dan pada tahun 1841 dipindahan ke Manado kemudian ia wafat di tempat itu pada tanggal 6 November 1864.[55]

---

53 Taufik Abdullah, Dr (Editor), *Sejarah Ummat Islam Indonesia,* diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, 1991, hlm. 156

54 Rusli Amran, *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang,* Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1981, hlm. 201–212

55 R.Z. Leirissa (Editor khusus), *Nusantara di Abad ke-18 dan ke-19, Sejarah Nasional Indonesia IV,* Departemen Pendidian dan Kebudayaan PN Balai Pustaka Jakarta, 1984, hlm. 172, 183–184

B. Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa

Kehadiran dan penyebaran Islam di pesisir utara Pulau Jawa dapat dibuktikan berdasarkan data arkeologis dan sumber-sumber babad, hikayat, legenda, serta berita-berita asing. Kehadiran Islam baik para pedagang maupun mubalig muslim melalui kota-kota yang sejak semula sudah berfungsi sebagai pelabuhan di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu–Buddha. Di Leran (Gresik) terdapat nisan kubur yang memuat nama Fatimah binti Maimun bin Hibatullah (wafat 475 H/1082 M).[56] Kemudian di Gresik terdapat makam Maulana Malik Ibrahim (wafat 822 H/1419 M)[57] sedang di Troloyo dan di Trowulan, yang diperkirakan bekas pusat kerajaan Majapahit, terdapat sejumlah nisan kubur muslim yang berangka tahun Saka dari abad ke-13–15 M.[58]

Berita asing dari Cina yang ditulis Ma-Huan dari sekitar tahun 1433 M dan berita Portugis terutama dari Tomé Pires (1512–1515) memberikan gambaran tentang kehadiran para pedagang dan ulama di kota-kota pelabuhan pesisir utara Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.[59] Babad-babad seperti *Babad Tanah Jawi, Babad Sengkala, Babad Tjerbon, Hikayat Hasanuddin, Purwaka Caruban Nagari,* dan lainnya seperti halnya H.J. de Graaf dan Th. G. Th Pigeaud, digunakan untuk historiografi kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, sangat membantu baik untuk masa islamisasi maupun untuk masa perkembangannya.[60] Islamisasi yang terjadi di beberapa kota pesisir utara Jawa dari bagian timur sampai ke barat lambat laun menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan Islam, berturut-turut dari Demak ke arah barat muncul Cirebon dan Banten, dan dari Demak ke arah pedalaman muncul kerajaan Pajang dan terutama kerajaan Mataram.

---

56 Ravaisse, Paul, L'inscription qoufique de Leran a Java, *TBG*, 85, 1925, hlm. 668–703; J.P. Moquette, Mohammedaansche Inscriptie op Java n. de grafsteen te Leran, *Handelingen van het Eerste Congres Voor de Taal-Land en Vokenkunde van Java*, Weltevreen, 1921, hlm. 391–399

57 Moqutte, J.P., De datum op den grafsteen van Malik Ibrahim te Gresik, *TBG*, 54, 1912, hlm. 208–214

58 Damais, L.Ch, Etude Javanaises I. Les Tombes Musulmans dateest de Tralaya, *BEFEO*, XLVIII, 2, Paris, 1957, hlm. 353–415; Uka Tjandrasasmita, "Majapahit dan Kedatangan Islam serta prosesnya", *700 Tahun Majapahit* (1293–1993), *Suatu Bunga Rampai* (Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo (Ketua), diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Tk. I Jawa Timur, Percetakan V Tiga Dara, Surabaya, 1993, hlm. 277–289

59 Milles, J.V.G., *Ma Huan Ying–yai Sheng-lan The Overall Survey of the Ocean's Shores* (1433).The Hakluyt Society, Extra Series No.43, Cambridge, 1970; Armando Coretsao, *The Suma Oriental of Tomé Pires* ..., Vol. I, II Hakluyt Society, 1944, 1967

60 Graaf, H.J. de- Th.G.Th. Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa Peralihan dari Majapahit ke Mataram*, Penerbit PT Pustaka Grafitipers, 1986

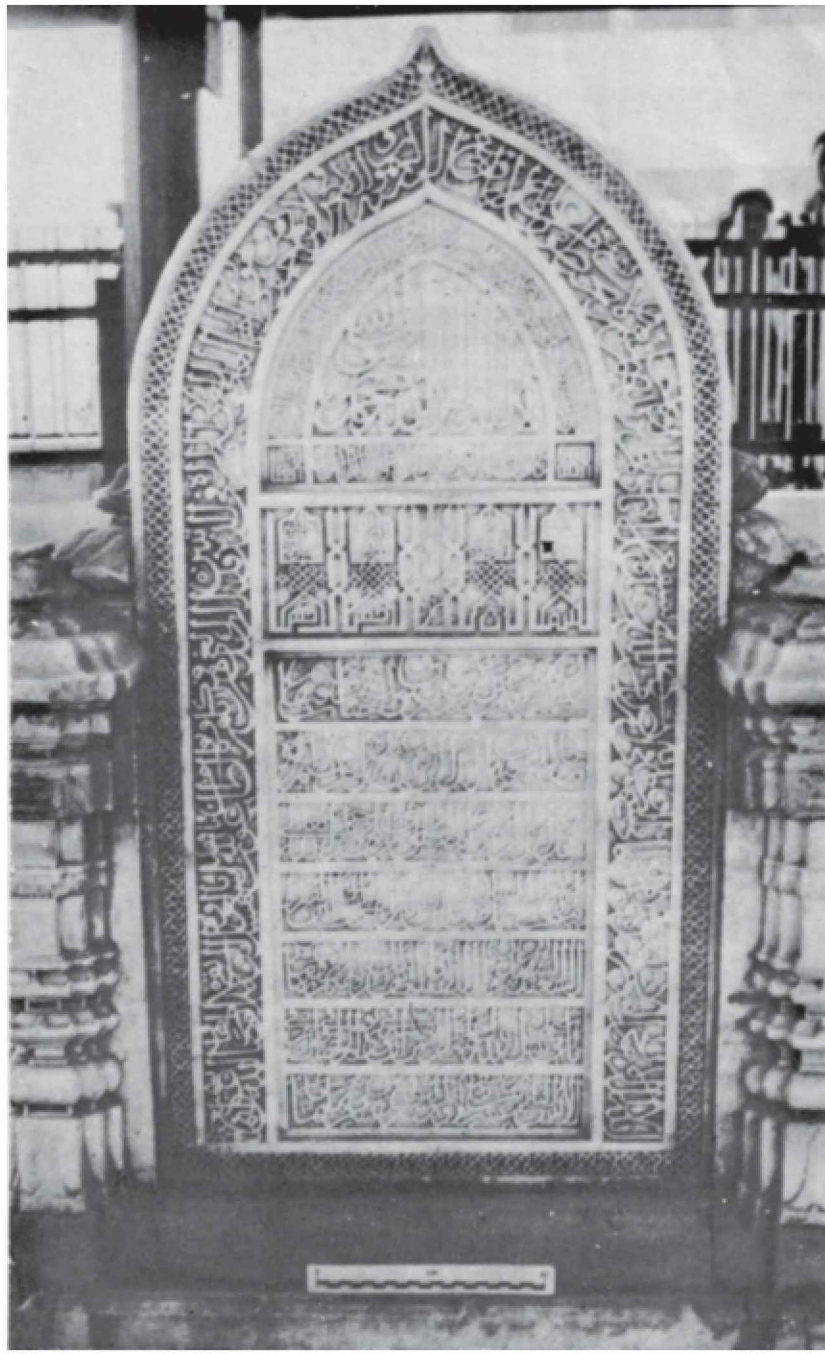

Gambar 2.10 Makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 M di Gresik, Jawa Timur

1. Kerajaan Demak

Demak mempunyai letak geografis di pesisir utara dengan lingkungan alamnya yang subur, dan semula adalah sebuah kampung yang dalam babad lokal disebut *Gelagahwangi*. Tempat inilah konon dijadikan permukiman muslim di bawah pimpinan Raden Patah yang kehadirannya di tempat tersebut atas petunjuk seorang wali bernama Sunan Rahmat atau Ampel. Raden Patah ialah seorang putra Brawijaya dari ibunya putri Cina (Cempa). Ketika Raden Patah masih dalam kandungan ibunya oleh Brawijaya dititipkan kepada gubernur di Palembang, di tempat itulah Raden Patah lahir.[61] Tempat itu kemudian tumbuh dan berkembang sebagai pusat kerajaan Islam pertama-tama di Pulau Jawa sejak akhir abad ke-15 M, mungkin sejak lenyapnya ibu kota kerajaan Majapahit di daerah Trowulan oleh Wangsa Girindrawardhana dari kerajaan Kadiri tahun 1474. Babad lokal menempatkan keruntuhan Majapahit tahun 1478 M, dengan candrasengkalanya, *Sirna Hilang Kertaning Bhumi* (1400 Saka). Mungkin angka tahun ini dapat dikaitkan pula dengan candrasengkala *memet* yang digambarkan sebagai bulus pada dinding mihrab Mesjid Agung Demak yang dapat diartikan tahun 1401 Saka atau 1479 M.[62] Berdasarkan berita Tomé Pires (1512–1515) Demak diberitakan merupakan kota besar dengan jumlah rumah kurang lebih 8.000 atau 14.000. Penguasa Demak dikatakan Pate Rodim dan kakeknya berasal dari Gresik. Yang menarik perhatian kita Tomé Pires juga memberitakan bahwa di daerah pedalaman masih ada kerajaan yang bercorak Hindu dengan rajanya Batara Vigiaya dan patihnya yang lebih berkuasa ialah Gusti Pate. Yang dimaksud Tomé Pires dengan Batara Vigiaya jelas Brawijaya seperti terdapat pada babad-babad. Brawijaya lebih kurang setengah abad sudah meninggalkan pusat kerajaan Majapahit dan pindah ke Daha atau Kadiri yang akhirnya jatuh pada tahun 1526 kepada kerajaan Islam Demak.[63]

Raja Demak yang kedua dalam babad dikenal dengan nama Pangeran Sabrang Lor meskipun pemerintahannya sebentar. Dalam berita Tomé Pires dikenal seorang yang bernama Pate Unus yang mengadakan serangan ke Malaka tahun 1513, keberangkatan dengan armadanya dari Japara yang berfungsi sebagai pelabuhan kerajaan Demak[64] H.J. de Graaf berpendapat bahwa raja kedua kerajaan Demak seperti disebut Tomé Pires ialah Pate Rodim Sr., seorang yang tegas dalam mengambil keputusan dan seorang

---

61 Graaf, H.J. de-Th. G. Pigeaud, *Ibid.*, hlm. 41

62 Ichsan Syamlawi, dkk., *Keistimewaan Masjid Agung Demak*, CV Saudara Salatiga, 1983, hlm. 18

63 Graaf, H.J. de, Tomé Pires, *Suma Oriental en het Tijdperk van Godsdienstovergang op Java, BKI*, 108, 1952, hlm. 140–141, 170–171; Cortesao, Armando, *Suma Oriental of Tomé Pires*, 1944/1967, hlm. 184–185

64 Cortesao, Armando, *Suma Oriental of Tomé Pires*, 1944, hlm. 187–188

Gambar 2.11 Menara Kudus dari abad ke-16 M

kesatria, bangsawan, dan teman seperjuangan Pate Zaenal dari Gresik.[65] Raja ketiga kerajaan Demak ialah Pangeran atau Sultan Trenggana yang pada waktu Tomé Pires ke Demak yang disebut Pate Rodim Jr. (Muda). Ia meluaskan kekuasaannya ke Jawa bagian barat terutama mengirimkan pasukannya yang dipimpin oleh Fadhillah Khan yang berasal dari Pasai untuk menyerang Kalapa tahun 1527. Sebelum ke Kalapa ia dengan pasukannya singgah di Cirebon dan juga dengan dorongan Sunan Gunung Jati sebagai mertuanya berangkat ke Kalapa dibarengi pasukan gabungan dari Cirebon. Dari arah barat pelabuhan Kalapa diserang sehingga armada Portugis di bawah Fransisco de Sa dipukul mundur dan Kalapa akhirnya dapat direbut dan kemudian Fadhillah Khan mengganti nama kota pelabuhan itu menjadi Jayakarta.[66] Ke Jawa bagian timur Trenggana juga meluaskan politiknya terutama menundukkan daerah-daerah yang masih beragama Hindu yaitu kecuali Kadiri tahun 1527, juga Tuban, Wirasari tahun 1528, Gagelang (Madiun) tahun 1529, Lendangkungan tahun 1530, Surabaya tahun 1531, Pasuruan tahun 1535, Panurakan, Lamongan, Blitar, dan Wirasaba antara tahun 1541 dan 1542, Gunung Penanggungan tahun 1543, Mamenang Thanu tahun 1544, Sengguruh tahun 1545, Balambangan menurut *Babad Sangkala* diserang tahun 1546, tetapi Sultan Trenggana gugur sehingga kerajaan Balambangan belum Islam.[67]

Penting dicatat di sini bahwa raja-raja Demak terkenal sebagai pelindung agama sehingga antara raja-raja dengan kaum ulama erat bergandengan, terutama dengan Wali Sanga. Pendirian Masjid Agung Demak oleh para wali dengan arsiteknya Sunan Kali Jaga merupakan pusat dakwah para wali, termasuk Wali Sanga, yaitu Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Gunungjati, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Darajat, Sunan Giri, dan Syekh Lemah Abang/Siti Jenar. Menurut *Hikayat Hasanuddin*, yang pernah menjadi imam Masjid Agung itu adalah Pangeran Bonang (sesudah tahun 1490–1506; Makdum Sampang (tahun 1506–1500); Kiai Pembayun (1515–sebelum 1521) pindah ke Japara; Penghulu Rahmatullah (tahun 1524 ditetapkan oleh Sunan Gunungjati).[68]

2. Kerajaan Pajang

Sejak wafatnya Pangeran Trenggana timbul perebutan kekusaan di kalangan keluarga. Pangeran Trenggana mempunyai enam putra dan putri, yaitu Pangeran Mukmin yang diangkat menjadi wali oleh Sunan Giri dengan

---

65 Graaf, H.J. de-Th. G. Th. Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam Di Jawa*, PT Pustaka Grafitipers, 1986, hlm. 43–44

66 Atja, *Tjarita Purwaka Tjaruban Nagari* (Sedjarah Muladjadi Tjirebon), diterbitkan oleh Ikatan Karyawan Museum, Jakarta, 1972, hlm. 23, 57

67 Graaf, H.J. de- Th. G. Th. *op. cit.*, 1986, hlm. 65–66

68 Graaf, H.J. de- Th. G. Th. Pigeaud, *Ibid.*, hlm. 55

gelar Sunan Prawata; putri yang menikah dengan Pangeran Langgar, putra Kyai Gede Sampang di Madura; putri yang menikah dengan Pangeran Hadiri, Bupati Kalinyamat; putri yang menikah dengan Bupati Pajang Hadiwijaya (Jakatingkir); putri yang menikah dengan Panembahan Pasarean putra Sunan Gunungjati; Pangeran Timur yang kemudian menjadi bupati di Madiun. Akibat perebutan kekuasaan di kalangan keluarga dan kerabat tersebut, terjadi perselisihan politik di antara Wali Sanga yang masing-masing menjadi pendukung untuk pengangkatan penguasa-penguasa.[69] Setelah Pangeran Trenggana diganti oleh Sunan Prawoto, ia dibunuh oleh Arya Penangsang dari Jipang pada tahun 1549. Sekarang giliran Arya Penangsang, ia pun dibunuh oleh ipar Sunan Prawoto yaitu Jaka Tingkir.

Jaka Tingkir adalah murid Ki Ageng Pengging yang semula menjadi seorang tamtama di kerajaan Demak di bawah pemerintahan Pangeran Trenggana, karena keahliannya ia dijadikan menantu oleh Sultan Demak. Setelah berhasil membunuh Aria Penangsang, ia menobatkan dirinya sebagai Sultan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Sultan Pajang mulai melakukan peluasaan kekuasaan sehingga beberapa daerah sekitarnya antara lain Jipang dan Demak sendiri mengakui kekuasaan kerajaan Pajang. Demikian pula ia meluaskan pengaruhnya ke daerah pesisir utara, seperti Japara, Pati, bahkan ke arah barat sampai Banyumas. Setelah wafat tahun 1587 ia digantikan oleh putranya, yaitu Pangeran Benawa. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Pajang kehilangan daerah Mataram yang masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya telah diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan, anak Ki Ageng Ngenis atas jasanya dalam pembunuhan terhadap Sunan Prawata.[70] Peralihan pusat kekuasaan dari Demak kemudian ke Pajang sampai ke Mataram merupakan pergeseran pusat pemerintahan dari daerah pesisir ke daerah pedalaman sehingga terjadi perubahan sifat kerajaan maritim ke kerajaan agraris.

3. Kerajaan Mataram

Mataram merupakan daerah yang subur, terletak antara Kali Opak dan Kali Praga yang mengalir ke Samudra Hindia dan memberikan kemungkinan pertumbuhan dan perkembangan pusat kerajaan Mataram. Di atas telah dikatakan bahwa daerah yang asalnya termasuk kerajaan Pajang, kemudian dihadiahkan kepada Ki Ageng Pamanahan, anak Ki

69 Atmodarminto, R. *Babad Demak dalam Tafsir Sosial Politik*, Penerjemah: Saudi Berlian, Mellinium Publisher PT Dyatama Lellinia, Jakarta, 2000, hlm. 122–123

70 Taufik Abdullah, Dr. (Editor), *Sejarah Ummat Islam Indonesia*, diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, 1991, hlm. 70–71

Ageng Ngenis. Di tempat inilah Ki Ageng Pamanahan mendirikan keraton tahun 1578, tetapi setelah beberapa tahun mendiami keraton, Ki Ageng Pamanahan atau Ki Ageng Mataram itu wafat pada tahun 1584. Penggantinya adalah putranya, Senapati ing Alaga yang pada masa mudanya bergelar Ngabehi Loring Pasar dan ia adalah menantu Sultan Pajang atau Sultan Hadiwijaya yang wafat tahun 1587. Menurut *Babad Tanah Jawi*, meskipun Panembahan Senapati tidak suka menghadap Sultan Pajang, pada waktu Sultan Pajang wafat, Senapati ing Alaga datang menghadiri upacara pemakaman Sultan.[71] Pada masa pemerintahannya Mataram memperluas daerah kekuasaannya ke daerah sekitarnya termasuk daerah pesisir utara, kemudian ke daerah-daerah di Jawa bagian timur maupun ke daerah Jawa bagian barat. Pajang yang berada di bawah kekuasaan Mataram berubah menjadi kadipaten, dan diperintah Pangeran Benawa, putra Sultan Hadiwijaya. Kecuali Pajang, Demak juga dikuasainya yang kemudian ditempatkan seorang dari Yuwana, daerah Kedu dan Bagelen juga dapat dikuasai. Madiun tahun 1590 mengakui kekuasaan Mataram, demikian pula Surabaya, selanjutnya Mataram menaklukkan Kadiri. Panembahan Senapati ing Alaga juga meluaskan daerah kekuasaan dan pengaruhnya ke bagian barat sampai ke Priangan Timur dan Kesultanan Cirebon. Hubungan antara Mataram dengan Cirebon pada masa pemerintahan Panembahan Ratu tidak karena penaklukan, tetapi hubungan persahabatan. Karena itu tidak mengherankan konon benteng kota Cirebon dibuat dengan bantuan Panembahan Senapati ing Alaga, dan benteng kota tersebut pada tahun 1684 masih dapat dikenali dan tentunya telah didirikan sebelum tahun 1596. Hal ini ternyata dalam pelayaran pertama bangsa Belanda tahun 1596 benteng kota Cirebon itu masih diceritakan.[72] Wafatnya Panembahan Senapati ing Alaga menurut *Babad Sangkala* yang menceritakan tentang peristiwa gerhana matahari dan wafatnya Panembahan Senapati ing Alaga pada tahun 1523 H, atau 1601 M, dan juga diceritakan bahwa pada waktu itu terjadi perpindahan Adipati Puger ke Demak.[73] Pemerintahan Panembahan Senapati ing Alaga dapat dikatakan sebagai masa awal kebangkitan, sedang masa puncaknya pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma, cucu Panembahan Senapati ing Alaga. Setelah Senapati ing Alaga wafat diganti Raden Jolang, putra dari selir asal putri dari Pati. Pemerintahan masa Pangeran Jolang dari tahun 1601 sampai tahun 1613, menyempurnakan pembangunan kota yang dikenal sebagai Kota Gede termasuk pembuatan Taman Danalaya, kolam (segaran), dan

71 Olthoff, W.L., *Poenika Serat Babad Tanah Djawi Wiwit Saking Nabi Adam Doemoegi ing Taoen 164* 's-Gravenhage Martinus Nijhof, 1941, hlm. 90

72 Graaf, H.J. De, *Awal Kebangkitan Mataram Masa Pemerintahan Senapati*, PT Grafiti Pers, Jakarta, 1985, hlm. 112–114

73 *Ibid.*, hlm. 126–127,

kompleks pemakaman Kota Gede. Karena ia meninggal di tempat perburuan (krapyak) tahun 1613. Ia terkenal pula dengan gelaran Panembahan Seda ing Krapyak. Penggantinya adalah cucu Panembahan Senapati ing Alaga, yaitu R.M. Jatmiko atau Pangeran Rangsang. Setelah menjadi Sultan Mataram, ia dikenal dengan gelar Sultan Agung Senapati ing Alaga.

Pada masa pemerintahan Sultan Agung Senapati Ing Alaga beberapa daerah yang semula sudah berada di bawah Mataram mulai melepaskan dirinya. Akibatnya, Sultan Agung melakukan penyerangan-penyerangan terhadap Surabaya tahun 1625, Pati, Giri, dan Balambangan. Sementara itu, Mataram mengadakan hubungan dengan VOC di Batavia yang sudah dirintis Panembahan Seda ing Krapyak tahun 1613. VOC mengirimkan utusannya ke Mataram, antara lain Hendrik de Haan, Yan Vos, dan Pieter Franssen. Akan tetapi, hubungan itu mulai memburuk sejak tahun 1624. Sultan Agung memerhatikan hal itu dan menganggap VOC berusaha melakukan kolonialismenya yang mengancam kekuasaan politik kerajaan Mataram.[74] Permusuhan itu memuncak dan Mataram mengirimkan pasukan-pasukan di bawah pimpinan panglima-panglimanya. Pertama kali pengepungan Batavia untuk mengusir VOC terjadi pada tahun 1628, tetapi mengalami kegagalan lalu diulangi lagi penyerangan pada tahun 1629, tetapi juga gagal. Jalan pertempuran prajurit-prajurit Sultan Agung Mataram telah diuraikan tersendiri pada bab tentang Keprajuritan Kesultanan abad ke-16–17 M.

Selain melewati pertempuran-pertempuran, dalam menaklukkan kembali daerah-daerah dan penyerangan besar-besaran mengepung Batavia dilakukan melalui daratan dan lautan. Kerajaan Mataram Islam meskipun menjadi kerajaan yang bersifat agraris, juga di bawah Sultan Agung kerajaan tersebut juga mengembangkan perdagangan ekspor dan impor komoditas-komoditas melalui pelabuhan di pesisir utara Jawa seperti Japara, Kendal, dan Tegal. Ekspor dari Mataram terutama beras melalui pelabuhan Japara, Kendal, dan Tegal merupakan monopoli kerajaan yang ditangani para Tumenggung.[75] Sultan Agung Mataram melakukan pembangunan sebagai contoh ia mempersiapkan untuk pendirian kota yang akan dipusatkan di Plered, pembangunan kompleks pemakaman di Girilaya, kemudian mengadakan pembangunan makam di Bukit Merak yang dimulai tahun 1632 setelah selesai diberi nama *Imogiri*. Dalam segi keagamaan masanya cenderung mengadakan perimbangan antara agama Islam dan

---

74 Inayati Adrisijanti Romli, Dr. Anggraeni, MA., Dra., (Penyunting), *Mosaik Pusaka Budaya Yogyakarta,* Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta, 2003, hlm. 23

75 Lear, J.C. van, *Indonesian Trade And Society. Essays in Asian Social and Economic History*, W. van Hoe ve Ltd. —The Hague Bandung, 1955, hlm. 207

agama Hindu. Ia membuat kalender tahun Jawa dengan perhitungan antara tahun Hijriah dengan tahun Saka yang waktu tahun 1555 Saka dapat diterima oleh masyarakat Jawa dan sampai sekarang disebut *penanggalan Jawi.*[76] Sultan Agung Mataram yang terkenal itu sakit dan wafat di keraton Kota Gede pada tahun 1645 dan kemudian ia dimakamkan di Imogiri, kompleks makam yang telah ia rintis pembangunannya.

Pengganti Sultan Agung Mataram adalah putranya yang bernama Amangkurat dengan gelar Sultan Amangkurat Senapati ing Alaga Ngabdur Rahman Sayidin Panatagama yang untuk mudahnya disebut Amangkurat I. Ia memindahkan keraton dari Kota Gede ke Plered yang menurut *Babad ing Sengkala* terjadi pada tahun 1569 Jawa atau 1647 M, tentang keraton dan komponen-komponen kota Plered telah dibicarakan Dr. Inajati Adrisijanti Romli dalam disertasinya *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam.*[77] Masa pemerintahan Amangkurat I dalam babad antara *Babad Tanah Jawi*, kecuali memberikan gambaran pemberontakan sampai pemberontakan Trunojoyo juga tindakan-tindakan tercelanya karena melakukan perintah pembunuhan terhadap siapa saja yang dianggap merongrong kekuasaannya, bukan hanya para pejabat antara lain Tumenggung Wiraguna, tetapi juga adiknya sendiri dan para ulama.[78] Sunan Amangkurat I itu lebih dekat kepada VOC untuk mencari dukungannya daripada ke masyarakat kerajaannya sendiri. Sebagai bukti melakukan perjanjian dengan VOC yang hakikatnya Mataram harus mengakui kekuasaan politik VOC di Batavia dan disusul dengan pengiriman utusan-utusan tiap tahun dari VOC ke Mataram. Kedekatan Mataram dengan VOC menyebabkan makin banyaknya tindakan mencampuri politik kerajaan Mataram. Permusuhan Sunan Amangkurat I dengan Pangeran Adipati Anom juga menambah ketidaksenangan para pejabat dan masyarakat Mataram. Faktor-faktor itu ditambah lagi upaya pemberontakan Pangeran Trunajaya yang dibantu oleh Pangeran Kajoran dan para pejabat dan masyarakat kerajaan Mataram yang sudah sangat tertekan. Dengan masuknya pasukan pemberontak Pangeran Trunajaya Sunan Amangkurat I terpaksa menyingkir ke luar kota dan menuju ke daerah Banyumas, dengan tujuan ke Cirebon untuk minta bantuan juga kepada VOC. Akan tetapi, sesampainya di Wanayasa ia jatuh sakit dan akhirnya meninggal pada tanggal 10 Juli 1677 yang kemudian jenazahnya di bawa ke Tegalwangi di daerah Tegal untuk

---

76 Inajati Adrisijanti Romli-Anggraeni (Penyunting), *Mosaik Pusaka Budaya Yogyakarta*, 2003, hlm. 24

77 Adrsijanti Romli, *Arkeologi Perkotaan Mataram Islam*, Diterbitkan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, Penerbit Jendela Yogyakarta, 2000, hlm. 62–82

78 Ras, J.J., *Babad Tanah Djawi. Javaanse Rijkskroniek* W.L. Olthofs vertaling van de prozaversie van J.J. Meinsma Iopende tot het jaar 1721, Foris Publications Dordrecht-Holland/Providence USA, 1987, hlm. 146–178

dimakamkan. Ia masih sempat mengangkat Pangeran Adipati Anom sebagai penggantinya dengan gelar Sunan Amangkurat II. Sejak pemerintahan baik Sunan Amangkurat I maupun Sunan Amangkurat II dan seterusnya, kerajaan Mataram Islam sampai Perang Giyanti tahun 1755 terus-menerus mengalami pengaruh politik VOC. Bahkan melalui perjanjian Giyanti itulah kerajaan Mataram Islam dipecah menjadi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta (Solo).

4. Kerajaan Cirebon

Cirebon yang semula termasuk daerah kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran bahkan menjadi salah satu pelabuhan kerajaan tersebut. Ketika kehadiran Tomé Pires (1512–1515) sekitar tahun 1513, diberitakan Cirebon sudah termasuk ke daerah Jawa di bawah kekuasaan kerajaan Demak. Penguasa di Cirebon adalah Lebe Usa sebagai bawahan Pate Rodim. Cirebon terutama mengekspor beras dan banyak bahan makanan lainnya. Kota ini penduduknya sudah ada 1.000 orang Pate Quitir yang dahulu memberontak di kampung Upeh (Malaita), berdiam di Cirebon sebagai pedagang besar yang juga dihormati oleh pedagang-pedagang lainnya bahkan oleh Raja Cirebon. Yang menarik perhatian Tomé Pires mengatakan bahwa Islam sudah hadir di kota Cirebon ini 40 tahun sebelum kehadiran Tomé Pires sendiri.[79] Perhitungan tahun kehadiran Islam di Cirebon berdasarkan berita itu dapat diperkirakan antara tahun 1470–1475 M. Perkiraan kehadiran Islam di kota Cirebon itu dapat dibandingkan dengan sumber lokal *Tjarita Purwaka Tjaruban Nagari* karya Pangeran Arya Cerbon tahun 1720 M. Dalam naskah ini dikatakan bahwa kehadirannya Syarif Hidayatullah di Cirebon tahun 1470 M adalah mengajarkan agama Islam di Gunung Sembung, bersama-sama uaknya Haji Abdullah Iman atau Pangeran Cakrabumi atau Cakarabuana yang sudah lebih dahulu berada di Cirebon. Syarif Hidayatullah menikah dengan Pakungwati putri uaknya dan pada tahun 1479 menggantikan mertuanya sebagai penguasa Cirebon, lalu mendirikan keraton yang diberi nama Pakungwati di sebelah timur keraton Sultan Kasepuhan kini. Syarif Hidayatullah terkenal juga dengan gelar Gusuhunan Jati atau Sunan Gunungjati, salah seorang Wali Sanga dan juga mendapat julukan *Pandita Ratu* sejak ia berfungsi sebagai wali penyebar Islam di Tatar Sunda dan sebagai kepala pemerintahan. Sejak itu Cirebon menghentikan upeti ke pusat kerajaan Sunda Pajajaran di Pakuan.[80] Sebenarnya Islam sudah mulai disebarkan meski mungkin masih terbatas

79 Cortesao, Armando, *The Suma Oriental of Tomé Pires*, 1944/1967, hlm. 183

80 Atja, Drs., *Tjarita Purwaka Tjaruban Nagari*, diterbitkan oleh Ikatan Karyawan Museum, Jakarta, 1972, hlm. 8–9

daerahnya, justru oleh Pangeran Cakrabumi alias Haji Abdullah Iman bahkan juga oleh Syeikh Datuk Kahfe yang telah memelopori mendirikan pesantren sebagai tempat mengajar dan penyebaran agama Islam. Paling tidak untuk daerah sekitarnya. Pada masa pemerintahan Sunan Gunungjati Islam makin diintensifkan dengan pendirian Mesjid Agung Cipta Rasa di sisi barat alun-alun keraton Pakungwati dan Islam diluaskan ke berbagai daerah antara lain ke daerah Kuningan, Talaga, dan Galuh sekitar tahun 1528–1530 dan ke daerah Banten sekitar tahun 1525–1526 bersama putranya Maulana Hasanuddin. Pada sekitar tahun 1527 ia mendorong Fadhillah baik sebagai menantunya maupun sebagai panglima yang dikirimkan Pangeran Trenggana dari Demak untuk menyerang Kalapa yang masih dikuasai kerajaan Sunda dan sejak tahun 1522 mengadakan hubungan dengan Portugis dari Malaka.

Sunan Gunungjati wafat tahun 1568 dan dimakamkan di Bukit Sembung yang juga terkenal dengan Makam Gunungjati. Penggantinya di Cirebon adalah buyutnya yang dikenal sebagai Panembahan Ratu putra Pangeran Suwarga yang telah meninggal tahun 1565. Pada masa pemerintahannya, hubungan dengan Mataram masih diteruskan melalui kekeluargaan antara lain perkawinan. Sebagai contoh, pernikahan kakak perempuan Panembahan Ratu, yaitu Ratu Ayu Sakluh, dengan Sultan Agung Mataram (1613–1645/6), yang melahirkan Amangkurat I (1614–1677). Panembahan Ratu II atau Panembahan Girilaya dipanggil ke Mataram dan selama 12 tahun tidak kembali ke Cirebon sampai wafatnya tahun 1662 dan dimakamkan di bukti Girilaya sebelah timur Imogiri. Kedua orang putranya yang bernama Martawijaya dan Kartawijaya yang turut ke Mataram pada masa pemberontakan Pangeran Trunajaya oleh Sunan Amangkurat I dibolehkan kembali ke Cirebon, dengan pertolongan Banten kedua putra itu diambil dari Surabaya kemudian dibawa ke Banten, diberi gelar Sultan Pangeran Martawijaya sebagai Sultan Sepuh I atau Sultan Syamsuddin dan Pangeran Kartawijaya sebagai Sutan Kanoman atau Sultan Badruddin. Pangeran Wangsakerta yang selama ayahnya di Mataram memegang Cirebon tidak diberi gelar Sultan. Keberadaan Kesultanan Cirebon menjelang akhir abad ke-17 melalui perjanjian-perjanjian dengan VOC antara lain perjanjian 7 Januari 1681 Kesultanan Cirebon mulai dicampuri politik kolonial VOC, dan selanjutnya di bidang ekonomi-perdagangan merupakan monopoli VOC, seperti pakaian dan opium. Demikian pula ekspor komoditas lada, beras, kayu, gula, dsb. berada di tangan VOC. Perjanjian 8 September 1688 yang ditandatangani Sultan Sepuh I, Sultan Anom, dan Pangeran Tohpati antara lain mengenai pengakuan dan juga pembagian cacah, di pihak Kesultanan Cirebon

Gambar 2.12 Masjid Agung Kasepuhan di Cirebon abad ke-16 M

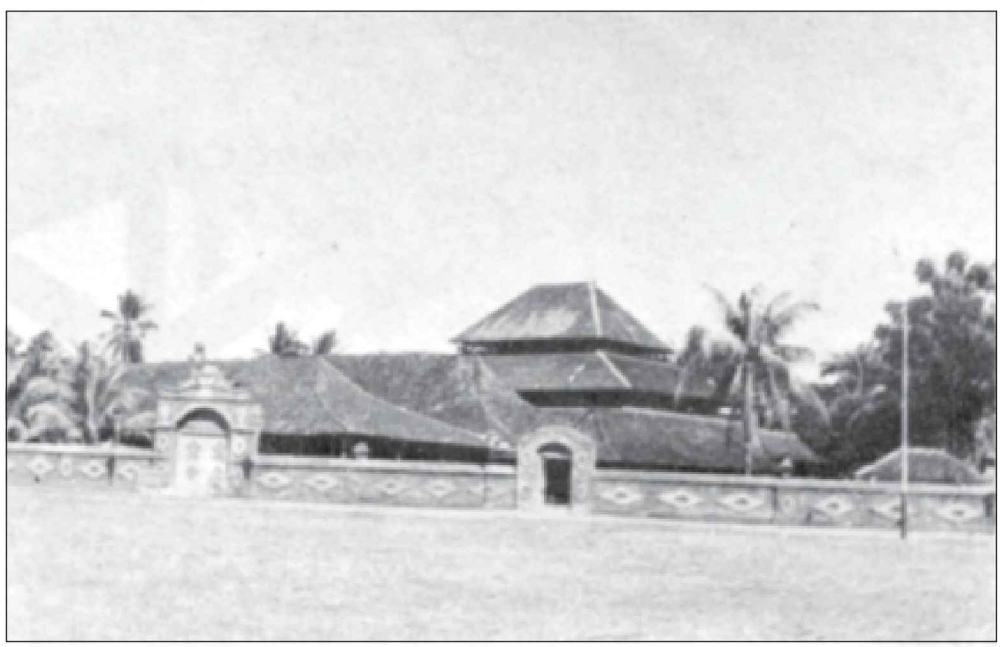

Gambar 2.13 Masjid Agung Kasepuhan di Cirebon, aslinya abad ke-16 M

Gambar 2.14 Ukiran batu pada makan Sunan Gunung Jati di Cirebon

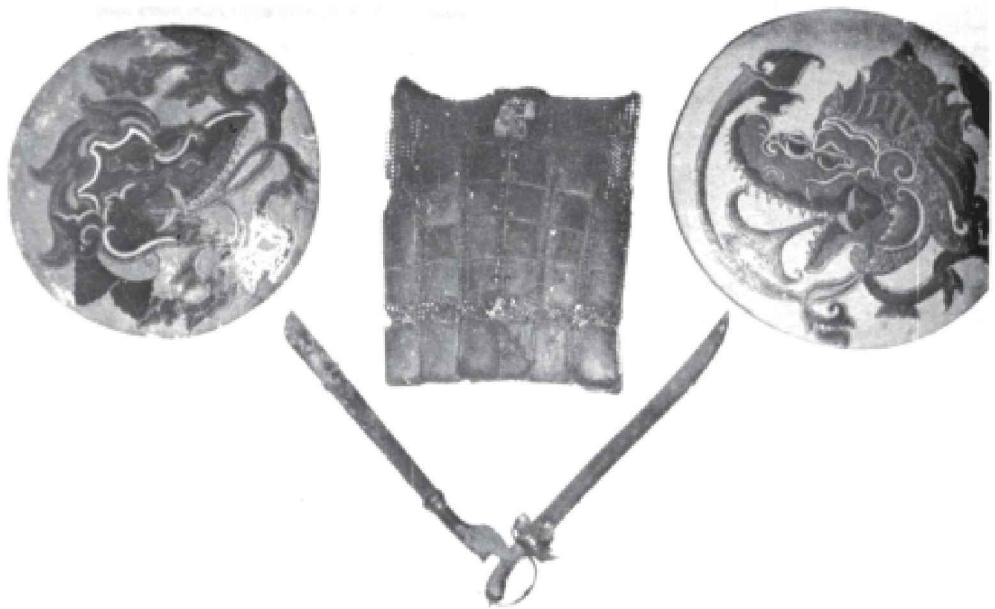

Gambar 2.15 Pedang dan baju jitah dari keraton Cirebon

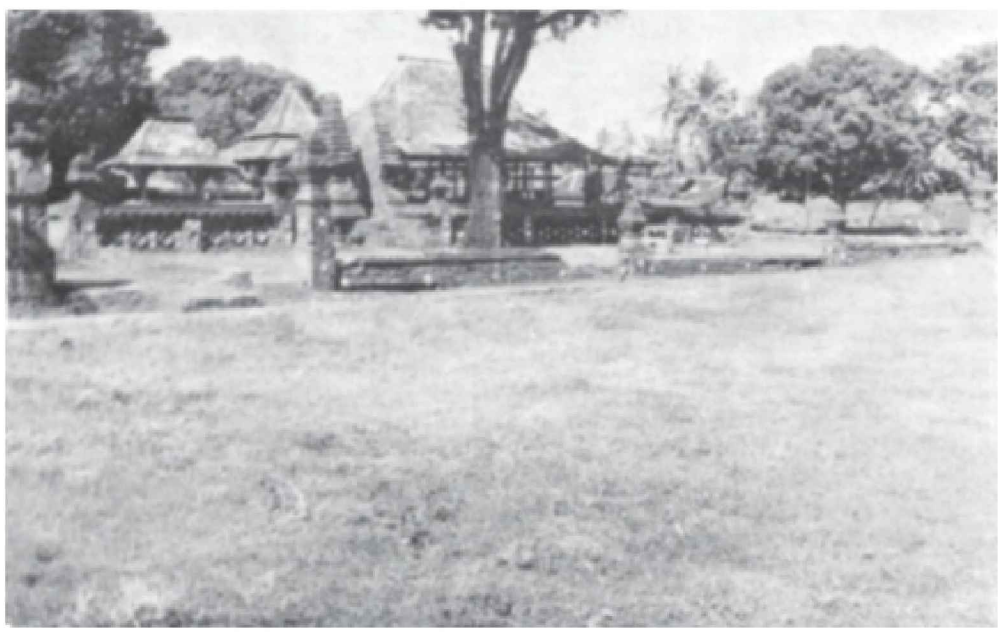

Gambar 2.16 Sitinggil keraton Cirebon

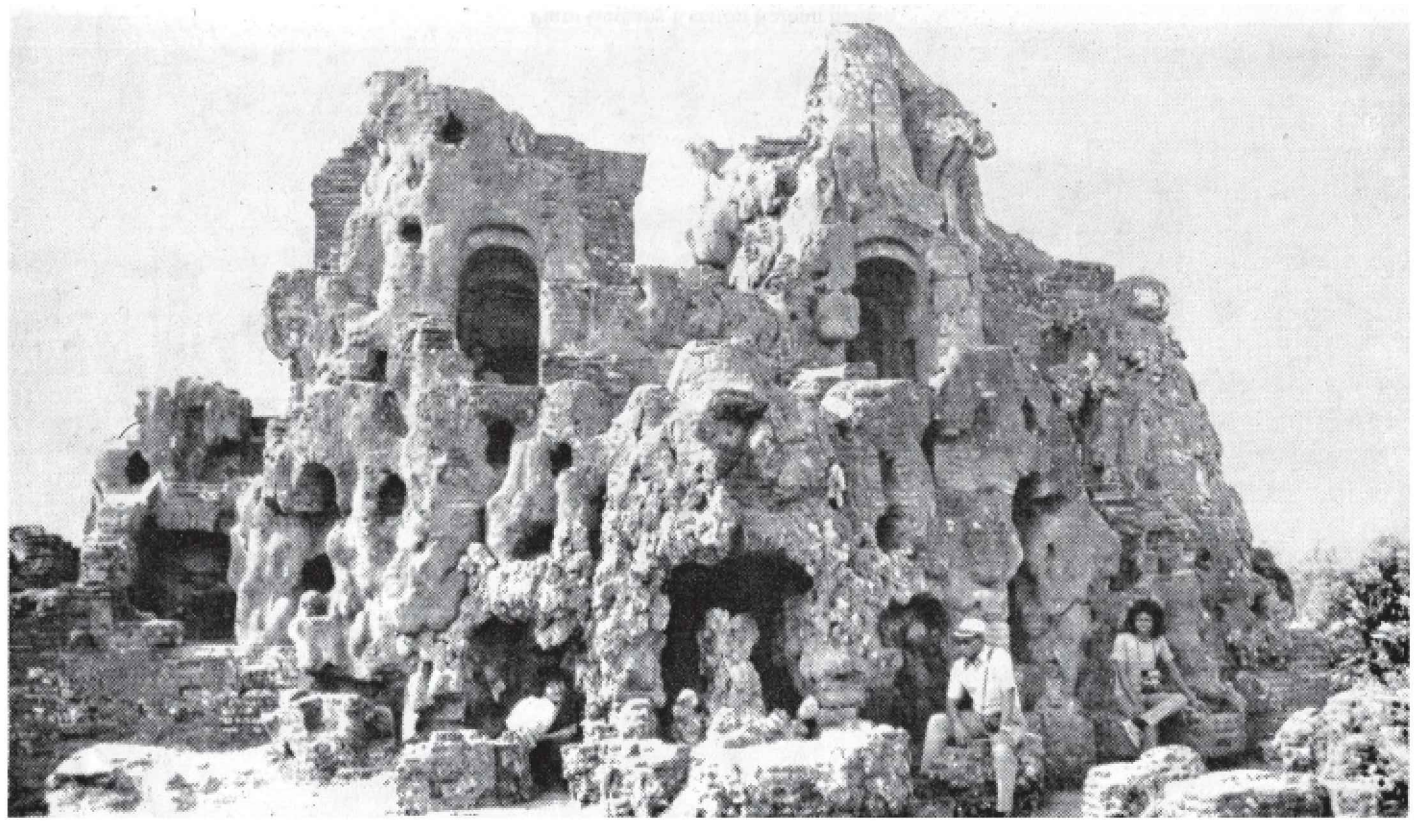

Gambar 2.17 Gua Sunyaragi Taman Peristirahatan Sultan di Cirebon abad ke-18 M

lebih menimbulkan persengketaan. Sejak tahun 1697 kekuasaan keraton Kasepuhan dan Kanoman terbagi lagi atas Kacirebonan dan Kaprabonan. Karena itu, menurut pendapat Sharon Sidiqque, Kesultanan Cirebon sejak tahun 1681 sampai 1940 mengalami kemerosotan karena kolonialisme.[81] Cirebon sebelum tahun 1681 meskipun pendapat beberapa ahli agak berbeda dapat dikatakan Kesultanan Cirebon merupakan pusat keagamaan dengan penyebarannya ke berbagai daerah seperti telah dikatakan di atas. Tasawuf dan tarekat-tarekat keagamaan Islam seperti Kubrawiyah, Qadariyah, Shattariyah, dan kemudian Tijaniyah berkembang di Cirebon.[82] Cirebon sebagai pusat keagamaan banyak menghasilkan naskah-naskah kuno, seperti *Babad Tjerbon, Tjarita Purwaka Tjaruban Nagari,* dan *Pepakem Tjerbon.*

5. Kerajaan Banten

Berdasarkan sumber-sumber lokal, antara lain *Babad/Sejarah Banten, Hikayat Hasanuddin, Tjarita Purwaka Tjaruban Nagari, Babad Tjerbon,* dan lainnya ditambah sumber asing antara lain sumber Portugis dan Cina, dapat kita ketahui bahwa daerah Banten sebelum kesultanan, yaitu sebelum tahun 1525/1526, masih berada di bawah kerajaan Sunda Pajajaran. Daerah Banten waktu itu merupakan kadipaten kerajaan Sunda Pajajaran yang berpusat di Bogor antara Sungai Cisadane–Ciliwung dan Cipakancilan. Pakuan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Sunda Pajajaran mempunyai karakter sebagai Negara-Kota (*City-State*) yang salah satu kegiatan utamanya adalah perdagangan regional dan internasional[83] Pusat Kadipaten Banten di Wahanten Girang (Banten Girang), sebelah barat kota Serang, yang konon diperintah oleh Pucuk Umun.

Sampai kehadiran Tomé Pires (1512–1515) Banten masih merupakan bagian dari kerajaan Sunda Pajajaran dan merupakan salah satu di antara pelabuhan lainnya, seperti Pontang, Ciguide, Tanggerang, Kalapa, Cimanuk, dan Cirebon. Dari pelabuhan Banten diekspor terutama lada dan beras, sebaliknya pelabuhan Banten didatangi para pedagang dari Kepulauan Maladiva, Sumatra, dan lainnya.[84] Sumber Cina, *Shun Peng Shsiang Sung* (lk. 1430 M), berita Ma Huan dalam *Ying yai-Sheng-Lan* (1433), dalam rute-rute pelayaran dan perdagangan Banten telah disebut-sebut. Hal itu berarti sejak abad ke-15 M pelabuhan Banten sudah merupakan pelabuhan penting yang

---

81 Sharon Siddique, *Relics of the Past. A Socialogical Study of the Sultanates of Cirebon West Java,* Diss.Universitat Bielefeld, 1977, hlm. 29–50

82 Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat,* Penerbit Mizan, Bandung, 1995, hlm. 224–225, 274, 321

83 Tjandrasasmita, Uka, "The International Trade of Sunda Pajajaran Kingdom in The XIV–XVI th Centuries", Paper disampaikan dalam Seminar *International Association of Historians of Asia (IAHA),* Jakarta August 17th September 1 th 1988

84 Cortesao, Armando, *Suma Oriental of Tomé Pires* ... Hakluyt Society, 1944/1967, hlm. 166–167, 170

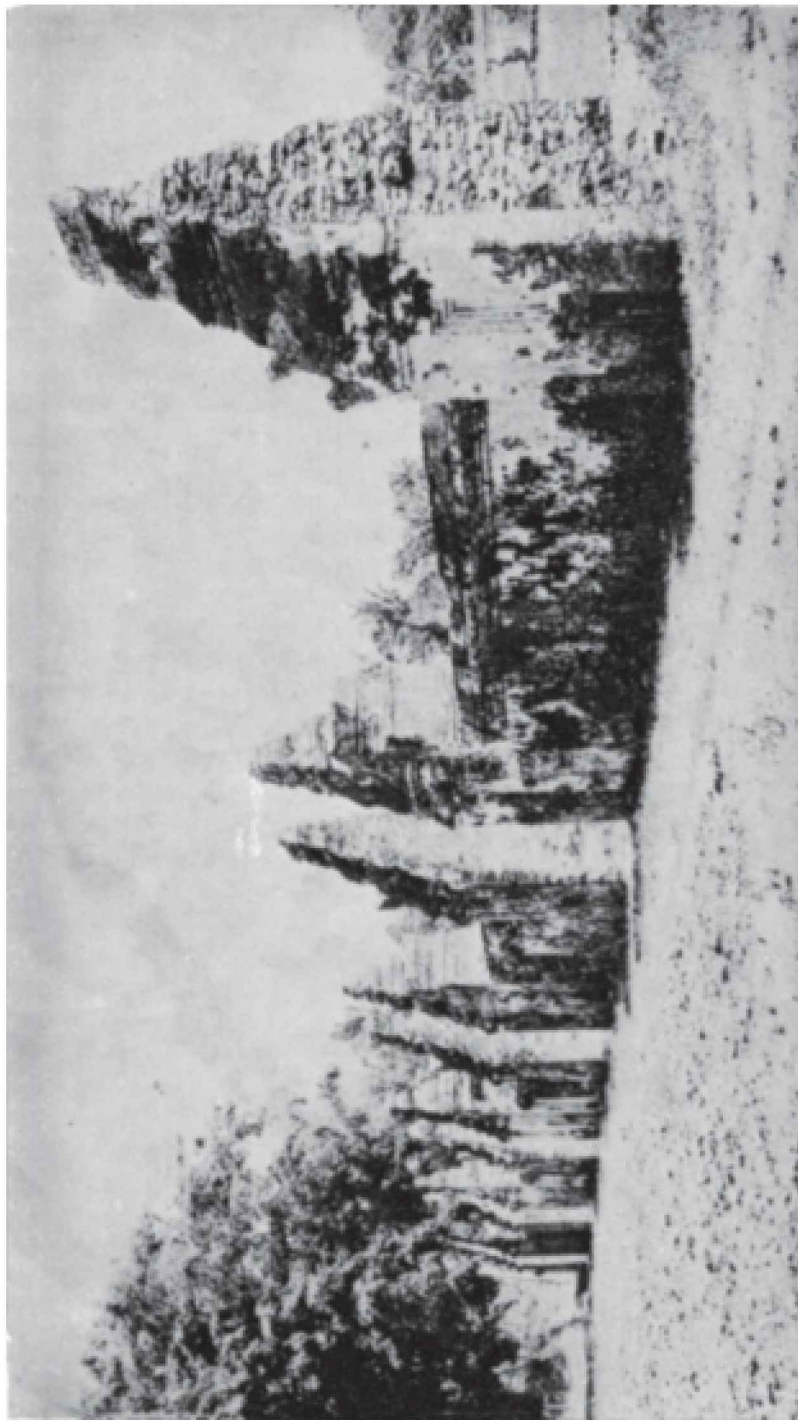

Gambar 2.18 Pintu gerbang keraton Kaibon Banten

masuk jaringan pelayaran dan perdagangan *'Jalur/Jalan Sutra'* (Silk-Road).[85] Berita itu semua dapat dibuktikan oleh temuan sejumlah pecahan keramik dari masa Dinasti Sung sampai Ming dari + abad ke-10–15 M berasal dari situs Banten Girang.[86] Kota Banten Girang ini menurut *Babad/Sajarah Banten* direbut oleh muslim di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin, putra Syarif Hidayatullah yang diberi sengkala, *brasta gempung warna tunggal* (0041 atau 1400 Saka (1478 M). Meskipun demikian, menurut perkiraan Dr. Hoesein Djajadiningrat jatuhnya Banten Girang antara tahun 1525–1526 M. Setelah itu, Banten Girang ditinggalkan dengan memindahkan pusat kerajaan Islam ke Surasowan dekat sekali ke teluk Banten. Atas petunjuk Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunungjati kepada putranya, Maulana Hasanuddin di tempat yang baru dibuat keraton, masjid, alun-alun, pasar, dan kelengkapan lainnya bagi suatu kota.[87] Letak ibu kota Surasowan di Teluk Banten sangat strategis untuk pertumbuhan dan perkembangan bahkan memuncaknya Kesultanan. Dengan penguasaan Malaka oleh Portugis, Banten makin berarti bagi pelayaran dan perdagangan internasional melalui Selat Sunda. Banten bukan hanya berfungsi sebagai pusat politik, perekonomian, dan perdagangan, melainkan juga keagamaan dan kebudayaan. Sejak pemerintahan Maulana Hasanuddin daerah Lampung sudah masuk ke dalam kekuasaan Kesultanan Banten, demikian pula Jayakarta semula bernama Kalapa dan sejak tahun 1527 berada di tangan Fadhillah masuk bagian Kesultanan Banten. Lebih-lebih setelah Jayakarta di bawah pemerintahan Tubagus Angke hubungannya dipererat dengan pernikahan antara putri Hasanuddin, Ratu Pembayun, dengan Tubagus Angke.[88] Pada masa pemerintahan Maulana Yusuf, Kesultanan Banten mengalami kemajuan dalam bidang pembangunan kota, desa-desa, dan pembuatan persawahan dan perladangan sebagaimana diceritakan *Babad/Sejarah Banten*.[89] Selain itu, pemerintahan Maulana Yusuf + tahun 1579 juga dapat mengalahkan pusat kerajaan Pajajaran di Pakuan. Setelah ia wafat, penggantinya adalah Maulana Muhammad (1580–1596) yang melakukan serangan terhadap Palembang yang mungkin bermotif ekonomi, tetapi ia gugur dalam peperangan di Palembang sehingga mendapat julukan

85 Tjandarasasmita, Uka, "Banten sebagai Pusat Kekuasaan dan Niaga Antarbangsa", dalam *Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta, 1995, hlm. 106–425

86 Hariyanti Ongkodharma, *Prelimenary notes on the classification of the cheramics Excavated at Banten in 1976 and 1977*, Studies on cheramics, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1984, hlm. 83–91

87 Hoesein Djajadiningrat, *Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten Sumbangan bagi Pengenalan Sifat-sifat Penulisan Sejarah Jawa*, Penerbit Jambatan, Koninklijk Instituut voor Taal–Land en Volkenkunde Jakarta, 1983, hlm. 36

88 Tjandrasasmita, Uka, *Sultan Ageng Tirtayasa Musuh Besar Kompeni Belanda*, Yayasan Kebudayaan Nusalarang, 1967

89 Hoesein Djajadiningrat, *op. cit.*, 1983, hlm. 38

Panembahan Seda ing Rana. Pada waktu itu kebetulan Banten mulai didatangi bangsa Barat, yaitu Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman.[90]

Pengganti Maulana Muhammad adalah putranya yang masih kecil bernama Abulmafakhir Mahmud Abdulkadir tahun 1596–1651 yang selama pemerintahannya Kesultanan Banten mulai dirongrong oleh politik kolonialisme Belanda (VOC), tetapi juga selalu dihadapi dengan peperangan. Pada masa pemerintahannya Kesultanan Banten mengirimkan utusan ke Mekkah yaitu Lebe Panji dan Tisnajaya untuk menanyakan isi kitab-kitab, antara lain tentang Wujudiyah dan memohon dikirimkan seorang ahli hukum, fakih, tetapi permintaan ini tidak dikabulkan oleh Syarif Mekkah. Pelayaran utusan itu melalui Maladiva, Keling, Surat, dan Jedah. Sekembalinya utusan tersebut dibawakan hadiah berupa sehelai bendera dari Nabi Ibrahim, sepotong kain penutup makam Nabi Muhammad, dan sepotong kiswah penutup Kakbah. Sedang pengertian tiga buah kitab telah ditulis. Yang penting juga pemberian gelar Sultan kepada Abulmafakhir Mahmud Abdulkadir.[91] Sultan Banten tidak hanya meminta keterangan tentang keagamaan kepada ulama-ulama Haramain, tetapi juga ke Aceh terutama kepada Al-Raniri, untuk menjawab pertanyaan Sultan Banten. Dengan demikian, Banten menjadi terkenal sebagai pusat penting di Jawa dan sangat mungkin Syekh Yusuf Al-Makassari juga belajar di Banten, bahkan ia menjalin hubungan pribadi dengan putra Sutan Abuma'ali Ahmad, yaitu Pangeran Surya, cucu Sultan Abulmafakhir Mahmud Abdulkadir. Setelah Pangeran Surya menjadi Sultan tahun 1651–1682 dengan gelar Sultan Abdulfath Abdulfatth yang terkenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa, Syekh Yusuf dijadikan menantunya.[92]

Kesultanan Banten pada masa pemerintahan Sultan Abdulfatah atau Sultan Ageng Tirtayasa mencapai puncaknya dalam bidang politik, perekonomian, perdagangan, keagamaan dan kebudayaan. Dalam bidang politik Kesultanan Banten terus-menerus melawan kolonialisme VOC baik di laut maupun di daratan yang antara lain terkenal dengan peperangan tahun 1658–1659 di daerah Angke–Tangerang yang diakhiri dengan perjanjian tanggal 10 Juli 1659 yang terdiri dari 12 pasal.[93] Peperangan yang terjadi tahun demi tahun antara Kesultanan Banten dengan VOC telah diuraikan tersendiri dalam buku ini. Pada masa Sultan Ageng

---

90 G.P. Rouffaer-ljzerman, *De Eerste Schipvaarl der Nederlanders Naar Oost-Indie Onder Cornelis de Houtman*, 's-Gravenhage Martinus Nijhott, 1915, hlm. ....

91 Hoesein Djajadiningrat, *Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten*, Djambatan, Jakarta, 1983, hlm. 53–54

92 Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama* ..., Penerbit Mizan, Bandung, 1994, hlm. 55, 213–214

93 Tjandrasasmita, Uka, *Sultan Ageng Tirtayasa* ... Yayasan Kebudayaan Nusalarang, Jakarta, 1967, hlm. 11–26

Gambar 2.19 Meriam Ki Amok di Banten

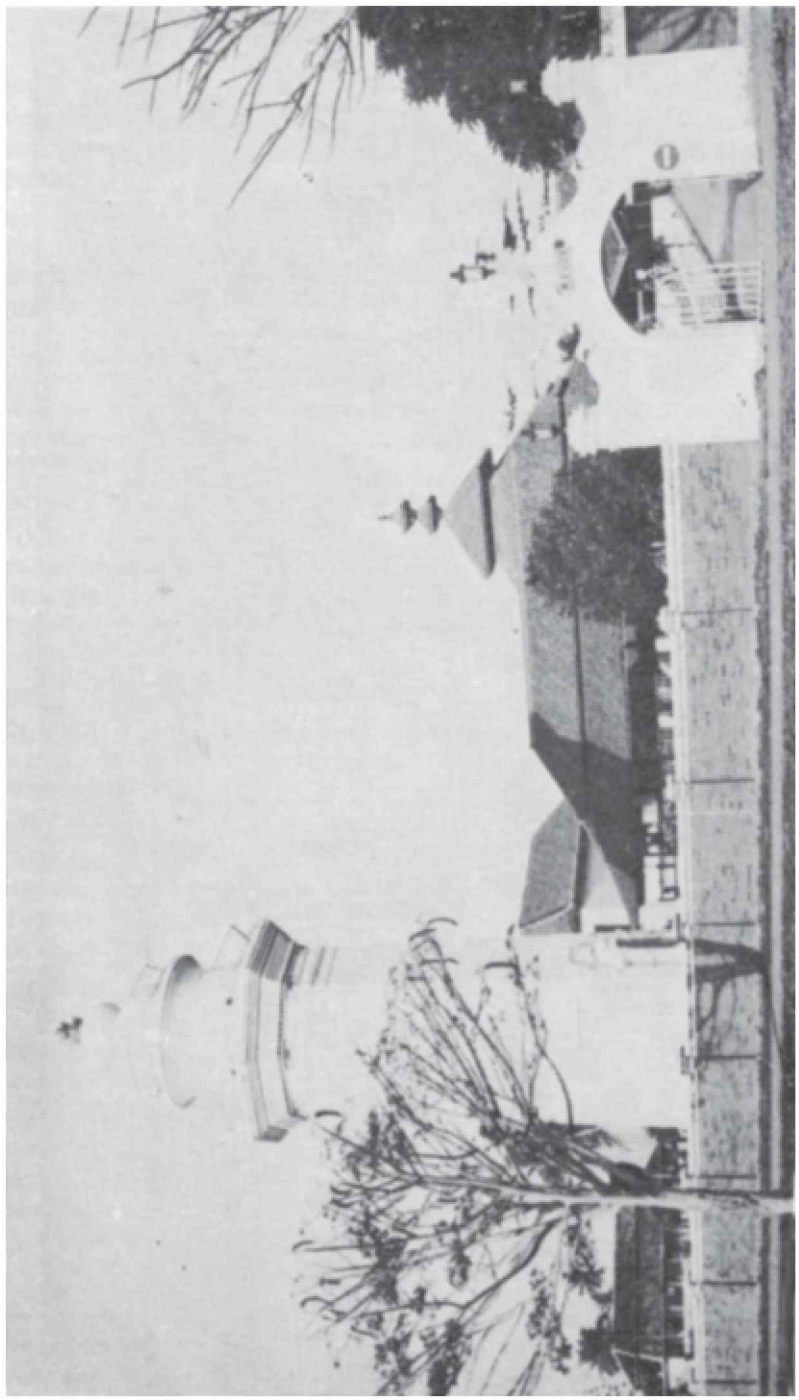

Gambar 2.20 Masjid Agung di Banten

Tirtayasa tanggal 10 November 1681 dikirimkan utusan diplomatik ke Inggris di bawah pimpinan Tumenggung Naya Wipraya dan Jaya Sedana. Hubungan persahabatan dengan negeri-negeri di Indonesia sendiri, seperti dengan Cirebon, Lampung, Gowa, Ternate, Aceh, dan lainnya. Setelah perjanjian tahun 1659 itu, Sultan Ageng Tirtayasa memperkuat pertahanannya dengan cara membuat keraton di Tirtayasa, membuat jalan dari Pontang ke Tirtayasa bahkan juga membuka persawahan di sepanjang jalan tersebut, mengembangkan permukiman-permukiman di sebelah barat ujung Jawa (Tangerang).

Dalam bidang perdagangan internasional Kesultanan Banten makin dikembangkan dengan negeri-negeri Iran, Hindustan, Arab, Inggris, Prancis, Denmark, Jepang, Pegu, Filipina, Cina, dan sebagainya.[94] Kemajuan Kesultanan Banten dalam bidang perdagangan tersebut bukan hanya tercatat dalam harian Belanda (Daghregisters), tetapi juga dari data temuan banyaknya pecahan keramik dan benda-benda lainnya baik dari Cina, Jepang, bahkan juga dari Eropa. Kesultanan Banten mulai mengalami kemunduran sejak perang kelompok yang dipimpin putranya, yaitu Sultan Abu Nasr Abdul Kahar atau Sultan Haji yang dibantu VOC melawan kekuasaan ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa. Akan tetapi, dengan jatuhnya Surasowan, serta tertangkapnya Sultan Ageng Tirtayasa dan terjadinya perjanjian antara VOC dengan Sultan Abu Nasr Abdul Kahar tanggal 17 April 1684, berakibat Sultan Haji harus mengganti kerugian 12.000 ringgit dan pendirian Benteng Speelwijk. Akibat lebih jauh adalah baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi-perdagangan, masuknya monopoli VOC, Kesultanan Banten praktis tidak berdaya lagi, meskipun gerilya di bawah pimpinan Syekh Yusuf masih terus dilakukan. Pergantian sultan yang dicampuri politik VOC dan masa pendudukan Hindia Belanda selalu menimbulkan pemberontakan-peberontakan, seperti Kiai Tapa dan Tubagus Buang pada sekitar medio abad ke-18 dan akhirnya dengan pembuatan jalan Daendels dan tindakan menghancurkan keraton Surasowan dan kemudian mengasingkan sultan-sultan Banten serta dengan tindakan akhir kolonial Belanda tahun 1808 menghapuskan pemerintahan Kesultanan menjadi kabupaten-kabupaten Serang, Caringin, dan Lebak berada di bawah pemerintah Hindia Belanda. Meski demikian, rakyat Banten di bawah pimpinan kiai dan haji senantiasa melakukan pemberontakan, di antaranya pemberontakan petani tahun 1888 di Cilegon di bawah pimpinan Kiai Haji Wasid.[95]

---

94 Tjandrasasmita, Uka, "Banten sebagai Pusat Kekuasaan dan Niaga Antarbangsa", dalam *Banten Kola Pelabuhan Jalan Sutra,* Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta, 1995, hlm. 116–117

95 Sartono Kartodirdjo; *Peasants Revolt of Banten in 1888* .... KITLV, 50, 's-Gravenhage Martus Nijhoff, 1966, Uka T jandrasasmita, Arti Perlawanan Kyai Haji Wasid terhadap Kolonial Belanda bagi Perjuangan Bangsa Indonesia. Dalam *Geger Cilegon 1888 Peranan Pejuang Banten Melawan Penjajah Belanda,* diterbitkan oleh Panitia Hari Jadi ke-462 Pemerintah Daerah Tk. II Kabupaten Serang, 1988, hlm. 31–45

C. Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusa Tenggara

Kehadiran Islam ke daerah Nusa Tenggara antara lain ke Lombok diperkirakan sejak abad ke-16 M yang diperkenalkan oleh Sunan Perapen, putra Sunan Giri. Akan tetapi, Islam yang masuk ke Sumbawa mungkin melalui Sulawesi, melalui dakwah para mubalig dari Makassar antara 1540–1550 M terutama ke Sumbawa.[96]

1. Kerajaan Lombok dan Sumbawa

Di Lombok Islam disebarkan ke Pejanggik, Parwa, Sokong, Bayan, dan tempat-tempat lainnya sehingga seluruh Lombok memeluk Islam. Dari Lombok konon Sunan Perapen meneruskan dakwahnya ke Sumbawa. Pusat kerajaan Islam Lombok terutama dipusatkan di Selaparang di bawah pemerintahan Prabu Rangkesari. Pada masa itulah Selaparang mengalami zaman keemasan dan memegang hegemoni di seluruh Lombok. Hubungan dengan beberapa negeri dikembangkan terutama dengan Demak dan juga dengan para pedagang dari berbagai negeri. Namun, kerajaan Lombok itu mendapat gangguan dari kerajaan Gelgel sehingga sempat melakukan serangan terhadap kerajaan Islam Lombok tetapi masih dapat bertahan. Ketika VOC berusaha menguasai jalur perdagangan yang jelas bertubrukan dengan kerajaan Gowa yang segera menutup jalur perdagangan ke Lombok dan Sumbawa dan berhasil menguasai kedua daerah di Nusa Tenggara itu. Kerajaan-kerajaan di Sumbawa Barat dimasukkan ke dalam kekuasaan kerajaan Gowa tahun 1618, Bima ditaklukkan pula pada tahun 1633, Selaparang tahun 1640 tunduk dan demikian pula daerah-daerah lainnya sehingga pada abad ke-17 seluruh kerajaan Islam Lombok ada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Gowa. Hubungan antara kerajaan Gowa dan Lombok dipererat dengan perkawinan seperti Pemban Selaparang, Pemban Pejanggik, dan Pemban Parwa. Setelah terjadi Perjanjian Bongaya antara kerajaan Gowa tanggal 18 November 1667 akibat lumpuhnya peperangan di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin, giliran kerajaan-kerajan di Nusa Tenggara mulai ditekan oleh VOC.

Pusat kerajaan Lombok dipindahkan ke Sumbawa tahun 1673 dengan tujuan untuk dapat mempertahankan kedaulatan kerajaan-kerajaan Islam di pulau tersebut dengan dukungan pengaruh kekuasaan Gowa, karena Sumbawa dipandang lebih strategis daripada pusat pemerintahan di Selaparang mengingat ancaman dan serangan terhadap VOC terus-menerus terjadi yang akhirnya daerah-daerah kerajaan

96 Arnold, Thomas W, *Sejarah Dakwah Islam* (Penterjemah: Drs H.A. Nawawi Rambe, Penerbit Wijaya Jakarta, 1981, hlm. 346–347

Lombok berada di bawah VOC dan raja-raja yang mengadakan perlawanan ditangkapi kemudian diasingkan ke Maluku. Kerajaan Sumbawa akhirnya juga dapat dikuasai VOC tetapi keadaan di kedua kerajaan Lombok dan Sumbawa tetap tidak aman karena selalu ada pemberontakan yang menentang terlalu campur tangannya VOC.

2. Kerajaan Bima

Bima merupakan pusat pemerintahan atau kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara dengan raja pertama yang masuk Islam yaitu Ruma Ta Ma Bata Wada yang bergelar Sultan Bima I atau Sultan Abdul Kahir. Sejak itu pula hubungan erat kerajaan Bima dengan kerajaan Gowa, lebih-lebih sejak perjuangan Sultan Hasanuddin kandas akibat Perjanjian Bongaya. Akan tetapi, setelah kerajaan Bima terus-menerus melakukan perlawanan terhadap masuknya politik dan monopoli perdagangan VOC akhirnya tunduk di bawah kekuasaannya. Ketika VOC mau memperbarui perjanjiannya dengan Bima tahun 1668 ditolak oleh Raja Bima, Tureli Nggampo; ketika Tambora merampas kapal VOC tahun 1675, Raja Tambora, Kalongkong, dan para pembesarnya diharuskan menyerahkan keris-keris pusakanya kepada Holsteijn. Pada tahun 1691, ketika permaisuri kerajaan Dompu terbunuh, Raja kerajaan Bima ditangkap dan diasingkan ke Makassar sampai meninggal di dalam penjara. Di antara kerajaan-kerajaan di Lombok, Sumbawa, Bima, dan kerajaan-kerajaan lainnya selama abad ke-18 dan akhir abad itu masih menunjukkan pemberontakan dan peperangan, karena pihak VOC senantiasa memaksakan kehendaknya mencampuri pemerintahan kerajaan-kerajaan bahkan menangkapi dan mengasingkan raja-raja yang melawan.[97]

Sebenarnya jika kita membicarakan sejarah kerajaan Bima abad ke-19 dapat diperkaya dengan gambaran rinci dalam *Syair Kerajaan Bima* yang menurut telaah filologi Cambert Loir diperkirakan dikarang sebelum tahun 1833 M sebelum Raja Bicara Abdul Nabi meletakkan jabatannya dan diganti oleh putranya. Pendek kata syair itu dikarang oleh Khatib Lukman barangkali tahun 1830 M. Syair itu ditulis dalam huruf Jawi dengan bahasa Melayu. Dalam syair itu diceritakan 4 peristiwa yang terjadi di Bima pada pertengahan abad XIX, yaitu letusan Gunung Tambora, wafat dan pemakaman Sultan Abdul Hamid bulan Mei 1819, serangan bajak laut, penobatan Sultan Ismail tanggal 26 November 1819, Sultan Abdul Hamid dan Wazir Abdul Nabi, pelayaran Sultan Abdul

97 Proses sejarah kerajaan-kerajaan Lombok, Sumbawa, dan Bima dapat dibaca dalam buku *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, Bambang Suwondo (Pemimpin Proyek), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1977/ 1978, hlm. 41–66

Hamid ke Makassar tahun 1792, kontrak Bima tanggal 26 Mei 1792, pelantikan Raja Bicara Abdul Nabi, Sultan Ismail, Reinwardt, dan H. Zollinger mengunjungi Sumbawa dan menemui Sultan.[98]

D. Kerajaan-Kerajaan Islam di Maluku

Tanda-tanda awal kehadiran Islam di daerah Maluku dapat diketahui dari sumber-sumber berupa naskah-naskah kuno dalam bentuk hikayat seperti *Hikayat Hitu*, *Hikayat Bacan,* dan hikayat-hikayat setempat lainnya. Sudah tentu sumber berita asing seperti Cina, Portugis, dan lainnya amat menunjang cerita sejarah daerah Maluku itu. Di antara kerajaan-kerajaan bercorak Islam di kepulauan Maluku yang menonjol dan akan dibicarakan terutama kerajaan Ternate dan Tidore.

1. Kerajaan Ternate

Pada abad ke-14 dalam kitab *Negarakertagama,* karya Mpu Prapanca 1365 M yang disebut Maluku dibedakan dengan Ambon, yaitu Ternate. Hal itu juga dapat dihubungkan dengan *Hikayat Ternate* yang antara lain menyebutkan Moeloka (Maluku) artinya Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. *Hikayat Bacan* mendukung pengertian "Maluku" hanya terdiri dari 4 kepulauan itu.[99] Pada abad ke-14 M masa kerajaan Majapahit, hubungan pelayaran dan perdagangan antara pelabuhan-pelabuhan terutama Tuban dan Gresik dengan daerah Hitu, Ternate, Tidore, bahkan Ambon sendiri sudah sering terjadi. Pada abad tersebut pelabuhan-pelabuhan yang masih di bawah Majapahit juga sudah didatangi para pedagang muslim. Untuk memperoleh komoditas berupa rempah-rempah terutama cengkih dan pala, para pedagang muslim dari Arab dan Timur Tengah lainnya itu juga sangat mungkin mendatangi daerah Maluku. *Hikayat Ternate* menyebutkan bahwa turunan raja-raja Maluku: Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan, adalah Jafar Sadik dari Arab. Dalam tradisi setempat dikatakan bahwa Raja Ternate XII bernama Molomatea (1350–1357) bersahabat dengan orang-orang muslim Arab yang datang di Maluku memberikan petunjuk pembuatan kapal. Demikian pula diceritakan bahwa pada masa pemerintahan Raja Marhum di Ternate, datang seorang alim dari Jawa bernama Maulana Husein yang mengajarkan membaca Alquran dan menulis huruf Arab yang indah sehingga menarik raja dan keluarganya serta masyarakatnya.[100]

---

98 Henri Chambert-Loir, *Syair Kerajaan Bima,* Lembaga Penelitian Prancis untuk Timur Jauh Ecole Francaisc D'Extreme-Orient, Jakarta-Bandung, 1982, hlm. 28, ringkasan isi, hlm. 37–50

99 Tjandrasasmita, Uka, "Peranan dan Sumbangan Islam dalam Sejarah Maluku", Makalah dalam *Seminar Sejarah Maluku* 15–10 Oktober 1972, Hasil-Hasil dan Materi Seminar Sejarah Maluku, Panitia Seminar Seminar Sejarah Maluku Perwakilan Departemen P dan K Provinsi Maluku, Ambon, 1972, hlm. 199–215

100 Tjandrasasmita, Uka, *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia dari Abad XIII sampai XVIII Masehi*, Penerbit Menara Kudus, 2000, hlm. 23

Meskipun demikian, mungkin waktu itu agama Islam belum begitu berkembang. Perkembangan baru terjadi pada masa Raja Cico atau putranya Gopi Baguna dan bersama Zainulabidin pergi ke Jawa belajar masuk agama betul, Iman Islam, Tauhid Marifat Islam.[101] Zainulabidin (1486–1500) yang mendapat ajaran Islam dari Giri mungkin dari Prabu Atmaka di Jawa terkenal sebagai Raja Bulawa artinya raja cengkih. Sekembalinya dari Jawa ia membawa mubalig yang bernama Tuhubahalul. *Hikayat Hitu* menceritakan bahwa yang mengiring Raja Zainulabidin ke Jawa adalah Perdana Menteri Jamilu dari Hitu.[102]

Hubungan perdagangan antara Maluku dengan Jawa oleh Tomé Pires (1512–1515) juga sudah diberitakan bahkan ia memberikan gambaran Ternate yang didatangi kapal-kapal dari Gresik milik Pate Yusuf, dan Raja Ternate yang sudah memeluk Islam adalah Sultan Bern Acorala dan hanya Raja Ternate yang menggunakan gelar sultan sedang yang lainnya masih memakai gelar raja-raja di Tidore, gelar raja disebut *Kolano*. Pada waktu itu diceritakan Sultan Ternate sedang berperang dengan mertuanya yang menjadi raja di Tidore, yaitu Raja Almansor. Ternate, Tidore, Bacan, Makyan, Hitu, dan Banda pada masa kehadiran Tomé Pires sudah banyak yang beragama Islam. Jika Islam memasuki daerah Maluku Tomé Pires mengatakan 50 tahun lalu, itu berarti antara tahun 1460–1465. Tahun-tahun tersebut menunjukkan persamaan dengan berita Antonio yang mengatakan bahwa Islam di daerah Maluku mulai 80 atau 90 tahun lalu dari kehadirannya di daerah Maluku (1540–1545) yang juga jatuhnya lebih kurang tahun 1460–1463 M.[103] Kerajaan Ternate sejak itu makin mengalami kemajuan baik di bidang ekonomi–perdagangan maupun di bidang politik, lebih-lebih setelah Sultan Hairun putra Sultan Zainalabidin menaiki takhta sekitar tahun 1535 kerajaan Ternate berhasil mempersatukan daerah-daerah di Maluku Utara. Akan tetapi, persatuan daerah-daerah dalam kerajaan Ternate itu mulai pecah karena kedatangan orang-orang Portugis dan juga orang-orang Spanyol ke Tidore dalam upaya monopoli perdagangan terutama rempah-rempah. Di kalangan kedua bangsa itu juga terjadi persaingan monopoli perdagangan, Portugis memusatkan perhatiannya kepada Ternate sedangkan pedagang Spanyol kepada Tidore.

---

101 Tjandrasasmita, *op. cit.*, 1972, hlm. 207

102 Graaf, H.J. de, *South-East Asian Islam to The Eghteenth Century*, Cambridge History of Islam, 1970, hlm. 136

103 Cortesao, Armando, *Suma Oriental of Tomé Pires* ..., Hakluyt Society, 1944, hlm. 213; Jacobs, S.J. Hubert 'Th. Th. M.; *Source and Studies for the History of the Jesuits* Vol III, *'A Tretise of the Moluccas (C.1544) Probably the prelimenary version of Anthonio Galvao lost Historia and Moluccas*, Edited by from the Portuguese manuscripts on the Archivo General de Indio Savilla, Italy, 1970/71, hlm. 83, 85 Catatan 14

Bagaimanapun kehadiran para pedagang Portugis di Ternate dirasakan kerajaan Ternate merugikan karena monopoli perdagangan sehingga kerap menimbulkan pemberontakan terhadap kedudukan Portugis di Ternate, terlebih pada masa Antonio Galvao menjadi Gubernur Portugis di Maluku (1536–1540). Pada tahun 1565 Sultan Khairun dengan rakyatnya mengadakan penyerangan-penyerangan terhadap Portugis karena hampir terdesak pihak Portugis melakukan penipuan dengan dalih untuk mengadakan perundingan tetapi ternyata Sultan Khairun dibunuh pada tahun 1570 yang menyebabkan makin marahnya rakyat Ternate. Perlawanan rakyat itu diteruskan di bawah pimpinan putranya, Sultan Baabullah, yang pada tanggal 28 Desember 1577 berhasil mengusir orang-orang Portugis dari Ternate, menyingkir ke pulau dekat Tahula tidak jauh dari Tidore, tetapi tetap diganggu oleh orang-orang Ternate agar menyingkir dari tempat itu, Sultan Baabullah menyatakan dirinya sebagai penguasa seluruh Maluku bahkan mendapat pengakuan kekuasaannya sampai ke berbagai daerah Mindanao, Manado, Sangihe, dan daerah-daerah Nusa Tenggara. Sultan Baabullah mendapat julukan sebagai *Penguasa 72 Kepulauan* dan menganggap sebagai emperor seluruh wilayah dan sangat berkuasa.[104] Sultan Baabullah wafat pada tahun 1583, Orang-orang Spanyol berkesempatan menyerang Ternate dan memang berhasil merebut benteng Gamulamu di Ternate tahun 1606. Sultan Ternate pada waktu itu Sahid Barkat ditangkap dan diminta agar menyerahkan semua benteng-benteng yang ada kepada sekutunya, agar tawanan orang-orang Kristen dibebaskan, kemudian Raja Ternate itu diasingkan dengan putra-putranya serta Kaicil-Kaicil dibawa ke Manila. Dengan munculnya VOC Belanda di daerah Maluku berarti kerajaan-kerajaan di daerah itu menghadapi monopoli ekonomi–perdagangan dan pengaruh politik kolonialismenya.

2. Kerajaan Tidore

Di atas sudah dikatakan bahwa baik saat kehadiran Tomé Pires (1512–1515) maupun Anthonio Galvao (1535–1544) antara kerajaan Ternate dan Tidore sudah ada persaingan meskipun raja-rajanya masih ada hubungan keluarga. Dengan kehadiran pedagang-pedagang Portugis yang semula menguntungkan kerajaan Ternate lambat laun menimbulkan persaingan antara kerajaan-kerajaan di daerah Maluku, terutama antara kerajaan-kerajaan di Ternate. Karena itulah timbul lagi pemberontakan yang dipimpin langsung oleh Sultan Khairun, yang memegang kembali

104 Abdurrahman Paramita, R., "Moluccas Responses to The First Intrusions of The West", *Dynamic of Indonesian History* (Editors: Haryati Soebadio-Carine A. Dumarchie Sarvaas), North Holland Publishing Company Amsterdam—New York-Oxford, 1978, hlm. 181–182 (161–188)

pemerintahan kerajaan Ternate setelah kematian Tabarija yang sangat kompromis dengan Portugis. Pada tahun 1553 Sultan Khairun mengadakan konsolidasi dengan perdana-perdana dari Hitu sehingga pada tahun 1555 timbul peperangan yang tidak dapat dielakkan ketika menghadapi hasil cengkih dari Makyan yang seharusnya diterima kerajaan Ternate dan Tidore, tetapi harus diberikan kepada penguasa Portugis. Ia juga sangat menentang pendirian benteng di Ambon oleh orang Portugis karena dikhawatirkan akan menjadi tempat konsolidasi kekuatannya. Sultan Khairun karena bukan dari Permaisuri selalu membuat pengabsahan dirinya. Peperangan yang terjadi dengan Portugis yang demikian dahsyatnya mendorong Portugis untuk berunding dan dengan dalih itulah tipu daya Portugis berhasil membunuh Sultan Khairun pada tahun 1570 M.

Penggantinya jatuh ke tangan putranya yaitu Sultan Baabullah, yang meneruskan memimpin peperangan melawan orang-orang Portugis. Sultan Baabullah menyatakan dirinya sebagai penguasa seluruh daerah Maluku bahkan mendapat pengakuan dari kerajaan-kerajaan lain dari luar Maluku, seperti Kepulauan Mindanao, Manado, Sangihe, sampai ke daerah-daerah Nusa Tenggara. Ia dikenal dengan julukan *'Penguasa 72 Kepulauan'*. Utusan-utusan dari Jawa, Melayu, dan terutama dari Johor dan penguasaan terhadap Loloda, Bacan, Jailolo, dan Tidore diharapkan juga dalam kekuasaannya. Pendek kata, Sultan Baabullah menganggap dirinya sebagai *emperor* seluruh wilayah dan sangat berkuasa. Pada waktu itu orang-orang Portugis berhasil diusir ke daerah Leitimor. Serikat Dagang Inggris di bawah pimpinan Francis Drake yang sudah berkeliling dunia sampai di Ternate tahun 1579 dan diterima Sultan Baabullah.

Pada tahun 1583 Sultan Baabullah wafat dan digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Said sebagai Sultan Ternate. Pada masa pemerintahannya kedatangan kapal Belanda tahun 1599 di bawah pimpinan Jacob van Neck, Wijbrand van Warewijk, dan Jacob van Heemskerk sampai di Hitu, diterima dengan baik oleh kedua orang bersaudara, Raja Ternate dan Kapiten Hitu. Mereka meneruskan pelayarannya ke Ternate dan diterima dengan baik oleh Sultan Said yang bertujuan selain untuk perdagangan juga untuk diminta bantuannya dalam meluaskan kekuasaan politik Sultan Said. Kehadiran bangsa Barat lainnya, seperti orang Inggris dan kemudian Belanda bagi orang-orang Portugis yang masih merasa kuat kedudukannya terkejut dan akhirnya berhasil menyaingi perdagangan orang-orang Portugis dan Spanyol yang lambat laun menyingkir kembali sebagian besar ke Malaka dan orang-orang Spanyol ke Manila. Sejak VOC memenangkan persaingan, kerajaan-kerajaan di daerah Maluku menghadapi monopoli perdagangan dan penguasaan politik VOC Belanda. Pada tahun 1607 VOC mendirikan

benteng-bentengnya di Ternate dan daerah-daerah takluknya sehingga praktis pada awal abad ke-17 M, baik orang-orang Portugis maupun Spanyol hengkang dari daerah Maluku dan VOC Belanda yang berhasil meluaskan politik ekspansi dan politik monopoli perdagangan di kepulauan rempah-rempah itu.

E. Kerajaan-Kerajaan Islam di Sulawesi

Kerajaan-kerajaan Islam yang terdapat di Sulawesi Selatan, antara lain Luwu, Gowa-Tallo, Bone, Soppeng, dan Wajo. Akan tetapi, dalam hal ini yang akan dibicarakan adalah kerajaan Gowa–Tallo, Bone, dan Wajo. Kerajaan Gowa–Tallo terutama mempunyai peran sejarah daerah, nasional, juga internasional mengingat ibu negerinya Sombaopu sebagai negara-kota (*city-state*) yang berperan dalam perdagangan regional dan internasional lagi pula mempunyai peranan penting dalam segi politik menentang kolonialisme Belanda pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin (1631–1670).

1. Kerajaan Gowa–Tallo

Baik sumber-sumber asing maupun sumber-sumber naskah-naskah kuno bahwa kehadiran agama Islam sudah ada sejak abad sebelum kedatangan Tomé Pires (1512–1515), karena ia menceritakan bahwa Makassar sudah melakukan hubungan perdagangan dengan Malaka, Kalimantan, dan Siam. Akan tetapi, Tomé Pires mengatakan bahwa penguasa-penguasa lebih dari 50 negeri di pulau itu masih menganut berhala, maksudnya belum Islam.[105] Pemberitaan Tomé Pires itu mungkin lebih menitikberatkan kepada sebuah kerajaan di Sulawesi belum resmi memeluk agama Islam, karena secara resmi kedua raja dari Gowa dan Tallo memeluk agama Islam pada tanggal 22 September 1605 M.[106] Negeri tersebut kaya akan beras putih dan juga bahan-bahan makanan lainnya, banyak daging dan juga banyak kapur barus hitam. Mereka memasok barang dagangan dari luar, antara lain jenis pakaian dari Cambay, Bengal, dan Keling. Mengingat jaringan perdagangan dari Cina sudah lama, barang-barang berupa keramik juga diimpor dan hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya temuan keramik dari masa Dinasti Sung dan Ming dari daerah Sulawesi Selatan.

Kerajaan Gowa–Tallo sebelum menjadi kerajaan Islam sering berperang dengan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, seperti dengan Luwu, Bone, Soppeng, dan Wajo. Kerajaan Luwu yang bersekutu dengan Wajo ditaklukan oleh kerajaan Gowa–Tallo. Kemudian kerajaan Wajo menjadi daerah takluk

105 Cortesao, Armando, *Suma Oriental of Tomé Pires*, Hakluyt Society, 1944, hlm. 226
106 Noorduyn J., De Islamiseering van Makassar, *BKI*, 1956, hlm. 247

Gowa menurut *Hikayat Wajo* hanya kerajaan Bone yang masih tetap bertahan karena bantuan Wajo secara rahasia. Dalam penyerangan terhadap kerajaan Gowa–Tallo, Karaeng Gowa meninggal dan seorang lagi terbunuh pada sekitar tahun 1565. Kemudian kerajaan Bone, Wajo, dan Soppeng mengadakan persatuan untuk mempertahankan kemerdekaannya yang disebut perjanjian *Tellumpocco*, barangkali terjadi tahun 1582. Akhirnya diadakan lagi perjanjian di Meru antara Bone dan Gowa.[107] Sejak kerajaan Gowa resmi merupakan kerajaan bercorak Islam tahun 1605, Gowa meluaskan politiknya agar kerajaan-kerajaan lainnya juga masuk Islam dan tunduk kepada kerajaan Gowa–Tallo antara lain Wajo tanggal 10 Mei 1610 dan Bone tanggal 23 November 1611. J. Norduyn berpendapat bahwa penaklukan terhadap kerajaan itu oleh Gowa–Tallo itu dirasakan sebagai harkat dan derajat agama baru yaitu Islam mendorong keruntuhan kerajaan yang memusuhi Gowa-Tallo membawa kerajaan Gowa-Tallo kepada kekuasaan dengan cepat dan pasti daripada sebelumnya.[108]

Menarik perhatian meskipun kerajaan Gowa–Tallo sudah Islam, pada masa pemerintahan raja-raja Gowa selanjutnya melukiskan hubungan baik dengan orang-orang Portugis yang membawa agama Kristen–Katolik. Contohnya masa Sultan Gowa Muhammad Said (14 Juni 1639–16 November 1653), bahkan masa putranya Sultan Hasanuddin (16 November 1639–29 Agustus 1669). Kedua-duanya memberikan bantuan kepada orang-orang Portugis umumnya dan kepada Francisco Viera pada khususnya yang telah menjadi utusan raja Gowa ke Banten dan Batavia bahkan Sultan Muhammad Said dan Karaeng Patingalong memberikan saham dalam perdagangan yang dilakukan Fransisco Viera.[109] Hubungan erat antara orang Portugis dengan Gowa disebabkan ancaman VOC Belanda yang hendaknya memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku.

Di daerah Sulawesi Selatan islamisasi makin mantap dengan adanya para mubalig yang disebut *Dalto Tallu (Tiger Dato)*; Dato'ri Bandang (Abdul Makmur atau Khatib Tunggal), Dato'ri Pattimang (Dato' Sulaemana atau Khatib Sulung), Dato'ri Tiro (Abdul Jawad alias Khatib Bungsu), ketiganya bersaudara dan berasal dari Koto Tengah, Minangkabau.[110] Para mubalig itulah yang mengislamkan raja Luwu, yaitu Datu' La Patiware'Daeng Parabung dengan gelar Sultan Muhammad tanggal 15–16 Ramadan 1013 H (4–5 Februari 1605). Kemudian disusul oleh raja Gowa dan Tallo yaitu Karaeng Matowaya dari Tallo yang bernama

107 Noorduyn, J., *Een Achtiende Eukse Kronieh van Wadjo*, Disertasi, Leiden, 1995, hlm. 320

108 Noorduyn, J., *Ibid.*, hlm. 9103, catatan 12, hlm. 98

109 Boxer, C.R, Fransisco Viera de Figueiredo, A Portuguese Merchant Adventurer in South-East Asia, 1624–1667, *VKI*, 52, 1967, hlm. 3, 4, 8

110 Christian Pelras, *Religion, Tradition and the Dynamics of Islamization in South-Sulawesi. L'Islam En Indonesian Archipel 29*, Paris, 1985, hlm. 108–109 (107–135)

I Mallingkang Daeng Manyonri (Karaeng Tallo) mengucapkan syahadat hari Jumat sore tanggal 9 Jumadil Awal 1014 H (22 September 1605 M) dengan gelar Sultan Abdullah. Selanjutnya Karaeng Gowa I Manga' rangi Daeng Manrabbia mengucapkan syahadat pada hari Jumat 19 Rajab 1016 H (9 November 1607 M). Perkembangan agama Islam di daerah Sulawesi Selatan mendapat tempat sebaik-baiknya bahkan ajaran Sufisme Khalwatiyah dari Syeikh Yusuf al-Makasari juga tersebar di kerajaan Gowa dan kerajaan lainnya pada medio abad ke-17 M. Akan tetapi, karena banyak tantangan dari kaum bangsawan Gowa, ia meninggalkan Sulawesi Selatan pergi ke Banten yang diterima oleh Sultan Ageng Tirtayasa bahkan dijadikan mantu dan diangkat sebagai mufti di Kesultanan Banten.[111]

Dalam sejarah kerajaan Gowa perlu dicatat sejarah perjuangan Sultan Hasanuddin dalam mempertahankan kedaulatannya terhadap upaya penjajahan politik dan ekonomi kompeni (VOC) Belanda. Semula VOC tidak menaruh perhatian terhadap kerajaan Gowa–Tallo yang telah mengalami kemajuan dalam bidang perdagangan, tetapi setelah kapal Portugis yang dirampas oleh VOC pada masa Gubernur Jenderal Y. P. Coen di dekat perairan Malaka, ternyata ada orang Makassar dan dari orang inilah ia mendapat berita tentang pentingnya pelabuhan Sombaopu sebagai pelabuhan transito terutama mendatangkan rempah-rempah dari Maluku. Pada waktu kapal VOC berada di Perairan Banda dicobanya mengirimkan surat kepada raja Gowa untuk bersahabat hanya dalam perdagangan. Raja Gowa mengundang orang VOC ke Sombaopu, ternyata VOC mulai menunjukkan tanda-tanda perilaku memaksakan kehendaknya terutama mengenai perdagangan rempah-rempah dari daerah Maluku. Pada tahun 1616 ketika sebuah kapal Belanda turun di Sumbawa orang-orangnya dibunuh, dan inilah yang membuat Y.P. Coen di Batavia marah. Pihak kerajaan Gowa menganggap VOC sebagai *"perdagangan penyelundupan"*.[112] Sejak itulah permusuhan antara kerajaan Gowa dan VOC tidak ada hentinya. Pada tahun 1634 VOC memblokade kerajaan Gowa tetapi tidak berhasil. Peristiwa peperangan dari waktu ke waktu berjalan terus dan baru berdamai antara tahun 1637–1638.

Namun, perjanjian damai itu tidak kekal karena pada tahun 1638 dengan perampokan kapal orang Bugis yang bermuatan kayu cendana dan telah dijual kepada orang Portugis. Orang Portugis minta ganti rugi kepada raja Gowa tetapi Raja Gowa Karaeng Patengaloan menolaknya dan akhirnya Raja Gowa mengusir orang-orang Belanda dan Sombaopu. Kecuali itu, raja

111 Riwayat hidup, guru-gurunya dan ajaran serta kitab-kitab Syeikh Yusuf al-Makassari secara rinci telah dibicarakan oleh Dr. Azyumardi Azra dalam *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Penerbit Mizan, Bandung, 1994. hlm. 211–239

112 Stapel, W., Het Bongaaisch Verdrag J. B. Wolters-Groningen, De Haag 1922. hlm. 16

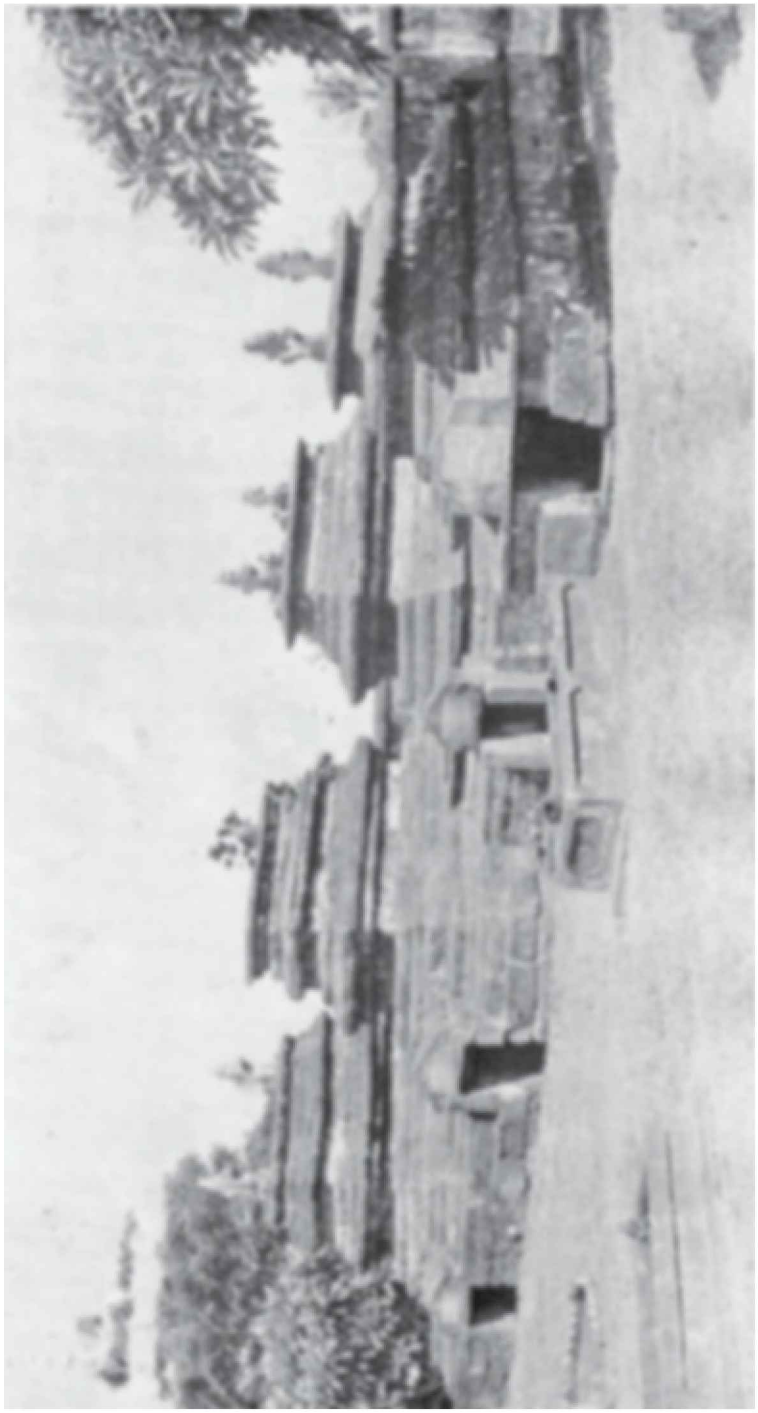

Gambar 2.21 Kompleks makam Sultan Hasanuddin abad ke-17 di Tamalatte Goa, Sulawesi Selatan

Gowa memberikan hak-hak istimewa dalam perdagangan terhadap orang-orang Portugis, Inggris, dan Denmark yang berada di Sombaopu. Demikian pula Gowa telah membantu Hitu dan Seram karena merasa seagama dan bantuan itu dengan mengirimkan armadanya yang berkekuatan 5.000 orang. Perang antara kerajaan Gowa dan VOC tidak dapat dielakkan lagi menjelang akhir tahun 1653 dan memang terjadi perang besar-besaran tahun 1654–1655, di mana-mana di pelabuhan Sombaopu, di daerah Maluku dengan rakyat di sana yang membantu Gowa sebab tidak menyenangi politik monopoli perdagangan rempah-rempah. Karena beratnya VOC menghadapi peperangan itu, dari Batavia dikirimkan utusan untuk menyodorkan perdamaian yang terjadi pada tanggal 27 Februari 1656. Perjanjian tersebut diterima Gowa karena menguntungkan, yaitu dibolehkan menagih utangnya di Ambon. Boleh menagih utang atas perompakan kapal Bugis yang memuat kayu cendana seperti yang pernah terjadi, VOC tidak pernah akan campur tangan dengan urusan dalam kerajaan Gowa, dan akan membayar kerugian atas penangkapan orang-orang Makassar di Maluku dan sebagainya.[113] Perjanjian tersebut oleh pihak VOC sendiri dianggap merugikan dan karenanya mempersiapkan armada dan persenjataan untuk menyerang Gowa yang sudah siap. Speelman dengan armadanya yang waktu itu sudah siap pula dan mendapat bantuan tentara dari Arung Palaka yang sudah memihak kepada Belanda. Sultan Gowa di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin tidak gentar dengan pengerahan tentara dan armadanya menghadapi kekuatan VOC. Di mana-mana terjadi pertempuran hebat dan tidak kurang mereka membayar desa-desa yang setelah lama perang berkecamuk di antara dua belah pihak, Barombong diserang besar-besaran oleh tentara VOC di bawah pimpinan Speelman dan tentara Bugis di bawah Arung Palaka akhirnya melalui Perjanjian Bongaya yang ditandatangani di Batavia tanggal 18 November 1667.

2. Kerajaan Bone

Semasa kerajaan Gowa–Tallo belum menjadi kerajaan Islam, perselisihan dengan kerajaan-kerajaan lainnya sering terjadi antara lain dengan Bone, Soppeng, dan Wajo. Persekutuan tiga kerajaan tersebut yang dinamakan "*Tallum Pocco*" merupakan masa perdamaian antara ketiga kerajaan itu meski pihak kerajaan Gowa–Tallo tetap berusaha meluaskan kekuasaannya. Menjelang akhir abad ke-16 terjadi lagi perang antara kerajaan Gowa–Tallo dengan kerajaan Bone, tetapi kerajaan Bone belum terkalahkan. Peperangan ini diakhiri lagi melalui pertemuan di Callepa yang disebut perjanjian Ulung Kanaya ri Callepa. Di samping itu, dibuat lagi

113 Stapel, W.F., *Ibid.*, 1922, hlm. 54

suatu persekutuan yang berisi pernyataan bahwa jika ada musuh terhadap kerajaan Gowa–Tallo adalah juga musuh kerajaan Bone, dan sebaliknya. Akan tetapi, perjanjian itu mulai luntur dan terjadi lagi perang antara lain karena di antara tiga kerajaan Bone, Soppeng, dan Wajo terikat perjanjian Tallum Pocco dan dari ketiga kerajaan itulah perlawanan terhadap kerajaan Gowa–Tallo. Lebih-lebih setelah secara resmi kerajaan Gowa-Tallo sebagai kerajaan Islam tahun 1605. Di Sulawesi Selatan hasrat meluaskan kekuasaan politiknya agar ketiga kerajaan itu juga menjadi kerajaan yang bercorak Islam. Kerajaan Gowa–Tallo mulai menyerang Bone dan takluklah kerajaan itu pada tahun 1611 dan rajanya masuk agama Islam yang bergelar Sultan Adam, lalu pada masa pemerintahan Raja Bone XIII, La Madarmeng, terjadi lagi perselisihan antara kerajaan Bone dengan kerajaan Gowa–Tallo sehingga kerajaan Bone mendapat serangan yang berakhir dengan ditangkapnya raja Bone tersebut dan dibawa sebagai tawanan ke Gowa.

Selama Raja Bone XIII berada di Gowa ia menunjukkan ketaatannya terhadap agama Islam sehingga ia dikembalikan ke Bone. Anehnya, ibunya melarikan diri ke Gowa dan menimbulkan ketidaksenangan pihak kerajaan Gowa–Tallo yang mengakibatkan Bone diserang lagi tahun 1643. Raja Bone dapat ditundukkan. Raja Bone ditawan dan dibawa ke Gowa, dan untuk sementara Arung Pitu ditempatkan di Bone untuk mencarikan siapa raja yang diangkat untuk kerajaan Bone. Namun, ternyata kesepakatan orang-orang Bone agar pengangkatan raja untuk kerajaan Bone tetap dari Gowa–Tallo. Keputusan orang-orang Bone tidak diterima oleh Gowa dan kembali timbul perselisihan, tetapi akhirnya juga disetujui dengan resmi Raja Gowa memerintah kerajaan Bone meskipun diwakilkan kepada orang lain.[114]

Masa persatuan Gowa–Bone itu tidak lama karena sejak tahun 1667 putra La Madaremeng, yaitu Aru Palaka yang bertahun-tahun menjadi tawanan kerajaan Gowa–Tallo dalam peristiwa perang kerajaan Gowa di bawah Sultan Hasanuddin di bawah VOC hingga berakhirnya peperangan antara kerajaan Gowa–Tallo dengan VOC dengan Perjanjian Bongaya tahun 1667. Dengan demikian, perjuangan Aru Palaka berhasil dalam mempersatukan kerajaan-kerajaan Bugis sehingga ia mendapat julukan dan VOC sebagai *"De Koning der Boeginesen"*.[115] Proses sejarah yang terjadi di kerajaan Wajo secara garis besar dapat diikuti uraian selanjutnya.

3. Kerajaan Wajo

Bagaimana tumbuh dan berkembangnya kerajaan Wajo terdapat sumber hikayat lokal yang berupa naskah-naskah aslinya dan pernah diteliti

114 Taufik Abdullah, Dr. (Editor), *Sejarah Ummat Islam Indonesia*, diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 90–91

115 *Ibid.*, 1991, hlm. 91

Dr. J. Noorduyn dengan judul, *Een Aehtiende-Eeuwse Kronik van Wadjo*, yang penting bagi penulisan sejarah Wajo.[116] Sejarah awal kerajaan Wajo dikatakan masih gelap karena terdapat beberapa versi yang menceritakan munculnya nama Wajo. Di antara cerita ada yang menghubungkan dengan pendirian kampung Wajo oleh tiga orang anak raja dari kampung tetangga Cinnotta'bi yaitu dari keturunan dewa yang mendirikan kampung itu yang menjadi raja-raja dari ketiga bagian (limpo) bangsa Wajo: Bettempola, Talonlenreng, dan Tua. Kepala keluarga dari mereka menjadi raja di seluruh Wajo dengan gelar Batara Wajo. Batara Wajo yang ketiga dipaksa turun takhta karena kelakuannya yang buruk dan dibunuh oleh tiga orang Ranreng. Menarik perhatian kita bahwa sejak itu pengangkatan raja-raja di Wajo tidak lagi turun-temurun, tetapi melalui pemilihan dari seorang keluarga raja menjadi *Arung-matoa*, artinya raja yang pertama atau utama.

Selama pemerintah Arung-matoa yang keempat, dewan pengereh-praja diperluas dengan 3 Pa'betelompo (pendukung panji), 30 Arung-ma'bicara (raja hakim), dan 3 duta sehingga jumlah anggota dewan 40 orang. Mereka itulah yang memutuskan segala perkara. Kerajaan Wajo memperluas daerah kekuasaannya sehingga menjadi kerajaan Bugis yang besar. Pada masa pemerintahan Arung-matoa yang keempat, raja Wajo yang budiman dan ahli siasat perang yang ulung, dan pemerintahannya selama 40 tahun.

Di atas telah dibicarakan antara kerajaan-kerajaan Wajo dengan Gowa terjadi peperangan. Wajo pernah bersekutu dengan kerajaan Luwu dan bersatu dengan kerajaan Bone dan Soppeng dalam Perjanjian Tellum Pocco tahun 1582. Wajo pernah ditaklukan kerajaan Gowa dalam upaya memperluas Islam dan pernah tunduk pada tahun 1610. Di samping itu, diceritakan pula dalam hikayat tersebut bagaimana Dato'ri Bandang dan Dato'Sulaemana memberikan pelajaran agama Islam terhadap raja-raja Wajo dan rakyatnya dalam masalah kalam fikih. Pada waktu itu di kerajaan Wajo dilantik pejabat-pejabat agama atau sara dan yang menjadi kadi pertama di Wajo adalah konon seorang wali dengan mujizatnya ketika berziarah ke Mekkah. Diceritakan bahwa di kerajaan Wajo selama tahun 1612 sampai 1679 diperintah oleh 10 orang Arung-matoa. Persekutuan dengan Gowa pada suatu waktu diperkuat dengan memberikan bantuan dalam peperangan, tetapi berulang kali Gowa juga mencampuri urusan pemerintah kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo sering pula membantu kerajaan Gowa pada peperangan baru dengan kerajaan Bone pada tahun 1643, 1660, dan 1667. Kerajaan Wajo sendiri pernah ditaklukan kerajaan Bone, tetapi karena didesak kerajaan Bone sendiri takluk kepada kerajaan Gowa–Tallo.

116 Noorduyn, J., *Een Achtiede-Eeuwse Kroniek van Wadjo,* Boeginese Historiografi, Disertasi, Universiteit Leiden, 16 Maret 1955, 's-Gravenhage, 1955

Melalui perang besar-besaran antara kerajaan Gowa–Tallo di bawah Sultan Hasanuddin melawan VOC yang dipimpin Speelman yang mendapat bantuan dari Aru Palaka dari Bone berakhir dengan Perjanjian Bongaya tahun 1667 di mana terjadi penyerahan kerajaan Gowa pada VOC dan disusul pada tahun 1670 kerajaan Wajo yang terlebih dahulu diserang tentara Bone dan VOC sehingga jatuhlah ibu kota kerajaan Wajo, yaitu Tosora. Arung-matoa to Sengeng gugur dalam penyerangan itu. Arung-matoa penggantinya terpaksa menandatangani perjanjian di Makassar tentang penyerahan kerajaan Wajo kepada VOC.[117]

F. Kerajaan-Kerajaan Islam di Kalimantan

Kita ketahui bahwa di seluruh Kalimantan terdapat kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Dalam pembicaraan ini di antara kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan yang akan dibicarakan ialah kerajaan Banjarmasin di Kalimantan Selatan, kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, dan kerajaan Pontianak di Kalimantan Barat. Kecuali itu, proses sejarah yang dialami oleh ketiga kerajaan tersebut yang dapat diutarakan hanya garis besarnya seperti uraian proses kesejarahan kerajaan-kerajaan Islam lainnya yaitu mengenai tumbuh dan berkembangnya dan beberapa catatan penting di bidang politik, ekonomi-perdagangan, agama, dan kebudayaan.

1. Kerajaan Banjar (Banjarmasin)

Kerajaan Banjar (Banjarmasin) terdapat di daerah Kalimantan Selatan yang muncul sejak kerajaan-kerajaan bercorak Hindu yaitu Nagara Dipa, Daha, dan Kahuripan yang berpusat di daerah hulu sungai Nagara di Amuntai kini. Kerajaan Nagara Dipa masa pemerintahan Putri Jungjung Built dan patihnya Lembu Amangkurat, pernah mengadakan hubungan dengan kerajaan Majapahit. Mengingat pengaruh Majapahit sudah sampai di daerah sungai Nagara, Batang Tabalung, Barito, dan sebagainya tercatat dalam *Kitab Nagarakertagama*.[118] Hubungan tersebut juga dibuktikan dalam cerita *Hikayat Banjar* dan *Kronik Banjarmasin*,[119] konon diceritakan bahwa di Kerajaan Daha setelah pergantian Pangeran Sukarama oleh Pangeran Tumenggung timbul perpecahan dengan Raden Samudra cucu Pangeran

---

117 Pigeaud, Th., *Jawa in the 14 th Century. A Study in Cultural History, The Nagarakertagama by Rakawi Prapanca* (Majapahit 1365 AD. Vol III, The Hague, 1960, hlm. 16, Canto 14, Stanaza 1

118 Noorduyn, J., *Ibid.*, Lihat Ikhtisar, hlm. 319–321

119 Ras, J.J., *Hikayat Bandjar. A Study in Malay Historiography,* (Disertasi Leiden), S-Gravenhage NV De Nederlansche Boek en Steendrukkerij wh H.L. Smits, 1968; Cense, A.A., *De Kontek van Bandjarmasin* (Disertasi, Leiden, 1928

Sukarama. Raden Samudra dinobatkan sebagai Raja Banjar oleh Patih Masin, Muhur, Balit, dan Kuwin. Pada waktu menghadapi peperangan dengan Daha, Raden Samudra minta bantuan kerajaan Demak sehingga mendapat kemenangan dan sejak itulah kerajaan Samudra menjadi pemeluk agama Islam dengan gelar Sultan Suryanullah. Yang mengajarkan agama Islam kepada Raden Samudra dengan patih-patih serta rakyatnya adalah seorang penghulu Demak. Islamisasi di daerah itu menurut A.A. Cense terjadi sekitar 1550 M.[120] Sejak pemerintahan Sultan Suryanullah kerajaan Banjar/Banjarmasin meluaskan kekuasaannya sampai Sambas, Batanglawai Sukadana, Kotawaringin, Sampit, Madawi, dan Sambangan. Sebagai tanda daerah takluk biasanya pada waktu-waktu tertentu mengirimkan upeti kepada Sultan Suryanullah sebagai penguasa kerajaan Banjar/Banjarmasin. Setelah Sultan Suryanullah wafat, dan digantikan oleh putranya yang tertua dengan gelar Sultan Rahmatullah yang masih mengirimkan upeti ke Demak yang pada waktu itu sudah menjadi kerajaan Pajang. Setelah Sultan Rahmatullah, yang memerintah kerajaan Banjarmasin adalah seorang putranya yang bergelar Sultan Hidayatullah. Pada masa itu patih-patih yang namanya disebut di atas sudah tiada karena itu untuk mangkubumi Sultan Hidayatullah adalah Kyai Anggadipa.[121] Pengganti Sultan Hidayatullah adalah Sultan Marhum Panembahan atau dikenal dengan gelar Sultan Mustain Billah yang pada masa pemerintahannya berupaya memindahkan ibu kota kerajaan ke Amuntai. Masa pemerintahan Sultan Mustain Billah pada awal abad ke-17 ditakuti oleh kerajaan-kerajaan sekitarnya dan dapat menghimpun lebih kurang 50.000 prajurit.[122] Demikian kuatnya kerajaan Banjar/Banjarmasin sehingga dapat membendung pengaruh politik dari Tuban, Arosbaya, dan Mataram, di samping menguasai daerah-daerah kerajaan di Kalimantan Timur Tenggara, Tengah, dan Barat.[123] Pada awal abad ke-17 itu tepatnya tanggal 7 Juni 1607 Banjarmasin kedatangan pedagang Belanda Gillis Michielse-zoon diundang ke darat, tetapi akhirnya dibunuh dan kapalnya dirampas. Balasan dari pihak VOC tahun 1612 kota Banjarmasin hancur ditembaki Belanda. Akhirnya Sultan Marhum Panembahan memindahkan pusat kerajaan ke Kayu Tangi. Perdamaian baru terjadi lagi tahun 1635, tetapi hubungan tersebut tidak lama.

Kerajaan Banjar atau Banjarmasin sejak pengaruh Belanda politik monopoli perdagangan masuk di Kalimantan Selatan terus-menerus

120 Cense, A.A., *Ibid.*, hlm. 107, 109

121 Ras, J.J. *Hikayat Bandjar*, 1968, hlm. 51.; Taufik Abdullah, Dr. (Editor), *Sejarah Ummat Islam Indonesia Majelis Ulama Indonesia*, 1991, hlm. 86–88

122 Dijk. L. C. D. van., *Nederlands Vroegste betrekkingen met Borneo, Den Solor Archipel,* Cambodja, Siam en Chocinching, Amsterdam, 1862, hlm. 7

123 Idwar Saleh, M., *Banjarmasin*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Proyek Pengembangan Permuseuman Kalimantan Selatan, 1981–1982, hlm. 31

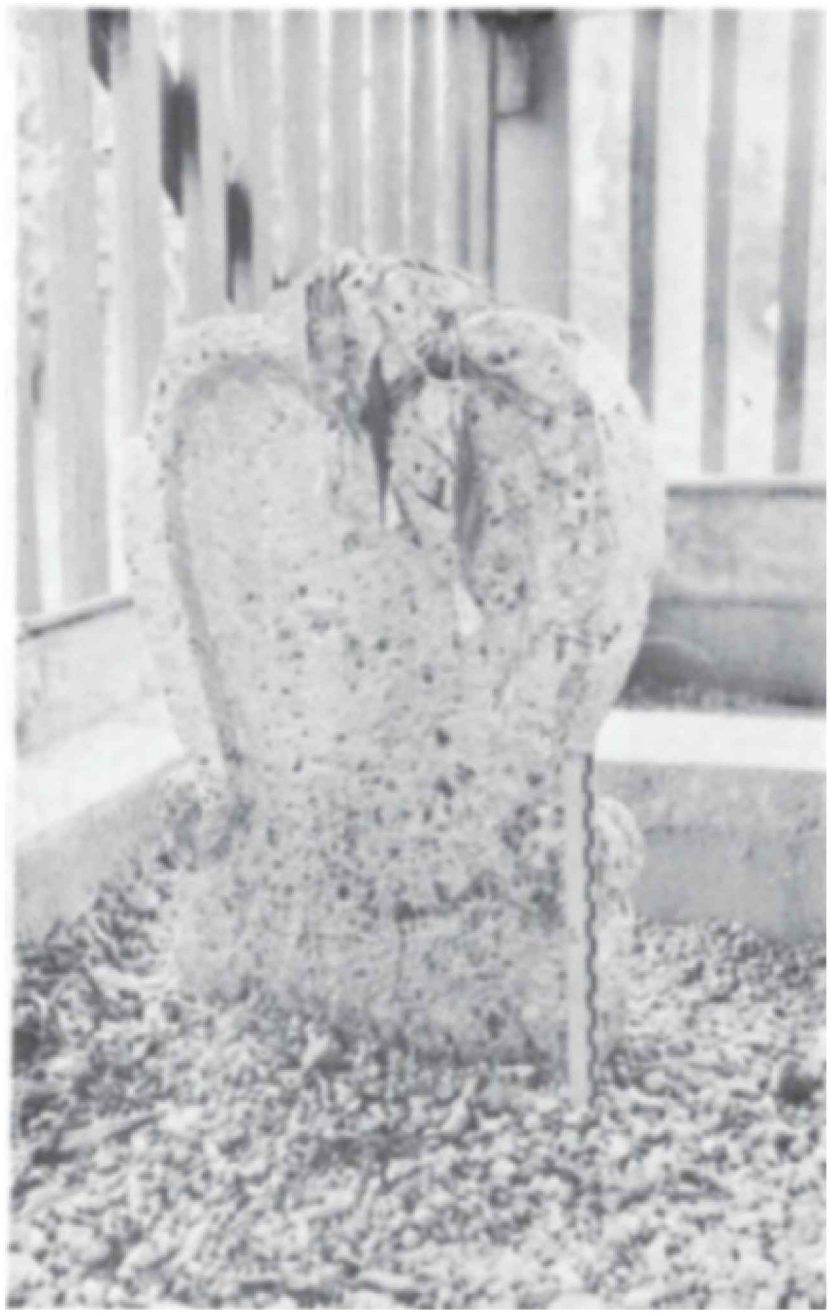

Gambar 2.22 Nisan Kubur Khatib Dayan abad ke-16 di kompleks makam Sultan Suryan Syah di Kuin 3 Banjarmasin

terjadi perselisihan-perselisihan baik dengan pihak Belanda maupun di lingkungan kerajaan Banjar sendiri, ditambah masalah pedagang Inggris. Terutama sejak abad ke-18, yaitu sejak Belanda membuat benteng di Pulau Tatas tahun 1747 bahkan kelak pada abad ke-19, yaitu tepatnya tanggal 4 Mei 1826 melalui kontrak antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Sultan Adam, dalam hal ini Pulau Tatas diserahkan kepada Belanda, juga daerah Kuwin Selatan, Pulau Burung, Pulau Bakumpal, dan sebagainya.[124] Meskipun keadaan politik kerajaan Banjar yang kurang stabil itu boleh dicatat bahwa pada abad ke-18 di kerajaan Banjar ada seorang ulama besar yang bernama Muhammad Arsyad b'Abdullah Al-Banjari (1710–1812) lahir di Martapura. Atas biaya kesultanan, masa Sultan Tahlil Allah (1700–1745) pergi belajar ke Haramayn selama beberapa tahun. Sekembalinya ia mengajarkan fikih atau syariah, dengan kitabnya *Sabil Al-Muhtadin*. Ia juga ahli di bidang tasawuf dengan karyanya *Khaz Al-Ma'rifah*. Baik riwayatnya maupun ajaran dan guru-guru serta kitab-kitab hasil karyanya secara panjang lebar telah dibicarakan oleh Dr. Azyumardi Azra dalam *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII* dan *XVIII*.[125] Sejak wafatnya Sultan Adam, tanggal 1 November 1857, pergantian sultan-sultan dengan campur tangan politik Belanda mulai menimbulkan pertentangan-pertentangan antara keluarga raja-raja. Lebih-lebih setelah dihapuskannya kerajaan Banjar oleh Belanda. Perlawanan-perlawanan terhadap Belanda itu terus-menerus terutama antara tahun 1859–1863 merupakan perjuangan baik rakyat maupun para pahlawan, antara lain Pangeran Antasari, Pangeran Demang Leman, dan Haji Nasrun. Perlawanan terhadap penjajah Belanda itu sebenarnya terus dilakukan sampai tahun-tahun selanjutnya.[126]

2. Kerajaan Kutai

Di Kalimantan Timur terutama di Kutai pada masa kehadiran dan islamisasi tidak menghadapi situasi dan kondisi politik perpecahan keluarga raja-rajanya, berbeda dengan di Kalimantan Selatan, kerajaan Kutai yang bercorak Hindu diceritakan dalam *Hikayat Kutai* selalu mengadakan hubungan dengan kerajaan Majapahit. Demikian hubungan tersebut dapat

124 Idwar, Saleh, M., *Ibid.*, 1981–1982, hlm. 33

125 Azyumardi Azra. Dr., *Jaringan Ulama Tengah ...*, Mizan, Bandung, 1994, hlm. 251–257

126 Untuk rincinya perjuangan rakyat Banjar dapat dilihat dalam R. Z. Leirisa (Editor), "Nusantara di Abad ke-18 dan ke-10, *Dalam Sejarah Nasional Indonesia IV,* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 217–278, Perang Banjar antara tahun 1859–1863 itu oleh W. A. van Rees dalam bukunya disebut *De Bandjarmashsrhe Krijg van* 1859–1863. I. Arnem. D.A. Theime, 1865, untuk perjuangan Pangeran Antasari dengan kawan-kawannya dapat dilihat hasil karya, M. Idwar Saleh; *Antasari,* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta, 1993, khususnya pada Bab III, hlm. 46–58

diketahui dari data dalam *Nagara Kertagama* karya Mpu Prapanca tahun 1365 M.[127] Konon diceritakan dalam *Hikayat Kutai* pada masa pemerintahan Raja Mahkota datanglah dua orang mubalig Islam yaitu Dato'ri Bandang dan Tunggang Parangan setelah mengislamkan Makassar. Setelah itu, beradu kesaktian dengan Raja Mahkota itu dan kalah. Maka Raja Mahkota mulai memeluk agama Islam. C.A. Mees mengirakan kedatangan Islam dan mulai dianut oleh Raja Kutai itu sekitar tahun 1575 M.[128] Kerajaan Kutai selanjutnya melakukan penyebaran Islam ke daerah-daerah sekitarnya sampai pada awal abad ke-17 yang mana mulai didatangi pedagang-pedagang VOC Belanda. Bahkan sampai penjajahan Hindia Belanda.

3. Kerajaan Pontianak

Kerajaan-kerajaan yang terletak di daerah Kalimantan Barat kini antara lain Tanjungpura dan Lawe pernah diberitakan Tomé Pires (1512–15151). Tanjungpura, dan Lawe menurut berita musafir Portugis itu sudah mempunyai kegiatan dalam perdagangan baik dengan Malaka dan Jawa, bahkan kedua daerah yang diperintah oleh Pate atau mungkin adipati kesemuanya tunduk kepada kerajaan di Jawa yang diperintah Pate Unus. Tanjungpura dan dari Lawe (daerah Sukadana) menghasilkan komoditas seperti banyak emas, berlian, padi, dan banyak bahan makanan. Banyak barang dagangan dari Malaka yang dimasukkan ke daerah itu, demikian pula jenis pakaian dari Bengal dan Keling yang berwarna merah dan hitam dengan harga yang mahal dan yang murah, dikatakan pula bahwa rakyatnya banyak yang menjadi pedagang.[129] Pada abad ke-17 kedua daerah kerajaan itu telah ada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Mataram terutama dalam upaya peluasan politik dalam menghadapi ekspansi politik VOC.

Menarik perhatian beberapa tahun yang lampau pernah dilaporkan kepada Pusat Penelitian Arkeologi Nasional di Jakarta bahwa di daerah Sukadana ditemukan nisan-nisan kubur Islam dan ternyata setelah diteliti bentuknya menunjukkan persamaan dengan nisan-nisan kubur dari Tralaya yang pernah diteliti oleh L. Ch. Damais. Nisan-nisan kubur dari daerah Sukadana itu seperti halnya nisan-nisan kubur di Tralaya sekitar abad ke-14–15 M. Pendapat itu diperkuat bahwa kedua kerajaan Tanjungpura dan Lawe (Sukadana) sudah banyak hubungannya dengan Jawa dan Malaka sehingga kehadiran Islam di daerah Kalimantan Barat di pesisir itu mungkin sudah ada sejak abad-abad tersebut. Demikian pula Kotawaringin

127 Mees, C. A., *De Kroniek van Koetai,* (Disertasi) Leiden, 1935, hlm. 90–93, Pigeaud, Th., *Java in the 14th Century* ... Vol. III, 1960, hlm. 16, Canto 1, Stanza 1, baris 1, 2, 3

128 Mees, C.A., *Ibid.*, 1935, hlm. 100

129 Cortesao, Armando, *Suma Oriental of Tomé Pires ... Hakluyt Society,* 1944/1967, hlm. 223–225

yang kini sudah termasuk wilayah Kalimantan Barat pada masa kerajaan Banjar juga sudah masuk dalam pengaruhnya, sekurang-kurangnya sejak abad ke-16 M. Meskipun kita tidak mengetahui dengan pasti kehadiran Islam di Pontianak, konon ada pemberitaan bahwa sekitar abad ke-18 M atau tahun 1720 ada rombongan pendakwah dari Tarim (Hadramaut) yang di antaranya datang ke daerah Kalimantan Barat untuk mengajarkan membaca Alquran, ilmu fikih, dan ilmu hadis. Mereka di antaranya Syarif Idrus bersama anak buahnya pergi ke Mampawah, tetapi kemudian menelusuri sungai ke arah laut memasuki Kapuas Kecil sampailah ke suatu tempat yang menjadi cikal bakal kota Pontianak. Syarif Idrus kemudian diangkat menjadi pemimpin utama masyarakat di tempat itu dengan gelar Syarif Idrus bin Abdurrahman al-Aydrus yang kemudian memindahkan kota dengan pembuatan benteng atau kubu dari kayu-kayuan untuk pertahanan. Sejak itu Syarif Idrus bin Abdurrahman al-Aydrus dikenal sebagai Raja Kubu dan daerah itu mengalami kemajuan di bidang perdagangan dan keagamaan, banyak datang para pedagang dari berbagai negeri. Pemerintahan Syarif Idrus (lengkanya: Syarif Idrus al-Aydrus bin Abdurrahman bin All bin Hassan bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Husein bin Abdullah al-Aydrus) yang memerintah dari tahun 1199–1209 H. Konon, ia gugur tahun 1870 M karena serangan musuh yang tidak diduga.

Cerita lainnya mengatakan bahwa pendakwah dari Tarim (Hadramaut) yang mengajarkan Islam dan datang ke Kalimantan Barat terutama ke Sukadana adalah Habib Husein al-Gadri ia semula singgah di Aceh dan kemudian ke Jawa sampai di Semarang dan di tempat itulah ia bertemu dengan pedagang Arab namanya Syekh karena itulah Habib al-Gadri berlayar ke Sukadana. Dengan kesaktian Habib Husein al-Gadri mendapat banyak simpati dari raja, Sultan Matan dan rakyatnya Habib Husein al-Gadri pindah dari Matan ke Mempawah untuk meneruskan syiar Islam, yang setelah wafat ia digantikan oleh salah seorang putranya yang bernama Pangeran Sayid Abdurrahman Nurul Alam. Ia pergi dengan sejumlah rakyatnya ke tempat yang kemudian dinamakan Pontianak dan tempat inilah mendirikan Keraton dan Mesjid Agung. Pemerintahan Syarif Abdurrahman Nur Alam bin Habib Husein al-Gadri dari tahun 1773–1808 M diganti oleh Syarif Kasim bin Abdurrahman al-Gadri tahun 1808–1828 dan selanjutnya Kesultanan Pontianak di bawah pemerintahan sultan-sultan keluarga Habib Husein al-Gadri.[130]

---

130 Muhammad Syamsu As. H. Drg., *Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya*, Penerbit Lentera, Cetakan kedua, 1999, hlm. 84–94, rinci sejarah kerajaan Kubu, Pontianak, Mampawah, dan lainnya

Bab III
Pelayaran dan Perdagangan

A. Teknologi dan Pusat-Pusat Pelayaran

1. Sistem Angin untuk Pelayaran

Berabad-abad lamanya kerajaan-kerajaan kecil yang berpencar letaknya di pulau-pulau Indonesia secara ekonomis dan kultural, juga sewaktu-waktu secara politis, telah bergabung atau digabungkan dalam satuan-satuan yang lebih besar. Adanya komunikasi dan lalu lintas antara kepulauan Indonesia ini sudah barang tentu dimungkinkan oleh penduduknya yang telah memperkembangkan suatu jaringan hubungan maritim yang lebih baik, didukung oleh kemajuan teknologi kapal dan keahlian navigasi serta suatu "enterprising spirit" yang besar. Kegiatan di laut yang dominan dalam kehidupan bangsa kita di masa lampau tercermin dalam sebutan "zaman bahari" yang bersinonim dengan zaman purbakala. Sifat internasional dari pelayaran dan perdagangan telah tampak pula pada zaman kerajaan-kerajaan Indonesia-Hindu.

Di sini akan dibicarakan khusus mengenai pelayaran dan perdagangan sesudah kerajaan-kerajaan Indonesia-Hindu, jadi pada masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam, kira-kira antara tahun 1500 dan 1700.

Bahasa kita kaya akan kata-kata untuk membedakan berbagai macam angin. Untuk *angin yang berpusing-pusing* kita katakan *angin langkisan, angin puting beliung,* atau *angin puyuh.* Jika angin tidak menentu arahnya, dikatakan *angin gila,* sedangkan untuk angin yang bertiup keras ada *angin gunung-gunung, angin taufan,* atau *angin ribut.* Angin yang sedang disebut *angin sendalu,* apabila anginnya kurang baik dikatakan *angin salah.* Angin yang bertiup pada waktu dini hari disebut *angin pengarak pagi.*

Beberapa jenis angin jelas berasal dari dunia maritim. *Angin haluan* dan *angin buritan* menunjukkan dari arah mana angin itu datang jika sedang berlayar. *Angin turutan* yang keras adalah *angin sorong buritan. Angin sakal* yang datang dari depan tentu menghalang pelayaran, sedangkan *angin paksa* justru memaksa orang membongkar sauh.

Jika angin datang dari berbagai jurusan, dikatakan *angin ekor duyung,* tetapi kalau angin bertiup keras dari sebelah sisi perahu dikatakan *angin tambang ruang.* Sebagai peninggalan zaman bahari kita membuat perbedaan

antara negeri-negeri di atas angin (India, Arab, Iran, negeri-negeri Eropa, dan Maghrib) dan negeri-negeri bawah angin yang terletak di sebelah Timur. "Angin berputar ombak bersambung" adalah pepatah terkenal kalau suatu perkara sukar dipecahkan.

Pengetahuan tentang angin darat dan angin laut adalah pengetahuan penting bagi para nelayan, karena dengan demikian mereka dapat memanfaatkan angin jika ingin berlayar keluar pada pagi hari dan pulang ke kampung pada sore harinya. Taraf kemampuan yang lebih maju lagi adalah dalam menggunakan angin musim yang menguasai kepulauan kita.

Kondisi alam sebagai daerah khatulistiwa seharusnya menempatkan kepulauan kita dalam wilayah kekuasaan angin pasat: di sebelah selatan pasat tenggara dan di sebelah utara dari garis khatulistiwa pasat timur laut yang bertiup sepanjang tahun. Tempat pertemuan kedua jenis angin ini disebut *intertropical front* dan merupakan daerah angin mati. Akan tetapi, ada dua faktor yang menyebabkan sistem angin di Indonesia menyimpang dari daerah tropik lainnya. *Pertama*, peredaran bumi mengitari matahari yang menyebabkan "daerah angin mati" itu berpindah-pindah dari Lintang Mengkara (*Tropic of Cancer*) ke Lintang Jadayat (*Tropic of Capricorn*). Pasat tenggara pada waktu melintasi garis khatulistiwa akan berubah menjadi barat daya, sedangkan apabila pasat timur laut melintasi khatulistiwa dalam perjalanannya ke selatan akan berubah menjadi angin barat laut. Faktor *kedua* adalah lokasi satu benua ini akan mengakibatkan suatu tekanan rendah yang cukup memengaruhi daerah angin mati tersebut bergeser lebih jauh ke selatan atau ke utara menurut musimnya sehingga mengubah arah angin yang bersangkutan. Dengan demikian, terjadilah angin musim yang berubah arah tujuannya setiap setengah tahun sehingga angin seolah-olah memutar haluannya 180°.

Di beberapa tempat tertentu, karena kondisi lokal, angin yang dalam bulan Desember sampai dengan Februari merupakan angin barat menjadi angin timur dalam bulan September sampai dengan November.

Perubahan musim ini sudah lama dikenal pelaut-pelaut kita. Dengan memanfaatkan perubahan angin ini, dalam bulan Oktober kapal-kapal berangkat dari Maluku menuju pusat-pusat perdagangan di Makassar, Gresik, Demak, Banten, sampai Malaka dan kota-kota lain di sebelah barat. Dalam bulan Maret perjalanan ke timur dapat dilakukan dengan menggunakan angin barat.

Dalam bulan Juni sampai dengan Agustus angin di laut Cina Selatan bertiup ke arah utara sehingga memudahkan pelayaran ke Ayudhia, Campa, Cina, dan negeri-negeri di sebelah utara. Angin ini mulai mengubah haluan lagi pada bulan September dan bulan Desember. Angin ini sudah berbalik sedemikian rupa sehingga perjalanan kembali ke selatan dapat dimulai lagi.

Jadi, dengan adanya sistem angin musim, kepulauan Indonesia, terlebih bagian sebelah barat, berada dalam kedudukan istimewa. Di sinilah kapal-kapal dari semua penjuru bertemu, maka tidak mengherankan apabila kerajaan besar pertama yang kita kenal berpusat di bagian ini. Posisi geografis ini sangat menguntungkan baginya karena dapat menguasai tempat pertemuan jalan pelayaran dan perdagangan.

Pengetahuan tentang jalan ke sebelah utara (Cina dan lain-lain) tidak setua pengetahuan tentang jalan ke sebelah barat (ke negeri-negeri di atas angin). Menurut Wolters [1] beberapa abad telah mendahului pelayaran dari dan ke barat itu sebelum kapal-kapal menemukan jalan laut ke negeri Cina. Akan tetapi, pada abad ke-16 hubungan maritim ini sudah lama dikenal, sehingga ketika Portugis menduduki kota Malaka (pada tahun 1511) yang pada waktu itu telah menguasai pelayaran selatnya. Tomé Pires [2] dapat berbangga dan mengatakan:

> "Barang siapa menguasai Malaka dapat mencekik Venesia. Sejauh Malaka, dan dari Malaka ke Cina dan dari Cina ke Maluku, dan dari Maluku ke Jawa, dan dari Jawa ke Malaka dan Sumatra, semuanya sudah berada dalam kekuasaan kami."

Di Malaka kapal-kapal bertemu dan menunggu angin yang baik untuk meneruskan perjalanannya atau kembali ke negeri asal.

Pelayaran yang besar tergantung pada tenaga angin sudah tentu memerlukan pengalaman dan pengetahuan tentang sistem angin di perairan ini. Kita sering kali membaca bahwa kapal yang satu menempuh suatu jarak tertentu dalam waktu yang lebih lama dari kapal yang lain. Fa Hsien (414) mengeluh bahwa jarak antara Malaka dan Kanton yang biasa ditempuh dalam 50 hari susah dilampaui. Sebelas abad kemudian perjalanan Tomé Pires (1517) untuk trayek yang sama masih memerlukan 45 hari. Sebaliknya, Chia Tan (abad ke-8) berlayar dari Kanton ke "Selat" dalam waktu 18½ hari suatu kemajuan yang besar, tetapi tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan Ch'ang Chun (abad ke-7) yang berlayar dalam 20 hari dari Kanton ke bagian selatan Semenanjung, atau kapal yang ditunggangi I-Tsing (671) yang berlayar dari Kanton ke Sriwijaya dalam waktu kurang dari 20 hari. Rahasia berlayar dan alur pelayarannya dijaga baik-baik seperti sekarang negara-negara besar memegang teguh rahasia perjalanan antariksa.

Dari sumber-sumber asli agak sukar kita mendapat keterangan tentang kemampuan kapal-kapal Indonesia berlayar pada zaman ini. Pada umumnya

---

1 P.W. Wolters, *Early Indonesian Commerce: A study of the origins of Sriwijaya*, Ithaca, N.Y., 1967, hlm. 31–32, tentang pelayaran dari Selat Malaka ke Cina, lihat halaman 188–189

2 A. Cortesao, *The Suma Oriental of Tomé Pires: An Account of the East* .... Hakluyt Society, seri ke-2, jilid XXXIX dan XL, London, 1944. Kutipan diambil dari halaman 287, yang dikutip pula oleh Wolters, 1967, halaman 31

berita-berita tidak memberi data yang tepat, walaupun ada beberapa pengecualian. Ketika Hang Tuah diutus Malaka ke tanah Keling diceritakan bahwa "Setelah 7 hari 7 malam berlayar, Laksamana pun berkata pada mualim: "Hai Panglima kami, sehari semalam lagi berlayar, maka kita bertemu dengan sebuah pulau. Tiga hari tiga malam lagi. Maka sampailah ke kuala Benua Keling.[3] Jadi, seluruh perjalanannya memakan waktu 18 hari, suatu hal yang masuk akal. Namun, tidak semua berita memberikan keterangan seperti ini. Biasanya dikatakan bahwa sesudah berlayar "sekian hari" kapal bersangkutan tiba di tempat yang dituju.

Sebenarnya sumber-sumber Barat dapat digunakan untuk mempelajari kemampuan navigasi dan kemampuan mualim-mualim kita. Sebab kapal-kapal Eropa yang pertama-tama berlayar di perairan Indonesia menggunakan mualim setempat untuk mengantarkan ke tempat tujuan. Dalam ekspedisi Magelhaens (1521) d'Elcano menculik dua perahu pandu laut setempat untuk mengantarkan kapal-kapalnya dari Filipina ke Tidore.[4] Pelayaran pertama oleh orang-orang Belanda (di bawah pimpinan Cornelis de Houtman) selain menggunakan orang Portugis yang pernah datang ke Indonesia juga memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman mualim-mualim setempat, misalnya pelayaran di Selat Sunda sampai ke Banten. Kapal-kapal Belanda yang pertama menerima tawaran juragan perahu yang dijumpainya di Selat Sunda, untuk mengantarkan mereka ke Banten dengan sewa 5 real (" .... *De overste van den Parao presenteerde ons tot Banten to brenghen, midts betalende voor loostman loon voor elck schip 5 Realen van vieren .... de Loostman bleef aen ons boort* ....").[5]

Apabila kita meneliti semua jurnal (*logboek*) dari kapal-kapal Eropa pertama yang dalam abad ke-16 dan ke-17 berlayar di perairan Indonesia, kita dapat bertemu dengan berita-berita tentang mualim kita yang membawa kapal-kapal Barat.

Dengan demikian, didapat gambaran yang lebih baik mengenai kemahiran pelaut-pelaut itu dalam navigasi, berapa lama diperlukan untuk menempuh suatu trayek tertentu, bagaimana kecakapan para mualim tersebut membawa kapal-kapal asing ke tempat yang akan ditujunya, dan tentu saja harus diperhatikan pula perbedaan teknologi kapal: jenis kapal asing lebih besar dan sanggup melintasi samudra, sedangkan perlengkapannya lebih maju. Penilaian tentang navigasi mualim-mualim setempat yang membawa kapal asing, tentu lain jika harus membawa kapalnya sendiri. Akan tetapi, sudah dapat dipastikan bahwa dalam penjelajahan pertama di perairan kita kapal-kapal Portugis banyak mendapat bantuan dari pelaut-

3 *Hikayat Hang Toeah*, disalin dari naskah toelisan tangan hoeroef Arab, kepoenjaan Koninklijk Bataviaasch Genootschap, Jakarta, Balai Pustaka, 1924, hlm. 353, diberi ejaan baru (EYD)

4 A. Pigafetta, *Premier voyage au tour du Monde* ..., Paris, 1801, hlm. 160

5 G.Y. Rouffaer dan J.W. Ijzerman (ed), *De eerste schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indie* ..., jilid I, D' eerste boeck van Willem Lodewycksz, Den Haag, 1915, hlm. 65

pelaut setempat sehingga dalam waktu relatif singkat orang-orang Portugis telah mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai keadaan iklim dan geografi setempat. Peta-peta dan *roteiros* (petunjuk-petunjuk untuk berlayar) tidak hanya didasarkan atas observasi sendiri oleh orang Portugis, tetapi oleh kemampuannya untuk memperoleh keterangan nautika dari pelaut setempat. Salah satu contoh adalah *roteiro* yang disusun oleh Francisco Rodrigues yang mendasarkan pengetahuannya atas pengalaman pelaut-pelaut di Indonesia. Toponim Melayu yang dipakai untuk beberapa tempat di pantai Vietnam dan Campa jelas menunjukkan asal-usul keterangan yang diperoleh orang-orang Portugis itu.[6]

Bahwa pelaut-pelaut kita sudah mengenal peta untuk berlayar telah dicatat oleh orang Portugis pada awal abad ke-16. Kita mengetahui bahwa mereka berusaha keras untuk memperoleh peta-peta ini. Albuquerque pernah mengirim sebuah peta yang bertuliskan huruf Jawa kepada rajanya. Namun, kapal Albuquerque yang membawa peta itu tenggelam sehingga dengan demikian kita tidak lagi mempunyai bukti tentang pengetahuan pelayaran Jawa pada masa itu: berapa jauh mereka dapat berlayar dan sampai di mana pengetahuan pada waktu itu tentang geografi dan kartografi Nusantara. Hanya keterangan Albuquerque itulah yang memberi indikasi tentang penggunaan peta dalam pelayaran Indonesia dan tidak mustahil bahwa kemajuan kartografi Portugis mengenai wilayah Asia Tenggara telah didasarkan atas peta-peta tersebut. Karena kehilangan peta ini, sekarang kita tidak dapat mengecek kebenaran keterangan Albuquerque yang mengatakan bahwa peta Jawa itu juga mencakup daerah seberang Samudra Indonesia dan malahan menggambarkan pantai Brasil[7] sehingga dapat saja membuka diskusi yang baru tentang adanya pelayaran Indonesia (Jawa) melintasi Samudra Atlantik. Mengenai adanya migrasi ke Madagaskar para sarjana pada waktu itu sudah menerimanya sebagai satu kenyataan, hanya masih gelap bagi kita dengan cara bagaimana, pada waktu apa, dari wilayah mana, dan sebab-sebab apakah nenek moyang penduduk Malagasi yang berbahasa Austronesia mengadakan perpindahan yang sebegitu jauh itu.

Kita harus memerhatikan pula kemungkinan lain yang diajukan oleh Ny. Meilink-Roelofsz. Ia mengemukakan bahwa peta yang beraksara Jawa tersebut di atas jelas berasal dari masa sebelum tahun 1512, dan dibuat

---

6 P.Y. Manguin, "Les Portugais sur les cotes du Viet-Nam et du Campa Etude sur les routes maritimes et Ies relations commerciales, d'apres les sources portugaises (xvie, xviiiie siecles), Paris, *Ecole Francaise d' Extreme Orient*, 1972, Bab 1.2

7 A. Cortesao, *Cartografia e cartografos portugueses dos seculos xv e xvi*, 2 jilid, Lisboa, Edicao dan "Serra Nova" (1935), 122–130, tentang pelayaran di Samudra Hindia, Jakarta, Bharatara, 1972, a.l. Kata Pengantar

setelah mempelajari peta-peta Portugis yang pada waktu itu sudah mengenal pantai Brasil, dan pengetahuan ini dipakai untuk membetulkan dan melengkapi peta-peta yang sebelumnya telah dikenal di sini.[8] Seandainya pendapat ini diterima, dengan ini kita mempunyai bukti yang baik tentang interaksi timbal balik antara pengetahuan navigasi Indonesia dan Barat. Hal demikian itu kita lihat pula pada peta-peta Bugis yang berasal dari abad ke-19.[9]

Alat navigasi yang tidak kalah penting adalah pedoman (kompas) dan *strolabe*. *Pertama*, sebagai pembantu untuk menentukan arah dan tempat menurut deklinasi dan inklanasi jarumnya, yang *kedua* untuk menentukan lokasi menurut pengukuran tinggi matahari, terutama apabila kapal berada di tengah-tengah laut tanpa mempunyai baringan darat.

Ludovico di Varthema dalam perjalanannya pada tahun 1506 dari Kalimantan ke Pulau Jawa katanya melihat kompas digunakan oleh nakhoda kapal yang ditumpanginya. Selain kompas, kapal itu mempunyai "sebuah peta yang penuh garis-garis memanjang dan melintang" ("....*una carta la quale era tuuta rigata per lengo oper traverso* ...."), sedangkan sang nakhoda bercerita bahwa jauh di sebelah selatan Pulau Jawa terdapat lautan yang besar di mana siang hari sangat pendek, hanya 4 jam lamanya ("....*dove it giorno non dura piu the quartto ore* ...."). Jika keterangan Varthema tersebut benar, pelayaran di Samudra Indonesia sudah diadakan sampai jauh melintasi daerah subtropik di sebelah selatan.[10]

Mualim Ibn Majid yang mengantarkan Vasco da Gama dari Malindi di pantai timur Afrika sampai ke Kalikut tidak memperlihatkan rasa heran ketika orang-orang Portugis menunjukkan alat-alat nautika kepadanya, sebab alat-alat tersebut sudah dikenalnya. Namun, kita belum dapat memastikan seberapa jauh penggunaan alat kapal Indonesia pada waktu itu, apakah alat-alat tersebut sudah umum dipakai, ataukah di beberapa kapal saja. Dipakai atau tidak, pelaut kita sudah mengenalnya melalui kapal-kapal Arab dan Persia yang sudah berabad-abad lebih dahulu datang ke perairan Indonesia. Sebenarnya kompas ditemukan di Cina, tetapi orang-orang Cina baru menggunakannya di laut pada akhir abad ke-11. Jadi, sesudah orang-orang Arab menggunakannya dalam pelayaran mengarungi Samudra Indonesia. Pengaruh Arab dan Persia dalam kegiatan maritim kita sudah merupakan kenyataan yang tercermin dalam

---

8 M.A.P. Meilink-Roelofsz, *Asian trade and European influence in the Indonesian archipelago between 1500 and about 1630*, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1962, 354 catatan 122

9 C.C.F.M. le Roux, "Boegineesche zeekaarten van den Indischen archipel *TAG*, seri ke-2, LII 1935, hlm. 687–714

10 A. Bausani, "L'. Indonesia nell'opera degli Italiana", dalam *Lettera di Giovanni da Empoli*, (with English translation), Roma, Istituto Italiano per it Medio ed Estremo Oriente, 1970, hlm. 16–17, 93

istilah-istilah maritim yang banyak memakai kata pinjaman dari bahasa-bahasa tersebut.[11]

Jadi, keterangan pelaut-pelaut Belanda dari abad ke-17 yang mengatakan bahwa kapal-kapal pribumi tidak mempergunakan kompas bukan berarti bahwa alat ini tidak dikenal. Laksamana Steven van der Haghen dalam perjalanan pertamanya ke Indonesia membawa beberapa ratus kompas dalam berbagai jenis kotak, dengan harapan akan menjualnya setiba di sini, tetapi rupanya tidak ada yang memerlukannya sehingga harus dikembalikan ke negeri Belanda karena tidak laku.[12] Entah karena ketidaktahuan sebab belum memperlihatkan kebutuhan akan alat itu, tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa pada abad ke-17 pemakaian kompas belum melihat kebutuhan akan alat itu, kompas belum umum digunakan di kapal-kapal pribumi meskipun sebelum kedatangan kapal-kapal Eropa alat navigasi semacam ini sudah dipakai di kapal-kapal Arab, Persia, Gujarat, dan Cina yang sering mengunjungi kepulauan Indonesia.

Keadaan iklim dan geografi Indonesia memungkinkan pelaut-pelaut pribumi mencari baringannya pada pulau-pulau, gunung-gunung, dan tanjung-tanjung jika berlayar menyusuri pantai, dan pada malam hari mereka menggunakan bintang-bintang di langit yang cerah untuk menentukan tempatnya di tengah laut. Alat-alat navigasi yang biasanya dipakai untuk pelayaran melintasi samudra di daerah yang sering ditutupi kabut sudah tentu tidak banyak diperlukan di perairan Indonesia. Sebaliknya, pengetahuan astronomi lebih banyak dipentingkan. Konstelasi bintang dikenal dengan kombinasi yang khas Indonesia dengan nama-nama, seperti *mayang* dan *biduk* yang lebih lagi mengingatkan sifat maritim dari pengetahuan perbintangan (para petani Jawa mengenal, misalnya, kombinasi bintang waluku yang menyerupai bajak). Menurut pengetahuan astronomi suku Biak, dua musim yang dikenalnya berada di bawah pengaruh bintang-bintang *Sawakoi* (Orion) dan *Romangwandi* (k.l. Scorpio). *Romangwandi* (naga) dengan ekornya yang terdiri dari bintang *Southern Crown* menandakan bahwa musim angin ribut telah berlalu. Apabila *Romangwandi* masih berada di bawah cakrawala, musim angin barat yang menyebabkan ombak-ombak besar masih akan mengganggu pelayaran. Akan tetapi, dengan munculnya bintang Scorpio ini, bintang Sawakoi

---

11 G. Ferrand, "L' Element persen dans les textes nautiques arabes des xive et xvesiecle", *Journal Asiatiques*, CCIV, 1942; 193–257. Tentang penggunaan kompas oleh kapal-kapal Cina, lihat J.J.L. Duyvendak, "lets over zeereizen der Chinezen", dalam varia Historica aangeboden aan Prof. Dr. A.W.B Yvanck, Assen, 1954, 102. Tentang studi perbandingan antara navigasi Arab dan Cina lihat G.R. Tibbetts, "Comparisons between Arab and Chinese navigational techniques", *Bulletin of the SOAS*, jilid xxvi, 1973, hlm. 97–108 karya mualim Ibn Majid telah diterjemahkan dalam bahasa Portugis oleh Myron Malkiel-Jirmounsky melalui terjemahan Rusia oleh T.A. Chumovaky, *Tres reteiros desconhecidos de Ahmad Ibn Majid ...*, Lisbon, 1960

12 Meilink-Roelofsz, *op. cit.*, hlm. 104–105

mulai menghilang, atau dalam tafsiran Biak: pemuda-pemuda (Pleiades dan Taurus) telah berhasil mengejar pemudi-pemudi ke dalam laut dan musim perjodohan telah tiba.[13]

Persepsi tentang arah mata angin tidak sama dikembangkan di pulau-pulau Indonesia. Ada suku bangsa yang hanya mengenal dua arah, yakni arah laut dan darat (gunung), bahasa kita di samping mengenal empat mata angin dasar utara-selatan, barat-timur, mengenal istilah "tenggara" khusus untuk arah antara timur dan selatan. Dalam bahasa Batak ada delapan mata angin dasar, sedangkan orang-orang Sangir mengenal di samping delapan kata khusus untuk mata angin dasar, juga mata angin *amboha* (antara barat daya dan selatan), dan *arak miang* (utara agak ke barat, NNWN).

Indonesia :			Batak:
utara			utara
barat-laut	timur-laut	manabia	irisnna
barat	timur	pastima	habisaran,
barat-daya	tenggara	hasundutan	purba, ha-
selatan		nariti	poltahan
			anggoni, agoni
		dangsina	

Sangir:			
poloeng sawennnahe	miang	lacs'u iki sawennahe	
poloeng			
poloeng bahe			laesiu iki
			laes'u iki daki
		pueng u wahe	daki, sarang
		tahangeng bahe	mahain daki
tahangeng			mahain
amboha, tahangeng timuhe		mahain timuhe	
		timuhe	

Dari apa yang dikemukakan di atas jelaslah bahwa taraf kemajuan dan perkembangan navigasi tidak sama di seluruh kepulauan Indonesia. Masih banyak yang berlayar secara tradisional, dengan berpegang pada pengetahuan yang diperoleh turun-menurun, malahan ada yang dapat menentukan arah di laut menurut intuisi. Ada yang dapat menentukan lokasinya berdasarkan bentuk awan dan pantulan sinar matahari, ada pula

13 F. Ch. Kamma, Koreri: *Messianic movements in the Biak-Num for culture area*, Den Haag, 1972, hlm. 6

yang melihat pada warna dan jenis air laut serta arusnya, malahan adakalanya dengan hidung orang dapat "mencium" tempatnya di laut. Orang-orang Bugis dan Makassar mempunyai berbagai *kotika tiliq* yakni naskah-naskah dalam bahasa daerah untuk meramalkan apakah kapal atau perahu yang dijumpainya bermaksud baik atau jahat, juga ada *kotika johoro* untuk melihat apakah serangan laut dapat berhasil baik atau tidak.[14]

Jadi, tiap-tiap suku bangsa telah mengembangkan budaya maritimnya menurut arah, selera, kebutuhan, dan daya ciptanya sendiri. Tidak semua kapal pada waktu itu membawa peta waktu berlayar, dan kalaupun dibawa peta-peta ini, jarang dipakai dan biasanya disimpan saja dalam pembuluh bambu seperti pada banyak kapal pribumi dalam abad ke-20. Hanya kalau perlu sekali barulah diadakan konsultasi dengan peta, karena langit yang cerah serta pulau-pulau yang berjajar dari barat ke timur sudah cukup sebagai petunjuk jalan. Teringat pula kita akan pengalaman kapal-kapal Belanda yang pertama datang di Indonesia yang oleh pembesar-pembesar Banten diminta supaya ditunjukkan di peta letak negeri Belanda. Hal yang sama ditanyakan pula di Bali, dan menurut Aernout Lintgens, supaya jangan memberi kesan bawah negeri asalnya begitu kecil, ia menunjukkan sebagian besar Eropa ("... *wees ick hem Neerlandt, Duijtslandt, Oestlandt, Noorweghen, ende een stuck van Moscoveijen, dan gaff het all de maem van Hollandt* ...."). [15] Sekali lagi suatu bukti bahwa peta-peta sudah tidak asing pada waktu itu.

2. Jenis Kapal dan Tempat-Tempat Pembuatannya

Kapal-kapal dan perahu-perahu Indonesia pada zaman yang dibicarakan di sini, yakni sebelum kapal api ditemukan, dapat kita bagi dalam dua kelompok besar berdasarkan teknik pembuatannya. Dengan melihat bentuk lunas kapal, kita dapat mengadakan pembedaan antara "kapal lesung" dan "kapal papan". Bagian dalam lunas seperti lesung, dengan bentuk yang memanjang.

Bentuk kapal-kapal demikian adalah bentuk yang paling sederhana dan pasti lebih tua daripada bentuk kapal papan, daerah penemuannya tidak hanya terbatas pada daerah budaya Asia Tenggara. Pada tahun 1928 jenis kapal lesung ini masih dilihat di Danau Mondsee (Austria) dan penggalian-penggalian arkeologi di negeri Belanda membuktikan bahwa sampan-sampan demikian juga dikenal di sini pada zaman purbakala.

---

14 B.F. Matthes, "De Makassarsche en Boegineesche Kotika's *TBC*, jil. 18. 1872, hlm. 22–26

15 H. Terpstra, "De Nederlandsche voor Compagnieen", dalam F.W. Stapel (ed.), *Geschiedenis van Nederlandsch-Indie*, Amsterdam, 1938, II, hlm. 347

Untuk memperbesar kapasitas muatannya, pinggiran kapal ditinggikan dengan papan-papan, ada yang mempunyai katir atau cadik, baik yang tunggal maupun yang ditempatkan sebelah-menyebelah kapal untuk menjaga keseimbangannya. Untuk memanfaatkan tenaga angin ketika berlayar, kapal-kapal ini pun mempunyai tiang satu, dua, atau lebih untuk tempat memasang layarnya.

Walaupun dikatakan bahwa bentuk perahu lesung ini yang paling sederhana, teknik pembuatannya memerlukan keahlian dan pengalaman yang khusus. Mulai dari memilih kayu yang paling cocok, menebang pohonnya, sampai pada pekerjaan mengeruk batangnya, para tukang harus memenuhi persyaratan yang tinggi. Pembuatan kapal memerlukan kesabaran dan ketekunan bekerja, sedang penggunaan alat-alat yang serba sederhana untuk pekerjaan ini sudah tentu hanya mungkin jika orang sudah mempunyai pengalaman bertahun-tahun. Seperti pula dalam banyak kegiatan orang, misalnya membangun rumah, balai, lumbung, atau jembatan, dan pekerjaan membuat kapal pun disertai dengan upacara-upacara adat dan upacara keagamaan tertentu. Doa dan sesajen sering menyertai atau mendahului setiap fase baru dalam pembuatan kapal sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

Apabila batang kayu yang baik telah dipilih, dengan bantuan api dan air, batang tersebut dilengkungkan supaya dasar perahunya dapat dijadikan lebih datar dan lebar. Biasanya batang yang telah dikeruk itu diisi air, sementara seluruh bagian bawahnya diletakkan di atas api yang kecil. Dengan demikian, dinding lambungnya dapat menyusut dan pekerjaan mengeruk dilanjutkan sampai "lesungnya" telah cukup lebar dan luas sedangkan tebal kayunya merata. Untuk menghindari lubang lesung menutup kembali, dipasang lagi kayu-kayu yang melintang antardinding kapal. Apabila luas dan bentuk yang dikehendaki telah tercapai barulah dimulai dengan pekerjaan halus untuk melicinkan kayunya dan memberi perhiasan seperlunya.

Bagi "kapal papan" teknik pembuatannya tidak kurang kompleks karena tidak tergantung dari satu batang kayu saja yang dikeruk bagian dalamnya. Jenis dan bentuknya lebih banyak lagi, kemungkinan untuk membuat kapal yang lebih besar tidak begitu terbatas pula. Panjang lunas dapat berbeda-beda dan cara meletakkan tinggi muka dan belakang serta gading-gading yang ikut membentuk kerangka kapal menentukan pelbagai macam variasi menurut kebutuhan dan pengalaman setempat. Penggunaan pasak kayu untuk menyambung papan-papan satu dengan yang lain meskipun suatu cara yang lebih tua daripada menggunakan baut, sekrup, atau paku dari baja dan logam, ternyata lebih baik karena dapat tahan air asin dan tidak berkarat.

Sumber-sumber sejarah tentang kemajuan teknik perkapalan Indonesia hampir tidak ada sehingga sukar bagi kita untuk merekonstruksikan sejarah perkembangan perkapalan Indonesia. Pada zaman prasejarah rupa-rupanya sampan sudah dikenal di samping rakit yang dibuat dari bambu dengan atau tanpa lantai papan di atasnya. Di antara lukisan prehistoris yang terdapat pada dinding gua atau batu karang (a.l. Ohoidertawun di pulau Kei Kecil) terdapat gambar sampan, walaupun tidak jelas bentuknya. Juga sukar untuk menentukan jenis perahu yang terdapat pada hiasan-hiasan nekara perunggu.

Akan tetapi, perkembangan puluhan abad dari zaman batu dan perunggu sampai pada abad ke-8 sudah demikian jauhnya sehingga pada zaman Indonesia–Hindu sudah kita kenal berbagai jenis kapal. Di Borobudur tidak kurang dari sepuluh relief melukiskan perahu atau kapal, yang dapat kita golongkan dalam 3 jenis, yaitu:

1. perahu lesung,
2. kapal besar yang tidak bercadik, dan
3. kapal besar yang mempunyai cadik.

Kapal yang terbesar mempunyai 2 tiang, sedangkan haluan dan buritannya meruncing ke atas. Tiang yang agak miring ke depan sangat menarik perhatian karena mengingatkan kita kepada kapal-kapal Arab. Layar besar yang dipakai pada waktu itu jelas berbentuk segi empat, hanya layar di bagian buritan ada yang berbentuk segitiga (layar sudu-sudu). Juga menarik perhatian adalah gambar mata pada lambung kapal, suatu kebiasaan universal yang erat hubungan dengan kepercayaan tradisional yang masih dipegang teguh oleh banyak masyarakat nelayan pada waktu sekarang.[16]

Berita perkapalan mengenai zaman ini kurang sekali. Beberapa tahun yang lalu (1971) sebuah naskah Portugis tentang sejarah Maluku, yang mungkin sekali ditulis oleh Antonio Galvao kira-kira tahun 1544 diterbitkan oleh H. Jacobs, S.J. Di dalamnya kita menemukan suatu uraian tentang cara orang di Maluku (Utara) membuat kapal.[17]

Menurut Galvao, kapalnya dibuat dengan cara demikian: bentuk di tengah-tengah kapal menyerupai telur (*he ovedo no meio*) dan kedua ujungnya melengkung ke atas. Dengan demikian, kapal dapat berlayar maju

16 Th. van Erp, *Voorstellingen van vaartuigen op reliefs van den Boroboedoer*, Den Haag, 1923, 7, 11, 34. Berita pertama tentang gambar-gambar prasejarah di Pulau Kei terdapat dalam J.A. Portengen, "lets over de doodengrotten en de rotsteekeningen die op de Kei-eilanden gevonden worden", *TAG*, seri ke-2, jil. 6, 1888, 258–160. Tentang cara membuat perahu lesung diuraikan dalam D.A. Rinkes, dan lain-lain, *Het Indische boek der zee*, Jakarta, 1925, 33, 34; dan H.J. Stokking, "Gebruiken der Talaoerezen bij de zeevaart", *Mededeelingen: 'Tijdschrift voor Zendingswe-tenschap*, jil. 66, 1922, 149–160; karya tentang perahu lesung yang penting sekali ialah C. Nooteboom, *De boomstamkano in Indonesie*, Leiden, 1932

17 Th. M. Jacobs (ed.), *A treatise on the Moluccas (c. 1544) Probably the preliminary version of Antonio Galvao's lost Historio das Moluccas ...*, Roma, 1971, hlm. 156, 157, 162–163

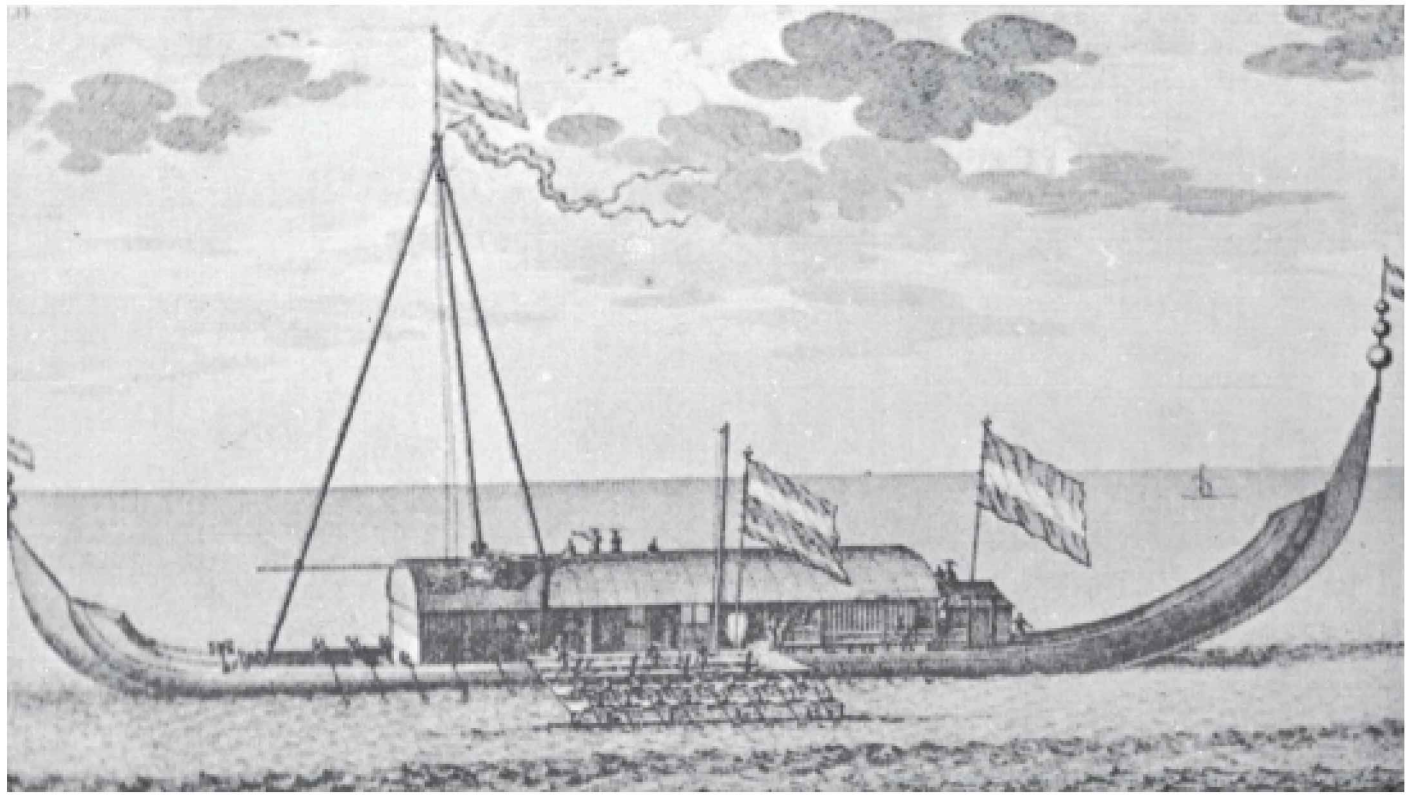

Gambar 3.1 Jenis kapal layar Kora-Kora yang dipakai berperang oleh orang-orang Portugis untuk melawan musuh Kora-Kora perahu Maluku, termasuk perahu bercadik, untuk menjaga keseimbangan ada kamar tinggal tempat istirahat dalam perjalanan yang jauh (untuk berdagang) perjalanan dinas dan merompak

maupun mundur. Kapal-kapal ini tidak diberi paku atau dempul. Lunas, rusuk, serta linggi depan dan linggi belakangnya disesuaikan dan diikat dengan tali ijuk (*guamuto,* dalam bahasa setempat *gomuto*) melalui lubang yang dibuat di beberapa tempat tertentu. Di bagian dalam terdapat bagian yang menonjol yang berbentuk cincin untuk tempat memasukkan tali pengikatnya sehingga dari luar tidak kelihatan sama sekali. Untuk menyambung papan-papannya mereka menggunakan pena, pada ujung papan lainnya dibuat lubang kecil untuk memasukkan pena tersebut. Sebelum menyambung papan-papan ini di sela-selanya diberi *baru* supaya air tidak dapat masuk: dengan disambung bersama-sama, papan-papan berapit-apit sehingga kelihatan seolah-olah berdiri dari satu bilah saja. Di bagian haluan dimasukkan "kayu (yang diukir) berupa ular dengan kepala naga yang bertanduk seperti kijang".

Naskah ini melanjutkan: bilamana kapal telah selesai, sepuluh atau dua belas balok yang dikerjakan baik-baik diletakkan melintang dari lambung ke lambung. Balok-balok ini berfungsi sebagai penunjang seperti pada kapal galai, dan disebut *ngaju* yang diletakkan baik-baik sampai tidak goyah lagi. *Ngaju* ini menonjol ke luar di sebelah-menyebelah kapal, satu, dua, atau tiga *braca* (1 *braca* kira-kira sama dengan 0,3043 meter) menurut besar kapalnya. Di atas *ngaju* ini, sejajar dengan kapal, diikatkan dua atau tiga baris bambu, yang disebut *cangalha.* Di tempat ini para pendayung duduk (jadi di atas air), terpisah dari pendayung lain yang berada di dalam ruang kapal. Paling ujung dari *ngaju* ini terdapat beberapa kayu bercabang, disebut *pagu,* sebagai tempat mengikat bambu lain yang lebih besar dan lebih panjang, bambu ini diberi nama *samah* (*semah-semah,* nama setempat untuk cadik), untuk menunjang jika kapal oleng.

Pada bagian *ngaju* yang terdapat di kapal, demikianlah naskah Portugis ini menguraikannya, dibuat sebuah lantai dari rotan yang dibelah dua, semacam tingkat atas atau geladak, yang dinamakan *baileo.* Apabila mereka mau berbuat jahat terhadap orang yang berlayar di atasnya, yakni orang yang bersenjata (*jemte d'armas*), mereka dapat menyapu *baileo* itu bersama *ngaju*-nya; dan tentara tersebut jatuh ke dalam air dan tenggelam, sementara mereka yang berada di ruangan ambu." Di Baileo ini dibuatkan bilik-bilik seperti *toldo* dan *conves,* yaitu bagian di kapal Portugis dahulu khusus untuk perwira dan "berbaring atau duduk di atas balai-balai", dan di sampingnya ada tempat untuk kapten, menteri, dan prajurit bersenjata. Mereka ini disebut "orang-*baileo*". Di atas bilik-bilik ini ditutup dengan tikar, yang disebut *kakoya,* dari haluan sampai ke bagian buritan seperti tenda pada galai ("*como temdas de guale*") untuk tempat berteduh terhadap panas matahari dan hujan. Para *kolano* bersama saudaranya

dan para sangaji memakai tanda yang dibuat dari *kakoya* putih dan yang dinamakan *papajangga*, bersegi empat. Pada tiap sudut tenda ini berkibar sebuah bendera dari bulu seperti ekor ayam jantan, lagi pula ada dua bendera lainnya di depan hampir setinggi permukaan air laut, masing-masing di kiri dan kanan, dibuat dari kain merah "yang tidak bersegi empat melainkan menyerupai lidah". Bendera raja dikibarkan dari tiang di tengah kapal.

Kata naskah ini, sementara sang raja dan kapten-kapten bersama menteri berlayar di atas *baileo*, putra mereka yang masih kanak-kanak tinggal di bagian bawah, yang lain duduk di *cangalhe* sambil berdayung. Apabila putra-putra ini naik pangkat, mereka disuruh naik ke *baileo* dan tidak usah mengayuh lagi. Ini merupakan suatu kehormatan besar baginya. "Kalau tidak berjasa, mereka tidak boleh memakai pedang atau diberi kenaikan pangkat, yang sama harganya seperti dianugerahi gelar". Dari *cangalha* mereka dinaikkan ke dalam kapal, dan hal ini pun sudah merupakan kehormatan. Kemudian kalau berjasa, dinaikkan lagi ke *baileo* dan barulah mereka melepaskan kayuhnya. Kayuh ini diukir sangat bagus, ringan, dan berbentuk sebagai ujung tombak besi, kadang-kadang juga bundar. Tangkainya berukuran satu *covado* (± 20 inci), berkepala sebagai salib kecil (*huma cruzeta peqeuna*) untuk pegangan tangan, sedangkan tangan kiri memegang daunnya. Mereka mengayuh bebas (dayungnya tidak diikat), dan mereka disebut *pamguayo* (pengayuh). Kayunya dipakai pula sebagai piring makan dan tempat untuk memotong-motong barang apa saja (*"servem de comer neles e d'al qualquer cousa em hum trimcho"*). Layarnya dibuat dari kain goni atau dari tikar.

Menurut sumber yang sama, di Maluku terdapat banyak jenis kapal, yang terpenting bernama *juanga* yang menyerupai galai raja (*guales reaes*). Ada pula kapal-kapal lain yang bernama *la-kafunu*, *kora-kora*, *kalulus*, dan perahu kecil. Semuanya digerakkan dengan dayung dan tidak dipakai untuk mengangkut muatan. Ruangannya panjang tetapi tidak dalam, sebuah *juanga* dapat membawa 200 pengayuh pada tiap lambung, ditambah dengan hampir 100 orang-*baileo* (*"e mais perto de cem homens de baileo"*). Akan tetapi, ada pula *juanga* yang lebih kecil yang hanya membawa 150 pengayuh untuk tiap sisi dan 50 orang di *balieo,* malahan ada yang lebih kecil lagi.

Kapal *lakafunu* hampir serupa dengan *juanga*. Untuk kapal ini dipilih orang-orang yang paling kuat (*mais esforcandos*), baik untuk mengayuh maupun untuk menempati *baleo*. Kapal lain yang juga menyerupai galai adalah *camanomi* dan *kora-kora*. Ini tidak begitu panjang, juga lebar dan tingginya tidak seberapa dan hanya dapat membawa 40–47 pengayuh dengan 25 orang *baileo*. Lebih kecil lagi adalah *rorehe* yang hanya

berkapasitas 15–30 pengayuh dan 6 sampai 10 orang *baileo*. Semua jenis kapal tersebut di atas mempunyai *cangalha* dan mempunyai cadik sebelah-menyebelah kapal. Yang tidak bercadik disebut *kalulus* dan memuat 20–50 pengayuh, sedangkan orang *baileo*-nya dapat berjumlah 10, 15, atau 20 orang. Selain itu, ada pula perahu nelayan, bernama *myenyan* dengan 3–12 pengayuh dan 2 orang *baileo*. Biasanya *juanga*, *lakafunu*, dan kora-kora membawa 1 sampai 3 buah perahu. Akan tetapi, kalau dalam kecemasan, perahu-perahu ini dibuang ke laut seperti barang yang tidak berharga (*como preco a sysqualho*). Sumber Portugis ini tidak juga mengatakan bahwa ada pula kapal khusus untuk muatan (*caravaloes de cargua*) yang disebut *campana*.

Kedatangan kapal-kapal Portugis di perairan Indonesia berakibat besar, bukan hanya dalam bidang politik dan ekonomi, melainkan juga dalam hal teknologi perkapalan pribumi. Seperti telah kita lihat di atas, ada pengaruh timbal balik dalam pengetahuan navigasi orang-orang pribumi dan Portugis. Demikian pula ada perubahan dalam pembuatan kapal. Akan tetapi, seberapa jauh pengaruh Portugis itu, dan dalam segi apa saja, sumber-sumber kita tidak banyak memberi keterangan. Perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam untuk mengetahui teknik perkapalan sejak itu. Sudah diketahui bahwa banyak orang Portugis meninggalkan pekerjaannya dan menawarkan tenaganya kepada raja-raja pribumi. Di Banten, Mataram, Makassar, Aceh, dan lain-lain tempat di Asia Tenggara orang-orang Portugis bekerja sebagai penasihat dalam pembangunan istana, kota, dan bangunan lainnya. Juga ada indikasi bahwa mereka membantu sebagai arsitek kapal, seperti van Linschoten pada akhir abad ke-16. Menurut catatannya,[18] di daerah sekitar Selat Malaka beberapa orang Portugis dikatakan telah "berkhianat" dan menawarkan jasa-jasanya kepada raja-raja pribumi dan mengajarkan teknik membuat kapal jenis Eropa (*"ende die van Malacca ende Indien had de veel Galleyen inde enghde van Malacca, die hem sommighe veloochende Chirstenen die neiwuwers en ghebreken hedde leeren maken: waermede zygroot quaet doen, ende dagheliks doet"*). Nama *galai* atau *gale* dan sebagainya berasal dari bahasa-bahasa Eropa dan sekarang sudah masuk dalam perbendaharaan kata Indonesia.

Kapal perang Banten, menurut kesaksian Willem Lodwycksz yang mengikuti ekspedisi Belanda pertama di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, menyerupai kapal galai dengan dua tiang layar. Keistimewaannya adalah serambi yang sempit, merupakan emperan yang mengikuti bagian buritan kapal. Ruangan bawah hanya dipakai untuk para budak dan pengayuh. Mereka ini seolah-olah dikurung sedangkan tentara berada di geladak supaya dapat berperang dengan lebih leluasa (" .... *dat de Slaven roeyers onder alleene sitten, wel vast ghesloten, ende boven haar op een verdeck de*

18 *Itinerario, voyage ofte Schipvacrt van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien*, 1579–1592, *s*, Den Haag, jilid I, 1955, hlm. 75

Soldaten om te beter ende vryer te connen stryden ...."). Di bagian depan ditempatkan empat pucuk meriam.[19]

Untuk mengadakan pelayaran yang jauh-jauh, yakni ke Maluku, Banda, Kalimantan, Sumatra, dan Malaka, Banten mempunyai ujung (*lunco* atau *joncken*) yang mempunyai layar kecil di depan, kadang-kadang juga ada tiang agung dan dua tiang lainnya. Di depan tidak ditempatkan layar segi empat, tetapi menurut laporan Lodewycksz: ada kapal yang lebih besar yang mempunyai layar demikian (" .... *noch een soorte van ... schepen seer groot, als de joncken, die zy met raaseylen varen ....*"). Dari haluan sampai ke belakang terdapat geladak yang ditutup dengan atap untuk berteduh "terhadap matahari, hujan, dan embun". Di bagian belakang terdapat anjungan untuk nakhoda. Di bagian bawah ruangan dibagi-bagi dalam petak-petak untuk tempat barang.

Lodewycksz juga mencatat bahwa di Banten ada perahu yang mempunyai cadik, dan ada juga yang tidak bercadik, keduanya dipakai untuk mengadakan patroli di laut ("*om onder de Eylanden te ligghen waken ofter gheene vrybuyters oft onraet de zee en is, ende haer van tselve te veradverteren, ende oock eenige goederen uytghevoert en woeden sonder tol tebetalen ....*"). Mereka ini bertugas menjaga keamanan di laut, juga mencegah apabila ada barang-barang yang keluar tanpa membayar cukai. Kapal-kapal ini mempunyai atap, seperti pula kapal yang dipakai untuk bersenang-senang (*speelbarken*).

Selanjutnya ada perahu lesung kecil yang dapat berlayar dengan sangat cepat, suatu hal yang belum pernah dilihat orang-orang Belanda tersebut. ("*cleine Jacht-schuyten, die so snel voortsvliegen dattet te verwonderen is, want ini gheene plaetse dierghelijke ghesien en hebbe, zijnde uyt eenen boom gheholt ....*").

Kronik-kronik dari Makassar dan Bugis mungkin sekali dapat melengkapi data tentang perkembangan teknologi maritim Sulawesi Selatan. Noorduyn[20] memberitahukan bahwa dalam *lontara bilang* (Makassar) atau *sure bilang* (Bugis) juga disebut peristiwa-peristiwa penting mengenai kapal, adat istiadat, dan alat-alat pertanian. Sudah barang tentu dalam hal ini data-datanya perlu diuji dengan membandingkannya dengan sumber lain; kita tidak menerima begitu saja keterangan yang diberikan, misalnya[21] bahwa kapal pertama dibuat pada tahun 1303 untuk pertama kalinya dan pada tahun 1380 meriam dibuat untuk pertama kalinya, membuat kita bertanya orang-orang manakah yang dimaksudkan dalam berita tersebut.

---

19 Keterangan tentang Banten oleh Lodewycksz terdapat dalam Rouffaer dan Ijzerman, I, hlm. 175, hlm. 130, 131, 132

20 J. Noorduyn, "Origins of Sout Celebes Historical Writing", dalam Soedjatmoko (ed.), *An Introduction to Indonesian Historigraphy*, Ithaca, N.Y.., 1965, hlm. 142–143

21 A.A. Cense, "Old Buginese and Macasasarese Diares", *BKI*, 1966, hlm. 423

Apakah dibawa oleh orang Majapahit, Malaka, orang Keling, atau orang Bugis dan Makassar sendiri? Ataukah oleh orang *Sanggalea* (di Manila dikenal sebagai *Sangley*), yaitu nama yang dahulu diberikan kepada orang Cina di Sulawesi Selatan.[22]

Kalau teka-teki ini dapat dipecahkan, akan lebih jelas lagi dari mana datangnya pengaruh kultural yang telah memperkaya budaya maritim Sulawesi Selatan ini. Sebab data-data yang diberikan dalam *lontara* itu tidak dapat ditolak begitu saja. Menarik sekali keterangan Cense bahwa di antara data yang dicatat dalam *lontara bilang* tersebut ada angka 1187, yaitu tahun Jerusalem (Darussalam) jatuh ke tangan muslim yang memang sesuai dengan fakta sebenarnya (penduduk Saladdin), sedangkan data mengenai kontak dengan pegawai Kompeni Belanda (VOC) juga dibenarkan oleh sumber-sumber Belanda sendiri. Terlebih dalam menyebutkan peristiwa yang kontemporer dengan pencatatnya, keterangan yang diberikan oleh sumber-sumber Makassar dan Bugis ini dapat tahan uji jika dibandingkan dengan sumber sezaman lainnya.

Tiba kita sekarang pada persoalan apakah kapal pribumi dibuat sendiri atau dibeli (dipesan) dari luar daerah. Menurut *Suma Oriental*, pada awal abad ke-16 Pasai belum mempunyai industri galangan kapal sendiri. Mereka harus pergi ke Malaka untuk membeli kapal. Akan tetapi, kapal-kapal Malaka rupanya berukuran kecil. Untuk kapal yang besar yang diperlukan untuk muatan banyak, Malaka membelinya di Pegu (Bunna Selatan). Dikatakan pula bahwa Pegu menjual kapal-kapalnya ke Pulau Jawa. Kemudian diberitakan pula bahwa ketika Sultan Mansur (Malaka) hendak berlayar ke Mekah, ia mengunakan kapal-kapal yang dibuat di Pegu dan Jawa.[23] Jadi, orang-orang Portugis sudah mengenal Jawa sebagai penghasil kapal-kapal besar yang mampu berlayar ke negeri Arab.

Tomé Pires menulis bahwa setiap tahun dalam bulan Februari, 15 atau 16 buah kapal yang besar-besar dari Pegu, bertiang 3 atau 4, berlayar ke Malaka. Di samping itu, ada 20 sampai 30 kapal berlunas panjang tetapi kapasitas muatannya kurang. Kapal-kapal tersebut tiba di Malaka pada bulan Maret dan April dan banyak di antaranya dijual di pelabuhan ini. Hutan kayu di daerah Pegu merupakan sumber bahan kayu penting dan menjadikan Pegu tempat galangan kapal yang terkenal di Asia Tenggara bagian Barat. Juga ke Sumatra dan Jawa galangan kapal Pegu ini mengekspor hasil industrinya.[24]

Galangan kapal di Jawa juga terkenal di Asia Tenggara pada abad ke-16. Keahlian arsitek kapal Jawa ini begitu tersohor sehingga Albuquerque membawa 60 tukang yang cakap pada waktu meninggalkan Malaka pada

---

22 A.A. Cense, 1955, hlm. 107–108, "Supplementary note", halaman 217; dan C. Ouwehand," Once more; Sanggalea," *ibid.*, halaman 216

23 Cortesao, *op. cit.*, hlm. 145, 263. Juga terdapat dalam Meilink Roelofsz, *op. cit.*, hlm. 20, 39

24 Cortesao, *op. cit.*, hlm. 98, 195; Meilink–Roelofsz *op.cit.*, hlm. 69, 70

tahun 1512.[25] Kapal yang dibuat di sini terbatas pada kapal-kapal kecil yang dapat berlayar cepat dan diperlukan untuk berperang. Juga dibuat kapal muatan dengan *tonnage* kecil. Albuquerque tidak menyebut di mana tempat galangan kapal Jawa tersebut, tetapi orang-orang Belanda yang pertama-tama datang di Indonesia memberitahukan bahwa Lasem, yang terletak antara pelabuhan-pelabuhan terkenal, Tuban dan Japara, dan yang dekat dengan hutan jati Rembang, merupakan pusat dari industri galangan kapal ini.

Keadaan yang menguntungkan ini adalah faktor penting bagi kemajuan Demak. Dengan demikian, Demak mempunyai kapal-kapal untuk mengangkut hasil pertanian daerah pedalamannya (terutama beras) dan menjualnya di lain bagian Nusantara, lagi pula dengan adanya industri kapal ini memungkinkan Demak mengerahkan sejumlah kapal untuk ekspedisi lintas laut, baik untuk maksud damai maupun untuk tujuan perang. Selain untuk dipakai sendiri, kapal-kapal tersebut merupakan bahan ekspor yang penting. Sebelum kekuatan laut Demak jatuh (dalam perang melawan Portugis di Malaka), Demak mempunyai 40 buah *jung* untuk membawa bahan makanan ke Malaka.[26]

Di bagian timur kepulauan Indonesia pusat galangan kapal terdapat di pulau-pulau Kei. Laporan dari para pengunjung pulau-pulau Kei semua memuji keahlian orang-orang Kei dalam teknologi membuat kapal. Setiap tahun suatu "armada" kapal dan perahu yang baru selesai dibuat berangkat dari sini ke pelabuhan-pelabuhan Maluku untuk dijual. Industri perkapalan memang merupakan sumber utama bagi ekspor pulau-pulau Kei pada abad ke-19, tetapi mengenai periode sebelumnya tidak ada data-data yang pasti. Pada zaman Tomé Pires bahan ekspor pulau Kei dan Aru ke pelabuhan Banda adalah sagu, emas, serta burung kakatua dan cenderawasih yang dikeringkan;[27] tidak disebutkan adanya kapal buatan Kei sebagai barang dagangan. Akan tetapi, hubungan langsung antara Kei dan Banda telah lama, sehingga ketika Jan Pietersz Coen memusnahkan Banda (1621) dan mengisinya dengan orang-orang Kompeni, penduduk asli Banda mencari tempat suaka ke pulau-pulau Kei dan sampai sekarang masih bertempat tinggal di sana dengan mempertahankan adat istiadat, agama (Islam), dan bahasanya sendiri.

Banyaknya variasi tipe kapal, teknologi perkapalan yang menimbulkan rasa kagum pada setiap pengunjung asing (*"zur Bewunderung hinreiszende technische Ausfuhrung des Plankenbootes"*), serta tradisi maritim yang telah memengaruhi budaya Kei menunjukkan bahwa pengetahuan teknik perkapalan di sini sudah mulai sebelum abad ke-19. Hutan rimba di

25 *Ibid.*, hlm. 103, 104
26 *Ibid.*, hlm. 111
27 *Ibid.*, hlm. 95

pulau-pulau Kei kaya akan kayu-kayuan yang cocok sebagai bahan kapal. Bosscher (1855) menyebut 6 macam kayu yang baik untuk keperluan ini.[28]

Tentu tidak boleh dilupakan bahwa di lain tempat pun rakyat setempat sanggup membuat kapal sendiri. Pada umumnya kapal dan perahu dibuat oleh arsitek sendiri untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dibuat menurut adat istiadat lokal dengan ciri-ciri yang khas dalam bentuk dan bagian-bagiannya. Misalnya, lunasnya (ada yang menonjol, ada yang menyerupai tanduk runcing, dan sebagainya); ukiran-ukiran di bagian depan atau belakang; bentuk sambungan dan jumlah katirnya: jenis dan jumlah layarnya (umpama layar bulu ayam, layar sudu-sudu, jib, dan sebagainya); bentuk kemudi dan gagangnya; tali-temali, dan seterusnya. Akan tetapi, sebagai pusat galangan kapal yang pernah mengekspor ke luar daerah dalam jumlah besar, Lasem terkenal untuk bagian barat Indonesia pada abad ke-16 dan ke-17, dan pulau-pulau Kei untuk bagian timur pada abad ke-19.

Seperti dikemukakan di atas agak sukar bagi kita untuk mengetahui inovasi dalam teknik perkapalan dan pelayaran yang terjadi karena pengaruh dari luar. Kapal-kapal pribumi yang dilihat orang-orang Belanda dan Inggris pada abad ke-17 mungkin saja telah mengalami perubahan sebagai akibat persentuhan budaya Portugis dan Spanyol di sini, demikian pula kapal-kapal menurut keterangan orang-orang Iberia pada abad ke-16 sangat mungkin sudah mengalami pengaruh kapal-kapal India (Gujarat), Persia, atau Arab. Kita dapat pula menanyakan unsur-unsur Arab mana yang diperoleh secara langsung atau melalui orang-orang Persia dan India, dan mana yang diterima melalui orang-orang Portugis dan Spanyol yang telah berabad-abad lamanya mengalami pengaruh budaya Arab di tanahnya sendiri.

Pengaruh Belanda juga telah meninggalkan bekas-bekas dalam dunia maritim Indonesia. Kapal muatan yang di daerah Sangir disebut *Lambuti* misalnya, diperkirakan berasal dari kata Belanda *laad boat*,[29] tetapi mungkin juga berasal dari kapal Bugis *Lamboh*. Nama kapal *pinis* (i) atau *penes* jelas hubungannya dengan kapal Eropa *pinas* (Belanda) atau *pinnace* (Inggris), dan kapal *sekunar* dan sekoci juga masih jelas mengingatkan nama asalnya (*schoener* dan *schuitje*). Mungkin pinjaman kata terakhir baru terjadi pada abad ke-19 karena sekoci sekarang khusus dipakai untuk kapal api yang

---

28 C. Bosscher, "Bijdragen tot de kennis van de Keij–eilanden", jil. 4, (1855), hlm. 22, tentang perkapalan Kei, lihat Walter Nutz, *Eine Kulturanalyse von Kei, Beitrage zur vergleichenden Völkerkunde Ostindonesien*, Düsseldorf, 1959, hlm. 27, 145

29 K.G.P. Steller dan W.E. Aebersold, *Sangirees–Nederlanc Menurut J.J. Ras,'s woordenboek met Nederlands-Saingirees register*, Den Haag, 1959, *Hikayat Banjar, A study in Malay historiography*, Den Haag, 1968, hlm. 562, jenis kapal lambu yang terkenal di Kalimantan Selatan sudah dikenal pula dalam Smarawedana, *Hikayat Prabu Jaya* dan *Hikayat Hang Tuang*, sehingga pendapat Steller–Aebersold bahwa *lambuti* berasal dari *laadboot* sukar dapat diterima.

kecil jadi sesudah tenaga uap digunakan untuk pelayaran. Dalam hikayat Banjar[30] ada perahu *pilang* dan *gurpa*, di samping *gali* (*galley*), *galiung* (*galleon*), *galiut* (*galliot*), dan *pragata* (*frigate*).

Bekas pengaruh Inggris juga terdapat dalam istilah-istilah maritim Indonesia, seperti *jib* (jenis layar), *hibop* (*heave up*) kalau hendak menaikkan muatan, dan *lego* (*let go*) kalau mau membuang jangkar (*anchor*, *anker*). Peminjaman kata belum berarti bahwa sebelumnya pelaut-pelaut tidak mengenal alat atau pengertian maritim yang bersangkutan. Apabila "pedoman" dipakai di samping "kompas", "sauh" di samping "jangkar" jenis-jenis kapal Eropa dan Cina (misalnya *jung* dan *wangkang*) di samping jenis asli, gelar-gelar Persia (kelasi, mualim, nakhoda, dan lain-lain) bersama nama-nama lokal, ini menunjukkan bahwa kontak dengan dunia luar telah memperkaya budaya bahari di kepulauan Indonesia. Bentuk *padewakang* dan *palari* Bugis terlebih kalau semua layarnya terkembang memperlihatkan banyak persamaan dengan *doschoener* Eropa. Sebaliknya kata-kata maritim Indonesia juga telah meninggalkan bekasnya dalam budaya luar misalnya kata *perahu* dan *jung* telah masuk dalam beberapa bahasa Eropa.[31]

Sebaliknya perlu dicatat di sini bahwa konservatisme dalam pembuatan kapal dan perlengkapan tali-temalinya tidak selalu karena ketidaktahuan atau kekurangan daya inventif. Dalam banyak hal bentuk yang sudah tercapai memang bentuk maksimal yang paling cocok untuk maksud dan keperluan setempat. Perahu mayang dengan layar tanjaknya, misalnya adalah bentuk yang terbaik untuk keperluan para nelayan yang harus berlayar di perairan utara Jawa yang dikuasai oleh sistem angin setempat.[32]

Suatu gambaran lengkap tentang jenis-jenis kapal dan perahu di Indonesia belum dapat diberikan karena belum pernah dibuat inventarisasi dari jenis-jenis yang ada. Akan tetapi, tidaklah berlebih-lebihan jika kita mengatakan bahwa budaya bahari telah menghasilkan banyak jenis kapal sesuai dengan keperluan setempat: sebagai alat komunikasi antarpulau atau sebagai alat pengangkut barang, untuk menangkap ikan atau untuk upacara kerajaan dan keagamaan, untuk berperang ataupun untuk bersenang-senang di waktu senggang.

Untuk memberi gambaran akan kekayaan variasi bentuk kapal dan perahu, selain jenis-jenis yang telah disebut di atas, kita menyebut lagi perahu *belang* dan *orembai* (Maluku) dan *pencalang* (Palembang) untuk upacara kebesaran dan perayaan; *cemplon* (Jawa Tengah, *tadi-tadi* (Mandar), *londe* (i) Sulawesi Utara), *roh talor* (Nusa tenggara) untuk menangkap ikan; *belungkang* (Sumatra), *cunia* (Madura), *tambangan* (Banjarmasin) untuk

30 Ras, *ibid.*, 248

31 L.F. Ferreira Reis Thomas, *De Malaca a Pegu, viagens de um feitor* Portugues, 1512–1515, Lisboa, Instituto de Alta Cultura (1966)

32 Rinkes *op. cit.*, hlm. 40

mengangkut muatan; dan jenis lain lagi seperti *lepa-lepa, sekong, beloto, pajala, sopeh,* dan sebagainya; sedangkan untuk melakukan profesi kriminal tertentu pelakunya bergerak di atas air dengan memakai *perahu sembawa* atau *jalur maling.*

3. Jalan dan Pusat-Pusat Pelayaran

Ketika pada tahun 1521 Sebastian del Cano berangkat dari Tidore dan tiba kembali di Sevilla, sebuah jalan laut yang baru telah dirintis yang menghubungkan Indonesia (Maluku) dengan Eropa Barat. Del Cano berlayar dari Tidore ke Selatan dan sesudah singgah sebentar di Timor, kapalnya dikemudikan ke arah barat daya menyeberang Samudra Indonesia ke ujung selatan Afrika, lalu ke Laut Atlantik sampai ke muara Sungai Guadalquivir di Iberia Selatan. Dengan demikian, untuk pertama kalinya dalam sejarah kita, rempah-rempah dari Maluku diangkut langsung dari tempat asalnya ke Eropa.

Sebelumnya rempah-rempah dari Maluku ini, yang terdiri dari pala dan cengkih, harus menempuh jalan yang bertahap-tahap yang memakan waktu lebih lama untuk sampai di pasar Eropa: Dahulu rempah-rempah tersebut diangkut dari Maluku Utara ke Hitu dan Banda yang kemudian diangkut pula ke bagian barat Indonesia, yakni ke pelabuhan-pelabuhan pesisir Jawa, pantai timur Sumatra, dan Selat Malaka. Pada abad ke-15 Malaka berhasil menjadi pusat utama untuk lalu lintas perdagangan dan pelayaran di bagian ini, dan dari Malaka hasil hutan dan rempah-rempah dibawa ke India. Terutama tanah Gujarat, yang melakukan hubungan dagang langsung dengan Malaka pada waktu itu merupakan mata rantai yang penting dalam perjalanan tersebut.

Lebih ke barat perjalanan laut melintasi Laut Arab dan bercabang dua; yang pertama di sebelah utara menuju ke Teluk Oman, melalui Selat Ormuz, ke Teluk Persia. Di Persia Syah Ismail I, cikal bakal Dinasti Sufi, sedang memperluas wilayahnya. Pada tahun 1514 pecahlah perang dengan kemaharajaan Turki (Ottoman) disebabkan ambisi untuk ekspansi wilayah dan juga karena ada pertentangan antara kaum Syi'ah (Persia) dan kaum Sunni (Turki). Dalam keadaan ini Syah Ormuz dapat menguasai lalu lintas keluar masuk teluk Persia. Kota Ormuz pada waktu itu dapat membanggakan diri sebagai salah satu kota yang terkaya di dunia karena posisi georafi yang unik itu.

Jalan kedua adalah melalui Teluk Aden dan Laut Merah, dan kota Suez jalan perdagangan harus melalui daratan ke Kairo dan Iskandariah. Di sini kekuasaan berada di tangan raja-raja Mameluk yang mempunyai imperium besar yang meliputi Mesir, Suriah, dan tanah Hejaz. Jadi, jalan

rempah-rempah melalui Teluk Persia pun akhirnya harus melalui wilayah Mameluk di mana Aleppo merupakan pusat perdagangan penting.

Melalui jalan pelayaran tersebut di atas kapal-kapal Arab, Persia, dan India telah mondar-mandir dari barat ke timur dan terus ke negeri Cina dengan menggunakan angin musim untuk pelayaran pulang perginya. Ada indikasi bahwa kapal-kapal Cina pun mengikuti jalan tersebut sesudah abad ke-9, akan tetapi tidak lama kemudian kapal-kapalnya hanya sampai ke pantai barat India, karena barang-barang yang diperlukan sudah dapat dibelinya di sini. Juga kapal-kapal Indonesia telah mengambil bagian dalam perdagangan tersebut. Pada zaman Sriwijaya pedagang-pedagang Indonesia telah mengunjungi pelabuhan-pelabuhan Cina dan pantai timur Afrika.[33]

Menyadari akan pentingnya jalan dagang tersebut, orang-orang Portugis segera berusaha menguasai jalan ini. Tokoh utama adalah Alfonso d'Albuquerque. Dalam waktu singkat ia berhasil menduduki Ormuz (1515), Goa (1510), dan Malaka (1511) sehingga pusat-pusat penting di jalan ini jatuh ke tangan Portugis. Kemudian menyusul *feitoria* baru, antara lain, Sao Tomé de Meliapor di pantai Koromandel, Hughli di Bengal, dan Makao di Cina. Dengan memperluas wilayahnya pendudukan sampai di Maluku (Ternate) dan Timor serta persahabatannya dengan Sultan Gowa di Makassar, perdagangan di sebelah timur pun terjamin baginya.

Seperti diketahui, orang-orang Portugis memasuki perairan Asia melalui jalan selatan, yakni via Tanjung Harapan Baik dan pantai timur Afrika. Dengan mendirikan pangkalan-pangkalan tersebut tadi, perdagangan Asia hendak dialihkannya melalui jalan Tanjung Harapan Baik tersebut, di mana ia telah mendirikan pangkalan-pangkalan di Sofala, Cabo Verde (pantai barat Afrika), dan Brasil (Amerika Selatan).

Walaupun muatan yang diangkut Portugis melalui Tanjung Harapan Baik ke Lisbon diperkirakan antara 40.000 dan 50.000 kuintal setiap tahun pada awal abad ke-16 dan kemudian menjadi 60.000–70.000 kuintal setahun, tidak semua barang dagangan dapat dialihkannya melalui jalan tersebut. Menurut perkiraan seorang pegawai Portugis pada tahun 1585, Aceh mengekspor antara 40.000 dan 50.000 kuintal rempah-rempah ke Jedah setiap tahun, terutama dengan kapal Gujarat.[34]

Jadi, kapal-kapal Portugis dalam hal ini berhasil mempertahankan monopoli rempah-rempah. Setelah mengalami disrupsi (tercabut dari akarnya) selama beberapa tahun, pelayaran pribumi cepat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Kapal-kapal Indonesia mulai lagi mengunjungi Malaka yang telah direbut Portugis, akan tetapi di samping itu telah timbul

33 Meilink-Roelofsz, *op. cit*, hlm. 15–16
34 C.R. Boxer, *The Portuguese Seaborne Empire: 1415–1825*, London, 1969, hlm. 59

pusat-pusat baru di sekitarnya. Aceh dan Banten menjadi saingan berat karena sebagian dari perdagangan tersebut dialihkan melalui pantai barat Sumatra dan Selat Sunda, sedangkan Jambi dan Brunei pun ikut mendapat keuntungan dari kemunduran Malaka sebagai pusat yang terbesar di wilayah ini.

Pada abad ke-16 telah berkembang pula suatu pelayaran baru, yakni antara Asia Tenggara dan Amerika, khususnya antara Manila dan Acapulco di pantai barat Meksico. Perjalanan lintas Pasifik ini telah dipelopori oleh beberapa ekspedisi Spanyol, akan tetapi baru pada tahun 1565 mereka untuk pertama kalinya melakukan perjalanan pulang ke Meksiko, yakni dengan kapal San Pablo yang berangkat dari Cebu pada tanggal 1 Juni 1565 dan tiba di Acapulco tanggal 28 September. Dalam hal ini navigasi tidak dapat bersandarkan pada angin musim sehingga untuk perjalanan pulang perlu dicari rute yang baru. Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dan kegagalan ekspedisi sebelumnya telah mendorong Urdaneta untuk merencanakan rute lain yang baru terlaksana tahun 1565. Sejak ditemukannya rute yang baik, lahirlah suatu hubungan baru dengan Eropa melalui Amerika Tengah dengan jalan mana barang-barang Asia mendapat jalan keluar. Jumlah muatan yang diangkut melalui jalan ini dapat kita pelajari lewat angka-angka *permiso* (izin) yang dikeluarkan di Manila. Sebelum tahun 1593 tidak diadakan pembatasan ekspor, tetapi pada tahun tersebut *permiso* pertama dikeluarkan dan muatan Manila Galleon dibatasi 250.000 peso setiap tahun, dengan berdasarkan harga yang berlaku di Manila, sedangkan harga penjualannya di Meksiko tidak boleh melebihi dua kali harga tersebut. Pembatasan ini dipertahankan ketika dikeluarkan peraturan pada tahun 1604 dan 1619. Baru pada tahun 1602 *permiso* dinaikkan menjadi 300.000 *peso* setahun, kemudian ditambah lagi menjadi 500.000 *peso* pada tahun 1734, dan akhirnya 750.000 *peso* setahun sejak tahun 1776.[35]

Sampai sekarang belum pernah dipelajari berapa persen dari barang dagangan yang diangkut setiap tahun lewat jalan trans-Pasifik berasal dari Indonesia. Dilihat dari jumlah keseluruhannya mungkin tidak seberapa karena orang-orang Spanyol memusatkan perhatiannya kepada Filipina dan perdagangan sutra dan porselen dengan negeri Cina. Akan tetapi, perhatiannya terhadap cengkih dan pala telah membawa mereka pula ke Maluku Utara dan pernah ada hubungan teratur antara Ternate dan Tidore dengan Manila setelah pada tahun 1606 Spanyol mendirikan benteng di pulau-pulau ini yang dapat dipertahankannya selama hampir 60 tahun.

Jalan langsung antara perairan Indonesia dengan Tanjung Harapan Baik melintasi Samudra Indonesia yang dirintis oleh Del Cano tersebut

35 W.L. Schurz, *The Manila galleon*, New York, 1959, hlm. 155, 220–221

di atas, dipergunakan oleh kapal-kapal Belanda pertama kali pada tahun 1596. Seperti dikatakan tadi kapal-kapal Portugis memilih jalan menyusur pantai timur Afrika. Dengan perkembangan jalan baru ini pelayaran melalui Selat Sunda yang sudah sering dipergunakan semenjak Portugis menduduki Malaka kini menjadi lebih ramai lagi. Seperti halnya lintas Pasifik dengan "Galai Manila" telah memelopori eksplorasi di Samudra Pasifik, pelayaran melintasi Samudra Indonesia juga menambah pengetahuan mengenai geografi di sini. Berangsur-angsur pulau-pulau di tengah-tengah samudra ini seperti Kokos dan Christmas muncul dalam peta Eropa. Demikian pula pantai barat Australia mulai dikenal karena sering kapal Belanda yang berlayar dengan angin Bramadora (*the Roaring Forties*) sebelum membelok ke utara menuju Selat Sunda, telanjur berlayar ke timur terbentur pada pantai Australia ini (sekitar pulau Dirk Hartogs).

Apabila kapal-kapal Belanda secara kebetulan sampai di pantai barat Australia, bukan demikian halnya dengan kapal-kapal Bugis dan Makassar yang berlayar ke pantai utara benua ini.

Menurut kisah Daeng Sarro dari kampung Bontorannu pelayaran tersebut yang terutama diadakan untuk mencari tripang yang sangat laku dalam perdagangan dengan orang Cina, telah dikenal pada abad ke-18, dan ada kemungkinan besar bahwa pelayaran tersebut sudah mulai pada abad ke-17 atau sebelumnya.[36]

Menurut kisah Daeng Sarro dari kampung Bontorannu pelayaran penangkap-penangkap tripang dari Sulawesi Selatan ke tanah Marege' (yaitu nama penduduk Australia dalam bahasa Bugis dan Makassar) mengambil rute sebagai berikut: Makassar, Salayar, Wetar, Kisar, Leti, Moa, selanjutnya ke arah selatan tenggara ke pelabuhan Darwin, dan seterusnya. Seperti diketahui, kunjungan kapal-kapal dari Sulawesi Selatan ini telah meninggalkan bekasnya pula pada budaya penduduk pantai utara Australia, misalnya, pemasangan tiang layar dalam upacara pemakaman orang mati yang walaupun sebenarnya merupakan penemuan baru oleh suku Australia sendiri diambilnya dari kebiasaan orang Bugis dan Makassar memasang tiang layar pada waktu mereka hendak berlayar pulang.[37]

Pelayaran orang Makassar dan Bugis dalam waktu itu sudah meliputi hampir seluruh perairan Nusantara. Cerita tentang pengembaraan *Sawerigading* dapat memberi petunjuk tentang luasnya daerah-daerah yang dikunjungi. Akan tetapi, gambaran lebih jelas baru diperoleh dari catatan

---

36 A.A. Cense dan H.J. Heeren, *Pelayaran dan Pengaruh Kebudayaan Makassar-Bugis di Pantai Utara Australia*, Jakarta, Bhratara, 1972, hlm. 10, 32

37 *Ibid.*, hlm. 28–31, 44–45

pada masa sesudahnya. Umpamanya dalam tulisan tentang hukum laut *Amanna Gappa*, dan juga dari peta laut Bugis.[38] Dari bukti-bukti ini kita melihat bahwa pelayaran mereka sampai ke Aceh, Kedah, dan Kamboja, ke timur sampai ke Kei dan Ternate, dan ke utara sampai ke pulau-pulau Filipina (Sulu) dan Kalimantan Utara (Berau). Belum dapat dipastikan apakah kapal-kapal ini yang mengadakan hubungan antara Manila dan Tuban pada abad ke-16 sebab pada waktu itu kapal-kapal Jawa pun mengadakan perjalanan yang jauh. Walaupun sumber-sumber Jawa tidak memberi petunjuk mengenai hubungan laut tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pelayaran di Selat Makassarlah yang dipakai untuk berlayar ke Manila. Melalui jalan ini pula kapal-kapal Makassar dan Bugis mengunjungi Sulawesi Utara. Sebenarnya, bukti tertua mengenai adanya pelayaran di selat ini lebih tua, yakni berasal dari abad ke-2 (penemuan arca Buddha di Sempaga).

Jalan pelayaran dalam negeri dapat dikonstruksikan dari posisi kerajaan-kerajaan pribumi dan wilayah ekspansinya, Samudra Pasai yang menempati kedudukan penting di Selat Malaka tetapi akhirnya harus mengalah terhadap Malaka dalam penguasaan lalu lintas di Selat Malaka, kemudian diganti oleh Aceh yang mendapat kesempatan baik setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Untuk sementara kapal-kapal memilih berlayar menyusur pantai barat Sumatra dan untuk penguasaan pelayaran serta penguasaan bahan hasil hutan dan perkebunan yang dihasilkan oleh daerah-daerah sepanjang jalan ini. Aceh berusaha melebarkan kekuasaannya ke selatan sampai ke Pariaman dan Tiku.

Dari pantai Sumatra kapal-kapal memasuki Selat Sunda menuju pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa. Di bagian barat, Banten menduduki tempat penting sejak awal abad ke-16. Mengenai sejarah pertumbuhan Banten pada masa pertumbuhannya, kita tidak mempunyai data-data pasti kecuali mengenai sejarah politik dan asal usul dinasti raja.[39] Akan tetapi, munculnya Banten sebagai bandar besar justru pada waktu Malaka telah jatuh ke tangan Portugis; barangkali dapat dihubungkan dengan pengalihan sebagian perdagangan dari Selat Malaka ke Selat Sunda. Usaha Banten untuk menguasai Lampung dan mengadakan ekspansi ke daerah Palembang mungkin pula dapat dihubungkan dengan ambisinya untuk memegang hegemoni di wilayah Selat Sunda, di samping keinginannya untuk menguasai lada di Sumatra Selatan.

---

38 Lihat catatan (9) di atas, Hukum Laut Amanna Gappa diterbitkan oleh sebuah panitia yang dipimpin oleh Ph. O.L. Tobing, *Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa, Makassar*, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, 1961, tentang hubungan antara Tuban dan Manila lihat pula B.J.O. *Schrieke, Het boek van Bonang*, Utrecht, 1916

39 Meilink-Roelofsz, 1963, hlm. 152 tentang H. Djajadiningrat, *Critische beschouwing van de Sejarah-Banten*, Haarlem, 1913

Pada zaman Tomé Pires, Banten masih menduduki kedudukan kedua sesudah Sunda Kalapa. Di sini pedagang-pedagang dari barat dan timur berkumpul, dari Palembang dan Pariaman, dan dari Lawe dan Tanjung Pura (Kalimantan Selatan); berikut pula dari Malaka, Makassar, Jawa Timur, dan Madura. Dari pulau-pulau Maladiwa kapal-kapal datang untuk menjual budak-budaknya.[40]

Pada tahun 1527 Banten menduduki Sunda Kalapa sehingga perdagangan pelabuhan ini yang pada waktu itu diberi nama Jayakarta, banyak dialihkan ke Banten. Baru sesudah tahun 1619 perdagangan di sini mulai ramai lagi, akan tetapi pada waktu itu kekuasaan telah berada di tangan orang Belanda, yang mengganti nama Jayakarta dengan Batavia.

Seperti Sunda Kalapa yang mempunyai sejumlah kapal *lanchara* dan *jung* dengan kapasitas muatan sampai 150 ton, dan mengekspor beras (di samping lada), demikian pula pelabuhan-pelabuhan pesisir Jawa bertambah makmur karena ada surplus beras di daerah pedalaman. Cirebon mempunyai 3 sampai 4 *jung* dan beberapa *lanchara*; Losari 2 jung dan 5 *lanchara*, Tegal 1 *jung* dan beberapa *lanchara* kecil, Semarang 3 jung dan 4 atau 5 *lanchara*, sedangkan Demak dapat membanggakan diri dengan 40 jung. Keadaan yang dilaporkan Pires adalah keadaan sebelum dilancarkan serangan bersama terhadap Portugis di Malaka yang dipimpin oleh Demak. Seperti diketahui, serangan ini berakhir dengan kekalahan Demak, dan armada jung dan *lanchara* dimusnahkan semua. Setelah kekalahan ini Japara hanya memiliki 3 jung dan 2 atau 3 buah perahu *pangajaya*.[41] Japara sebenarnya lebih kecil, dan penduduknya kurang dari penduduk Demak, tetapi pelabuhannya lebih penting. Letaknya di dalam teluk yang dapat dikunjungi kapal besar sehingga memungkinkan pertumbuhannya sebagai pelabuhan penting dalam jalan perdagangan antara Malaka dan Maluku. Hasil sawah di pedalaman memungkinkan Japara untuk menjadi pengekspor beras yang penting ke daerah Malaka dan Maluku. Dari pelabuhan Japara ini ekspedisi-ekspedisi penyeberangan laut Jawa bertolak untuk meluaskan kekuasaan ke Bangka dan Kalimantan Selatan (Tanjung Pura dan Lawe).

Sesudah diduduki oleh Mataram pada tahun 1599, Japara tetap merupakan pelabuhan penting bagi kerajaan di bawah pimpinan Senopati. Pada tahun 1615 orang Belanda melaporkan telah bertemu di dekat pantai Sumatra dengan 60–80 *jung* dari Jawa, sebagian besar di antaranya berasal dari Japara dan tempat-tempat sekitarnya. Kapal-kapal tersebut memuat makanan untuk dibawa ke Malaka. Sumber-sumber Belanda melaporkan

---

40 Meilink-Roefsz, *op. cit.*, hlm. 113–114
41 *Ibid.*, hlm. 112

pula bahwa ada hubungan langsung antara Jambi dan Japara. Malahan dikatakan bahwa lada yang dimasukkan dari Jambi ke Japara (dari Japara biasanya diangkut beras dan garam ke Jambi) menarik pedagang-pedagang Cina untuk datang ke Japara. Di sini lada dari Sumatra ditukar dengan sutra, porselen, dan belanga besi dari negeri Cina. Rupanya antara Japara dan Jambi terdapat hubungan dagang yang erat pada waktu itu, akan tetapi juga dengan Palembang dan Inderagiri ada perdagangan lada, dan perahu-perahu Melayu dan Patani (Siam) juga membawa lada ke Japara.

Berlayar lebih ke timur, kapal-kapal tiba di Tuban, salah satu pelabuhan yang terkenal sejak abad ke-11, tetapi pada akhir abad ke-16 kapal-kapal yang mengunjunginya sudah berkurang. Dikelilingi tembok yang tebal Tuban merupakan benteng yang tidak mudah dikalahkan. Baik Tomé Pires maupun pengunjung-pengunjung Belanda yang singgah di sini pada tahun 1599 sangat kagum akan kekayaan yang dipamerkan, antara lain, pawai gajah, kuda, dan anjing. Kaum bangsawan di sini mempunyai banyak budak yang pada waktu itu juga merupakan simbol status yang penting. Akan tetapi, kapal-kapal dagang pada abad ke-16 lebih suka ke Gresik daripada ke Tuban, entah karena fasilitas pelabuhan di sini sudah mulai berkurang, atau karena endapan tanah mendangkalkan pelabuhan, atau mungkin karena sistem bea cukai yang tinggi sehingga para pedagang tidak mendapat keuntungan yang diharapkan. Sumber-sumber tidak memberi penjelasan cukup, tetapi sangat mencolok bahwa pada waktu itu Tuban menggunakan kekerasan untuk memaksa kapal-kapal datang ke pelabuhannya. Kapal-kapal yang berlayar dari Banjarmasin ke Gresik dicegat oleh 3 galai kepunyaan Tuban, yang mendapat bantuan dari Arosbaya, pelabuhan yang terletak lebih ke sebelah timur lagi yang pada waktu itu juga bersaingan dengan Gresik. Berita lain menyatakan bahwa *jung-jung* Cina pun dipaksakan masuk ke Tuban. Pernah terjadi pertempuran di laut yang berakhir dengan kekalahan jung Cina, dan seluruh muatannya disita.[42]

Persaingan antara kota-kota pelabuhan tersebut tentu turut melemahkan posisi *vis-a-vis* politik ekspansi Mataram. Pada tahun 1619 Tuban menyerah, Gresik diduduki tahun 1623, Surabaya masih bertahan sampai tahun 1625, tetapi pada tahun itu seluruh pesisir utara Jawa boleh dikatakan sudah berada dalam tangan Sultan Mataram. Pada awal abad ke-17 kota Surabaya masih disebut "desa" dalam laporan-laporan Belanda, walaupun pada waktu itu kerajaannya yang mula-mula meliputi Sedayu, Pasuruan, dan Gresik, setelah meluas ke Panarukan dan Balambangan. Malahan dikatakan bahwa Surabaya pernah menaklukkan Sukadana,

42 *Ibid.*, hlm. 285, 287–389

Banjarmasin, Lawe, dan Pulau Bawean. Akan tetapi, di antara pelabuhan-pelabuhan yang disebut itu, bandar Gresik Jaratan merupakan pelabuhan yang utama. Di sini dibuat pula kapal-kapal kecil berukuran 10 sampai 100 ton yang dipakai untuk berlayar ke Maluku. Selain itu, ada fasilitas bagi kapal dari luar yang memerlukan reparasi. Pelayaran dengan pulau rempah-rempah di Maluku sangat penting dalam hubungan ini. Baik kapal Gresik sendiri maupun kapal Banda menyelenggarakan hubungan pelayaran ini. Dalam hubungannya dengan Maluku pelabuhan Gresik juga sangat penting karena di sinilah orang-orang Ternate dan Tidore berlabuh untuk pergi ke Giri memperdalam pengetahuannya di bidang agama Islam.

Pada musim angin Timur, kapal-kapal kecil dari Gresik itu berlayar ke Selat Malaka, Sumatra, Kalimantan, Patani, dan pelabuhan-pelabuhan Siam. Kalau musim barat, mereka berlayar ke pulau-pulau di Nusa Tenggara dan kepulauan rempah-rempah di Maluku, juga ke Buton, Buru, Mindanao, dan pulau-pulau Kei dan Aru.

Hubungan antara Pulau Bali dengan pulau-pulau lain di Indonesia pada abad ke-16 dan ke-17 tidak kurang pentingnya. Orang-orang Belanda yang datang di sini pada tahun 1596 (ekspedisi pertama dari Compagnie van Verre) menyaksikan suatu perdagangan besar dengan bagian timur maupun bagian barat Indonesia (*"grooten handel soo nae Moluccas, Ambon, Bandar, almae Java, Bantam, Sunda ende Sumatra"*).[43] Sumber yang sama melaporkan lebih lanjut bahwa kapal-kapal dari sebelah barat Indonesia yang berlayar ke Maluku dan Nusa Tenggara biasanya singgah di Bali karena ada pelabuhan yang baik untuk mengisi air minum dan bahan makanan berlimpah-limpah dan murah, dan di sampingnya ada kain bermacam-macam yang diperjualbelikan di tempat ini. Selain itu, dilihatnya pula kapal-kapal dayung (*roy-barcken*) datang dari Pulau Sumbawa, delapan buah berbentuk panjang dan sempit.

Di samping Bali dan Lombok, Pires menyebut Sumbawa sebagai penghasil beras dan bahan makanan lainnya seperti daging dan ikan. Pedagang-pedagang Malaka datang ke Sumbawa untuk mengambil kayu sapan, dan ke Solor untuk belerang dan ke Timor untuk kayu cendana, damar, dan madu. Pelabuhan-pelabuhan mulai dari Bali sampai ke Timor juga disinggahi untuk perdagangan budak.

Semakin besar kekuatan dan kemampuan Belanda untuk menguasai jalan perdagangan ini dalam abad ke-17, semakin sulit bagi kapal-kapal pribumi untuk memelihara hubungan laut antara pelabuhan-pelabuhan tersebut. Oleh sebab itu, kapal-kapal Jawa dan Portugis mencari jalan lain untuk menghindari jalan dagang yang telah dikuasai Belanda itu. Dari

43 Rouffaer dan Ijzerman 1915, hlm. 190, keterangan berikut diambil dari halaman 187 dan 199–200

Malaka mereka berlayar melalui Pulau Karimata dekat Kalimantan, dan dengan demikian mereka dapat menjauhi jalan yang dahulu biasa dipakainya melalui pulau-pulau Lingga dan Bangka. Dengan menyusur pantai selatan Kalimantan kapal-kapal Portugis dapat pula mengunjungi Makassar yang pada pertengahan abad ke-17 telah berkembang menjadi pusat perdagangan yang ramai. Bagaimana hubungan antara kemunduran di satu pihak dari pelabuhan-pelabuhan pesisir Jawa yang telah dikuasai Belanda dengan kemajuan di lain pihak yang kita saksikan di Banjarmasin dan Makassar pada waktu itu, memerlukan lagi penelitian yang lebih lanjut.[44]

Orang-orang Portugis berusaha pula untuk mencari jalan lain dari Malaka ke Maluku, yakni lebih ke utara dengan mengikuti pantai Kalimantan Utara dan menyeberang Laut Sulawesi. Rute ini memang sudah dipakai pelaut-pelaut pribumi, sebab antara Filipina Selatan (Mindanao dan Sulu) dengan Brunei dengan negeri-negeri di Selat Malaka, sedangkan hubungan antara Filipina dan Maluku Utara telah lama dikenal. Kapal Victoria dan Trinidade dari ekspedisi Magelhaes dipandu oleh mualim pribumi dalam perjalanannya dari Filipina Selatan ke Tidore pada tahun 1521. Akan tetapi, baru enam tahun kemudian kapal Portugis berhasil menemukan jalan utara ini. Dalam sumber-sumber Portugis dikatakan bahwa dua kali mereka mencoba berlayar melalui rute tersebut, yakni pada bulan Mei 1522 dan Mei 1523, masing-masing oleh Garcia Henriques dan Antonio d'Abreu yang diperintahkan untuk mencari jalan dengan bertolak dari Ternate. Namun, kedua-duanya gagal. Pada tahun 1526 Jorge de Menezes berangkat dari Malaka bersama seorang pandu setempat yang sudah mengetahui jalan ini, dari Brunei mereka menuju Cagayan Sulu, kemudian melalui Mindanao dan Basilan, dan akhirnya tiba di Ternate. Setibanya di sini ia mengirim sebuah *kora-kora* yang dipimpin oleh Vasco Lourenco yang dibantu oleh seorang pandu Spanyol dan seorang pandu Melayu. *Kora-kora* tersebut hanya sampai di Brunei. Akan tetapi, Lourenco akhirnya berhasil tiba di Malaka setelah mengalami banyak rintangan. Jadi, sejak tahun 1527 pelayaran melewati jalan utara ini mulai digunakan kapal Portugis. Kapal-kapal Belanda menemukan rute ini satu abad kemudian.[45]

Melalui 3 jalan laut ini, yakni via pesisir utara Jawa, pantai selatan Kalimantan, dan via Brunei dan Mindanao, akhirnya kapal-kapal tiba di Maluku, daerah yang menjadi inceran kapal-kapal asing karena menghasilkan pala dan cengkih. Hegemoni di Maluku pada waktu itu sedang

---

44 Meilink-Roelofsz, *op. cit.*, hlm. 102–103, 294

45 M. Teixeira, "Early Portuguese and Spanish contacts with Borneo", *Boletin da Sociedade de Geografia de Lisbon*, 1946, hlm. 314–315. Mengenai pelayaran kapal Belanda melalui utara Kalimantan, lihat *Daghregister gehouden int Casteel Batavia: 1631–34*, Den Haag, 1898, hlm. 391

diperebutkan antara Ternate dan Tidore. Sultan Ternate yang juga dikenal sebagai "Raja 72 Pulau" pada masa puncak kejayaaannya telah melebarkan sayap dan pengaruhnya ke daerah-daerah Mindanao Selatan, pulau-pulau Sangir dan Talaud, Minahasa, Gorontalo, dan beberapa daerah di teluk Tomini, pulau-pulau Banggai dan Sula, bagian timur Sulawesi (Timbuku), Butung, Solor, Buru, dan sebagian dari Pulau Seram dan Ambon Uliasa. Sementara itu, kerajaan Tidore (pada waktu itu meliputi juga Maitara dan Mare) mencari wilayah ekspansinya ke daerah timur yakni ke sebagian besar Pulau Halmahera, Gede, kepulauan Raja Ampat, dan bagian barat Irian/Papua. Besar kecilnya pengaruh kekuasaan tentu tergantung pada frekuensi ekspedisi-ekspedisi laut, di samping pelayaran kapal dagang yang menghubungkan daerah-daerah tersebut dengan kota "metropole" Ternate dan Tidore.

B. Pola Pelayaran dan Perdagangan

1. Pemilik Modal Pelayaran dan Perdagangan

Sultan Agung dari Mataram (1613–1645) ketika menerima utusan VOC, Rijckloff van Goens, mengatakan bahwa ia bukan seorang pedagang seperti sultan Banten. Di sini jelas ada perbedaan nilai antara kerajaan agraris yang penghasilannya terutama didasarkan atas hasil pertanian dan hasil hutan, dengan kerajaan pesisir yang sebagian besar penghasilannya tergantung pada perdagangan dan pelayaran. Meskipun kita tidak mempunyai cukup bahan mengenai semua negeri-negeri pesisir untuk membuat generalisasi, dari sumber-sumber yang tersedia kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada umumnya raja-raja negeri pesisir bukan saja menarik keuntungan dari pajak perdagangan dan pelayaran di bandar-bandarnya, melainkan mereka secara pribadi turut mengambil bagian dalam perdagangan dan pelayaran ini.

Menurut Tomé Pires, raja-raja Pahang, Kampar, dan Inderagiri mempunyai kantor dagang di Malaka, sekalipun pada umumnya peranan mereka pasif. Rupanya raja-raja ini sendiri tidak memiliki kapal. Melalui perwakilannya di Malaka mereka mempunyai saham dalam kapal dan perahu yang berlayar dari Malaka. Sistem *partnership* demikian yang juga dikenal di Eropa pada zaman ini, dan disebut *commenda*, berlaku dalam sebagian besar perdagangan di sini. Kecuali sang raja, pembesar-pembesar negeri lainnya pun turut mengadu untung dalam berbagai usaha perdagangan dan pelayaran.

Untuk membuat kapal besar dan mengisi ruangan penuh dengan barang dagangan sudah tentu diperlukan modal yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, peran raja dan pembesar negeri untuk menginvestasi sebagian

dari hartanya dalam perdagangan dan pelayaran ini sangat penting. Mereka inilah yang menghimpun modal untuk memperlengkapi kapal dan muatannya. Di samping itu, ada kapal-kapal Malaka yang menjadi milik penuh dari sultan, dan dalam hal ini perdagangan dijalankan oleh seorang saudagar yang bertindak atas nama sultan. Kadang-kadang tugas ini diserahkan kepada nakhoda. Menurut Pires, pada setiap jung yang berangkat dari Malaka ada sebagian barang dagangan milik sultan.[46] Mungkin berita ini agak berlebihan, tetapi sultan Malaka memang pernah mencarter kapal untuk mengangkut barang jualannya. Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan ini tidak sedikit, apalagi sultan mendapat prioritas dalam pembagian ruang (petak) untuk barang dagangannya.

Sultan Muzaffar Syah (1446–1459) memerintahkan supaya dibuatkan kapal baginya, kemudian disuruh berlayar dengan dagangannya yang dititipkan kepada pedagang-pedagang. Pada waktu kota Malaka baru saja jatuh ke tangan Portugis, orang-orang Portugis berhasil menangkap kapal milik sultan yang membawa barang dagangan kepunyaan sultan, antara lain terdiri dari kain Koromandel yang ditaksir seharga kira-kira 12.000 sampai 15.000 *cruzados*. Juga terdapat muatan kain kepunyaan pedagang-pedagang Koromandel yang berdiam di Malaka.[47]

Dari usaha perdagangan ini sultan dapat mengumpulkan harta yang besar. Dengan penghasilan dari bea cukai yang dipungut dari barang impor ditambah dengan pajak lainnya, kekayaan sultan bertambah dengan semakin ramainya kapal-kapal dan saudagar-saudagar yang mengunjungi bandar. Sultan Alauddin Syah dikatakan mempunyai harta yang ditaksir sama dengan 140 kuintal emas (8.824 kg). Mansur Syah, menurut perkiraan Pires, memiliki 120 kuintal emas ditambah dengan sejumlah besar intan berlian dan ratna-mutu-manikam. Hikayat-hikayat kuno memuji-muji kekayaan raja. Misalnya, pakaian raja katanya terdiri dari:

> " ... serawal berantelas dengan air-mas, berumbaikan mutiara dan permata merah, berkain ungu bertepi merah, berair mas dipahat, bersirat benang-mas bertatah pudi menikam; ikat pinggang bersuji emas diragam dan berbaju antakesuma dan destar bertepi bunga sirih mas dipahat awan berarak ...."

Sementara kerisnya disalut intan dengan sarungnya emas "berpermata sembilan bagai".[48] Kekayaan ini dipakai untuk membiayai pula pembangunan istana dan masjid, dan untuk membiayai upacara-upacara kebesaran, tetapi sebagian juga disisihkan sebagai investasi untuk usaha-usaha perbaikan dan perluasan pelabuhan.[49]

---

46 Meilink-Roelofsz, *op. cit.*, hlm. 51; Cortesao, *op. cit.*, hlm. 251
47 *Ibid.*, hlm. 52, 341 catatan 94
48 *Hikayat Hang Tuah, op. cit.*, hlm. 87
49 Meilink-Roelofsz, *op. cit.*, hlm. 52

Keadaan di kota-kota pelabuhan lainnya mungkin tidak sama, keadaan tidak semakmur jika dibandingkan dengan keadaan Malaka sebelum jatuh ke tangan Portugis. Akan tetapi, ejekan Sultan Agung (Mataram) bahwa sultan Banten adalah seorang saudagar, dan keterangan seorang Prancis yang mengunjungi Aceh pada tahun 1620–1621 bahwa Sultan Iskandar Muda adalah pedagang" (... *le Prince est marchand*) menunjukkan indikasi bahwa di Banten dan Aceh raja pun ikut mencari untung dengan usaha dagang.

Seperti dikatakan tadi, golongan atas pun mengambil bagian dalam perdagangan dan pelayaran ini. Nama "orang kaya (rangkaya, rangkayo)" di Sumatra dan Maluku yang diberikan kepada golongan terkemuka tidak diberi begitu saja. Golongan inilah yang termasuk golongan yang berada, dan mereka yang memiliki cukup harta untuk menginvestasikannya dalam pelbagai usaha perdagangan dan pelayaran.

Kita kutip lagi catatan Loddewycksz tentang keadaan di Banten pada tahun 1596:

> "Para pedagang yang kaya pada umumnya tinggal di rumah, bilamana ada kapal yang mau berangkat, mereka menyerahkan sejumlah uang kepada orang-orang yang akan berlayar dengan maksud bahwa uang ini akan dikembalikan nanti dua kali lipat, menurut perjanjian yang dibuat ("*.... wear van zy een Obligatie maken*"). Jumlah uangnya kurang lebih sesuai dengan lama dan jauhnya perjalanan. Jikalau pelayaran ini berhasil baik, pemberian uang dibayar kembali sesuai dengan perjanjiannya. Akan tetapi, jika peminjam uang tidak sanggup membayarnya kembali karena suatu kemalangan, maka ia harus memberikan istri dan anaknya sebagai jaminan sampai utangnya telah lunas, kecuali apabila kapalnya karam, dalam hal ini pemilik modal kehilangan uang yang dipinjamkannya.[50]

Dari satu contoh ini sudah tentu belum boleh diambil kesimpulan bahwa perdagangan Banten semuanya berjalan demikian, perjanjian yang diadakan pun dapat berbeda-beda. Akan tetapi, dari kutipan di atas jelaslah bahwa di sini pun kita melihat sistem perdagangan *commenda* yang dijalankan, suatu sistem yang tidak hanya dikenal di Indonesia dan Asia Tenggara, tetapi sudah menjadi pola umum dalam dunia perdagangan dari timur ke barat sampai ke pusat-pusat perdagangan di Timur Tengah.[51]

Juga dilihat dari contoh tadi bahwa "pinjaman" atau titipan" uang itu ditetapkan dengan perjanjian. Adapun perjanjian itu ditulis atas "daun lontar yang dalam bentuk buku diikat dengan tali di antara dua kayu ("*.... gheschreven op bladeren van eenen boom met enn stillet oft yseren priem, die zy dan oprollen oft soo 't boecken zijn tusschen twee houters met toukens samen*

50 Rouffaer dan Ijzetman, *op. cit.*, hlm. 120
51 van Leur, *op. cit.*, hlm. 328–229 catatan 108

gebonden, seer aerdich en fraey ...."), atau ditulis di atas kertas Cina yang halus dalam berbagai warna (" .... *ook op Chinees pampier van allo coulour, dwelck seer fijn ende suyvei is ....*").

Adakalanya modal yang diperdagangkan berasal dari pedagang asing. Hal ini diberitakan oleh orang Gujarat kepada Gubernur (VOC) di Ambon, yang melaporkannya kepada gubernur jenderal (" .... *soo wij meede van eenige Guseratten verstaan hebben ....*") dalam suratnya tanggal 6 Agustus 1627. Dikatakan bahwa jung-jung yang berangkat dari Makassar ke Maluku untuk mengambil cengkih, diberi uang tunai, kain, atau barang dagangan lainnya oleh orang-orang Inggris, Denmark, atau Portugis untuk membeli atau menukarkannya dengan cengkih (*"werden by d'Engleschen, Deenen ofte Portugiesen met contanten, cleeden ende ander coopmanschap tot opcoop van naegelen versorght"*). Risiko apabila usaha bersama ini gagal harus ditanggung bersama, yakni jika kapalnya tenggelam karena angin besar. Halangan lain adalah kapal-kapal Belanda yang berusaha untuk membajak dan menggagalkan usaha orang-orang Makassar dan Bugis ke Maluku itu ("*.... het gevalt dat deselve joncken bij ons werden aengehaelt, genomen ofte tegens den wal gejaecht ende al soo comen te verongelucken, ofte dat door strom ofte quaet weder comen te blijven ....*"). Dalam hal ini semuanya rugi, juga pihak yang telah mempertaruhkan uang atau barang dagangannya (" .... *die sijn gelt ende coopmanschappen met haer heeft geavontuert ....*"). Akan tetapi, apabila kapalnya kembali dengan selamat, muatan cengkih diserahkan kepada peminjam modal, yang membayar pelaksana "200 *reaelen van achten*" untuk setiap bahar cengkih. Di samping itu, pemilik tersebut masih harus membayar pajak dan kewajiban-kewajiban lain kepada raja ("*.... Daerenboven moet den ontfanger vande naeglen den Coninck sijn tol ende gerechticheyt noch bataelen ....*"). Akan tetapi, tidak diberitahukan beberapa jumlah pajak harus dipenuhi.[52]

Jadi, sang raja, bendahara, tumenggung, dan para orang kaya bukanlah saudagar dalam arti yang sebenarnya. Mereka "berdagang" dalam bentuk *commenda*, yakni menyerahkan barang dagangan kepada orang lain untuk diperdagangkan, ataupun hanya memberi uang sebagai modal. Seperti tuan tanah yang "menyewakan" sawah-ladangnya kepada petani atas dasar bagi hasil, demikian pula para hartawan menyerahkan dagangannya (rempah-rempah, kain tenunan, dan sebagainya) kepada saudagar dengan perjanjian bagi-laba menurut ketentuan yang berlaku setempat (persentase laba yang dibagikan dapat berbeda). Juga dalam hal pelayaran, apabila pemilik kapal adalah raja atau para pembesar, sistem bagi-laba juga dipakai. Akan tetapi,

---

52 P.A. Tiele dan J.E. Heeres, *Bouwstoffen voor de Geschledenis der Nederlandrs in den Maleischen Archipel, Den Haag, Martinus Nijhoff*, 1890, II, hlm. 113

biasanya nakhoda juga memiliki sebagian kapal, bersama raja, bendahara, dan lain-lain, maka masing-masing menerima keuntungan sesuai dengan saham yang dimiliki, sedangkan nakhoda mendapat persentase khusus, menurut ketentuan yang berlaku.

Menurut peraturan yang berlaku di Sulawesi Selatan pada abad ke-17 seperti yang telah dikodifikasikan oleh Amanna Gappa dan disetujui oleh seluruh kepala orang Wajo pada waktu mereka mengadakan pertemuan di Makassar sudah tentu peraturan ini telah dikenal pada masa sebelumnya, tetapi baru pada zaman *Amanna Gappa* dirasakan kebutuhan untuk menerbitkannya dalam satu buku undang-undang, yang masih berlaku pada tahun 1930-an diadakan pembedaan dalam lima jenis cara berjualan.[53] Menurut Pasal 7:

> " .... berkongsi sama banyak ...." *Samatula*, "utang kembali" dan *kalula*. Yang dimaksudkan dengan "... berkongsi sama banyak ..." ialah cara berdagang dengan menanggung risiko sama-sama, memikul bersama keuntungan atau kerugian."

Akan tetapi, kerugian yang dipikul bersama hanya terbatas pada tiga hal, yaitu apabila barangnya rusak di lautan, dilalap api, atau kecurian, sedangkan yang tidak dipikul bersama (ditanggung oleh pelaksana perdagangan) diperinci sebagai berikut.

Pertama : dijudikan
Kedua : diperlacurkan
Ketiga : dipergunakan beristri
Keempat : diboroskan
Kelima : dipinjamkan
Keenam : dimadatkan
Ketujuh : diberikan untuk makan kepada (yang menjadi) tanggung-annya.

Jenis kontrak yang disebut *samatula* menetapkan bahwa dalam hal kerugian, maka yang punya barang jualan yang menanggungnya. Hanya kalau "bukan cara berjualan yang dilakukannya sehingga rusak, si pembawa jualanlah yang menanggungnya." Jadi, dalam hal ini risiko terbesar berada di pihak yang punya barang. Jika mendapat untung, dua per tiga dari laba jatuh ke tangannya, sedangkan sepertiga diberikan kepada si pembawa.

Kalau diadakan perjanjian "utang tanpa bunga", pihak yang memberi utang hanya menagih saja bilamana "telah sampai janjinya". Pada perjanjian yang disebut "utang kembali," maka lebih dahulu bersama-sama disepakati harga barangnya. Barang ini dapat dikembalikan apabila tidak laku atau telah berganti rupa. Jadi, utang baru dibayarkan jikalau barangnya laku atau telah berganti rupa. Perihal utang disamakan dengan perihal

---

53 Tobing, *op. cit.*, hlm. 52

berjual beli, yakni harus "bercermin pada adat", segala hal telah ditetapkan menurut peraturan-peraturan tertentu.

> " .... sesama penjual tidak tunggu-menunggu kekeliruan, misalnya (dalam hal) bayar-membayar. Jikalau setelah diterima, barulah diketahui tidak cukup pembayarannya, atau ada robek bagi barang yang berlembar, dicukupkannyalah yang tidak cukup, dan digantikannya yang robek. Sebab tidak boleh mengembalikan barang yang telah diputuskan harganya, kalau ternyata tidak ada sebabnya. Akan tetapi, tidak terlarang bersepakat dengan sesama pedagang (Pasal 9)."

Perjanjian jenis ke-5 yang disebut *kalula*, dinamakan pula *anak guru*. Dalam hal ini perdagangan diserahkan kepada seorang yang sudah dipercayai benar oleh si pemilik barang. *Kalula* tidak mungkin bercerai dari pemilik barang yang sudah dianggap sebagai atasannya. Hubungan antara kedua orang ini adalah hubungan khusus sehingga dalam cara membuat perjanjian ini "dia dan keluarganya tidak menanggung kerusakan jualan, akan tetapi hanya menunggu belas kasihan semata-mata." Jika rusak karena kesalahan sendiri, *kalula* sendiri yang harus menanggung utang," .... tidak sampai kepada keluarganya ...." (Pasal 18). Oleh sebab itu, yang dijadikan *kalula* hanyalah orang yang merdeka, bukan dari golongan budak. Yang disebut *anak guru* adalah orang yang diikutsertakan dalam suatu perjanjian dan yang bertugas sebagai pesuruh.

Mengenai bayar-membayar utang piutang termasuk membayar laba, dalam Pasal 17 ditegaskan bahwa jika dipinjam dalam bentuk uang, uang juga harus dibayarkan. Jika yang dipinjamkan barang jualan, haruslah dibayar dalam bentuk barang jualan pula.

> "Jikalau uang yang dipinjam (dan) jualan yang dibayarkan, maka itu atas putusan orang penengah yang menaksir harga barang itu. Jikalau jualan yang dipinjam (dan) uang yang dibayarkan, maka itu tergantung pada persetujuan mereka."

Dalam hal berlainan jenis jualan yang dipinjamkan dan yang diterima kembali, hendaknya diselesaikan menurut persepakatan. Penyelesaian demikian dikiaskan sebagai seorang anak yang diberi berbaju sempit akan tetapi tidak sampai robek.[54]

> Amanna Gappa tidak lupa berpesan agar: "Jangan mengambil utang bagi-laba pada orang yang lebih berpengaruh daripada engkau dan juga jangan beri dia berutang bagi-laba. Adapun keburukannya sering dia tidak mau mengikuti peraturan bea perdagangan. Jika berikan utang bagi-laba, sesuaikanlah dengan harga miliknya beserta (harta) keluarganya dan (harta) golongan keluarganya yang dekat."

Disarankannya pula bahwa apabila pihak yang meminjamkan barang itu berkeras kepala menuntut bayaran, hendaklah ditaati peraturan yang sudah ditetapkan itu.

---

54 *Ibid.*, hlm. 60

"Jikalau yang berutang membayar dan masih belum mencukupi pembayarannya, maka ditaksirkan harga segala barang miliknya sendiri. Jikalau telah habis harga miliknya dibayarkan dan masih belum mencukupi pembayarannya, maka lunaslah utangnya. Tidak boleh lagi dibayarkan atau ditagih, meskipun ada rezeki dikaruniakan oleh Allah Ta'ala sesudah dibayarkan harta miliknya.
Tidak boleh (pula) ditagih lagi, oleh karena dia sebagai orang yang merdeka seperti kita, tidak boleh keluar dari lingkungannya."

Kalimat terakhir ini berarti bahwa orang yang menurut adat telah dianggap melunasi utangnya (meskipun masih kurang daripada utang sebenarnya), tidak boleh ia "dikeluarkan dari kandang kerbau".[55] Dengan kata lain ia sebagai seorang merdeka tidak boleh dipaksakan mencari uang di luar lingkungannya dengan jalan memperhambakan dirinya, lagi pula ia tidak boleh dijual sebagai budak dan dibawa ke luar Sulawesi. Diharapkan bahwa di kemudian hari ia akan mendapat rezeki lagi, oleh sebab itu dianjurkan untuk memberikannya lagi.

" .... dagangan untuk dijadikan mata pencahariannya. Mudah-mudahan kamu sama bertuah dan terkabul doamu sama-sama, dikasihani dan dikaruniai rezeki oleh Allah Ta'ala sehingga ada dibayarkannya kepadamu untuk melunaskan segala utangnya ...."

2. Pelaksana Pelayaran dan Perdagangan

Pada tahun 1527 Banten menduduki Sunda Kalapa, kota pelabuhan terpenting dari kerajaan Pajajaran. Nama Jayakarta yang diberikan kepada Sunda Kalapa setelah penaklukan itu, mengandung arti yang besar bagi Banten. Sebagai pelabuhan, kerajaan Sunda yang pada waktu itu beragama Hindu, dengan kemenangan Banten terhadap Sunda Kalapa sekaligus mengubahnya dari *darulharb* menjadi Darul Islam.

Di samping faktor agama, kemenangan Banten harus dilihat dari segi ekonomi. Banten pada waktu itu telah berkembang sebagai pelabuhan yang ramai, terutama setelah Malaka diduduki Portugis, akan tetapi masih kalah jika dibandingkan dengan keramaian pelabuhan Sunda Kalapa. Dengan kemenangan ini tidak ada yang menghalangi Banten dalam pertumbuhannya, dan pada akhir abad ke-16 kedudukannya sebagai bandar terbesar di sebelah barat Pulau Jawa dan sekitarnya sudah tidak ada tandingannya.

Perubahan agama, politik, dan ekonomi pada waktu itu (bagi beberapa daerah islamisasi telah berlangsung lebih dahulu, bagi daerah lainnya seperti Makassar baru pada masa kemudian) mengakibatkan pula perubahan-perubahan besar di bidang sosial. Pergeseran golongan atasan yang berkuasa yang didampingi kelompok masyarakat yang menunjangnya sudah tentu membawa perubahan-perubahan dalam kedudukan dan rezeki individu

55 *Ibid.*, hlm. 125, catatan 47 dan 48

dan keluarga dari kelompok yang bersangkutan. Bagaimana nasib individu-individu yang disingkirkan, sumber-sumber sejarah kita tidak menyebutkannya. Tidak ada pula keterangan apakah elite lama yang kehilangan posisinya (yang sering berarti pula kehilangan sumber penghasilannya) dalam pemerintahan setempat mencari bidang lain, umpama bidang perdagangan, seperti yang diuraikan oleh Clifford Geertz dalam hal aristokrasi Tabanan dalam masa pancaroba dalam tahun 1950-an. Dalam cerita-cerita kuno ada kisah tentang pangeran yang harus hidup sebagai petani akibat kalah perang (tetapi akhirnya ia berhasil mendapat kedudukannya kembali), maka tidaklah mustahil apabila dalam abad ke-16 seorang *prince* terpaksa mengembara sebagai *peddler* akibat pergolakan politik pada waktu itu.

Pada eselon bawah pun islamisasi membawa pengaruh sosial. Agama yang egaliter berhadapan dengan agama yang mengenal sistem kasta lambat laun mengubah susunan masyarakat yang ada. Akan tetapi, di sini pun sumber-sumber tidak memberi keterangan banyak. Misalnya, apakah kaum pedagang yang dahulu masuk kasta waisya masih tetap meneruskan pekerjaannya, ataukah mereka terdesak oleh golongan lain? Tomé Pires, yang menulis kira-kira 15 tahun sebelum Sunda Kalapa menjadi Jayakarta, memberitakan hanya sejumlah kecil saudagar yang beragama Islam diperbolehkan masuk kerajaan Sunda karena pemerintah takut akan terjadi perebutan kekuasaan di sini. Akan tetapi, Pires juga mencatat bahwa pada waktu itu sudah banyak pedagang muslim yang berdiam di daerah perbatasan. Untuk itu, kita boleh menarik kesimpulan bahwa pada waktu pendudukan Sunda Kalapa, pedagang-pedagang tersebut bebas masuk ke kota untuk berdagang sehingga tidak mustahil apabila ada pedagang setempat yang harus gulung tikar karena tidak sanggup menyaingi pendatang baru yang mungkin mendapat perlindungan penguasa baru dan yang barangkali mempunyai koneksi dagang penting di ibu kota Banten.[56]

Dalam hal perdagangan maritim tidak ada diferensiasi tegas antara pelaksana perdagangan dan orang yang melaksanakan pelayaran, sebagaimana juga tidak ada pembedaan jelas antara pemilik kapal, nakhoda, dan pedagang. Adakalanya ketiga-tiganya berada dalam satu individu, adakalanya kapal dimiliki bersama oleh pedagang dan nakhoda. Kata "juragan" dapat berarti pemilik maupun pemimpin kapal. Dapat juga pemilik kapal memberikan kapal beserta barang jualannya kepada nakhoda untuk dijalankan atas dasar bagi-laba. Nakhoda tidak menerima gaji dari pemilik kapal, akan tetapi ia mendapat sebagian dari labanya. Begitu pula

56 Cortesao, *op. cit.*, I, hlm. 173, juga dalam Meilink-Roelofsz, *op. cit.*, hlm. 113, 115. Karya tentang usahawan Tabanan (Bali) yang disebut di atas adalah C. Geertz, *Peddlers and Princes: Social Change and Economic Modernization in two Indonesian towns*, Chicago, University of Chicago Press, hlm. 1968

awak kapal lainnya tidak digaji. Semuanya menerima bagian tertentu dari hasil penjualan.

Besar kecilnya jumlah awak kapal tergantung pada besar kecilnya kapal. Untuk sebuah *padewakang* jumlahnya biasanya antara 10 sampai 20 orang. Pemimpinnya disebut nakhoda (*anak-koda* dalam bahasa Makassar dan Bugis) yang mengepalai semua urusan yang berhubungan dengan kapal dan muatan. Ia harus membuat catatan-catatan tentang barang yang dibeli atau yang diperdagangkannya, tentang uang masuk dan uang keluar. Di perahu yang mengadakan perjalanan yang jauh-jauh biasanya ada dua nakhoda, yakni nakhoda laut yang hanya bertugas untuk soal berlayar, dan nakhoda darat yang harus mengurus muatan, mencatat segala pengeluaran dan hasil penjualan, serta lain-lain perkara yang harus dilakukan selama berada di darat.[57]

Juru mudi bertanggung jawab atas kemudi. Tempatnya berada di belakang *juru batu* (kadang-kadang ada dua orang) dan bertanggung jawab atas jangkar dan menjaga jangan sampai kapal menumbuk karang atau menyentuh gosong. Sebab itu tempatnya di haluan. *Mualim* adalah pandu perahu yang membawa kapal. Dalam kapal yang berukuran besar ia dibantu oleh seorang *mualim kecil*, yang bertugas mengurus layar dan tali-temali kapal, ialah yang harus mengetahui tentang arah angin, sebab itu ia dikenal pula sebagai *mualim angin*.

Petugas-petugas tersebut di atas digolongkan sebagai "perwira" kapal. Di bawahnya lagi terdapat para *tukang* yang dapat kita samakan dengan "bintara" kapal. Para tukang dikepalai oleh *tukang agung* yang dibantu oleh *tukang kiri* (untuk bagian lambung kiri), *tukang kanan* (untuk lambung kanan, *tukang petak* (yang harus mengurus soal-soal mengenai ruang kapal, petak-petak tempat barang), dan tukang tengah (kerja di tengah kapal). Di samping itu, ada *tukang gantung layar*, tetapi yang belakangan ini berada langsung di bawah *mualim angin*.

Golongan paling bawah adalah *awak kapal* (dalam arti kata sempit) atau *anak kapal*, dikepalai oleh seorang "mandor" yang disebut *serang*. Awak kapal ini terdiri dari *orang banyak* (orang merdeka), orang abdi (budak), dan orang berutang yang selama utang belum dilunasi berstatus sebagai "budak". Ada pula yang disebut *orang turun penukan*, yakni orang berutang yang dipekerjakan oleh *nakhoda* tetapi masih mempunyai wewenang tertentu di kapal.

Kemudian ada pula *muda-muda*, "kadet" kapal yang ikut berlayar untuk mencari pengalaman. Tugas mereka ialah mendampingi nakhoda jika ia turun ke darat, mengawasi orang abdi, dan selama berlayar mereka melayani orang

---

57 Rinkes, *op. cit.*, hlm. 37

jaga dan orang yang bekerja di anjungan. Ada pula para *kiwi*, yakni pedagang yang tidak membantu dalam pelayaran, tetapi hanya ikut untuk kepentingan dagang (pemimpinnya disebut *maula kiwi*); ada *orang tumpang* atau orang penumpang yang berlayar dari satu tempat ke tempat lain dengan membayar uang tambang, dan ada pula *orang senawi*, yakni penumpang yang tidak membayar uang tambang, tetapi membantu di kapal sebagai gantinya.

Menurut hukum laut Melayu,[58] nakhoda berkuasa penuh jika sedang berlayar.

> " .... karena segala nakhoda itu ganti raja di dalam laut. Maka ia menjadi raja di dalam laut jikalau anak-anak sekalipun tahulah pada masa itu. Maka dapat ia menghukumkan itu supaya sudah hukumannya pada barang sesuatu pekerjaan kita, Insya Allah Ta'ala ...."

Jadi, meskipun ada awak kapal yang usia lebih tua daripada nakhoda, nakhoda berhak menghukumnya kalau dianggap perlu. Kalau nakhoda disamakan dengan raja, juru mudi diumpamakan sebagai bendahara, juru batu sebagai temenggung.

> " ... yang memelihara baik dan jahat, menentukan salah dan benar di dalam jung jikalau di dalam baik sekalipun demikian juga ...."

Para tukang disamakan dengan "*yekh*". Yang paling cakap di antara tukang-tukang boleh menggantikan juru batu atau juru mudi secara bergilir.[59]

Untuk menjadi nakhoda diperlukan pengalaman berlayar dan kebijaksanaan untuk memimpin masyarakat kapal dengan baik. *Kodex Amanna Gappa* (Pasal 6) menyebut 15 syarat yang harus dipenuhi seorang nakhoda.[60] Syarat *pertama* mengatakan "bila ada senjata berat dan ringan dengan makanannya (= pelurunya), dengan kata lain, ia harus mampu mempersenjatai perahunya. *Kedua*, bila perahunya kuat, jadi ia harus tahu akan kualitas dan kapasitas perahunya. *Ketiga*, bila ada modalnya (untuk berdagang). *Keempat*, bila rajin dan teliti dalam pelayaran. Syarat *kelima* adalah bahwa ia dapat mengawasi kelasinya. Yang *keenam*, ia dapat membela kelasinya di dalam kebenaran. *Ketujuh*, bila ia sudi menerima nasihat-nasihat orang lain. *Kedelapan*, bila ia jujur terhadap kelasinya dan juga kepada orang lain dan terhadap Tuhan. Sebagai syarat *kesembilan* dikatakan bahwa ia harus mau memandang kelasinya sebagai anak sendiri. *Kesepuluh*, ia tidak jemu-jemu memberi pelajaran mengenai alat-alat pelayaran. *Kesebelas*, ia harus penuh dengan kesabaran. *Kedua belas*, ia harus disegani. Syarat *ketiga belas* mengatakan bahwa ia harus mau bersusah

---

58 J.M. Pardessus, *Collection de lois maritimes anterieures au XVIlle siecle*, Paris Impri royale, VI, 1844, hlm. 391–392. Tentang pembagian kerja di kapal, lihat hlm. 381–382

59 Rinkes, *op. cit.*, hlm. 37

60 Tobing, *op. cit.*, hlm. 51

payah mengurus dagangan kelasinya, dan yang *keempat belas* ia harus mau mengongkosi perahunya. Syarat yang *kelima belas* mengatakan:

> " .... bila dia mengetahui benar-benar jalan (pelayaran). Jikalau dia tidak mengetahui jalan (pelayaran), dicarinya seorang petunjuk jalan yang mengetahui benar-benar jalan (pelayaran) itu. Diupahkannyalah dia (= si penunjuk jalan), atau menolongkah dia dengan percuma, tergantung dari persetujuan mereka sukai, itulah yang menjadikan (supaya terlaksana)."

Di sini jelas bahwa kelasi boleh berdagang (syarat ke-13; nakhoda harus memerhatikan pula dagangan kelasinya). Dalam pengertian pelayaran Bugis dan Makassar pada kelasi, atau dalam bahasa asli *senawi*, boleh berdagang sendiri di samping bekerja sebagai pelaut. Hukum laut Ammna Gappa menyebut empat macam orang kapal: *sawi puli* (kelasi tetap), *sawi loga* (kelasi bebas), *sawi manumpang* (kelasi penumpang), dan *tomanumpang* (orang yang menumpang).[61]

Kelompok pertama yang disebut "kelasi tetap" merupakan awak kapal sebenarnya. Mereka dilarang meninggalkan perahu selama perjalanan. Jika perahu selamat kembali ke tempat aslinya, barulah mereka dibebaskan dari kewajiban ini. Selama berlayar mereka harus mengurus dan memperbaiki kerusakan-kerusakan pada perahu, lagi pula ada kewajiban "timba ruang" yakni menimba air laut dari ruang perahu. Seandainya mereka turun ke darat (melanggar peraturan), mereka harus membayar "wang turun" 5 rial ditambah uang sewa penuh untuk barang dagangannya yang semuanya harus segera diturunkan dari perahu.

"Kelasi bebas" dibebaskan dari kewajiban timba ruang dan tidak perlu membetulkan kerusakan perahu. Ia bebas pula meninggalkan perahu selama perjalanan tanpa membayar "uang turun" dan tidak pula membayar sewa penuh untuk barang-barangnya. Demikian pula yang disebut "kelasi penumpang". Kalau berlayar sebagai *tomangnumpang*, ia tidak berhak menempatkan barang-barangnya di dalam ruang, ia tidak boleh mengambil "petak". Semua barangnya diletakkan di bagian atas saja.

Kalau ada bahaya (angin ribut dan sebagainya), barang-barang diperiksa. Kalau ternyata penumpang membawa lebih dari yang diberitahukan, yang lebih itu harus dibuang ke laut. Bilamana perahu masih sarat, segala barang yang di atas itu (yang tidak terdapat dalam petak) dibuang pula. Berikutnya adalah giliran barang kepunyaan kelasi penumpang (dalam petak) yang harus dibuang jika masih sarat. Kemudian untuk menyelamatkan perahu lagi barang kelasi bebas yang harus dibuang ke laut. Demikian seterusnya, urutan giliran hierarki yang berlaku, sampai

---

61 *Ibid.*, hlm. 48–49

pada kelasi tetap, dan jika diperlukan akhirnya barang kepunyaan nakhoda pun harus dibuang ke laut.

Nahkoda wajib mencarikan perahu pengganti jika ia tidak dapat memberikan petak di dalam perahunya, padahal ia telah berjanji untuk mengangkutnya. Syarat bagi perahu pengganti ini berat juga, karena harus mencari perahu yang sama, artinya sama jenisnya dan sama suasananya, serta sama sifat kelakuhan nakhodanya (Pasal 4). Seperti dalam hukum laut Melayu, hukum Amanna Gappa menentukan bahwa nakhoda jika perlu harus bertindak sebagai hakim. Kalau ada perselisihan sesama kelasi, ia harus menjadi penengahnya tanpa dibawa ke pengadilan (Pasal 2). Jikalau pertengkaran terjadi selama berlayar, harus diselesaikan lebih dahulu sebelum turun ke darat " ...." Di mana saja api jadi, di situ juga padam ...." Kesukaran yang terjadi di luar (selama berlayar) tidak boleh dibawa kepada penguasa negeri (Pasal 11).

Kalau yang punya perahu tidak ikut berlayar dan hanya mengharapkan sewa perahu, penghasilan dari sewa perahu dibagi dua: separuh adalah untuk yang empunya perahu, separuh lagi untuk nakhoda bersama juru mudi. Apabila demikian, sewa perahu dibagi dua bagian untuk yang empunya perahu, satu bagian untuk nakhoda bersama juru mudi dan juru batu. Ditetapkan pula bahwa kalau nakhoda salah menentukan sewa perahu untuk muatannya, kesalahan itu tidak boleh dipikulkan kepada kelasi (Pasal 2).

Pengambilan tempat (*petak*) untuk muatan juga mempunyai peraturan tertentu dalam hukum laut Melayu. Dalam hal ini nakhoda dan pemilik kapal mendapat prioritas. Berikut adalah para kiwi yang boleh mengambil petak, tetapi tidak boleh melebihi 7 atau 8 petak. Ada tiga macam cara orang *kiwi* mengambil *petak*:

1) membeli hak untuk mengisi sebagian dari ruang kapal,
2) menambah modal nakhoda dengan memberi sejumlah uang sehingga hak untuk mengambil petak ini disesuaikan dengan besar kecilnya jumlahnya, dan
3) dengan mengambil 7 atau 8 petak sebagai bagiannya.

Bagi 4 *petak* mereka tidak usah membayar, asal mereka membayar "pajak" sebesar 3¼% jika perjalanannya berhasil. Luas *petak* antara satu perahu dengan perahu yang lain berbeda-beda. Selain itu, *kiwi* harus membantu dalam mengusahakan perlengkapan perahu.

Mualim berhak mengambil $^1/_2$ petak, tetapi ia boleh juga memberi uang kepada nakhoda sebagai penambah modal berdagang. Kalau mualim meninggalkan perahu sebelum perjanjian ditepati, ia harus membayar kompensasi sedangkan nakhoda tidak perlu memberikan bagian hasil yang diperoleh dari modal yang ditambah mualim.

Dalam hukum laut Melayu awak kapal lainnya tidak berhak mengambil petak, tetapi mereka berhak menerima sebagian dari muatan: untuk orang banyak dua bagian, untuk "orang abdi" satu bagian.

Hukum laut Melayu mengatur pula urutan perdagangan. Kalau tiba di pelabuhan, nakhoda mendapat prioritas untuk berdagang (menjual barang miliknya) selama empat hari berikut giliran para kiwi yang diberi kesempatan berjual beli selama dua hari, kemudian baru awak kapal diperbolehkan berdagang. Harga yang diminta tidak boleh melebihi harga yang diminta nakhoda, dan jika jual beli dilakukan tanpa sepengetahuannya, ia berhak menyita barang bersangkutan dengan membayar harga penjualannya. Hal ini terutama berlaku dalam hal perdagangan budak dan barang-barang mewah. Kalau budaknya perempuan, sang nakhoda tidak usah membayarnya tetapi ia boleh mengambilnya begitu saja.[62]

3. Jenis Barang Ekspor dan Impor

Jarak yang harus ditempuh perahu dan kapal sering sangat jauh dan memakan waktu pula. Kapal harus menunggu angin yang baik untuk perjalanan pulang, berarti harus menunggu sampai angin berbalik arah, dengan kata lain harus menunggu berbulan-bulan lamanya. Jika transaksi niaga terlambat dijalankan sehingga tidak sempat menggunakan angin musim tahun itu, terpaksa kapal menunggu sampai tahun berikutnya. Banyak risiko yang dihadapi pedagang yang berlayar. Angin ribut, bajak laut, dan segala macam rintangan harus diatasi sebelum berhasil mendapat keuntungan yang lumayan. Petak-petak yang terbatas tidak memungkinkan pedagang membawa muatan dalam jumlah banyak. Oleh sebab itu, barang yang diperjualbelikan lebih banyak berupa barang yang tidak memakan tempat tetapi berharga tinggi. Demikianlah disimpulkan van Leur dalam karyanya yang terkenal tentang pola perdagangan Asia di masa lampau.[63]

Akan tetapi, penelitian Meilink–Roelofsz menunjukkan bahwa pada waktu itu barang-barang dagangan dalam jumlah banyak pun telah diangkut dalam perjalanan yang jauh, meskipun diakui bahwa semakin jauh perjalanannya semakin mewah jenis barang yang dibawa. Dalam *lontara* perundang-undangan Amanna Gappa disebutkan bahwa jenis dagangan yang membutuhkan ruangan luas, adalah beras, garam, kapas, rotan, tembakau *bakala* (untuk dipakai makan sirih), gambir, agar-agar, dan kayu. Untuk barang demikian dikenakan bayaran *sima biring*, yakni 1/11

---

62 Pardesus, *op. cit.*, VI, 420; juga dalam Meilink-Roelofsz, *op. cit.*, hlm. 46
63 van Leur, *op. cit.*, hlm. 67

bagian dari jumlah modal. Barang yang tidak mengambil ruangan besar tetapi berharga mahal, seperti mata uang, emas, batu permata, kain sutra, dan kemenyan, bayarannya seperdua dari sewa *balu reppi* (Pasal 1).

Dalam halaman-halaman ini tidak akan disebut secara terperinci barang-barang dagangan yang diangkut dari bandar ke bandar di Nusantara pada waktu itu. Hal demikian akan mengambil tempat yang lebih banyak dan memerlukan penelitian sumber yang lebih lama. Di sini hanya akan dipilih beberapa pelabuhan berdasarkan data-data yang diambil dari hasil karya penelitian sarjana-sarjana lain untuk mendapat gambaran tentang jenis dagangan yang berpindah-pindah tangan dalam lalu lintas perdagangan zaman bahari.

Pada awal abad ke-16 Banda mengimpor kain dan tenunan halus dari negeri-negeri Asia di sebelah barat, yang dibawa oleh kapal-kapal Portugis menurut catatan Pires. Pedagang-pedagang kecil dari Pulau Jawa dan Melayu membawa tenunan kasar, katanya. Akan tetapi, raja Gresik sering juga memborong kain-kain halus dan sutra yang dimasukkan ke bandarnya dengan maksud untuk mengekspornya lagi ke Banda dan tempat lain di Maluku. Di sini kain halus tersebut tidak hanya diperlukan sebagai pakaian raja dan keluarganya serta kaum bangsawan lainnya, tetapi disimpan sebagai harga bersama barang lain, seperti gong tembaga, gading, dan tembikar halus. Tenunan kasar sangat laku di Banda karena dapat ditukar kepada pedagang-pedagang yang datang dari daerah sekitarnya, misalnya orang Halmahera dan Irian/Papua yang membawa sagu dan rempah-rempah. Sagu yang juga diimpor dari pulau-pulau Kei dan Aru, tidak hanya dimakan oleh orang Maluku, tetapi sangat penting untuk dibawa sebagai bekal dalam perjalanan laut yang jauh karena dapat disimpan untuk waktu yang lama. Pada zaman Pires, sagu dianggap sangat penting sehingga dipakai sebagai alat bayar (sumber dari 1603 menyebut lada sebagai standar memedium untuk jual beli).[64]

Telah disebutkan dalam bagian-bagian sebelumnya, perahu-perahu buatan Kei juga diperdagangkan di Banda. Juga barang-barang mewah didatangkan dari daerah sekitarnya, seperti emas dari Sulawesi Utara dan burung cenderawasih dari Irian/Papua. Namun, yang terpenting adalah perdagangan rempah-rempah, khususnya pala dan cengkih, yang didatangkan dari pulau-pulau di sebelah utara, cengkih dari Maluku Utara, sedangkan pala dari Ambon, Seram, dan pulau-pulau sekelilingnya. Pala ditanam pula di kepulauan Banda sendiri. Berhubung harga yang diperoleh dari tanaman pala tinggi, petani lebih memusatkan perhatiannya kepada tanaman ekspor ini sehingga beras dan bahan makanan lainnya harus didatangkan dari luar.

64 Meilink–Roelofsz, *op. cit.*, hlm. 95–96

Angka-angka yang diberi Pires mengenai hasil pala sangat tinggi. Untuk bunga pala hasilnya mencapai angka 500 bahar, sedangkan untuk pala 6.000 sampai 7.000 bahar. Meilink-Roelofsz berpendapat angka setinggi itu hanya dapat dicapai Banda pada masa panen besar yang terjadi sekali dalam tujuh tahun. Demikian pula angka yang diberikan Reyer Cornelisz, seorang pelaut Belanda, yakni 6.000 bahar pala, hanya berlaku pada musim panen besar.[65]

Sumber-sumber lain juga memberikan perbandingan harga untuk rempah-rempah ini. Pada tahun-tahun permulaan abad ke-16 bahar bunga pala sama harganya dengan tujuh bahar pala. Akan tetapi, tahun 1603 perbandingannya menjadi 1:10. Harga cengkih pun jatuh dibandingkan dengan bunga pala. Kalau pada awal abad ke-16 nilainya 1:1, pada tahun 1603 dilaporkan bahwa 7 satuan bunga pala sama dengan 10 satuan cengkih. Menurut Pires, 1 bahar bunga pala berharga 3 dan 3,5 *cruzado*, tetapi pada waktu itu harganya naik berhubung adanya persaingan antara orang Portugis dan orang Asia. Namun, kita melihat bahwa harga buah pala semakin turun jika dibandingkan dengan bunganya. Seorang Portugis yang sezaman dengan Pires, Duarte Barbosa, menulis bahwa orang Banda lebih suka membuang palanya daripada menjualnya dengan harga rendah. Mereka pernah membakar pala untuk mempertahankan nilai yang lebih dari yang ditetapkan. (Pegawai Kompeni Belanda pada abad-abad kemudian sengaja mengadakan ekspedisi-ekstirpasi pohon rempah-rempah supaya tidak lolos dari pengawasannya dan dijual keluar sehingga dapat menurunkan harga).[66]

Orang Banda pernah mengadakan perjalanan jauh untuk berdagang. Jadi, dahulu mereka tidak menunggu saja kedatangan pedagang dari luar yang membawa dagangannya dan mengambil rempah-rempah dan hasil-hasil lain dari daerah ini. Di Malaka ada syahbandar yang khusus mengurus kepentingan orang-orang Jawa, Maluku, Banda, Palembang, Kalimantan, dan Filipina. Namun, laporang-laporan tentang pelayaran orang Banda kurang baik. Dikatakan bahwa sauh kapalnya hanya dibuat dari kayu dan sebagian besar dari awak kapal terdiri dari budak-budak. Apabila ada bahaya sedikit, awak kapalnya segera melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Dengan demikian, pelayaran orang Banda tidak dapat dibandingkan dengan pelayaran orang-orang dari luar Banda.[67]

Berlayar lebih ke utara kapal tiba di Ternate dan Tidore, tempat penghasil cengkih. Di pelabuhan Ternate, kata Pires, hanya dua atau tiga

---

65 *Ibid.*, hlm. 94
66 Terkenal sebagai ekspedisi *hongi*, yang dihapuskan pada tahun 1824 oleh van der Capellen
67 Meilink-Roelofsz, *op. cit.*, hlm. 96, 352 catatan 60

kapal yang dapat berlabuh sekaligus, sedangkan pelabuhan Tidore penuh karang sehingga menyulitkan kapal yang berukuran besar untuk merapat. Akan tetapi, karena cengkih hanya terdapat di Maluku Utara (baru pada akhir abad ke-18 pohon cengkih diselundupkan keluar dan ditanam di Afrika Timur, dan baru pada pertengahan abad ke-19 Belanda menghapuskan monopoli rempah-rempah Maluku dan mengizinkan penanamannya di luar Maluku), memaksa kapal-kapal untuk mengunjungi daerah ini. Seperti diketahui, *kora-kora* Ternate dan Tidore khusus dipakai untuk berperang dan urusan pemerintahan, bukan untuk mengangkut barang.

Juga di Maluku Utara penanaman rempah-rempah lebih dipentingkan sehingga bahan makanan harus didatangkan dari luar, misalnya beras dari Sulawesi. Pedagang Cina yang sudah mengenal Maluku sejak dahulu datang membawa tenunan, perak, gading, manik-manik, dan piring mangkuk buatan Cina yang biasanya berwarna biru.

Di Kalimantan pelabuhan yang paling terkenal pada waktu itu ialah Brunei (seluruh pulau dikenal pula dengan nama ini dan menjadi *Borneo* menurut ucapan dan ejaan Portugis). Di sebelah tenggara kota-kota yang terkenal adalah Lawe dan Tanjungpura, sebelum Banjarmasin muncul sebagai pusat kerajaan yang besar. Hubungan dagang diadakan terutama dengan kota-kota di pantai utara Jawa. Emas, intan, bahan makanan, dan hasil hutan seperti damar dan kayu-kayuan diekspor dari Lawe dan Tanjungpura. Juga perahu buatan Kalimantan laku di Pulau Jawa. Sering orang Kalimantan menjual perahu bersama muatannya sekaligus setibanya di Jawa. Begitu penting kota-kota di Kalimantan ini bagi pesisir utara Jawa sehingga beberapa kali dikirim ekspedisi untuk mendudukinya pada abad ke-16 dan awal abad ke-17. Sumber-sumber dari masa kemudian lebih banyak menyebut hubungan dengan Sambas, Banjarmasin, dan Sukadana, suatu petunjuk bahwa Lawe dan Tanjungpura telah menjadi kurang penting.[68]

Bagi bagian barat Indonesia bahan ekspor yang terpenting adalah lada. Kapal-kapal asing mengunjungi Pasai, Pidie, Jambi, Palembang, Lampung (Tulang Bawang dan Sekampung), kota-kota pantai barat Sumatra, seperti Pariaman, Tiku, Barus, dan di Jawa Barat, Banten, dan Sunda Kalapa. Menurut perkiraan Tomé Pires, Pasai menghasilkan 8.000 sampai 10.000 bahar setahun, malahan kalau sedang panen besar dapat sampai 15.000 bahar. Angka-angka yang tinggi diberikan pula oleh Empoli yang mencatat bahwa pada waktu itu (awal abad 16) 60.000 *cantaar* diekspor dari sini.[69]

---

68 *Ibid.*, hlm. 101–102
69 *Ibid.*, hlm. 89, 91

Bangka disebut sebagai pengekspor bahan makanan, hasil hutan, katun, dan besi, tetapi mengenai timah belum disinggung pada zaman Pires. Di pantai barat Sumatra bahan ekspor kecuali lada adalah emas, kelambak, kapur barus, kemenyan, sutra, damar, madu, dan bahan makanan. Ekspor ini ditujukan ke Malaka, tetapi kapal-kapal Gujarat juga datang ke sini untuk membawanya langsung ke negerinya.

"Barang" dagangan yang penting dan diekspor pada zaman ini adalah budak belian. Mereka diperlukan di istana raja dan rumah bangsawan dan hartawan dan juga dipekerjakan sebagai buruh kasar di pelabuhan dan sebagai pendayung kapal, terutama kapal perang. Orang dapat menjadi budak sebagai akibat kekalahan dalam perang, tetapi juga sebagai tebusan utang yang tidak dapat dibayar. Dalam hal ini adat biasanya mengatur bahwa kedudukan sebagai budak hanya bersifat sementara sampai utangnya dilunasi. Ada pula yang jatuh menjadi budak karena tindakan melanggar adat. Akan tetapi, biasanya budak-budak diperoleh dengan mengadakan ekspedisi khusus ke daerah "luar." Menurut hukum Amanna Gappa (Pasal 14), jika orang yang berutang telah habis hartanya karena dijadikan pembayar utang padahal jumlah ini belum lagi cukup untuk melunasinya, ia memperhambakan dirinya untuk menutup kekurangannya. Hal ini dinamakan *riekke ponna*, yaitu "pohon dicabut beserta akarnya ...." Dengan demikian, utangnya sudah lunas dan tidak boleh dituntut lagi sekalipun ia akan mendapat rezeki di kemudian hari.

Budak-budak yang diekspor dari Palembang ke Malaka (di samping beras, bawang putih dan bawang merah, daging, arak, hasil hutan seperti rotan, madu, damar, katun, dan sedikit emas dan besi) banyak berasal dari daerah pedalaman. Dikatakan pula bahwa setiap tahun dua atau tiga jung yang berangkat dari Malaka ke pelabuhan Sunda Kalapa untuk membeli budak, beras, dan lada. Budak di sini (Kalapa) ada yang dari pedalaman dan ada yang diambil dari pulau-pulau Maladiwa. Jadi, Kalapa mengimpor dan mengekspor budak. Di Jawa Timur kerajaan Balambangan terkenal pula sebagai penghasil budak, laki-laki maupun perempuan. Perdagangan budak terdapat pula di Madura yang mendatangkannya dari Nusa Tenggara ke Malaka (di samping kayu cendana, kayu merah, dan belerang). Kuda diekspor oleh Sumbawa dari Timor. Pedagang-pedagang datang ke Nusa Tenggara dari Jawa dan Malaka membawa kain, pisau, pedang, tembikar Cina, timah dan timah hitam, air raksa, dan manik-manik berwarna. Budak-budak yang dijual oleh kapal-kapal Bugis dan Makassar berasal dari pembajakan di laut maupun di daerah pedalaman (Toraja).[70] Orang Portugis pun ikut serta dalam perdagangan budak di sini. Ada berita tentang ekspor budak dari

---

70 *Ibid.*, hlm. 86–87, 103, 110. Lihat "slavernij" dalam *Encyclopaedia van Nederlandsch-Indie*

Panarukan ke Malaka yang pada waktu itu dikuasai Portugis. Pernah kapal Belanda menangkap *jung* Portugis yang berlayar dari Makassar dengan membawa 150 bahar pala, bunga pala, dan cengkih, beserta sejumlah budak laki-laki dan perempuan. Nakhodanya seorang Portugis dan seorang Melayu yang berdiam di Makassar. Perdagangan Portugis antara Malaka dan Gresik (sebelum dikuasai Belanda) dilakukan dengan kapal-kapal yang menggunakan tenaga budak.[71]

Kompeni Belanda juga memerlukan tenaga budak dalam usahanya, misalnya untuk perkebunan pala di Banda yang dikuasai VOC sejak tahun 1621. Budak-budak ini didatangkan dari seluruh tempat di mana VOC mempunyai perwakilannya, dan orang-orang ini kemudian menjadi penduduk ... "asli" Banda. Seperti diketahui, penduduk asli yang sebenarnya sudah diangkut ke Batavia sebagai budak, dan yang dapat lolos melarikan diri ke pulau-pulau sekitarnya di antaranya ada yang mendirikan kampung-kampung Banda di kepulauan Kei.

4. Tempat Penghasil Barang Perdagangan

Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung mengenai tempat-tempat di Indonesia yang menghasilkan barang ekspor untuk perdagangan internasional maupun lokal. Perdagangan internasional pada waktu itu terutama berkisar pada perdagangan rempah-rempah. Jalan pelayaran yang "gemuk" dalam jaringan hubungan maritim Nusantara pada masa itu jelas memperlihatkan sebuah garis yang menghubungkan daerah-daerah penghasil rempah-lada di Sumatra dan Jawa, pala di Maluku Tengah, dan cengkih di Maluku Utara. Pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa mengumpulkan beras dari pedalaman, sehingga merupakan tempat singgah yang penting bukan hanya untuk mencukupi bekal pelayaran melainkan untuk dibawa ke daerah rempah-rempah yang kekurangan beras karena tenaga dan ladang setempat dipakai untuk menanam rempah-rempah itu.

Bahan ekspor lain yang penting adalah kayu-kayuan dan hasil hutan, seperti damar, madu, dan sebagainya. Kayu cendana dari Nusa Tenggara, kayu gaharu dan kelembak dari Sumatra dan Kalimantan, kayu besi dan kayu hitam dari Sulawesi dan Maluku, dan kayu jati dari Jawa. Di samping jalan raya laut dari barat ke timur itu, tumbuh pula cabang-cabang jalan yang dilayari perahu setempat, kadang-kadang juga perahu dari luar, untuk mengangkut hasil-hasil hutan ini. Pada waktu suasana politik berubah, misalnya ketika Malaka dikuasai Portugis, jalan sekunder ini berkembang pesat, seperti jalan laut melalui pantai barat Sumatra yang sudah dipelopori sebelumnya oleh perahu-perahu yang dahulu datang untuk mengambil lada,

---

71 Meilink-Roelofsz, *op. cit.*, hlm. 163, 274

kayu-kayuan, kapur barus, emas, budak, dan sebagainya. Menurut Tomé Pires, pada waktu itu Tiku dan Pariaman belum menghasilkan lada, tetapi kemudian sumber Belanda menyebut kedua tempat ini sebagai penghasil lada. Perluasan perkebunan lada di sini mendapat dorongan dari pelayaran yang sekarang banyak mempergunakan jalan pantai barat Sumatra, dan juga sebagai tanggapan terhadap kebutuhan lada di pasar dunia yang semakin meningkat.

Hal serupa dapat dilihat pula di Banten. Kalau permintaan lada bertambah, penduduk mengalihkan pertaniannya kepada penanaman lada. Sebaliknya, kalau permintaan berkurang, penduduk menanam bahan makanan. Pada waktu Belanda mengadakan blokade terhadap Banten sehingga menjadikan berkurangnya kapal datang di pelabuhan, penduduk mulai menanam padi lagi. Malah ada yang mulai menanam tebu karena gula dapat laku pada orang-orang Inggris yang tinggal di Banten.[72]

Menurut sebuah sumber dari tahun 1616,[73] dalam bulan Februari dan Maret bilamana musim hujan sudah memungkinkan sungai-sungai dilalui perahu, penanam lada datang dengan perahu membawa hasil perkebunannya. Orang-orang Cina yang telah menunggu-nunggu kedatangan lada ini memindahkan kampungnya lebih ke selatan kota Banten agar dapat mencegat perahu lada yang baru turun dari pedalaman dan memborongnya semua. Lodewycksz mencatat bahwa pada waktu *jung-jung* Cina tiba di Banten, harga lada sudah naik dua kali lipat. Oleh sebab itu, penting sekali untuk mendapatkan lada lebih dahulu sebelum harga melonjak demikian tinggi. Namun, pengusaha lada pun sadar akan harga ini sehingga mereka suka menahan barangnya terlebih kalau panen tahun itu kebetulan kurang dari yang biasa dipetik, dengan harapan agar mendapat harga yang lebih tinggi bagi ladanya. Akan tetapi, sering juga sebelum musim hujan tiba, orang-orang Cina masuk ke pedalaman untuk membeli lada, meskipun jumlah yang biasa dibelinya amat terbatas berhubung fasilitas pengangkut tidak ada, jalan darat sangat sukar dilalui, sedangkan jalan sungai belum dapat dipakai. Namun, keuntungan dari perjalanan ke pedalaman besar juga, dapat mencapai 400%, tetapi keadaan ini tidak bertahan lama.

Pada tahun 1619 Belanda menguasai Jayakarta dan mengganti namanya menjadi Batavia (Betawi). Persaingan VOC yang didukung oleh blokade pelabuhan Banten menyebabkan kapal-kapal yang mengunjungi Banten semakin berkurang, dan pada tahun 1634 menurut arsip VOC sebagian besar perdagangan Banten telah berpindah ke Batavia.

---

72 *Ibid.*, hlm. 242

73 *Ibid.*, hlm. 246, diambil dari H.T. Colenbrander, *Jan Pietersz Coen. Bescheiden omtrent zijn bedrijb in India, I*, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1923, hlm. 163

Di Jambi pedagang perantara berada di tangan pedagang Cina pula. Petani lada di pegunungan tanah Minangkabau membawa hasil kebunnya dengan perahu ke Jambi, biasanya 100–150 perahu kecil datang dari pedalaman, masing-masing mengangkut kira-kira 150 pikul lada. Pedagang Cina membelinya atau menukarnya dengan kain tenunan yang oleh penanam lada ini dijual lagi di kampungnya.

Hasil pertambangan yang terpenting adalah timah di Bangka dan Belitung, dan emas di pulau-pulau besar. Akan tetapi, pada waktu itu pertambangan timah lebih berkembang di Semenanjung Malaya, sedangkan emas (dan intan di Kalimantan) rupanya hanya mempunyai arti lokal. Hasilnya tidak seberapa sehingga tidak menyebabkan suatu *gold rush* ke daerah pertambangannya. Emas lebih banyak dipakai oleh penguasa setempat, raja-raja Sumatra memakai emas hasil pulau ini, raja-raja Maluku Utara mengambil emas dari Sulawesi Utara. Dalam jumlah sedikit emas diekspor oleh kapal Gujarat dan Cina.

Pada pola perdagangan dan pelayaran yang berlaku di sini orang-orang Eropa Barat datang membawa unsur-unsur baru yang kemudian mengubah keadaan politik dan ekonomi Indonesia. Pusat-pusat perdagangan menjadi sasaran kapal-kapal Eropa. Terutama Kompeni Belanda memegang peran penting karena mereka berhasil memaksakan sistem monopoli dagang yang ditunjang oleh modal yang besar, organisasi yang baik, persenjataan serta teknologi perkapalan yang lebih maju. Akan tetapi, di tempat-tempat dan pelabuhan yang belum dikuasai VOC, dan juga dalam beberapa sektor perdagangan di daerah VOC yang kurang mengalami campur tangan Kompeni (misalnya dalam pelayaran perahu pribumi), pola perdagangan dan pelayaran masih tetap seperti pola dahulu. Dalam tahun 1930-an menurut pengamatan Caron, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pada masa *matoa* Amanna Gappa pada abad ke-17 masih berlaku di Makassar. Sistem *commenda* dengan bagi-laba masih berlaku dalam banyak usaha perdagangan meskipun telah mengalami modifikasi menurut tuntutan zaman. Dunia perdagangan di bandar berpusat pada kegiatan-kegiatan di pasar, suatu tempat berjual beli yang mempunyai ciri-ciri khas. Apalagi VOC dengan sistem monopolinya makin lama makin berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah dan barang-barang impor (antara lain kain dari India), perdagangan (kecil) pribumi di pasar terbatas pada daging, sayur-sayuran, masakan, dan hasil kerajinan tangan seperti bakul dan tembikar, semuanya dalam jumlah kecil. Menurut Geertz, perniagaan pribumi (Jawa), seperti juga dalam hal pertaniannya, adalah padat karya, dengan sistem penentuan harga yang dicapai dengan tawar-menawar, berdasarkan hubungan pengkreditan yang khusus antara sekelompok

pedagang dalam urutan hierarki (dari pedagang besar ke pedagang kecil ke pedagang lebih kecil dan seterusnya), serta mengikutsertakan lebih banyak orang dalam kesempatan membagi-bagi risiko dan laba berniaga. Suatu penelitian sumber sejarah yang lebih mendalam dapat menentukan apakah pola perdagangan ini merupakan pola residual dari sesuatu yang dahulu umum berlaku, atau sebaliknya, merupakan evolusi (atau involusi) dari suatu pola yang lebih sederhana.[74]

Di samping cara berjual beli yang diuraikan dalam halaman-halaman sebelumnya, masih ada cara berniaga yang lain yang berlaku di kepulauan Indonesia. Di daerah-daerah terpencil dengan suku-suku terasing ada barter yang dilakukan secara diam-diam, penjual dan pembeli malahan sering tidak bertemu muka. Catatan orang-orang Arab dari abad ke-11 dan ke-12 (seperti Ibrahim bin Wasif Syah, Kazini, Ibn al-Fakih, dan Mas'udi) menyebut cara berdagang demikian kalau mereka membeli cengkih:

> .... para pelaut mengunjungi pulau dan menaruh barang dagangannya di pantai, kemudian kembali ke kapal, keesokan harinya mereka datang lagi dan melihat di samping setiap barang tersebut sejumlah cengkih. Ada yang membiarkan barang-barang dan cengkih ini, dan dalam hal demikian maka jumlah cengkih ditambah sampai beberapa kali.

Dalam hal ini pedagang asing itu boleh balik ke kapal sampai jumlah cengkih sudah dianggap cukup memadai harga yang dibawa. Dengan jalan seperti ini pertukaran barang dilaksanakan tanpa pelaku-pelakunya bertemu. Barter serupa ini masih dijalankan pada abad ke-20, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada abad ke-16 dan ke-17 sistem ini juga dilakukan di beberapa tempat, terutama dalam suasana saling mencurigai dan rasa takut terhadap orang yang berbudaya lain, jika hubungan dagang dilakukan oleh pihak yang tingkat budayanya relatif lebih tinggi daripada pihak yang dikunjungi, untuk mempermudah perdagangan apabila penduduk setempat tidak mengetahui bilamana pedagang asing akan datang, jika penduduk pribumi segan (atau tahu) mengadakan hubungan dengan dunia luar, atau jika kedua belah pihak tidak dapat berkomunikasi karena kesulitan bahasa. Perdagangan demikian oleh orang-orang Tobelo (Halmahera Utara) disebut *"potage tagali vuru"* yang dibedakan dari perdagangan biasa yang disebutnya *"votage tagali damaroi"*.[75]

---

74 Uraian tentang ekonomi pasar dalam Geertz, *op. cit.*, hlm. 30–47

75 G. Ferrand, *Relations de voyages et textes geographiques du VIII e au XVIIe siecles*, Paris, 1914, hlm. 304–305, J.C. van Eerde, "On persoonlijk ruilverkeer in de Indischen archipel, *"Feestbundel uitgegeven door her Kon. Bataviaasch Genootsschap; Bij gelegenheid van zijn 150 jarig bestaan, 1778–1928*, Jakarta, 1929, hlm. 93–119

Perdagangan secara diam-diam dan tersembunyi ini merupakan sebab utama lambannya proses integrasi dan akulturasi antarsuku yang sebenarnya sudah lama mengadakan hubungan dagang. Lain halnya dengan pelabuhan dan bandar di mana persentuhan budaya lebih terbuka. Namun, pola menetap di bandar besar di mana kelompok-kelompok masyarakat bertempat tinggal dalam kampung etnis yang terpisah-pisah juga memperlambat proses integrasi, karena tempat pertemuan berbagai macam suku hanyalah di pasar, sedangkan hubungan di antara mereka lebih terbatas pada waktu mengadakan tawar-menawar.

C. Pelabuhan

1. Letak dan Fungsi Pelabuhan

Sejauh-jauh kapal berlayar, sekali kelak ia masuk pelabuhan. Pelabuhan yang satu berbeda dengan pelabuhan yang lain. Ramai tidaknya pelabuhan tergantung dari berbagai faktor, di antaranya yang penting sekali adalah faktor ekologi. Pelabuhan bukan asal saja tempat berlabuh, melainkan tempat kapal dapat berlabuh dengan aman, terlindung dari ombak besar, angin, dan arus yang kuat (seperti yang tersirat dalam arti kata *harbour, haven,* dan lain-lain).

Tempat yang paling baik untuk pelabuhan adalah di sebuah sungai, agak jauh ke dalam. Akan tetapi, dalam hal ini lebar sungai membatasi perkembangan pelabuhan bersangkutan. Oleh sebab itu, banyak pelabuhan terletak di muara yang agak terbuka, atau –meskipun kurang terlindung– di dalam sebuah teluk. Dalam jaringan lalu lintas di sebuah negeri kepulauan seperti Indonesia, fungsi pelabuhan adalah sebagai penghubung antara jalan maritim dan jalan darat. Pada zaman dahulu ketika komunikasi dengan daerah pedalaman lebih banyak menggunakan sungai, lokasi pelabuhan dalam *estuarium* (di muara sungai) banyak untungnya. Melalui sungai penduduk pedalaman dapat mengangkut hasil sawah dan kebunnya ke pantai tanpa memerlukan tenaga yang banyak.

Sebaliknya, sungai menyebabkan semakin mendangkalnya pelabuhan karena endapan tanah yang dibawanya dari daerah pegunungan. Gosong pasir yang terdapat di muara sungai dan batu karang yang sering tumbuh di bagian luar teluk merupakan penghalang besar bagi kapal-kapal yang hendak masuk ke pelabuhan, akan tetapi di lain pihak merupakan alat pertahanan alamiah yang baik terhadap kapal-kapal asing yang datang dengan maksud jahat. Hanya dengan pandu laut yang berpengalaman yang telah mengenal alur pelayaran, kapal-kapal dapat masuk pelabuhan.

Pelabuhan harus mempunyai daya tarik yang besar bagi kapal-kapal dari luar, misalnya pasar yang ramai tempat hasil hutan dari pedalaman diperdagangkan dan tempat bahan makanan dan air minum disediakan untuk konsumsi di kapal. Ada korelasi erat antara besarnya volume perdagangan (termasuk persediaan bahan makanan) dan frekuensi kunjungan serta jumlah kapal yang singgah di suatu pelabuhan. Gosong pasir dan batu karang, penghalang pelayaran yang penting, diatasi dengan mengirimkan sampan-sampan kecil ke pelabuhan asal saja suasana bandar dapat menarik pedagang-pedagang dengan harapan memperoleh banyak keuntungan dari perniagaan setempat.

Misalnya kapal-kapal berusaha masuk Sungai Musi untuk mengunjungi kota Palembang. Pada abad ke-15, menurut berita Ma Huan, kapal-kapal dari segala penjuru datang ke sini. "Mula-mula mereka tiba di muara sungai yang berair tawar, kemudian masuk selat P'eng-chia, kapal ditambatkan di darat di mana terdapat banyak menara (= tiang?) batu, dengan menggunakan perahu kecil mereka memasuki muaranya, dan dengan demikian mereka tiba di ibu kota." Harapan untuk mendapat laba adalah besar, karena penduduknya, kata Ma Huan, ".... sangat makmur dan kaya. Tanahnya amat subur, seperti kata pepatah 'Hamburlah padi untuk satu musim, hasilnya menjadi beras untuk tiga musim', demikianlah keadaan di negeri ini ...."[76]

Pelabuhan Surabaya pada abad ke-15 demikian pula. Di muara sungai kapal-kapal besar dari Cina menemui kesukaran untuk maju, sebab itu dipakai perahu kecil yang masih harus menempuh 20 *li* sebelum tiba di tempat tujuannya.

Untuk mendekati pelabuhan Banda Aceh banyak kesukaran yang harus diatasi, akan tetapi sebagai pusat perdagangan dan pelayaran di bagian utara Sumatra pada abad ke-17, terutama pada zaman Iskandar Muda, perahu dan kapal walaupun dengan susah payah, berusaha datang ke pelabuhan tersebut. Ada tiga alur pintu masuk Teluk Aceh yang terlindung oleh pulau-pulau Waih, Breueh, dan Bunta. Alur pertama terkenal sebagai alur Surate karena kapal-kapal yang berlayar ke Gujarat memakai jalan ini, yang kedua diberi nama alur Benggal karena melalui alur ini kapal berangkat menuju Benggala dan pantai timur India. Sumber kita tidak menyebut nama alur yang ketiga yang khusus digunakan oleh kapal yang berlayar ke arah Malaka dan negeri di bawah angin. Pengetahuan tentang alur ini amat penting, kalau tidak kapal dapat mengalami nasib seperti pengunjung Belanda Nicolaus de Graaff, yang pada tahun 1641 kandas pada karang yang terdapat dekat Pulau Waih.

---

76 J.V.C. Mills (ad) *Ma Huan Ying Yai sheng-lan, "The overall survey of the Ocean's Shore' (1433)*, Cambridge, The University Press, 1970, hlm. 98, 99, 90

Setelah berhasil memasuki teluk, kesulitan yang dihadapi pengunjung Banda Aceh belum lagi selesai. Kalau belum mengenal tempatnya, waktu yang diperlukan untuk mencari tempat yang baik untuk melego jangkar akan lama. Beaulieu, seorang Prancis yang datang pada abad ke-16, menghabiskan delapan jam sebelum sauhnya menyentuh dasar. Pada abad ke-17 Peter Mundy menghadapi arus angin yang bertentangan arahnya sehingga dalam waktu dua hari kapalnya maju sedikit saja. Apabila mau menghampiri kota, kapal harus memasuki muara sungai, dan di sini gosong di tengah-tengahnya sangat berbahaya, terlebih pada waktu malam ("*.... specialement le soir, a l'occasion des brizans et de devers l'eau, qui font rompre lamer ....*"). Pada kunjungan Beaulieu, utusan sultan Aceh yang datang menjemputnya ke kapal lebih suka menginap di kapal daripada membahayakan dirinya berlayar kembali ke kota pada malam itu juga.

Bagi kapal yang hendak mendekati kota dan memasuki sungai dengan maksud jahat, masih ada penghalang penting yang harus dihadapi, yakni tembakan dari benteng yang mengawasi lalu lintas di muara sungai. Pada tahun 1599 benteng ini belum seberapa penting, tetapi pada zaman Iskandar Muda, menurut laporan Beaulieu (1621), benteng ini terdiri dari sebuah *bastion* besar dan bundar yang menguasai sungai dengan beberapa meriam yang menjaga "dua dinding benteng yang juga dilubangi untuk beberapa mulut meriam yang menutup pintu pelabuhan". Apabila Davis memberitakan pada tahun 1599 bahwa ia belum pernah melihat benteng sejelek ini ("*.... a worse cannot be conceived ....*"). Beaulieu malah menyebut benteng Aceh suatu bangunan yang baik sekali (" *.... trés bon ouvrage*").

Berhadapan dengan benteng ini raja mendirikan bangunan sebagai tempat peristirahatan yang dikelilingi dengan terusan. Di depan terusan ini ada pula sebuah benteng kecil" *.... couvert de brussailles dans lequels il' ya quelques canons ....*" Di dalam tembok benteng ada sebuah mesjid. Selanjutnya dikatakan di dekat pelabuhan terdapat rumah bea cukai di mana terdapat sebuah balai, tempat para pedagang dari dalam dan luar negeri yang datang ke sini harus menghadap. Ruang ini berada di bawah kekuasaan laksamana yang bertindak pula sebagai wali kota ("*.... 1' orancaya Laxemana qui etait comme maire de la ville ....*") yang juga memimpin sebuah pasukan yang terdiri dari kaum kebiri.[77]

Hal penting lain bagi perkembangan pelabuhan adalah kondisi pasang surut. Banyaknya selat yang menghubungi perairan Nusantara dengan samudra di luarnya menyebabkan sistem arus pasang surut di Indonesia sangat

77 Keterangan tentang Aceh pada zaman Sultan Iskandar Muda diambil dari D. Lombard, *"Le sultanas d'Atjeh au temps d'Iskandar Muda, 1607–1636*, Paris, Ecole Francaise d'Extreme Orient, 1967, hlm. 41–44

berbeda-beda, sekalipun di tempat yang agak berdekatan. Gerak air pasang di pantai barat Kalimantan sama sekali berbeda dengan gerak di kepulauan Lingga, sedangkan di Selat Makassar kita menghadapi keanehan bahwa sistem pasang surut di pantai timur Kalimantan lain dengan pantai barat Sulawesi. Pelabuhan yang mempunyai perbedaan besar antara waktu air pasang dan air surut tentu merasakan pengaruhnya dalam hal keluar-masuk kapal. Kapal-kapal tidak dapat memasuki pelabuhan saat air surut. Pada muara sungai yang mengenal perbedaan besar antara air pasang dan air surut, arus pada waktu pergantian pasang akan begitu kuat sehingga endapan sungai dibawa ke laut. Hal ini tidak memungkinkan bertumbuhnya gosong pasir yang menghambat pelayaran, akan tetapi di lain pihak muaranya makin menjadi dalam hingga kapal-kapal tidak mudah mendapat tempat untuk berlabuh. Kondisi ini penting karena dapat membatasi kemungkinan perluasan pelabuhan seperti dalam hal Ternate yang mempunyai laut yang dalam sedangkan tempat untuk berlabuh amat terbatas dan tidak mampu menampung berpuluh-puluh kapal besar seperti di Malaka.

Bentuk pantai adalah faktor lain yang memengaruhi pelabuhan. Keadaan bumi membagi kepulauan Indonesia dalam dua bagian, di sebelah barat kerak bumi lebih tua dan lebih mantap sehingga memperlihatkan bentuk pantai yang rendah, berbeda dengan di sebelah timur yang masih kurang stabil buminya di mana pantai-pantainya mempunyai *relief* yang lebih bervariasi. Perubahan tektonis juga lebih banyak terjadi di bagian timur, tebing curam lebih banyak dan bentuk pulau yang mempunyai teluk-teluk yang masuk jauh ke dalam dan menciptakan banyak tanah genting seperti di Pulau Sulawesi, Halmahera, dan Banggai menunjukkan bahwa bumi di sini masih relatif lebih muda. Di beberapa tempat dasar laut sedang dalam proses menurun sehingga sangat membantu pertumbuhan bunga karang. Di bagian timur inilah kita dapat membanggakan kebun karang yang luas yang menjadikan laut di sini suatu tempat tamasya yang indah, tetapi ditinjau dari segi navigasi sangat berbahaya. Pelabuhan seperti Tidore yang subur untuk pertumbuhan bunga karang merasakan benar faktor penghalang ini demi perkembangan pelabuhannya. Sebaliknya, pelabuhan-pelabuhan di sebelah barat di mana pantainya merupakan dataran aluvial yang luas seperti di Sumatra Timur, Kalimantan, dan Jawa Utara, pelabuhan-pelabuhan setempat harus berhadapan dengan proses pendangkalan muara karena endapan sungai yang terus-menerus.

Faktor alamiah yang lain adalah iklim. Di sini laut tidak pernah beku seperti daerah kutub, kabut jarang menghalangi pelayaran, sedangkan taifun atau tornado tidak dikenal. Akan tetapi, adanya angin musim

menentukan pelayaran setempat dan memengaruhi frekuensi kunjungan ke pelabuhan, misalnya, pelabuhan Manado yang sangat berbahaya didatangi pada musim angin barat.

Pada zaman dahulu faktor-faktor alamiah ini amat penting karena teknologi pada waktu itu belum sanggup mengatasi kesulitan geografi, iklim, dan geografisik. Beberapa pelabuhan sudah mempunyai tanggul untuk menahan arus dan ombak yang besar, dan mungkin ada yang menyediakan dermaga untuk menambatkan kapal, tetapi batu karang, gosong pasir, dan angin musim masih tetap merupakan rintangan besar.

Tanggul dan dermaga untuk mempertinggi keamanan pelabuhan adalah ciptaan manusia, dan ini membawa kita kepada faktor manusia yang tidak kurang pentingnya dalam perkembangan pelabuhan. Malahan dapat dikatakan paling penting, kalau diingat bahwa dengan perkembangan teknologi modern sekarang banyak rintangan alamiah sudah dapat dihilangkan atau dikurangi. Lokasi geografi pelabuhan hanya menguntungkan kalau berada dekat atau berdekatan dengan konsentrasi penduduk yang padat. Kedua hal ini, ramainya pelabuhan dan padatnya penduduk, sebenarnya saling memengaruhi. Apabila letaknya dalam jaringan perdagangan yang ramai sebuah selat yang menghubungkan dua pusat perdagangan (seperti Selat Malaka yang berada antara Cina dan India) lebih menguntungkan lagi, kondisi untuk kemajuan dan kemakmuran pelabuhan sudah banyak terpenuhi. Akhirnya, yang masih harus diperhatikan adalah soal keamanan (bebas dari bajak laut, pemerasan dari pihak penguasa, dan sebagainya), sistem perpajakan yang masih memungkinkan pedagang mendapat laba, dan fasilitas-fasilitas lain seperti persediaan air minum, bahan makanan, dan galangan untuk memperbaiki kerusakan kapal, semua ini turut memengaruhi maju mundurnya suatu pelabuhan. Sumber-sumber Belanda dari abad ke-16 dan ke-17 memuji pelabuhan Jayakarta karena ada persediaan air tawar yang cukup. *Hikayat Patani* mengisahkan bagaimana Raja Ijau memerintahkan penggalian parit untuk air minum,".... maka bendahara pun menyuruhkan berkerah segala menteri pegawai sekalian ...." dan menembuskan sungai sampai ke Tambangan. Di sini jelas ada usaha untuk mempertinggi kesehatan penduduk setempat dan sekaligus juga menarik kapal-kapal asing dengan memberi pelayanan yang baik.[78]

---

78 A. Teeuw dan D.K. Wyatt, *Hikayat Patani: The Story of Patani*, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1970, hlm. 105–106

2. Organisasi Pelabuhan

Begitu kapal memasuki pelabuhan, segera syahbandar datang menghampirinya. Pelabuhan yang banyak didatangi kapal dan pedagang asing memerlukan lebih dari seorang syahbandar. Di Malaka pada masa jayanya terdapat sampai empat orang syahbandar yang bertugas. Syahbandar yang menempati kedudukan pertama adalah syahbandar yang memerhatikan kepentingan orang-orang dari Jawa, Maluku, Banda, Palembang, Brunei (dan Kalimantan), dan pulau-pulau Filipina. Untuk orang-orang Cina dan pedagang dari pulau-pulau Liu-Kiu ada syahbandar khusus.[79]

Tugas utama seorang syahbandar adalah mengurus dan mengawasi perdagangan orang-orang yang dibawahinya, termasuk pengawasan di pasar dan gudang. Ia harus mengawasi timbangan, ukuran dagangan, dan mata uang yang dipertukarkan. Apabila tidak ada persesuaian paham antara nakhoda dan para saudagar di salah satu kapal yang berasal dari "wilayah" syahbandar bersangkutan, ia harus menjadi penengahnya. Oleh sebab itu, syahbandar biasanya diangkat dari kalangan saudagar-saudagar asing itu sendiri. Pada umumnya saudagar yang paling berwibawa (kekayaannya menjadi ukuran daripada berhasil tidaknya ia berdagang) yang menjadi syahbandar. Dengan demikian, saudagar-saudagar asing merasa lebih tenteram karena kepentingannya diperhatikan oleh seorang pejabat pelabuhan yang berasal dari kalangannya sendiri. Syahbandar memberi petunjuk dan nasihat tentang cara-cara berdagang setempat, ia pula menaksir barang dagangan yang dibawa dan menentukan pajak yang harus dipenuhi, serta bentuk dan jumlah persembahan yang harus diserahkan ke bawah duli tuanku raja, bendahara, dan tumenggung. Nakhoda, penumpang, dan awak kapal lainnya, tidak diperkenankan berbuat sesuatu tanpa sepengetahuan syahbandar. Pejabat ini menghadapkannya kepada tumenggung dan bendahara, dan ia pula yang menunjuk gudang untuk menyimpan barang-barang dagangan nakhoda dan jika diperlukan, ia menyediakan gajah (di Malaka) untuk mengangkut barang-barang tersebut.

Pejabat yang mengepalai para syahbandar adalah tumenggung yang berkuasa atas seluruh kota dan pelabuhan (Malaka). Dalam urusan dagang kedudukannya sangat penting karena ialah yang harus menerima bea masuk dan bea ekspor dari barang yang diperdagangkan, dan ia pula yang mengadili perkara-perkara yang menyangkut orang-orang asing yang hampir semua terdiri dari pedagang. Sementara itu, kapal-kapal kerajaan (armada kapal perang) beserta awaknya berada di bawah perintah laksamana. Pada waktu perang, peran laksamana lebih menonjol.

Keramaian di pelabuhan Banda Aceh Darussalam pada zaman Sultan Iskandar Muda memerlukan pula beberapa orang syahbandar.

79 Meilink-Roelofsz, *op. cit.*, hlm. 42; Bahan pada halaman berikutnya juga diambil dari karya ini

Kalau tidak salah hitung jumlahnya empat juga, paling sedikit tiga orang. Dalam kunjungan Beaulieu dikatakan ada seorang "Syahbandar" bersama beberapa orang pegawai dan juru tulis kantor bea cukai (*"plusienurs officiers et ecrivains de I'alfandegue"*) datang dengan sampan kecil setelah kapal Prancis itu membuang sauh. Mereka ini membawa keris kerajaan sebagai pertanda diutus sultan, menyerahkan sebuah daftar barang-barang yang harus dipersembahkan ke istana, lalu kembali ke darat. Keesokan harinya (adakalanya dua hari kemudian) kunjungan ke istana dilakukan dengan suatu pawai. Tiap hadiah untuk sultan ditutupi kain halus yang berwarna kuning. Kalau ada surat resmi yang harus diserahkan, surat ini dibawa di atas baki persembahan dari perak yang ditutupi setangan yang disulam dengan benang emas. Maka berangkatlah rombongan dari pelabuhan menuju istana. Di depan sekali surat resmi dibawa oleh orang kaya di atas gajah, disusul oleh enam orang peniup trompet, enam orang pemukul tambur, dan enam orang peniup suling. Kemudian dua ekor gajah, yang satu merupakan pelangka sang duta (nakhoda), diiringi pula oleh dua orang kaya yang masing-masing menunggang kuda Arab. Di belakang terdapat tiga orang "syahbandar" dan pegawai-pegawai bea cukai, semuanya berjalan kaki. "Begitulah kami berjalan melalui lorong-lorong, diantar seperti pengantin," kata Beaulieu.[80]

Mungkin sekali "Sabandar" yang terpenting ikut berpawai di atas gajah yang lain untuk mendampingi tamunya.

Juga pada upacara dan perayaan-perayaan lainnya di Aceh Syahbandar memegang peran penting. Menurut adat Aceh, pada upacara yang disebut "majelis tabal pada hari memegang puasa", yaitu sehari sebelum puasa dimulai, Syahbandar Sri Raam Setia harus mengantarkan persembahan berupa kain kepada sultan dan menaburkan kembang di atas makam raja-raja. Pada hari ini *tabal* (tambur) besar yang bernama Ibrahim Khalil dipukul.

Pada perayaan lainnya, yaitu "perkataan jaga-jaga pada malam lailatulkadar", giliran Syahbandar Saifulmuluk untuk menyerahkan kain kepada sultan. Demikian pula pada upacara sultan mandi pada hari Rabu terakhir bulan Safar, "majelis Syah Alam mandi safar", salah seorang syahbandar ditugaskan untuk menyediakan kereta perarakan untuk sang raja.[81]

Di pelabuhan Banda Aceh (yang tidak tanggung-tanggung di dalam hikayat Aceh disebut juga Bandar Makmur) para syahbandar beserta para *karkun* dan pejabat bea cukai lainnya merupakan pegawai Balai Furdah,

---

80 Lombard, *op. cit.*, hlm. 140
81 *Ibid.*, hlm. 144–145

yakni jawatan pelabuhan yang dikepalai oleh orangkaya Sri Maharaja Lela dan penghulu kawal, yang disebut pertama menguasai urusan sipil dan yang kedua urusan militer. Beaulieu berpendapat bahwa petugas-petugas ini sebenarnya tidak boleh disebut pegawai karena mereka tidak menerima gaji dari sultan. Bahkan sebaliknya, mereka diwajibkan memberi persembahan kepada raja berupa *"un baju ou vetement"*. Untuk persalinan raja dibuat dari kain seindah mungkin sesuai dengan kesanggupan pejabat masing-masing.[82]

Pelabuhan Japara yang baru mengalami pertumbuhan pesat pada masa kerajaan Demak rupanya hanya mengenal seorang syahbandar. Sebuah studi mengenai pelabuhan Japara pada abad ke-17[83] jadi pada waktu Japara menjadi pelabuhan yang terpenting dari kerajaan Mataram, hanya menyebut seorang syahbandar. Ia mengepalai pabean yang memungut bea cukai untuk setiap barang yang masuk-keluar pelabuhan.

Wilayah pesisir Mataram dibagi dalam dua bagian besar, *tlatah pesisiran kulon* (bagian barat) dan *tlatah pesisiran wetan* (bagian timur), dan masing-masing *tlatah* terdiri dari bagian-bagian kecil yang dikepalai oleh seorang bupati. Pada masa pemerintahan Sultan Agung dan Amangkurat I kota Japara menjadi ibu kota dari Pesisiran Wetan, tempat kedudukan seorang *wedana-bupati*. Di kompleks dalam (rumah) *wedana-bupati* semua kegiatan administrasi daerah pesisir dipusatkan. Kota Japara sendiri dikepalai oleh seorang Kyai Lurah, begitu pula dengan kota-kota pelabuhan lainnya. Pieter Franssen, pegawai VOC yang tiba di Semarang pada tanggal 16 Mei 1631 diterima oleh Kyai Lurah Yuda yang memperkenalkannya kepada Tumenggung Warganaya, Bupati Semarang. Seorang pejabat yang disebut *petiat-tanda* yang berkedudukan di Japara dikatakan mengawasi semua kantor pabean dan ia "berkuasa di semua muara sungai". Akan tetapi, bagaimana hubungan antara kyai lurah dan syahbandar, sumber-sumber sejarah tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Semuanya berada di bawah *Wedana–Bupati* Japara.

Bagi Japara beras adalah bahan ekspor yang paling penting. Oleh sebab itu, Wedana–Bupati Japara lebih banyak memusatkan perhatiannya terhadap ekspor bahan ini, terlebih karena ekspor beras merupakan salah satu monopoli raja. Dalam hal impor, wedana–bupati pun mempunyai suara yang menentukan. Ia yang memerintahkan barang apa saja yang perlu dimasukkan yang dapat memenuhi kebutuhan dan selera di daerahnya. Di samping itu, kekuasaan meliputi daerah seberang: wedana–

---

82 *Ibid.*, hlm. 102–103

83 F.A. Sutjipta, "remarks on the harbour city of Jepara in the seventeenth century", *Fifth Conference on Asian History*, Manila, IAHA, 1971. Keterangan selanjutnya mengenai organisasi pelabuhan Japara diambil dari karangan ini.

bupati diserahi tugas pengawasan untuk daerah upeti Jambi, bupati Demak untuk daerah Palembang, dan bupati Semarang untuk daerah Sukadana di Kalimantan.

Seperti dikatakan di atas, syahbandar adalah pejabat pertama yang menemui kapal-kapal asing. Berhubung dengan itu biasanya di Malaka ia dipilih di antara pedagang-pedagang asing yang sudah lama menetap di sini. Di pelabuhan lain pada masa itu juga ditemukan syahbandar keturunan asing. Syahbandar di Martapura pada tahun 1635 (pada waktu itu ibu kota kerajaan Banjarmasin telah dihancurkan) dalam sumber-sumber Belanda dikatakan bernama "Retna dy Ratya" atau "Godja Babouw", seorang keturunan Gujarat. Akan tetapi, pada tahun 1692 jabatan ini sudah dipegang oleh seorang keturunan Cina.[84]

Syahbandar Japara yang menemui kapal-kapal Belanda pada tahun 1616 dan 1619 juga merupakan seorang keturunan Cina, bahkan mungkin seorang Cina totok. Ia dikenal pula dengan nama *Ince Muda*, dan mengadakan hubungan dagang dengan Jambi karena di tempat ini ia mempunyai saudara laki-laki yang mempunyai hubungan baik dengan raja Jambi. *Ince Muda* memiliki beberapa kapal kecil yang dipakai untuk mengangkut beras. Pegawai VOC juga mencatat bahwa kedua bersaudara ini besar pengaruhnya baik terhadap raja Jambi maupun terhadap Wedana–Bupati Japara, di samping itu *Ince Muda* berdagang pula dengan orang-orang Portugis di Malaka.[85]

Pelabuhan Gresik dan Jaratan merupakan pelabuhan kembar yang terletak berhadapan di muara sungai. Menurut sumber Belanda, syahbandar berkedudukan di Gresik, sedangkan di Jaratan ditempatkan seorang syahbandar muda. Pada tahun 1625 syahbandar muda di Jaratan dikenal pula dengan nama Ince Muda, juga seorang Cina atau keturunan Cina. Istrinya seorang putri Beng Kong, pemimpin penduduk Cina di Betawi pada waktu itu. Di sini kita melihat gejala yang menarik seperti yang dikemukakan oleh Meilink-Roelofsz, yaitu pergeseran kekuasaan di Jawa yang semakin berpindah ke tangan Kompeni Belanda yang berpusat di Batavia, mulai mendorong pedagang Cina mencari afiliasi dengan pedagang sebangsanya yang bertempat tinggal di kota pusat VOC itu.[86]

Sumber-sumber Belanda memberikan pula berita lain yang tidak kurang pentingnya. Seperti diketahui, pada tahun 1623 Gresik jatuh ke tangan Mataram, pada tahun 1625 Surabaya mengalami nasib yang sama. Setahun

---

84 A.A. Cense, *De kroniek van Banjarmasin*, Santpoort, 1928, hlm. 94, 109
85 Meilink-Roelofsz, *op. cit.*, hlm. 286, 289
86 *Ibid.*, hlm. 283–284

kemudian, pada tahun 1626, VOC diperbolehkan untuk berdagang kembali di Gresik, dan menurut pengunjung-pengunjung Belanda, syahbandar yang menerimanya bernama "Quiay Putoa", orang yang sama dengan syahbandar yang menerima mereka pada tahun 1605 dan 1619. Demikian pula *Ince Muda* masih menjabat sebagai syahbandar muda di Jaratan. Dengan kata lain, pejabat pelabuhan di Gresik dan Jaratan masih tetap dipertahankan walaupun ada pergantian kekuasaan politik. Hanya tidak disebutkan apakah pejabat-pejabat lain yang membawahi syahbandar juga dipertahankan dalam kedudukan yang lama.

Sebagai pejabat yang menguasai lalu lintas perdagangan yang keluar masuk pelabuhan, syahbandar dapat menjadi seorang yang amat berkuasa. Walaupun dikatakan "tidak diberi gaji oleh raja", penghasilannya cukup tinggi. Tomé Pires menulis bahwa di Malaka, syahbandar yang khusus mengawasi kepentingan saudagar Cina, Siam, dan Liu Kiu, membebaskan mereka dari kewajiban membayar bea cukai. Sebagai gantinya mereka harus membawa persembahan, dan syahbandarlah yang menentukan jenis dan harga persembahan yang harus diserahkan. Kata Pires, pedagang-pedagang Cina menuruti saja apa yang dikehendaki "adat negeri", meskipun mereka tahu bahwa yang diminta sudah sangat berlebihan. Sungguhpun demikian mereka tetap mau datang ke Malaka dengan kata lain, masih cukup untungnya walaupun mengadakan perjalanan sejauh itu, padahal untuk mendapatkan izin meninggalkan negeri Cina saja mereka sudah harus membayar pajak yang tinggi.[87]

Di samping penghasilan dari bea cukai, syahbandar di Banten mendapat sebagian dari uang pajak untuk berlabuh (*ruba-ruba*). Biasanya jumlah yang harus mereka bayar seluruhnya (pajak berlabuh dan bea cukai) ditetapkan sekaligus untuk setiap kapal, dua pertiga untuk raja dan sisanya untuk syahbandar.[88]

Melalui jabatan syahbandar orang asing dapat mendapat pengaruh yang besar. Ini dibuktikan oleh syahbandar Banten (1604) yang berasal dari tanah Keling (sumber Belanda mengatakan bahwa laksamana pun berasal dari negeri Keling). Menurut keterangan yang diperoleh Belanda pada waktu pedagang Keling ini tiba di Banten dari Meliapur ia tidak mempunyai suatu apa pun untuk hidup, ia mulai berdagang dengan barang rombengan, kemudian ia berdagang barang-barang yang kurang kualitasnya. Akan tetapi, karena sombong dan berani (*"arch ende cloeck"*), ia akhirnya menjadi hartawan besar yang disegani dan disenangi oleh mangkubumi yang pada waktu itu memegang pemerintahan karena raja

87 *Ibid.*, hlm. 77
88 *Ibid.*, hlm. 247

masih di bawah umur. Sebagai syahbandar ia menerima sebagian dari hasil bea cukai, ia duduk pula sebagai anggota dewan kerajaan. Walaupun secara resmi suaranya dalam dewan ini tidak penting, ia berhasil mendapat pengaruh besar karena kecakapan dan pengalamannya. Mangkubumi pandai memanfaatkan kecakapan orang Keling ini, dan sebagai imbalan ia menerima sebagian penghasilan mangkubumi, yakni hak prioritas dalam hak berjual beli. Dengan menggunakan hak ini mereka dapat membeli lada dengan harga murah, sedangkan saudagar-saudagar asing (termasuk VOC) terpaksa membelinya dari mangkubumi dan syahbandar dengan harga tinggi.[89]

Tindakan-tindakan syahbandar dan mangkubumi ini sudah tentu mendapat perhatian khusus dari Kompeni Belanda yang bertujuan memperoleh monopoli berdagang. Beberapa kali mereka berusaha untuk mendapat hak prioritas berjual beli di Banten, tetapi tidak berhasil. Pada tahun 1616 mereka menempuh jalan baru, syahbandar didekati dengan hadiah-hadiah, juga untuk juru tulis pegawai, Kompeni membawa hadiah. Akan tetapi, usaha ini juga gagal.[90] Tiga tahun kemudian Jayakarta diduduki VOC dan sejak itu Kompeni mulai menarik pedagang-pedagang ke tempat ini. Walaupun Banten mulai mundur, masih lebih dari delapan windu Banten dapat bertahan sampai Belanda menguasai perdagangan di pelabuhan ini.

Kalau di satu pihak syahbandar harus memerhatikan kepentingan saudagar asing dan menjadi penyambung lidah mereka, di pihak lain ia harus bertindak sebagai pejabat pelabuhan yang menagih pajak dan bea cukai untuk kepentingan negeri dan pejabat-pejabatnya. Dalam kedudukan demikian ia harus pandai menentukan sikap loyalitasnya. Berpihak kepada pedagang asing adalah suatu hal yang dapat dimengerti sebab ia sendiri dipilih antara mereka, dan ini mempunyai risiko pemecatan atau hukuman yang lebih berat. Jika syahbandar tidak mengindahkan kepentingan pedagang dan hanya menjalankan tuntutan penguasa setempat, kepercayaan pedagang asing terhadap dirinya hilang, perasaan tenteram berdagang di bandar itu tidak ada lagi karena tidak ada yang melindungi kepentingan mereka, sehingga timbul kemungkinan kegiatan dipindahkan ke pelabuhan lain. Sumber Cina pada abad ke-15 menyebut pelabuhan Tuban sebagai tempat yang tidak aman sehingga kapal-kapal Cina menjauhinya dan lebih suka ke Gresik dan Surabaya. Kapal-kapal Tuban memaksa dengan kekerasan kapal-kapal Cina supaya singgah di Tuban. Sumber Cina menyebut pelabuhan ini sebagai sarang bajak laut. Dalam abad ke-16 sumber Portugis mengatakan bahwa syahbandar di Pasai yang

89 *Ibid*, hlm. 240
90 *Ibid.*, hlm. 253

beragama Hindu suka membantu orang-orang Portugis yang datang ke pelabuhan ini.[91]

Kita tidak mengetahui tentang peran syahbandar di Japara dalam perundingan antara Belanda dengan penguasa setempat, tetapi sumber-sumber memberitakan bahwa *Wedana–Bupati* Japara yang pada waktu itu dijabat oleh Tumenggung Wiradikara telah memulai perundingan dengan VOC dan telah menjanjikan fasilitas berdagang yang menguntungkan Belanda. Hal ini dilakukan tanpa persetujuan sunan sehingga wedana–bupati ini dipecat dan diganti oleh Tumenggung Wiratmaka. Penggantian orang yang menduduki jabatan tertinggi di Japara ini sering dilakukan pada masa Amangkurat I dan II. Pada tahun 1647 Tumenggung Wirasetya diangkat menjadi wedana–bupati, pada tahun 1653 ia diganti oleh yang disebut sumber Belanda "Antracapa". Tumenggung Wirasetya sendiri ditempatkan di Kendal, tetapi setelah beberapa tahun kemudian ia mendapat kembali kedudukan di Japara. Kemudian ia diberi jabatan di istana dan diganti oleh Reksamenggala yang hanya menjadi wedana-bupati untuk waktu yang singkat sebab ia diganti oleh Wiradikara. Pejabat ini pun diganti pada tahun 1667 oleh Wangsadipa, tetapi pada tahun 1669 ia kembali ke Japara. Pada tahun 1676 Wangsadipa menduduki jabatan Japara yang amat penting itu.

Pertimbangan untuk menggantikan wedana–bupati ini dapat bermacam-macam. Mungkin ada intrik istana disertai dengan ambisi untuk mendapatkan jabatan penting itu bagi satu pihak, dapat juga karena wedana–bupati tidak sanggup memenuhi tugas yang dipercayakan. Pengawasan pelayaran dan perdagangan di pelabuhan-pelabuhan yang terletak dalam wilayahnya adalah tugas utama. Ia mengumpulkan bea cukai dari semua pelabuhan dan mengumpulkan pajak dari wilayah pesisiran yang harus diserahkan sebagian kepada istana. Ia harus mewakili sunan dalam perundingan dengan duta-duta luar negeri dan diserahi tugas mengawasi daerah-daerah vasal di seberang lautan. Di samping itu, ia harus dapat mengerahkan kapal dan tentara pada waktu perang. (Pada tahun 1624 Sunan Mataram memerintahkan supaya 2.000 perahu dari berbagai jenis disiapkan untuk menyerang Batavia, Banten, dan Surabaya. Semua perahu di daerah pesisir harus berkumpul di Japara untuk inspeksi). Mungkin juga dalam pergantian *wedana–bupati* ada pertimbangan politik bahwa posisi Japara sebagai pusat pelayaran dan perdagangan dapat menjadi demikian kuat sehingga *wedana–bupati* dapat lebih berkuasa dan membahayakan kedudukan raja dan keutuhan negara.

---

91 *Ibid.*, hlm. 364 catatan 2

3. Sistem Pemungutan Bea Cukai

Bagi kerajaan-kerajaan maritim Indonesia, pelabuhan merupakan pintu gerbang (bahasa Latin: *portus*) bahan-bahan ekspor dan impor. Di sini arus impor dan ekspor dapat diawasi dan dikenakan bea seperlunya. Oleh sebab itu, pelabuhan merupakan sumber penghasilan yang amat penting bagi kerajaan.

Mengenai pemungutan bea cukai, Tomé Pires lebih banyak memberi keterangan tentang Malaka daripada pelabuhan yang lain. Para pedagang yang baru saja tiba di Malaka harus membayar bea cukai lebih dahulu sebelum ia diperbolehkan menjual dagangannya. Jumlah yang harus dibayar tergantung pada ukuran dan timbangannya, oleh sebab itu barang-barangnya harus ditimbang dan diukur dahulu berdasarkan timbangan dan ukuran yang berlaku di Malaka. Ada tarif tersendiri untuk tiap-tiap jenis barang, sedangkan jumlahnya berbeda-beda menurut negeri asalnya.

Selain membayar bea cukai, pedagang-pedagang harus membayar pula barang persembahan untuk raja, bendahara, tumenggung, dan syahbandar yang membawahinya. Keseluruhan persembahan ini berjumlah 1% atau 2% dari nilai barang yang dimasukkan, besarnya ditetapkan oleh syahbandar yang bersangkutan. Peraturan ini sangat baik karena pada umumnya syahbandar dari suatu negeri tertentu tidak akan menuntut jumlah yang berlebih-lebihan dari pedagang senegerinya. Namun, adakalanya pedagang memberi sejumlah yang lebih dari yang diharuskan, dengan maksud agar syahbandar dapat "membujuk" raja dan pegawai-pegawainya supaya perdagangannya lebih berhasil. Kalau mau menetap di Malaka pedagang-pedagang di sebelah barat, termasuk orang Melayu, harus membayar pajak 3%, di samping itu mereka harus membayar 6% pajak kerajaan (3% untuk orang Melayu).[92]

Untuk menghindari tuntutan "pajak" yang dipungut oleh pegawai-pegawai rendahan, kapal-kapal yang datang dari sebelah barat ini biasanya menggunakan jalan yang lain. Sesudah kapal membuang sauh dan muatannya telah dinilai harganya, serombongan pedagang yang biasanya terdiri dari lima orang Keling dan lima orang bangsa lain pergi menghadap tumenggung, yaitu pegawai tinggi yang mengepalai semua syahbandar dan menguasai urusan bea cukai. Rombongan ini menilai lagi muatan kapal dalam keseluruhannya menurut peraturan yang berlaku dan rombongan inilah yang menerima bea cukainya, atau lebih tepat, mereka menerimanya untuk kemudian diserahkan kepada tumenggung. Cara membayar bea cukai demikian, khususnya dipakai oleh kapal-kapal

92 Cortesao, *op. cit.*, hlm. 273

Gujarat yang besar, yang menurut perkiraan Pires berharga 21.000 *cruzados*, dan 6% dari harga itu harus dibayar sebagai bea cukai. Dengan pembayaran ini semua kewajiban telah dipenuhi, karena dalam 6% tersebut telah diperhitungkan pula persembahan yang harus diberikan. Biasanya sebuah kapal membawa muatan berbagai macam bahan dan untuk setiap jenis barang ada tarif untuk bea dan persembahannya pun sendiri-sendiri, sehingga sistem membayar melalui panitia sepuluh orang itu lebih memudahkan pelunasan bea masuk dan sekaligus merupakan jaminan terhadap segala macam penyalahgunaan hak dan wewenang yang dapat menghambat perdagangan.

Bagi negeri-negeri di bawah angin lain lagi peraturannya. Para pedagang dari sini tidak perlu membayar cukai atas barang dagangan yang dibawanya, mereka hanya harus membawa persembahan untuk raja dan pegawai-pegawainya. Nilai persembahan itu besar juga, bila dihitung, sama harganya dengan bea cukai yang harus dibayar oleh pedagang dari sebelah atas angin. Adapun besar hadiah yang harus diserahkan itu ditentukan oleh para pegawai kerajaan Malaka.

Saudagar-saudagar dari Cina harus memberi lebih banyak persembahan bila dibandingkan dengan para saudagar negeri-negeri lain. Ini disebabkan jumlah pedagang dalam satu kapal lebih banyak dibandingkan di kapal yang berasal dari negeri lain. Adakalanya satu jung beserta seluruh isinya dijual di Malaka sekaligus. Dalam hal ini pajak yang harus dibayar dihitung menurut penjualan seluruh kapal dan dilunasi dalam bentuk emas. Akan tetapi, agaknya kemudian kapal dari sebelah bawah angin ini harus membayar bea cukai sebesar 5% juga, kecuali kapal-kapal yang membawa bahan pangan. Atas semua barang makanan yang datang dari kepulauan Indonesia dan Asia bagian timur tidak dipungut pajak, hanya diharapkan pemberian hadiah.

Terhadap barang-barang yang dikeluarkan dari Malaka tidak dipungut bea ekspor, baik dari kapal-kapal yang menuju ke barat maupun ke timur. Akan tetapi, mereka diwajibkan membayar ongkos timbangan 1% untuk semua barang yang masuk dan keluar. Orang yang berhak memungutnya ditunjuk oleh raja sendiri. Di samping itu, ada jenis pajak yang walaupun tidak langsung berhubungan dengan pedagang asing, masih banyak memengaruhi perdagangan di negeri Malaka. Pajak ini dipungut sebagai imbalan izin berdagang di jalanan, di pasar, di kedai-kedai kecil yang terdapat di atas jembatan, dan di jalan raya di depan rumah-rumah. Izin ini merupakan sumber penghasilan bagi pegawai-pegawai Malaka, tetapi sebagian dari uang penerimaan dipakai juga membiayai rumah sakit bagi fakir miskin.

Sistem perpajakan ini banyak menguntungkan Malaka. Oleh sebab itu, orang-orang Eropa yang kemudian menduduki kota ini pada umumnya mempertahankan sistem pemungutan pajak ini. Hanya beberapa perubahan kecil yang diadakan, demikianlah yang dilaporkan seorang Belanda pada tahun 1679.[93]

Ketika Malaka telah diduduki Portugis, setiap kapal Melayu yang masuk atau keluar pelabuhan harus membayar pajak ekstra. Tarifnya $^1/_2$ real untuk setiap orang jika awak kapalnya 5 orang atau kurang. Kapal yang mempunyai awak kapal lebih banyak harus membayar 3 *cruzado* bagi setiap orang. Orang Jawa dan orang asing lainnya dan warga kota Malaka sendiri dibebaskan dari pajak tersebut. Mereka ini juga tidak usah membayar *ruba-ruba*, yaitu pajak untuk melabuhkan kapal. Walaupun ada pembebasan ini, orang Portugis dapat menerima 2.000 cruzado setahun dari jenis perpajakan ini.

Pajak ruba-ruba yang berjumlah 1 real per kapal dan $^1/_8$ real per kapal kecil berlaku bagi kapal-kapal yang mempunyai 5 orang atau lebih awak kapal. Hasilnya diberikan kepada keturunan Vasco da Gama menurut keputusan raja Portugis.

Selain itu, kapal-kapal yang hendak berangkat dari Malaka harus mempunyai *pas* berlayar yang ditandatangani oleh gubernur Portugis. Dalam *pas* ini disebutkan pelabuhan yang akan dituju, jumlah awak kapal, dan persenjataan yang dibawanya. Untuk mendapat *pas* demikian setiap kapal harus membayar ¼ real.

Walaupun pajak yang dipungut dari pedagang-pedagang yang datang ke Malaka tampaknya agak berat bila dibandingkan dengan tempat-tempat lain di sekitarnya, keadaannya masih lebih baik. Menurut Pires, bea impor yang dikenakan di Pegu adalah 12%, dan di samping itu masih juga dituntut berbagai persembahan dan suapan untuk para pegawai pelabuhan.

Studi Denys Lombard mengenai Aceh dan zaman Iskandar Muda juga memberi beberapa keterangan tentang sistem pemungutan pajak di sini. Walaupun kita tidak mengetahui dengan tepat kapan peraturan-peraturan mulai diberlakukan, ada beberapa jenis pajak yang disebutkan dalam adat Aceh, yakni:

1) *adat cap atau adat lapik cap*, dibayar dalam bentuk barang atau dengan uang untuk memperoleh "cap" yaitu izin raja untuk berlayar;
2) *adat kain*, kain segulung (sekayu) yang harus diberi oleh pedagang-pedagang dari India dan Eropa pada waktu mereka mendapat adat cap;
3) *adat kain yang ke dalam*, yaitu kain yang diberikan untuk istana;

---

93 Meilink-Roelofsz, *op. cit.*, hlm. 166–167

4) *adat memohon kunci*, untuk dapat menurunkan barang-barang dari ruang kapal sesudah pajak-pajak lainnya dilunasi;
5) *hadiah langgar*, untuk izin berlabuh (sebesar 120 tahil 10 mas bagi sebuah kapal bertiang tiga dari Gujarat);
6) *adat pengawal*, untuk orang-orang tua-tua bangsa Aceh yang naik ke kapal untuk menjaganya selama kapal berlabuh;
7) *adat hak ul-kalam*, yakni semacam bea registrasi.

Selain kewajiban tersebut di atas, para pedagang harus membayar 10% (usur) untuk sultan, yang menurut naskah *Bustanus-Salatin* baru dimulai pada zaman Sultan Iskandar Muda.[94]

Pengunjung-pengunjung Eropa pada zaman ini melaporkan bahwa ada perbedaan antara pungutan pajak dari pedagang muslim dan nasrani, tetapi keterangan-keterangan ini tidak menjelaskan apakah jumlah pajak yang dibayar lebih besar atau lebih kecil. Dikatakan dalam adat Aceh, orang Belanda dan Inggris harus membayar 7% dari harga barang-barang yang diturunkan ke darat dan dibayar dalam bentuk barang sedangkan pedagang yang beragama Islam membayarnya dalam bentuk emas.

Sumber-sumber Belanda dari abad ke-17 menyebut Jambi sebagai pusat perdagangan lada di pantai timur Sumatra. Untuk memasukkan bahan sandang, Jambi tidak memungut bea impor, tetapi untuk mengekspor lada dipungut 10%. Perdagangan lada ke luar negeri pada waktu itu lebih banyak dikuasai oleh orang Cina. Sumber-sumber menyebutkan beberapa nama pedagang perantara dari negeri Cina yang memegang peranan penting dalam ekspor lada ini, antara lain "Kecil Yapon" yang juga terkenal sebagai "Orang Kaya Sirre Lela", dengan kata lain ia telah diterima dalam masyarakat elite di Jambi. Dengan iri hati pedagang-pedagang Belanda melihat orang-orang Cina mengadakan transaksi yang pada waktu sukar ditandinginya. Dikatakan bahwa (+1634) pedagang Cina ini mengadakan perjanjian bahwa jika mereka tidak usah membayar ekspor untuk lada, mereka akan datang dengan enam atau 7 buah *jung*. Ini berarti bahwa praktis seluruh lada Jambi akan dibelinya sekaligus. Di samping itu, dijanjikan pula bahwa akan didatangkan beberapa orang Cina yang pandai membuat meriam.

Dari bea ekspor yang agak tinggi ini sebagian adalah untuk raja-raja dan raja muda. Masing-masing menerima 10% dari bea ekspor lada ini dengan ketentuan bahwa raja tua menerima 105 dari pungutan terhadap pedagang Belanda, Inggris, dan Cina, sedangkan raja muda mendapat bagian dari pungutan terhadap pedagang Jawa dan Melayu. Bagian yang terbesar (90%) adalah bagian orang kaya.

---

94 Lombard, *op. cit.*, hlm. 103

Bea ekspor yang tinggi ditambah lagi dengan ekspor pengangkutan yang mahal menyebabkan kapal-kapal Belanda tidak lagi datang mengambil lada ke Jambi tetapi menarik kapal-kapal Jambi untuk datang membawa ladanya sendiri ke Batavia.

Dalam hal Banten ada angka-angka terperinci tentang pajak dan bea cukai yang harus dibayar oleh kapal-kapal Belanda pada abad ke-17.[95] Pada tahun 1608 kapal Belanda yang bernama "Banten" yang mengekspor 8.440 karung lada dari pelabuhan Banten harus membayar:

Pajak kerajaan sebesar 8%, yaitu menurut harga pembelian yang ditetapkan (4 real per karung) ...	fl	6.346
ruba-ruba untuk syahbandar (250 real per 6.000 karung)	fl	826
ruba-ruba untuk raja berdasarkan ketentuan 500 real untuk setiap 6.000 karung	fl	1.625
beli belian suatu pajak khusus, (666 real per karung	fl.	2.201
pangroro, pajak khusus yang lain, $11^1/_2$ cash per karung	fl	14
pajak untuk juru tulis, dihitung per 100 karung	fl	198
pajak untuk juru timbang, per 100 karung	fl	198
biaya untuk mengangkut lada ke rumah timbangan	fl	98
	fl	11.533

Jumlah fl 11.533.– ini harus dipenuhi untuk pengeluaran total seharga fl 33.760.–, tetapi perlu diingat bahwa pajak bagi orang Belanda tidak sama dengan saudagar lainnya. Pedagang Cina hanya membayar 5% pajak, tetapi mereka harus pula membawa hadiah berupa barang tembikar Cina. Untuk barang-barang ekspor yang bukan merupakan hasil Banten sendiri dipungut pajak yang lebih besar, misalnya lada. Kain yang dimasukkan Belanda dikenakan 3% bea impor. Menurut laporan para pegawai VOC, Banten mempersulit usaha-usaha perdagangan Belanda di sini. Bea cukai dinaikkan sedangkan pada tahun ± 1615 barang yang sebelumnya bebas bea dikenakan bea. Mungkin hal ini ada hubungannya dengan usaha-usaha Kompeni untuk mendapatkan hak monopoli yang sering juga dituntut dengan paksa. Pernah dicoba untuk membujuk syahbandar dan juru tulis dengan hadiah, untuk mendapat prioritas membeli lada. Akan tetapi, bujukan ini dan usaha untuk memperoleh monopoli tidak berhasil. Pada tahun 1620 Jan Pietersz Coen mencoba untuk memaksa agar bea yang tinggi itu dihapuskan atau dikurangi. Banten menolak tuntutan ini walaupun diadakan blokade terhadap pelabuhan Banten. Usaha blokade ini juga gagal, terutama karena pedagang-pedagang Inggris tidak menunjangnya. Namun, akhirnya Banten tidak dapat menyaingi Batavia, dan baru pada tahun 1684 Banten menyerah.

95 Arsip VOC 962, dikutip dari Meilink – Roelofsz, *op. cit.*, hlm 393 catatan 84

Di Japara para pedagang Belanda beruntung karena pada tahun 614 Sultan Agung (Mataram) membebaskan mereka dari kewajiban membayar bea impor dan ekspor. Seperti diketahui, Sultan Agung tidak mau dianggap "sebagai pedagang seperti raja-raja Banten dan Surabaya". Menurut Meilink-Roelofsz, pembebasan bea ini dimaksudkan untuk menarik pedagang asing ke sini dan untuk mendapatkan bantuan Belanda untuk menghantam Banten dan Surabaya. Mungkin pendapat ini benar juga.[96] Kepada pedagang Cina juga diberikan pembebasan bea impor dan ekspor di Japara. Memang sebelumnya pelabuhan-pelabuhan di pesisir Jawa tidak memungut bea cukai yang tinggi. Menurut Pires yang harus dibayar pada umumnya hanyalah bea untuk berlabuh dalam bentuk hadiah. Kecuali itu, masih dipungut pajak 4% untuk barang dagangan yang dijual di dalam kota.

Walaupun memperoleh pembebasan bea dari Japara, VOC menghadapi saingan berat dari pihak pedagang Cina. Coen mencurigai Ince Muda, syahbandar keturunan Cina yang menghalang-halangi usaha perdagangan Kompeni. Lada Jambi dijual di Japara mencapai 10 sampai 13 real sepikul pada tahun 1618. Pedagang pedagang Cina berani membelinya karena mereka dapat menjualnya di Cina dengan harga yang lebih tinggi. Dengan demikian, Kompeni harus menyesuaikan diri dengan harga tersebut, seperti halnya di Banten. Belanda mengharapkan dengan memberi hadiah kepada Bupati Japara mereka mendapat hak pertama untuk membeli lada sebelum pedagang Cina menawarkannya. Akan tetapi, di sini pun mereka gagal.

Pelabuhan Gresik pun pada mulanya tidak memungut bea impor dan ekspor. Akan tetapi, pada tahun 1612 raja Surabaya mulai mengadakan pemungutan. Sebelumnya orang Portugis boleh memasukkan kain dan mata uang tanpa bea masuk. Mata uang didatangkan untuk diberi sebagai *commenda* supaya pedagang-pedagang setempat dapat memakainya sebagai modal. Dengan demikian, orang Portugis memperoleh rempah-rempah dengan cara yang lebih murah daripada apabila mereka harus membeli sendiri di Gresik.

Mengenai Timor sumber-sumber mengatakan bahwa setiap pelabuhan mempunyai raja sendiri. Bea cukai yang harus dipenuhi di pelabuhan-pelabuhan ini tidak besar, tetapi dikatakan bahwa perdagangan tidak boleh berlangsung jika raja tidak hadir. Hal ini perlu supaya "tidak akan terjadi gangguan-gangguan", tetapi tidak dijelaskan apakah raja juga mempunyai hak khusus dalam transaksi jual beli, misalnya mendapat prioritas pertama. Ekspor dari Pulau Timor sebagian besar adalah damar dan madu di samping perdagangan budak. Barbosa menyebut lada di antara bahan ekspor, tetapi hal ini tidak diperkuat oleh sumber-sumber lain.

---

96 *Ibid.*, hlm. 273–290

Hasil setempat tidak diangkut keluar oleh kapal-kapal sendiri, tetapi oleh kapal-kapal dari Maluku dan Jawa yang datang ke Timor membawa kain, tembikar, manik-manik timah, air raksa, timah hitam, dan alat-alat seperti kapak, pisau, pedang, dan paku untuk ditukar di sini.[97]

Tentang sistem perpajakan di Maluku, kita tidak mempunyai angka-angka. Sumber-sumber sejarah hanya menyebut bahwa pajaknya berat terlebih untuk rakyat setempat. Hasil tanah yaitu rempah-rempah yang ditanam, lebih banyak membawa untung kepada pedagang asing, raja setempat, dan pegawai pelabuhan yang bertugas memungut bea cukai. Ketika VOC mengadakan perjanjian dengan Ternate (± 1610), salah satu syarat adalah bahwa separuh ($^1/_2$) dari penghasilan bea cukai adalah untuk raja sendiri. Kesulitan mulai dirasakan pada waktu Belanda menghalang-halangi pedagang asing lain untuk datang ke Maluku. Raja kehilangan sumber penghasilan, oleh sebab itu perhatiannya lebih banyak ditujukan kepada penanaman pohon rempah-rempah. Di lain pihak rakyat pun tidak mendapat bahan-bahan pokok yang harus didatangkan dari luar, karena mereka memusatkan perhatiannya kepada penanaman rempah-rempah.

Menurut dokumen-dokumen VOC, pajak yang harus dipenuhi rakyat diserahkan dalam bentuk persembahan rempah-rempah kepada raja. Pegawai-pegawai yang bertugas untuk mengumpulkan cengkih ini mendapat sebagian dari hasil. Dikatakan pula bahwa rakyat harus membeli kain dan barang-barang keperluan lainnya dengan harga yang tinggi yang ditetapkan oleh raja. Di samping itu, mereka harus bekerja sebagai pendayung *kora-kora* sehingga tidak banyak waktu yang tersisa untuk melakukan pekerjaan yang lain di kebun. Penghasilan rakyat dari perkebunan cengkih makin kecil sehingga pohon cengkih dibiarkan saja. Mereka lebih suka menangkap ikan atau menanam bahan makanan karena untuk penghasilan ini tidak dipungut ekstra.

Jadi, pada abad ke-17 sudah tampak gejala-gejala kemunduran dalam penanaman cengkih yang bersumber pada tindakan-tindakan pemerintah setempat. Keadaan ini ditambah dengan tindakan-tindakan VOC untuk menebang pohon-pohon cengkih secara besar-besaran, pengarahan orang untuk pekerjaan di benteng di kota-kota dan *rorehe* sebagai rodi (semacam pajak tenaga), membuat suasana semakin parah sehingga pada abad ke-18 dan ke-19 Maluku mengalami kemunduran total. Hak monopoli rempah-rempah di Maluku tetap dipertahankan Belanda dan baru dihapuskan pada pertengahan abad ke-19.[98]

---

97 *Ibid.*, hlm. 103

98 Monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku masih di pertahankan sesudah pembubaran VOC dan baru dihapuskan pada tahun 1863.

Dari gambaran yang diberikan mengenai pelayaran dan perdagangan dalam masa ini, suatu hal yang mencolok, adalah bahwa bidang ini masih amat kurang diketahui. Sumber-sumber yang telah dipelajari tidak memberi keterangan tentang seluruh kepulauan Indonesia, dan data-data yang ada tidak selalu memberi keterangan yang lengkap. Diperlukan suatu studi yang lebih mendalam dalam menangani lebih banyak sumber sejarah untuk dapat mengungkapkan sejarah maritim di Indonesia dengan lebih lengkap.

Bab IV
Perkembangan Agama dan Kebudayaan Islam

A. Saluran-Saluran Islamisasi

1. Golongan Pembawa dan Penerima Islam

Dalam uraian-uraian terdahulu telah disinggung sedikit hal-hal yang berhubungan dengan saluran islamisasi. Namun, agar kita mengetahui lebih luas tentang saluran islamisasi itu, bagian ini membicarakannya lebih khusus. Untuk itu, kita tidak terlepas dari pembicaraan mengenai waktu kedatangan Islam, negeri asalnya, golongan-golongan pembawa, motivasi mereka ke Indonesia, dan unsur-unsur budaya yang mereka bawa serta. Perlu dibicarakan pula golongan-golongan yang menerima Islam dan alasan mereka menerimanya. Kemudian akan dibahas pula penyebarannya ke daerah-daerah pedalaman dan hubungan satu daerah dengan daerah lainnya, terutama antarpulau Indonesia. Hal lain yang dianggap penting membicarakan islamisasi dan saluran-saluran melalui perdagangan, perkawinan, ajaran-ajaran tasawuf, cabang-cabang seni, dan aspek-aspek budaya lainnya.

Pendapat-pendapat para ahli yang pernah mengemukakan masalah kedatangan Islam di Indonesia masih berbeda-beda. Sebagian ahli berpendapat bahwa kedatangan Islam pertama-tama ke Indonesia sudah sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, dan sebagian lagi berpendapat bahwa Islam baru datang pada abad ke-13 M, terutama di Samudra Pasai. Ahli-ahli yang berpendapat abad ke-7 M, terutama mendasarkan teorinya pada berita Cina dari zaman T'-ang yang menceritakan adanya orang-orang Ta-shih yang mengurungkan niatnya untuk menyerang kerajaan Ho-ling di bawah pemerintahan Ratu Sima (674), karena pemerintahan Ho-ling itu sangat keras. Sebutan "Ta-shih" dalam berita itu ditafsirkan sebagai orang-orang Arab. Sebutan "Ta-shih" itu juga ditemukan dari berita Jepang yang ditulis tidak lebih dari tahun 748 M yang menceritakan perjalanan Pendeta Kanshin. Diceritakan pula bahwa pada masa itu di Kanton terdapat kapal-kapal Po-sse dan Ta-shih K-uo. Menurut Rita Rose Di Meglio, istilah *Po-sse* dapat pula menunjukkan jenis bangsa Melayu, tetapi Ta-shih hanya untuk menunjukkan orang-orang

Arab dan Persia, bukan untuk orang-orang muslim India.[1] Chau Ju-kau yang mengutip berita Chou Ku-Fei tahun 1178 mengatakan bahwa tempat orang-orang Ta-shih itu ada dua. Tempat pertama yang bernama Folo-an termasuk daerah Sriwijaya. Menurut P. Wheatley, tempat tersebut terletak di kota Kuala Brang lebih kurang 25 mil dari Sungai Trengganu. Tempat yang kedua terletak di Sumatra Selatan karena dalam berita Chou Ju-kau itu dapat dicapai lima hari pelayaran dari Cho-po.[2]

Sebagian ahli berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 itu didasarkan pada dugaan akibat keruntuhan Dinasti Abbasiah oleh Hulagu pada tahun 1258. Pendapat ini diperkuat oleh bukti berita Marco Polo pada tahun 1292, berita Ibn Battutah abad ke-14, serta nisan-nisan kubur Sultan Malik as Saleh tahun 1297.[3] Di antara ahli-ahli itu ada juga yang berpendapat bahwa kedatangan Islam hingga terbentuknya masyarakat muslim di Indonesia pada abad ke-13 disebabkan oleh masa arus penyebaran dan kedatangan ajaran tasawuf.[4]

Setelah memerhatikan pendapat-pendapat tersebut di atas, jelaslah bahwa awal kedatangan Islam di Indonesia masih belum dapat dipastikan. Data-data lain yang meyakinkan masih perlu diteliti lagi. Kecuali itu, sebenarnya perlu dipisahkan tiga pengertian yaitu tahap kedatangan, tahap penyebaran, dan tahap perkembangan Islam. Oleh karena itu, abad ke-7 Masehi boleh dipandang sebagai abad permulaan kedatangan dan hubungan pedagang-pedagang muslim dengan sebagian kecil daerah dan bangsa Indonesia. Hal itu sesuai pula dengan hubungan pelayaran dan perdagangan dengan negeri-negeri di Benua Asia bagian timur dan tenggara melalui beberapa tempat pelabuhan yang terletak di pesisir Selat Malaka yang justru pada abad ke-7 dan ke-8 ada di bawah pengawasan Sriwijaya. Belum dapat dipastikan apakah kedatangan orang-orang muslim itu di samping berdagang dengan bangsa Indonesia juga melakukan islamisasi melalui dakwah atau tidak. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya kelompok masyarakat Ta-shih yang di atas telah ditafsirkan sebagai orang-orang Arab di daerah kekuasaan Sriwijaya pada abad ke-7 itu. Jika memang sejak abad tersebut islamisasi telah meluas, anehnya baru lima abad atau enam abad kemudian kita ketahui muncul bentuk kerajaan yang bercorak Islam yakni Samudra Pasai, yang didasarkan atas data-data sejarah yang lebih konkret. Mungkin penyebaran Islam di daerah tersebut terjadi pada abad-abad menjelang

---

1 Rita R. Di Meglio (edited by Ds. Richards), *op. cit.*, hlm. 108–109

2 *Ibid.*, hlm. 110

3 Snouk Hurgronje, "De Islam in Nederlandsch-Indie," *VG.* IV, 11; Kurt Schroeder/Bonn un Leipzig 1924, LXXXVII, 1913, 361–362; L'Arabie et les Indes Neerlandises, LXXVII, 1907, 101–104; J.P. Moquette, "De Eerste Vorsten van Samoedra-Pase (Noord Soematra)", *ROD*, 1913, hlm. 1–12

4 A.H. Johns, "Sufism as a Category in Indonesia Literature and History", *JSAH*, Vol. 2 No. 2 (July 1961), hlm. 10–23

terbentuknya kerajaan, jadi barulah merupakan taraf penyebaran dan perkembangan Islam di wilayah tersebut, kemudian baru berusaha keluar dan merupakan suatu proses penyebaran lagi. Demikianlah pada masa-masa tersebut terjadi pula kedatangan, penyebaran, dan pengembangan Islam di daerah-daerah Indonesia lainnya.

Pendapat para ahli tentang negeri asal serta golongan-golongan masyarakat muslim yang memperkenalkan agama Islam kepada bangsa Indonesia itu juga berbeda-beda. Ahli-ahli yang memberi tafsiran Ta-shih seperti dikatakan dalam berita Cina pada abad ke-7, adalah orang-orang Arab, mengambil kesimpulan bahwa orang-orang muslim yang datang ke Indonesia itu adalah langsung dari negeri Arab.[5] Akan tetapi, sebagian ahli, di antaranya C. Snouck Hurgronje, berpendapat bahwa orang-orang Islam yang datang dan menyebarkan agamanya pertama-tama di Indonesia tidak langsung berasal dari negeri Arab. Mereka adalah orang-orang Islam dari Gujarat (India). Bukti-bukti hubungan langsung antara Indonesia dengan Arab baru terjadi pada masa kemudian, contohnya, hubungan utusan dari Mataram dan Banten ke Mekah pada pertengahan abad ke-17.[6]

Pendapat tersebut didasarkan pula kepada unsur-unsur Islam di Indonesia yang menunjukkan persamaannya dengan di India. Cerita-cerita populer dalam bahasa-bahasa di Indonesia mengenai nabi dan pengikut-pengikut pertamanya tidak hanya jauh dari nilai sejarah, tetapi juga jauh dari cerita-cerita Arab, dan aslinya terdapat kembali di India. Dikatakan pula oleh sarjana Belanda itu bahwa bersamaan dengan cerita-cerita tersebut di atas beberapa kebiasaan muslim di Indonesia menunjukkan kebiasaan-kebiasaan yang sama Syi'ah di pantai Malabar dan Koromandel, dan mereka penganut Sunnah Ortodoks yang dalam hukum tergolong mazhab Syafi'i.[7]

Pendapat-pendapat seperti itu diperkuat oleh hasil penelitian kepurbakalaan J.P. Moquette mengenai nisan kubur dari Samudra Pasai yang memuat nama Sultan Malik as Saleh yang berangka tahun 696 H (1297 M), dan beberapa nisan lainnya dari abad-abad berikutnya yang dibuat dari pualam. Ia berpendapat bahwa beberapa nisan tersebut menunjukkan pembuatan yang berasal satu pabrik di Cambay-Gujarat.[8] Beberapa ahli lainnya menganut pendapat kedua ahli tersebut di atas jika membicarakan kedatangan dan asal Islam di Indonesia itu. Meskipun demikian, ketidaksesuaian pendapat selalu ada, yaitu dari ahli-ahli yang

---

5 Hamka dan Muhammad Sa'id dalam *Risalah Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia di Medan*, 1963, hlm. 87, 207, yang antara lain dianggap sebagai kesimpulan seminar tersebut; Syed Naguid Al-Attas, *op. cit.*, hlm. 11 (lihat catatan No. 4)

6 C. Snouck Hurgronje, *op. cit.*, hlm. 106

7 *Ibid.*, hlm. 364

8 J.Y. Moquette, *op. cit.*, hlm. 1–12; "De Grafsteenen to Pase en Grisse vergekelen met dergelijke monumenten uit Hindoestan", *TBG*, LIV, 1912, hlm. 536–553; Fabriekswerk, *VGB*, LVII, 1920, hlm. 44

berpendapat bahwa Islam yang datang ke Indonesia adalah dari Arab seperti telah dikemukakan di atas. S.Q. Fatimi berpendapat bahwa orang-orang muslim pembawa Islam ke Indonesia berasal dari Benggala. Pendapat ini didasarkan pada berita Tomé Pires serta aliran tasawuf yang masuk ke Indonesia dan Malaysia.[9]

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas jelaslah bahwa tidak mudah untuk memastikan bila dan dari mana pembawa pertama-tama Islam ke Indonesia. Oleh karena itu, mungkin lebih baik dikatakan bahwa pembawa Islam ke Indonesia antara abad ke-7 sampai ke-13 adalah orang-orang muslim dari Arab, Persia, dan India (Gujarat, Benggala).

Pendapat para ahli mengenai golongan-golongan pembawa Islam ke Indonesia menunjukkan persamaan. Sesuai dengan kedatangan Islam melalui jalan perdagangan, pembawa-pembawanya adalah golongan pedagang juga. Golongan pedagang muslim berbeda dengan golongan pedagang yang beragama Hindu. Pada agama Hindu hanyalah golongan Brahmana atau pendeta yang melakukan kegiatan-kegiatan upacara keagamaan dan membaca buku-buku suci, serta merekalah yang menyebarkan budaya Hindu itu. Jadi, para pedagang Hindu tidak berperan dalam menyebarkan agama. Kecuali itu, di dalam agama Islam tidak dikenal karisma yang magis seperti pada agama Kristen Katolik, yang dikenal adalah masyarakat misi dalam pengertian Kristen kuno. Oleh karena itu, peluasan dan sifat misi pada Islam ialah bahwa setiap muslim adalah pendakwah agama. Karena itulah pedagang-pedagang Islam merupakan tokoh misi yang umum sekali di negeri-negeri asing.[10]

Apabila pembawa Islam ke Indonesia pada masa-masa permulaan itu adalah golongan pedagang, jelaslah bahwa yang menjadi pendorong utama untuk berkunjung ke Indonesia adalah faktor ekonomi–perdagangan. Hal itu sesuai pula dengan masa perkembangan pelayaran dan perdagangan internasional antara negeri-negeri di bagian barat, tenggara, dan timur Asia. Kedatangan pedagang-pedagang muslim seperti halnya dengan pedagang sejak Samudra Pasai dan Malaka sudah menjadi pusat kerajaan Islam dan hubungannya sudah banyak pula dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, orang-orang Indonesia dari pusat-pusat Islam itu sendiri menjadi pembawa dan penyebar agama Islam ke daerah-daerah di kepulauan Indonesia.

Contoh-contoh mengenai hal itu adalah Dato'ri Bandang yang pergi ke Gowa, Tuan di Bandang dan Tuan Tunggang Parangan ke Kutai, Penghulu Demak dan sejumlah tentaranya ke kerajaan Banjar, di samping itu ada hubungan antara Sunan Giri dengan Hitu dan Ternate; Pate Quetir

---

9 S.Q. Fatimi, *Islam comes to Malaysia, Singapore*, 1963, hlm. 14–18–23
10 J.C. van Leur, *op. cit.*, hlm. 114

yang pernah diam di kalangan masyarakat Jawa di Malaka kemudian ke Cirebon di mana ia dikunjungi ulama Syeikh Said dari Pasai yang dalam perjalanan ke Patani untuk mengajarkan agama Islam di kalangan raja-raja serta rakyatnya.[11] Masih banyak lagi pembawa dan penyebar Islam ke daerah-daerah pedalaman yang umumnya adalah mubalig, wali-wali, dan orang-orang yang dianggap keramat. Mereka di samping dapat dianggap sebagai pemimpin Islam di suatu tempat, juga dapat dianggap sebagai pembawa dan penyebar di tempat lainnya.

Kecuali itu, pada abad-abad ke-16/ke-17 ketika hubungan antara Mekah dengan Indonesia sangat lancar, beberapa orang Indonesia bermukim di Mekah.[12] Sekembalinya di tanah air mereka membawa ajaran-ajaran atau paham-paham Islam yang mereka pelajari selama di Mekah untuk kemudian dikenalkan kepada kawan-kawan di Indonesia.

Di samping pembawa Islam ada pula penerima Islam. Pada bagian-bagian terdahulu telah disinggung bahwa raja-raja, bangsawan-bangsawan, dan penguasa-penguasa memegang peran dalam menentukan kebijakan perdagangan dan pelayaran. Mereka bukan hanya penguasa dalam bidang pelayaran dan perdagangan, melainkan juga pemilik saham bahkan pemilik kapal-kapal dagang. Perdagangan hasil-hasil pertanian yang sangat penting pada masa itu seperti rempah-rempah, beras, dan lain-lainnya yang sangat menguntungkan, biasanya menjadi hak monopoli negara, di mana raja dan bangsawan berkuasa menentukan harga dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu.

Beberapa data mengenai monopoli dan perdagangan serta bangsawan yang memiliki kapal-kapal dan saham-saham, kita ketahui mengenai raja Aceh yang memegang monopoli perdagangan beras yang ditangani tumenggung Kendal dan Tegal. Penguasa-penguasa di Makassar mempunyai agennya di Banda dalam perdagangan rempah-rempah. Orang-orang kaya, Sri Maharaja Indra dan Syahbandar Datu Besar dari Patani, memiliki kapal-kapal dan melakukan pelayaran. Raja-raja Aceh, Johor, Jambi, Surabaya, Makassar, Banten, Jakarta, Ternate, Adipati Demak dan Kendal, Sukadana, dan syahbandar Gresik, mereka itu kesemuanya adalah pemilik-pemilik kapal dan melakukan perdagangan.[13]

Sudah dikatakan bahwa ketika pusat-pusat kerajaan Indonesia–Hindu, Sriwijaya dan Majapahit mengalami kekacauan politik, adipati-adipati pesisir berusaha melepaskan diri dan mengadakan hubungan dengan pedagang-pedagang muslim. Jadi, jelaslah mereka itu menjadi penerima

11 A. Teeuw – D.K. Wyatt, *Hikayat Patani*, Bibliotheca Indonesia, 1970, hlm. 71–75

12 C. Snouck Hurgronje, "De' Hadji Politiek der Indiesche Regeering," *VG.* IV, ii, 1924, LXXVIII, 1909, hlm. 193. Bahwa orang-orang dari Indonesia di Mekah dikenal sebagai koloni Jawa

13 J.C. van Leur, *op. cit.*, hlm. 134

agama Islam bahkan kemudian penyebar pula melalui pengaruh-pengaruhnya. Menurut Meilink-Roelofsz, perubahan kepercayaan dan pergeseran kekuasaan di kota-kota pelabuhan di Jawa mempunyai pengaruh tertentu terhadap desintegrasi yang sedang berjalan karena perpecahan di intern.[14] Akan tetapi, perkembangan masyarakat pedagang muslim di kota-kota pesisir itu mungkin juga disebabkan pengaruh kekacauan dan perpecahan di pusat kerajaan Majapahit seperti yang dikemukakan oleh J.C. van Leur.[15] Dengan demikian, perkembangan masyarakat muslim di kota-kota pesisir dan desintegrasi politik di pusat kerajaan-kerajaan Indonesia–Hindu itu saling memengaruhi yang bukan tanpa akibat.

Meskipun di atas telah dikatakan bahwa golongan raja-raja dan bangsawan dalam masyarakat kerajaan tradisional menjadi pemegang kunci perdagangan bahkan mereka sendiri adalah saudagar-saudagar, sedangkan pemilik saham dan kapal-kapal, para pelaksana perdagangan sebagian besar adalah orang-orang dari golongan bawah atau non-elite. J.C. van Leur berpendapat bahwa sebagian besar dari para pedagang yang berdagang dari tempat ke tempat, termasuk golongan masyarakat bawah, merekalah yang bercampur dengan para pedagang dari berbagai negeri.[16]

Para pedagang yang berasal dari golongan bawah bercampur dengan para pedagang muslim dan lambat laun menerima agama Islam. Penerimaan Islam melalui golongan raja-raja atau bangsawan memungkinkan islamisasi lebih cepat daripada melalui golongan bawah, masyarakat Indonesia menganggap rajanya atau golongan bangsawan karismatis. Agama Islam tidak mengenal anggapan itu.

Berdasarkan cerita tradisional dan babad-babad Jawa, tokoh yang mendapat gelar wali dianggap sebagai pembawa dan penyebar Islam di daerah-daerah pesisir.[17] Tidak semua wali yang tergolong *Wali Sanga* atau Wali Sembilan berasal dari negeri luar. Bahkan bagian besar Wali Sanga, menurut cerita dalam babad-babad, berasal dari Jawa sendiri. Sunan Bonang, Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel yang sebelumnya telah bertempat tingal di kampung Ampel Denta (Surabaya), Sunan Kalijaga yang disebut pula Jakasayid adalah putra seorang tumenggung Majapahit, Sunan Giri adalah putra seorang putri Balambangan dengan seorang muslim, dan ia adalah putra angkat Nyai Panatih, Sunan Gunung Jati adalah putra Rara Santang atau Syarifah Moda'im, putri Prabu Siliwangi.

---

14 M.A.P. Meilink-Roelofsz, *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago*: Between 1500 and about 1630, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1962, hlm. 24

15 J.C. van Leur, *op. cit.*, hlm. 165

16 *Ibid.*, hlm. 98–99

17 Istilah *wali* di sini mungkin dari Wali-Allah Muhammad Ibraheem al-Geyoushi, "Al-Tirmidhi's Theory of Saints and Sainthood 71", The Islamic Quarterly, The Islamic Cultural, London, Vol. V, number 1, (Jan–March 1971), hlm. 17–61

Sunan Rahmat sendiri yang disebut dalam babad-babad datang dari Campa, adalah saudara sepupu permaisuri Brawijaya. Kalau cerita dalam babad-babad itu benar, para wali itu semula merupakan penerima ajaran Islam, tetapi kemudian juga menjadi penyebarnya terutama di kalangan masyarakat di pesisir utara Jawa. Peran mereka bukan hanya memberikan dakwah islamiah, tetapi juga sebagai dewan penasihat, pendukung para raja yang memerintah. Bahkan di antara Wali Sanga itu, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah tidak hanya pelopor dan penyebar Islam, tetapi juga raja, sehingga ia mendapat julukan Pandita-ratu.[18]

Kecuali nama-nama wali tersebut di atas, ada juga nama-nama lain yang oleh beberapa babad disebut "wali", misalnya Maulana Magribi, Syeikh Bentong, Syeikh Majagung.[19] Berdasarkan namanya, Maulana Magribi mungkin berasal dari Magrib atau Barat, dari Maroko. Beberapa nama seperti Sunan Bayat (Klaten), Maulana Malik Ibrahim (wafat 1419 M yang dimakamkan di Gresik), Sunan Sendang di desa Sendangduwur, sering kali oleh masyarakat setempat disebut pula wali. Oleh karena itu, julukan Wali Sanga mungkin merupakan julukan yang mengandung perlambang suatu dewan wali-wali, dengan mengambil angka sembilan yang sebelum pengaruh Islam sudah dipandang angka keramat.

Di luar Jawa, seperti Dato'ri Bandang dan Dato' Sulaeman di Sulawesi, dianggap pula sebagai pembawa dan penyebar agama Islam di daerah tersebut. Dato'ri Bandang dan Tuan Tunggang di Parangan dianggap pembawa dan penyebar agama Islam di Kutai, Kalimantan Timur. Penghulu dari Demak seperti diceritakan dalam *Hikayat Banjar* juga berperan dalam mengajarkan Islam kepada Raden Samudra atau Sultan Suryanullah dan patih-patihnya. Masih banyak lagi orang-orang yang dianggap keramat dan pelopor penyebaran Islam di berbagai daerah lainnya. Bagaimanapun orang-orang yang mendapat julukan wali atau orang keramat, mula-mula dapat kita anggap sebagai golongan penerima Islam, tetapi kemudian sebagai pemberi atau penyebar Islam. Demikian pula pedagang-pedagang muslim, guru-guru, ahli-ahli tasawuf, dan lain-lain. Sebenarnya sangat relatif untuk memisahkan pengertian pembawa, penyebar, dan penerima Islam; karena seperti telah digambarkan, ada suatu golongan yang semula dapat dianggap sebagai pembawa dan penyebar Islam dari luar, dan ada golongan yang dapat dianggap sebagai penerima Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, golongan penerima dapat menjadi pembawa atau penyebar Islam untuk

---

18 J.L.A. Brandes – D.A. Rinkes, "Babad Tjerbon, Uitvoerig inhoudsopgave en noten", *VBG*, LIX, 1911, hlm. 104 (teks)

19 D.A. Rinkers, "De Heiligen van Java" VI. "Het graf to Pemlaten en de Hollansche heerschappij", *TBG*, LV, 1913. Bijlage I, *Jav.Hds.* BG. No. 515, hlm. 74, tentang Maulana Magrib, bait ke-4 baris ke-1, bait ke-30 baris ke-3. Juga nama-nama tersebut dalam Bijlage II, Jav.Hds. BG, No. 481, 89; Bijlage III, Jav. Hds., BG, No. 546; Bijlage IV. Jav.Hds. *BG*, No. 575, 185

orang-orang lain di luar golongan dan daerahnya. Dalam hal ini kontinuitas antara penerima dan penyebar terus terpelihara dan mungkin merupakan sistem pembinaan calon-calon pemberi ajaran tersebut. Pendidikan ini kita hubungkan dengan adanya pesantren-pesantren yang hingga abad-abad selanjutnya masih meneruskan sistem tersebut.

Biasanya santri-santri yang pandai dan telah lama belajar seluk-beluk agama Islam di suatu tempat, dan kemudian kembali ke daerahnya, menjadi pembawa dan penyebar ajaran yang telah mereka peroleh selama berguru. Pada abad ke-15–17, sistem pesantren atau pondok yang terkenal adalah yang terletak di Giri, di bawah asuhan Sunan Giri yang kemudian diteruskan oleh Susuhunan Prapen–yang dalam berita asing disebut *Rajah Bukit*.

Sejak hubungan antara Indonesia dengan Arab terjalin, terutama dalam kegiatan menunaikan kewajiban rukun Islam kelima, yakni haji, maka banyak orang yang telah menjadi haji sekembali mereka di Indonesia menyebarkan ajaran yang pernah mereka peroleh dari para syekh. Begitu pula bagi orang-orang Indonesia yang bermukim untuk beberapa lama di tanah Arab, sekembali di tanah air ada yang memberikan ajaran yang semula mereka peroleh dari guru-guru mereka.

Haji-haji berperan penting dalam masyarakat, yakni sebagai penyebar ajaran Islam, bahkan pembaru masyarakatnya. Mmereka memiliki pengalaman bergaul dengan kaum muslimin dari berbagai negara selama menunaikan ibadah haji di Mekah. Kadang-kadang mereka juga mengadakan pembaruan terhadap kehidupan agama Islam di daerahnya yang mereka pandang tidak sesuai dengan pandangan mereka ketika mengunjungi negeri Arab dan bergaul dengan kaum muslim dari negeri-negeri lain. Sebagai contoh, di Minangkabau pada abad ke-19 ada tiga orang haji yang terkenal dalam gerakan Padri. Mereka membawa pengaruh gerakan Wahabi dari Arab, sekembali ke daerah asal, mereka mengadakan gerakan untuk menghapuskan hal-hal yang mereka anggap menyeleweng dalam masyarakatnya.[20]

Apabila telah dikatakan bahwa pembawa atau penyebar agama Islam hanya golongan tertentu, golongan rakyat umumnya dapat dipandang semata-mata sebagai penerima. Meskipun demikian, karena islamisasi dilakukan melalui pendekatan dan penyesuaian dengan unsur-unsur kepercayaan yang telah ada sebelumnya, kehidupan keagamaan rakyat umumnya masih menunjukkan unsur-unsur percampuran dengan unsur kepercayaan sebelumnya.

---

20 Taufik Abdullah, "Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau", Indonesia, II, Oktober 1961, Modern Indonesia Project, Cornell University, Ithaca, New York, hlm. 13–14

2. Saluran-Saluran dan Islamisasi

Dari uraian terdahulu telah kita ketahui bahwa pedagang-pedagang, mubalig-mubalig, orang-orang yang dianggap wali atau keramat, ahli-ahli tasawuf, guru-guru agama, dan haji-haji, adalah golongan pembawa dan penyebar Islam. Di samping golongan pembawa atau penyebar Islam, yang juga penting kita ketahui adalah saluran-saluran yang mereka gunakan dan bagaimana islamisasi itu dilakukan.

Pada taraf permulaan, di antara saluran islamisasi yang pernah berkembang di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu sejalan dengan kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7 hingga abad ke-16. Pada saat itu pedagang-pedagang muslim (Arab, Persia, India) turut serta ambil bagian dalam perdagangan dengan pedagang-pedagang dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Penggunaan perdagangan sebagai saluran islamisasi sangat menguntungkan karena bagi kaum muslim tidak ada pemisahan antara kegiatan berdagang dan kewajiban menyampaikan ajaran Islam kepada pihak-pihak lain. Kecuali itu, pola perdagangan pada abad-abad sebelum dan ketika Islam datang sangat menguntungkan, karena golongan raja dan bangsawan umumnya turut serta dalam kegiatan perdagangan, bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham.

Islamisasi melalui saluran perdagangan dipercepat oleh situasi dan kondisi politik beberapa kerajaan di mana adipati-adipati pesisir berusaha melepaskan diri dari kekuasaan pusat kerajaan yang sedang mengalami kekacauan dan perpecahan. Mengenai islamisasi di pesisir utara Jawa, Tomé Pires menggambarkannya dalam kutipan berikut:

> "Kini saya ingin mulai menceritakan pate-pate muslim yang berada di pesisir, yang berkuasa di Jawa dan mempunyai semua perdagangan karena mereka adalah penguasa-penguasa jung-jung (kapal) dan rakyat. Ketika di sana di sepanjang pesisir Jawa masih belum musli 'caffre', maka banyak pedagang berdatangan, orang-orang Persi, Arab, Gujarat, Bengali, Malaya, dan jenis kebangsaan lainnya, yang di antaranya banyak muslim. Mereka mulai berdagang di dalam negeri itu dan menjadi kaya-kaya. Mereka berhasil dalam mendirikan masjid-masjid, dan *mollah* (maulana) datang dari luar sehingga jumlahnya menjadi banyak dan karenanya anak-anak muslim itu menjadi orang Jawa dan kaya-kaya, karena mereka di daerah-daerah ini lebih kurang sudah 70 tahun. Dalam beberapa tempat penguasa-penguasa Jawa yang belum Islam sendiri menganut Islam, dan maulana-maulana dan pedagang muslim ini mengambil kedudukan di tempat-tempat ini yang lain-lainnya dengan suatu cara memberi perbentengan. Mereka itu mengambil rakyat untuk diri mereka sendiri yang turut serta dalam jung-jungnya dan mereka membunuh penguasa-penguasa Jawa dan

menjadikan dirinya sebagai penguasa-penguasa pesisir dan mengambil alih perdagangan dan kekuasaan Jawa, di tempat-tempat tinggalnya."[21]

Meskipun demikian, secara umum islamisasi yang dilakukan oleh para pedagang melalui perdagangan mungkin dapat digambarkan sebagai berikut. Mula-mula mereka berdatangan di pusat-pusat perdagangan dan di antaranya kemudian ada yang tinggal, baik untuk sementara waktu maupun menetap. Lambat laun tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan, yang disebut *Pekojan*.

Di antara golongan pedagang tersebut tentu ada yang kaya dan pandai, bahkan sering kali ada pula yang menjadi syahbandar pelabuhan dalam suatu kerajaan. Dari sudut ekonomi jelas mereka memiliki status sosial yang lumayan sehingga orang-orang pribumi terutama anak-anak bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Bagi pedagang-pedagang asing yang datang ke negeri-negeri lain biasanya tidak membawa istri, karena itu mereka cenderung membentuk keluarga di tempat yang mereka datangi. Untuk memperoleh seorang perempuan penduduk pribumi di sekitar perkampungannya, mereka tidak mengalami kesukaran. Akan tetapi, perkawinan dengan penganut berhala mereka anggap kurang sah. Oleh karena itu, perempuan-perempuan yang mereka inginkan diislamkan terlebih dahulu dengan cara mengucapkan syahadat. Hal itu berjalan dengan mudah karena tanpa pentasbihan atau upacara-upacara panjang lebar dan mendalam, sehingga penganut yang bukan Islam yang melakukan cara tersebut merasa senang dan segera menyadari bahwa mereka termasuk dalam lingkungan penduduk asing, yang dianggap lebih daripada mereka. Lingkungan mereka makin luas dan dengan cara demikian lambat laun timbul kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim.[22]

Dari uraian di atas kita memperoleh gambaran bahwa perkawinan antara pedagang atau saudagar dengan perempuan pribumi juga merupakan bagian yang erat berjalinan dengan islamisasi. Dalam babad sering kita dapatkan cerita mengenai perkawinan semacam itu. Perkawinan merupakan salah satu saluran islamisasi yang paling mudah, karena ikatan perkawinan itu sendiri sudah merupakan ikatan lahir batin, tempat mencari kedamaian di antara individu yang terlibat. Individu-individu yang terlibat, yaitu suami dan istri, membentuk keluarga yang menjadi inti masyarakat,

---

21 Armando Cortesao, *op. cit.*, hlm. 182

22 C. Snouck Hurgronje, *op. cit.*, hlm. 362, berpendapat bahwa yang mempercepat penyebaran Islam itu ada dua hal yang menguntungkan yaitu sebagian besar penduduk pulau-pulau kehidupan kerohaniannya masih rendah (sic 1), dan di pihak lain penduduk yang sudah mempunyai pengaruh Hindu, tetapi mereka mengenal kasta, sedang Islam terhadap perkembangan individunya bebas

berarti membentuk inti masyarakat muslim. Kemudian dari perkawinan itu membentuk pertalian kekerabatan yang lebih besar antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan.

Saluran islamisasi melalui perkawinan itu lebih menguntungkan lagi apabila terjadi antara saudagar, ulama, atau golongan lain, dengan anak bangsawan atau anak raja dan adipati. Lebih menguntungkan karena status sosial–ekonomi, terutama politik raja-raja, adipati-adipati, dan bangsawan-bangsawan pada waktu itu turut mempercepat islamisasi. Dalam cerita-cerita babad, hikayat, dan tradisi, sering kita dapati data mengenai perkawinan antara seseorang pedagang atau golongan lainnya dengan anak bangsawan. Dalam babad tanah Jawa diceritakan tentang perkawinan putri Campa dengan seorang raja Majapahit yaitu Brawijaya; sedangkan ayah putri Campa adalah seorang misionaris muslim yang kawin dengan ibunya, anak raja Campa, yang semula bukan penganut Islam. Maulana Ishak datang di Balambangan dan melakukan perkawinan dengan putri raja negeri tersebut yang kemudian melahirkan Sunan Giri. Dalam *Babad Tanah Jawa* itu juga diceritakan perkawinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ngampel dengan Nyai Gede Manila, putri Tumenggung Wilatika.[23] Dalam *Babad Cirebon* diceritakan perkawinan putri Kawunganten dengan Sunan Gunung Jati.[24] *Babad Tuban* menceritakan tentang perkawinan antara Raden Ayu Teja, putri Aria Dikara yang menjadi adipati Tuban, dengan Seh Ngabdurahman, seorang Arab muslim yang kemudian mempunyai anak laki-laki dengan gelar Arab bernama Seh Jali atau Jaleludin.[25]

Kecuali melalui perdagangan dan perkawinan, tasawuf juga merupakan salah satu saluran penting dalam islamisasi. Tasawuf termasuk kategori yang berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke-13 dan ke-18. Hal itu bertalian langsung dengan penyebaran Islam di Indonesia, memegang peran suatu bagian yang penting dalam organisasi masyarakat kota-kota pelabuhan. Sifat spesifik tasawuf menyajikan ajarannya kepada bangsa Indonesia pernah dikemukakan oleh A.H. Johns:

> Mereka adalah guru-guru pengembara yang menjelajahi seluruh dunia yang dikenal, mereka dengan sukarela menghayati kemiskinan, mereka sering kali juga berhubungan dengan perdagangan atau serikat tukang kerajinan menurut tarekat mereka masing-masing; mereka mengajarkan teosofi yang telah bercampur, yang dikenal luas oleh bangsa Indonesia tetapi yang sudah menjadi keyakinannya, meskipun suatu peluasan fundamental kepercayaan Islam.

---

23 W.L. Olthof, *Poenika Serat Babad Tanah Djawi Wiwit SakingNabi Adam Doemoegi, ing toen, 1647*, 's-Gravenhage, 1941, hlm. 24–25

24 J.L.A. Brandes – D.A. Rinkes, *op. cit.*, hlm. 93

25 H.J. De Graaf, *op. cit.*, hlm. 144

> Mereka mahir dalam soal-soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan menyembuhkan dan tidak berakhir di situ saja, dengan sadar atau tidak mereka bersiap untuk memelihara kelanjutan dengan masa lampau dan menggunakan istilah-istilah dan anasir-anasir budaya pra-Islam dalam hubungan Islam. Guru-guru tasawuf ini dengan kebajikan kekuasaannya dan kekuatan magisnya dapat mengawini putri-putri bangsawan Indonesia, dan dengan demikian anak-anak mereka mendapat pengaruh keturunan darah raja, tambahan untuk mendewakan sinar karisma keagamaan.[26]

Gambaran mengenai islamisasi di Indonesia sering kita ketahui dari cerita-cerita dalam babad dan hikayat, misalnya *Sejarah Banten*, *Babad Tanah Jawi*, dan *Hikayat Raja-Raja Pasai*. Di antara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran seperti pada mistik Indonesia–Hindu adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung. Ajaran mistik semacam itu juga terdapat pada abad ke-19 seperti *Sumarah*, *Sapta Darma*, *Bratakesawa*, dan *Pangestu*.

Bentuk Islam yang diperkenalkan kepada bangsa Indonesia menunjukkan persamaan dengan alam pikiran orang-orang Jawa–Hindu. Persamaan tersebut bukan hanya pada alam pikiran umumnya, melainkan juga pada gambaran ciri-ciri yang dianggap mutlak. Kesimpulannya, pada mulanya agama Islam disajikan kepada bangsa Indonesia dalam bentuk yang menunjukkan persamaan dengan agama Ciwa dan Buddha Mahayana, sehingga mudah dimengerti sebab-sebab orang Jawa mudah menerima agama baru itu.

Kecuali melalui tasawuf, islamisasi juga dilakukan melalui pendidik, baik dalam pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, atau ulama-ulama. Pesantren atau pondok merupakan lembaga yang penting dalam penyebaran agama Islam. Seperti telah diuraikan dalam bagian-bagian terdahulu bahwa pembinaan calon guru-guru agama, kiai-kiai, atau ulama-ulama justru dilakukan di pesantren-pesantren. Setelah keluar dari suatu pesantren, mereka kembali ke tiap-tiap kampung atau desanya. Di tempat-tempat asal, mereka akan menjadi tokoh keagamaan, menjadi kiai yang menyelenggarakan pesantren lagi. Dengan demikian, pesantren-pesantren beserta kiai-kiai berperan penting dalam proses pendidikan masyarakat. Semakin terkenal seorang kiai, semakin terkenal pula pesantrennya dan pengaruhnya akan mencapai radius lebih jauh lagi.

Pada masa pertumbuhan Islam di Jawa, kita mengenal Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Sunan Giri terkenal dengan pesantrennya sampai daerah Maluku. Orang-orang dari daerah itu, terutama Hitu, berguru kepada Sunan Giri; bahkan beberapa

---

26 A.H. Johns, *op. cit.*, hlm. 15, 16, 17

kiai yang berasal dari Giri diundang ke Maluku untuk menjadi guru agama. Mereka ada yang dijadikan khatib, modin, kadi dalam masyarakat Maluku, dengan upah cengkih.[27]

Raja-raja beserta keluarganya, kaum bangsawan, biasanya juga mendatangkan kiai-kiai, ulama-ulama sebagai guru atau penasihat agama. Menurut *Sejarah Banten*, Kiai Dukuh atau Pangeran Kasunyatan adalah guru Maulana Yusuf,[28] Syekh Yusuf adalah penasihat agama Sultan Ageng Tirtayasa. Kiai Ageng Sela adalah guru Jaka Tingkir,[29] dan masih banyak lagi kiai yang menjadi penasihat atau guru raja-raja dan anak-anak bangsawan. Dengan demikian, mungkin raja kiai-kiai tersebut dapat memberikan pengaruh di bidang politik kepada raja-raja.

Saluran dan islamisasi lain dapat pula melalui cabang-cabang kesenian seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Hasil-hasil seni bangunan pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia, antara lain masjid-masjid kuno Demak, Sendang Duwur Agung Kasepuhan di Cirebon, masjid Agung Banten, Baiturrahman di Aceh, Ternate, dan sebagainya. Di Indonesia, masjid-masjid kuno menunjukkan keistimewaan dalam denahnya yang berbentuk persegi empat atau bujur sangkar dengan bagian kaki yang tinggi serta pejal, atapnya bertumpang dua, tiga, lima atau lebih, dikelilingi parit atau kolam air pada bagian depan atau sampingnya dan berserambi. Bagian-bagian lain seperti mihrab dengan lengkung pola kalamakara, mimbar yang mengingatkan ukir-ukiran pola teratai, *mastaka* atau *memolo*, jelas menunjukkan pola-pola seni bangunan tradisional yang telah dikenal di Indonesia sebelum kedatangan Islam.

Beberapa masjid kuno mengingatkan kita kepada seni bangunan candi, menyerupai bangunan meru pada zaman Indonesia-Hindu.[30] Ukir-ukiran seperti mimbar, hiasan lengkung *polakalamakara*, mihrab, bentuk beberapa *mastaka* atau *memolo* menunjukkan hubungan yang erat dengan perlambang merit, *kekayon* gunungan atau gunung tempat kedewaan yang dikenal dalam cerita-cerita keagamaan Hindu. Beberapa ukiran pada masjid kuno seperti di Mantingan, Sendang Duwur, menunjukkan pola yang diambil dari dunia tumbuh-tumbuhan dan hewan yang diberi corak tertentu dan mengingatkan kepada pola-pola ukiran yang telah dikenal pada candi Prambanan dan beberapa candi lainnya.[31]

Kecuali itu, pada pintu gerbang, baik di keraton-keraton maupun di makam orang-orang yang dianggap keramat yang berbentuk candi-bentar, kori Agung, jelas menunjukkan corak pintu gerbang yang dikenal sebelum

---

27 B. Schrieke, part one, *op. cit.*, hlm. 148
28 R.A. Hoesein Djajadiningrat, *op. cit.*, hlm. 148
29 W.L. Olthof, *op. cit.*, hlm. 35
30 G.F. Pijper, "The Minaret in Java" India Antiqua, Leiden, 1949, hlm. 275
31 F.D.K. Bosch, *OV*, 1930, hlm. 54–58

Islam. Demikian pula nisan-nisan kubur di daerah Tralaya, Tuban, Madura, Demak, Kudus; Cirebon, dan Banten, menunjukkan unsur-unsur seni ukir dan perlambang pra-Islam. Di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatra terdapat beberapa nisan kubur yang lebih menunjukkan unsur seni Indonesia pra-Hindu dan pra-Islam.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jelas islamisasi dilakukan pula melalui seni bangunan dan seni ukir. Berdasarkan berbagai peninggalan seni bangunan dan seni ukir dari masa-masa tersebut jelas pula bagi kita bahwa islamisasi dilakukan dengan damai. Kecuali itu, dilihat dari segi ilmu jiwa dan taktik, penerusan tradisi seni bangunan dan seni ukir pra-Islam merupakan alat islamisasi yang sangat bijaksana yang mudah menarik orang-orang bukan Islam untuk dengan lambat laun memeluk Islam sebagai pedoman hidup barunya.

Saluran dan islamisasi melalui seni bangunan dan seni ukir sesuai pula dengan saluran dan cara melalui seni tari, musik, sastra, dan lain-lain. Dalam upacara-upacara keagamaan, seperti Maulud Nabi, sering dipertunjukkan seni tari atau musik tradisional, misalnya gamelan yang disebut *sekaten* yang terdapat di keraton Cirebon dan Yogyakarta dibunyikan pada perayaan Gerebeg Maulud. Berdasarkan babad dan hikayat, di keraton-keraton lama terdapat gamelan, tarian seperti *dedewan debus*, *birahi*, *bebeksan* yang diselenggarakan pada upacara tertentu. Bahkan di antara seni yang terkenal dijadikan alat islamisasi adalah pertunjukan wayang. Menurut cerita, Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Sunan Kalijaga tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia minta agar para penonton mengikutinya mengucapkan kalimat Syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari *Mahabharata* dan *Ramayana*, tetapi sedikit demi sedikit nama tokoh-tokohnya adalah pahlawan Islam.

Nama panah *Kalimasada*, suatu senjata paling ampuh, dalam lakon wayang dihubungkan dengan Kalimat Syahadat, ucapan yang berisi pengakuan kepada Allah dan Nabi Muhammad. Kalimat Syahadat merupakan tiang pertama dari lima rukun Islam.

Islamisasi melalui seni sastra juga dilakukan secara sedikit demi sedikit seperti terbukti dalam naskah-naskah lama masa peralihan kepercayaan yang ditulis dalam bahasa dan huruf daerah, misalnya primbon-primbon abad ke-16 yang antara lain disusun oleh Sunan Bonang.[32]

Babad-babad dan hikayat-hikayat juga ditulis dalam bahasa daerah, dengan menggunakan huruf daerah dan Arab. Beberapa kitab tasawuf diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan beberapa lagi ke dalam bahasa daerah lainnya. Ajaran Hamzah Fansuri disusun dalam bentuk syair

32 R.A. Hoesein Djajadiningrat, "Islam di Indonesia", Islam Djalan Mutlak, II, Penyelenggaraan Penerbitan Kenneth W. Morgan, PT Pembangunan Djakarta, 1963, hlm. 122

Melayu; merupakan salah satu usaha agar ajaran tersebut dapat dimengerti oleh orang-orang Indonesia yang tidak mengenal bahasa Arab dan Persi.[33] Mungkin, tersebarnya bahasa Melayu atau Indonesia sebagai lingua franca pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam, juga melalui perdagangan. Di Maluku, misalnya, kita kenal *Hikayat Hitu* yang ditulis dalam bahasa Melayu; demikian juga *Hikayat Banjar* dan *Hikayat Kutai.*

B. Aliran-Aliran Islam

1. Mazhab-Mazhab

Dalam dunia Islam, kata *mazhab* dipakai untuk menyebut berbagai aliran yang terdapat dalam Islam, seperti aliran teologi (kalam), aliran hukum (fiqh atau syariat), aliran mistik (tasauf), dan sebagainya. Akan tetapi, dalam perkembangannya, kata *mazhab* biasa dipakai untuk aliran hukum (fiqh atau syariah).

Mazhab hukum dalam Islam banyak sekali jumlahnya. Namun, tidak semuanya mempunyai pengikut sampai sekarang, hanya beberapa saja di antaranya yang bertahan hingga saat ini. Mazhab hukum yang terkenal dan masih berkembang hingga sekarang adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nama-nama tersebut berasal dari nama pendirinya, yaitu Abu Hanifah (wafat 150 H/767 M), Malik bin Anas (wafat 179 H/795M), Muhammad bin Idris as-Syafi'i (lahir 150 H/767 M, wafat 204 H/820 M) dan Ahmad bin Hambal (wafat 241 H/855 M). Di antara mazhab-mazhab tersebut, mazhab Syafi'i mempunyai pengaruh besar terhadap kaum muslimin di Indonesia.

Saat awal masuknya mazhab Syafi'i ke Indonesia sukar dipastikan. Di kalangan para ahli Islam sendiri, pendapat mengenai hal itu masih berlainan. Pendapat yang berlainan itu jelas tergantung pada dasar pendirian masing-masing dalam menelaah asal-muasal kedatangan Islam di Indonesia. Hamka, misalnya, berpendapat bahwa sejak mula sekali orang-orang Indonesia telah menggali ideologi Islam ke Mekah dengan berintikan mazhab Syafi'i.[34] Hoesein Djayadiningrat menghubungkan bukti-bukti nisan di Sumatra Utara dan Gresik, ditambah dengan bukti-bukti Islam di Malabar yang ternyata menunjukkan adanya pengaruh mazhab Syafi'i.[35] Apabila

---

33 Syed Naguib Al-Attas, *The Origin of the Malay Sha'ir,* Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1968, hlm. 44–46

34 Hamka dan Muhammad Said dalam *Risalah Seminar Sejarah Masuknya Islam Indonesia di Medan,* 1963, hlm. 87–95; risalah tersebut dimuat pula oleh S. Ibrahim Boehari, *Sejarah Masuknya Islam dan Proses Islamisasi di Indonesia,* Publica, Djakarta, September 1971, 38 No. 10

35 R.A. Hoesein Djajadiningrat, "Islam Djalan Mutlak", II. Penyelenggaraan Penerbitan Kenneth W. Morgan, PT Pembangunan Djakarta, 1963, hlm. 124; C. Snouck Hurgronje, *VG,* IV, ii, 1913, hlm. 361

pendapat Djajadiningrat dihubungkan dengan tahun kedatangan Islam dari Gujarat, sebagaimana pendapat Moquette dan Snouck Hurgronye, kedatangan mazhab Syafi'i di Indonesia diperkirakan sekitar abad ke-13.

Meskipun dalam uraian terdahulu dikemukakan bahwa mungkin sekitar abad ke-7 M Islam telah masuk ke salah satu daerah di Sumatra terutama di Selat Malaka dan dibawa oleh orang-orang muslim Arab, Persia, dan India. Namun jelas, pembawa ajaran tersebut bukanlah mazhab Syafi'i. Pendiri mazhab Syafi'i, seperti telah dikemukakan, hidup antara tahun 150 H (767 M) hingga 204 H (802 M).

Pada pertengahan abad ke-14 (tahun 746 H/1345 H), Ibn Bathuthah, seorang pengelana termasyhur dari Maroko, mengunjungi Samudra Pasai dalam perjalanannya ke Cina. Ketika itu Samudra Pasai diperintah oleh Sultan al-Malik al-Zahir, putra Sultan al-Malik al-Saleh yang hidup semasa Marco Polo. Ibn Bathuthah menyatakan bahwa Islam sudah hampir seabad lamanya disiarkan di sana. Ia meriwayatkan tentang kesalehan, kerendahan hati, dan semangat keagamaan rajanya, seperti rakyatnya mengikuti mazhab Syafi'i.[36] *Dalam Babad Tjerbon* kita dapatkan pula suatu cerita tentang perkawinan Syarifah Muda'im dengan Maulana Hud yang dilakukan dengan cara Syafi'i. Dalam babad tersebut antara lain terdapat cerita tentang tanya jawab antara Sunan Gunung Jati dan Panjunan. Dikatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah ahli *sunni* (sunnah).[37] Telah kita ketahui, ahli sunnah wa al-jama'ah di Indonesia adalah penganut mazhab Syafi'i. Bukti-bukti berupa karya sastra atau sejarah yang bersifat keagamaan Islam mungkin masih banyak lagi. Hingga kini, di berbagai daerah di Indonesia tampak dengan jelas bahwa sebagian besar masyarakatnya menganut mazhab Syafi'i.[38]

Penyebaran mazhab Syafi'i di Indonesia dilakukan melalui pengajian kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i dari abad ke-16 yang biasanya menjadi pedoman antara lain *Tuhfat al-Muhtaj* karangan Ibn Hajar al-Haitami (wafat 975 H) dan *Nihayah* karangan ar-Ramli (wafat 1006 H); keduanya ditulis dalam bentuk tafsir dari *Minhaj at-Thalibin* karangan an-Nawawi (wafat 676 H) yang merupakan ringkasan dari *Muharrar*-nya Imam Rafi'ii.

Di samping itu, ulama-ulama Indonesia sejak awal abad ke-17 juga menulis kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Nuruddin ar-Raniri (wafat 1659 M) menulis sebuah buku sederhana tentang fiqh dalam bahasa Melayu, *as-Shirath al-Mustaqim*, yang terus dibaca di beberapa daerah Indonesia. Lalu

---

36 Dipetik dari R.A. Hoesein Djayadiningrat, *op. cit.*, hlm. 120

37 J.L.A. Brandes-D.A. Rinkes, "Babad Tjerbon, Uitvoerig inhoudsopgave en noten", *VBG*, LIX,1911, hlm. 97, nyanyian 21, pupuh 10

38 *Ibid.*, hlm. 35, nyanyian 3, pupuh 10–11

Abdurrauf al-Singkili, yang terkenal sebagai guru tarekat Syattariyah dan pengarang karya-karya sufi, juga menulis *Mir'at at-Thullab fi Ash Ma'rifat al-Ahkam al-Syar 'iyah li al-Malik al-Wahhab*, sebuah karya fiqh Syaf'i.[39] Selain itu, beberapa kitab fiqh terkenal mazhab Syafi'i juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu atau bahasa Jawa. Salah satu dari sejumlah manuskrip lama dari Jawa yang dibawa ke Eropa oleh para pelaut pada sekitar tahun 1600 adalah sebuah teks fiqh berbahasa Arab yang sangat terkenal, *At-Taqrib ft al-Fiqh* dengan terjemahan bahasa Jawa.[40]

2. Sekte-Sekte

Sekte-sekte dalam Islam adalah mazhab-mazhab atau aliran-aliran yang timbul akibat perbedaan pendapat dalam bidang teologi (kalam atau ushuluddin). Munculnya sekte-sekte tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari pertikaian politik yang muncul pada zaman klasik Islam. Pada awal perkembangan Islam di Indonesia sekitar abad ke-13, di dunia Islam terdapat dua sekte besar, yaitu Sunni dan Syi'ah. Sunni pada saat itu mempunyai pengaruh yang lebih besar karena sejak awal abad ke-11 kaum Sunni berhasil meraih kembali kontrol politik atas kebanyakan wilayah Timur yang sebelumnya banyak dikuasai kaum Syi'ah. Penguasa-penguasa Sunni, seperti Ghaznawi (di Transoxania dan Afghanistan, 444–582 H/1052–1186 M), Saljuk (Anatolia, Syria dan Irak, 429–700 11/1037–1300 M), dan Ayyubi (Mesir, Yaman, Syria dan Irak, 564–900 H/1169–1500 M) meski sering terlibat konflik di antara mereka sendiri, mampu membendung pasang naik kaum Syi'ah. Di bawah payung Khalifah Abbasiyah di Baghdad, mereka sungguh-sungguh menjalankan kebijaksanaan kembali kepada ortodoksi Sunni.[41] Berdasarkan tinjauan ini, sekte yang dianut oleh orang-orang muslim Indonesia adalah Sunni dengan berlandaskan paham Asy'ari dan al-Maturidi. Informasi yang diperoleh dari *Babad Tjerbon* yang menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati adalah sunni mendukung pernyataan ini.[42]

Sungguhpun orang-orang muslim Indonesia menganut paham Sunni, di beberapa daerah terdapat tradisi dan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan unsur Syi'ah. Perbedaan utama antara kaum Sunni dan kaum Syi'ah adalah bahwa bagi kaum Sunni, Nabi Muhammad wafat tanpa menunjuk seseorang untuk menggantikannya sebagai pemimpin kaum muslimin sehingga kepemimpinan Abu Bakar yang diangkat melalui

---

39 Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat. Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, Bandung, Mizan, 1995, hlm. 115

40 *Ibid.*

41 Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulaun Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung, Mizan, 1994, hlm. 62

42 Lihat catatan kaki 36

proses pemilihan dinyatakan sah. Bagi kaum kaum Syi'ah, sebelum wafat, Nabi Muhammad telah menunjuk Ali bin Abi Thalib (saudara sepupu dan menantu beliau) dan keturunannya untuk menjadi pengganti beliau memimpin kaum muslimin. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib dan keturunannya (Ahl al-Bait) mendapat kehormatan tinggi di kalangan pengikut Syi'ah. Di Indonesia, pengaruh Syi'ah misalnya dapat dilihat dari perayaan 10 Muharam, yaitu hari peringatan wafat syahidnya Husain bin Ali (cucu Nabi Muhammad) di Karbela 10 Muharam 16 H. Pada hari itu banyak sekali keluarga muslim membuat masakan khas yang disebut *bubur sura* yang berasal dari kata *Syura* dalam bahasa Iran atau *'Asyura'* dalam bahasa Arab yang berarti tanggal 10 Muharam. Dalam bahasa Jawa bulan Muharam disebut *bulan sura* dan di Aceh disebut bulan *Asan-Usen*, berasal dari nama Hasan dan Husein, anak Ali bin Abi Thalib (cucu Nabi Muhammad). Di Minangkabau, bulan Muharam disebut bulan *Tabui*.[43]

Di beberapa tempat di Indonesia, terutama di Sumatra Barat dan Bengkulu, pada tanggal 10 Muharam diadakan upacara peringatan wafatnya Husein. Di Pidie dan di berbagai tempat di pesisir utara dan timur pulau Sumatra, orang-orang Keling juga turut serta mengambil bagian dalam upacara mengarak *tabut*, atau sebuah keranda mayat lambang mayat Husein. Keranda digotong sepanjang jalan kemudian dilempar ke sungai atau ke dalam perairan lainnya. Di Jawa *bubur sura* biasanya dibuat dari bahan-bahan bermacam-macam butiran jagung, kacang-kacangan, dan sebagainya, dicampur dengan kelapa yang ditaruh di atas bubur beras yang disajikan.

Di Aceh, *kanji acura* terdiri dari beras, santan, gula, dan bermacam-macam buah-buahan, seperti pepaya (*bot peute*), delima (*boh gelima*), pisang, tebu, kacang-kacangan (*reutue*), dan bermacam-macam umbi-umbian yang dapat dimakan. Di Hindunistan makanan demikian disebut *khistsyri*, di Kairo *huhbub*, yaitu padi-padian atau gandum. Akan tetapi, *kanji acura* tidak dimasak di setiap rumah; beberapa wadah penuh *kanji acura* dibuat untuk suatu *gampong* dan dibuat di *meunasah*. Hari-hari sebelum tanggal 10 Muharam dipercaya sebagai hari-hari yang celaka. Pada waktu-waktu itu orang tidak boleh mengerjakan pekerjaan penting, tidak boleh melangsungkan perkawinan, karena dianggap gampang bercerai, atau dapat meninggal salah satu pasangan, suami atau istri, tidak boleh menyunati anak, dilarang menanam padi. Di Aceh, anehnya, motif larangan-larangan tersebut dinyatakan dalam bulan Asura sebagai bulan api (*buluein apuy*).[44]

Ciri-ciri tentang tokoh Ali yang lebih menonjol dari pahlawan-pahlawan Islam lainnya mungkin menunjukkan pula kuatnya unsur-unsur

43 R.A. Hoesein Djajadiningrat, *op. cit.*, hlm. 123
44 Snouck Hurgronje, *De Atjehers, Uitgegeven op last der regeering*, dl. I, Batavia-Leiden, 1893, hlm. 214–219

Syi'ah. Kebiasaan-kebiasaan lainnya yang menunjukkan unsur-unsur Syi'ah mungkin masih banyak dan agaknya perlu penelitian lebih mendalam. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa kaum muslimin di Indonesia yang termasuk beraliran Sunni juga melakukan kebiasaan-kebiasaan Syi'ah.

C. Pemikiran Islam dan Pengaruhnya

1. Figh (Syari'ah)

Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa dalam bidang fiqh atau syariah, kaum muslimin Indonesia menganut mazhab Syafi'i. Agaknya perlu diketahui mengapa mazhab ini mudah diterima dan dianut oleh bangsa Indonesia; bagaimana terjadinya persesuaian antara Syari'ah menurut ajaran Syafi'i dan adat kebiasaan pra-Islam di negeri ini.

Syari'ah menitikberatkan pada lima dasar pokok Islam, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji; juga mengatur urusan perkawinan, kekeluargaan,warisan, perdagangan, dan kegiatan politik. Dalam hal adat, syari'ah memegang peran penting. Adat adalah aturan, kebiasaan, dan cara-cara pra-Islam yang lazim dianut atau dilakukan meskipun tidak seluruhnya selalu dapat disesuaikan dengan syari'ah.[45]

Di kota-kota besar dan kecil serta pelosok-pelosok yang terdapat banyak masyarakat muslimnya, didirikan masjid-masjid untuk sembahyang berjamaah. Dari cerita babad dan hikayat diketahui, raja-raja, kaum bangsawan dan rakyat secara bersama-sama melaksanakan sembahyang, terutama sembahyang Jumat, Idulfitri, dan Iduladha yang sering pula disebut sembahyang Raya. Masjid Agung Demak dan Cirebon, dalam cerita dikenal sebagai sebagai tempat bersembahyang berjamaah Wali Sanga. Pada masa-masa lalu, banyak wanita di Indonesia bersembahyang di masjid-masjid bersama-sama dengan kaum pria. Hal itu dapat dilihat dari adanya *pawestren* atau *pawedonan* (tempat istri/wanita) di dalam masjid-masjid kuno.[46]

Menarik perhatian bahwa dalam ibadah sembahyang di sebagian masyarakat Lombok hingga kini ada yang dinamakan sembahyang *watu telu*, yaitu sembahyang yang hanya dilaksanakan tiga kali sehari. Ini berlawanan dengan golongan muslim yang bersembahyang lima kali sehari dalam lima waktu yang merupakan kewajiban bagi ahli sunnah wal-jamaah. Mereka dikenal sebagai suatu sekte yang berpegang pada kebiasaan

45 R.A. Hoesein Djajadiningrat, *op. cit.*, hlm. 129
46 G.F. Pijper, *Fragmenta Islamica: Studien voor het Islamisme in Nederlansch Indie*, Leiden, 1934, hlm. 16–17, 38–40, 48–49

tradisional yang disebut adat, bersama dengan syariah. Adat mereka adalah hukum kebiasaan, misalnya ada kebiasaan bahwa tidak seorang pun wanita dapat mewarisi sawah, sedangkan agama Islam tidak mengecualikan wanita dari warisan semacam itu.[47]

Zakat yang merupakan dasar pokok Islam yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin Indonesia dengan memberikan sedekah kepada orang-orang miskin, terutama *zakat fitrah* yang biasa dilakukan pada akhir bulan Ramadan. Di Indonesia umumnya, bulan Ramadan disebut bulan Puasa dan di Jawa disebut pula dengan bahasa halus yaitu *sasi Syam* atau *Saum*. Pada bulan itu dilakukan sembahyang tarawih setiap malam setelah sembahyang Isya. Orang-orang yang taat, selama satu bulan penuh benar-benar berpuasa, tidak makan dan minum, serta menahan segala hawa nafsu pada siang hari. Dalam *Adat Makuta Alam* dari zaman Iskandar Muda di Aceh disebutkan tentang kurnia sultan pada hari sebelum puasa kepada *uleebalang po-teu* (*uleebalang* yang tidak berwilayah). Sembahyang pada Hari Raya Puasa dan Haji di Masjid Baiturrahman harus dihadiri oleh sultan.[48]

Di Mataram, sultan melakukan sembahyang bersama-sama di masjid pada hari Jumat, dan juga pada hari Garebeg Hari Raya Puasa, meskipun bukan tahun *Dal*. Hal itu kita ketahui dari berita asing pada tanggal 9 Agustus 1622.[49] Menjelang hari Idul Fitri biasanya orang-orang sibuk membuat pakaian baru untuk dipakai pada hari raya tersebut. Sangat menarik perhatian kita bahwa di Banten menurut berita Willem Lodewycksz (1596), menjelang Idul Fitri orang-orang sibuk membuat pakaian sehingga dikatakannya seolah-olah semua orang menjadi tukang-tukang jahit.[50] Pada malam hari beduk dipukul bertalu-talu, suatu tanda pemberitahuan sebelum melakukan sahur dan sembahyang hari raya. Pada hari-hari biasa, beduk dan kentongan dipukul pula, tetapi terbatas menjelang sembahyang. Pada zaman dahulu, alat beduk atau kentongan sangat berguna bagi pengganti jam. Hal itu sesuai dengan tradisi bangsa Indonesia yang telah memiliki dan menggunakan alat tersebut sebagai tanda pemberitahuan atau panggilan dalam mengumpulkan orang-orang, baik dalam keadaan bahaya maupun untuk upacara-upacara keagamaan.

Tentang haji, yaitu rukun Islam kelima, agaknya sejak hubungan langsung dengan Mekah, orang-orang muslim dapat melakukan ibadah

---

47 R.A. Hoesein Djajadiningrat, *op. cit.*, hlm. 127

48 Moehammad Hoesein, *Adat Atjeh*, Penerbitan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970, hlm. 208

49 H.J. de Graaf, "De Regering van Sultan Agung, Vorst van Mataram 1613–1645, en Die Zijn Voorganger, Panembahan Seda-Ing-Krapjak 1601–1613", *VKI*, 's-Gravenhage, 1958, hlm. 103

50 G.P. Rouffaer en J.W. Ijzerman, *De Eerste Schipvaar der Nederlanders naar Oost-Indie ander Cornelis de Houtman 1595–1597, De Eerste Boek van Willem Lodewijcksz*, 's-Gravenhage, 1915, hlm. 114

haji. Beberapa orang tokoh, pernah diceritakan dalam babad atau hikayat, naik haji, seperti Rara Santang dan Cakrabuana yang kemudian berganti nama Sarifah Muda'im dan Haji Duliman. Sultan Abunasar Abdul Kahar dari Banten sekembalinya dari Mekah terkenal dengan julukan Sultan Haji. Sultan ini pergi ke Mekah dua kali, yaitu pada tahun 1669 sampai tahun 1671 dan dari tahun 1674 sampai 1676. Pangeran Arya Ranamenggala dari Banten juga seorang haji.[51] Sudah tentu pada masa-masa dahulu orang yang menunaikan kewajiban haji tidak sebanyak abad-abad ke-19 dan ke-20. Pada tahun 1852–1858 rata-rata 2.000 orang muslim Indonesia pergi naik haji. Pada tahun 1889 sejumlah 3.100 orang, dan tahun 1896 berjumlah 11.700 orang. Rata-rata per tahun yakni sejak sepuluh tahun sesudah tahun 1880 orang Indonesia yang pergi haji ada 7.000 orang.[52] Pada tahun 1930 orang Indonesia yang naik haji ada 30.000 orang dari 85.000 orang yang berasal dari luar negeri Arab. Jumlah orang Indonesia yang melakukan ibadah haji tersebut merupakan bukti akan daya hidup dan semangat Islam di antara penduduk kepulauan itu. Penduduk kebanyakan harus menabung bertahun-tahun agar dapat menunaikan tugas suci itu. Jadi, keinginan untuk menunaikan kewajiban ibadah haji itu pasti sangat kuat di Indonesia.[53]

Sebagaimana telah dikatakan, adat memegang peran penting meskipun tidak semuanya dapat disesuaikan dengan syariah. Perkawinan, misalnya, dapat dilakukan dengan cara syariah maupun adat, yaitu akad nikah dilakukan dengan syarat-syarat syariah Islam, tetapi upacara lainnya dilakukan menurut adat setempat.Biasanya setelah akad nikah mempelai laki-laki harus membacakan janji-janji terhadap mempelai perempuan yang lazim disebut *ta'liq thalaq*. Menurut leluri Jawa, *ta'liq* diadakan mula-mula oleh seorang sultan yang bersama beberapa orang prajuritnya kembali dari suatu ekspedisi yang sangat lama. Namun, istri mereka telah kawin lagi dengan orang lain. Hakim agama telah memutuskan tali pernikahan mereka dengan alasan bahwa suaminya telah meninggalkan istrinya tanpa memberi nafkah sepantasnya. Hal yang demikian membawa syarat baru bahwa talak tidak gugur apabila kepergian suami disebabkan oleh perintah yang berkuasa.[54]

Mengenai warisan menurut syariah, perbandingan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2 banding 1. Di Indonesia hal berlainan karena disesuaikan dengan adat yang menyatakan bahwa baik anak laki-laki

---

51 J.L.A. Brandes, D.A. Ringkes, *op. cit.*, hlm. 29, nyanyian 1, pupuh 4; B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, II, The Hague & Bandung: van Hoeve, 1955, hlm. 242

52 C. Snouck Hurgronje, *op. cit.*, hlm. 178, 183

53 R.A. Hoesein Djajadiningrat, *op. cit.*, hlm. 128

54 *Ibid.*, hlm. 129

maupun perempuan memperoleh warisan yang sama besarnya. Ajaran yang bertentangan dengan syariah Islam tentang warisan pada agama *waktu telu* di Lombok adalah melarang perempuan menerima warisan sawah; sedang dalam syariah batasan hal itu tidak ada sama sekali. Di antara keluarga nelayan yang mendapat warisan perahu adalah anak laki-laki, sedang anak perempuan mendapat warisan rumah. Di daerah Minangkabau hukum waris menurut syariah Islam tidak diikuti. Di sana berlaku hukum keluargaan garis ibu, karena harta kekayaan perseorangan yang diperoleh sendiri oleh si peninggal jatuh kepada kaum kerabat dari pihak ibu sebagai harta milik keluarganya.

Ditinjau dari kenyataan bahwa islamisasi yang dahulu di Minangkabau lebih bersifat praktik-praktik tarekat serta perumusan kembali ketetapan yang berlaku, masuknya agama Islam tidaklah secara serius mengancam akar-akar dasar masyarakat Minangkabau. Unsur-unsur baru yang dibawanya tidaklah berarti kehilangan kultural, tetapi malah menambah kekayaan kultural. Namun, secara ironis Islam menambahkan dimensi lain dari konflik internal yang berlanjut. Ketegangan yang terdapat antara kesinambungan dan perubahan antara "tradisi besar" dan variasi-variasi lokal adat, dibentuk oleh tradisi yang terkandung dalam doktrin Islam, terlepas dari dilema abadi bahwa dalam doktrin agama timbul kesatuan dan perpisahan dari alam dan adikodrati, agama Islam juga menghadapi ketegangan antara universalitasnya yang dicita-citakan serta parokialisme yang nyata. Dengan jalan menghindari pertentangan yang potensial antara diri dan alam semesta pada tahap masuknya yang mula-mula sekali, Islam dapat membentuk kembali pola nilai masyarakat sehingga Alquran dan Hadis mendapat tempat paling utama. Untuk itu, dalam konteks demikianlah kita hendaknya memahami pendapat dalam sumber-sumber adat Minangkabau yang paling tua bahwa *adaik basandi syara', syara' basandi adaik*. Karena dalam arti demikian tidak ada paradoks dalam pola perilaku ideal antara adat dan agama, maka tidak ada perbedaan antara *adaik nan sabana adaik* dan ajaran-ajaran Alquran dan Hadis.[55]

Penyatuan antara adat dan syari'ah juga terjadi di daerah-daerah lannya seperti di Aceh dengan adanya *Adat Meukota* (Mahkota) *Alam* yang diwarisi Sultan Iskandar Muda. Lazimnya adat tersebut diperbuat sesudah diadakan permusyawaratan dengan kabinet/dewan, ahli hukum, ahli adat, dan orang-orang besar yang diperlukan.[56]

---

55 Taufik Abdullah, "Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau," *Indonesia*, II, Oktober 1961, Modern Indonesian Projeckt, Cornell University, Ithaca, New York, hlm. 1–12

56 Moehammad Hoesein, *op. cit.*, hlm. 206–208

2. Tasawuf

Telah dikatakan bahwa tasawuf merupakan salah satu saluran islamisasi yang penting di Indonesia. Kata *tasawuf* adalah bentuk *masdar* dari kata dasar *suf* yang artinya *wol* yang biasanya dipakai sebagai jubah (*labs al-suf*) oleh orang-orang yang menjalankan kehidupan mistik atau yang disebut *sufi*.[57] Kecuali itu, tasawuf sering dihubungkan dengan pengertian *suluk* yang juga berasal dari bahasa Arab yang berarti *perjalanan*. Oleh ahli-ahli tasawuf pengertian *suluk* dipergunakan untuk menggambarkan perjalanan mistik, yaitu perjalanan menuju Tuhan yang dimulai dengan memasuki *tarika* atau perjalanan di bawah pimpinan seorang syekh dan akhirnya dengan usaha mencapai tingkat kejiwaan yang tertinggi menurut kemampuannya.[58]

Di Indonesia istilah *suluk* banyak dipakai untuk menyebutkan beberapa karangan tertentu yang berisi uraian mistik yang dibentuk dalam tembang dan pada umumnya berupa tanya jawab antara suami dan istri. Dalam bagian awal *Buku Bonang*, istilah *suluk* itu jelas dipakai untuk menunjukkan orang-orang yang mempunyai pengetahuan mistik Islam. Hamzah Fansuri menyebut ajaran-ajarannya ilm as-Suluk. Hal itu mungkin sekali ada hubungannya dengan apa yang disebut kini di Aceh *eleumee sale* bagi mistik Islam yang heterodoks. Demikian pula istilah *suluk* banyak dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan zikir dan *tarika* sendiri.[59]

Kedatangan ahli-ahli tasawuf ke Indonesia diperkirakan terutama sejak abad ke-13, yaitu masa perkembangan dan persebaran ahli-ahli tasawuf dari Persia dan India. Meskipun demikian, di Indonesia perkembangan ahli-ahli tasawuf dengan ajarannya tampak dengan nyata sekitar abad-abad ke-16 dan ke-17, terutama di Sumatra dan Jawa. Pada abad-abad itu di Aceh hiduplah beberapa ahli tasawuf, seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-samatrani, ar-Ranisri, dan Abdurrauf dari Singkel. Di Jawa pada abad ke-16 dikenal Wali Sanga yang juga di antaranya mengajarkan tasawuf seperti Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang, Sunan Bonang, Sunan Panggung, dan lain-lainnya.

Jika didasarkan pada kitab-kitab karangan ahli-ahli tasawuf serta tradisi-tradisinya, ajaran tersebut dapat dibagi menjadi dua aliran, yang heterodoks dan ortodoks. Ajaran Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Samatrani dimasukkan ke dalam aliran yang heterodoks. Keduanya mengajarkan paham yang disebut *wujudiyya*, karena memandang bahwa wujud makhluk-makhluk yang dibesarkan sebenarnya tidak ada, yang

---

57 H.A.R. Gibb and J.H. Kraemer, *ShorterEncyclopaedia of Islam*, Leiden, 1953, hlm. 579

58 *Ibid.*, hlm. 551

59 Hendrik Kraemer, *Een Javaansche Primbon uit de Zestiende eeuw: Inleiding, vertaling en aantekeningen*, Academisch Proefschrift, Leiden, 1921, hlm. 59–61

ada hanyalah wujud Penciptanya. Nama yang lebih populer dari ajaran keduanya adalah "Martabat Tujuh", yaitu suatu ajaran tentang emanasi yang erat sekali dengan ajaran Ibn al-'Arabi.[60] Ibn al-'Arabi telah mengajarkan bahwa semua benda di alam semesta ini harus terpancar (emanasi) dari pra-pengetahuan ke-Ilahi-an: mereka telah ada terlebih dahulu di dalam bentuk ide dan pancaran itu berlangsung sebagai aliran yang berkembang dalam lima tahap. Di dalam diri manusia, yang merupakan tahap keenam, evolusi dapat terlepas, karena jiwa dapat bersatu kembali dengan esensi ke-Ilahi-an dengan melihat tembus bentuk luar pluralitas yang palsu ini. Manusia telah menyadari kebenaran asasi bahwa wujud semua makhluk tidak lain adalah sebenar-benar esensi Khaliknya, maka itu doktrin ini dinamai *wujudiyyah*.[61]

Kemiripan ajaran Hamzah Fansuri dengan ajaran Ibn al-'Arabi tampak dari pentamsilan Yang Mutlak dengan laut. Pentamsilan ini bukan pikiran asli Hamzah Fansuri melainkan pentamsilan tradisional yang didapat pada ajaran Ibn al-'Arabi. Dalam semua penjelasannya ia berkali-kali kembali kepada pengibaratan laut. Berbeda dengan Hamzah, Syamsuddin menggunakan istilah-istilah umum untuk menggambarkan tingkat-tingkat emanasi Yang Mutlak, yaitu *Ahadiyah* yang dinyatakan sebagai tingkat yang tanpa perbedaan yaitu *la ta'ayyun*, tingkat ini merupakan peningkatan yang abstrak. Kemudian *wahda*, tingkat pembedaan awal, yaitu *ta 'ayyun awwal*, dan tingkat kesatuan; kemudian *wahidiyyah* atau tingkat perbedaan kedua, yaitu *ta'yyun tsani*, di mana kesatuan dalam keserbaan; kemudian alam arwah, yaitu tingkat semua ruh, *alam mitsal*, tingkat semua bentuk atau dunia semua atau *ajsaam*, tingkat semua badan atau dunia kausal, dan akhirnya *alam insane*, yaitu tingkat manusia atau dunia manusia sempurna atau *'alamal-insanal-kamil*.

Hamzah Fansuri juga menggunakan istilah-istilah tersebut tetapi tidak dengan cara yang sistematis.[62] Ringkasnya Hamzah Fansuri dan Syamsuddin mengajarkan bahwa Allah adalah Yang Mutlak. Yang Mutlak ini juga dipandang sebagai emanasi atau berada di dalam semua makhluk. Ia adalah batin dari segala yang tampak. Emanasi ini juga terjadi karena pengejawantahan dalam tujuh tingkatan yang dapat digabungkan menjadi tiga, yaitu *la ta'ayyun* (tanpa perbedaan), *ta'yyun awwal* dan *tsani* (perbedaan pertama dan kedua) yang kemudian melahirkan *a'yan tsabita* atau realitas-realitas yang terpendam. Akhirnya terdapat tingkatan *a 'yan kharija*, yaitu realitas-realitas yang mengalir ke luar sesudah sabda *kun fa yakun*.

---

60 G.W.J. Drewes, "Indonesia, Mysticism and Activism", dalam Gustave E. Von Grunebaum, (Ed.), *Unity and Variety in Muslim Civilization*, The University of Chicago Press, 1963, hlm. 289

61 *Ibid.*, hlm. 290

62 Harun Hadiwijono, *Man in Present Javanese Mysticism*, (proefschrift) Amsterdam, Bosen & Keuning NV, Baarn, 1967, hlm. 72

Manusia dipandang sebagai pengejawantahan terakhir Yang Mutlak dan mengakhiri segala pengejawantahan sehingga manusia dipandang sebagai pengejawantahan yang terlengkap. Ia menjadi tempat pernyataan segala sifat dan nama Allah. Ia adalah mikrokosmos yang di dalamnya mengandung makrokosmos. Karenanya manusia dianggap gambar-bayang Allah yang sempurna. Manusia sebagai pengejawantahan tingkat terakhir dipandang sebagai permulaan jalan kembali ke Allah (*taraqqi*). Karena sembrono (*ghaflat*) manusia terikat oleh dunia fana sehingga tidak dapat melihat segala yang ada dalam keadaan yang sebenarnya. Ia mengira jasmani dan rohani adalah beraneka ragam, sebenarnya tidak demikian. Segala yang tampak beraneka ragam ini sebenarnya tutup yang menutupi keadaan Allah yang sebenarnya. Pengenalan diri-Nya pada manusia akan menghapuskan tutup atau dinding tersebut sehingga menyadari dan melihat bahwa dunia ini adalah *wahina*. Manusia sempurna harus dapat *fana'* atau hapus dari keduniawian, dalam arti bahwa *junanga* harus sampai kepada *fana' al-fana'*, yaitu hapus dari segala bukan Yang Mutlak, juga hapus yang menyembah dan yang disembah.[63]

Ajaran *wujudiyya* yang heterodoks jelas: mengapa segala sesuatu serba Tuhan, bersifat *panteistis-monistis* seperti halnya pada agama Ciwa dan Buddha Mahayana yang telah dikenal sebelum kedatangan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, emanasi dalam tujuh tingkatan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu *la ta'ayun* (tanpa pembedaan) yang sejajar dengan *niskala* dalam agama Ciwa dan *dharmakaya* dalam agama Buddha Mahayana; tingkatan kedua adalah *ta'ayyun awwal* dan *tsani* (pembedaan pertama dan kedua) yang melahirkan *a'yan tsabita* atau realitas-realitas terpendam yang hakikatnya disebut bukan Khalik dan bukan makhluk sehingga dapat dipandang sejajar dengan *sakala-niskala* di dalam agama Ciwa serta *Sambhogakaya* dalam agama Buddha Mahayana; akhirnya tingkatan *a'yan kharija*, yaitu realitas-realitas yang mengalir ke luar sesudah sabda *kun fa yakun*, yang dapat disamakan dengan *Sakala* di dalam agama Ciwa dan *Nirmanakaya* dalam agama Buddha Mahayana. Demikianlah titik-titik pandang tentang ketuhanan yang sudah ada. Itulah mungkin antara lain yang menyebabkan Islam melalui ajaran tasawuf lebih mudah diterima oleh orang Indonesia terutama di Sumatra dan di Jawa.

Di Aceh ajaran Hamzah Fansuri dan Syamsuddin mendapat perlindungan dari Sultan Iskandar Muda. Dengan adanya dukungan dari penguasa yang tertinggi, yaitu Sultan Iskandar Muda, Hamzah Fansuri beserta muridnya, Syamsuddin as-Samatrani, banyak menghasilkan karangan. Fansuri menuliskan ajaran-ajarannya dalam bentuk prosa dan

63 *Ibid.*, hlm. 253–254

syair dalam bahasa Arab dan Melayu. Karangan-karangan Hamzah Fansuri, antara lain *Syarab al-'syigina, Asrar al- 'arifina fi bayan 'ilm assuluk wa at-tauhid*; dalam bentuk syair yang terkenal: *Rubba al-muhaqqiqina, Kasyf sirr at-tajalli as-subhani, Muntahi pada merajanakan sabda Nabi Allah, Man 'arafa nafsahu 'arafa rabbahu, Miftah al-asrar, Syair si Burung Pingai, Syair Perahu, Syair Sidang Fakir, Syair Dagang*. Karangan-karangan Syamsuddin ibn Abdullah as-Samatrani, antara lain *Mir'at al-mu'min, Mir'at al-Muhaqqiqina, Syarh ruba' Hamzah al-Fansuri, Jauhar al-Haq'aiq,Tambih al-Tullab fi ma'rifat al-Malik al-Wahhab*.[64]

Ajaran-ajaran Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Samatrani mendapat tantangan dari Nur ad-Din ar-Raniri yang nama lengkapnya disebut Nur ad-Din bin Hasanji bin Muhammad Humaid ar-Raniri. Menurut G.W.J. Drewes ia berasal dari Ranir, yaitu Rander di Gujarat kini. Ia berasal dari keluarga Hadramaut-India.[65] Menurut Hoesein Djajadiningrat, Nur ad-Din ar-Raniri datang ke Aceh ketika masih muda. Akan tetapi, karena waktu itu tidak mendapat perhatian dari Sultan Iskandar Muda, setelah sultan tersebut diganti dengan Sultan Iskandar Tsani, Nur ad-Din kembali ke Aceh pada tahun 1637 sampai tahun 1644 di mana ia banyak menulis kitab-kitabnya.[66]

Sebagaimana telah dikatakan di atas bahwa Nur ad-Din bertentangan dengan ajaran heterodoks dari Hamzah Fansuri dan Syamsuddin, kerap kali Nur ad-din berdebat melawan ajaran Syamsuddin di hadapan sultan. Syamsuddin seperti halnya Hamzah berpendapat bahwa Allah itu ruh dan wujud Tuhan. Dikatakan oleh Nuruddin bahwa mereka yang mengajarkan demikian adalah orang kafir. Nur ad-Din menganjurkan kepada sultan supaya orang-orang tersebut dihukum dan buku-bukunya dibakar. Dalam karangannya, *Asrar al-Insan fi ma'rifat ar-ruh wa ar-Rahman*, Nuruddin dengan tegas melawan pendapat bahwa ruh itu kadim. Menurut dia, ruh itu diciptakan oleh Tuhan. Ia melawan keras perkataan "Ana al-Haq", dan dalam kitab tersebut di atas ia mengatakan bahwa ruh dicipta dan mengetahui bagaimana keadaannya, karena kalimat: "*man 'arafa nafsahu fa qad 'arafa rabbahu*" diartikan sebagai berikut: "siapa yang mengenal dirinya sebagai makhluk, maka ia akan mengenal Tuhannya sebagai Sang Pencipta. Siapa yang mengenal dirinya sebagai fana, ia akan mengenal Tuhannya sebagai baka". Ia membandingkan ruh dengan Tuhan. Ruh tidak dapat diketahui tempat tinggalnya, tetapi terang ia ada. Demikian juga Tuhan, Ia terang ada, tetapi tidak dapat diketahui di mana Ia. Dalam kitab tersebut

---

64 Hendrik Kraemer, *op. cit.*, hlm. 28–32

65 G.W.J. Drewes, "De Herkomst van Nuruddin ar-Ranisri", *BK I*, III, 1955, hlm. 150

66 R.A. Hoesein Djajadiningrat, "Critisch Overzicht van de Malaische Werken verbatten gegevens van het Sultanaat van Atjeh", *BKI*, 65, 1911, hlm. 186

dikatakan bahwa ruh itu dicipta dan orang tidak dapat mengetahui bagaimana keadaannya, karena ini hanya Tuhan yang tahu.

Nama Nur ad-Din tersiar sampai di luar Aceh. Dalam sejarah Kedah dikatakan bahwa ketika sultan Aceh dan Nur ad-din mendengar bahwa Kedah telah memeluk Islam karena jasa Syekh 'Abd Allah dari Yaman, mereka lalu mengirim karangan Nur ad-din yang berjudul *Shirat al-mustakim*. Menurut Tujimah, berdasarkan hasil telaahannya dari karangan Nur ad-Din, *Asrar al-Insan fi ma'rifat ar-ruh wa ar-Rahman*, ia adalah seorang ahli ketuhanan yang ulung, yang banyak mengetahui kitab-kitab karangan ahli-ahli filsafat yang terkenal seperti Ibn 'Arabi, Imam al-Ghazali, Abd Razzak al-Karyani, Najm ad-Din ar-Razi, dan Abu Syukur as-Salami. Tidak kurang dari 50 di antara filsuf itu disebut dalam karangan *Asrar al-Insan* tersebut, sedang kitab yang berisi tasawuf lebih dari 10 buah yang diambilnya sebagai sumber. Tentang kepandaiannya menggunakan bahasa Arab menurut Tujimah, tidak begitu baik. Banyak kesalahan di dalamnya yang berasal dari penulisnya sendiri. Kesalahan-kesalahan ini kebanyakan tata bahasanya, sedangkan kesalahan-kesalahan dalam harakahnya dapat berasal dari pengutipnya.[67] Di antara karangan-karangan Nur ad-Din itu dapat dikemukakan di sini: *Asrar al-Insan fi Ma'rifat ar-Ruh wa ar-Rahman, Sirat al-Mustakim, Durrat al-Faraid bi Syarh al- 'aqaid, Hidayat al-Habib fi at-Targhib wa at-Tarhib, Bustan as-Salatin fi dzikr al-awwalin wa al-akhirin, Nubdza fi da'wa al-zill ma 'a shahibihi, Latha'if alasrar, Akhbar al-akhirat Fi ahwal al-kiyama, Hill al-zill, Ma' al-hayat li ahl almamat, Jawahir al-'ulum fi kasyf al-ma'um, 'Umdat al-I'tigad, Syifa' al-qulub, Hujjat al-shiddiq li ahl al-zindiq, Fath al-mubin 'ala al-mulhidin, Kitab al-salat,* dan *Al-Lam 'u bi takfiri man qala bi khalq al-Qur'an*.[68]

Setelah Sultan Iskandar Tsani wafat tahun 1641, Nur ad-Din kembali ke Rander di India dengan menulis buku *Jawahir 'ulum fi kasyf al-ma'lum*. Sebagaimana telah dikatakan di atas, ia kembali ke Aceh pada masa pemerintahan Sultanah Shafiatuddin. Pada masa pemerintahan Sultanah Taj al-'alam Shafi ad-din ia mendapat perintah untuk menulis buku tentang agama dan tarekat. Buku itu berjudul *Tibyan fi Ma'rifa al-Adyan*. Pada akhir kitab tersebut terdapat angka tanggal dan tahun, yaitu 9 Rajab 1063 H (27 Mei 1654).

Telah disebut pula nama Abd ar-Rauf dari Singkel yang setelah wafatnya terkenal dengan nama Syekh Kuala atau Teungku di Kuala. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1620 di Singkel. Pada tahun 1642 ia pergi ke Arabia dan tinggal selama 19 tahun di sana untuk mempelajari pengetahuan agama.

---

67 Tujimah, *Asrar al-Insan fi Ma'rifat ar-Ruh wa ar-Rahman*, Tesis Universitas Indonesia, PT Penerbitan Universitas, Jakarta, 1960, hlm. 5–8

68 *Ibid.*, hlm. 9–22

Gurunya yang terkenal adalah Ahmad Kusyasyi. Setelah kembali pada tahun 1661 ke Aceh, ia mendirikan pesantren atau rangkang dekat muara sungai Aceh. Ajaran tasawuf dari tarekat Syattariyah menjadi pusat perhatiannya serta tersebar ke berbagai tempat di Indonesia dan Malaya. Di antara muridnya yang terkenal adalah Syekh Burhanuddin dari Ulakan Minangkabau yang di daerahnya dianggap sebagai pelopor Islam dan mengajarkan Islam dengan intensif ke daerah pedalaman.

Abd ar-Rauf yang bermazhab Syafi'i dengan ajaran tasawufnya dari aliran Syattariyah termasuk golongan yang menganut paham yang dinamakan *wandat as-Syuhud*, yang tidak berbeda dengan aliran Nurur ad-Din ar-Raniri. Jadi, ia menentang pula paham aliran *wujudiyya* yang heterodoks.

Kegiatan Abd ar-Rauf sebagian besar terjadi pada masa pemerintahan Sultanah Shafiatuddin. Di antara karangannya yang terkenal adalah *Mir'at at-Tullab fi Tashi/Ma'rifat al-Ahkam as-Syar 'iyah li Malik al-Wahhab*. Buku tersebut merupakan pengantar ilmu fiqh berdasarkan mazhab Syafi'i. Ajaran-ajarannya di bidang tasawuf dimuat dalam karangan-karangannya yang berjudul: *Kifayat al-Muhtajin, Daqaiq alhuruf, Bayan Tajalli dan Umdat al-Muhtadin*. Juga Abd ar-Rauf telah menyusun tafsir Quran dalam bahasa Melayu (Jawi) dan menerjemahkan kitab *Mawa'iz al-Badi'a* yang berisi 32 hadis qudsi. Karangannya dalam bentuk puisi adalah *Syair Ma'rifat*.[69]

Telah dikatakan bahwa ajaran tasawuf Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Samatrani mempunyai pengaruh di Jawa. Demikian pula aliran tasawuf yang bersifat ortodoks dari ar-Ranisri, pengaruhnya juga sampai ke Jawa. Di pesisir Pulau Jawa pada masa perkembangan agama Islam dikenal ajaran-ajaran Islam dari orang-orang yang dinamakan wali.

Dari Jawa ada dua naskah yang menggambarkan alam pikiran umat Islam dalam abad ke-16. Naskah yang masih baik disimpan di negeri Belanda yang diduga asalnya ditemukan pada waktu pelayaran orang-orang Belanda sepanjang pesisir utara Jawa, kemungkinan ketika mereka berlabuh di Sedayu, Jawa Timur. Naskah ini diterima pada bulan November 1957 oleh ahli perpustakaan di Leiden yang bernama Merula, dari pedagang Amsterdam yang bernama van Dulman. Naskah yang dimaksud berasal dari karangan Sunan Bonang, karenanya dalam dunia ilmu dikenal sebagai *Buku Bonang*.[70]

Kegiatan-kegiatan Sunan Bonang dapat ditentukan antara tahun 1475–1525. Naskah tadi dibuatnya sebagai tandingan ajaran-ajaran kesufian sesat atau heterodoks yang misalnya menyatakan bahwa apa yang ada adalah Allah, dan apa yang tidak ada adalah Allah; bahwa ketidakadaan Allah

---

69 Voorhoeve, "Abd ar-Rauf', *The Encyclopedia of Islam*, vol. 1, 1960, hlm. 88
70 Hendrik Kraemer, *op. cit.*, hlm. 2

adalah tak menciptakan dan hal itu menjelaskan kemahasucian Allah, sebab Allah itu sendirian dan kesepian; dan hanya dapat diketahui oleh ketidakadaan yang mengitarinya. Sunan Bonang menentang dan menyatakan bahwa Allah lebih dari gambaran sedemikian itu. Allah itu Mahatinggi dan Mahaluhur, Sukma Mahasuci yang tidak didahului oleh ketidakadaan, tidak diiringi oleh ketidakadaan dan tidak pula dikelilingi oleh ketidakadaan. Dari keterangan di atas dapatlah diketahui bahwa sejak permulaan Islam di Pulau Jawa renungan mistik itu sudah hidup, baik dalam bentuk-bentuk paham serba Tuhan yang ortodoks maupun yang heterodoks.[71]

Naskah Islam dari abad ke-16 lainnya yang ditulis dalam bahasa Jawa dan pengarangnya tidak dikenal adalah naskah yang kemudian disebut *primbon*, yaitu naskah yang berupa suatu kumpulan serbaneka mengenai agama, doa-doa, jampi-jampi ilmu-ilmu, firasat, tafsir mimpi, ramalan tentang tanda-tanda, dan sebagainya. Naskah abad ke-10 H atau ke-16 M itu terutama berisikan catatan mengenai soal keagamaan, kecuali halaman terakhir yang membicarakan denyutan urat (kedutan) yang dianggap sebagai alamat. Catatan mengenai soal keagamaan itu terutama menyangkut soal ibadah, misalnya ditekankan lafal niat sebelum mengambil air wudu atau salat. Dalam penjelasannya mengenai paham mistik yang ortodoks mengenai bid'ah serta peringatan-peringatan terhadapnya menimbulkan kesan bahwa naskah tersebut ditulis untuk menentang kesufian yang bersifat serba Tuhan dalam masyarakat. Naskah itu pun menyebutkan pula seorang yang bernama Syekh Ibrahim Maulana dan petuah-petuahnya. Beliau itu mungkin Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 822 H (1419 M) dan makamnya kedapatan di Gresik.[72]

Dalam suluk dan primbon sering kali didapatkan paham mistik yang disebut *kawula gusti*. Di kalangan orang-orang Jawa, paham seperti itu sudah dikenal sejak sebelum kedatangan Islam, misalnya dalam kitab *Kunjarakarna* dan pada upacara dalam agama Buddha Mahayana seperti *tat twam asi*. Istilah-istilah mistik dari lingkungan keagamaan lainnya banyak persamaannya. Karena Islamlah di Jawa pikiran serta pelaksanaan ke arah kesatuan antara Tuhan dan manusia diperbarui. Menurut beberapa naskah, diskusi-diskusi antara wali-wali mengenai iman, tauhid, dan makrifat adalah kritik-kritik terhadap mistik yang membicarakan mengenai siapa dan apakah wujud Allah itu. Pernyataan seorang wali yang bernama Siti Jenar atau Lemah Abang tentang ajaran *kawula gusti* yang menganggap bahwa dirinya sendiri adalah Tuhan yang kekal,

---

71 R.A. Hoesein Djajadiningrat, *op. cit.*, hlm. 122

72 *Ibid.*, hlm. 123; Tentang pembacaan makam Malik Ibrahim lihat J.P. Moquette, "De Datum op den grafsteen van Malik Ibrahim to Grissee", *TBG*, LIV, 1922, hlm. 207–214

mendapat tantangan yang hebat dari wali-wali lainnya. Karena kenyataan itulah Lemah Abang dihukum mati. Ia adalah al-Hallajnya orang Jawa yang kesalahannya menurut para wali tidak terletak pada ajarannya, tetapi karena ia membuka tabir *miakwerana* tentang hakikat yang tertinggi.[73] Menurut cerita-cerita babad, setelah Lemah Abang meninggal kemudian dimakamkan dan setelah dibuka kembali kuburnya, yang ada hanyalah bunga melati. Oleh karena itu, tempat pemakamannya disebut kampung Kemlaten yang terdapat di pinggiran selatan kota Cirebon.[74]

Dari uraian di atas diketahui bahwa di Jawa, seperti juga di Sumatra, paham ortodoks telah berhasil mencapai kemajuan besar.

3. Tarekat

Ajaran tasawuf berhubungan erat dengan tarekat yang berasal dari kata *thariqah*, yaitu jalan yang ditempuh oleh kaum sufi dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. *Thariqah* kemudian mengandung arti organisasi (tarekat). Tiap tarekat mempunyai syekh, upacara ritual, dan bentuk zikir sendiri.

Pada mulanya tempat tinggal syekh bersangkutanlah yang menjadi pusat kegiatan tarekat, tetapi kemudian didirikan perumahan tersendiri yang disebut *ribat*. Anggota tarekat terdiri dari dua kelompok, yaitu murid dan pengikut yang tinggal dalam *ribat* serta memusatkan perhatian pada ibadat, dan pengikut awam yang tinggal di luar serta tetap bekerja dalam pekerjaan mereka sehari-hari, tetapi dalam waktu-waktu tertentu berkumpul di *ribat* untuk mengadakan latihan spiritual.[75]

Murid yang telah sampai tingkat tertinggi diberi ijazah, lalu keluar dari *ribat* dan kemudian mengadakan *ribat* yang serupa di tempat lain. Dengan cara demikian meluaslah pengikut tarekat bersangkutan, mulanya pada satu kota atau daerah, kemudian dalam satu negara dan akhirnya meluas ke berbagai dunia Islam lainnya.

Beberapa sumber pribumi secara tegas mengemukakan bahwa di Indonesia tarekat-tarekat mendapatkan pengikutnya, pertama-tama di lingkungan istana dan lama kemudian barulah merembes ke kalangan masyarakat awam. Para pengarang sufi Sumatra yang disebut di atas bekerja di bawah lindungan pihak kerajaan.

Kronika berbahasa Jawa dari Cirebon dan Banten menceritakan bagaimana pendiri dinasti raja sendiri mengunjungi Tanah Arab dan *berbai'at*

---

73 Hendrik Kraemer, *op. cit.*, hlm. 72–73
74 D.A. Rinkes, lihat catatan 72
75 Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974, hlm. 90

menjadi pengikut sejumlah tarekat. Tarekat dipandang sebagai sumber kekuatan spiritual, sekaligus melegitimasi dan mengukuhkan posisi raja.[76]

Tarekat-tarekat yang mempunyai pengaruh di Indonesia adalah tarekat *Qadiriyah,Rifa'iyah, Naqsyabandiyah, sammaniyah Qusyasyiyah, Syattariyah, Syaziliyah, Khalwatiyah,* dan *Tijaniyah*. Menurut Hoesein Djajadiningrat, tarekat Qadiriyah tidak mendapat pengaruh yang banyak, tetapi pendiri tarekat itu sendiri tentunya telah mendapat kehormatan yang sangat tinggi, sebab, ternyata dalam kalimat-kalimat pembukaan naskah-naskah pengakuan pemangku-pemangku jabatan-jabatan terpenting yang turun-temurun dan gelar-gelar kebangsawanan, jika memohon berkat-berkat Allah, Rasulullah saw. dan para wali, maka dengan sengaja disebutkan nama Abdul Qadir Jailani, pendiri tarekat Qadiriyah.[77]

Hamzah Fansuri dan pembesar-pembesar Aceh mendapat pengaruh tarekat Qadiriyah. Di Banten, Sultan Abdulkadir mungkin mendapat pengaruh dari tarekat Qadiriyah pula.[78] Sementara itu, tarekat Rifa'iyah yang terkenal dengan amalannya yang berupa penyiksaan diri, berhubung dengan kegiatan yang mereka lakukan, mempunyai pengaruh pula di Banten. Pengikut tarekat ini mendapat julukan tukang *debus*, sebab setelah sampai pada puncak kegairahan yang dilakukan dengan jalan zikir dan membuat berbagai gerakan badan di bawah pimpinan seorang syekh atau guru, mereka mencoba menikam diri mereka di dada atau di bahu dengan debus, sebilah belati besi. Apabila ada yang luka, gurunya dapat menyembuhkan kembali dengan air liurnya sambil menyebutkan nama dirinya. Di Banten lama, senjata untuk melukai diri itu disebut *gedebus*, dan masih tersimpan di bagian luar bangunan Masjid Agung, yaitu di dalam *tiamah*. Pada perayaan-perayaan, misalnya khitan dan kesempatan keramaian lainnya, *gedebus* dipakai dalam pertunjukan. Di Aceh, bahkan di daerah Maluku, permainan debus juga masih dikenal orang. Di Bali, yang masyarakatnya masih beragama Hindu–Bali, juga dikenal permainan semacam debus, yaitu permainan dengan mempergunakan keris besar sebagai alat penusuknya. Sudah tentu permainan tersebut berhubungan pula dengan upacara keagamaan.

Tarekat Sammaniyah dapat dibedakan dari aliran lainnya karena zikirnya dibacakan dengan suara nyaring oleh para peserta dalam pertemuan mereka. Pendiri tarekat Sammaniyah adalah Syekh Muhammad Samman, seorang penjaga kuburan Nabi dan pengarang beberapa kitab mengenai metafisika sufi, tetapi dia dikenal terutama sebagai pendiri tarekat

---

76 Martin Van Bruinessen, *op. cit.*, hlm. 197

77 Hoesein Djajadiningrat, *op. cit.*, hlm. 135

78 G.W.J. Drewes en R.Ng. Poerbatjaraka, "De Mirakelen van Abdoelkadir Djaelani", Bibliothica Javanica, *KBG*, 8 Bandung, 1938, hlm. 10–13

Sammaniyah sehingga ia menjadi orang yang berpengaruh. Syekh Samman sangat terkenal dengan kemampuannya melakukan hal-hal yang mengandung keajaiban, yang pastilah sangat menunjang penyebaran tarekat ini dalam waktu singkat ke Indonesia. Sebuah kitab kumpulan berbagai cerita penuh keajaiban (*manaqib*) diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu tidak lama setelah wafatnya sang syekh dan menjadi sangat populer di seluruh Nusantara.[79]

Tarekat Syattariyah yang dianggap sebagai tarekat yang paling awal di Jawa percaya akan ajaran kejawen mengenai tujuh tingkat keadaan Allah, yakni ilmu mengenai hakikat. Sebagaimana telah diterangkan di atas, ilmu ini dikenal sebagai ilmu *martabat tujuh*. Kaum mistik Jawa mempunyai keyakinan bahwa semua manusia mempunyai benih-benih untuk menjadi manusia yang sempurna, dan oleh karena itu manusia harus berusaha untuk melaksanakan kesempurnaan itu. Bertalian dengan cita-cita itu terdapat perenungan tentang hubungan manusia dengan Allah seperti hubungan antara seorang pelayan dan majikannya.

Di antara ahli-ahli tasawuf yang mengenal tarekat Syattariyah di Indonesia adalah Abd ar-Rauf dari Singkel dan Syekh Yusuf dari Banten. Kedua nama ini sering disebut-sebut oleh Ibrahim al-Kurani, murid Ahmad Qusyasyi pendiri tarekat Syattariyah itu.[80] Syekh Yusuf adalah seorang ulama dari Sulawesi selatan dan pernah menjadi penasihat agama Sultan Ageng Tirtayasa di Banten. Setelah ditangkap dari gerilya di daerah Padaherang, Priangan Timur, ia kemudian dibawa ke Jakarta dan selanjutnya diasingkan ke Srilangka dan akhirnya ke Tanjung Harapan Baik sampai meninggal di sana, di Zand Vliet.

Menarik bagi kita adalah bahwa dalam tradisi dikatakan, Syekh Abdul Muhyi dari Saparua, Pamijahan di daerah Tasikmalaya juga melakukan zikir Syattariyah.[81] Abdul Muhyi ini di daerah Priangan terkenal sebagai pelopor yang menyebarkan dan mendalamkan ajaran Islam.

Tarekat Naqsyabandiyah yang masuk ke daerah Minangkabau dari Mekah menaikkan derajat kelompok ortodoks. Antara kelompok Naqsyabandiyah dan kelompok Syattariyah terjadi pertentangan mengenai pengucapan bahasa Arab dalam upacara-upacara ibadah, penempatan kiblat, tentang penentuan permulaan dan akhir Ramadan.

Pada masa-masa berikutnya, tasawuf dan tarekat-tarekatnya masih terus dipraktikkan oleh kaum muslimin Indonesia. Pertikaian antara golongan ortodoks dan heterodoks juga masih dapat kita saksikan seperti digambarkan dalam *Serat Centhini*.

---

79 Martin Van Bruinessen, *op. cit.*, hlm. 195
80 G.W.J. Drewes, *op. cit.*, hlm. 290–291
81 D.A. Rinkes, "De Heiligen van Java I. De Maqam van Syech Abdoelmoehi", *TBG*, LII, 1910, hlm. 564

D. Lembaga Pendidikan

1. Pesantren dan Kehidupannya

Pengajaran dan penyiaran agama Islam dilakukan antara lain melalui lembaga pendidikan yang dikenal dengan pesantren. Namun, informasi tentang asal usul lembaga ini sangat sedikit, bahkan tidak diketahui kapan lembaga tersebut mula-mula didirikan. Ada yang berpendapat bahwa pesantren merupakan kelanjutan dari lembaga serupa yang pernah ada pada masa pra-Islam. Menurut Sugarda Purbakawaca, pesantren lebih mirip lembaga pendidikan Hindu ketimbang lembaga pendidikan Arab.[82] Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sutejo Brodjonegara yang menyatakan bahwa sistem pendidikan pesantren aslinya bukan berasal dari Arab, tetapi dari Hindu.[83]

I.J. Brugmans yang telah melakukan penelitian tentang asal-usul pesantren sampai pada kesimpulan bahwa lembaga ini secara tipikal dipengaruhi oleh lembaga pendidikan yang berasal dari India. Menurutnya pesantren lebih dahulu ada daripada Islam itu sendiri. Saat ini lembaga semacam itu tidak dijumpai di negara-negara Islam lain, padahal ia masih beroperasi di India yang beragama Hindu dan Burma serta Thailand yang beragama Buddha.[84]

Pendapat-pendapat tersebut bersifat spekulatif yang mungkin ada benarnya, karena terdapat indikasi bahwa tempat-tempat pertapaan pra-Islam tetap bertahan beberapa waktu setelah Jawa diislamkan, bahkan tempat pertapaan yang baru terus didirikan. Namun, tidak jelas apakah semua itu merupakan lembaga pendidikan tempat pengajaran agama Islam berlangsung.[85] Dari survei Belanda pertama mengenai pendidikan pribumi yang diadakan pada tahun 1819 terkesan bahwa pesantren yang sebenarnya belum ada pada waktu itu di seluruh Jawa. Lembaga-lembaga pendidikan yang mirip pesantren dilaporkan terdapat di Priangan, Pekalongan, Rembang, Kedu, Surabaya, Madiun, dan Ponorogo. Di daerah lain tidak terdapat pendidikan resmi lama sekali, kecuali pendidikan informal yang diberikan di rumah-rumah pribadi dan masjid.[86]

Pesantren tertua yang dapat diketahui tahun berdirinya adalah pesantren Tegalsari, di Ponorogo, Jawa Timur. Pesantren ini didirikan oleh Sultan Paku Buwono II pada tahun 1742 sebagai tanda terima kasih kepada

---

82 Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*, Jakarta, Gunung Agung, 1970, hlm. 17

83 Sutedjo Bradjanegara, *Sedjarah Pendidikan Indonesia*, Yogyakarta, 1956, hlm. 25

84 I.J. Brugmans, *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch Indie*, Groningen, J.B. Wolters, 1938, hlm. 57

85 Martin van Bruinessen, *op. cit.*, hlm. 24

86 *Ibid.*, hm. 25

Kyai Hasan Besari. Paku Buwono II juga membangun masjid dan asrama untuk santri.[87]

Sungguhpun tidak ada bukti yang jelas adanya pesantren sebelum berdirinya pesantren Tegalsari, tidak berarti tidak ada santri yang tinggal sekian lama di tempat guru untuk memperdalam agama Islam waktu itu. Zainal Abidin, raja Ternate pertama yang beragama Islam dikabarkan belajar agama Islam di Giri, mungkin dengan Prabu Satmata, yang disebut sebagai raja-ulama pertama Giri.[88]

Dalam *Serat Centhini* juga diceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Danadarma. Ia mengaku telah belajar selama tiga tahun di Karang, Banten, yang letaknya mungkin di sekitar Gunung Karang, sebelah barat Pandeglang di bawah bimbingan Seh Kadir Jalena; mungkin maksudnya dia belajar ilmu yang dikaitkan dengan Sufi besar 'Abd al-Qadir al-Jailani. Juga tokoh utama *Serat Centhini*, Jayengresmi alias Amongraga, belajar di *paguron* (perguruan) Karang, di bawah bimbingan seorang guru Arab bernama Syaikh Ibrahim bin Abu Bakar, yang lebih dikenal sebagai Ki Ageng Karang. Dari karang, kemudian dia pergi ke *paguron* besar lain di desa Jawa Timur, Wanamarta, yang dipimpin oleh Ki Baji Panutra, di mana dia menunjukkan penguasaannya yang sangat mendalam atas kitab-kitab ortodoks.[89]

2. Sistem Pendidikan dan Kitab-Kitabnya

Kurangnya informasi mengenai asal-usul pesantren menyebabkan sulitnya menjelaskan sistem pendidikan di lembaga ini pada masa sebelum abad ke-18. Meskipun demikian, sistem pengajaran yang dilaksanakan di pesantren-pesantren pada masa-masa selanjutnya dapat menggambarkan hal tersebut, mengingat dalam waktu yang sangat panjang pesantren mempergunakan suatu metode yang agak seragam. Metode pengajaran yang lazim dipergunakan di pesantren-pesantren dan tetap bertahan dengan awet tanpa variasi atau perubahan adalah metode yang disebut dengan *sorogan* dan *bandongan* atau *weton*. Dalam pengajaran dengan menggunakan metode sorogan, santri menghadap guru seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajarinya. Kiai membacakan pelajaran yang berbahasa Arab kalimat demi kalimat kemudian menerjemahkannya dan menerangkan maksudnya. Santri menyimak dan memberi catatan pada kitabnya, untuk mengesahkan bahwa ilmu itu telah diberikan oleh kiai. Istilah *sorogan* tersebut berasal dari kata *sorog* (Jawa)

87 Informasi lebih lanjut tentang pesantren Tegalsari, lihat *Tijdshift voor Indische Taal, Land en Volkenkunde*, vol. XXIV, 1877, hlm. 319–336

88 H.J. De Graaf, *op. cit.*, 136

89 Martin van Bruinessen, *op. cit.*, hlm. 26

yang berarti menyodorkan. Sebab setiap santri menyodorkan kitabnya di hadapan kiai atau pembantunya.[90] Sistem *sorogan* ini sangat efektif bagi seorang santri untuk mencapai cita-citanya menjadi seorang alim. Sistem ini memungkinkan seorang guru mengawasi, menilai, dan membimbing secara maksimal kemampuan seorang murid dalam menguasai materi pelajaran.

Adapun metode *bandongan* adalah metode kuliah. Dengan metode ini para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai yang menerangkan pelajaran secara kuliah. Santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan padanya. Metode ini juga disebut *metode weton*. Istilah *weton* ini berasal dari kata *wektu* (Jawa) yang berarti 'waktu', sebab pengajian tersebut diberikan pada waktu-waktu tertentu, yaitu sebelum dan/atau sesudah melakukam *shalat fardhu*.[91]

Dalam pengajaran yang memakai cara *sorogan* dan *bandongan* ini tidak ada pengulangan pelajaran ataupun pertanyaan yang diajukan oleh kedua belah pihak, dan setiap pelajaran dimulai dengan bab baru. Semua pelajaran ini diberikan oleh kiai atau pembantunya yang disebut *badal* (pengganti) atau *qari'* (pembaca) yang terdiri dari santri senior. Kenaikan tingkat ditandai dengan bergantinya kitab yang dipelajari. Sementara itu, evalusi dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan, apakah ia cukup menguasai bahan lalu dan mampu mengikuti pengajian kitab berikutnya. Dalam mengikuti pelajaran, santri mempunyai kebebasan penuh, baik dalam kehadiran, pemilihan pelajaran, tingkat pelajaran, dan sikapnya dalam mengikuti pelajaran. Masa belajar tidak ditentukan dan waktu tamat tidak dibatasi. Santri yang telah merasa puas akan meninggalkan pesantren dan pulang ke masyarakat atau pergi ke pesantren lain untuk mencari keahlian tertentu.[92]

Pengajaran di pesantren hampir seluruhnya dilakukan dengan pembacaan kitab. Sungguhpun secara pasti tidak diketahui kitab-kitab yang dibaca di pesantren-pesantren (*peguron*) sebelum abad ke-18, sejumlah kitab-kitab klasik berbahasa Arab yang sudah dikenal pada abad ke-16 tentu dibaca dan dipelajari. *Serat Centhini* memberikan banyak informasi mengenai kitab-kitab yang dipelajari di pesantren. Dalam diskusi antara Jayangresmi dan tokoh-tokoh lain dalam *Serat Centhini* disebutkan 20 kitab yang berbeda, 6 di antaranya kitab fiqh (termasuk *al-Tagrib fi al-Fiqh* karya Abu Syuja' al-asfahani dan *al-Idhah ft al-Fiqh* yang pengarangnya anonim), 9 kitab akidah (termasuk kitab pengantar karya al-Samargandi dan dua karya al-Sanusi yang terkenal dengan komentarnya), 2 kitab tafsir (*Jalalain*

90 M. Habib Chirzin, "Ilmu dan Agama dalam Pesantren", dalam M. Dawam Rahardjo, (Ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta, LP3ES, 1974

91 *Ibid.*

92 *Ibid.*

dan Baidhawi) dan 3 kitab tasawuf. Yang terakhir ini termasuk *Ihya' Ulm al-Din* karya al-Ghazali dan *al-Insan al-Kamil* karya 'Abd al-Karim al-Jilli, sebuah kajian sistematis tentang metafisika *wandat al-wujud* Ibn al-'Arabi.[93]

E. Kesenian

Kesenian sebagai salah satu unsur universal kebudayaan dalam hal ini kebudayaan Islam erat kaitannya dengan keagamaan tersebut. Dari segi pandang Islam dengan berpedoman kehidupannya pada Alquran dan Hadis Nabi Muhammad saw. sesungguhnya kegiatan kesenian juga tidak dapat dipisahkan, kecuali yang bertentangan dengan akidah Islam yang mengharamkan sikap yang mengarah kepada kemusyrikan. Pada subbab kesenian ini yang akan dibicarakan akan dibatasi hanya pada seni sastra, seni bangun, dan ragam hias.

1. Seni Sastra

Sebenarnya hal-hal yang baru kita bicarakan pada subbab terdahulu tidak dapat dipisahkan dari hasil-hasil seni sastra keagamaan Islam yang banyak terdapat dalam naskah-naskah kuno terutama yang berasal dari masa penyebaran Islam serta pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di kepulauan Indonesia. Naskah-naskah kuno dan klasik itu jumlahnya beribu-ribu dan tersimpan di beberapa lembaga pemerintah maupun swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri.[94] Kandungan naskah-naskah itu tentang babad, hikayat, atau tambo kerajaan-kerajaan, keagamaan Islam mengenai fikh (syariat), tasawuf, dan tarekatnya, akidah, primbon, tafsir Alquran, Hadis Nabi, dan lain-lain, dan naskah-naskah kuno dan klasik yang mengandung berlimpah informasi tersebut baru sebagian kecil mungkin di bawah sepuluh persen yang telah dikaji, disunting, serta diterbitkan baik oleh ahli-ahli filologi asing maupun pribumi.[95]

Meskipun kedatangan Islam dan penyebarannya sudah sejak abad ke-7 M atau ke-8 M, melalui Selat Malaka dan kemudian secara bertahap abad ke-11 M di Jawa Timur disusul dengan penyebarannya secara bertahap pula di berbagai kepulauan Indonesia. Namun, hasil-hasil seni sastra yang

---

93 Martin van Bruinessen, *op. cit.*, hlm. 29

94 Tjandrasasmita, Uka, "Beberapa Catatan tentang Naskah-Naskah Kuno Islami Indonesia", dalam *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa. Agama dan Problema Masa Kini*, Yayasan Festival Istiqlal, Jakarta, 1996, hlm. 235–263

95 Tjandrasasmita, Uka, *Kajian Naskah-Naskah Klasik dan Penerapannya bagi Kajian Sejarah Islam di Indonesia*, Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2006, hlm. 1

sampai pada masa kita berasal abad ke-14 M dan abad-abad ke-16 M–19 M. Di antara hasil seni sastra pada masa Islam awal di Indonesia adalah *Hikayat Raja-Raja Pasai* yang aslinya ditulis dalam huruf Jawi sesuai dengan perkembangan bahasa Melayu Kuno masa kerajaan Sriwijaya yang mendapat pembaruan menjadi bahasa Melayu Klasik di kerajaan Samudra Pasai. Pusat seni sastra juga berkembang di kerajaan Malaka, tetapi setelah direbut Portugis 1511 M pusat kegiatan penulisan seni sastra itu pindah ke kerajaan Aceh Darussalam yang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dan Iskandar Thani abad ke-17 M. Menurut Braginsky awal kesusastraan Islam tersebut ditandai dengan penerimaan pokok-pokok ajaran Islam (Alquran dan Hadits) dan hukum-hukum Islam (Syariah) yang indikator pokoknya sudah ada dalam kandungan *Hikayat Raja-Raja Pasai* dan *Sejarah Melayu*.[96] Muncul dan berkembangnya seni sastra Islami menurut Abdul Hadi, W.M., karena disulut semangat puitik dan estetik Alquran. Peran sastrawan dalam penyebaran Islam sangat besar seperti terbukti dalam sejarah. Mereka menulis dan menyebarluaskan kisah-kisah Nabi Muhammad, para sahabat, wali, dan pahlawan Islam terkenal. Dikatakan bahwa para sastrawanlah yang menjadi garda depan dalam mentransformasikan simbol-simbol Alquran dan sejarah Islam menjadi simbol budaya masyarakat muslim sejagat. Abdul Hadi memberikan contoh seni syair yang menggambarkan kisah kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad yang sangat populer di Indonesia antara lain *Kasidah Burdah* dan *Kasidah Barjanji* yang dinyanyikan pada setiap perayaan Maulid Nabi Muhammad. Selain itu, masih banyak contoh hasil sastra lama karya populer, seperti *Alf Lailah wa Lailah, Hikayat Bayan Budiman, Kalilah wa Dimnah,* dan *Mantiq at-Tayr* karya Fariduddin 'Attar, *Syair Burung Pingai* karya Hamzah Fansuri, dan karya-karya sastra lainnya.[97]

Di atas telah dikatakan bahwa seni sastra islami berkembang di kerajaan Aceh Darussalam abad ke-16 M yang memuncak masa Sultan Iskandar Muda dan Sultan Iskandar Thani pada abad ke-17 M. Hal itu dikarenakan kegiatan para ulama dan pemikir keagamaan Islam seperti Al-Jauhari, Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Samatrani, Nuruddin Al-Raniri, Syeikh Kuala atau Abdul Rauf Al-Singkili, dan lainnya. Mereka membuat karya seni sastra Islam kecuali dalam bahasa Arab juga banyak dalam bahasa Melayu yang menggunakan huruf Jawi yaitu huruf Arab tertentu yang diberi tanda-tanda tertentu seperti harakat serta titik satu atau tiga di bawah

---

96 Braginsky, V.I., *The System of Classical Malay Literature*, KITLV, Press, Leiden, 1993, hlm. 22–23

97 Abdul Hadi, M.W, *Islam Cakrawala Estetik dan Budaya*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2000, hlm. 3–21, 49–54

atau di atasnya disesuaikan dengan fonem atau ucapan serta ejaan dalam bahasa Melayu. Mengingat pada subbab terdahulu sudah disebutkan beberapa karya para ulama di Aceh itu, kiranya tidak perlu lagi kita ulangi. Tulisan Jawi itu di Asia Tenggara yang dianggap bukti tertua terdapat pada Batu Bersurat Trenggano (Malaysia) bertanggal 4 Rajab 702 H atau 22 Februari 1303 M.[98] Bagaimanapun peran penting huruf Arab dengan bahasa Arab mengantarkan agama Islam tersebar ke berbagai belahan dunia, antara lain ke Asia Tenggara termasuk Indonesia yang mempunyai penganut terbesar di wilayah ini. Bukti-bukti penggunaan bahasa serta huruf Arab kita dapatkan pada nisan-nisan kubur antara lain Fatimah binti Maimun bin Hibatullah di Leran dari tahun 475 H (1082 M) dengan huruf jenis Kufik Timur, nisan-kubur Sultan Malik as-Saleh dari Gampong-Samudra tahun 696 H atau 1297 M dengan jenis tulisan Thuluth, nisan kubur Maulana Malik Ibrahim di Gresik tahun 822 H atau 1419 M juga bentuk huruf Thuluth, demikian pula nisan kubur Sultanah Nahrisyah tahun 823 H atau 1428 M dari Pasai.[99] Huruf dan bahasa Arab yang dipakai sebagai alat komunikasi yang mungkin masih terbatas ternyata digunakan untuk menuliskan bahasa Melayu yang disebut huruf Jawi untuk daerah-daerah yang masyarakatnya menggunakan bahasa Melayu. Bagaimana pentingnya huruf atau tulisan Jawi untuk penulisan bahasa Melayu yang dimulai oleh para ulama terkenal dari Aceh Darussalam sampai tersebar ke seluruh Nusantara melalui karya-karya seni sastranya sehingga menjadi bahasa *Lingua Franca* yang dipakai sebagai bahasa komunikasi, baik dalam keagamaan maupun dalam bidang-bidang kegiatan lainnya, seperti perdagangan, pemerintahan, korespondensi, dan pers. Untuk Indonesia jelas bahasa Melayu itu dalam perkembangannya menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Nasional, di Malaysia dan Brunei Darussalam menjadi bahasa resmi Melayu bagi kedua negara tersebut.[100] Di Indonesia naskah-naskah mengenai seni sastra Melayu yang ditulis dalam huruf Jawi dari abad ke-16, 17, 18, dan 19 M terdapat di berbagai

---

98 Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, *The Correct Date of the Trengganu Inscription Friday 4 th Rajab 702 A.H./Friday 22"d February 1303 A.C.* Muzium Negara, Kuala Lumpur Malaysia, 1970

99 Tjandrasasmita, Uka, telah dibicarakan beberapa ahli yang pernah menelitinya, baca *Penelitian Arkeologi Islam di Indonesia dari Masa ke Masa,* Penerbit Menara Kudus 46, Jakarta, 2000, hlm. 25–41

100 Tjandrasasmita, Uka, "Kegunaan Bahasa dan Sastra Melayu Abad VII–XIX Masehi dalam Berbagai Bidang Komunikasi (Suatu Tinjauan Historis)", *Seminar Internasional Bahasa dan Sastra Indonesia/ Melayu,* Kerja sama Universitas Pakuan, Pusat Bahasa dan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, Bogor 14–16 September 2000

101 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Sastra Melayu Lintas Daerah,* Pusat Bahasa Dep. Pendidikan Nasional, Jakarta, 2004; Uka Tjandrasasmita: Penggunaan Tulisan Jawi di Indonesia Setelah Kedatangan Islam. Disampaikan dalam *Persidangan Tulisan Jawi, Sejarah Seni dan Warisan* tanggal 2–4 Juli 2007 di Pahang diselenggarakan oleh Muzium Negeri Pahang-Kementerian Kebudayaan Seni dan Warisan Malaysia (KEKKWA)

daerah bukan hanya di daerah-daerah Sumatra, tetapi juga di Nusa Tenggara, Maluku, dan Kalimantan.[101] Jika di daerah-daerah yang masyarakatnya menggunakan bahasa Melayu digunakan tulisan Jawi, di daerah-daerah seperti di Jawa yang berbahasa Sunda, Jawa, dan Madura huruf Arab yang digunakan untuk penulisan seni sastra keagamaan dan babad-babad atau cerita pada umumnya disebut dengan sebutan *Pegon* yang sudah tentu disesuaikan dengan fonem bahasa tersebut. Banyak naskah dalam bahasa Sunda, Jawa, dan Madura bertuliskan Pegon sebagaimana dapat kita kenali dari katalogus-katalogus.[102] Menarik perhatian bahwa ada satu dua naskah kuno yang ditulis dalam aksara Jawa dan bahasa Jawa Pertengahan berasal dari abad ke-16 M yang terkenal dengan sebutan *Kitab Sunan Bonang* yang berisi tentang petunjuk atau nasihat yang didasarkan kitab *Ihya Ulumuddin* karya Imam Gazali. Kitab itu aslinya ada di Perpustakaan Universitas Leiden dan naskah tersebut ditinjau kembali oleh G.W.J. Drewes.[103] Kitab inilah yang diperkirakan para ahli sebagai imbangan untuk meniadakan pandangan keagamaan Islam yang diajarkan oleh Seh Siti Jenar atau Seh Lemah Abang mengenai *Kaula Gusti* atau *Kaula Manunggaling Gusti* yang dianggap menyesatkan oleh para Wali Sanga dan mereka menghukumnya seperti diceritakan, antara lain dalam *Babad Tjerbon*.[104] Pertentangan pandangan tentang teologi tersebut seperti halnya dialami di kerajaan Aceh Darussalam antara Nuruddin Al-Raniri dengan ajaran *wandatul shuhud* terhadap ajaran Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Al-Samatrani yang mengajarkan tasawuf *wandat al-wujud*. Ajaran Al-Raniri lebih menitikberatkan kepada syariah yang disebut neo-sufisme, sedangkan ajaran tasawuf Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Al-Samatrani lebih menitikberatkan pada mistiko filosofis juga sering disebut *heterodoks*.[105]

Demikian pokok-pokok pembicaraan kita mengenai seni sastra yang tumbuh dan berkembang karena kegiatan-kegiatan para ulama dan pemikir keagamaan Islam di Nusantara yang terutama berpedoman pada Alquran dan Hadis Nabi Muhammad saw. serta tradisi setempat. Pada bagian berikutnya marilah kita bicarakan pula sepintas perihal seni bangun

---

102 Behrend, T.E. *et al, Katalogus Induk Naskah-Naskah Nusantara Museum Sonobudoyo Yogyakarta*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1990.; Ekadjati, S. Edi dan Undang A. Darsa: *Katalogus Induk Naskah-Naskah Nusantara*. Jilid 5 A, Jawa Barat, Koleksi Lima lembaga, Yayasan Obor Indonesia- Ecole Francaise D'Extreme Orient, 1999

103 Schrieke, B.J.O., *Het Boek van Bonang*, Disertasi, Leiden 1916; Drewes, G.W.J.: *The Admonitions of She 4-Bari A 16th Century Javanese Muslim Text attributed to the Saint of Bonang* Reedited and translated with an Introduction, Bibibliotheca Indonesia Published by KITLV 4, The Hague Martinus Nijhoff, 1969

104 Brandes, J.L.A. en D.A. Ringkes, *Babad Tjerbon: Uitvoerig inhoudsopgave en Noten, VBG*, dl. LIX, 1911

105 Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Penerbit Mizan, Bandung, 1924, hlm. 166–169

Islam.

2. Seni Bangunan

Masjid merupakan wujud seni bangun hasil islamisasi yang bersifat sakral. Dengan kehadiran Islam dan terbentuknya komunitas muslim sejak abad ke-7 atau ke-8 M di Indonesia bagian barat, yaitu sekitar Selat Malaka dan diteruskan dengan proses penyebarannya hingga terbentuk kerajaan Islam Samudra Pasai sejak awal abad ke-13 M, semestinya sudah didirikan masjid-masjid yang dapat kita saksikan hingga masa ini. Namun, kenyataannya dari situs bekas kerajaan Islam tertua di Indonesia itu belum ditemukan sisa-sisanya. Kita kenali hanya dalam pemberitaan Ibnu Battuta dalam *Rihlah*-nya ketika ia mengunjungi Samudra Pasai tahun 1345 M pada masa pemerintahan Sultan Malik al-Dhahir. Dalam Rihlah-nya itu dikatakan bahwa Ibnu Battuta menuju masjid untuk menjumpai sultan yang akan melaksanakan sembahyang Jumat. Ia juga menyebutkan adanya *maksura* tempat khusus sultan ketika sembahyang. Akan tetapi, ia tidak menceritakan bagaimana bentuk masjid itu.[106]

Bentuk masjid-masjid kuno yang dapat kita saksikan hingga masa ini meskipun sudah mengalami beberapa kali perbaikan adalah Masjid Agung atau Masjid Raya atau Masjid Jami' di beberapa ibu kota kerajaan-kerajaan Islam dari abad ke-16 sampai dengan abad ke-18 M. Masjid-masjid dari abad-abad tersebut masih dapat kita saksikan ciri-ciri khasnya dibandingkan dengan masjid-masjid terutama di negeri-negeri Islam lainnya.

Di ibu kota-ibu kota kerajaan Islam di Indonesia, terutama di Jawa dan di daerah lainnya di mana terdapat alun-alun, contohnya di Demak, Cirebon, Banten, Kota Gede, Surakarta, Yogyakarta, dan lainnya bangunan Masjid Agung itu ditempatkan sebelah barat alun-alun sebagai pusat keagamaan. Masjid Agung Demak diperkirakan didirikan pada akhir abad ke-15 M yang mungkin ditandai oleh adanya gambar atau relief kura-kura pada dinding mihrabnya yang diartikan sebagai sengkala memet 1401 Saka (kepala= l; kaki= 4; perut 0; ekor= 1 sehingga bernilai 1401 Saka atau 1479 M). Mungkin tidak begitu berbeda candrasengkala memet itu dengan candrasengkala dalam babad-babad yang memuat kata-kata *sirna hilang kertaning bhumi itu sirna*= 0; hilang-= 0; kerta = 4; dan bhumi= 1 sehingga bernilai 1400 Saka atau 1478 M yang biasanya dihubungkan dengan keruntuhan kerajaan Majapahit. Yang menarik lagi adalah angka tahun Saka yang dipahatkan pada kayu bagian atas pintu utama, yaitu tahun1428

106 Ross E. Dunn, *Petualangan Ibnu Battuta Seorang Mussafir Muslim Abad ke-14 M*, Kata Pengantar Taufik Abdullah, Penterjemah Amir Sutaarga, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 388

107 Graaf, H.J.de -Th. G.Th. Pigeaud, *Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa, Kajian Sejarah Politik Abad ke-15 dan ke-16*, Seri Terjemahan Javanologi, PT Pustaka Grafitipers, Cetakan Kedua, Jakarta, 1986, hlm. 35–36

Saka atau 1506 M, yaitu angka tahun yang mungkin dapat dikaitkan dengan pendirian atau perbaikan.[107]

Menurut *Babad Demak, Babad Tanah Jawi,* dan babad-babad lainnya, arsitek Masjid Agung Demak adalah Sunan Kalijaga dan dikatakan pula bahwa beliaulah yang membetulkan kedudukan dan arah kiblat secara tepat serta membuat salah satu sakaguru dari tatal kayu sehingga dikenal dengan nama *Saka Tatal* yang berada di timur laut. Sakaguru di sebelah barat laut dibuat oleh Sunan Bonang, sedang sakaguru di sebelah barat daya dibuat oleh Sunan Gunungjati, dan sakaguru di tenggara dibuat oleh Sunan Ampel.[108] Masjid-masjid Agung atau Raya yang berasal dari abad ke-16–18 Masehi yang terdapat di berbagai ibu kota kerajaan-kerajaan Islam pada umumnya mempunyai ciri-ciri khas, yaitu:[109]

1. denahnya berbentuk bujur sangkar atau persegi empat dan pejal atau masif;
2. atapnya bertumpang atau bersusun dua, tiga, lima, bahkan lebih;
3. di bagian depan atau samping terdapat serambi;
4. halaman masjid dikelilingi tembok dengan sebuah atau tiga buah gerbang;
5. di antara masjid-masjid itu di bagian depan atau samping terdapat kolam air.

Keraton atau **istana** dari zaman kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia termasuk seni bangun Islam. Keraton adalah suatu tempat yang bukan hanya tempat kediaman raja, tetapi sekaligus berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Di ibu kota kerajaan-kerajaan Islam terutama di Jawa lokasi istana berada di sebelah selatan alun-alun menghadap arah utara. Keraton-keraton di Surakarta dan Yogyakarta dari abad ke-18 M diapit oleh dua alun-alun, yaitu alun-alun utara (lor) dan alun-alun selatan (kidul). Menarik perhatian bahwa kedua alun-alun tersebut mempunyai fungsi yang berbeda: alun-alun utara (lor) berfungsi tempat pertemuan masyarakat yang bersifat pemerintahan, tetapi alun-alun selatan (kidul) hanya berfungsi untuk upacara kematian seakan-akan mempunyai unsur tradisi kehinduan karena Dewa Yama, yaitu dewa kematian itu berada di selatan.

Keraton-keraton di Jawa yang menghadap ke utara biasanya mempunyai 3 halaman, yaitu halaman ke-1, halaman ke-2, dan di halaman ke-3. Di halaman ke-1 itulah berdiri keraton atau *dalem*. Keraton terutama

---

108 R. Atmodarminto (Penerjemah Saudi Berlian), *Babad Demak dalam Tafsir Sosial Politik*, Milenium Publisher PT Dyatama Mienia, Jakarta, 2000, hlm. 57–63

109 Tjandrasasmita, Uka, *Masjid-Masjid di Indonesia/Arsitekur: Nafas Islam Kebudayaan Indonesia.* Pemrakarsa dan Penyusun: Joop Ave. Festival Istiglal Pertama, 1991, hlm. 48–79.; Tjandrasasmita, Uka, *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota Muslim di Indonesia dari Abad XIII sampai XVIII Masehi.* Telah membicarakan lebih rinci tentang masjid kuno dengan kekhasannya serta teori beberapa ahli, PT Menara Kudus, 2000, hlm. 162–171

dalem itulah yang dianggap bersifat semisakral. Mungkin hal ini mengandung tradisi dari masa Indonesia Hindu/Buddha yang menganggap keraton itu tempat dewa-raja yang di Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya masih ada meskipun sebenarnya Islam tidak mengenal kultus dewa-raja. Di luar Jawa antara lain keraton atau istana di kerajaan Aceh Darussalam juga menurut berita asing terbagi atas 3 halaman. Pembagian atas 3 bagian atau halaman itu mengingatkan kita kepada tradisi masa Indonesia Hindu/Buddha dalam pembagian kompleks percandian terutama dari Jawa Timur seperti Candi Panataran di zaman Majapahit dan di Bali kompleks Pura yang disebut *jaba, jaba-tengah, jero* (tempat tersuci). Demikian pula penempatan makam beberapa Wali Sanga, antara lain makam Sunan Kudus, makam Sunan Drajat, dan lainnya.[110] Halaman pertama baik untuk keraton maupun untuk kompleks makam biasanya diberi gerbang dalam bentuk *candi-bentar* seperti candi yang dibelah, dan antara halaman kedua dengan ketiga diberi gerbang yang disebut *kori-agung* bentuk gerbang yang bagian atasnya tertutup. Di salah satu sisi halaman pertama dibuat *sitinggil* yaitu bangunan yang bidang tanahnya ditinggikan di mana bangunan-bangunan dengan masing-masing fungsinya seperti untuk raja/sultan dan keluarga serta para pembesar dapat menyaksikan upacara-upacara kenegaraan yang dilaksanakan di alun-alun, tempat berkumpul masyarakat umum turut menyaksikan upacara-upacara. Sebutan *sitinggil* di luar Jawa antara lain di Kerajaan Banjar disebut *sitiluhur*.

Pada halaman ketiga sebelum memasuki keraton itu sendiri terdapat bangunan tempat penerimaan tamu yang disebut *srimanganti*. Setelah itu, memasuki keraton menuju pendopo tempat rapat para pejabat pemerintahan kerajaan, dan ada pula tempat yang khusus untuk menghadap raja/sultan. Di dalam keraton ada juga bagian yang khusus untuk putri-putri raja disebut *kaputren*, sedangkan untuk para putra raja disebut *kaputran*. Bentuk atap bangunan keraton atau istana pada umumnya *limasan* yang dibedakan dari bentuk atap pendopo bahkan masjid, yaitu bentuk *joglo* yang meruncing ke atas karena tiang pendukungnya terutama 4 tiang yang disebut *sakaguru*. Keraton-keraton masa kerajaan-kerajaan Islam yang didirikan sejak abad ke-16 M terlebih setelah ada pengaruh seni bangunan Islam dan Eropa bukan hanya menggunakan bahan kayu saja melainkan juga bahan bata-bata seperti masih dapat kita saksikan sisa-sisa keraton di Banten, di Cirebon terutama di keraton Kasepuhan, di Aceh Darussalam, di Penyengat, bekas keraton Kuta Gede, Plered, Kartasura, dan lainnya. Pada keraton-keraton yang sampai sekarang masih utuh tampak sekali percampuran teknik serta

110 Tjandrasasmita, Uka, *Ibid.*, 2000, hlm. 192, catatan 30

bahan tradisional dengan pembaruan pengaruh Barat terutama dalam bentuk dan hiasan tiang-tiang. Hal itu masih dapat kita saksikan pada keraton di Cirebon, di Yogyakarta, dan Surakarta (Solo).

3. Ragam Hias

Mengenai ragam hias yang erat dengan penerapannya kepada seni bangun juga pada benda-benda lepas lainnya, perlu kita berikan gambarannya sepintas. Dalam kesenian Islam terutama dalam ragam hias yang paling lazim adalah Kaligrafi (khat) tulisan yang dibentuk indah). Kecuali kaligrafi pola-pola ragam hias islami sejak awal menyukai pola-pola yang diambil dari dunia tumbuh-tumbuhan (floralisik) dan pola geometrik. Islam pada masa awalnya tidak menyukai bahkan menyingkiri ragam hias yang mengambil dari dunia binatang atau manusia atau makhluk hidup (antropomorphik).[111] Dalam perkembangan selanjutnya mengenai penggambaran makhluk hidup ada dua pendapat, yaitu ada yang tetap berpegang kepada beberapa ayat tertentu dalam Alquran dan Hadis Nabi, tetapi dalam perkembangan selanjutnya ada pula kelompok masyarakat yang mulai membuat lukisan, gambaran, hiasan bahkan pematungan dengan didasarkan bahwa lukisan, gambaran makhluk hidup itu tidak menjadi objek pemujaan seperti berhala. Ragam hias kaligrafi tumbuh dan berkembang mungkin untuk mengalahkan anggapan larangan membuat ragam hias mengambil motif makhluk hidup. Namun anehnya, di Timur Tengah sendiri terdapat kaligrafi yang menggambarkan dunia binatang seperti burung, kuda, dan lainnya sejak abad ke-13 dan seterusnya zaman Banu Umayyah, Abbasiyah, dan lainnya. Jika di negeri-negeri Islam di Timur Tengah banyak masjid-masjid kuno kaya diberi hiasan kaligrafi, di Indonesia anehnya sangat sedikit dan terbatas kecuali pada masjid-masjid yang termasuk baru.

Lain halnya dengan peninggalan Islam berupa nisan-nisan kubur, seperti nisan kubur yang berasal dari abad 11 M yaitu nisan-kubur Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat 475 H (1082 M) ditemukan di Leran Gresik, Jawa Timur. Nisan itu ditulis dalam bahasa Arab dengan tulisan kaligafi Kufik Timur. Kemudian nisan kubur Sultan Malik as-Salih yang wafat 696 H (1297 M) di Gampong Samudra dari situs kerajaan Islam Samudra Pasai. Ia termasuk seorang Sultan pertama dari Kerajaan Samudra Pasai. Bentuk tulisan kaligrafinya ialah jenis Thuluth, dan demikian pula nisan kubur dari Pasai, yaitu Sultanah Nahrisyah wafat 832 H (1428 M),

---

111 Oleg Grabar: *The Formation of Islamic Art*, New Haven and London Yale University Press, 1973, hlm. 77–103.

112 Tjandrasasmita, Uka, *Penelitian Arkeologi Islam Di Indonesia dari Masa ke Masa*, PT Menara Kudus, 2000, hlm. 20 gbr. 2, hlm. 24 gbr. 3., hlm. 27, gbr. 4

dan di Gresik makam Maulana Malik Ibrahim dari 822 H (1419 M) bertulisan kaligrafi Thuluth.[112]

Di Jawa pada abad ke-16 M mungkin pengaruh adanya ayat-ayat tertentu dalam Alquran dan Hadis Nabi masih dirasakan, karena ternyata terdapat relief pada paras yang terdapat pada dinding masjid di Mantingan penyamaran gambaran makhluk hidup seperti: gajah, ular, kepiting, kera, dan lainnya dengan penuh ragam hias pola tumbuhan dan daunan teratai, pohon *Pandanus* dan lainnya ragam hias yang memberikan gambaran tumbuh-tumbuhan seperti jenis waluh-waluhan telah dibicarakan oleh A. Steinman.[113]

Ragam hias juga banyak macamnya ditemukan pada nisan kubur yang berupa pola-pola daunan atau patra dan hiasan geometrik seperti tali-temali, segitiga, belah ketupat, bintang, lingkaran tunggal atau ganda, kurawal, dan lainnya. Kecuali dari nisan-nisan kubur juga terdapat pada hiasan periuk belanga. Contoh-contohnya dapat diperhatikan, diambil dari nisan-nisan kubur batu Aceh, dan dari pecahan periuk belanga dari situs Banten Lama.[114]

Ragam hias dan masa kerajaan-keraajaan Islam baik yang geometris maupun yang floralistik juga didapatkan pada berbagai barang seperti kain batik, benda-benda pusaka, dan benda-benda keperluan sehari-hari. Pada beberapa ragam hias batik bahkan ditambahkan hiasan antropomorfik seperti burung funix, gambar ular naga, dan lainnya. Menarik perhatian bahwa musyaf Alquran kecuali hiasan kaligrafi juga ada beberapa musyah Alquran dari Cirebon terdapat hiasan yang disebut "Macan Ali". Demikian pula ada beberapa naskah kuno diberi gambaran makhluk hidup seperti burung, ikan, dan lainnya yang diperkirakan berasal dari pengaruh Tarekat Syattariyah. Dari berbagai ragam hias yang kita kenali dalam penggunaannya sering kali sudah bercampur antara ragam hias lokal dan yang berasal dari ragam hias Islam bahkan dengan ragam hias dari negeri lainnya.

Demikian gambaran secara garis besar tentang kesenian: seni satra, seni bangun, dan ragam hias termasuk kaligrafi sebagai contoh-contoh pada masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia.

---

113 Steinman, A.,"Enkete opmitingen betreffende der Plant-Ornamenten van Mantingan", *Jawa*, XIV, 14e jrg, 1934, hlm. 89–97

114 Tjandrasasmita, Uka, *Penelitian Arkeologi Islam di Indonesia* ..., PT Menara Kudus, 2000, hlm. 75, gbr. 23, hlm. 77, gbr. 24

Bab V
Struktur Organisasi Kerajaan-Kerajaan

A. Kekuasaan Pusat dan Daerah

1. Raja-Raja dan Bangsawan Sekitarnya

Dari uraian-uraian terdahulu telah disinggung serba sedikit hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah. Di sini akan diuraikan khusus tentang struktur birokrasi kerajaan. Struktur masyarakat di Indonesia pada masa permulaan kedatangan Islam dalam beberapa hal masih melanjutkan tradisi masa Indonesia–Hindu. Hal itu terutama dapat diketahui karena budaya Hindu di Indonesia kebanyakan menyentuh lapisan kaum bangsawan, raja-raja, itu pun hanya mengambil beberapa aspek kehidupan.[1]

Dapat disebutkan bahwa masyarakat perdesaan dan masyarakat yang hidup di luar tembok keraton lebih banyak hidup dalam tradisi Indonesia yang telah mereka miliki sebelum kedatangan pengaruh Hindu di Indonesia. Pola kehidupan sosial itu adalah masyarakat pedagang yang hidup di pesisir. Dengan datangnya pengaruh Islam, yang terutama dilakukan secara aktif oleh ulama-ulama dan di Jawa oleh para wali, sedikit demi sedikit mereka mulai mengguncangkan kekuasaan para raja dan kaum bangsawan. Di Jawa, yang pada masa-masa kekuasaan Indonesia-Hindu, kerajaan Majapahit memegang peran penting dan mereka memusatkan keratonnya di Jawa Timur. Pada masa transisi Indonesia-Islam kekuasaan ini bergeser lagi ke Jawa Tengah, mula-mula di pesisir yaitu Demak, kemudian bergeser agak lebih ke pedalaman yaitu Pajang, dan akhirnya bergeser lebih jauh lagi ke pedalaman di Pasar Gede kemudian Mataram.[2]

Perubahan sosial dari masa Indonesia–Hindu ke Indonesia-Islam pada umumnya mulai berjalan di pesisir. Tomé Pires menyebutkan tidak kurang dari 19 kerajaan di Sumatra dan masih berpuluh-puluh daerah kecil lainnya mulai dari Aceh hingga daerah Lampung sekarang. Tomé Pires, yang telah melakukan perjalanan ke beberapa daerah Nusantara antara tahun 1512–1515, menyebutkan bahwa di Sumatra kerajaan-kerajaan tersebut kebanyakan telah beragama Islam dan hanya beberapa kerajaan yang masih

---

1 W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition*, 1959, hlm. 7
2 B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, Part Two, 1957, hlm. 8–13

menyembah berhala. Disebutkan bahwa raja-raja yang berkuasa sepanjang garis pantai mulai Aceh hingga Palembang telah beragama Islam. Selanjutnya ia menguraikan bahwa Jawa dibagi menjadi dua bagian, yaitu Tanah Sunda dan Tanah Jawa, berbataskan Sungai Cimanuk. Untuk Tanah Sunda ia menyebutkan Banten, Pontang, Cigede, Tangerang Kalapa, dan Cimanuk sebagai pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara. Cirebon, Japara, Tegal, Demak hingga Balambangan dimasukkan daerah Jawa. Dikatakannya juga daerah Sunda belum beragama Islam kecuali bagian timur.[3]

Keadaan geografi Indonesia yang berpulau-pulau dan ribuan jumlahnya menyebabkan beberapa daerah pantai memegang peran penting di bidang perdagangan, kekuasaan politik, dan ekonomi. Kita melihat kenyataan bahwa pada masa permulaan berdirinya kerajaan Islam di Indonesia, baik di Sumatra, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, maupun Maluku, daerah pesisirlah yang menjadi pusat kerajaan Islam. Melihat keadaan geografi yang demikian kiranya sulit dibayangkan akan adanya suatu kekuasaan tunggal untuk menguasai seluruh Indonesia. Sartono Kartodirdjo menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat suatu kontinum dari perkembangan kesatuan-kesatuan sosio-kultural. Sebagai contoh historis ia menyebutkan masyarakat Jawa pada zaman Majapahit dan zaman Mataram, masyarakat Melayu pada abad ke-15 dan masyarakat Bali pada abad ke-19. Dalam perkembangan sejarahnya di dalam pertumbuhan dari yang sederhana ke yang kompleks, kesatuan-kesatuan dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada lebih dahulu tidaklah hilang sama sekali. Sebagai contoh dalam periode kuno budaya Jawa, masyarakat desa yang merupakan kesatuan kekuatan sosio-kultural ini menjadi bagian dari kerajaan terikat. Masyarakat desa ini lambat laun pada derajat yang berbeda-beda ditempatkan di bawah pengaruh suatu pusat politik dan budaya, misalnya Majapahit dan Mataram.[4] Dalam perkembangan masyarakat Indonesia–Hindu yang berpindah secara perlahan dan lambat ke masyarakat Islam, atau dari segi politik lenyapnya kekuasaan kerajaan Indonesia–Hindu dan munculnya kerajaan Indonesia–Islam, apakah hal itu membawa transformasi dalam sistem ekonomi, sosial, politik, dan keagamaan untuk menuju sistem berikutnya? Kemudian yang juga menjadi pertanyaan ialah golongan mana yang mengambil peran pokok dalam proses transformasi sosial ini? Demikian pula, kekuatan mana yang telah mendorong transformasi sosial itu akan mencakup suatu proses antara lain dalam birokrasi kerajaan Islam. Dalam uraian berikut akan diusahakan mencari jawaban ke arah itu.

---

3 Armando Cortesao, *The Suma Oriental of Tomé Pires*, Translated from the Portuguese MS in the biblitheque de la Chambre des Deputes, Paris, I, 1944, hlm. 166

4 Sartono Kartodirdjo, *Merenungkan Kembali Pemikiran tentang Persoalan Sekitar Rekonstruksi Sejarah Indonesia sebagai Sejarah Nasional*, 1972, hlm. 4

2. Sistem Pengangkatan Raja

Pada umumnya sebutan raja sebagai kepala pemerintahan yang tertinggi pada kerajaan-kerajaan Islam masih memakai nama-nama atau sebutan-sebutan seperti lazimnya untuk para raja pada masa sebelum berdirinya kerajaan Islam. Sartono Kartodirdjo menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian raja di sini adalah seseorang yang menyatukan pelaksanaan kekuasaan tertinggi dan berbagai lambang yang bersifat magis dan mistis, yang menyatukan kualitas perlengkapan-perlengkapan kekuasaan itu.[5]

Tradisi dari *Hikayat Raja-Raja Pasai* menyebutkan bahwa raja yang pertama sekaligus pendiri kerajaan samudra Pasai adalah Malik as-Saleh yang memakai gelar Sultan, tetapi dari hikayat itu juga kita ketahui bahwa gelarnya sebelum menjadi raja adalah Marah Sile atau Merah Selu. Dari hikayat tersebut kita ketahui bahwa Merah Selu masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Mekah, yang setelah pertemuan mereka berdua itu, kemudian Merah Selu diberi gelar Sultan Malik as-Saleh. Gelar tersebut masih tercantum pada batu nisannya yang terdapat di kampung Samudra, sebelah kiri sungai Pasai.[6]

Di Jawa pada umumnya sebutan raja masih dipakai dengan beberapa ragam nama dan gelar lainnya, seperti susuhunan, sultan, penambahan, maulana, dan raja.[7] Di Sulawesi sebutan raja dapat ditemukan pada beberapa buku tradisional yang memuat silsilah raja-raja Wajo, Gowa, Soppeng, Bone, Luwu, Sidenreng Moserempulu, *Sanggala* (silsilah raja-raja Toraja), dan beberapa kerajaan lainnya, kemudian kitab *I La Galigo* (yang memuat silsilah raja-raja Bugis).[8]

Di Sulawesi Selatan kita mengenal tiga kerajaan besar yaitu:

1) kerajaan Gowa, rajanya bergelar *sombaya* (yang disembah) sebutannya Sombayari Gowa.
2) kerajaan Luwu, rajanya bergelar *payunge* atau *mapayunge* (yang berpayung atau dipayungi) sebutannya *Payunge ri Luwu* (yang berpayung di Luwu).
3) kerajaan Bone, rajanya bergelar *mangkau'E* (yang bertakhta).

Dari kitab-kitab tradisional di Sulawesi ini kita masih menemukan banyak gelar untuk raja seperti *datu, batara, tomanurung* (seorang yang diturunkan dari kayangan), *karaeng arung,* dan *matowa*. Sebutan sultan baru lahir beberapa lama kemudian setelah raja-raja di Sulawesi Selatan masuk Islam. Raja yang pertama Islam adalah Datu Luwu XIII yang bernama La Patiware' Daeng Parabbung yang kemudian bergelar Sultan Muhammad (memerintah tahun 1585–1610). Ia memeluk agama Islam sekitar tahun

---

5 Sartono Kartodirdjo, *Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisionil dan Kolonial*, 1969, hlm. 13
6 H.M. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, 1961, hlm. 55
7 L.W.C. van den Berg, *De Inlandche Ranger, en Titels of Java en Madoera*, 1902, hlm. 6
8 Andi Zainal Abidin, *Lontara sebagai Sumber Sejarah Terendam Masa 1500–1800*, 1970, hlm. 3–9

1604–1605. Gelar *batara* sebagai sebutan untuk raja pada masa pemerintahan Wajo yang rajanya bernama La Patedungi to Samallangi (1466–1469), ia telah bertindak sewenang-wenang, oleh karena itu ia kemudian dipecat dan dibunuh. Sejak itu gelar *batara* diganti dengan sebutan *arung matowa* (raja yang dituakan) dan kemudian ditekankan bahwa jabatan raja tidak diwarisi atau diwariskan.

Raja Gowa yang pertama memakai gelar *batara guru*.[9] Gelar *sangaji* antara lain untuk La Songngeng. Beliau adalah seorang *rengreng* Bettempola yang ikut membantu Arung Matowa Wajo XXXIV Mappayung Puana Salowong dalam menyusun *Lontara Wajo*.

Di daerah Maluku, Tomé Pires menyebutkan bahwa kerajaan yang terbesar di sana adalah Ternate dan Tidore. Penduduknya masih menyembah berhala. Walaupun demikian, disebutkan selanjutnya bahwa di sana sudah ada beberapa pedagang muslim di pelabuhan-pelabuhan besar di beberapa kepulauan, seperti Salamon, Lontar, dan Komber.

Disebutkan pula oleh Pires bahwa Banda hanya sebuah kampung dan kepala sukunya disebut *cabiles* dengan pemerintahan yang dibantu oleh beberapa tua-tua kampung.[10]

Di beberapa kepulauan lain, masih di Maluku, Tomé Pires bertemu dan berbicara dengan pedagang-pedagang muslim yang bermukim di situ. Ia memperoleh keterangan bahwa daerah itu, terutama Ternate, telah memeluk agama Islam kira-kira 50 tahun yang lalu. Disebutkan bahwa raja Ternate adalah seorang muslim yang bernama Sultan Ben Acorala (Barbarosa menyebutnya sultan Binaracola dan Pigafetta menyebutnya raja Abuleis). Disebutkan selanjutnya bahwa raja Ternate memakai gelar sultan sedang yang lainnya hanya bergelar raja. Ia sedang berperang atau bermusuhan dengan mertuanya, raja Tidore yang bernama raja Almancor (Pigafetta menyebutnya raja Sultan Manzor).

Keterangan Tomé Pires ini diperkuat Antonio Galvao yang menyebutkan raja Ternate bernama Vongi menikah dengan seorang putri dari Patih Jawa dan kemudian menjadi muslim. Anaknya, Boleif, menggantikan Vongi dan pada masa pemerintahannya, Francisco Serrao tiba di Maluku bernama sembilan orang Portugis lainnya. Sebelum Vongi masuk Islam gelar yang dipakai ialah *Kolano*.[11] Tentang nama Boleif seperti yang disebutkan oleh Antonio Galvao mungkin nama yang sama yang oleh Pigafetta disebut raja Abuleis, sedang Parros menyebutkan cachil Boleis, dan ia yang dimaksud telah menolong Francisco Serrao ketika kapalnya karam di sana. Tentang daerah Kalimantan, mungkin inilah yang disebut oleh Tomé Pires *Central Islands*, di antaranya disebutkan

9 La Side, *Peranan Kerajaan Gowa sebagai Kerajaan Maritim Abad ke-16–17*, hlm. 6
10 Armando Cortesao, 1944, *op. cit.*, hlm. 206
11 Hubert Th. Th. M. Jacobs S.J.S., *A Treatise on the Molucas* (c. 1544) *etc.*, 1970–1971, hlm. 144

nama Tanjungpura. Disebutkan bahwa daerah tersebut berada di bawah kekuasaan Pate Unus dari Demak. Kepala daerah di sini memakai gelar *Pate* yang berarti *Governor*. Disebutkan pula daerah ini menghasilkan emas, beras, serta berbagai bahan makanan lainnya.

Tentang sistem pengangkatan raja pada masa berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, juga tetap tidak mengabaikan cara-cara pengangkatan raja seperti pada masa sebelum Islam. Kalau kita mengambil Jawa pada abad ke-14 misalnya, saat itu merupakan zaman berkembangnya kerajaan Majapahit. Negara ini pernah mencapai puncak kemegahannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk (1350–1389). Tingkat pertanian yang maju berdasarkan irigasi yang luas dengan disertai perdagangan internasional yang berkembang, menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk meluaskan pengawasan teritorial, mengembangkan birokrasi yang terperinci, dan menyusun kekuasaan politik yang makin disentralisasikan.[12]

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang mengangkat atau lebih tepat "merestui" pengangkatan raja? Jika kita mengambil contoh Sultan Malik as-Saleh, yang berdasarkan tradisi dari *Hikayat Raja-Raja Pasai* pengangkatannya sebagai raja ialah sebagai berikut: Sebelum ia diangkat sebagai sultan namanya Merah Selu, ia adalah putra Merah Gajah dan Merah Gajah adalah putra angkat Ahmad. Ia dinobatkan menjadi sultan oleh utusan Syarif Mekah bernama Ismail yang ketika bertemu dengan Merah Selu telah mengajarkan agama Islam dan ajaran Rasul Muhammad. Merah Selu ternyata paham tentang apa yang diajarkan oleh syekh tersebut, dan segera dinobatkan menjadi sultan dengan gelar Malik as-Saleh.

Kita melihat bahwa Aceh, khususnya Samudra Pasai pada saat itu, ditinjau dari segi geografi dan sosial ekonomi, merupakan suatu daerah yang penting sebagai penghubung antara Indonesia, India, dan Arab. Schrieke menyebutkan bahwa Aceh adalah pusat perdagangan Islam yang sangat penting. Para pedagang muslim India dan ahli pikirnya (kaum cendekiawan dan ulama-ulama) berkumpul sehingga Aceh menjadi pusat kegiatan studi Islam.[13] Berdasarkan himpunan hukum adat Aceh yang tercantum dalam *Adat Makuta Alam*, yang disusun secara lengkap pada masa pemerintahan Sultan Iskandar *Muda*, pengangkatan dan penobatan sultan ialah sebagai berikut: Menurut lembaran sejarah adat yang berdasarkan hukum (Syara') dalam pengangkatan sultan haruslah semufakat hukum dengan adat. Oleh karena itu, waktu sultan dinobatkan, sultan berdiri di atas tabal, ulama memegang Alquran berdiri di kanan, perdana menteri yang memegang pedang berdiri di kiri. Pada umumnya di Tanah Aceh pangkat sultan turun kepada anak. Sultan diangkat oleh rakyat atas mufakat dan persetujuan ulama dan orang-orang besar cerdik pandai. Adapun orang-orang yang diangkat

12 Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 7
13 B. Schrieke, 1957, *op. cit.*, hlm. 255

menjadi sultan dalam hukum agama harus memiliki syarat-syarat bahwa ia mempunyai kecakapan untuk menjadi kepala negara (merdeka, dewasa, berpengetahuan, adil), ia cakap untuk mengurus negeri, hukum dan perang, erta mempunyai kebijaksanaan dalam hal mempertimbangkan dan menjalankan hukum dan adat.

Jikalau raja mangkat sebelum adanya pengganti oleh karena beberapa sebab lain, Panglima Sagi XXII mukimlah yang menjadi wakil raja, menerima hasil yang didapat dalam negeri Aceh dan daerah takluk atau jajahannya. Jikalau sudah ada yang patut diangkat menjadi raja, perbendaharaan itu pun dengan sendirinya berpindah kepada raja.[14]

Raja-raja pertama pada masa permulaan kerajaan Islam di Jawa seperti Demak, Cirebon, dan Banten, umumnya waktu penobatan dilakukan oleh para Wali Sembilan yang diketuai oleh Sunan Ampel Denta, Sunan Gunung Jati yang menjadi raja pertama di Cirebon telah mendapat restu dari Dewan Wali Sembilan dan diberi gelar raja-pendeta yang menguasai tatar Sunda.[15] Ketika para Wali berkumpul di Demak untuk merencanakan perkawinan Pangeran Hasanudin dengan putri Demak, beberapa saat kemudian Pangeran Hasanudin dinobatkan menjadi raja di Banten.[16]

Di sini kita melihat dengan jelas, para wali di satu pihak sebagai suatu institusi yang berkecimpung di bidang pengembangan agama Islam dan raja atau sultan dari kerajaan-kerajaan Islam di Jawa yang merupakan penegak tampuk pimpinan kerajaan.

Di Sulawesi Selatan, dari beberapa catatan hukum adat yang dihimpun secara terus-menerus dari abad ke-16 hingga abad ke-18, yang di Bone disebut "Latowa", di Gowa dinamakan "Rappang", dan di Wajo disebut "Lontara", dapat dilihat sistem pengangkatan raja. Raja diangkat oleh Dewan Pemangku Adat. Setiap pengangkatan raja harus ditentukan oleh hasil pemilihan dari calon-calon oleh 40 orang Dewan Pemangku Adat.

Sistem penobatan raja di Maluku oleh Antonio Galvao telah dicatat secara terperinci pada masa kerajaan Ternate. Ia mencatat bahwa raja Islam yang pertama di Ternate sekitar tahun 1460 yaitu Vongi, merupakan raja yang pertama masuk Islam.

Di Ternate yang berhak naik takhta apabila ada pengangkatan raja adalah putra raja yang tertua yang berasal dari permaisuri. Menurut Antonio Galvao penobatan raja di Ternate ialah sebagai berikut: Sang Pangeran pada saat penobatannya memakai pakaian yang terbagus yang ia miliki, lalu dengan mahkota emas di kepalanya duduk di singgasana dengan pengiringnya yang selalu siap mengawal. Di pintu gerbang pun

---

14 H.M. Zainuddin, 1961, *op. cit.*, hlm. 319

15 Pangeran Arya Cerbon, *Purwaka Caruban Nagari*, (MS) 1972, hlm. 55

16 R.A. Hoesein Djajadiningrat, *Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten, Bijdrage ter kentschetsing van de Javansche Geschiedschrijving* (Proefschrift), Leiden, 1913, hlm. 46

ditempatkan pengawal yang berpakaian perang. Para bangsawan yang menghadiri penobatan juga memakai pakaian terindah yang mereka miliki. Setelah berkumpul, mereka melakukan sembahyang. Setelah sembahyang selesai, semua hadirin berlutut atau menyembah dan mencium raja sebagai lambang kesetiaannya kepada raja. Sesudah upacara dilakukan di istana, semua menuju masjid. Raja naik kereta yang dikawal oleh pasukan bersenjata dengan pedang terhunus di tangan. Di depan kereta berkibar bendera kerajaan yang mereka sebut panji, yang melambangkan kebesaran raja. Panji tersebut dipasang pada kayu yang terbuat dari pohon palam berwarna merah dan putih dari atas ke bawah. Warna ini merupakan simbol raja. Musik yang dibunyikan adalah gong dan gamelan. Selain itu, terdapat juga musik yang berupa serunai dan tifa. Setelah peresmian dan pentahbisan di masjid, raja yang telah resmi dinobatkan itu pun kembali ke bangsal kerajaan.[17]

Dari *Hikayat Banjar* diketahui hal ihwal berdirinya kerajaan Nagaradhipa, yang menurut hikayat tersebut merupakan kerajaan yang pertama di Kalimantan. Nagaradhipa pada mulanya terletak di ujung tanah. Di sini kita melihat bahwa Aria Mangkubumi sebagai cikal raja-raja Banjar bukanlah seorang yang berasal dari keturunan raja. Ia hanya seorang saudagar kaya raya. Oleh karena itu, ketika Mangkubumi meninggal, penggantinya, Ampu Jatmika, yang merupakan raja yang pertama dari Nagaradhipa, menyuruh membuat candi, keraton, balairung, ruang sidang, dan menara. Bahkan karena Ampu Jatmika bukan keturunan raja dan merasa tidak berhak menjadi raja, olehnya diperintahkan membuat dua arca laki-laki dan perempuan, kemudian ditempatkan di candi dan segenap rakyat diwajibkan menyembahnya dan menganggapnya sebagai raja, supaya Ampu Jatmika beserta keturunannya kelak terhindar dari celaka dan marabahaya.[18] Setelah melengkapi istana, membuat candi dan kedua arca untuk ditempatkan di dalam candi, barulah ia melengkapi aparat kerajaan dengan mengangkat pejabat-pejabat kerajaan. Ia mengangkat Aria Margatsari menjadi patih kerajaan yang membawahi pula beberapa menteri. Demikian pula ketika Ampu Jatmika meninggal, pengganti takhta kerajaan tetap menjadi persoalan karena Ampu Jatmika berpesan bahwa kedua putranya, Ampu Mandastana dan Lambung Mangkurat, atas pesan ayahnya tidak berhak naik takhta karena bukan keturunan raja. Jika Ampu Jatmika meninggal harus dicarikan pengganti yang lain yang masih keturunan raja. Lambung Mangkurat berhasil menemukan pengganti raja, yaitu Putri Tanjungbuih

---

17 J.J. Ras, S., *Hikayat Bandjar*, 1968, Leiden, hlm. 234–242, di sini Ras menyajikan *Hikayat Banjar* dalam dua resensi yang dimuat berurutan. Kami mengambil resensi I sebagai patokan saja. Selanjutnya periksa juga A.A. Cerise, *De Kroniek van Bandjarmasin*, Proefschrift, Leiden, 1928, hlm. 8–12

18 *Ibid.*

yang kelak atas jasa Lambung Mangkurat pula memperoleh jodoh seorang pangeran turunan Majapahit bernama Raden Putra atau Suryanata. Dari kedua tokoh inilah kerajaan berlanjut, sedang Lambung Mangkurat hanya memangku jabatan Mangkubumi hingga akhir hayatnya.

3. Kewajiban-Kewajiban dan Hak-Hak Raja

Raja adalah seorang pemimpin sehingga kepadanya dikenakan sejumlah syarat agar ia menjalankan fungsinya. Padanya dikenakan syarat-syarat untuk menempatkan dia lebih tinggi dari semua manusia yang lain. Karena syarat-syarat yang tidak sedikit dan kewajiban-kewajiban raja yang melebihi dari manusia biasa, kadang-kadang martabat raja dihubungkan dengan kedewaan, raja adalah penjelmaan dari dewa.

Menurut Heine-Geldern, pada kerajaan yang bertradisi Hindu atau Buddha terdapat anggapan struktur kerajaan sebagai mikrokosmos dengan alam semesta sebagai makrokosmos. Oleh karena itu, dalam hubungan kerajaan sebagai pusat dengan segala unsur di sekitarnya disesuaikan dengan susunan alam.[19]

Moertono mengemukakan organisasi kerajaan cenderung untuk tidak berubah meskipun terdapat tantangan politik dan ekonomi.[20] Bahkan kelanjutan kedudukan raja dianggap sebagai syarat utama pengakuan dan peneguhan kedudukan raja tersebut. Kelanjutan ini menurut Geldern tidaklah melalui garis keturunan melainkan kelanjutan dari "wahyu", kelanjutan dari perkenan dewa atau Tuhan.

4. Kekuasaan Raja dan Pangeran terhadap Raja

Adat Makuta Alam telah memberikan beberapa gambaran tentang kekuasaan sultan atau raja (Aceh). Sultan mengangkat panglima sagi dan masa penobatan panglima sagi mendapat kehormatan dengan membunyikan dentuman meriam sebanyak 21 kali, juga sultanlah yang mengangkat uleebalang yang pada masa penobatannya mendapat kehormatan dentuman meriam sebanyak 21 kali. Raja mengadili perkara-perkara yang berhubungan dengan pemerintahan seperti menindak uleebalang yang melakukan pelanggaran. Raja atau sultan menerima audiensi, termasuk menerima tamu-tamu asing yang akan berdagang dengan negeri Aceh. Raja berkewajiban melindungi rakyat dari tindakan sewenang-wenang para pejabat kerajaan. Ia mempunyai kekuasaan untuk mengangkat orang-orang

---

19 R. Heine Geldern, "Conseption of States and Kingship in South East Asia," *The Far Eastern Quarterly*, Vol. II, 1942, hlm. 20–21

20 Soemarsaid Moertono, *State and Statecraft in old Java: A Study of the Later Mataram Period, 16 to 19th*, Monography Series, 1968, hlm. 8

yang ahli dalam hukum (ulama), mengangkat orang cerdik pandai untuk mengurus kerajaan. Mengangkat orang yang perkasa untuk pertahanan negeri yaitu uleebalang atau panglima sagi.[21] Dalam menjalankan kekuasaannya, sultan atau raja mendapat pengawasan dari alim ulama, kadi dan dewan kehakiman, mereka terutama memberi peringatan kepada raja terhadap pelanggaran pada adat dan syara'.

Antonio Galvao memberikan catatan tentang kekuasaan raja Ternate. Disebutkan bahwa pengadilan dan badan hukum tidak ada atau tepatnya tidak ada hukum tertulis, yang ada hanyalah keputusan berdasarkan alasan-alasan yang masuk di akal. Menteri berbicara dan menetapkan keputusan atas nama raja.[22] Di Sulawesi Selatan, dari *Sejarah Gowa* kita mengetahui bahwa raja dibantu oleh *Kasuwiyang Salapangan* atau Majelis Sembilan (*Kasuwiyang* arti sebenarnya mengabdi), kemudian dalam perkembangan selanjutnya menjadi *Bate Salapangan* atau bendera sembilan dalam menjalankan undang-undang dan pemerintahan diawasi oleh *Paccalaya* (hakim, yang menghukum), yang bertindak selaku ketua majelis sembilan. Pada kerajaan Bone, dalam menjalankan kekuasaannya raja dibantu oleh badan yang disebut *Arung Pitu'E* (raja tujuh) yang bertugas memberikan pertimbangan melaksanakan tegaknya hukum dan undang-undang.[23] Di antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, kerajaan Wajo mempunyai corak yang agak lain. Wajo sebenarnya merupakan kerajaan, tetapi dalam sistem pemerintahannya lebih mirip suatu "republik".[24] Hal itu terjadi karena Batara Wajo yang menjadi raja ketiga kerajaan Wajo dipecat, dan kemudian dibunuh karena perbuatannya yang sewenang-wenang terhadap rakyat Wajo. Sejak itu Wajo dipimpin oleh seorang raja bergelar *Arung Matewa Wajo*, gelar dan kedudukan itu tidak dapat diwariskan lagi atau diwarisi. Arung Matewa diangkat oleh badan yang disebut *Arung Enneng'E* (raja yang enam) atau *Petta Enneng'E* (enam yang dipertuan). Untuk mengetahui *Petta Enneng'E* ini, keenam orang itu sepakat untuk mengangkat seorang *Arung Matowa* (raja tua yang dituakan). *Arung Matowa* inilah yang kemudian menjadi kepala negara (raja) yang dihormati dan dituakan di seluruh kerajaan Wajo. Ia mewakili kesatuan Wajo terhadap dunia luar, menyelesaikan perselisihan di antara *Arung Enneng'E*, akan tetapi ia mempunyai wewenang memecat seseorang *Enneng'E*. Ia dapat mengetahui rapat *Arung Enneng'E* dan di dalam perang Arung Matewa harus maju ke medan perang dan memimpin seluruh angkatan, perang kerajaan Wajo. *Arung Matowa* dan *Arung Enneng'E* inilah yang disebut *Pette Wajo* (yang dipertuan di Wajo).

---

21 H.M. Zainuddin, 1961, *op. cit.*, hlm. 314
22 Hubert Th. Th. M. Jacobs S.J., *op. cit.*, hlm. 46
23 Abd. Razak Daeng Patunru, *Sejarah Gowa*, Jajasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1969, hlm. 139
24 H.D. Mangemba, *Kenapopaj Sulawesi Selatan*, Timur Mas, Djakarta, 1968, hlm. 60

5. Tanda Perlambang Raja dan Bangsawan

Transformasi kerajaan-kerajaan di Jawa terutama pada masa Majapahit yang beralih ke Demak yang sudah merupakan kerajaan bercorak Islam menurut Bosch hanya merupakan "pemindahan" belaka pusat kerajaan dari keraton Majapahit ke Bintara Demak kemudian beralih ke tangan Jaka Tingkir (yang kelak menjadi Sultan Pajang), kemudian berpindah pula ke tangan Senapati ing Alaga, yang kemudian akan mengembangkan kerajaan Mataram menjadi kerajaan besar.[25]

Siapa pun orangnya jika ia diberi "wahyu" oleh Tuhan berupa pulung keraton atau kekuatan suci, ia akan memimpin Tanah Jawa dan mewarisi pula kerajaan untuk dapat menguasai seluruh Tanah Jawa. *Babad Tanah Jawi* banyak memberikan contoh soal semacam ini. Dalam kedudukan inilah, menurut Djajadiningrat, merupakan suatu kepercayaan umum masyarakat Jawa, setiap raja yang memperoleh "cahaya nurbuat" yang merupakan wahyu Illahi, yang mempunyai kekuatan magis dan mistis akan berhasil menguasai seluruh kerajaan dan menguasai seluruh Tanah Jawa. "Cahaya nurbuat" ini adalah tidak lain seperti *ndaru* atau pulung keraton, merupakan kekuatan suci yang mempunyai nilai mistik.[26]

Perlunya pralambang bagi raja yang membawa akibat memiliki kekuatan magis, *Babad Tanah Jawi* telah memberikan beberapa contoh. Raden Patah yang menjadi adipati Demak ketika itu mewarisi takhta kerajaan Majapahit dan untuk menolak "bala", maka sebagai syaratnya ialah "kedaton" tersebut *dilungguhi* terlebih dahulu oleh Sunan Giri selama 40 hari. Setelah selesai *perlungguhan* itu barulah kedaton diserahkan kepada Raden Patah; itu pun Raden Patah tetap tinggal di Bintara Demak. Raden Patah kemudian oleh para wali dinobatkan menjadi Sultan Demak I dengan gelar Senapati Jimbung Ngabdur'rahman Panembahan Palembang Sajidin Panatagama. Sejalan dengan peristiwa tersebut Raden Patah telah mengangkat Ki Wanapala sebagai patih dengan gelar Mangkurat.[27]

Babad Tanah Jawi masih memberikan sebuah contoh lagi tentang sebuah benda yang akan menjadi perlambang raja-raja Tanah Jawa. Pada suatu hari para wali sedang berzikir di masjid Demak, tiba-tiba dari atas jatuh sebuah bungkusan yang ternyata isinya adalah *pasujudan* dan selendang Rasullullah. Kedua benda tersebut oleh Sunan Kalijaga disebut baju yang kelak disebut *Antakusuma* yang bergelar Ki Gundil. Baju inilah yang menjadi perlambang pakaian resmi raja-raja di Jawa yang dimulai dipakai sejak masa Senapati ing Alaga di Mataram.

---

25 B. Sehrieke, *op. cit.*, hlm. 319

26 R.A. Hoesein Djajadiningrat, *op. cit.*, hlm. 251

27 W.L. Olthoff, *Babad Tanah Jawi in Proza Javaansche Geschiedenis* (Poenika Serat Babad Tanah Jawi wiwit Baking Nabi Adam Doemugi ing Taoen 1647), Leiden, 1941, hlm. 30

Sebuah benda lain yang menjadi perlambang "magis" yang diceritakan *Babad Tanah Jawi* adalah benda (gong). Pada suatu hari Sunan Kudus mendapat perintah dari Raden Patah untuk menyerang Pengging yang dikuasai oleh Ki Ageng Pengging. Sunan Kudus membawa serta Bone Ki Macan warisan dari Adipati Terung. Sebaliknya Ki Ageng Pengging telah membunyikan benda yang bernama Udan Arum dipukul bertalu-talu sebagai tanda untuk mengumpulkan penduduk Pengging supaya menyerang kembali Sunan Kudus.

Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607–1636) bendera Aceh yang resmi adalah berwarna merah dengan bagian atas terdapat gambar bintang bersudut lima yang mengapit bulan sabit, kemudian di bagian bawahnya terdapat gambar pedang. Selain itu, terdapat lambang kerajaan yang lain ialah stempel sultan yang bercap halilintar dan keris milik raja.[28] Untuk lambang para hulubalang (uleebalang) dan para perwira ialah pedang yang bertakhtakan emas, sedang untuk putri-putri raja (sultan) ditandai oleh pakaiannya, yaitu topi (kopiah) yang bertumpuk emas, semplak lada yang berukiran cawardi, dan baju yang berkerawang emas.

Dari *Hikayat Banjar* kita catat beberapa alat perlambang kerajaan, baik milik raja maupun milik bangsawan. Alat tersebut adalah payung, keris (pada kerajaan Kotawaringin keris kerajaan bernama si Mesa Girang), rencak suji, umbul-umbul, dan panji kakenda.[29]

Selain itu, terdapat pula lambang kerajaan yang bernilai magis, yaitu mahkota (ketika Mangkubumi merebut takhta kerajaan dari mahkota Pangeran Samudra, dan hendak memakai mahkota ternyata tidak dapat masuk ke kepalanya hingga ia urung memakai mahkota). Juga terdapat gamelan Si Rasasti dan Si Rabut Paradah yang disimpan di Paseban Agung.

Antonio Galvao yang mencatat kejadian-kejadian pada waktu penobatan sultan Ternate menyebutkan beberapa alat yang merupakan simbol raja, yaitu mahkota, kereta kerajaan (hanya dipakai pada waktu penobatan raja atau untuk melakukan perjalanan penting raja), kemudian payung (khusus dipegang oleh orang tertentu yang di *Hikayat Banjar* orang tersebut berada di bawah pengawasan menteri pepayung), bendera kerajaan (di sini disebut berwarna merah bagian atas, putih bagian bawah, dan warna ini khusus untuk bendera raja-raja), kemudian keris dan pedang.

6. Birokrasi Pusat dan Daerah

Dari *Hikayat Raja-Raja Pasai*, Hill menyebutkan beberapa pejabat kerajaan dan pejabat militer dari masa pemerintahan Sultan Malik as-

28 Denys Lombard, *Le Sultanat D'Atjeh Au Temps D'Iskandar Muda 1607–1636*, Paris 1967, 58; H.M. Zainuddin, *op. cit.*, hlm. 210

29 J.J. Ras, *op. cit.*, hlm. 504

Saleh hingga Sultan Ahmad (cicit Sultan). Sebutan pejabat-pejabat ini diuraikan berdasarkan perbandingan dengan Sejarah Melayu.[30]

Adapun pejabat-pejabat kerajaan adalah *menteri, hulubalang, sida-sida, embuai, pandita,* dan beberapa pembesar istana. Kepala kampung yang membantu mengumpulkan orang-orang untuk berperang disebut *pendikar* atau *pengulu.*

Adapun nama-nama pejabat militer dalam kerajaan adalah *penglima* kemudian di bawahnya menyusul *pahlawan* dan *ponggawa* sedang pasukan kerajaan umumnya disebut *laskar.* Selain itu, untuk para ratu dan putri-putri raja terdapat pembantu-pembantu, seperti *perwara;* para menteri mempunyai pembantu yang disebut *inang, dayang-dayang* dan pengasuh, bahkan terdapat pula *beti-beti.* Para penguasa atau pemegang pemerintahan tertinggi bergelar *Tun Beraim Bapa,* atau gelar lain *Tuanku;* untuk raja yang memegang pemerintahan bergelar Syah Alam bahkan pada beberapa bagian lain dalam hikayat kadang-kadang ditambah pula gelar *Zillu'lahi fi'l Alam,* kadang-kadang pula terdapat gelar *Daulat Dirgahayu.* Hill juga mencatat bahwa di bagian lain terdapat beberapa gelar yang merupakan pengaruh gelar-gelar di Jawa, seperti *punggawa* untuk hulubalang, *angabei, lurah, aria, bebekal,* dan *petinggi.* Menurut Hill hal ini adalah semata-mata karena pengarang hikayat ini telah mengenal istilah-istilah itu.

Pada bagian lain dari *Hikayat Raja-Raja Pasai* ini dikemukakan pula gelar tertinggi pejabat kerajaan, yaitu *perdana menteri.* Sebagai contoh, pada pemerintahan Malik al Mahmud yang menjadi perdana menteri adalah Sayid Giatu'ddin yang pada mulanya bergelar orang besar dalam negeri bernama Tun Sri Kaya dan pada pemerintahan Sultan Malik al Mansur yang menjadi perdana menterinya adalah Amayu'ddin yang semula bernama Tun Baba Kaya. Satu jabatan penting kerajaan lagi yang disebut dalam *Hikayat Raja-Raja Pasai* adalah *laksamana,* yaitu jabatan yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan serta pertahanan laut. Pada masa Sultan Iskandar Muda (1607–1636) susunan birokrasi pemerintahan kerajaan Aceh (yang sesudah memusatkan kekuatannya di Kutaraja) telah berkembang lebih maju lagi karena perkembangan politik di Aceh juga telah memperoleh kemajuan. Susunan hierarki jabatan yang tertinggi sesudah sultan adalah perdana menteri yang bergelar Orang Kaya Maharaja Sri Maharaja. Berikutnya Orang Kaya Sri Maharaja Lela, penghulu dan Karkun Raja Setia Muda, Karkun Katibul Muluk Sri Indra Suara, dan Karkun Sri Indra Muda. Kemudian jabatan jabatan lain ialah *penghulu* atau *hulubalang* (kepada pasukan), *biduande* (pegawai raja),

30 A.H. Hill, "Hikayat Raja-Raja Pasai", *JMBRAS,* XXXIII, Part 2, 1960, hlm. 30

bentara (tentara), dan *syahbandar* (kadang-kadang ditambah gelar Sri Rama Setia Muda) bertugas sebagai penguasa pelabuhan.[31]

Untuk Jawa kita melihat lagi Majapahit. Sartono menyebutkan bahwa struktur teritorial Majapahit bertalian dengan kepercayaan yang bersifat kosmopolit dan menjadi *proto-type* struktur teritorial kerajaan-kerajaan Jawa kemudian hari. Ibu kota dengan tempat kediaman raja terletak jauh dari kota-kota lainnya. Kerajaan-kerajaan sekitarnya mencari bantuan ke pusat, wilayah kerajaan di Jawa asli terdiri atas beberapa provinsi di antaranya Kahuripan dan Kadiri yang terpenting.

Dalam hal ini kita berjumpa dengan administrasi yang patrimonial, oleh sebab itu dominasi dipegang oleh seorang penguasa yang membutuhkan pegawai-pegawai untuk menjalankan kekuasaannya. Persamaan fisik susunan hierarki Majapahit dan susunan hierarki Mataram jelas tidak hanya mencerminkan persamaan dalam sistem ideologinya, tetapi juga persamaan dalam struktur sosialnya.[32]

Tentang Cirebon, yang dahulu di bawah Pajajaran tetapi sesudah adanya pengaruh Islam kekuasaannya makin menanjak, pemegang kekuasaan tertinggi adalah Susuhunan Jati (Sunan Gunung Jati), yang berstatus raja (dalam versi lain Raja-Pendeta) adalah seorang adipati dari Demak yang ditetapkan sebagai penatagama di Tatar Sunda. Jauh sebelum pengangkatan Susuhunan Jati, Cirebon masih berstatus desa pelabuhan yang dikenal oleh *kuwu* dan seorang pejabat lain disebut *jurulabuhan*. Jabatan *kuwu* jatuh ke tangan Cakrabuana yang berkat perkawinannya dengan seorang putri dari Singapura naik menjadi adipati yang ada di bawah kekuasaan Bupati Galuh.[33] Cakrabuana sesudah menjadi kuwu dan sesudah mewarisi benda-benda keraton Singapura, oleh Prabu Siliwangi dinobatkan menjadi tumenggung dan diberi gelar Sri Mangana.

Mengenai Banten kita mengambil contoh pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Raja bergelar sultan di bawahnya terdapat mangkubumi yang dijabat oleh Pangeran Madura, jabatan ini sama dengan jabatan patih di Mataram Islam. Putra mahkota mendapat kedudukan sultan muda dengan gelar Pangeran Adipati Anom.[34] Dengan demikian, baik Cirebon maupun Banten dalam susunan pemerintahannya berdasarkan pola yang pararel dengan Mataram.

Di Sulawesi ada beberapa pola dari pemerintahan beberapa kerajaan yang mirip jabatan tertinggi sesudah raja, yaitu mangkubumi yang dijabat

---

31 Denys Lombard, *op. cit.*, hlm. 75, 209
32 A. Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 26
33 Pangeran Arya Cerbon, (MS), *op. cit.*, hlm. 29
34 Uka Tjandrasasmita, *Sultan Ageng Tirtajasa Musuh Besar Kompeni Belanda*, Penerbitan Jajasan Nusalarang, 1967, hlm. 9

oleh *opu patunru*. Putra mahkota kerjaan sudah didudukkan dalam dewan pemerintahan; mereka bergelar *opu caning*. Juga pada kerajaan Luwu terdapat struktur jabatan yang disebut *hadat sembilan*, yang kalau kita boleh membandingkan kira-kira sama dengan *nawaratnya* pada masa Majapahit. Jabatan *opu pabicara* dan *opu tomarilang* dalam tugasnya mirip dengan bupati *keparak kiwa* dan bupati *keparak tengen* yang bertugas mengurus segala soal yang berhubungan urusan pemerintahan istana. Kedudukan mereka langsung di bawah *opu patunru* seperti halnya patih di Mataram. Jabatan *opu bali rante* yang mengurus bendahara negara sama seperti jabatan bupati *gedong kiwa*. Ia juga mempunyai jabatan rangkap, yaitu mengurus soal perdagangan dan hubungan ke luar yang dalam pemerintah Mataram Islam dijabat oleh bupati *gedong tengen*, sekaligus merangkap bupati *gede* dan bupati *sewu*.

Di samping itu, terdapat jabatan-jabatan kelas tiga seperti *opu wagee* yang mengepalai pembawa sirih bipang. *Opu cenrana* yang kira-kira sama dengan bayangkari pada masa Majapahit, dan *opu lalantoro* yang kira-kira sama dengan jabatan *bupati kadipaten anom* yang mengurus rumah tangga putra mahkota. Soal-soal yang berhubungan dengan keagamaan diurus oleh kadi yang dibantu imam, kadi, dan bilal.

Di kerajaan Bone, jabatan tertinggi sesudah raja adalah *tomari lalang* (mangkubumi), ia adalah ketua dewan *hadat tujuh* yang merupakan wakil tujuh orang dari berbagai daerah di Bone, juga kepala daerah dari daerah-daerah tersebut. Anggota *hadat tujuh* yang disebut *arung pitu* terdiri antara lain dari *arung ujung*, *arung tiboyong*, *arung maccege*, dan *arungta*. Mereka yang berkedudukan di pusat kerajaan Bone adalah kepala-kepala daerah yang ditempatkan di pusat; sedang sebagai kepala di daerahnya sendiri mereka mengangkat wakil yang disebut *sulewatang*. *Sulewatang* ini mempunyai pula seorang wakil yang disebut *mado*. Yang menjadi *tamailalang* atau *makkadange'tama*, biasanya *arung-ujung*. Jadi, *arung pitu* adalah sebuah federasi yang menunjang kekuatan kerajaan Bone. Jabatan-jabatan rendah sesudah *arung pitu* adalah *jematoangeng* (pesuruh raja untuk menyampaikan perintah surat); *anro-uru-anak-karung*, yang kira-kira sama dengan bupati kadipaten Anom di Mataram, jabatan bayangkari adalah *tomalompona tuwangke*, sedang para pengawalnya disebut *tuwangke*.[35] Jabatan juru tulis (sekretaris) mengingatkan kita pada jabatan-jabatan yang terdapat di Maluku.

Di kerajaan Gowa, jabatan tertinggi sesudah raja adalah *pabbicarabuta* (mangkubumi) yang dibantu oleh *Tumailalang Mataowa* atau *Tumailalang Towa* dan *Tumailalang-Malolo*. Jabatan tinggi ini mengingatkan kita pada

35 Abd. Razak Patunru, *op. cit.*, hlm. 141

triumvirat Majapahit (mahamentri Hino, Sirikan, dan Helu) serta *triumvirat* Mataram Islam (putra mahkota, bupati *sentana kiwa*, dan bupati *sentana tengen*). Bertindak selaku dewan pemerintahan tertinggi adalah *Batesalapanga* atau *Kasuwiyang Salapanga* (majelis sembilan). Di bawah *Pabbicarabuta* sebagai pejabat tertinggi, seperti disebutkan adalah *Tomailalang Towa* (petugas tertinggi, yang menyampaikan perintah-perintah raja kepada *Bate Salapanga*) dan *Tumailalang-Malolo* (pegawai tinggi urusan istana). Panglima tertinggi (laksamana) disebut *Anren Lompong Tumakkajanna* merupakan panglima tertinggi angkatan perang kerajaan Gowa. Tentang *Bate Salapanga* yang merupakan kepala-kepala daerah yang mula-mula merupakan federasi Gowa, mereka bergelar *Gallarang* atau *Karaeng Salapanga* dikepalai oleh salah seorang dari anggota sembilan yang disebut *Pacacalaya*. Kedudukan *Bate Salapanga* setingkat lebih atas dari kedudukan *akuwu ripingir* pada masa Majapahit karena fungsi mereka dalam pemerintahan istana tidak menentukan.

Hikayat Banjar menyebutkan bahwa di kerajaan Banjar pada masa pemerintahan Raja Suryaganggangwangsa, yakni seorang keturunan Majapahit, ditempatkan Lambung Mangkurat sebagai pejabat tertinggi dalam kerajaan dengan jabatan mangkubumi. Tugasnya sebagai mangkubumi adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum, baik di luar maupun di dalam istana. Raja mengadakan audiensi setiap hari Sabtu yang dihadiri oleh semua menteri. Jabatan tertinggi di bawah mangkubumi adalah *panganan* yang dipegang oleh Aria Margatsari, kemudian *pangiwa* yang dipegang oleh *Tumenggung Tatahjiwa*. Kedua pejabat yang disebut terakhir memerintah segala sesuatu yang berhubungan dengan istana. Di bawah jabatan *panganan* dan *pangiwa* terdapat jabatan *mantri empat* yang bertugas sebagai jaksa yang diserahkan pada patih *laras*, patih *pasir*, patih *luhur*, dan patih *dulu*. Selanjutnya terdapat jabatan *mantri-bumi*, jabatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial sehari-hari di dalam masyarakat yaitu empat orang, masing-masing sang *Panimba sagara*, sang *Pangarantasmanan*, sang *Pambalankatan*, dan sang *Jampangsasak*. Jabatan terendah dalam hierarki kerajaan di bawah jabatan-jabatan yang baru disebutkan adalah *mantri ampat puluh* yang masing-masing membawahi pegawai (anggota) sebanyak seratus orang.[36]

Dalam hikayat juga disebutkan beberapa jabatan pada masa pemerintahan Pangeran Samudra, yaitu raja pertama kerajaan Banjarmasin. Pangeran Samudra mengangkat Patih Masih sebagai mangkubumi, Patih Balit sebagai *pangiwa*, dan Patih Balitun sebagai *panganan*. Selanjutnya sebagai *gamparan panumping* diserahkan kepada

36 *Mantri Ampatpuluh*, diterjemahkan oleh Ras sebagai kepala regu dari Angkatan Perang, J.J. Ras, *op. cit.*, hlm. 233

Patih Kusin dan Patih Muhur masing-masing membawahi 30 menteri. Selain jabatan-jabatan yang telah disebutkan terdapat lagi jabatan-jabatan rendahan, seperti *jaksa, singabana, parakan papayungan, para nanang, para menteri, surawisa, mandun, saragani, mangumbala,* dan *menteri umbul*. Pada umumnya jabatan-jabatan ini berhubungan dengan kegiatan yang bersifat pengamanan negara atau kemiliteran. Pangeran Samudra kemudian masuk Islam berkat petunjuk ajaran agama Islam yang diberikan oleh penghulu Demak, dan ketika datang saudagar Arab, Pangeran Samudra memperoleh gelar Suryanullah.

Di daerah Nusa Tenggara, kerajaan Bima memegang peran cukup menonjol. Dari berita-berita setempat diperoleh gambaran bahwa agama Islam berkembang di sana dari dua arah yaitu dari Jawa dan Sulawesi Selatan. Hingga permulaan abad ke-16 penduduk daerah tersebut dapat dibagi dalam lima kelompok dan tiap-tiap kelompok dikepalai oleh seorang *ntjuhi*, yaitu:

1) *Ntjuhi Dara* di bagian Bima Tengah.
2) *Ntjuhi Borowani* di bagian Bima Timur.
3) *Ntjuhi Sanggapupa* di bagian Bima Utara.
4) *Ntjuhi Parewa* di bagian Bima Selatan.
5) *Ntjuhi Balo* di bagian Bima Barat.

Apabila ada persoalan bersama yang bersangkut paut dengan kepentingan daerah bersama, mereka berkumpul untuk musyawarah. Ahmad Amin menyebutkan bahwa kira-kira tahun 1575 datang seorang Jawa, dan kelima kelompok *ntjuhi* sepakat untuk mengangkat orang tersebut menjadi raja Bima dengan gelar *Sangaji*. Kelima mereka inilah yang berhak memilih dan mengangkat raja. Pemerintahan berlaku berdasarkan *Hadat*. Namun, pada kenyataannya sangaji yang bernama sang Bima menyerahkan jabatan raja kepada anaknya yang bernama Indra Jambrut.

Raja Bima mulai menganut agama Islam sekitar abad ke-17. Seorang raja bergelar Ruma Ta Ma Bata Wadu (raja Bima XXVII) dijadikan menantu oleh raja Gowa dan memeluk agama Islam tahun 1050 H (1640 M). Hak-hak raja dan hak-hak *ntjuhi* tetap seperti semula. Setelah ia ikut menyebarkan agama Islam di kalangan para *ntjuhi* dan rakyat Bima, sangaji Bima kemudian diberi gelar Sultan Bima I dengan nama Sultan Abdul Kadir sedangkan para *ntjuhi* diubah gelarnya menjadi *Gelarang*. Sistem pemerintahan didasarkan atas *Hadat*. Mengenai susunan pemerintahan adalah sebagai berikut.

Kekuasaan tertinggi di tangan sultan; orang kedua sesudah sultan adalah perdana menteri yang disebut *Tureli Nggampo* (biasanya dijabat oleh adik kandung Sultan atau keluarga yang dekat sekali hubungannya dengan Sultan). Di bawah *Tureli Nggampo* terdapat tugas pejabat yang membantu kegiatan Tureli Nggampo masing-masing *Tureli Balo, Tureli*

Waha, Tureli Saharu, Tureli Parado, dan *Tureli Donggo*. Melihat nama-nama yang tujuh ini jelas mereka adalah kepala-kepala daerah yang ada di bawah naungan kerajaan Bima.

Majelis *Hadat* dikepalai oleh kepala *Hadat* yang bergelar *Bumi Luma Basene* dan dibantu oleh *Bumi Luma Balo* sebagai wakil kepala. Anggota-anggotanya bergelar *Bumi Mae* terdiri dari 12 anggota. Kedudukan mereka dalam majelis *Hadat* adalah sebagai anggota perwakilan menggantikan kedudukan *ntjuhi* dalam haknya mengangkat/melantik Sultan. Selain majelis *Hadat* terdapat lagi majelis agama yang dikepalai oleh seorang kadi yang bertugas sebagai imam kerajaan Bima. Ia dibantu oleh empat orang khatib di pusat serta dibantu pula oleh 17 orang *lelenae*. Di tingkat daerah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Bima, kepala daerah disebut *jeneli* dibantu oleh *Bumi Nae* sebagai wakil *jeneli* dan *Labenae* sebagai wakil di bidang keagamaan.[37]

7. Mobilitas Golongan Birokrat

Naik turunnya mobilitas pada masyarakat dipengaruhi oleh terjadinya pergeseran kelas sosial di kalangan masyarakat itu sendiri. Terjadinya mobilitas sosial ini di berbagai daerah di Nusantara kalau tidak karena perang dinasti yang terus-menerus dan adanya anasir-anasir baru di kalangan masyarakat, disebabkan adanya perebutan hegemoni di bidang politik dan perdagangan.

Jika melihat Aceh pada abad ke-13 kita mengenal nama Merah Selu yang kemudian menjadi sultan bergelar Malik as-Saleh. Nama *merah* adalah gelar bangsawan yang lazim di Sumatra Utara. Namun, *selu* kemungkinan berasal dari kata *sungkala* yang aslinya dari *sanskrit chula*. Yang menempatkan Merah Selu, seorang yang kaya dan tampaknya berbau adat istiadat Hindu; menjadi seorang raja adalah berdasarkan kepemimpinannya yang menonjol.[38] Dari *Hikayat Raja-Raja Pasai* ini kita berkali-kali menemukan bagian Merah Selu mengembara dari satu tempat ke tempat lain dengan penolakan dari daerah-daerah yang bersangkutan; tetapi kemudian ia berhasil diangkat menjadi raja di suatu daerah. Ini memperlihatkan mobilitas vertikal Merah Selu masih perlu diperkuat lagi dengan adanya penobatan menjadi sultan oleh jasa seorang alim ulama utusan Syarif Mekah bernama Syarif Ismail. Kedudukan mulai kuat sebagai sultan baru diperoleh oleh putranya Malikul Zahir.

Pada masa pemerintahan kerajaan Samudra Pasai ini kita masih banyak melihat adanya mobilitas vertikal dan sangat sedikit adanya mobilitas horizontal. Sultan Malik al-Zhahir mempunyai dua orang anak masing-masing Malik al-Mahmud dan Malik al-Mansur. Kedua putra

37 Ahmad Amin, *Sejarah Bima*, 1971, hlm. 10–12
38 A.H. Hill, *op. cit.*, hlm. 15

raja itu semasa kecilnya diserahkan kepada seorang alim ulama bernama Sayid Ali Chiatuddin untuk dididik. Sayid Chiatuddin dinaikkan kedudukannya sebagai perdana menteri. Dengan demikian, Sayid Assyayuddin naik menjadi perdana menteri setelah Malik al-Mansur menjadi raja Samudra.

Mobilitas horizontal dapat terjadi biasanya karena sang raja mempunyai banyak anak laki-laki, dan mereka perlu diberi jabatan kepala daerah di suatu tempat, atau dapat juga terjadi sebagai akibat pergeseran pejabat-pejabat dari satu tempat dipindahkan ke tempat lain dengan kedudukan yang sama.

Dari *Hikayat Raja-Raja Pasai* kita dapat mengambil contoh terjadinya mobilitas horizontal pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Perumadel Perumal. Ia menempatkan anak laki-lakinya yang tertua, Tun Brain Bapa, menjadi kepala daerah di Tukas. Perkembangan sosial lebih maju lagi ketika masa kerajaan Aceh di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Mobilitas horizontal terjadi karena hubungan *clientship* dan hubungan perkawinan terjadi juga pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda.

Pada tahun 1613 Johor diserang dan ditaklukkan Aceh. Sultan Johor Alauddin Riayat Syah III ditawan dan dibawa ke Aceh, tetapi kemudian dilepaskan kembali dengan harapan Johor akan membantu Aceh menghalau Portugis dari Semenanjung Malaka. Janji itu ternyata tidak dipenuhi, sehingga tahun 1615 Iskandar Muda mengirim armada lagi untuk menyerang Johor dan Sultan Johor Riayat Syah III dibunuh, sedang adik Sultan Johor Raja Abdullah, dikawinkan dengan adik kandung Iskandar Muda, dan kemudian dinobatkan menjadi Sultan Johor. Dengan adanya perkawinan ini diharapkan ada keseimbangan kekuatan di sepanjang pantai Sumatra dan Semenanjung Malaka, walaupun harapan ini tidak tercapai karena sesudah Raja Abdullah menjadi Sultan Johor, ia membangkang terhadap ikatan kekeluargaan dengan menceraikan adik Iskandar Muda. Akibatnya Johor diserang kembali oleh Aceh dan Sultan Abdullah terpaksa melarikan diri ke Lingga dan di sana ia meninggal.[39]

Di Jawa perebutan hegemoni antara pesisir dengan pedalaman mulai tampak dengan makin meningkatnya peran daerah-daerah di pesisir Jawa menentang Majapahit. Japara yang memiliki pelabuhan beras yang semula di bawah pengaruh Majapahit dapat ditarik menjadi daerah di bawah kekuasaan Demak. Ketika Demak memegang hegemoni di Jawa, usaha untuk mempertahankan hegemoni ini telah diusahakan dengan berbagai mobilitas dari golongan birokrat di sepanjang pantai utara Jawa. Setelah Majapahit jatuh, praktis di sebelah timur pulau Jawa sudah di tangan Demak. Perhatian kemudian diarahkan ke Jawa, ke sebelah barat, karena kekuasaan di sana mulai dari Cirebon hingga Banten masih ada di bawah

39 H.M. Zainuddin, *op. cit.*, hlm. 306–307

pengakuan Pakuan Pajajaran. Dengan adanya saudagar-saudagar Islam dan para bangsawan daerah yang menganut agama Islam, dan dengan mengadakan kerja sama dan hubungan-hubungan perkawinan, Demak berhasil meluaskan kekuasaannya hingga ke Banten.

Pada masa abad ke-16 Cirebon masih merupakan suatu daerah kecil di bawah kekuasaan Pakuan Pajajaran. Raja Pajajaran melalui bupati dari Galuh hanya menempatkan seorang juru labuhan di Cirebon. Namun, ketika Cakrabuana, seorang tokoh yang masih mempunyai hubungan darah dengan keluarga raja Pajajaran, berhasil memajukan Cirebon, ia sudah menganut agama Islam. Usaha memajukan agama Islam bersamaan pula dengan menaikkan status sosial pejabat-pejabat Cirebon. Usaha ini mendapat bantuan penuh dari Demak. Seorang tokoh yang dikenal sebagai salah seorang Wali Sembilan berhasil menaikkan tingkat mobilitasnya menjadi raja di Cirebon. Sunan Gunung Jati, demikian nama tokoh tersebut, berhasil menjadi raja di Cirebon dan melakukan ikatan perkawinan dengan seorang putri dari Raden Patah (Ratu Masa Nyawa). Dengan naiknya status sosial Sunan Gunung Jati dari seorang alim ulama yang tadinya tidak memegang peran penting dalam pemerintahan, ia berhasil meluaskan dan berusaha meruntuhkan kerajaan Pajajaran. Ia memperoleh gelar rangkap karena perannya yang menonjol di bidang keagamaan dan pemerintahan sehingga memperoleh gelar *pendeta*.[40] Dalam usaha memperluas kekuasaan, Demak memperoleh seorang tokoh yang tadinya bukan berasal dari golongan bangsawan yaitu Fadillah Khan atau Faletehan. Nama tokoh itu begitu terkenal sehingga sangat dikenal oleh orang Portugis. Faletehan, yang oleh Sultan Demak III, Pangeran Trenggana, dikawinkan dengan salah seorang putrinya, memegang peran sebagai senapati. Usaha penaklukan Sunda Kalapa sebagai bandar terpenting dari Pajajaran yang mendapat bantuan dari Portugis berhasil dengan baik berkat bantuan tentara Cirebon dan Banten.

Ketika pusat kekuasaan kerajaan Demak mulai menurun akibat pertikaian antarkeluarga raja Demak, Jaka Tingkir, seorang rakyat biasa yang karena adopsi menjadi putra raja dari Trenggana, berhasil mengalihkan pusat kerajaan ke Pajang. Munculnya Pajang setelah tahun 1574 bukan karena dinasti raja-raja yang berkuasa berasal dari Pengging, tetapi kehadirannya adalah akibat tantangan hegemoni yang beruntun antara daerah pesisir dan daerah pedalaman.[41] Naik-turunnya mobilitas pada masyarakat tradisional Jawa boleh dikata dari strata tertinggi kelas-kelas sosial yang mempunyai *privilege* itu. Dengan hadirnya saudagar-saudagar Islam yang mempunyai peran penting dalam bidang

---

40 Pangeran Arya Cerbon, (MS), *op. cit.*, hlm. 55
41 B. Schrieke, *op. cit.*, hlm. 80

perdagangan di daerah pantai ikut membantu mempercepat pemberontakan-pemberontakan terhadap kekuasaan pusat Majapahit. Dalam hal ini Demak telah berhasil memegang tampuk pimpinan. Ketika kekuasaan Demak pudar, situasi politik dan perdagangan menjadi berbeda. Penguasa kerajaan dapat lebih memusatkan kegiatan-kegiatan politiknya, sedang kelas-kelas lain tidak memperoleh kesempatan lagi untuk mengadakan perjuangan politik. Lebih-lebih setelah hegemoni di Jawa dipegang oleh Mataram yang mempunyai kondisi sosial yang berbeda dengan daerah-daerah pesisir karena lebih memusatkan kegiatan ekonomi pada perdagangan agraris. Kondisi yang demikian ini memungkinkan penguasa kerajaan dapat mengembangkan birokrasi menjadi lebih eksklusif.

B. Hubungan Pusat dan Daerah

1. Sistem Pengawasan Pusat dan Daerah

Dari segi peta politik, munculnya kerajaan Samudra Pasai abad ke-13 sejalan dengan suramnya peran maritim kerajaan Sriwijaya, yang kita ketahui sebelumnya memegang peran penting di kawasan Sumatra dan sekitarnya. Sementara itu, di Semenanjung Malaka pada tahun 1280 telah terjadi invasi Thai ke daerah ini; sedang di Jawa kita ketahui hingga akhir abad ke-13 adalah masa kejayaan Singasari–Majapahit, bahkan tahun 1292 Kertanegara mengirim ekspedisi ke Melayu.[42] Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa hingga akhir abad ke-13 hanya kerajaan Melayulah satu-satunya yang masih merdeka; sementara di Jawa, Majapahit sedang tumbuh dengan pesat. Satu faktor yang perlu dicatat adalah bahwa sebagai akibat desintegrasi kerajaan Sriwijaya, Islam mulai masuk ke sekitar pantai utara Sumatra. Hal ini ditambah pula bahwa beberapa abad sebelumnya pedagang Arab sudah mengenal pelayaran dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara ini, bahkan pada abad ke-10 mereka telah memegang peran penting dalam jalan perdagangan di Asia Timur.

Walaupun Marco Polo (1292) hanya menyebut Perlak sebagai daerah yang sebagian penduduknya telah beragama Islam sedang daerah lainnya yang disebut Marco Polo, yaitu Basma, Samara Dagroian, dan Lamri masih belum mengenal Islam, hal ini tidak dapat menutup kenyataan adanya batu nisan berangka tahun 1297 dari Malik as-Saleh, raja Pasai yang telah menguatkan bukti bahwa di sana telah berdiri kerajaan Islam.

Lokasi Basma dan Samara, seperti yang disebutkan Marco Polo, menunjukkan bahwa kedua tempat itu tentunya penting sebagai pelabuhan. Di dalam *Hikayat Raja-Raja Pasai* selain Samudra Pasai ada tempat lain

---

42 A.H. Hill, *op. cit.*, hlm. 76–83

yang disebut Samarlangga yaitu sebuah daerah yang ditaklukkan oleh Malik as-Saleh. Sementara itu, Samudra pada saat yang sangat berdekatan dengan perjalanan Marco Polo, adalah sebuah tempat yang banyak dikunjungi oleh pedagang muslim. Seperti kita ketahui, berkembangnya kerajaan Islam yang pertama-tama baik di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, maupun daerah-daerah lainnya adalah di pesisir-pesisir. Meskipun demikian, dari kitab-kitab sejarah kita mengetahui bahwa antara daerah yang letaknya berdekatan selalu saling berebut hegemoni hingga pusat-pusat kerajaan pada saat-saat tertentu akan bergeser satu sama lain.

Dari *Hikayat Raja-Raja Pasai* terdapat petunjuk bahwa tempat yang pertama sebagai pusat kerajaan Samudra Pasai adalah muara Sungai Pasangan yang disebut dua kali dalam hikayat tersebut. Sungai Pasangan adalah sebuah sungai yang cukup panjang dan lebar di sepanjang jalur pantai yang memudahkan perahu-perahu dan kapal-kapal mengayuhkan dayungnya ke pedalaman dan sebaliknya.

Hikayat Raja-Raja Pasai menyebutkan beberapa perjalanan raja dengan mengarungi sungai menuju ke pedalaman. Dari hikayat itu juga kita mendapat petunjuk bahwa dua kota yang terletak berseberangan di muara Sungai Pasangan adalah Pasai dan Samudra. Kota Samudra terletak agak lebih ke pedalaman. Kern mengatakan bahwa ada sebuah desa kecil yang bernama Pasai, terletak agak ke muara sungai Pasai dan di tempat inilah terletak beberapa makam raja.[43] Dengan demikian, dapat diduga di muara Sungai Pasangan inilah rupanya letak ibu kota tua Samudra Pasai, yang kemudian hari pindah ke Lho' Seumawe.

Sejarah Asia Tenggara mempunyai banyak contoh mengenai permodalan beberapa ibu kota kerajaan untuk mengembangkan status kerajaan itu sendiri atau untuk perlindungan. Pemindahan ibu kota dari tempat lama ke sekitar Lho' Seumawe masih belum merupakan bukti adanya invasi Majapahit seperti disebutkan dalam salah satu fragmen cerita itu. Kerajaan Samudra Pasai masih tetap berdiri hingga abad ke-16 ketika kemudian berada di bawah daerah taklukan Aceh. Dari *Hikayat Raja-Raja Pasai* kita mencatat bahwa Malik as-Saleh sebelum menjadi raja besar di Samudra Pasai telah melakukan beberapa kali perang dan penaklukan terhadap daerah-daerah lain, antara lain negeri Benua, memerangi Sultan Malik al Nasar; setelah seluruh negerinya ditaklukkan Sultan Malik al Nasar sari ke Gunung Telawas, Kumbu, dan Pekersang. Semua tempat yang ditaklukkan dengan perang kemudian di bawah perintah Samudra Pasai. Terhadap daerah yang tidak mau takluk, penguasaannya terpaksa menyingkir seperti yang diceritakan *Hikayat Raja-Raja Pasai*. Orang-orang Gayo yang lari ke hulu Sungai Pasangan karena

43 R.A. Kern, "De Verspreiding van de Islam", *Geschiedenis van Nederlandsche-India*, F.W. Stapel, deel I, Amsterdam, 1938, hlm. 310

tidak mau tunduk kepada agama Islam yang disampaikan oleh Malik as-Saleh. Dari hikayat ini pula kita ketahui bahwa untuk mengikat tali persahabatan dengan daerah kerajaan yang kedudukannya sejajar, dilakukan perkawinan seperti yang dilakukan oleh oleh Malik as-Saleh yang menikah dengan salah seorang putri raja Perlak.

Pada bagian lain kita mencatat bahwa pemerintahan beberapa daerah kecil yang ada di bawah naungan Samudra Pasai diserahkan kepada anak raja yang sedang memerintah yang bergelar Tun Beraim Bapa yang menguasai daerah Pekan Ratu, bahkan dimasukkan dalam sistem pengawasannya. Ketika kerajaan Samudra Pasai mendapat serangan dari negeri Keling, yang diminta pertolongan untuk mengusir musuh adalah Tun Beraim Bapa.

Agak jauh ke selatan kerajaan Samudra Pasai, pada masa pemerintahan Ahmad Malik-az-Zhahir Bahian Syah, terletak negeri Tamiang yang diperintah oleh raja Dinok. Setelah ditaklukkan, Tamiang diperintah oleh seorang pembesar istana kerajaan Samudra Pasai yang bergelar raja Setia Muda. Penempatan Raja Setia Muda sebagai raja di Tamiang adalah jelas untuk memudahkan pengawasan terhadap daerah Tamiang yang baru saja ditaklukkan.

Hikayat Raja-Raja Pasai menyebutkan daerah yang berada di bawah pengaruh Samudra Pasai adalah Pasai, Balek Bimba, Samerlangga, Beruana, Simpang di hulu sungai, Buloh Telang, Benua, Samudra, Perlak, Hambu Aer, Rama Candi, Tukas, dan Pekan. Menurut hikayat tersebut, sesudah kerajaan Samudra jatuh karena serangan Majapahit pada sekitar abad ke-15, kedudukannya diganti oleh kerajaan Tamiang. Di Tamiang tidak lazim menyebut kepala pemerintahan dengan nama uleebalang tetapi dengan sebutan raja. Di bagian lain daerah Aceh, sebagian raja kecil disebut uleebalang, sedangkan Sultan Aceh Raya tetap disebut Sultan Aceh Raya.

Aceh menanjak dengan cepat pada abad ke-17 ketika seluruh Aceh sudah berada di bawah Aceh Besar yang berkedudukan di Kutaraja. Dalam masa pemerintahan Iskandar Muda, kerajaan mencapai kemakmuran yang luar biasa. Bandar Aceh dibuka luas menjadi pelabuhan internasional dengan jaminan pengamanan terhadap gangguan laut dari kapal perang Portugis. Kekayaan negara dan hasil perkebunan negara lada, dipergunakan untuk pembelian dan pembuatan kapal-kapal perang guna memperkuat armada kerajaan. Penaklukan demi penaklukan tidak hanya terhadap daerah Aceh dan sekitarnya tetapi meluas jauh keluar daerah Aceh.

Pada masa pemerintahan Iskandar Muda inilah disusun suatu undang-undang tentang tata pemerintahan yang disebut *Adat Makuta Alam*. Di tingkat pusat kerajaan, Sultan Iskandar Muda berhasil

mempersatukan golongan masyarakat yang disebut *kaum*, di antaranya yang memegang peran penting adalah Kaum *Lhoe Reotoih* (kaum tiga ratus), Kaum *Tok Raoe* (orang-orang Asia), Kaum orang Mante, Batak Karo, Arab, Persi, Turki Mindi, Kaum *Ja Sandang* (orang-orang Mindi), dan Kaum *Imam Peucut* (imam empat). Untuk daerah sekitarnya, yaitu kerajaan-kerajaan di luar ibu kota Kutaraja, Sultan Iskandar Muda membagi kerajaan itu dalam *mukim-mukim*, yang dapat mengatur pemerintahan sendiri sepanjang tidak berlawanan dengan hukum yang tertulis dalam *Adat Makuta Alam*.

Susunan daerah mulai dari tingkat desa/kampung hingga menjadi *mukim* adalah sebagai berikut: Kesatuan hukum masyarakat yang asli pada tingkat pertama adalah keluarga sekampung/*meunasah*. Kepala kampung bergelar *Keucik* (orang-orang yang tertua, terkemuka). Kemudian kampung ini di bawah kesatuan *mukim*, pada permulaannya adalah 1.000 orang laki-laki dewasa. Jadi, suatu mukim yang kemudian berkembang penduduknya dapat dipecah lagi menjadi beberapa mukim. Beberapa mukim ini kemudian dipersatukan dalam suatu kelompok yang lebih besar yang dikepalai oleh *uleebalang* sultan, oleh karena akan mengurus semua perkara yang berhubungan dengan daerah kelak. Rakyat mendapat tanah bebas untuk membuat sawah atau kebun dan apabila telah menjadi hak milik harus membayar pajak kepada raja Talce.

Gabungan negeri-negeri yang merupakan pengelompokan *mukim-mukim* ini dalam kesatuan yang besar (gabungan uleebalang) berupa *sagi*, dipimpin oleh *pengadilan sagi*. Sebenarnya yang menjalankan pemerintahan dalam suatu sagi adalah uleebalang yang bersangkutan dan *panglima sagi* hanya sebagai pengawasnya. Akan tetapi, bila negara dalam keadaan bahaya, panglima sagi memegang urusan pemerintahan dan kemiliteran atas nama sultan. Negeri-negeri yang berada di luar Aceh Besar (*tiga sagi*) susunannya sama, tetapi pemerintahannya langsung berada di bawah sultan. Beberapa pokok peraturan yang tertulis dalam Adat Makuta Alam antara lain tentang pengangkatan panglima sagi dan uleebalang, dan peraturan tentang belanja sagi dan *uleebalang* dalam tanggungan sultan yang ada dalam negeri Aceh Besar.[44]

Seperti dibicarakan dalam bagian-bagian terdahulu, Demak memegang pimpinan puncak di Jawa setelah jatuhnya Majapahit. Pimpinan Pusat ini dengan ibu kotanya Bintoro masih terus berlangsung hingga masa pemerintahan Pangeran Trenggana. Segala tanda kebaktian dari berbagai adipati dan tanda *sangaji* mengalir ke Demak. Tanda kebaktian ini tidak hanya berupa barang tetapi juga putri cantik, binatang-binatang, dan hasil-hasil alam yang jarang didapat. Ketika Trenggana meninggal

---

44 H.M. Zainuddin, *op. cit.*, hlm. 319–329, Peraturan-peraturan tentang pengangkatan panglima Sagi, Uleebalang, dan sebagainya beserta syaratnya tercantum dalam *Adat Makuta Alam*

yang tampil kemudian adalah menantunya, Jaka Tingkir, yang diakui orang keramat dari Kudus, sebagai pengganti sultan dengan gelar Prabu Adiwijaya. Jatuhnya Adiwijaya berakibat suatu pergeseran bagi kekuasaan tertinggi. Arya Pangiri, Pangeran Demak, segera memegang pemerintahan, tetapi hampir pada saat itu juga timbul pemberontakan yang berasal dari Pajang yang dikobar-kobarkan oleh Mataram. Di Jawa Tengah akhirnya timbul pergolakan untuk merebut pucuk pimpinan atas daerah-daerah yang dikuasai para adipati yang dipimpin oleh Mataram. Sebaliknya bupati-bupati daerah pantai timur dengan pimpinan bupati Surabaya telah berusaha memengaruhi adipati-adipati Jawa Tengah untuk tidak mengakui Senapati sebagai raja. Sesudah Senapati meninggal mereka mencalonkan Pangeran Puger dari Demak sebagai kawan baik untuk menghadapi saudaranya, Ki Gede Mataram, sultan yang baru (Seda ing Krapyak). Akan tetapi, karena tidak saling percaya persekutuan ini akhirnya buyar dan Demak sejak tahun 1640 tunduk, disusul oleh Pati, Pajang, Tuban, Madura, dan Surabaya. Mereka satu per satu tunduk dan jatuh di bawah naungan Mataram sejak tahun 1625. Mataram akhirnya memegang kekuasaan tertinggi.[45]

Kerajaan Gowa. Berbeda dengan situasi di Jawa dan Sumatra, Sulawesi dalam menerima pengaruh agama Islam jauh lebih lambat. Islamisasi Gowa dan Tallo, kerajaan Makassar yang tergabung sejak pertengahan abad ke-16 yang dalam zaman yang sama terlibat dalam perdagangan dengan negeri-negeri Malayu sampai kepulauan Malaka.[46] Pertama-tama kita melihat Gowa sebagai pusat kekuasaan politik di Sulawesi Selatan pertengahan abad ke-16. Pada masa Karaeng Tumaparisi-kalona[47] datang orang Jawa bernama I Galassi. Nama Jawa menunjukkan bahwa orang tersebut datang dari barat Sulawesi, jadi tidak mesti dari Pulau Jawa, besar kemungkinan dari Sumatra dan Malaka.

Juga di bawah pemerintahan Karaeng Gowa berikutnya, Tunipalangga (1546–1556), di Gowa menetap seorang Jawa bernama Anakoda Bonang yang juga memperoleh hak istimewa tertentu yang kemudian berlaku juga bagi orang asing seperti dari Pahang, Patani, Campa, Minangkabau, dan Johor. Dalam zaman ini ternyata sudah ada hubungan dengan pelbagai daerah di Sumatra, Malaka, bahkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Ini menunjukkan bahwa di Makassar sudah ada koloni saudagar-saudagar Melayu yang berasal dari daerah-daerah ini. Kerajaan Gowa mula-mula sebuah kerajaan kecil yang terdiri dan Sembilan daerah, yaitu: 1. Tombolo, 2. Lakung, 3. Saumata, 4. Parang-parang, 5. Data', 6. Agong-Jene, 7. Beser,

---

45 P. Roos Dela Faille, *Dari Zaman Kesultanan Palembang*, diterjemahkan oleh Soeganda Poerbakawatja, Bhratara, 1971, hlm. 11–12

46 J. Noorduyn, *Islamisasi Makassar*, diterjemahkan oleh S. Gunawan, Bhratara, 1972, hlm. 12

47 Mathes, *Makassaarsche Chrestemathie*, 1883, hlm. 151

8. Kalling, dan 9. Sero.[48] Raja Gowa IX Tumaparisi mulai ekspansi menaklukkan daerah-daerah seperti: Katinggang, Parisi, Sedang, Sidenreng, dan Lembayung, bahkan Bulukumba dan Selayar. Ketika kerajaan-kerajaan kecil dikalahkan, mereka harus membayar denda kalah perang yang dalam bahasa Makassar disebut *sabukatti* (seribu kati, satu kati 10 tahil atau 80 real). Perjanjian damai dilakukan dengan negara-negara yang mempunyai kekuatan seimbang, misalnya terhadap kerajaan Maros dan Bone. Negara-negara yang diperlukan sebagai daerah vasal (*palili*) adalah Sumba, Bone, Jipang, Galesong, dan Agung-Nionyo.[49] Selain dengan Maluku, berdasarkan berita dari Valentijn [50] disebutkan bahwa Sultan Ternate Baabullah kira-kira 1580 telah datang di Makassar. Di sana ia mengadakan persekutuan dengan Karaeng, dan sebagai imbalan bantuannya Baabullah menuntut agar Karaeng pada waktu itu, Tunijaelo, masuk agama Islam. Mengenai tokoh Tunijaelo adalah bagian yang perlu diperhatikan; pada waktu Tunijaelo belum menjadi raja Gowa ia harus berjalan menuju Gowa. Setibanya di Parang oleh raja Marusu disiapkan tandu untuk membawa dia ke Gowa; lalu antara Tunijaelo dan Marusu diadakan perjanjian: selama keturunan Tunijaelo masih menjadi raja Gowa, selama itu pula keturunan raja Marusu akan dijadikan *Tumailalang*. Pada masa Tumi Jaelo ketiga kerajaan Bugis menjadi besar; persekutuan mereka disebut "Tellum Pocco"' artinya tiga yang penuh, tiga yang puncak. Perjanjian ini diadakan di kampung Bunne di daerah timuran (Bone utara) antara: 1. Raja Bone La Tenrirawe Bongkange Matenro'e ri Gucinna; 2. *Arung Matowa* Wajo La Mungkace Tomdamang Matinro'e ri Batana; 3. Raja atau *Datu* Soppeng La Mappa leppe Patola'e. Maksud perjanjian ini adalah sebagai usaha pencegahan terhadap hegemoni Gowa dan dengan demikian perjanjian damai Gowa dan Bone yang disebut Ulukamaya ri Caleppa tidak berlaku lagi.[51]

Hikayat Banjar sebagai sumber sejarah tentu saja tidak dapat dinilai secara objektif terlebih-lebih sebagai dasar penukaran historis raja-raja dan kerajaan Banjar hingga sekarang. Akan tetapi, patut dicatat bahwa sangat sukar untuk mencari sumber tradisional lain tentang sejarah Kalimantan Tengah ini sehingga *Hikayat Banjar* tetap memegang peran sebagai sumber tradisional.

Dalam resensi I disebutkan Banjarmasin sebagai keraton yang ke-3. Keraton ini didirikan oleh Pangeran Samudra setelah berhasil menghalau serangan kerajaan Nagaradaha berkat bantuan pasukan Demak. Ras menyebutkan bahwa keraton ke-3 Banjarmasin didirikan sebelum

48 Abd. Razak Daeng Patunru, *op. cit.*, hlm. 1
49 G.J.W. Walhoff dan Abdurrahim, *Sejarah Gowa*, 1968, hlm. 8–22
50 Valentijn, *Oud en Nieuw Oost–Indien met annteekeningen, Voleedige inhoudsregisterv, chronologische lijsten, enz Uitgegeven* door Dr. S. Kejzer, 1724 I z, hlm. 208
51 Abd. Razak Daeng Patunru, *op. cit.*, hlm. 17

pertengahan abad ke-16. Keraton pertama dalam rangkaian *Hikayat Banjar* terletak di Tanjungpura sebagai ibu kota kerajaan Nagaradhipa, kemudian yang kedua di Muara Bahan, selanjutnya Banjarmasin sebagai keraton ke-3. Pada mulanya Banjarmasin masih membayar pajak pada kerajaan Nagaradhipa, tetapi setelah negara yang disebut terakhir ditaklukkan oleh Raden Samudra, Negaradhipalah yang membayar pajak kepada Banjarmasin.

Daerah Banjarmasin yang terletak di muara sungai memungkinkan kapal-kapal besar berlabuh di sana. Daerah ini dari hari ke hari makin maju dan dinasti raja-raja yang memerintah di sana dapat mengembangkan kekuasaannya. Raden Samudra kemudian memindahkan bandar kerajaan dari Muara Bahan ke Banjarmasin (dalam hikayat ditulis Marabahan). Tindakan ini diambil untuk mengadakan pengawasan langsung terhadap lalu lintas barang perdagangan yang akan menjadi tulang punggung ekonomi negara. Para pedagang asing di Marabahan sangat puas dengan adanya pemindahan bandar ke Banjarmasin karena letaknya sangat dekat dengan pesisir. Hingga pertengahan abad ke-16 terdapat lalu lintas perdagangan antara Jawa dan Kalimantan, dan Demak sebagai pemimpin. Banjarmasin masih tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Demak dengan membayar pajak dan upeti.

Jika kita memerhatikan peta Kalimantan, letak Banjarmasin dan Muarabahan berjarak sekitar 50 km, dan itu pun harus ditempuh melalui liku-liku sungai sehingga dapat dimengerti mengapa Raden Samudra setelah menetapkan Banjarmasin sebagai bandar dengan mudah dapat mengembangkan kekuasaan di sana. Perdagangan dapat diperluas sampai jauh ke pedalaman dengan melalui sungai hingga ke Marampiau, 18 km dari Marabahan.

Di sini dapat dilihat perbedaan titik berat perdagangan perekonomian antara kerajaan Nagara Daha dan Banjarmasin. Nagara Daha menitikberatkan ekonomi negara pada pertanian, sedangkan Banjarmasin menitikberatkan perekonomian kerajaan pada perdagangan.[52]

2. Kewajiban Daerah terhadap Pusat

a. Seba

Seba di sini mungkin berasal dari kata *sabha* yang dapat berarti 'sidang, pertemuan'.[53] Pengertian *seba* yang kemudian adalah 'suatu pertemuan atau sidang raja-raja'. Pada kesempatan tersebut para utusan dari daerah-daerah yang mengakui kekuasaan kerajaan yang mengundang hadir di sana sebagai tanda kesetiaan. Kehadiran *seba* tidak harus selalu sebagai

52 J.J. Ras, *op. cit.*, hlm. 196–200
53 MacDonald, *A Practical Sanskrit Dictionary*, Oxford, 1958, hlm. 255

pengakuan atas kekuasaan, tetapi dapat juga hadir karena mendapat undangan, dan kedudukan raja yang diundang adalah sejajar dengan pengundang. Dengan *seba* ini raja yang bersangkutan sekaligus dapat mengadakan kontrol terhadap kerajaan dan daerah-daerah yang berada di bawah naungan kekuasaannya. Barang siapa yang tidak hadir dalam *seba* ini mengundang pertanyaan bagi raja dan hadirin mengenai sebab ketidakhadirannya, dan jika ternyata kemudian ketidakhadirannya dalam *seba* dilakukan dengan sengaja. Sikap itu dapat ditafsirkan mengarah kepada pemberontakan atau ketidaksetiaan kepada raja yang bersangkutan. *Seba* paling sedikit dilakukan setahun sekali, tetapi tiap-tiap kerajaan memiliki aturan tersendiri; seperti kita lihat dari *Hikayat Banjarmasin*, Raja Suryaganggawangsa mengadakan *seba* setiap hari Sabtu. Salah satu contoh yang menonjol akan adanya *seba* bagi suatu kerajaan besar ditunjukkan dalam *Babad Tanah Jawi*. Dalam kitab tersebut diceritakan tentang kejadian di Mataram setelah Ki Ageng Pamanahan meninggal, Sultan Pajang mengangkat putra Ki Ageng yang juga masih menantunya bernama Ngabehi Loring Pasar menjadi penguasa di Mataram. Ia kemudian diberi gelar Senapati–Alaga–Sayidin Panatagama dengan syarat bahwa dalam setahun sekali ia harus *seba* ke Pajang dan tidak sekali-kali boleh terlambat.[54] Ketika setahun sudah berlalu dan ternyata Senopati juga belum datang dalam *seba* yang diadakan oleh Sultan Pajang, sedangkan para bupati, rangga demang, dan yang lainnya sudah lengkap hadir, Sultan Pajang menanyakan kepada hadirin ketidakhadiran Senopati. Para bupati lain sudah siap-siap mengadakan perhitungan kepada Senopati atas ketidakhadirannya itu, Sultan Pajang lalu mengutus Ngabehi Wuragil dan Ngabehi Marta ke Mataram. Dengan adanya petunjuk ini ternyata ketidakhadiran Mataram dalam *seba* ini dilakukan dengan sengaja, dan ternyata kemudian Mataram mengambil alih pimpinan kekuasaan atas Jawa dari tangan Pajang ketika Sultan Pajang, Jaka Tingkir, meninggal.

Di Sulawesi pada beberapa kerajaan, seperti Gowa, Bone, dan Luwu, setelah kerajaan-kerajaan tersebut menganut Islam, diadakan sistem *seba* yang dilakukan dengan semacam pertemuan silaturahmi yang diadakan setahun sekali dan biasanya dilakukan pada Hari Raya Idul Fitri.

Di Gowa kita mengenal lembaga adat yang disebut *Kasuwiyang Salapanga* (pengabdi sembilan), yang kemudian berkembang menjadi *Bate Alapanga* (bendera sembilan). Anggota-anggota yang sembilan ini adalah bangsawan yang menjadi kepala daerah di tempatnya, dan menduduki jabatan di pusat kerajaan, karena itu sistem *seba* ini menjadi agak sederhana lagi, hingga bersifat silaturahmi saja. Hanya, dalam pertemuan ini baik pakaian adat (keris dan pakaian-pakaian kebesaran lainnya) serta

54 W.L. Olthoff, *op. cit.*, hlm. 70

letak tempat duduk menentukan kedudukan raja atau bangsawan yang bersangkutan. Dalam kesempatan ini pula para bangsawan daerah yang ada di bawah naungan raja Gowa memberikan hadiah-hadiah. *Seba* di sana dapat dipersamakan dengan *Ma'kasuwiyang* (raja yang menghadap) dan pertemuan ini disebut *Tudang Ade'* (pertemuan adat). Walaupun demikian, bagi bangsawan-bangsawan daerah yang tidak hadir tanpa mengirim wakilnya dan mereka sebenarnya memang berada di bawah naungan kerajaan Gowa, mengundang pertanyaan apakah ia akan melakukan pemberontakan dan tidak menunjukkan tanda kesetiaannya lagi? Demikian juga pada kerajaan Luwu karena sudah ada dewan adat, yaitu *Hadat Tinggi* (*Pakkettena Ade'E*) dan *Hadat Sembilan* (*Ade Asera'E*), dengan hadirnya mereka dalam *Tudang Ade'E* sebagai federasi bangsawan atau raja-raja daerah, sudah merupakan tanda loyalitas mereka terhadap raja, demikian juga Bone dengan dewan yang disebut *Arung Pitu'E*.

Untuk daerah Maluku kita mengenal sebuah lembaga adat kuno Ambon dari abad ke-17, berkat penuturan Imam Rijali seorang pejuang dari tahun 1640–1650. Karangannya, *Hikayat Tanah Hitu*, telah dikutip kembali oleh Valentijn. Dari cerita tersebut kita mengenal Raja Ampat. Raja Hitu sebagai tokoh tanpa sesuatu kekuasaan menjadi lambang kesatuan yang lebih tinggi. Tiap-tiap Raja Ampat mempunyai tanda-tanda kebesaran tersendiri, yaitu hitam, merah, kuning, dan hijau. Pada waktu diadakan upacara-upacara atau pertemuan-pertemuan resmi, Raja Hitu memakai keempat warna. Dalam persekutuan ini seorang di antaranya mempunyai kekuasaan yang paling besar yang disebut Kapitan Hitu. Gelar ini mungkin diberikan oleh Sultan Ternate atau oleh orang-orang Portugis. Pemerintahan yang bersifat federasi ini telah diakhiri secara tiba-tiba oleh gubernur Ambon pada masa itu.[55] Hanya tidak dijelaskan bagaimana dengan pengawasan daerah taklukannya kalau itu ada, apakah juga dalam bentuk *seba* atau *upeti*. Akan tetapi, dari Galvao kita memperoleh gambaran bahwa kerajaan Ternate dengan raja yang disebut Kolano telah menempatkan para bangsawan kerajaan yang disebut Sangaji untuk mengawasi distrik supaya patuh pada raja sekaligus melaksanakan administrasi sipil dan militer berdasarkan undang-undang raja.[56]

b. Pengiriman Upeti dan Penyerahan Hasil Pajak

Upeti dalam pengertian umum dimaksudkan sebagai pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada raja. Pemberian atau upeti dapat berupa pemberian yang mengingatkan, yaitu kewajiban memberi suatu barang terhadap raja atas dasar kesetiaan (loyalitas) karena yang bersangkutan ada dalam perlindungan raja (*vasal*). Selain itu, upeti atau pemberian tidak

55 J. Keuning, *Sejarah Ambon sampai pada akhir Abad ke-17*, diterjemahkan oleh S. Gunawan, Bhratara, 1973, hlm. 9–10

56 Hubert Th. Th. M. Jacobs, *op. cit.*, hlm. 111, 115, 339

atas dasar bawahan dengan atasan, tetapi hanya merupakan pemberian sebagai tanda persahabatan. Pemberian diberikan oleh utusan suatu negara yang biasanya ingin diakui sebagai sahabat. Jadi, upeti merupakan penyerahan barang imbalan atas sesuatu jasa atau pemberian sebagai pengakuan atas perlindungan raja yang bersangkutan.

Roo de La-Faille menyebutkan bahwa upeti tidak hanya berupa barang tidak bergerak saja tetapi kadang-kadang dapat berupa perempuan cantik, hewan yang sangat jarang diketemukan di tempat lain, atau sejenis tumbuh-tumbuhan yang sangat jarang terdapat.[57] Dengan upeti ini, secara tidak langsung kerajaan yang menjadi pelindung bagi kerajaan-kerajaan lain akan menjadi bertambah kaya dan kekayaan itu jatuh ke tangan raja. Sebagai contoh Demak pada masa pemerintahan Raden Patah hingga Trenggono, telah menjadi makmur karena mengalirnya upeti dari bupati-bupati Jawa bahkan dari Palembang dan Banjarmasin.

Dalam kitab *Purwaka Caruban Nagari* sebutan untuk upeti resmi adalah *bulu-bekti*. Cirebon sebagai sebuah desa kecil yang waktu itu berada di bawah kekuasaan Bupati Raja Galuh harus menyerahkan upeti berupa terasi, garam, dan ikan. Akan tetapi, setelah Cirebon merasa kuat di bawah Cakrabuana, Cirebon mulai menolak membayar upeti sehingga Bupati Raja Galuh mengirim pasukan di bawah pimpinan Tumenggung Jagabhaya untuk menghukum Cakrabuana, tetapi tidak berhasil.[58] Dalam *Hikayat Banjar* disebutkan bahwa ketika Raden Samudra naik takhta dengan gelar Maharaja Suryanullah maka daerah Sambas, Batang Lawai, Sukadana, Kotawaringin, Pambuang, Sampit, Mandawai, Sabangau, dan beberapa daerah lainnya mengakui takluk kepada kerajaan Banjarmasin dan sebagai tanda bakti mereka mengirim persembahan kepada Raden Samudra serta selalu hadir pada waktu ia dinobatkan. Tiap-tiap musim barat mereka datang ke Banjarmasin membawa upeti dan pada musim timur mereka kembali. Pengurusan daerah-daerah taklukan diserahkan kepada mangkubumi yang dijabat oleh Aria Tranggana.[59]

Antonio Galvao menyebutkan bahwa kerajaan Ternate memperoleh penghasilan negara karena upeti dan pajak yang diberikan oleh daerah taklukannya, berupa gandum, roti, anggang, ikan, dan sebagainya.[60]

c. Pengiriman Tenaga Kerja dari Daerah ke Pusat

Selain menyerahkan upeti dan menyerahkan berbagai macam pajak, daerah-daerah yang menjadi bagian dari satu pusat kerajaan masih dibebani

---

57 P. Roo de la Faille, *op. cit.*, hlm. 11
58 Pangeran Arya Cerbon, *op. cit.*, hlm. 39–41
59 J.J. Ras, *op. cit.*, hlm. 430–440
60 Hubert Th. Th. M. Jacobs, *op. cit.*, hlm. 111, dan seterusnya

tugas mengirimkan tenaga kerja, baik untuk membangun keraton ataupun untuk keperluan perang. Selain itu, apabila satu kerajaan akan melakukan penyerangan ke tempat lain tentu diperlukan persediaan makanan. Demikian pula untuk perlengkapan suatu upacara kenegaraan diperlukan makanan untuk disajikan kepada para hadirin.

Mengenai pengiriman tenaga kerja dari daerah ke pusat ini, Djajadiningrat mencatat dalam *Sajarah Banten* bahwa yang membuat keraton Cirebon dan makam Gunung Jati adalah para tukang yang berasal dari tawanan Majapahit. Mereka berada di bawah pimpinan seorang tukang, Raden Sepat. Tindakan ini dilakukan oleh Demak sebagai imbalan kepada Cirebon ketika membantu pengiriman pasukan dalam penyerangan ke Majapahit.[61] Demikian juga dalam *Purwaka Caruban Nagari* terdapat fragmen tentang pembuatan Masjid Agung Cirebon dan Keraton Pakungwati (Cirebon) atas bantuan orang Demak di bawah pimpinan Raden Sepat.

Adapun pengiriman tenaga kerja untuk perang diambil contoh dari *Purwaka Caruban Nagari*. Ketika Demak bermaksud mengadakan penyerangan ke Sunda Kalapa, pimpinan penyerangan ini diserahkan kepada Fadhillah, dari Cirebon dipimpin oleh Pangeran Cirebon dan dari Bangkuang dipimpin oleh Adhipati Keling dibantu juga oleh Banten.

Hikayat Raja-Raja Pasai juga memberikan sebuah contoh tentang bantuan daerah terhadap pusat apabila terjadi perang. Disebutkan bahwa pada masa pemerintahan Sultan Ahmad, kerajaan Pasai kedatangan sebuah kapal besar dari benua Keling lengkap dengan pasukan tempur dan panglimanya. Mereka mendarat dan membuat onar, tetapi di ibu kota kerajaan tidak ada yang berani melakukan perlawanan. Sultan Ahmad Peramal minta bantuan pada putranya, Tun Beraimi Bapa, yang menjadi kepala daerah di Tukas. Akhirnya pasukan Keling berhasil dihalau kembali oleh Turi Beraim Bapa.[62]

3. Sistem Komunikasi antara Pusat dan Daerah

a. Pengiriman Berita dengan Tundan Desa

Komunikasi antara pusat dan daerah harus dilakukan secara kontinu mengingat bahwa ibu kota kerajaan sangat tergantung dari daerah-daerah. Pergolakan-pergolakan di daerah akan sangat memengaruhi situasi politik kerajaan. Umumnya, komunikasi di kerajaan-kerajaan di Jawa dilakukan melalui daerah. Di tempat-tempat lain disesuaikan dengan keadaan geografi daerah setempat. Jika kita berbicara tentang komunikasi kerajaan-kerajaan di Kalimantan, faktor hubungan melalui sungai sangat

61 Pangeran Arya Cerbon, (MS), *op. cit.*, hlm. 78–79, alinea 232–233
62 A.M. Hill, *op. cit.*, hlm. 76–83

menonjol, karena selain sungai di sana besar-besar dan sangat panjang, juga kota besar yang pernah atau kelak menjadi ibu kota suatu kerajaan pada umumnya terletak di dekat sungai. Di sini hubungan antara pusat dan daerah dilakukan melalui sungai kecuali jika jalan darat memungkinkan untuk dilalui. Lebih sulit lagi faktor komunikasi di daerah Malaka, hubungan pusat dan daerah harus mengarungi laut/air dan tentu menyulitkan hubungan antara pusat dan daerah.

Tundan desa. Tundan adalah suatu sistem komunikasi antara pusat kerajaan dengan daerah yang dilakukan dengan mengirim berita melalui utusan yang disampaikan dari satu desa ke desa yang lain hingga berita tersebut akhirnya sampai kepada yang dituju. Sistem *tundan* (*tundan*: menaruh) adalah utusan dari satu desa hanya menyampaikan berita ke desa lain yang dituju, dan selanjutnya amanat itu akan dilanjutkan oleh petugas desa yang baru didatangi ke tempat yang dituju. Demikian seterusnya sehingga berita tersebut akhirnya sampai kepada yang dituju.

Untuk komunikasi zaman sekarang sistem itu kelihatannya tidak praktis, tetapi untuk zaman dahulu yang masih memiliki sistem jalan darat dan sarana pengangkutan sangat sederhana, cara yang ditempuh ini membuat komunikasi lebih cepat. Kalau kita memerhatikan peta Pulau Jawa dapat dilihat bahwa gugusan ini terpotong-potong oleh gunung-gunung dan sungai yang memisahkan desa yang satu dengan desa yang lain. Apabila dipelajari sistem jalan raya di Jawa dari abad ke-17, diperoleh berita dari van Goens, antara lain bahwa jalan dari dan ke Mataram memiliki 3 pintu gerbang. *Pertama*, jalan dari dan ke Mataram ke arah utara menuju Semarang, melalui pintu gerbang utara dan pada perbatasan terdapat pintu *toll* (penarik pajak) di Taji. Jalan ini adalah jalan termudah dan terpendek. *Kedua*, jalan ke arah barat menuju Tegal; keadaannya sangat buruk dan pintu gerbang untuk penarikan pajak ada di dekat Trayem. *Ketiga*, jalan ke arah timur menuju Balambangan dengan pintu gerbang Bongar.[63]

Selain hal-hal yang berhubungan dengan keamanan negara, kita masih dapat melihat contoh tentang tindak pidana berupa pencurian, pembunuhan, dan pembegalan yang sifatnya mengganggu ketenteraman negeri. Ketika Mataram terbagi menjadi 2, Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta, untuk menyatukan hubungan, penanggulangan tindak pidana warga penduduk ditangani oleh pejabat khusus. Contohnya dapat kita lihat dari *Serat Rembang Anggeranggeran* yang dikeluarkan oleh Kanjeng Raden Adipati Danurejo dari tahun 1771. Peraturan dimaksudkan untuk mengatur hal ihwal ketertiban dan cara mengatasi pencurian, pembunuhan, dan perbuatan liar yang dilakukan dalam daerah hukum Yogyakarta dan Surakarta atau sebaliknya. Untuk daerah Yogyakarta urusan ini ditangani oleh Kyai Ngabehi Jayamenggala, sedang daerah Surakarta urusan ini

63 B. Schrieke, *op. cit.*, hlm. 105

ditangani oleh Mas Demang Ngurawan. Apabila ada orang berasal dari Yogyakarta melakukan perbuatan kejahatan di derah Surakarta, urusan pertama jatuh ke tangan Mas Demang Ngurawan dan kemudian setelah diadakan pemeriksaan baru diserahkan kepada Kyai Ngabehi Jayamenggala. Begitu pula sebaliknya apabila kejadian itu terjadi di daerah hukum Yogyakarta.[64]

Di daerah Kalimantan yang daerahnya mewakili sungai-sungai besar, sistem hubungan antardaerah dilakukan dengan perahu, tetapi tetap dengan *tundan desa*. *Hikayat Banjarmasin* memberikan sebuah contoh tentang komunikasi. Ketika itu Patih Masih menjadi penguasa di Banjarmasin hendak mencari Raden Samudra untuk dijadikan raja. Ia mengutus orang-orang untuk disebar ke berbagai daerah. Untuk itu, ia sekaligus mengirim lima orang utusan menyebar ke sungai Muhur, Balandean, dan Halalak dengan perahu dengan satu tujuan mencari Raden Samudra. Akhirnya salah seorang utusannya menemukan Pangeran Samudra di Halalak.[65]

b. Komunikasi dengan Menggunakan Bende Kentongan dan Benda-Benda Lain

Dari *Papakem* Cirebon kita mencatat kentongan atau *titir* sebagai alat komunikasi. Kentongan atau *titir* pada umumnya ditempatkan dekat alun-alun atau dekat balai desa. Penduduk setempat bila mendengar bunyi *titir* atau kentongan sudah paham bahwa pada saat itu terjadi huru-hara. Dalam *Papakem Cirebon* disebutkan bahwa jika terjadi suatu huru-hara, misalnya ada pembunuhan atau perampokan yang mengganggu penduduk, dibenarkan membunyikan kentongan dan sesudah itu melaporkan kejahatan kepada *Jaksa Tuduh* (*jaksa pepitu*). Apabila ada kejadian dan seseorang membunyikan kentongan tetapi tidak segera melaporkan kejadian tersebut kepada Jaksa Tuduh, yang bersangkutan akan kena denda.[66]

Untuk peristiwa yang lebih besar, misalnya serbuan musuh, yang dibunyikan adalah *bende*. *Babad Tanah Jawi* memberikan contoh tentang peristiwa semacam ini. Ketika Sunan Kudus yang diutus Sultan Demak, Raden Patah, untuk menawan Ki Ageng Pengging, ia membawa *bende* Ki Macan. Ketika rakyat Pengging mengetahui bahwa Ki Pengging telah dibunuh oleh Sunan Kudus, mereka membunyikan *bende* yang bernama Ki Udan Arum. Mendengar *bende* ini penduduk Pengging segera berkumpul hendak menyerang Sunan Kudus dan pasukannya.[67] Jika kentongan atau *bende* tidak mungkin dipergunakan sebagai alat komunikasi pada masa

64 Soeripto, *Ontwikkelingsgang Der Vorstenlandsche wet boeken*, Proeftschrift, Leiden, 1929, hlm. 244–245
65 J.J. Ras, *op. cit.*, hlm. 400
66 G.A.J. Hazeu, "Tjirebonsch Wetboek" (*Pepakem Tjerbon*) van het jaar, 1768, *VBG*, LV, 1905, hlm. 2–3
67 W.L. Olthoff, *op. cit.*, hlm. 34–35

perang, cara yang dilakukan adalah menempatkan mata-mata di perbatasan kota. Dalam *Hikayat Banjar* hal itu dapat ditemukan ketika Raden Samudra mempersiapkan pertahanan kerajaan Banjarmasin dari serangan musuhnya, Nagara Daha. Hubungan antardaerah di sana dilakukan melalui sungai. Karena itulah Raden Samudra menempatkan mata-mata di perbatasan Banjarmasin dan Muara Bahan, dan mereka menjaga siang malam. Ketika muncul tanda-tanda armada dari Muara Bahan, dengan cepat mata-mata ini mengirim utusan berperahu ke Banjarmasin untuk memberitahukan kedatangan musuh.

c. Komunikasi yang Dilakukan dengan Perintah Tertulis atau Utusan

Ketika kerajaan Samudra terus-menerus mendapat tekanan militer dari kerajaan Nagara Daha, Raden Samudra dengan semua pasukannya terpaksa melakukan blokade terus-menerus. Patih Masih yang menjabat mangkubumi mengusulkan untuk meminta bala bantuan ke Demak. Untuk itu, Raden Samudra menulis surat kepada Sultan Demak, minta bala bantuan. Karena kedudukan kerajaan Demak pada waktu itu lebih tinggi daripada Banjarmasin, Raden Samudra mengirim utusan yang dipimpin oleh Balituarang, pembesar tinggi kerajaan Banjarmasin beserta hadiah-hadiah berupa 1.000 pikul rotan, 1.000 buah tudung saji, 10 pikul lilin, 1.000 bongkah damar, dan 10 buah intan dan pengiring sebanyak 400 orang. Karena hadiah yang besar, sebagai timbal baliknya Demak mau membantu jika raja Banjarmasin dan seluruh pegawai kerajaan mau masuk Islam. Utusan kembali ke Banjarmasin menyampaikan hasil pembicaraannya dengan sultan Demak. Raden Samudra menyanggupi permintaan sultan Demak. Akhirnya berkat bantuan Demak, Banjarmasin dapat menghalau serangan kerajaan Nagara Daha.[68]

C. Hubungan Kerajaan-Kerajaan

1. Hubungan antara Kerajaan di Indonesia

Dalam babad dan hikayat sering kita jumpai cerita perang antara kerajaan-kerajaan pribumi. Perang ini mencerminkan persaingan antara kerajaan-kerajaan Indonesia, ambisi untuk mengadakan ekspansi teritorial, terutama untuk memperoleh sawah-ladang yang lebih luas guna dijadikan *tanah lungguh* bagi perwira-perwira dan menteri hulubalang. Juga untuk mendapat lebih banyak cacah yang dapat dikerahkan guna pelbagai macam pekerjaan, atau untuk menguasai suatu tempat strategis

68 J.J. Ras, *op. cit.*, hlm. 428–440

dilihat dari sudut perdagangan, pelayaran, atau pertahanan. Masih banyak pertimbangan lain untuk mengadakan ekspansi yang tidak hanya terbatas pada faktor-faktor ekonomi dan pertahanan-keamanan, seperti dalam bidang psikologi, misalnya prestise bangsa dan lain-lain. Namun, sering pula kita membaca dalam hikayat dan babad bahwa hubungan antara kerajaan berjalan atas dasar persahabatan.

Alasan-alasan yang membuat kerajaan-kerajaan memilih jalan damai daripada mengadakan perang, dapat berbeda-beda. Mungkin dua kerajaan yang berbatasan sama kuat, mungkin tidak ada pemimpin yang mempunyai ambisi politik menguasai wilayah yang lebih besar, mungkin raja masing-masing menantikan saat dan kesempatan yang baik untuk mengadakan penyerangan dan untuk sementara mengadakan hubungan persahabatan dahulu, mungkin pula kerajaan tetangga yang lebih lemah mempunyai sekutu yang cukup kuat untuk membantu apabila ia diserang, dan mungkin pula ada faktor-faktor lain yang memutuskan kerajaan-kerajaan bersangkutan lebih senang memelihara perdamaian daripada berperang satu sama lain.

Pada akhir abad ke-16 kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senapati (1558–1601) merupakan kerajaan yang terkuat di Jawa Tengah yang dibuktikan dengan kemenangan atas Pajang dan Demak (1588), Madiun (1590), dan Japara (1599). Tuban diserang pada tahun 1598 dan 1599, tetapi masih dapat bertahan sampai diduduki pada tahun 1619 oleh Sultan Agung. Sebelumnya telah jatuh ke tangan Mataram, daerah-daerah Wirasaba (1615), Lasem (1616), dan Pasuruan (1617). Penduduk Jawa Timur diselesaikan dalam beberapa tahap: Madura pada tahun 1624, Surabaya pada tahun 1625, Giri pada tahun 1636, dan Balambangan pada tahun 1639. Jadi, hanya bagian barat Pulau Jawa yang tidak menjadi wilayah Mataram, yaitu Banten, Jakarta, dan Cirebon. Diketahui bahwa serangan Sultan Agung ke Jakarta yang pada waktu itu sudah diduduki Kompeni Belanda diadakan sampai dua kali, yaitu pada tahun 1628 dan 1629. Keduanya berakhir dengan kegagalan. Usaha untuk menyerang Banten tidak sampai dijalankan, terutama karena kegagalan ekspedisi ke Betawi itu.

Akan tetapi, Cirebon tidak pernah diserang, malahan tidak pernah ada rencana untuk menyerang kerajaan ini. Menurut Rijckloff van Goens, utusan VOC yang telah lima kali ditugaskan ke Mataram (1648–1654), sejak zaman Panembahan Senapati sudah dipelihara hubungan yang erat dalam suasana perdamaian (*groote correspondentio op goede vreede*). Sebelum Senapati wafat, ia telah berpesan pula kepada putranya agar tetap memelihara hubungan yang baik ini, mungkin (kata van Goens) "karena Cirebon dianggap orang suci" (*guansuijs, omdat den Cheribonder voor hem't gelooff hadde aengenoomen ende een heijlige man was*).[69] Seperti diketahui,

raja-raja Cirebon adalah keturunan Sunan Gunung Jati sehingga dapat dimengerti bahwa Mataram masih menghormati Cirebon sebagai kerajaan yang lebih tua. Pada masa Sultan Agung memerintah di Mataram, raja Cirebon yang terkenal dengan sebutan "Panembahan Ratu" berusia lebih tua daripada raja Mataram dan dianggap guru oleh Sultan Agung. Pada tahun 1636 raja tua ini berkunjung ke Mataram. Hal ini menunjukkan penghormatan kepada sultan yang telah menguasai sebagian besar Pulau Jawa.

Di lain pihak, Cirebon mulai khawatir akan kekuatan Mataram yang semakin besar sehingga dalam pertentangan Mataram dengan VOC, Cirebon berusaha menempuh jalan tengah. Jadi, walaupun ada suasana perdamaian antara Cirebon dan Mataram, sewaktu-waktu dapat terjadi hal-hal yang bersembunyi di balik hubungan persahabatan itu. Misalnya, ketika De Haag yang diutus Kompeni pada tahun 1622 mampir di Cirebon dalam perjalanannya menuju ibu kota Mataram. Sultan Agung menyatakan rasa kesalnya bahwa utusan VOC itu lebih dahulu mengunjungi Cirebon sebelum datang ke Mataram. Begitu pula pada tahun 1629 ketika sejumlah kapal Kompeni sedang berlayar menyusur pantai utara, raja Cirebon mengajak mereka supaya "mengirimkan beberapa kapal ke kotanya dan menembak tanpa peluru, dengan maksud untuk mengelabui Mataram". Rupanya Cirebon takut bahwa Mataram akan menganggapnya sebagai kawan Kompeni. Cirebon hendak dipergunakan Sultan Agung juga sebagai penghubung antara Mataram dan Banten. Sering Cirebon harus bertindak sebagai perantara dalam komunikasi antara kedua kerajaan tersebut sehingga dapat dimengerti bahwa kedudukannya sangat sulit pada waktu hubungan antara Mataram dan Banten menjadi tegang. Dalam posisi yang demikian, akhirnya Cirebon yang pada waktu itu sudah pecah dalam Kasepuhan dan Kanoman, lebih suka memilih memihak kompeni Belanda pada tahun 1681.[70]

Berita tentang kekuasaan dan ekspansi Mataram di Pulau Jawa yang menjadikannya sebagai pengganti kerajaan Demak dan Majapahit, tersebar sampai ke daerah seberang lautan. Utusan-utusan dari Palembang, Jambi, dan Banjarmasin datang mengunjungi Mataram dengan membawa persembahan. Hubungan ini dianggap oleh sultan sebagai hubungan dengan negara *vasal*, seperti halnya pada zaman Demak dan Majapahit, pimpinan Kompeni pun menganggap raja Palembang sebagai "bawahan" Mataram (*onderdaen des Mataram*), sedangkan Palembang memerlukan perlindungan Mataram untuk memperkuat kedudukannya terhadap

---

69 Dikutip dari H.J. de Graaf, *De regering van Panembahan Senopati Ingalaga*, Den Haag, 1954, hlm. 116
70 *Ibid.*, hlm. 274–280

Banten yang sedang mengadakan ekspansi di Sumatra Selatan. Juga Jambi dan Banjarmasin melihat Mataram sebagai kerajaan yang besar dan kuat yang patut dicontoh. *Hikayat Banjar* berulang kali mengagung-agungkan budaya Jawa; tata cara dan tata pemerintahan Jawa dipakai sebagai teladan untuk membangun kerajaan Banjarmasin. Pada tahun 1642 golongan pro-Mataram berkuasa di Jambi. Menurut Hendrik van Gent, kepala kantor dagang VOC di Jambi, "pangeran dan pembesar Jambi" berorientasi ke Mataram. Di keraton Jambi orang-orang berbahasa Jawa dan berpakaian cara Jawa. Malahan orang dari pegunungan apabila datang menghadap ke keraton, tidak lagi diperkenankan berpakaian Melayu seperti dahulu, tetapi harus menggunakan pakaian Jawa. Sesudah Sultan Agung meninggal (1645), pengaruh budaya dan politik Jawa berkurang sehingga Kompeni Belanda berhasil menguasai keadaan setempat.[71] Hanya Palembang yang masih setia sampai pada akhir pemerintahan Sunan Amangkurat I Tegalwangi (1677).

Barangkali utusan-utusan yang datang dari Makassar dianggap oleh Mataram juga sebagai utusan dari daerah *vasal*. Menurut catatan Belanda, kunjungan orang-orang Makassar pada tahun 1658 diatur oleh Sunan Amangkurat I sedemikian rupa sehingga misi duta dari Sulawesi Selatan ini seolah-olah datang untuk menyembah kepadanya, walaupun sebenarnya mereka bukan bermaksud demikian (*dat syr moninge niet en was*).[72] Kunjungan duta-duta Makassar sudah dimulai pada zaman pemerintahan Sultan Agung yang oleh Kompeni dikatakan sebagai kawan orang-orang Makassar dan Portugis (*vrundt van de Macassaren ende Portuguesen*); jadi kedudukannya berbeda dengan Palembang yang dilihat sebagai bawahan (*onderdaen*) dari Mataram. Pada tahun 1630 seorang utusan Makassar tiba di Mataram dengan membawa 2 ekor kuda, masing-masing berwarna hitam dan cokelat, dan sebuah tempat tidur dari emas untuk sunan. Kunjungan ini dibalas pada tahun 1633 ketika Ki Ngabehi Sara-Bula dikirim ke Sulawesi. Pada tahun itu juga diadakan perjanjian persahabatan antara kedua kerajaan ini. Akan tetapi, pada tahun 1654 Amangkurat I menyatakan kekesalannya bahwa kapal-kapal Makassar tidak seperti sediakala. Menurut hasil penelitian H.J. de Graaf,[73] pada masa datang pemerintahan Sunan ini hanya dua kali diadakan pengiriman utusan dari Makassar, masing-masing pada tahun 1656–1657 dan 1658–1659. Makassar yang mempunyai kapal-kapal dan terkenal sebagai pelaut, mengambil inisiatif. Mereka pada waktu itu sedang menghadapi usaha-usaha Kompeni yang ingin memaksakan hak perdagangan tunggal di Makassar dan Maluku, oleh sebab itu Makassar memerlukan bantuan

71 *Ibid.*, hlm. 274–280

72 *Daghregister gehouden int Casteel Batavia*, 7 Juli 1659, hlm. 138

73 H.J. de Graaf, *De regering van Sunan Mangkurat I regal Wangi, Vorst van Mataram, 1646–1677*, 2 jilid, Den Haag, 1961 dan 1962. Bagian yang dapat dalam jilid I, hlm. 68–73, 75

dari kerajaan-kerajaan pribumi lainnya. Di lain pihak, Mataram sangat mengharapkan pendekatan Makassar ini dengan harapan bahwa raja Gowa mengakui Susuhunan Jambi sebagai yang dipertuan seperti halnya dengan Palembang, Jambi, Sukadana, dan Banjarmasin. Akan tetapi, dalam hal ini Mataram kecewa: utusan-utusan Makassar yang mengantarkan persembahan itu menganggapnya sebagai hadiah rajanya, bukan sebagai upeti, lagi pula mereka tidak bersedia memberi penghormatan sebagai orang yang takluk. Kedua misi Makassar itu dapat dikatakan gagal dalam tugasnya. Kedua perutusan itu tidak dianggap layak oleh Mataram yang demikian bukan orang Makassar asli, melainkan orang Melayu (*mooren*, menurut Speelman), yaitu Koja Ibrahim dan Encik Mahmud. De Graaf berpendapat mungkin dengan mengetuk perasaan solidaritas Islam untuk mendapat bantuan Mataram melawan bahaya kafir Belanda yang sedang mengancam kedudukannya. Bagaimanapun juga, delegasi ini tidak diperkenankan pergi ke ibu kota dengan alasan bahwa mereka tidak pantas menghadapi sunan.

Misi yang kedua yang tiba pada tahun 1658 mendapat perlakuan yang lebih baik karena diperoleh keterangan bahwa pemimpin delegasi adalah paman Sultan Gowa. Mereka ini diterima dalam istana, tetapi ketika diketahui bahwa tidak tergolong bangsawan tinggi, perhatian Sunan pun mulai berkurang. Namun, Rumphius memberitakan bahwa pada kesempatan ini diadakan lagi suatu perjanjian pertahanan bersama (*verbintenisse ... van gemeene offensie on defensie*), dan di Surabaya diperintahkan untuk mempersiapkan 20 jung untuk membantu Makassar. Walaupun janji ini tidak sampai direalisasikan, hubungan persahabatan antara Makassar dan Mataram tetap terpelihara.

Pada waktu Makassar harus mengakui pendudukan VOC pada tahun 1667, Mataram turut bersedih hati. Wakil Kompeni yang ditempatkan di Japara merayakan kemenangan Kompeni di Makassar dengan melepaskan beberapa tembakan meriam, tetapi putra tumenggung segera melarangnya dengan nada marah (*dat by seer vertoornt en gram was*). Sunan sendiri merasa tidak puas atas kemenangan Belanda (*niet wel tevreden over de victorie*) dengan mengatakan: "Pertama Kompeni menduduki Palembang dan menariknya dari kekuasaan kami, sekarang baru-baru ini Makassar; dengan demikian saya sendiri akhirnya akan mengalami nasib serupa."[74]

Sesungguhnya yang dimaksud dengan Makassar adalah persekutuan kerajaan kembar Gowa dan Tallo. Penduduk Sulawesi Selatan dari suku Makassar dan Bugis telah membentuk kerajaan-kerajaan kecil besar yang

---

74 *Ibid.*, I hlm. 185–186, Ucapan Sunan dicatat dalam *Daghregister*, 13 September 1669 (Eerst heeft de Compagnie Palembang verovert en van on der myn gehoorsaem heyt aftrocken, ende nu jongst Makassar, soo doen de soude het my op 't laest oock wel gelden")

berada dalam hubungan tertentu antara satu dengan lainnya. Perjanjian antara masing-masing kerajaan ini dituliskan dalam lontara yang merupakan suatu *Corpus Diplomaticum* untuk Sulawesi Selatan yang khusus.[75] Sebagaimana pula keadaan di tempat lain, hubungan antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dapat dalam tingkat yang berbeda-beda.

Penelitian Noorduyn tentang kerajaan Wajo, mencatat 3 jenis hubungan antara satu dengan kerajaan lain sewilayahnya. Walaupun keterangan ini berasal dari abad ke-18 kita dapat menggunakannya sebagai pangkal tolak untuk mengetahui keadaan yang berlaku di sini di abad-abad sebelumnya.[76]

Jenis hubungan pertama adalah hubungan antara kerajaan yang sama derajatnya. Hubungan ini dianggap sebagai hubungan antara "saudara" (*seajing*) yang sama kedudukannya, dapat pula merupakan hubungan antara adik (*ari*) dan kakak (*kaka*). Jenis kedua adalah antara anak (*ana'*) dan ibu (*ina*). Biasanya hubungan kekeluargaan ini terjadi karena keinginan kerajaan yang bersangkutan; kerajaan yang lebih kecil atau yang lebih lemah bergabung kepada yang besar dan kuat dalam suatu persekutuan, entah sebagai anak terhadap ibu, atau sebagai adik terhadap kakaknya. Apabila kekuatannya sama diadakan persekutuan yang sama tingkat. Apakah jenis hubungan kedua itu harus kita nilai sebagai hubungan raja terhadap *vasal*-nya? Hal ini tidak selalu dapat ditelusuri dengan baik. Hubungan antara kerajaan adik dengan kerajaan kakak dapat juga dilihat sebagai hubungan *vasal*. Istilah untuk mengadakan hubungan demikian, yakni persekutuan dengan kerajaan besar untuk mendapatkan perlindungan, adalah *pa'dao tarara*, merangkulkan tanahnya, yaitu dirangkul oleh kerajaan ibu. Juga dalam hal pendudukan sebagai akibat perang sebuah kerajaan dapat mendapat status "anak" terhadap kerajaan penakluknya. Dalam hal ini jelas sekali hubungan vasalnya. Hanya kalau kerajaan anak memberontak terhadap ibunya dan pemberontakan berakhir dengan kekalahan pihak pertama, terjadilah jenis hubungan ketiga, yakni antara budak (*ata*) dengan tuannya (*puang*). Hubungan ini dapat juga terjadi apabila suatu kerajaan budak, telah berada dalam hubungan "budak" terhadap kerajaan lain dikalahkan atau ditundukkan oleh kerajaan ketiga.

Hubungan ini selalu dikukuhkan dengan perjanjian-perjanjian resmi dan disertai sumpah keagamaan. Perumusan dinyatakan dengan jelas, misalnya dalam hubungan *vasal*, daerah takluk berjanji akan menurut tanpa syarat laksana "daun yang dimainkan angin". Dalam hal

---

75 G.J. Resink, *Indonesia's History Between the myths*, Den Haag, 1968, hlm. 4–1

76 J. Noorduyn, *Een achttiende–eewse kroniek van Wajo: Buginese historiografie*, Den Haag, 1955, hlm. 73 dan seterusnya, karangan tentang perkembangan aliansi kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan diambil dari penelitian Noorduyn tersebut

persekutuan sama tingkat, perjanjian memberi tekanan kepada persamaan kedudukan, pemberian bantuan timbal balik dan kerja sama, antara lain dalam waktu perang. Dalam perjanjian dengan kerajaan budak ditetapkan jasa-jasanya yang harus diberikan kepada kerajaan yang dipertuan. Umpamanya, dalam hubungan antara Loa, Ana'berua, dan Atata dengan Wajo', penduduknya harus mengerjakan sawah dari tujuh *arung* yang terpenting sedangkan penduduk Tempe, Singkang, Wage, dan Tampangeng harus bekerja sebagai pendayung dan memelihara persediaan ikan.

Sebaliknya ada lontara yang menyebut kewajiban yang harus dipenuhi oleh kerajaan induk bahwa ia menghormati kerajaan *vasal* meneruskan adat dan hukumnya sendiri, dan bahwa *vasal* tersebut akan mendapat dukungan penuh dalam pertikaian dengan kerajaan-kerajaan tetangganya; terutama dijanjikan akan diberikan bantuan jika *vasal* diserang musuh, baik dari dalam maupun dari luar.

Apabila Wajo' merupakan kerajaan induk yang membawahi sejumlah kerajaan kecil dalam hubungan sebagai adik, anak, ataupun budak, kerajaan Wajo' sendiri merupakan vasal dari kerajaan Luwu' dalam kedudukan sebagai anak. Perluasan Wajo' dengan perang ekspansi atau dengan penggabungan secara sukarela oleh kerajaan-kerajaan kecil, dilakukan sedikit banyak dengan restu kerajaan Luwu'. Dengan mencapai wilayah yang cukup besar ini hubungan antara Wajo' dan Luwu' diperbarui dan diadakan perjanjian yang baru di mana Wajo' dinyatakan sebagai adik Luwu'. Perjanjian yang diadakan di Topace'do ini sangat penting bagi sejarah Wajo' dan diadakan dengan upacara tradisonal dengan menanam batu seraya memanggil kesaksian dewata yang menguasai dunia atas dan dunia bawah, lalu kedua raja masing-masing melemparkan batu di atas telur. Tindakan ini melambangkan hukuman yang akan menimpa barang siapa yang melanggar perjanjian: malapetaka yang akan terjadi adalah seperti telur yang dihancurkan oleh batu.

Dengan kedudukan yang baru ini, Wajo' mulai terlibat dalam pertarungan politik wilayah Sulawesi Selatan. Perhatian dua kerajaan besar, Gowa dan Bone, yang telah bersatu dalam satu perjanjian, mulai ditujukan ke utara di mana Luwu' memegang hegemoni, dan dalam operasi ke utara ini beberapa *vasal* Wajo' melepaskan diri dan mengadakan hubungan langsung dengan Gowa. Sebagai akibat peristiwa ini, ketika Wajo' tidak melindungi *vasal*-nya dan melanggar perjanjian, Luwu' "menghukumnya" dan mengubah hubungan di antara mereka, yang menjadikan Wajo' daerah takluk. Ketika Luwu' kemudian harus mengakui hegemoni Gowa, Wajo' pun menjadi *vasal* Gowa malahan beberapa tahun kemudian Wajo' terpaksa diturunkan martabatnya sebagai "budak" Gowa dan diharuskan membayar denda *timpe'*-sarewong (membuka tikar).

Rupanya sukses Gowa mulai mencemaskan kerajaan Bone. Hegemoni Gowa makin meluas di Semenanjung Sulawesi Selatan, lagi pula lokasi geografis sangat menguntungkan baginya untuk menjadi pusat perdagangan. Pedagang Melayu datang menetap di sana, dan Gowa dapat menarik keuntungan dari bea cukai yang dipungut oleh syahbandar di pelabuhan. Akhirnya hubungan antara Gowa dan Bone makin renggang dan menegang, dan pada tahun 1565 pecahlah perang yang pertama antara kedua kerajaan besar ini.

Mungkin dalam mencari sekutu terhadap kekuatan Gowa yang semakin berkembang itu, Bone mengajak Wajo' dan Soppeng untuk bersatu dalam persekutuan *Tellumpocco* yang merupakan suatu aliansi yang penting sekali dalam sejarah Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1582. Karena ketiga unsur termasuk suku Bugis, persekutuan ini dilihat sebagai solidaritas Bugis terhadap Gowa dan Tallo yang terdiri dari suku Makassar.

Perjanjian *Tellumpocco* diadakan di desa Bunne (Timurung dan juga disertai upacara sumpah sambil menghancurkan telur dengan batu). Sesuai dengan besar wilayahnya, Bone diakui sagai saudara tertua, Wajo' sebagai saudara tengah, dan Soppeng saudara bungsu. Juga diberi jaminan bahwa Wajo' akan dibantu jika Gowa masih mau memperlakukannya sebagai budak.

Semenjak itu *Tellumpocco* bertindak keluar sebagai satu badan, dan diikrarkan bersama bahwa ekspansi tidak akan diadakan ke "dalam", tetapi keluar 3 sekutu itu. Aliansi Bugis ini menunjukkan kekompakannya pada waktu Gowa menyerangnya. Pada pertempuran yang terkenal dalam sejarah Sulawesi Selatan sebagai pertempuran Pakenya (awal abad ke-17), Gowa dipukul mundur oleh *Tellumpocco*: Raja Gowa, Karaeng Matoaya, hanya dapat lolos karena nasibnya yang mujur (*manoemug*).

Serangan Gowa ini harus dihubungkan dengan usaha Gowa untuk mengislamkan daerah Sulawesi Selatan. Pada tahun 1605 Karaeng Matoaya memeluk agama Islam–setahun sesudah Datu ri kerajaan Luwu', sedangkan peristiwa Pakenya terjadi pada tahun 1608.

Di antara kerajaan yang tergabung dalam perjanjian *Tellumpocco*, kerajaan Soppenglah yang pertama masuk Islam, lalu Gowa dan Soppeng bersama-sama memerangi kerajaan Bugis lainnya, kemudian Wajo' menyusul menjadi kerajaan Islam, dan akhirnya Bone pun mengikuti jejak mereka (1611). Pada masa ini usaha Gowa untuk memperluas hegemoninya dikaitkan dengan usaha islamisasi. Juga menarik perhatian kita bahwa solidaritas Bugis dalam bentuk aliansi *Tellumpocco* tidak sekuat solidaritas agama Islam: Gowa dan Soppeng berperang untuk meng-islam-kan Wajo', dan setelah Wajo' tunduk dan bersedia menerima agama yang baru, maka Gowa, Soppeng, dan Wajo' bersama-sama menyerang Bone, sampai Bone menyerah dan menganut agama Islam.

Perang ini memang berbeda dengan perang-perang pada masa sebelumnya. Walaupun diadakan juga dalam rangka perlawanan kekuasaan Gowa, sifat perang agama lebih menonjol. Pada waktu kerajaan bersangkutan menyerah, Gowa tidak menuntut bayaran denda perang, Karaeng Matoaya hanya meminta mereka mengucapkan kalimat Syahadat. Walaupun setelah Bone dikalahkan, Gowa menganjurkan supaya persatuan *Tellumpocco* tetap dipelihara, dan supaya mereka hanya memerangi kerajaan yang merugikan agama, sedangkan musuh dari seberang lautan supaya diserahkan saja kepada Gowa untuk menghadapinya.

Baru sesudah Karaeng Matoaya (yang terkenal) sebagai raja alim dan saleh) meninggal, permusuhan Gowa–Bone dimulai lagi, yang kemudian berakhir dengan keruntuhan Bone. Seperti diketahui, pada akhirnya Arung Palaka meminta bantuan Kompeni Belanda yang memang telah lama mencoba menguasai Makassar. Pada tahun 1666 Gowa mengalah dan harus menandatangani Perjanjian Bongaya yang terkenal itu.

2. Hubungan Kerajaan dengan Negeri-Negeri Asing

> ... Negara-Dipa itu bertambah-tambah makmur, suka ramai. Banyak orang-orang berniaga, seperti Cina dan Malayu, orang Johor, orang Aceh, orang Malaka, orang Minangkabau, orang Patani, orang Makassar, orang Bugis, orang Sumbawa, orang Bali, orang Jawa, orang Banten, orang Palembang, orang Jambi, orang Tuban, orang Madura, orang Makau, orang Kaling. Ada yang setengahnya itu berdiam sekali, orang dagang-dagang itu. Banyaklah yang tiada tersebut.

Demikianlah *Hikayat Banjar*[77] menceritakan tentang pengunjung-pengunjung asing yang datang ke Kalimantan Selatan. Sudah tentu kita tidak dapat menerima begitu saja keterangan-keterangan ini. Misalnya, pedagang Belanda baru datang di tempat ini pada abad ke-17 ketika pusat perdagangan telah lama berpindah dari Nagara-Dipa. Kedatangan orang-orang dari Makao pun mungkin merupakan suatu anakronisme. Akan tetapi, pedagang-pedagang dari negeri Cina sudah sejak lama berlayar di perairan Indonesia. Bukti-bukti tertua berasal dari zaman dinasti Han, dan banyak sumber Cina memuat berita tentang kunjungan duta-duta dari kerajaan-kerajaan Indonesia yang mengantarkan persembahan ke negeri Cina. Sayang sekali sumber-sumber kita tidak banyak mengungkapkan panjang lebar tentang pengiriman duta-duta ke Cina itu. Akan tetapi, jelas sekali bahwa hubungan tersebut memang diadakan. Hanya sukar diketahui kapan dan berapa kali kunjungan ini diadakan. Misalnya, frekuensi pengiriman duta-duta dari Kalimantan Selatan ke

77 J.J. Ras, *Hikayat Banjar: A Study in Malay Historiography*, Den Haag, 1968, hlm. 262

negeri Cina tidak dapat kita ketahui dari sumber asli. Kalau kita berpegang pada *Hikayat Banjar* saja, hanya satu kali suatu rombongan diutus ke Cina, yakni pada masa raja Ampu Jatmika yang mendirikan Nagara-Dipa dan bergelar Maharaja di Candi.

Untuk mengetahui latar belakang dan pengiriman duta ini ada baiknya jika kita mengikuti cerita yang dituturkan oleh *Hikayat Banjar*.[78] Menurut kata yang empunya *Hikayat Banjar*, raja hendak mengganti berhala yang dibuat dari kayu cendana dengan patung berhala dari logam, tetapi di seluruh negeri tidak ada yang pandai membuat berhala gangsa. Hanya diketahui bahwa orang Cinalah yang dapat membuatnya. Maka sang raja mengutus Wiramartas ke negeri Cina untuk meminjam pandai yang tahu bahasa Cina. Demikianlah maka Wiramartas berangkat "membawa intan sepuluh, membawa 40 mutiara dan 40 pikul lilin dan 1.000 kindai damar, 1.000 galung pekat dan 100 gantangair madu, 10 ekor orang hutan, serta membawa surat meminjam orang yang tahu berbuat berhala gangsa." Untuk menambah prestise sang duta, Wiramartas diberi persalin "sapanjang baju sachlat, sabuk cindai, kain sarasah, keris balandean emas serta sangunya" Lima puluh orang menjadi pengiringnya yang dipersalin pula dengan "sabuk kimka dan kain Kaling."

Syahdan setelah beberapa lamanya berlayar dengan pargata, tibalah mereka di bandar Cina dan segera mereka mengibarkan tunggul putih dan menghiasi kepalanya sebagai pertanda bahwa mereka membawa surat sebagai "suruhan raja besar". Ketika ditanya siapa gerangan yang datang dalam pergata itu, dijawablah: "Ini suruhan raja Nagara-Dipa, membawa layang serta bingkis pada raja Cina ini. Nama raja-dutanya Wiramartas." Maka mereka diterima dengan tembakan bedil pula "sarta bergamal rabab dan suling tjalampung sarta baraja raja itu ...." Selanjutnya dikisahkan bagaimana syahbandar dan mangkubumi mengurus penerimaan duta sampai ia boleh menghadap raja. Akhirnya raja Cina menyuruh menghimpunkan para menteri ("ada kira-kira ampat ribu") dan rakyatnya ("tiada terbilang") untuk menghadiri upacara penerimaan duta-raja. Surat dibacakan dan dengan disertai bunyi-bunyian dan penghormatan bedil, raja mengundurkan diri.

Kemudian setelah beberapa hari, Wiramartas dihadapkan lagi kepada raja dalam suatu upacara di mana surat jawaban untuk raja Nagara-Dipa diserahkan dan diberikan kepadanya "orang ampat puluh, pandai berhala saluh, kimka merah sakodi, kimka kuning sakodi, kimka hijau sakodi, air mas sapuluh gandang, sawarnawarna sutra sapuluh gandang, pinggan sawarna-warna pinggan saribu, mangkok besar saribu, mangkok kecil saribu, cupu sawarna-sawarna cupu saribu-saribu, atal sapuluh pikul, manyan

78 *Ibid.*, hlm. 254, dan seterusnya

sapuluh pikul." Semuanya bingkisan untuk raja. Duta Wiramartas sendiri diberi "baju bertulis air mas dan kain sutra merah dan pedang Jambun satu dan cindai ampat lembar", sedangkan para pengiringnya dipersalin setiap orang selembar "tapih cindai serta kain sarasah".[79] Maka Wiramartas pun berangkat pulang ke negerinya.

Fragmen cerita ini mungkin sekali tidak seluruhnya berjalan seperti dikisahkan. Namun, dari cerita ini dapat ditarik keterangan-keterangan yang penting karena di sini kita dapat menghayati bagaimana sebenarnya orang-orang di Kalimantan Selatan pada waktu itu memikirkan tentang tata cara yang layak untuk pengiriman dan penerimaan seorang utusan raja. Bingkisan-bingkisan yang dibawa juga memberi keterangan yang cukup tentang barang-barang penghasilan Kalimantan Selatan (intan dan emas, batu permata, hasil hutan seperti rotan, madu, damar, dan lilin; orang utan), sedangkan bingkisan dari negeri Cina terdiri dari kain sutra segala macam warna, kain brokat (*kimka*), pinggan-pinggan, dan kemenyan.

Soal pemberian bingkisan membawa kita kepada suatu aspek lain dalam hubungan kerajaan pada waktu itu. Kenyataan bahwa bingkisan yang dibawa dibalas dengan bingkisan lain; maka pengiriman suatu rombongan duta dapat dilihat sebagai usaha untuk mengadakan tukar-menukar hasil negeri. Dengan kata lain misi yang diutus itu boleh dianggap sebagai misi dagang.

Akan tetapi, di lain pihak ada pendapat yang menyatakan bahwa pengiriman bingkisan itu sesungguhnya suatu persembahan upeti dari raja *vasal*. Setidak-tidaknya raja Tiongkok menganggap semua utusan yang datang menghadapnya sebagai kunjungan dari negara *vasal*. Negeri Cina dianggapnya pusat dunia dan kerajaan-kerajaan sekitarnya hanyalah *vasal*. Hubungan luar negerinya hanyalah hubungan antara raja dengan vasalnya yang harus menghadap takhtanya dengan penghormatan *kow-tow*. Bahwa raja "vasal" bersangkutan tidak selalu menganggapnya demikian sudah jelas. Namun, keinginan untuk mendapatkan kain sutra, tembikar halus buatan Cina, dan lain-lain barang berharga atau seperti dalam contoh di atas, keinginan untuk memperoleh pandai besi dan ahli lainnya mendorong raja-raja di sebelah laut selatan Cina (*Nanyang*) untuk mengirim duta-dutanya. Tentu saja sering kali pertimbangan untuk pengiriman duta mempunyai dasar politik pula. Penerimaan hadiah-hadiah dengan barang-barang mewah buatan negeri Cina sudah tentu mempertinggi gengsi istana terhadap kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Namun, yang lebih penting lagi adalah pertimbangan untuk memperoleh perlindungan dari negeri besar seperti Cina terhadap ancaman negeri lain. Misalnya, Malaka memerlukan

---

79 J.J. Ras, *Hikayat Banjar, A Study in Malay Historiography*, Disertasi, Leiden, 1968, N.V. Nederlandsche Boek en Steendrukkery, V/H, H.L. Smits, 's-Gravenhage, hlm. 258

pertolongan terhadap bahaya dari Ayuthia (Siam) yang sedang mengadakan ekspansi ke semenanjung. Jadi, politik luar negeri untuk mencari sekutu adalah sama seperti yang telah diuraikan dalam bagian pertama, di mana telah disinggung pula mengenai aliansi-aliansi yang diadakan dengan orang-orang Eropa.

Kunjungan orang-orang asing harus dilihat penuh kecurigaan oleh raja-raja Indonesia. Seperti pada waktu Francis Drake singgah dengan kapalnya, Golden Hind, di pelabuhan Ternate.[80] Drake mengirim seorang utusan ke darat dengan membawa sebuah jubah beludru untuk sang raja dan sebagai tanda bahwa *"his coming should be in peace"*. Utusan ini diterima dengan upacara di keraton Ternate, sedangkan kapal Inggris itu diberi bahan makanan, antara lain, beras, ayam, tebu, gula, pisang, kelapa, dan sagu. Walaupun suasana hubungan sangat baik, Drake sendiri tidak berani turun ke darat, dan undangannya kepada raja untuk datang ke kapal tentu saja tidak dapat dipenuhi. Kehadiran Portugis di Malaka, walaupun ditentang keras dan mula-mula diserang oleh kerajaan-kerajaan pribumi, akhirnya diterima sebagai suatu kenyataan. Kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa seperti Pajajaran dan Balambangan, mencari bantuan untuk dapat bertahan terhadap kerajaan-kerajaan Islam. Akan tetapi, abad berikutnya ketika Kompeni Belanda muncul sebagai kekuatan baru, kerajaan-kerajaan Islam pun mengadakan aliansi dengan Portugis.

Pada tahun 1628 ketika Sultan Agung sedang mempersiapkan serangannya ke Batavia, ia menulis surat ke Malaka untuk meminta bantuan.[81] Permohonan bantuan ini tentu dianggap sangat penting oleh Gubernur Malaka dan surat Sultan Agung diteruskan ke ibu kota Goa di India Barat. Mungkin surat Sultan Agung dijawab, tetapi kiriman bantuan tidak kunjung datang. Pada tahun 1630, sesudah serangan Mataram yang kedua gagal, sekali lagi Sultan Agung meminta bantuan kepada Malaka. Bupati Japara, Kyai Demang Laksamana, mengirim surat permohonannya. Mungkin berdasarkan pendekatan ini, Portugis mulai mengirim utusan ke Mataram. Pada tahun 1631 kapal Belanda membantu tujuh orang Aceh yang baru melarikan diri dari tahanan Portugis. Mereka membawa berita bahwa beberapa orang Portugis sedang mengunjungi Mataram dengan membawa seekor kuda Arab putih, dan tujuan mereka adalah "untuk menganjurkan kepada Mataram supaya melanjutkan serangan-serangannya terhadap Batavia. Orang Portugis akan memberi bantuan 40 buah kapal".

Akan tetapi, kemudian Kompeni Belanda mendapat berita bahwa utusan Portugis yang terdiri dari 50 orang putih dan campuran ("300

---

80 H. Terstra, "Franschen en Engelschen," *Geschiedenis van Nederlandsch–Indie*, II, ed. F.W. Stapel, 1938, hlm. 257–258

81 H.J. de Graaf, *De regering van Sultan Agung*, hlm. 164–177; 223–232

blanke als mistice coppen"), kembali ke Malaka dalam keadaan yang sangat buruk. Utusan ini malahan diharuskan membayar bea untuk barang-barang yang dibawanya. Perlakuan yang kurang baik ini menurut Kompeni disebabkan bantuan yang dijanjikan tidak pernah datang. Bupati Japara yang rupanya telah yakin akan bantuan itu sudah melaporkannya kepada Sultan Agung, dan sekarang merasa ditipu. Akan tetapi, ia harus menunggu setengah tahun sebelum ia diperkenankan berangkat.

Kedatangan misi Portugis pertama ini dianggap penting oleh Mataram sehingga dicatat oleh *Babad Sengkala*. Dikatakan bahwa pada tahun Wawu 1553 (AD 1631) *"wang Pratokal mentas mring Djepara, tur kuda dateng batik."* Dengan dipersalin *"dodotan batik"* perjalanan dilanjutkan ke Mataram. Menurut De Graaf yang mengadakan penelitian tentang sejarah Mataram zaman ini, hanya kali inilah rombongan duta diberi berpakaian kebesaran cara Jawa, walaupun kebiasaan ini tidak asing di kerajaan-kerajaan lain, misalnya di India. Pada kunjungan-kunjungan lain para utusan asing hanya memakai selendang kuning yang digantungkan di leher.

Hadiah berupa kuda putih sangat dihargai di Mataram. Keadaan perang dengan Kompeni Belanda pada waktu itu mempersulit pelayaran sehingga impor kuda dari luar jarang sekali terjadi. Oleh sebab itu, utusan-utusan Mataram mengadakan kunjungan balasan ke Gowa untuk mencari seekor kuda seperti itu.

Rupanya utusan Portugis yang kedua (1632–1633) bertolak dari Malaka, bukan dari Gowa. Pada waktu itu Malaka khawatir bahwa kota ini akan dikepung lagi oleh kerajaan Aceh. Oleh sebab itu, bantuan diminta dari beberapa raja, terutama dari raja Mataram. Menurut keterangan yang dikumpulkan Kompeni Belanda di Batavia (dan yang dipelajari oleh de Graaf dalam studinya tentang Sultan Agung), keadaannya demikian.

Malaka yang mengirimkan seorang duta istimewa, mungkin Jorge d'Acunha (dalam *Babad Sangkala Kapitan Joharsih*), memberitahukan kepada Mataram bahwa bantuan tentara dan kapal yang pernah dijanjikan Gowa dahulu akan datang pada Musim Barat dan akan "menduduki Batavia dan menghalau Belanda dari Pulau Jawa". Berhubung dengan hal itu, Portugis mengharapkan supaya "sementara menunggu armada (Portugis) itu", Mataram menyerahkan "15.000 orang di laut maupun di darat" untuk memulai serangan terhadap Belanda dan kawan-kawannya.

Seperti diketahui bantuan Portugis tidak pernah datang walaupun Malaka dan Gowa mungkin dengan ikhlas menjanjikan bantuan tersebut, kerajaan Portugis sendiri sudah tidak mampu lagi untuk mengirim armada yang besar. Ketika pada tahun 1636 utusan Portugis tiba di Mataram dan mengulang lagi janji yang telah diberikan itu (antara lain dikatakan bahwa

di samping armada besar yang akan datang dari Gowa, Manila akan mengirim 16 buah kapal, dan apabila Belanda telah dikalahkan Mataram boleh mendapat Batavia), reaksi Sultan Agung yang menerimanya di tengah-tengah para pembesar kerajaan, hanya tertawa mengejek. Sebagai bingkisan balasan terhadap pemberian Portugis (yang terdiri dari sebuah lonceng besar, jam, bedil, musket, jubah, payung, budak perempuan, permadani, mangkuk-mangkuk perak, dan kain-kain) hanya terdiri dari dua taring badak dan sebuah mangkuk emas, jadi tidak memadai hadiah-hadiah yang diterima. Hal itu menunjukkan sekaligus kepada Gowa bahwa Mataram tidak puas dengan janji-janji yang belum pernah ditepati. Surat kepada raja-muda Portugis di Gowa singkat sekali dan tidak disertai kalimat-kalimat penghormatan. Akan tetapi, selain surat ini Sultan Agung mengirimkan surat lain langsung kepada raja di Portugal. Isinya lebih terhormat dan disertai ucapan-ucapan doa restu demi keselamatan sang raja. Kedatangan duta diberitakan pula, demikian juga tentang bingkisan yang dibawanya dan raja menyatakan kepuasannya, tetapi tanpa disertai ucapan terima kasih. Mengenai rencana dan usul Portugis untuk mengepung bersama-sama orang Belanda di Jakarta, Sultan Agung berkenan menyetujuinya dan menunggu armada Portugis dengan senang hati. Akan tetapi, kalau raja Portugis memang bermaksud mengirim armada, hendaknya hal ini dilaksanakan dalam dua tahun. Apabila dalam waktu dua tahun armada tidak datang, Sultan tidak dapat menunggu lagi. Siang-malam akan ditunggu kedatangan armada dari Gowa, dan Sultan Agung mengharapkan mudah-mudahan pengepungan bersama terhadap Jakarta tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebagai bingkisan dikirim dua keris bergagang emas beserta dua pedang.

Surat tegas dengan ultimatum yang disertai bingkisan kecil menunjukkan dengan jelas sikap Mataram. Mungkin karena tidak yakin akan datangnya bantuan dari Portugis, Mataram mulai mengadakan hubungan dengan Belanda untuk menghentikan permusuhan. Pada tahun 1630, setahun sesudah kegagalan kedua dalam ekspansi penyerangan ke Batavia, pengiriman utusan dimulai. Misi pertama gagal, mungkin karena tidak diadakan langsung dengan sultan, melainkan melalui Tumenggung Arya Wangsa.[82] Akan tetapi, kepada utusan Kompeni dijelaskan bahwa Mataram ingin berdamai, terlebih karena dua

82 Barangkali pendekatan pertama diprakarsai oleh Tg. Arya Wangsa, sebab itu surat Kompeni ditujukan kepadanya, tidak langsung kepada sunan. Menarik perhatian sekali bahwa Piter Franssen, utusan Belanda, tidak pernah bertemu dengan tumenggung tersebut karena ia sedang "sakit". Menarik perhatian pula bahwa pembesar-pembesar lainnya ingin mengetahui isi surat Kompeni tersebut, padahal Franssen mendapat instruksi supaya menyerahkan suratnya sendiri kepada Tg. Arya Wangsa. Apakah ada kecurigaan bahwa ia mencari kontak dengan Kompeni untuk kepentingan sendiri? (N. Fruin–Nees, "Pieter Franssen's journaal van zijn reis ndar Mataram in 1630")

tokoh yang saling bermusuhan, yaitu Jan Pieterszoon Coen dan Tumenggung Baureksa (dari Kendal) sudah meninggal dunia. Bagaimanapun juga, kepada utusan Belanda, Pieter Franssen, diberi penjelasan bahwa suatu misi perdamaian harus diberi wewenang penuh dari yang berkedudukan tinggi, kalau tidak, serangan ketiga ke Batavia akan menyusul, Franssen datang ke Mataram hanya dengan seorang pengiring raja. Pesanan kepada Franssen dilihat oleh Belanda sebagai ultimatum, dan sebagai jawabannya sebuah eskader yang terdiri dari delapan kapal di bawah pimpinan Pieter Vlack berangkat dari Batavia pada tanggal 16 Mei 1631. Dengan awak kapal yang seluruhnya berjumlah kira-kira 700 orang, eskader ini bertujuan untuk merusak kapal-kapal Mataram yang dijumpainya dan mencegah Mataram untuk mengumpulkan persediaan beras. Jadi, ekspedisi ini diberi tugas untuk membatalkan usaha Mataram menyerang Jakarta.

Hasil ekspedisi yang dicapai, yang baru tiba di Japara tanggal 9 Juni, tidak banyak. Sebagian besar kapal Mataram telah diselamatkan ke sungai, sedangkan pertahanan Japara sangat baik. Vlack tidak jadi mendaratkan pasukannya.

Tentu tindakan ini dianggap Mataram sebagai sikap bermusuhan. Ketika Belanda mengirim utusannya pada tahun 1632 di bawah pimpinan Cornelis van Maseyek, tentu saja utusan ini diterima dengan penuh kecurigaan. Sang duta sendiri tidak bersedia turun ke darat sehingga surat yang dibawa dari Kompeni untuk Sultan Agung dikirim melalui dua pembesar Mataram, Putera-Manggala dan Karta-Yudha. Pada waktu jawaban dari Sultan telah tiba di pelabuhan, van Maseyek mengirim dua perahu dengan 24 orang Belanda ke darat untuk menerimanya. Akan tetapi, rombongan ini tidak diizinkan lagi pulang dan dibawa (sebagai sandera) ke pedalaman, yakni ke ibu kota.

Dengan peristiwa-peristiwa ini usaha untuk mengadakan perdamaian antara Mataram dan Belanda terhenti. Walaupun melalui orang-orang tahanan, surat-menyurat dengan Batavia dilanjutkan, kedua belah pihak tetap pada pendiriannya. Kompeni menuntut pembebasan 24 orang tahanan sebelum mau mengirim dutanya. Di lain pihak Mataram berpegang pada syarat bahwa Belanda harus mengirim duta yang diberi kuasa penuh (*gequalifireerd*), barulah dapat dipertimbangkan pembebasan kembali orang Belanda yang ditahan itu. Sampai Sultan Agung meninggal (1645) keadaan ini tidak berubah.

Dari uraian di atas jelas kita lihat tata cara hubungan luar negeri yang berlaku waktu itu. Ketika Kompeni masih dalam keadaan lemah, ia masih menghormati tata cara yang berlaku di sini dalam hal tukar-menukar duta.

Syarat-syarat antara Batavia dengan kerajaan-kerajaan pribumi jelas memperlihatkan kedudukan masing-masing. Kalau mula-mula masih disebut "saudara", lambat laun hal ini berubah dan pemerintah di Batavia (dan kemudian di Bogor) disebut "Bapak". Dalam kedudukan ini Kompeni kemudian memerintah dan turut hadir dalam penyelesaian sengketa-sengketa pribumi, seperti dalam hal Perjanjian Bongaya (1666), atau persoalan raja-raja Cirebon (1708), dan pada Perjanjian Gianti (1755).

Kekuasaan Belanda pada abad ke-17 dan awal abad ke-18 sedemikian besarnya sehingga usaha kerajaan-kerajaan Indonesia untuk bersekutu dengan kekuatan Eropa lainnya, terutama Portugis dan Inggris, tidak membawa hasil.[83]

---

83 Tentang hubungan Mataram dengan Kompeni Belanda, lihat H.J. de Graaf, De Regering van Sultan Agung, hlm. 53–76, 173–192, 233–246

Bab VI
Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-Kota

A. Kota dan Corak Kehidupan

1. Kota Pusat Kerajaan dan Kota di Luar Pusat Kerajaan

Dalam uraian-uraian terdahulu telah disebutkan berbagai nama tempat, seperti Samudra Pasai, Pidie, Aceh, Palembang, Jambi, Malaka, Demak, Gresik, Tuban, Cirebon, Banten, Ternate, Tidore, Gowa–Makassar, dan Banjarmasin. Jika didasarkan pada sumber-sumber sejarah, pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia tempat-tempat tersebut di atas sudah dapat dikatakan kota.[1] Di antaranya ada yang berfungsi sebagai kota pusat kerajaan, ada yang berfungsi sebagai kota kadipaten, dan ada pula sebagai kota pelabuhan.

Jika diperhatikan, letak geografis kota-kota pusat kerajaan yang bercorak Islam itu umumnya di pesisir-pesisir dan di muara sungai-sungai besar. Demikianlah, kota-kota Samudra Pasai, Pidie, Aceh, Demak, Banten, Ternate, Gowa–Makassar, dan Banjarmasin berfungsi pula sebagai kota pusat kerajaan yang bercorak maritim, berlainan dengan Pajang dan Kerta yang keduanya jelas merupakan kota pusat kerajaan yang bercorak agraris. Dilihat dari sudut ekonomi dan militer terdapat perbedaan antara corak kota pusat kerajaan maritim dengan kota pusat kerajaan bercorak agraris.

Masyarakat kota pusat kerajaan maritim lebih menitikberatkan kehidupannya pada perdagangan yaitu suatu ciri yang erat berhubungan dengan kenyataan bahwa para pedagang lebih sesuai hidup dalam masyarakat kota bercorak maritim. Kekuatan militernya lebih dititikberatkan pada angkatan laut, suatu ciri penting pula dan erat berhubungan dengan

---

1 Perkataan *kota* telah ada dalam beberapa hikayat seperti *Hikayat Raja-Raja Pasai* (Hill, 1960, hlm. 47, 66), *Hikayat Banjar* (Ras, hlm. 3072, 3896 teks). Dalam beberapa babad, misalnya *Babad Tanah Jawi*, perkataan *kota* disebut dengan perkataan *kita*, *kuta*, dan *negeri* (Olthoff, *kuta* sendiri dalam beberapa sastra Jawa kuno dan Jawa peralihan, sudah tercantum, misalnya dalam kitab *Bhomakawya*, *Ramayana*, *Bharatayudha*, dan *Pararaton*. Juynboll memberikan arti sebagai: *burcht, kasteel, vesting, verstekte legerplaats* (Juynboll, 1023, hlm. 141). Perkataan *nagari* atau *nagara* dalam kitab *Nagarakertagama* dapat diartikan sebagai kota yang meliputi keraton dan kompleks sekitarnya. Perkataan *nagara* tersebut dibedakan dari *deca* atau *pradeca*, dan perkataan *pura* atau *puri* sering kali dipakai untuk menunjukkan kompleks keraton (Pegeaud, II, 1960, hlm. 9, 15). Kecuali hal-hal tersebut di atas, berita-berita asing untuk tempat-tempat pusat kerajaan atau beberapa tempat pelabuhan dari abad-abad ke-15–17 menyebutnya *stad* (bhs. Belanda), *town* dan *city* (bhs. Inggris), dan *cidade* (bhs. Portugis).

suasana politik serta perluasannya.[2] Sebaliknya, masyarakat kota agraris dalam kehidupan ekonominya lebih menitikberatkan pada pertanian, sedang kekuatan militernya lebih dititikberatkan pada angkatan darat. Pada zaman Indonesia–Hindu ada suatu contoh kota pusat kerajaan yang bercorak campuran agraris–maritim yaitu Majapahit.[3]

Pertumbuhan dan perkembangan kota-kota pusat kerajaan disebabkan beberapa faktor. Sebelum sampai pada uraian serta tinjauan kota dan bagian-bagiannya, sebaiknya ditinjau terlebih dahulu faktor-faktor apakah kiranya yang turut serta dalam pertumbuhan dan perkembangan kota-kota, terutama kota-kota pusat kerajaan. Lokasi kota-kota pusat kerajaan di pesisir dan di muara sungai-sungai seperti telah dikatakan, erat berhubungan dengan faktor geografis yang penting terutama untuk hubungan lalu lintas. Dalam hal ini mungkin pendapat Charles M. Cooley dapat kita benarkan yang menyatakan bahwa soal hubungan lalu lintas itulah yang menjadi sebab utama lokasi kota-kota besar di muara atau pertemuan sungai-sungai.[4] Hubungan lalu lintas melalui sungai-sungai serta lautan dengan mempergunakan perahu dan kapal layar pada waktu itu dianggap lebih tepat, cepat, dan mudah.

Hubungan-hubungan antarkota, baik di daerah Indonesia sendiri maupun dengan kota-kota di luar Indonesia, terang merupakan faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan kota-kota itu sendiri. Kita dapat bertanya mengapa misalnya Samudra Pasai, Pidie, Aceh, Indragiri, Palembang, dan Malaka di Selat Malaka tumbuh dan berkembang. Hal itu antara lain karena mungkin tempat-tempat tersebut terletak di sepanjang selat yang penting bagi lalu lintas perhubungan dan perdagangan. Sejak abad-abad pertama Selat Malaka merupakan salah satu urat nadi pelayaran dan perdagangan internasional yang menghubungkan bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Sejak pertumbuhan dan perkembangan Islam yang bersamaan pula dengan kegiatan pelayaran bangsa-bangsa dari benua Eropa makin pentinglah arti Selat Malaka bagi dunia perhubungan dan perdagangan.

Kota-kota pusat kerajaan Indonesia-Hindu di Jawa seperti Majapahit dengan kota-kota pelabuhan Gresik, Tuban, Jaratan, Pajajaran dengan pelabuhan Kalapa, mengalami perkembangan sehingga mencapai puncak kebesarannya di bidang politik–ekonomi dan kultural. Sejak pertumbuhan

---

2 Gerhard E. Lenski, *Power and Privilege: A Theory of Social Stratification*, McGraw–Hill, New York, 1966, hlm. 191–192

3 Sartono Kartodirdjo, "Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisionil dan Kolonial", *Lembaran Sedjarah*, Universitas Gadjah Mada, 1969, hlm. 7–10

4 Max Weber, *The City*, diterjemahkan dan diedit oleh Don Martindale and Getrud Neuwirth, New York, 1966, hlm. 16

dan perkembangan Islam di Jawa dengan munculnya kota pusat kerajaan Demak dan kota-kota pelabuhan Japara, Tuban, Gresik, dan Sedayu, terbentuklah rangkaian kota-kota pelabuhan yang pada saat itu memungkinkan perkembangannya. Hal itu antara lain karena kunci pelayaran dan perdagangan yang terbentang antara Selat Malaka melalui pesisir utara Jawa sampai Maluku sebagian besar ada di tangan pedagang-pedagang muslim. Bupati-bupati pesisir yang semula merupakan bawahan dari pusat kerajaan Majapahit lambat laun melepaskan diri dan melakukan hubungan perdagangan dengan pedagang-pedagang muslim tersebut. Tumbuhnya kota-kota pusat kerajaan di Jawa Barat, seperti Cirebon, Jayakarta, dan Banten membentuk pula jalinan perhubungan pelayaran, perekonomian, dan politik dengan Demak, sebagai pusat kerajaan besar pada abad ke-16. Jelaslah bahwa pertumbuhan kota-kota bercorak muslim di pesisir utara dan timur Sumatra di Selat Malaka sampai Ternate di Maluku melalui pesisir utara Jawa ada hubungan dengan faktor ekonomi di bidang pelayaran dan perdagangan.

Jika kita perhatikan lebih jauh, ada beberapa kota yang pertumbuhan dan perkembangannya bertalian erat dengan faktor politik, misalnya kota-kota pusat kerajaan yang bercorak Islam di pesisir utara Jawa, di pesisir Selat Malaka, dan di beberapa daerah lainnya. Demak muncul sebagai kota pusat kerajaan antara lain mungkin karena usaha Raden Patah yang berhasil menghimpun kekuatan masyarakat yang kemudian berhasil menaklukkan Majapahit yang sebenarnya sudah lemah akibat perebutan kekuasaan di kalangan keluarga raja-raja yang menganut agama Hindu itu sendiri. Kota Cirebon berkembang mungkin karena penguasanya berhubungan politik dengan Demak bahkan menjadi daerah bagian Demak, seperti diberitakan oleh Tomé Pires. Dikatakannya bahwa yang menjadi Pate Cherimon (Dipati Cirebon) ialah seorang dari Gresik sebagai kakek Pate Rodim, raja Demak (1512–1515).[5] *Babad Tjerbon* menceritakan adanya kekuasaan Cakrabuwana atau Haji Abdullah Imam yang menyebarkan Islam di kota tersebut sehingga upeti berupa terasi ke pusat Pajajaran lambat laun dihentikan.[6]

Berkembangnya Jayakarta yang semula bernama Kalapa pada zaman Pajajaran juga mungkin karena penguasaan politik oleh Faletehan, seorang

---

5 Armando Cortesao, *The Suma Oriental of Tomé Pires*, 1944, hlm. 183–184; H.J. de Graaf dalam "Tomé Pires", *BKI*, 1952, hlm. 11, 108, 153, 158–159, berpendapat bahwa Pate Rodim yang disebut Tomé Pires ada dua, yaitu Pate Rodim (Sr) diduga Raden Patah, sedang Pate Rodim (Jr) adalah Pangeran Sabrang Lor dalam babad-babad. Rouffaer dalam "Wanneer is Madjapahit Gevallen?" *BKI*, 1966, hlm. 144, menyamakan Pangeran Sabrang Lor dengan Pate Unus. Dalam berita Tomé Pires jelas disebut Pate Unus di samping disebut-sebut juga Pate Rodim.

6 J.L.A. Brandes D.A. Rinkes, "Babad Tjirebon: Uitveoerige lnhoudsopgave en Noten door Wijlen Dr. J.L.A. Brandes, met Inleiding en Bijbehoorenden Tekst, Uitgegeven door Dr. D.A. Rinkes", *TBG*, LIX, 1911, hlm. 15, 80 (teks) XVII, pupuh 2

berasal dari Pasai yang mungkin dapat disamakan dengan tokoh Fadhillah menurut *Purwaka Caruban Nagari*.[7] Kota pusat kerajaan Banten yang semula terletak di Banten Girang pada waktu munculnya Islam dipindahkan ke kota Surosowan di dekat pantai. Dari sudut politik, pemindahan kota pusat kerajaan itu dimaksudkan untuk memudahkan hubungan antara pesisir utara Jawa dengan pesisir Sumatra Barat melalui Selat Sunda dan Samudra Indonesia, karena pada masa itu Selat Malaka dengan kota Malaka sedikit banyak telah dikuasai Portugis. Demikian pula kekuasaan Pasai di pesisir utara Sumatra pada sekitar awal abad ke-16 sudah di bawah pengaruh Portugis. Tidak mengherankan apabila sekitar tahun 1513 Pati Unus berusaha merebut Malaka dari kekuasaan Portugis, meskipun mengalami kegagalan. Demikian pula VOC tahun 1641 merebut kota tersebut dari kekuasaan orang-orang Portugis. Hal-hal itu membuktikan betapa pentingnya Malaka dengan selatnya dilihat dari sudut politik dan ekonomi. Kota pusat kerajaan Banjarmasin tumbuh dan berkembang sebagai pusat kekuasaan Islam di Kalimantan Selatan di bawah Pangeran Samudra atau Suryanullah, setelah berhasil menaklukkan kerajaan Nagara Daha atas bantuan Demak.[8] Kota pusat kerajaan Aceh di Banda Aceh Darussalam tumbuh dan berkembang setelah Ali Mughayat Syah melepaskan diri dari kekuasaan Pidie.[9]

Kecuali faktor politik, ekonomi, dan geografi, pertumbuhan beberapa kota di Indonesia mungkin tidak dapat dilepaskan dari faktor yang berhubungan dengan kosmologi serta faktor magis religius. Berdasarkan beberapa bukti dari literatur kuno dan prasasti di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Robert Heine–Geldern,[10] menduga bahwa hubungan antara pendiri suatu pusat kerajaan dengan kosmologi bukan hanya dalam pendiri suatu kerajaan melainkan juga dalam penobatan raja, gelar raturatu, menteri-menteri, pendeta-pendeta keraton, pembagian provinsi-provinsi, upacara-upacara adat, dalam pekerjaan seni pembuatan denah

7 Pangeran Arya Cerbon, *Purwaka Caruban Nagari* (MS), 1720, hlm. 5–54, antara lain menceritakan bahwa yang memimpin menyerang Sunda Kelapa ialah orang dari Pasai bernama Fadhillah atas perintah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Menurut R.A. Hoesein Djajadiningrat, dalam *Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten, Bijdrage ter Kentschetsing van de Javaansche Geschiedschrijving* (Proefschrift), Leiden, 1913, hlm. 87 bahwa Faletehan atau Tragil adalah Sunan Gunung Jati. Berdasarkan nama-nama dalam tradisi ia menyamakan juga Faletehan dengan Muhammad Nuruddin, Syekh Nurullah, Sayyid Kamil Bulqiyyah, Syekh Madzkurullah, Syarif Hidayatullah, dan Mandum Jati ("De Naam van den Eersten Mohammedaanschen Vorst in West-Java", *TBG*, LXXIII, 1933, hlm. 401–404)

8 J.J. Ras, *Hikayat Banjar*, Leiden, 1968, 436 (teks), hlm. 157

9 R.A. Hoesein Djajadiningrat, "Critisch Overzicht van de Maleische Werken Vervatte Gegevens over de Geschiedenis van Sultanaat van Atjeh", *BKI*, 65, 1911, hlm. 151–152

10 Robert van Heine–Geldern, "Conception of State and Kingship on Southeast Asia", data paper, number 18 Southeast Asia Program Department of Asian Suties, Cornell University, 1956, hlm. 2–3, mengatakan bahwa di Asia Tenggara kota pusat kerajaan lebih daripada di Eropa merupakan pusat kota kerajaan untuk seluruh negeri, lebih daripada sebagai pusat politik dan budaya, juga sebagai pusat niaga kerajaan besar

kota dan struktur ibu kota atau pusat kerajaan, kota-kota besar lainnya, keraton-keraton, dan kuil-kuil. Menurut pendapatnya di daratan Asia Tenggara tradisi tersebut sampai kini masih hidup, sedang di Indonesia tradisi itu sudah menjadi samar-samar karena pengaruh Islam dan Eropa.

Tanggapan itu mungkin dapat dihubungkan dengan kemungkinan adanya unsur magis-religius dalam pertumbuhan beberapa kota pusat kerajaan pada zaman pengaruh Islam, sebagaimana kita ketahui dari beberapa babad atau hikayat. Tumbuhnya kota pusat kerajaan Demak di Bintara menurut *Babad Tanah Jawi* adalah atas petunjuk Sunan Ampel, seorang yang termasuk Wali Sanga, kepada Raden Patah. Diramalkan oleh Sunan Ampel bahwa Bintara–Demak akan menjadi kerajaan besar di Jawa.[11] Pendiri kota Surosowan, sebagai ibu kota kerajaan Banten ialah atas petunjuk dan nasihat Sunan Gunung Jati alias Syarif Hidayatullah kepada Maulana Hasanudin. Selain itu, dinasihatkan agar *waktu gilang* yang ada di tengah kota tidak boleh digeser, karena pegeseran merupakan tanda keruntuhan kerajaan.[12] Bahwasanya pendirian bangunan keraton dan kota itu tidak di Banten Girang, mungkin dihubungkan dengan soal magis pula. Karena dianggapnya bahwa kota atau keraton yang telah dikalahkan harus ditinggalkan, tidak ditempati lagi untuk keraton.

Menurut beberapa hikayat, timbulnya beberapa kota pusat kerajaan, dihubungkan dengan bintang-bintang ajaib atau pohon keramat. Dalam sejarah Melayu dan *Hikayat Raja-Raja Pasai*, timbulnya Samudra Pasai hingga menjadi ibu kota kerajaan tersebut diceritakan dengan adanya semut besar "samudra" dan anjing yang bernama "Si Pase".[13] Dalam *Hikayat Wajo*, timbulnya Wajo sebagai ibu kota kerajaan dihubungkan dengan cerita seorang raja dari Soppeng yang berhikmat di bawah pohon yang keramat, yaitu tempat putrinya dimakamkan. Kecuali itu, juga ada yang dihubungkan dengan tiga orang pendirinya, anak-anak raja dari kampung Cinnotabi, keturunan dewa.[14] Kota pusat Nagara Dipa di Kalimantan Selatan pada zaman sebelum pertumbuhan Islam, dalam *Hikayat Banjar* diceritakan pendirinya atas petunjuk saudagar Mangkubumi ketika masih hidup, kepada anaknya Ampu Jatmaka. Setelah ia menjumpai tanah yang rasanya hangat dan harum barulah kerajaan Nagara Dipa didirikan.[15]

---

11 W.L. Olthof, *Babad Tanah Jawi in Proza, Javaansche Geschiedenis (Poenika Serat Babad Tanah Djawi Wiwit Saking Nabi Adam Doemoegi ing Taoen 1647)*, Leiden, 1941, hlm. 24; Hoesein Djajadiningrat, *op. cit.*, hlm. 25

12 R.A. Hoesein Djajadiningrat, *op. cit.*, hlm. 33

13 A.H. Hill, "Hikayat Raja-Raja Pasai", *JMBRAS*, XXXIII, part 2, 1960, hlm. 55; J.P. Moquette, "De eerste vorsten van Samudra Pase", *ROD*, 1913, hlm. 1–12

14 J. Noorduyn, *Een Achttiende–Eeuwse Kroniek van Wajo: Boeginese Historiografie's–Gravenhage*, 1955, hlm. 44, 139

15 J.J. Ras, *op. cit.*, hlm. 230–236, teks baris 55–160

Unsur-unsur lainnya yang mungkin berhubungan dengan kosmologi ialah pemberian gelar beberapa orang raja atau sultan, meskipun di antaranya terdapat nama-nama sultan dari abad ke-18. Di daerah bekas kerajaan Samudra Pasai, yaitu di Menunasah Pi, Gampong Geudong, terdapat nisan kubur yang memuat nama Maulana Abdul-Rahman Taju'l Daulah Qutbu'l Ma'ali-al Fasi.[16] Nama yang memakai gelar tersebut mengingatkan kita kepada Susuhunan Pakubuwono, Cakraningrat, Paku Alam, dan sebagainya.

Unsur-unsur kosmologis dan magis-religius mungkin juga pada cara penempatan keraton sultan-sultan. Sebagaimana sudah dikatakan, lokasi kota-kota pusat kerajaan kebanyakan di muara sungai-sungai seperti: Banda Aceh, Demak, Banten, Samudra Pasai, Cirebon, dan Banjarmasin. Inti dari kota kerajaan yakni keraton adipati-adipati. Dalam tanggapan orang Indonesia pada masa-masa sejarah kuno, raja dianggap sebagai seorang tokoh yang diidentikkan dengan dewa.[17] Pada zaman pengaruh Islam meskipun unsur itu sudah samar-samar tetapi masih ada, di mana sultan juga dianggap seorang tokoh yang menguasai masyarakat, hidup dan dapat menghubungkannya dengan masyarakat gaib. Hal itu dapat disaksikan dari tradisi pemberian gelar-gelar pangeran, susuhunan, dan panembahan kepada beberapa orang sultan atau raja.[18]

Kecuali itu, setelah raja atau sultan wafat, makam-makamnya pun sering dikunjungi orang dengan tata cara adat sebagaimana orang menghadap kepada raja atau sultan yang masih berkuasa. Contoh tradisi tersebut masih terlihat kuat pada kebiasaan masyarakat dalam mengunjungi makam Sultan Agung di Imogiri, makam raja-raja dan para wali di Jawa. Demikian pula halnya di luar Pulau Jawa, kebiasaan mengunjungi makam raja-raja atau orang-orang yang dianggap keramat masih tetap dilakukan. Sangat menarik perhatian bahwa ada beberapa keraton yang dilingkari oleh parit atau sungai-sungai di samping sungai-sungai alamiah. Keraton-keraton semacam itu dapat kita lihat contohnya pada keraton Cirebon, Demak, Banten, Banda Aceh, dan Samudra Pasai. Parit atau sungai buatan di bekas-bekas keraton Demak dan Samudra Pasai kini sudah tidak berair lagi, tinggal saluran-saluran kering. Meskipun kebiasaan tersebut dapat kita hubungkan dengan perbuatan "waterkasteel" di Eropa yang fungsinya erat dengan unsur pertahanan, di Indonesia mungkin ada hubungannya pula dengan unsur

16 R.L. Mallema, *Een Interpretatie van de Islaam*. Kon. Inst. V. de Trooen, CXXXI Amsterdam, 1958, hlm. 130–131, meragukan pembacaan K.C. Crucq tentang *al-Fasi*. Menurut pendapatnya harus dibaca *al-'Ali*. Pembacaan oleh Crucq dapat kami setujui setelah kami tanggal 6 Januari 1973 berhasil membaca nisannya di daerah Pasai

17 F.D.K. Bosch, "Het Lingga Heiligdom van Dinaja", *TBG*, 1924, hlm. 227–286, telah menelaah masalah kultus dewa-raja berdasarkan prasasti Dinaja dan lain-lain di Jawa, dan prasasti-prasasti dari daratan Asia Tenggara, misalnya dari Kamboja dan Campa

18 H.J. de Graaf, "Titels en Namen van Javaanse Vorsten en Groten uit de 16e en 17e eeuw," *BKI*, dl. 109, hlm. 77–78

kosmologi. Hal itu mengingatkan kepada pendirian keraton atau inti kota kerajaan di Asia Tenggara termasuk Indonesia pada masa sebelum perkembangan Islam dan biasanya dihubungkan dengan simbol *meru* dalam mitologi Hindu.[19]

Unsur-unsur tradisional dalam pembuatan keraton-keraton dari masa pertumbuhan dan perkembangan Islam masih dilanjutkan. Istilah-istilah bagian keraton seperti *srimanganti, prabhayaksa, pendopo, bangsal wanita,* dan sebagainya menunjukkan beberapa persamaan dengan bagian-bagian pada keraton-keraton sebelum Islam.

Tata kota pusat kerajaan atau kota-kota di luar pusat kerajaan, kota-kota pelabuhan, tempat penguasa-penguasa yang berkedudukan sebagai adipati dan bupati pada dasarnya menunjukkan persamaan. Wertheim berpendapat bahwa tata kota dibuat secara tradisional dan direncanakan oleh penguasa yang lebih tinggi. Tata kota yang masih asli itu mudah dikenal pada denah kota-kota keraton kuno di Jawa, yaitu adanya alun-alun yang terletak di tengah-tengah kota, bangunan-bangunan terpenting didirikan secara tradisional dan jalan-jalan lurus berpotongan membentuk bujur sangkar.[20]

Menarik pertumbuhan pula bahwa letak keraton-keraton pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam di Jawa umumnya mengarah ke utara seperti keraton Kasepuhan dan Kanoman di Cirebon,[21] keraton Banten di Surosowan,[22] dan mungkin bekas keraton Demak. Demikian pula keraton-keraton yang berasal dari abad ke-18, seperti Yogyakarta dan Surakarta diarahkan ke utara.[23] Keraton Samudra Pasai besar kemungkinan menghadap ke utara pula, yaitu menghadap ke Selat Malaka. Keraton Banda Aceh dari masa Iskandar Muda abad ke-17, berdasarkan berita asing dan berdasarkan peninggalannya diarahkan ke barat laut, jadi hampir ke arah utara pula.[24]

Kompleks bangunan yang termasuk keraton, biasanya dipisahkan dari bangunan-bangunan lainnya oleh tembok keliling, parit atau sungai buatan. Untuk mencapai tempat yang terpenting yang biasanya dinamakan "*dalem*" di Jawa atau "*dalam*" di Aceh, tidak mudah. Karena halaman-halaman diberi batas tembok-tembok pemisah atau pagar pemisah, yang dapat dimasuki

---

19 Robert Heine–Geldern, *op. cit.*, hlm. 2

20 W.F. Wertheim, *Indonesia Society in Transition: A Study of Social Change*, Sumur Bandung, 1956, hlm. 147

21 Lihat peta denah keraton Kasepuhan dan Kanoman, Cirebon No. 3526 pada Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional Jakarta

22 L. Serrurier, "Kaart van Oud Banten", *VBG*, 1900, XXXVII

23 Peta Keraton Yogyakarta dan Surakarta dapat dilihat pada dokumentasi kantor Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional, no. 3224, 3225

24 Denys Lombard, "Le Sultanaat, D'Atjeh Au Temps D'Iskandar Muda 1607–1636", *EFEO*, Vol. IXI, Paris 1967, hlm. 11

hanya melalui pintu gerbang raja. Contohnya antara lain keraton-keraton Aceh, Samudra Pasai, Banten, Cirebon, Mataram, dan Sombaopu sebagaimana pernah diberitakan oleh pengunjung-pengunjung asing.[25] Susunan halaman sampai ke bagian yang dinamakan "dalem" itu ada tiga yang mengingatkan kita kepada tradisi seni akhir Indonesia–Hindu dalam pembuatan kompleks candi dan bangunan pura di Bali. Demikian pula tradisi semacam itu terdapat pada beberapa kompleks makam Islam seperti makam Sendangduwur dan Sunan Drajat di Kabupaten Lamongan, makam Sunan Kudus, makam-makam di beberapa tempat di daerah Madura, dan masih banyak lagi di tempat lainnya.[26]

Bangunan lain yang biasanya didirikan di sisi barat alun-alun adalah masjid. Sesuai dengan fungsinya sebagai masjid yang terletak di pusat kota dan dipergunakan untuk sembahyang Jumat dan sembahyang hari-hari raya Islam, masjid semacam itu dinamakan Masjid Agung, Masjid Raya, atau Masjid Jami. Masjid-masjid Agung di bekas-bekas kota pusat kerajaan[27] yang masih dapat kita saksikan meskipun sudah mengalami beberapa kali pembaruan, antara lain, di Demak, Cirebon, Banten, Banda Aceh, Martapura, dan Sumenep. Sudah tentu di dalam kota pusat kerajaan atau kota-kota di luar pusat kerajaan, tidak hanya terdapat sebuah masjid. Di Banten, kecuali Masjid Agung, didapatkan juga masjid di dekat kampung Pacinan yang kini tinggal runtuhannya. Menurut gambaran dan berita,

---

25 Mark Dion, *Sumatra Through Portuguese Eyes*, Cornell University, ..., hlm. 151, tentang keraton Samudra Pasai berdasarkan de Barros; A.K. Dasgupta, *Acheh in Indonesian Trade and Politic:1600–1640*, Cornell University, 1962, hlm. 85–86, tentang keraton Aceh berdasarkan berita Johan Davis; P.J. Perquin, "Rapport omtren de Kraton "Kasepoehan" te Cheribon", *OV*, 1928, bijlage K. hlm. 129–136, lihat pula peta II; H.J. de Graaf, "De Regering van Sultan Agung, Vorst van Mataram 1613–1645, En die van zijn voorganger Panembahan Seda Ing Krapyak 1601–1613", *VKI*, XXXII, 1958 hlm. 105–108, berdasarkan berita Jan Von 1624 ke Mataram; Lihat pula Rijckloff van Goens, "Bijbeschrijving van den wee uit Camarangh nae de Koninklijke Hoofdlaat Mataram", *BKI*, 4e, dl. 1856, hlm. 312–313, tentang keraton Mataram; A. Ligtvoet, "Transcriptie van het Dagboek der Vorsten van Gowa en Tello", *TNI*, 1880, hlm. 96; Stapel, *Cornelis Janszoon Speelman*, 1936, hlm. 59; keraton di Ternate, lihat berita Antonio Galvao, oleh Jacobs, S.J. Hubert Th. *A Treatise on the Moluccas* C. 4544 *etc.*, Roma–Italy, 1970/1971, hlm. 344

26 Pada halaman ke-3 yang merupakan halaman terakhir, biasanya terdapat bangunan yang paling keramat, misalnya pada bangunan candi di Panataran, pada bangunan makam wali-wali di Kudus, Drajat, makam raja-raja di Madegan, Madura. Pada makam-makam di atas bukit-bukit, makam orang yang terpenting biasanya ditempatkan paling atas, contohnya makam Sunan Gunung Jati, Drajat, Giri, dan Sultan Agung Mataram

27 R. Soedjana Tirtakoesoema, "De Besaran ter Regentschap-shoofdplaats Demak", *Djawa*, 17e jrg. 1937, hlm. 133–136. Lihat tentang perbaikan Masjid Agung Kasepuhan di Cirebon pada arsip Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional di Jakarta bundel 236, 237, 304, 684, 979/D.3/1941. Masjid Agung Banten sejak tahun 1913 juga mengalami perbaikan-perbaikan (*OV*, 1913, hlm. 2, 3) dan perbaikan terbesar pada tahun 1968–1969 oleh masyarakat Banten dengan Operasi Bhakti Siliwangi atas pengawasan Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional. Masjid Raya di Banda Aceh yang dinamakan Baitul Rahman yang pernah terbakar mengalami perombakan dan pembaruan besar-besaran pada tahun 1894, lihat J. Kraemer, "De Groote Moskee to koeeta-Radja,", *NION*, 1920–1921, hlm. 69–87. Gambar asli Masjid Raya di Banda Aceh dapat dilihat pada buku "Denys Lombard", 1967, *op. cit.*, No. 17 gbr. IV

pertama-tama orang Belanda ke Banten tahun 1596, di dekat pasar juga masih terdapat sebuah masjid.[28] Di Banda Aceh terdapat beberapa buah masjid, di antaranya Masjid Raya yang didirikan pada masa Iskandar Muda. Dalam hikayat, masjid ini disebut Baitul Rahman.[29] Rupa-rupanya masjid-masjid yang berfungsi bukan sebagai masjid agung, didirikan hampir di setiap perkampungan masyarakat muslim.

Selain tempat peribadatan, yang juga menjadi ciri penting bagi kota adalah adanya pasar, meskipun tidak hanya terdapat di kota-kota. Jika kota merupakan tempat himpunan masyarakat dari berbagai tempat yang kehidupannya lebih dititikberatkan pada perdagangan, jelaslah fungsi pasar sebagai pusat perekonomian kota sangat penting.

Di dalam kota, ada lebih dari satu pasar dan letaknya tidak selalu dekat alun-alun tetapi ada juga yang dibuat dekat perkampungan para pedagang. Di Banten, sekitar abad ke-16 terdapat beberapa pasar, di antaranya ada yang terletak di Pacinan dan Karangantu.[30] Di Jakarta pada masa pemerintahan Pangeran Jayakarta Wijayakrama terdapat sebuah pasar di sebelah utara alun-alun.[31] Setelah Kompeni Belanda berkuasa di kota itu terdapat beberapa jenis pasar, antara lain pasar ikan, pasar daging, pasar beras, dan pasar ayam, yang didirikan di beberapa tempat.[32]

Di Banda Aceh terdapat beberapa buah pasar seperti diberitakan oleh John Davis dan Lancaster yang melihatnya tiga buah.[33] Nicolaus de Graaf yang datang pada abad ke-17 menceritakan bahwa di Aceh hanya ada dua pasar, sebuah terletak di tengah kota dan sebuah lagi di luar kota.[34] Di Cirebon pasar yang termasuk tua terdapat di sudut timur laut alun-alun Keraton Kasepuhan dan sebuah lagi terletak di sebelah utara alun-alun Kanoman.[35] Di kota-kota lain, Sombaopu, Makassar, Banjarmasin, Ternate, dan tempat-tempat lainnya juga terdapat pasar.

Di dalam kota-kota, selain terdapat tempat peribadatan, pasar, dan bangunan untuk penguasa yaitu keraton, terdapat pula perkampungan-perkampungan. Perkampungan itu ada yang didasarkan kepada status sosial-ekonomi, status keagamaan, dan status kekuasaan dalam pemerintah. Biasanya perkampungan untuk para pedagang asing ditentukan oleh masing-

---

28 Denys Lombard, *op. cit.*, hlm. 13–137

29 G.P. Rouffaer, J.W. Ijzerman, *op. cit.*, hlm. 110, gbr. 12

30 G.P. Rouffaer, J.W. Ijzerman, *Ibid.*, hlm. 110: Willem Lodewyckszi dalam catatannya menyebutkan jenis-jenis pasar: pasar ikan, pasar tembikar, pasar beras, lada, pasar ayam, dan sebagainya

31 J.W. Ijzerman, "Over de Belegering van het Fort Jacarta", *BKI*, 1971, hlm. 538, lihat sketsa muka halaman 585

32 F. de Haan, *Oud Batavia*, I, 1922, hlm. 358–386, pasar ikan didirikan tahun 1636 (halaman 347), pasar ayam didirikan tahun 1690 (halaman 361), dan pasar beras (halaman 763)

33 A.K. Dasgupta, *Acheh in Indonesian Trade and Polities: 1600–1641*, Cornell University, 1962, hlm. 81–82

34 J.C.M. Warnsinck, *Reisen van Nicolaus de Graaf Gedaan naar Alle Gewesten des Werelds Beginnende 1639 tot 1678 Incluis*, 1930, hlm. 15

35 Lihat peta denah Keraton Kasepuhan, Kanoman pada catatan kaki 21

masing penguasa kota. Di kota Malaka terdapat perkampungan para pedagang asing dari Gujarat, Koromandel, Hindu, Persi, Arab, Cina, dan perkampungan para pedagang orang-orang Indonesia sendiri yang berasal dari berbagai tempat.[36] Menurut de Barros, di Malaka pada tahun 1515 ada dua buah perkampungan yang bernama Upih dan Ilir, keduanya di bawah kekuasaan administrasi orang-orang Jawa. Di perkampungan Upih, yang juga terdapat perkampungan Keling, berdiam para pedagang dari Tuban, Japara, Sunda, dan Palembang. Mereka berada di bawah penguasa orang Jawa bernama Utimutiraja yang begitu berkuasa sehingga Barros memberi gelar padanya sebagai raja. Di perkampungan Ilir berdiam pedagang-pedagang dari Gresik, di bawah kekuasaan orang Jawa yang bernama Tuanku Laskar. [37]

Kota pusat kerajaan Banten seperti halnya kota Malaka merupakan pusat perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang dari berbagai negeri asing yang di antaranya bertempat tinggal pula di dalam perkampungan masing-masing. Ada perkampungan orang India yang berasal dari beberapa daerahnya, ada perkampungan orang-orang Pegu dan Siam, Persi, Arab, Turki, dan Cina. Di kota itu terdapat pula perkampungan pedagang bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai daerah: Melayu, Ternate, Banda, Banjar, Bugis, dan Makassar. [38]

Perkampungan-perkampungan tersebut ada yang ditempatkan di dalam pagar tembok kota dan ada pula di luarnya. Di Banten hingga kini ada kampung yang dinamakan kampung Pakojan, meskipun tempat itu sudah tidak ditempati penduduk lagi. Kampung Pakojan terletak di sebelah barat bekas pasar kuno Karangantu, atau timur laut keraton Surosowan. Sebutan Pakojan tidak lain mengingatkan kita kepada bahasa Persia untuk menyebutkan tempat-tempat pedagang besar muslim dari Cambay-Gujarat, Mesir, Turki (Rum), Goa.[39] Kini di Surosowan masih terdapat sebutan kampung Pacinan, di tempat itu ditemukan sisa rumah kuno corak Cina dan sejumlah makam orang-orang Cina.

Di kota Aceh juga terdapat perkampungan-perkampungan berbagai bangsa. Pada sekitar akhir abad ke-16, Davis memberitakan adanya perkampungan orang-orang Portugis, Gujarat, Arab, Benggala, dan Pegu. Orang-orang Cina yang berdagang di kota Aceh juga mempunyai perkampungan sendiri. Adanya perkampungan Pegu juga diberitakan oleh de Houtman; sedang dalam hikayat Aceh disebut-sebut pula kampung-

---

36 J.C. van Leur, *op. cit.*, hlm. 132

37 B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, I The Hague-Bandung, 1955, hlm. 16

38 J.C. van Leur, *op. cit.*, hlm. 132

39 G.P. Rouffaer, J.W. Ijzerman, *op. cit.*, hlm. 104, 105, catatan 7 mengatakan bahwa yang disebut Pekojan termasuk pula kampung orang-orang Arab; J.C. van Leur, *op. cit.*, hlm. 293, 357 catatan 4

kampung Birma dan Jawa.[40] Di daerah Maluku berdasarkan berita Antonio Galvao terdapat perkampungan-perkampungan yang disebutnya *soa*.[41]

Di kota pusat kerajaan Gowa, yaitu di Sombaopu, juga terdapat kampung Cina. Kampung ini menurut Skinner,[42] terletak di sebelah utara kota Sombaopu, tempat yang dikatakan Valentijn bukan hanya tempat orang-orang Makassar, melainkan juga orang-orang dari bangsa lain. Setelah pusat kerajaan Gowa di Sombaopu dikalahkan oleh VOC tahun 1669, Makassar mengalami perkembangan di mana juga terdapat perkampung-perkampungan semacam itu.[43]

Di kota-kota pusat kerajaan lainnya yang berfungsi sebagai tempat kota-kota pelabuhan, perkampungan-perkampungan itu ada pula yang didasarkan bukan hanya pada asal kebangsaannya, melainkan berdasarkan pada jenis pekerjaannya. Hal itu dapat kita ketahui dari kampung Pande, seperti di Aceh,[44] mungkin tempat tukang-tukang; perkampungan yang dinamakan Panjunan, di kota Cirebon kini, tempat tukang anjun atau pembuat periuk belanga. Perkampungan yang diberi nama berdasarkan fungsi dalam pemerintahan ditemukan pula misalnya Kademangan yaitu tempat demang; Ksatrian tempat para senapati, perwira, dan prajurit istana. Orang-orang keagamaan terutama golongan ulama juga mempunyai perkampungan sendiri yang dinamakan kampung Kauman.

Bangunan-bangunan di kota-kota, baik bahan maupun bentuknya, sering kali menunjukkan perbedaan. Untuk bangunan keraton sebagian mempergunakan bahan-bahan batu bata, terutama pagar keliling, dinding-dinding, dan bagian-bagian fondasi. Meskipun demikian, sebagian besar bangunan dibuat dari kayu dan bahan-bahan lain yang tidak dapat tahan lama, misalnya untuk tiang-tiang, dinding-dinding, dan ruangan-ruangan. Untuk atapnya ada yang dibuat dari genting atau sirap seperti kita ketahui dari beberapa peninggalan kepurbakalaan. Pengetahuan pembuatan genting sebenarnya telah diketahui pada zaman Majapahit, sebagaimana terbukti dari temuan penelitian di Trowulan oleh Maclaine Pont.[45]

Di luar Jawa, antara lain di Aceh, Sombaopu, dan Makassar, tembok keliling keraton rupa-rupanya juga mempergunakan bahan batu atau bata.

---

40 Denys Lombard, *op. cit.*, hlm. 47, catatan 2, 3, 4

41 Hubert Th. Th. M. Jacobs, S.J., *A Treatise on the Molucca*, (C. 1544), Rome-Italy 1970 & 1971, *op. cit.*, hlm. 105, 167

42 C. Skinner, "Sya'ir Perang Makassar by Entji'Amin", *VKJ*, 40, 1963, hlm. 167 catatan 255a, 142 (teks)

43 *Ibid.*, hlm. 2; FrancoisValentijn, *Oud en Nieuw Oost Indien met aanteekeningen, Voledige Inhoudsregister, Chronologische listen enz, Uitgegeven door Dr. S. Keijzer*, jilid 3, 1858, hlm. 116

44 C. Snouck Hurgronje, *De Atjehers I*, 1893, hlm. 24

45 Lihat foto genting-genting yang ditemukan H. Maclaine Pont dari Trowulan pada albumnya yang disimpan pada kantor Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional di Jakarta; bukti-bukti genting itu juga masih tersimpan Museum Trowulan, Mojokerto

Di Maluku pada abad ke-16, seperti diberitakan oleh Galvao, keraton tidak memakai tembok keliling dari bahan-bahan batu, tetapi dari bahan-bahan bambu atau kayu. Akan tetapi, pada masa Baabullah, ketika mendirikan kembali benteng bekas Portugis, digunakan batu-batuan.[46] Kebanyakan rumah mempunyai pagar yang memisahkannya dari bangunan-bangunan lainnya. Rumah bangsawan biasanya dibedakan dari rumah rakyat umumnya, baik bentuk maupun bahannya.

Apabila di kota-kota pusat kerajaan atau kota-kota pelabuhan di Jawa, rumah-rumah sudah banyak yang tidak berpanggung, pada waktu itu di kota-kota lainnya masih banyak rumah didirikan di atas tiang-tiang yang tinggi. Menurut berita-berita asing dikatakan bahwa sebagian besar rumah-rumah di kota Aceh dibuat dari bahan bambu dan atap alang-alang, tetapi beberapa buah di antaranya dibuat dari batu. Tiang-tiang dibuat dari bambu dan tingginya sampai beberapa kaki sehingga orang dapat berjalan di bawahnya dengan bebas. Hal itu disebabkan setiap tahun mengalami musim hujan dan banjir melanda kota sehingga rakyat harus pindah dari rumah ke rumah dengan mempergunakan perahu. Rumah-rumah didirikan tidak bergandengan satu sama lain dan kebanyakan mempunyai pagar.[47] Jauh sebelumnya, berita dari Cina, Ying Yai Sheng-lan (1416) menceritakan bahwa di Lambri, yang letaknya mungkin di Aceh, rumah-rumah penduduk didirikan di atas tiang kayu yang besar-besar, sehingga di kolongnya binatang piaraan dapat hidup bebas, sedangkan di atas kolong itu bilik dan lantainya dibuat dari papan. Bentuk rumah-rumah rakyat seperti itu diketahui pula di Sumatra (Samudra).[48]

Pembuatan rumah-rumah di atas tiang-tiang tinggi seperti di Aceh juga umum terdapat di Ternate sebagaimana diberitakan oleh Antonio Galvao.[49] Demikian pula di kota-kota pusat kerajaan di Kalimantan dan Sulawesi, sebagian besar didirikan di atas tiang-tiang yang tinggi. Tradisi ini hingga dewasa ini masih diteruskan. Rumah-rumah adat di Toraja, Minangkabau, dan Kalimantan meskipun bukan di dataran atau pesisir tetapi di daerah pegunungan kebanyakan masih berbentuk panggung. Rumah-rumah panggung atau berkolong mungkin tradisi asli sebelum pengaruh Hindu, Islam, dan Barat. Di Jawa, akibat pengaruh arsitektur India, lantai rumah langsung di atas tanah.

Demikian garis besar tentang bangunan-bangunan keraton dan rumah-rumah rakyat umumnya. Kini kita meninjau kota dari aspek fisik lainnya

---

46 Hubert Th. Th. M. Jacobs, S.J., *op. cit.*, hlm. 106, 107; lihat pula P.A. Tiele, "De Europeers in den Maleischen Archipel, Tweede Hoofdstuk", *BKI*, 1881, hlm. 82

47 A.K. Dasgupta, *op. cit.*, hlm. 80

48 W.P. Groeneveldt, *Historical Notes on Indonesia & Malaya Compiled from Chinese Sources*, Jakarta, 1960, hlm. 98

49 Hubert Th.Th. M. Jacobs, S.J., *op. cit.*, hlm. 106

yaitu tembok atau pagar keliling kota. Berdasarkan berita-berita asing, babad atau hikayat serta bukti-bukti kepurbakalaan, ternyata kota-kota dari zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia, ada yang mempunyai tembok keliling atau pagar keliling dan ada juga yang tanpa pagar keliling. Tomé Pires memberitakan bahwa kota Tuban dikelilingi oleh pagar tembok bata yang dibakar api dan panas matahari. Di sekitar tembok keliling tersebut terdapat perairan, sedang di bagian daratan pada keliling itu tumbuh pohon-pohon dan semak-semak.[50] Mengenai kota pusat kerajaan Samudra Pasai, Tomé Pires hanya menceritakan bahwa sungai yang memasuki kota dipagari oleh batu-batu tegak yang menyerupai *padrao*.[51] Jika kota Tuban oleh Tomé Pires (tahun 1512–1515) dikatakan sudah mempunyai pagar bata keliling, berita Cina tahun 1416 mengatakan kota Tuban tidak mempunyai pagar tembok termasuk 3 kota lainnya: Gresik, Surabaya, dan bahkan Majapahit sendiri.[52] Kota Majapahit, meskipun dapat kita ketahui mempunyai pintu gerbang berupa candi-bentar, *waringin lawang*, dalam kitab *Nagara-kertagama*, Prapanca sama sekali tidak menyebutkan adanya tembok keliling kota, kecuali tembok keraton.[53]

Berita Cina mengabarkan bahwa kota yang mempunyai pagar tembok keliling kota tersebut berasal dari batu-batu dan kayu tetapi pagar tembok batu-batu tersebut telah dihancurkan untuk mengurung Pulau Ch'ang-yau (mungkin Pulau Muara), sedangkan pagar kayunya masih ada. Kota Banjarmasin menurut sejarah dinasti Ming (1368–1643) merupakan kota yang berpagar kayu yang salah satu sisinya terletak di pinggir sebuah bukit.[54] Kota Malaka diberitakan pula dalam Ying Yai Sheng-lan (1416), mempunyai tembok keliling dengan empat pintu gerbang yang diberi menara penjaga atau menara tempat genderang; pada waktu malam mereka mengadakan patroli sambil membunyikan jenis genta-genta kecil.[55]

Galvao ketika akan menyerang Tidore minta keterangan kepada seorang muslim setempat tentang situasi kota dan pertahanan kota Tidore. Diceritakan bahwa kota Tidore begitu kuat, diberi pagar tembok, baluwarti, parit, benteng, lubang perangkap kavaleri, sehingga sukar dimasuki dari sisi mana pun.[56]

Pemberitaan lainnya tentang beberapa kota di Jawa yang sudah mempunyai pagar keliling, baik bata maupun kayu, berasal dari orang-orang

---

50 Armando Cortesao, *op. cit.*, hlm. 189
51 *Ibid*, hlm. 144
52 W.P. Groeneveldt, *op. cit.*, hlm. 45
53 Th. Pigeaud, IV, *op. cit.*, hlm. 45, 46
54 W.P. Groneveldt, *op. cit.*, hlm. 106; A.A. Cense dalam *De Kroniek van Bandjarmasin*, Leiden, 1928, hlm. 111, berpendapat bahwa waktu itu semasa dengan pemerintahan Hidayatullah (1618 M)
55 W.P. Groeneveldt, *Ibid.*, hlm. 125
56 Hubert Th. Th. M. Jacobs, S.J., *op. cit.*, hlm. 259

Belanda yang mengadakan pelayaran pertama ke Indonesia sekitar tahun 1596. Di antara kota-kota pusat kerajaan dan pelabuhan yang sudah mempunyai pagar tembok bata adalah Banten, Cirebon, Demak, dan Tuban. Kota-kota yang pagar kelilingnya kayu dan bambu yang diberitakan oleh orang-orang Belanda adalah Jakarta, Japara, dan Balambangan.[57] Dari kota-kota yang dipagari tembok bata yang masih dapat disaksikan peninggalannya adalah kota pusat kerajaan Banten di Surosowan.

Gambar peta sketsa kota Banten pada abad ke-16 meyakinkan pula adanya pagar keliling kota.[58] Peta dari abad ke-18 buatan Heydt masih menunjukkan adanya pagar keliling itu. Akan tetapi, pada waktu kunjungan Stavorinus tahun 1769, tembok pagar keliling kota Banten itu sudah hilang.[59] Pagar tembok pinggir laut kini sebagian besar sudah tidak dapat kita saksikan lagi. Sebagian kecil tembok keliling tersebut masih dapat dilihat pada salah satu batu sisi sudut barat laut benteng Speelwijk.[60] Di Cirebon, pagar tembok keliling itu sudah tidak dapat kita lihat sisa peninggalan kepurbakalaannya. Meskipun demikian, tempat-tempat tertentu yang secara tradisional disebut Lawanggada, Jagasatru dahulu mungkin dihubungkan oleh tembok-tembok keliling kota.

Pasuruan pada sekitar tahun 1546, ketika diserang oleh tentara Demak, sebagaimana dikatakan Pinto, mempunyai pagar keliling, karena dikatakannya bahwa setelah pintu-pintu kota dibuka, dari luar pagar terjadilah penyerbuan ke dalam kota.[61] Di Sombaopu, Sulawesi Selatan, pada waktu diserang oleh pasukan Speelman, penduduk membuat parit-parit dan ranjau sampai di bawah tembok keraton.[62] Kota pusat kerajaan yang pada abad ke-16 dan ke-17 tidak mempunyai pagar tembok keliling di antaranya kota Aceh. Hal itu mungkin dapat dihubungkan dengan apa yang dikatakan John Davis tahun 1599 dan Beaulieu tahun 1621, bahwa di kota itu hanya ada benteng pada pintu masuk sungai yang dibuat dari batu.[63]

Pembuatan pagar keliling beberapa kota terutama kota-kota pusat kerajaan, mungkin sekali berhubungan dengan fungsinya yakni untuk mencegah gangguan keamanan dari luar kota. Karenanya pagar keliling kota, baik yang dibuat dari batu maupun kayu, berfungsi sebagai benteng. Pintu gerbang pada tempat-tempat tertentu merupakan tempat keluar masuk

---

57 G.P. Rouffaer, J.W. Ijzerman, *op. cit.*, hlm. 99, 100, 101, 102, 103, 110, 163, catatan 15
58 G.P. Rouffaer, J.W. Ijzerman, *Ibid.*, hlm. 104, 105, 106, gambar 11
59 J.A. Van der Ch,ijs, "Oud Banten", *TBG*, 26, 1881, hlm. 21
60 V.J. Van de Wall, "Bouwgeschiedenis an het Fort Speelwijkte Banten", *OV*, 1928, Bijlage L., hlm. 137–157, terutama hlm. 146, gambar 15, 16, IV
61 Maurice Collis, *The Grand Perigrination Being the Life and Adventures of Femao Mendes Pinto*, 1949, hlm. 204
62 W.F. Stapel. *Cornellis', Janszoon Speelman*, hlm. 56–59
63 A.K. Dasgupta, *op. cit.*, hlm. 80–81

kota dan di tempat itulah biasanya ditempatkan petugas-petugas keamanan. Untuk kota-kota yang tidak mempunyai pagar keliling mungkin cukup dengan penunjukan desa-desa tertentu sebagai desa tempat pertahanan dan pintu gerbang pertahanan. Selain itu, dari sudut ekonomi adanya pintu gerbang itu mungkin diperlukan sebagai tempat pemungutan bea cukai barang-barang dagangan yang keluar masuk kota. Pemberian pagar atau tembok keliling pada kota-kota itu mengingatkan kepada kebiasaan kota-kota purba dan kota-kota Abad Pertengahan baik di Eropa maupun di luar Eropa. Kebalikannya, kota-kota di Jepang tidak mempunyai tembok keliling, sedang di Cina setiap kota besar dikelilingi oleh pagar tembok raksasa. Bahkan, beberapa tempat yang dari sudut ekonomi merupakan perdesaan dan yang dalam arti administrasi bukan kota-kota besar, pada setiap zaman memikirkan pembuatan pagar tembok kota.[64]

Kota-kota muslim pada akhir Abad Pertengahan di Timur Tengah ketika kekuasaan Mamuluk, seperti Kairo, Damaskus, dan Aleppo, juga mempunyai pagar keliling dengan beberapa pintu gerbang. Di Kairo misalnya, terdapat pintu gerbang atau bab yang dinamakan *Bab al-Luq. Bab al-Futuh*; di kota Damaskus terdapat pintu gerbang *Bab as-Saghir, Bab Syarki, Bab al-Zabiya*; di kota Aleppo ada pintu gerbang yang dinamakan *Bab Maqam*.[65]

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kota-kota di Indonesia pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam mempunyai ciri-ciri fisik, yaitu ada yang berpagar keliling dan yang tanpa pagar keliling, ada pasar, tempat peribadatan, perkampungan, kelompok bangunan (keraton), dan ada tempat raja atau penguasa. Meskipun ciri-ciri itu secara fisik seakan-akan ada persamaan dengan ciri-ciri kota-kota kuno di Eropa dan di luar Eropa, ternyata ada perbedaan-perbedaan. Struktur dan gaya bangunan serta pemberian istilah-istilah bagi bangunan dan latar belakang sosial kulturalnya berbeda pula dari kota-kota di Eropa. Bahkan, antara kota-kota Abad Pertengahan di Eropa, termasuk Yunani, Romawi, dengan kota-kota muslim pada akhir Abad Pertengahan di Timur Tengah, menunjukkan perbedaan. Dari sudut geografi dan ekologi, dari komposisi sosial termasuk daerah serta penduduknya, kota-kota muslim bukanlah *urban* dalam arti sebenarnya, tetapi *urban-rural*.[66] Dari sudut fisik, kota-kota pusat kerajaan, kota-kota pelabuhan di Indonesia mungkin termasuk *urban-rural* pula. Kehidupan sosial-ekonomi kota-kota muslim di Indonesia akan diuraikan nanti.

---

64 Max Weber, *op. cit.*, hlm. 75

65 Ira Marvin Lapidus, *Muslim Cities in the Later Middle Ages*, Harvard Univ. Press, Cambridge, Massachusetts, 1967, hlm. 79, lihat pula sketsa denah kota Aleppo, Damaskus, dan Kairo, hlm. 44, 46, 48

66 Ira Marvin Lapidus (editor), *Middle Fastern Cities: A. Symposium on Ancient Islamic and Contemporary Middle Eastern Urbanization*, Univ. of California Press, Berkeley, 1969, hlm. 73

2. Jumlah Penduduk Kota

Jumlah penduduk kota-kota pusat kerajaan dan kota di luarnya pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia sukar dipastikan. Hal itu berhubungan pula dengan sumber-sumber yang terbatas dan relatif, karena waktu itu sensus penduduk belum menjadi perhatian pemerintahan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Jumlah penduduk kota-kota yang akan dikemukakan dalam uraian ini sudah tentu juga bersifat relatif dan hanya bersifat perkiraan berdasarkan sumber-sumber berita asing serta babad dan hikayat yang mencatat jumlah penduduk kota-kota itu menurut perkiraan pula.

Di antara berita asing yang menceritakan penduduk beberapa kota ialah dari Tomé Pires (1512–1515). Kota-kota yang dikunjungi dan diperkirakan jumlah penduduknya, antara lain, Pasai, Palembang, Cirebon, Tegal, Demak, Tuban, dan Ternate. Tomé Pires memperkirakan penduduk kota pusat kerajaan Pasai tidak kurang dari 20.000 orang.[67] Perkiraan tersebut mungkin tidak begitu dilebih-lebihkan jika dibandingkan dengan perkiraan de Barros (1499–1539) yang menceritakan waktu Jorde d'Albuquerque datang di kota Pasai di dalam kompleks keraton saja berdiam 3.000 orang.[68]

Palembang, kota yang waktu itu sudah berada di bawah pengaruh kekuasaan Demak, menurut Tomé Pires berpenduduk lebih kurang 10.000 orang.[69] Kota-kota lainnya di Pulau Sumatra seperti Aceh, Aru, Pedir, Baros, Indragiri, Siak, dan sebagainya tidak disebutkan berapa jumlah penduduknya. Tomé Pires menitikberatkan hal-hal yang terkait dengan perhubungan, perdagangan, serta barang-barang yang diekspor dan diimpor dari dan ke kota-kota atau negeri-negeri itu.[70]

Kota Demak yang pada awal abad ke-16 merupakan pusat kerajaan bercorak Islam yang terbesar di Jawa, berpenduduk antara 8.000–10.000 keluarga yaitu kira-kira 40.000 atau 50.000 jiwa.[71] Penguasa Demak pada zaman itu ialah Pate Rodim (Jr) yang mungkin dapat dinamakan dengan Pangeran Sabrang Lor, seorang tokoh yang disebut-sebut dalam babad.[72]

Kota Cirebon pada waktu kedatangan Tomé Pires diperkirakan berpenduduk 1.000 keluarga.[73] Kalau setiap keluarga dihitung rata-rata 4 atau 5 jiwa, penduduk kota Cirebon pada waktu itu lebih kurang 4.000 atau 5.000 jiwa.

---

67 Armando Cortesao, *op. cit.*, hlm. 143
68 Mark Dion, *op. cit.*, hlm. 151
69 Armando Cortesao, *op. cit.*, hlm. 155
70 *Ibid.*, hlm. 141–165
71 *Ibid.*, hlm. 184
72 H.J. de Graaf, *op.cit.*, hlm. 159
73 Armando Cortesao, *op. cit.*, hlm. 183

Tuban pada masa itu dalam lingkungan tembok kotanya diperkirakan berpenduduk 1.000 orang.[74] Lebih kurang satu abad sebelum kedatangan Tomé Pires, yaitu tahun 1430, penduduk kota Tuban beserta kota Gresik dan Surabaya,[75] lebih kurang 1.000 keluarga. Jika diambil rata-rata setiap keluarga terdiri atas 4 atau 5 orang, tiga kota tersebut hanya berpenduduk sekitar 4.000 atau 5.000 orang. Jumlah ketiga kota itu hampir sama dengan jumlah penduduk Tegal atau Cirebon ketika kedatangan Tomé Pires di kota-kota itu. Akan tetapi, pada tahun 1523 penduduk Gresik yang terdiri atas orang-orang muslim saja diperkirakan 30.000 jiwa.[76] Jumlah penduduk kota-kota tersebut jelas menunjukkan perkembangan yang lumayan. Pertumbuhan penduduk kota Gresik pada abad ke-16 jelas ada hubungan dengan fungsinya sebagai kota pelabuhan yang banyak dikunjungi pedagang pada waktu itu dan merupakan salah satu kota pelabuhan yang terpenting.

Jumlah penduduk Ternate, yang oleh Tomé Pires tidak disebut sebagai kota tetapi sebagai desa yang besar, berpenduduk lebih kurang 2.000 orang. Pada waktu itu jumlah orang-orang Islam lebih kurang hanya 200 orang.[77] Perkiraan tersebut tidak begitu jauh dari perkiraan Antonio Galvao, yang beberapa tahun kemudian memperbandingkannya dengan kota-kota di Provinsi Galileo, dan dikatakannya bahwa sekalipun kota terbesar di Maluku, Ternate berpenduduk tidak lebih dari 2.000 orang. Meskipun demikian, kata Galvao, hal itu tidak berarti negeri tersebut kurang penduduknya.[78]

Sejumlah penduduk di dalam kota dan tempat-tempat lainnya di Kalimantan pada abad ke-16, oleh Tomé Pires tidak diberitakan, meskipun antara lain disebut-sebut Tanjungpura dan Laue (Lawe). Ia menceritakan bahwa Sulawesi mempunyai lebih dari 50 kerajaan dengan penduduk negerinya yang kaya.[79]

Hikayat dan babad sering pula menyebutkan jumlah tentara dalam perang antara kerajaan-kerajaan. Akan tetapi, jumlah yang disebutkan itu pada umumnya sukar dijadikan ukuran. Suatu contoh dapat dikemukakan pada salah satu bagian *Hikayat Banjar*. Disebutkan bahwa kira-kira 6.000 orang tentara pada masa Pangeran Samudra di Banjar sudah siap-siap untuk berperang ditambah 1.000 orang pedagang yang membantu.[80]

Dalam bagian hikayat itu juga disebutkan rakyat Pangeran Samudra di kota Banjar yang berperang kira-kira 7.000 orang dan 1.000 orang pedagang.[81] Ternyata jumlah tentara yang disebutkan dalam hikayat tersebut sangat

---

74 *Ibid.*, hlm. 190
75 B. Schrieke, *op. cit.*, hlm. 25
76 B. Schrieke, *Het Boek van Bonang*, Leiden, 1916, hlm. 25
77 Armando Cortesao, *op. cit.*, hlm. 214
78 Hubert Th. Th. M. Jacobs, S.J., *op. cit.*, hlm. 155
79 Armando Cortesao, *op. cit.*, hlm. 226
80 J.J. Ras, *op. cit.*, hlm. 408 baris 3009–3011
81 *Ibid.*, hlm. 412, teks baris 3064–3066

relatif. Berdasarkan berita orang-orang Belanda yang pertama-tama mengadakan pelayaran ke Indonesia kita ketahui beberapa nama kota dengan sedikit gambaran kehidupannya. Akan tetapi, dari sejumlah kota yang disebut di pesisir utara Jawa itu yang disinggung perkiraan jumlah penduduknya hanyalah Jayakarta yaitu 3.000 keluarga.[82] Kalau jumlah keluarga itu masing-masing mempunyai 4 atau 5 jiwa, berarti ada 12.000 atau 15.000 jiwa yang menjadi penduduk kota Jayakarta pada akhir abad ke-16.

Telah dikatakan bahwa pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam masalah sensus penduduk pada umumnya menjadi perhatian pemerintahan suatu kerajaan. Yang menarik perhatian kita bahwa satu-satunya kerajaan yang pada akhir abad ke-17 pernah mempunyai perhatian akan sensus penduduk kota Surosowan adalah kerajaan Banten. Tepatnya sensus itu dilakukan pada tahun 1620 atau 1694 M, yaitu pada masa Sultan Abdul Mahasin Jenul Ngabidin, di bawah pengawasan Pangeran Natawijaya yang hasilnya menyatakan bahwa penduduk kota Surosowam berjumlah 31.848 orang.[83] Selang dua belas tahun, yaitu 1120 H atau 1708 M, diadakan lagi sensus, mungkin yang kedua kalinya, memberikan bukti bahwa penduduk kota Surosowan berjumlah 36.302 orang.[84] Berarti pertambahan penduduk kota itu selama 12 tahun hanyalah 4.454 orang; suatu pertambahan yang relatif tidak menonjol.

Pada awal abad ke-17 penduduk kota Surabaya lebih kurang 50.000 atau 60.000 jiwa.[85] Jelaslah bahwa pertambahan penduduk ketiga kota itu jika kita ambil rata-rata, dari awal abad ke-15, awal abad ke-16, dan awal abad ke-17, adalah dua sampai enam kali lipat. Kota Japara yang sejak pertumbuhan dan perkembangannya merupakan kota pelabuhan, pusat pengumpulan beras yang akan diekspor ke kota Malaka pada sekitar abad 17, berpenduduk kira-kira 10.000 orang.[86]

Gambaran tentang penduduk kota dan tempat-tempat lainnya yang termasuk kota-kota kadipaten abad ke-17 dalam lingkungan kerajaan Mataram dapat kita ketahui dari berita ekspedisi Hurdt dari Japara ke Kadiri tahun 1678. Untuk penduduk daerah kerajaan Mataram, B. Schrieke,[87] telah memperinci daerah-daerah yang sudah menyerah kepada VOC dan daerah-daerah yang belum menyerah. Daftar nama-nama daerah tersebut disertai pula dengan perkiraan penduduk menurut perhitungan cacah, yaitu perhitungan menurut jumlah unit atau seluruh keluarga. Dari daftar tersebut cukuplah diambil beberapa tempat sebagai contoh:

---

82 G.P. Rouffaer, J.W. Ijzerman, *op.cit.*, hlm. 163
83 Th. Pigeaud, *Literature of Java*, Vol. I, 1968, hlm. 64–65, *L. Or* 2052, 2055
84 *Ibid.*, Vol. III, hlm. 68, gbr. 32.
85 B. Schrieke, *op. cit.*, part one, hlm. 25
86 *Ibid.*, hlm. 26
87 B. Schrieke, *op. cit.*, part two, hlm. 155–158

1) Kaduwang, di sebelah selatan Gunung Lawu mempunyai 500 cacah, sedang sebelum tahun 1678 mempunyai 2.000 cacah;
2) Panaraga mempunyai penduduk 5.000 cacah, sedang sebelumnya 12.000 cacah;
3) Caruban mempunyai 600 cacah;
4) Blitar mempunyai 2.000 cacah.

Pada tahun 1678 daerah-daerah yang belum menyerah kepada VOC, antara lain:

1) Malang mempunyai 2.000 cacah;
2) Pajajaran mempunyai 2.000 cacah;
3) Surabaya dalam tahun 1677 mempunyai 12.000 cacah, meskipun dalam realitasnya kurang dari itu;
4) Semarang dengan Lembahrawa diperkirakan 3.000 cacah, kotanya sendiri diperkirakan 1.000 cacah;
5) Japara tercatat mempunyai 8.000 cacah.

Dari tahun 1706, berbeda dari tahun 1677–1679:

1) Batang mempunyai 4.600 cacah;
2) Pemalang mempunyai 4.000 cacah;
3) Tegal mempunyai 7.000 cacah;
4) Brebes mempunyai 1.600 cacah.

Selain berita-berita tersebut di atas, masih diketahui dari sumber sejarah tahun 1709 dan seterusnya yang memberikan gambaran tentang kadipaten-kadipaten dengan perkiraan jumlah penduduknya yang dihitung dengan cacah pula.

Dari catatan Francois Valentijn,[88] pada awal abad ke-18 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk kota Banten dengan perkampungan sekitarnya ada 8.170 keluarga yang berarti lebih kurang antara 30.000–40.000 orang. Di daerah Tirtayasa diceritakan mempunyai penduduk 6.000 orang. Penduduk kota Jakarta dengan 202 kampung sekitarnya diperkirakan oleh Francois Valentijn sekitar 19.390 keluarga, atau kalau kita hitung rata-rata 5 jiwa per keluarga menjadi 96.950 jiwa. Ia secara khusus memberikan daftar jumlah rumah yang ditempati orang-orang Belanda dan Cina, baik di dalam kota maupun luar kota, yakni 2.442 buah di dalam kota dan 2.328 buah di luar kota sehingga jumlah seluruhnya ada 4.770 rumah. Dari jumlah ini 894 merupakan rumah berukuran besar, 1414 rumah Belanda berukuran kecil, dan 2.440 rumah besar dan kecil yang didiami orang-orang Cina. Rumah-rumah di luar Jakarta yang merupakan rumah kebun berukuran besar dan baik ada 95 buah. Penduduk Cina di Jakarta menurut catatan tanggal 31 Januari 1674 ada 2.747 orang, 978 orang di

88 Francois Valentijn, *op. cit.*, hlm. 253, 255, 261

antaranya laki-laki, sedang catatan tanggal 31 Januari 1682 ada 3.101 orang, 948 di antaranya laki-laki dewasa.[89]

Valentijn juga menyebutkan jumlah rumah atau keluarga di kota Cirebon yang ia datangi pada tahun 1722 yaitu sebanyak 7.000 keluarga.[90] Kalau kita hitung rata-rata 5 orang setiap keluarga, penduduk kota tersebut ada 35.000 orang. Jika didasarkan kepada berita Valentijn, Tuban dan Sedayu pada abad ke-18 berpenduduk 5.000 dan 6.000 keluarga.[91] Jika penduduk kota-kota tersebut dibandingkan dengan penduduk pada tahun 1430, dan tahun-tahun kedatangan Tomé Pires (1512–1515), jelas sekali menunjukkan perkembangan.

Jumlah penduduk kota-kota di Sumatra pada abad ke-17 dapat kita ambil contoh Aceh. Menurut berita Thomas Boqrey, di kota Aceh pada waktu itu lebih kurang ada 7.000 atau 8.000 rumah yang dapat kita perkirakan dihuni antara 35.000 atau 40.000 jiwa. Begitu banyak penduduk Aceh dan sekitarnya, maka pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu ketika Aceh hendak mengadakan perang, berhasil dikumpulkan tentara sebanyak 40.000 orang.[92]

Jumlah penduduk kota-kota di daerah Sulawesi, seperti Makassar, Bone, dan Wajo, tidaklah dapat diketahui dengan pasti. Baik berita-berita asing maupun hikayat-hikayat setempat tidak secara khusus memuat data jumlah penduduk kota-kota di daerah itu. Francois Valentijn[93] mengatakan bahwa pada tahun 1665 raja di Makassar dapat menghimpun pasukannya sejumlah 10.000 orang untuk menyerang Buton, dan pada tahun 1666 berhasil mengirimkan armadanya berjumlah 25.000 orang. Jumlah penduduk kotanya sukar dipastikan dan apakah mereka berasal dari kota semata-mata atau dari daerah-daerah lain sekitarnya. Demikian halnya dengan jumlah penduduk di kota-kota di Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan lain-lain, kalau hanya diambil dari perhitungan jumlah tentara yang diberitakan pada babad, hikayat, ataupun berita asing, sukarlah ditentukan berapa sebenarnya penduduk kota-kota itu. Biasanya mobilisasi tentara bukan hanya dari sebuah kota semata-mata tetapi juga dari berbagai tempat yang termasuk kawasan suatu kerajaan.

Berdasarkan jumlah penduduk di tempat-tempat yang telah disebutkan di atas, secara relatif dapatlah kita golongkan kepada kota-kota, baik kota besar maupun kota kecil. Jika diperhatikan jumlah penduduk kota-kota Pasai 20.000, Aceh 35.000 atau 40.000, Surosowan 31.848, Demak 40.000

---

89 J.Th. Vermeulen, *De Chineezen te Batavia Troebelen van 1940*, Leiden, 1938, hlm. 23
90 Francois Valentijn, *op. cit.*, hlm. 266–267
91 *Ibid.*, hlm. 290
92 A.K. Dasgupta, *op. cit.*, hlm. 81
93 Francois Velentijn, *op. cit.*, hlm. 135

atau 50.000, dan Palembang lebih kurang 10.000, Gresik abad ke-16 berpenduduk 30.000, Surabaya 60.000, maka jelaslah bahwa di kota-kota tersebut jumlah penduduknya lebih besar daripada di beberapa kota di Eropa atau Amerika pada abad-abad ke-14–17. Misalnya London pada abad ke-14 berpenduduk antara 30.000 sampai 40.000 jiwa. New York dan Bristol berpenduduk kurang dari 10.000. Pada pertengahan abad ke-15 Frankfurt berpenduduk 8.700 jiwa, Nurenberg 20.000, Strassburg 26.000, dan Brussel 40.000 jiwa. Pada masa itu kota yang berpenduduk 20.000 jiwa termasuk kota besar; sedangkan mayoritas kota-kota pusat berpenduduk kurang dari 10.000 orang. Pada pertengahan abad ke-16 penduduk Bristol masih berjumlah 10.000 orang, Swedia lebih kurang 5.000 orang.[94] Padahal ukuran sebuah kota minimal berpenduduk 2.000–5.000 orang.[95]

Sudah tentu perbandingan jumlah penduduk kota-kota di Indonesia dengan kota-kota di Eropa dan di Amerika tersebut di atas tidaklah berarti bersamaan pula corak kehidupan dan struktur sosialnya. Perbedaannya terletak dalam fungsi dan sejarahnya bahkan dalam fisiknya seperti bangunan-bangunannya dan kekurangan ketatakotaan.[96] Kota-kota di Indonesia yang termasuk negeri Timur lebih menunjukkan unsur-unsur perdesaan.

3. Lapisan Penduduk dan Corak Kehidupannya

Kerajaan-kerajaan yang telah kita bicarakan, seperti Demak, Banten, Mataram, Aceh, Ternate, Gowa, Banjarmasin, dan Samudra Pasai, adalah kerajaan-kerajaan tradisional. Dengan demikian, struktur sosial ekonomi kota-kota pusat kerajaan tersebut bersifat tradisional pula. Golongan masyarakat yang ada dalam struktur sosial kota-kota yang bercorak tradisional seperti itu dapat disebut pula golongan masyarakat kota praindustri.[97] Untuk menentukan lapisan-lapisan penduduk kota masyarakat tradisional atau praindustri tersebut berdasarkan sistem status sosialnya tidaklah mudah. Sartono Kartodirdjo berpendapat bahwa penerapan definisi tentang pengertian status yang ada, yang biasanya berlaku bagi masyarakat industri akan sangat meragukan. Diferensiasi dan stratifikasi sosial dalam masyarakat tradisional jauh lebih sederhana daripada masyarakat industri. Lain daripada itu, peranan sosial dan status yang menyertainya jelas merupakan suatu fenomena kultural, karena itu harus diingat sifat relatif dari kriteria status.[98]

---

94 Gerhard E. Lenski, *op. cit.*, hlm. 199
95 John Sirjamaki, *The Sociology of Cities*, New York, 1964, hlm. 6
96 Emrys Jones, *Human Geography: An Introduction to Man and His World*, New York, Washington, 1970, hlm. 193–194.
97 Gideon Sjoberg, *The Preindustrial City: Past and Present*, New York, 1965, hlm. 7–13
98 Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 16

Relativitas kriteria untuk menentukan status sosial lapisan atau golongan penduduk kota, misalnya didasarkan atas segi politik dan dapat pula didasarkan atas segi-segi lainnya, seperti ekonomi, keagamaan, atau kultural. Suatu contoh, dari segi politik raja dapat digolongkan dalam status sosial pemegang kekuasaan tertinggi di antara golongan tersebut. Akan tetapi, jika didasarkan atas kriteria ekonomi, raja termasuk pula golongan yang kehidupan ekonominya tertinggi, karena raja-raja pada zaman tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, menentukan nasib perekonomian dan perdagangan dengan segala peraturannya. Contoh lain, sekelompok anggota masyarakat dapat digolongkan sebagai ulama berdasarkan kriteria perannya dalam keagamaan. Namun, tidak jarang bahwa di antara golongan ulama ada pula yang memegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, sehingga mereka dapat digolongkan ke dalam elite birokrat. Jadi, jelas bahwa kriteria untuk menentukan status sosial lapisan atau golongan masyarakat, bersifat relatif. Meskipun demikian, dengan relativitas itu sebagai pedoman dalam uraian selanjutnya, penggolongan masyarakat kota-kota zaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia itu dapat kita bagi atas:

1) golongan raja-raja dan keluarganya,
2) golongan elite,
3) golongan nonelite, dan
4) golongan budak.

Pembagian golongan atau lapisan penduduk kota seperti itu tidak lain untuk lebih memungkinkan keleluasaan mengklasifikasikan golongan pejabat pemerintahan, ulama, perkaya atau tukang-tukang, pedagang, serta petani.

a. Golongan Raja-Raja dan Keluarganya

Tempat kediaman golongan raja-raja, baik yang berkedudukan sebagai raja besar atau maharaja maupun sebagai raja kecil, adalah keraton atau istana. Dari keraton itulah raja menjalankan pemerintahan atau kekuasaannya. Gelar raja atau maharaja pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam masih digunakan pada beberapa kerajaan, di samping gelar sultan akibat pengaruh Islam. Demikian pula ada pemakaian gelar raja-raja menurut istilah setempat seperti *karaeng*, *arung*, dan *batara* yang digunakan di Sulawesi,[99] serta *kolano* di daerah Maluku.[100]

---

99 Di antara *karaeng-karaeng* atau *arung-arung* ada yang disebut *karaeng matoa* atau *arung matoa*, yaitu raja yang utama atau kepala dari raja-raja (lihat J. Noorduyn, *Een Achttiende, Eeuwse Kroniek van Wadjo*, Leiden, 1955, hlm. 52 catatan kaki 1)

100 Hubert Th. Th. M. Jacobs, S.J., *op.cit.*, hlm. 103. Jika raja disebut *kolano* maka ratu disebut *raja*

Gelar *sultan* yang pertama kali di Indonesia dipergunakan oleh Sultan Malik as-Saleh seperti tertera pada nisan kuburnya tahun 696 H (1297 M) yang didapatkan di Gampong Samudra, bekas kerajaan Samudra Pasai, Kabupaten Lhokseumawe.[101]

Kecuali gelar *raja* atau *sultan*, di Jawa dan kerajaan yang terpengaruh olehnya, terdapat pula gelar-gelar lainnya seperti *adipati* atau *pati*, *senapati*, misalnya Adipati atau Senapati Jimbun; *pangeran*, *kiai gede*, *susuhunan* atau *sunan*, dan *panembahan*. Gelar *adipati* atau *pati* mengingatkan kita kepada berita Tomé Pires yang mencantumkan gelar *pate* bagi penguasa-penguasa di kerajaan pesisir utara Jawa seperti Pate Rodim, Pate Unus, dan Pate Wira. Gelar *pangeran*, *panembahan*, dan *susuhunan* untuk raja-raja muslim pada zaman peralihan Indonesia–Hindu ke Islam ternyata ada hubungannya dengan gelar-gelar untuk penguasa-penguasa kerohanian. *Pangeran* adalah gelar untuk wali, gelar *susuhunan* atau *panembahan* mempunyai nilai kerohanian yang kuat. Gelar-gelar tersebut setelah islamisasi dipakai raja-raja untuk mempertinggi gelar *pati* yang mula-mula diperolehnya. Hal itu sesuai dengan dugaan bahwa tidak hanya raja-raja yang beragama Hindu tetapi juga golongan muslim yang mempunyai kedudukan kerohanian yang tinggi dipandang sebagai sumber dan asal kekuasaan, dalam hal ini mungkin Brahmana atau wali Islam. Sesudah penghapusan hinduisme, maka golongan kerohanian Islam dianggap sebagai penguat khusus tenaga-tenaga gaib.[102] Raja-raja di Banten juga ada beberapa yang memakai gelar *maulana* yang berarti tuan atau penguasa seperti Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, dan Maulana Muhammad. Gelar tersebut sebenarnya telah dipakai pada abad ke-15 M oleh Abdul Rahman Taju'l Daulat Qutbul Ma'ali al Fasi (wafat 816 H) di Pasai, dan Maulana Malik Ibrahim (wafat 822 H) di Gresik.[103]

Dalam masyarakat, raja-raja atau sultan-sultan dari garis keturunan atau pertalian darah umumnya tergolong kaum bangsawan. Tentu saja ada beberapa orang yang karena jasa-jasanya kepada raja atau perkawinan dengan putri raja yang berkuasa, pada suatu waktu diangkat menjadi raja kecil atau dipati atau jabatan lainnya dengan gelar jabatan dalam hierarki birokrasi kerajaan. Dengan demikian, orang-orang tersebut karena mobilitasnya dapat masuk ke golongan raja-raja atau bangsawan.

Jabatan raja biasanya turun-temurun dari ayah kepada anak atau cucunya. Meskipun demikian, ada pula beberapa pengecualian di mana seseorang dapat menjadi raja karena hal-hal lain. Di Indonesia ada pula unsur demokrasi dalam struktur pemerintahan kerajaan yang dapat

101 J.P. Moquette, *op. cit.*, hlm. 1–12, suppra catatan 13

102 H.J. de Graaf, *op. cit.*, hlm. 77–78

103 R.L. Mellema, *op. cit.*, hlm. 130, gbr. 22 (nisan). Ph. S. van Ronkel, "Bij de Afdeeldding van het draf van Malik Ibrahim te Gresik", *TBG*, III, 1910, hlm. 596–600; J.P. Moquette, "De Datum op den Grafsteen van Malik Ibrahim te Grissee", *TBG*, LIV, 1912, hlm. 208–214

dibuktikan oleh adanya unsur pemilihan dalam pengangkatan raja dan dalam putusan suatu hal mengenai pemerintahan. Contoh di kerajaan-kerajaan Gowa-Tallo, Bone, dan Wajo. Di Sulawesi, jabatan *karaeng matoa* atau *arung matoa* (*matoaya*) tidaklah turun-temurun, tetapi dipilih oleh *karaeng* atau *arung-arung*, yang merupakan federasi kerajaan besar. Lebih-lebih unsur demokrasi tersebut jelas dalam struktur pemerintahan kerajaan Wajo bahwa di samping tempat *arung matoa* ada dewan pangreh praja yang diperluas dengan tiga *Pa' Bate Lompo* (pendukung panji) tiga puluh *arung ma'bicara* (raja hakim) dan tiga duta, sehingga anggotanya menjadi empat puluh. Keputusan-keputusan pemerintahan hanya dapat diambil dengan persetujuan mereka semua.[104]

Unsur demokrasi meskipun sedikit, juga didapatkan pada kerajaan di Maluku sebagaimana diberitakan oleh Antonio Galvao, bahwa *kolano* mempunyai dewan penasihat yang terdiri dari 20 menteri yang anggota-anggotanya telah cukup usia. Anggota tetapnya diambil dari pejabat-pejabat istana, dan tiga puluh empat anggota lainnya dari orang-orang yang dipercayai atau loyal kepada raja, dan karenanya ditunjuk duduk di dalam dewan kerajaan itu.[105]

Di Aceh, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dikenal pula cara memilih sultan yang dilakukan oleh tiga panglima *sagi*, *uleebalang*, meskipun pemilihan tersebut jatuh pada keluarga sultan-sultan pula.[106] Demikian juga tentang adat, disusun, diperbarui, dan ditetapkan setelah dipertimbangkan oleh majelis kerajaan dengan dimufakati ahli-ahli agama (ulama) dan ahli-ahli adat (menteri, uleebalang, dan orang kaya).[107]

Raja atau sultan sebagai penguasa tertinggi dari suatu kerajaan, dalam pemerintahannya dibantu oleh pejabat-pejabat birokrasi dari tingkat pusat sampai daerah. Bagaimana sistem dan struktur birokrasi kerajaan-kerajaan pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia, akan diuraikan pada bagian tersendiri. Dalam bagian ini yang perlu dibicarakan adalah hubungan antara golongan satu dengan golongan lain. Raja atau sultan dalam pemerintahan selalu erat berhubungan dengan pejabat-pejabat birokrasi pusat, terutama dengan pejabat-pejabat tinggi kerajaan seperti mangkubumi (wazir, patih, perdana menteri), menteri-menteri, kadi, senapati, laksamana, dan syahbandar sesuai dengan gelar jabatan masing-masing. Raja atau sultan dalam menyampaikan perintahnya ada yang dengan cara langsung kepada pejabat kerajaan menurut hierarki

---

104 J. Noorduyn, *op. cit.*, hlm. 319–320
105 Hubert Th., Th.M. Jacobs, S.J. *op. cit.*, hlm. 113
106 A. Mukti Ali, *An Introduction to the Government of Acheh's Sultanate*, Yogyakarta, 1970, hlm. 27
107 H.M. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, Pustaka Iskandar Muda, Medan, 1961, hlm. 335

birokrasi, kepada yang tertinggi, biasanya mangkubumi untuk disampaikan lagi kepada pejabat-pejabat lainnya, berturut-turut sesuai dengan hierarkinya.

Audiensi antara raja dengan pejabat-pejabat kerajaan, lebih-lebih dengan masyarakat umum, tidak dilakukan setiap hari. Kebiasaan raja atau sultan beraudiensi dapat kita ketahui baik dari babad, hikayat, maupun berita-berita asing. Dalam *Sadjarah Banten* diberitakan bahwa pada masa penghujan atau peralihan, sultan jarang melakukan audiensi. Apabila melakukan audiensi, sultan tidak membiarkan hadirin duduk di tempat yang terkena panas matahari. Kalaupun tidak ada tempat duduk, hadirin disuruh duduk berdekatan dengan sultan. Dalam audiensi, pertama-tama sultan meminta keterangan tentang keadaan *ponggawa* dan mantri-mantri mengenai daerah masing-masing, perdagangan di pasar dan pelabuhan. Kemudian sultan menanyakan pula berita-berita tentang daerah di sekitar Banten, mengenai negeri-negeri Makassar, Jambi, Palembang, Johor, Malaka, Aceh, Mataram, dan terutama tentang Jakarta yang dianggapnya sebagai penghalang (*tambak*) terhadap Mataram. Ia kemudian juga minta keterangan mengenai soal-soal hukum, karena kalau ada proses hukum yang berlarut-larut dan kadi tidak dapat memutuskan, sultanlah yang akan memberikan keputusan akhir. Pada akhir audiensi, sultan memberikan gambaran mengenai keadaan kerajaan secara umum. Kemudian setelah itu baru makan bersama dan berbincang-bincang tentang sesuatu dan akhirnya kembali ke dalam keraton.[108] Salah satu tempat beraudiensi di Banten dinamakan *dipangga*, sedang di tempat lainnya tempat untuk beraudiensi biasanya dinamakan *sitiluhur* atau *sitinggil*.[109]

Di kerajaan Banjar, menurut *Hikayat Banjar*, raja-raja mengadakan audiensi tiap hari Sabtu di mana raja dihadap di tempat yang dinamakan *sitilohor* atau di balai penghadapan, misalnya pada masa pemerintahan Sultan Suryanullah atau Pangeran Samudra.[110]

Rijckloff van Goens dalam catatan perjalanannya sebagai utusan ke Mataram menceritakan bahwa raja menampakkan diri di hadapan umum tiga kali dalam seminggu yaitu untuk menghadiri turnamen, menjalankan peradilan, dan menyelenggarakan sidang dewan pemerintahan. Akan tetapi, hampir setiap hari bangsawan-bangsawan, pejabat-pejabat negara diminta hadir di keraton, menunggu kehadiran sultan. Mereka mempertaruhkan nasibnya bahkan hidupnya apabila mereka tidak hadir. Raja dapat menjamin loyalitas mereka hanya dengan permintaan agar mereka tetap

---

108 R. Hoesein Djajadiningrat, *op. cit.*, hlm. 54–55
109 *Ibid.*, hlm. 53, 63, 65, 66 catatan 4
110 J.J. Ras, *op. cit.*, hlm. 408

hadir. Biasanya beberapa ribu orang besar atau orang kebanyakan menghadiri audiensi raja.[111]

Kehadiran raja di muka umum kecuali pada waktu audiensi juga pada waktu penyelenggaraan upacara kenegaraan atau yang dianggap sebagai upacara kenegaraan. Sebagaimana diketahui dari beberapa data sejarah bahwa kepentingan raja dan negara bahkan kepentingan keluarga raja sendiri sering dicampuradukkan. Upacara pernikahan putri-putri raja, khitanan seorang putra raja, semuanya dianggap sebagai upacara yang diselenggarakan secara kenegaraan dan masuk adat raja-raja. Upacara seperti penobatan putra mahkota, pernikahan raja atau putra raja, dan lain-lain diselenggarakan di kota pusat kerajaan. Kehadiran para bangsawan dan pejabat pemerintah pusat kerajaan maupun dari daerah, termasuk raja-raja taklukan dengan membawa upeti masing-masing, merupakan keharusan. Dengan audiensi dan upacara-upacara semacam itulah raja atau sultan dapat mengawasi dan memerhatikan loyalitas pejabat-pejabat birokrasinya serta raja-raja taklukannya. Begitu juga utusan-utusan dari kerajaan-kerajaan lainnya, yang dianggap bersahabat diharapkan kehadirannya terutama dalam upacara-upacara tersebut di atas.

Sitinggil dipergunakan untuk sultan apabila ia menyaksikan keramaian yang diselenggarakan di alun-alun. Keramaian itu tidak hanya dapat dinikmati sultan dan keluarga serta para bangsawan, pejabat pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga oleh masyarakat umum, baik penduduk kota pusat kerajaan maupun penduduk desa-desa sekitarnya. Mengenai upacara-upacara tersebut akan dibicarakan pada bagian tersendiri.

Kehadiran raja atau sultan pada hal-hal tersebut di atas juga dalam upacara penerimaan utusan-utusan dari kerajaan-kerajaan lain, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia. Biasanya sebelum utusan secara resmi diterima, mereka diharuskan lebih dahulu menyampaikan maksud kedatangannya melalui syahbandar, kemudian patih atau perdana menteri dan akhirnya raja atau sultan.

Di Aceh, pada zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah, ketika James Lancaster (1602) datang, yang menjadi protokol adalah seorang laksamana perempuan bernama Malahayati. Utusan tersebut dapat diterima sultan, dan disambut dengan segala upacara kebesaran dan penghormatan disertai pula tari-tarian dan musik.[112]

Pada waktu-waktu tertentu sultan juga melakukan perjalanan di dalam kota ataupun ke luar kota bahkan ke daerah-daerah yang letaknya berjauhan dari kota pusat kerajaan. Pada zaman sebelum pertumbuhan

---

111 Clive Day, *The Policy and Administration of the Dutch in Jav*a, Oxford Univ. Press, 1972, hlm. 12
112 Zakaria Ahmad, *Sekitar Keradjaan Atjeh dalam Tahun 1520–1675*, Medan, 1972, hlm. 61

kerajaan bercorak Islam, perjalanan raja yang menempuh jarak jauh tersebut, mengingatkan kita akan perjalanan Raja Hayam Wuruk ke berbagai tempat di bagian timur Jawa Timur. Pada zaman perkembangan Islam, di Aceh, Sultan Iskandar Thani diceritakan dalam kitab *Bustanus Salatina*, mengadakan perjalanan jauh ke Pasai. Karena jauhnya, selama beberapa hari ia terpaksa menginap dalam perjalanan. Pejabat-pejabat yang mengiringi perjalanan tersebut dari keraton (*dalam*) Dar-ud Dunia ke Samudra Pasai antara lain raja, satria, *sida-sida*, *abentara*, hulubalang, dan tentaranya.[113] Telah diterangkan pada bagian yang lalu bahwa raja dalam perjalanan, baik di dalam kota maupun ke luar kota, biasanya menunggangi kereta yang ditarik oleh lembu atau kerbau. Apabila sultan dengan pengiringnya dalam perjalanan bertemu dengan rakyatnya, rakyat segera menepi dan berjongkok di tepi jalan sambil menyembah.

Di kalangan raja-raja atau golongan bangsawan pada zaman sebelum dan sesudah pertumbuhan kerajaan bercorak Islam, terdapat pula kebiasaan melakukan perjalanan untuk berburu. Kebiasaan berburu binatang di kalangan raja-raja adalah salah satu kebiasaan dalam kehidupan golongan feodal dan dianggap sebagai sesuatu kegiatan yang melebihi olahraga.[114] Karena itu pula beberapa raja memutuskan bahkan membuat suatu hutan perburuan khusus untuknya. Sebagai tempat peristirahatan, raja mendirikan taman-taman yang indah yang juga diisi dengan binatang-binatang peliharaan seperti kijang dan kelinci yang dibiarkan terlepas.

Di Aceh, pada masa pemerintahan raja Iskandar Muda, pernah dibuat suatu taman indah yang dinamai Taman Ghairah dan digambarkan dalam cerita *Bustanus Salatina* betapa indahnya taman tersebut.[115] Demikian pula di Banten dibuat sebuah taman di tengah-tengah danau buatan yang diberi nama *Tasikkardi*. Di Cirebon dibuat juga suatu taman dengan bangunan tempat peristirahatan dari batu-batu karang yang dinamakan *Suryaragi*. Kemudian di Yogyakarta pada abad ke-18 kita kenal taman yang juga mempunyai bangunan besar yang dinamakan *Taman Sari*. Kebiasaan raja-raja membuat taman-taman itu juga sudah ada sejak masa Indonesia–Hindu, sebagaimana diceritakan dalam beberapa sastra Jawa kuno.[116]

Dari uraian di atas jelas bahwa hubungan antara bangsawan, pejabat-pejabat birokrasi, dan lebih-lebih masyarakat umum dengan golongan raja sangat terbatas. Hal itu bukan karena hari-hari atau waktu yang tidak dapat dipastikan dan lebih tergantung bagaimana kehendak raja, melainkan juga

---

113 Denys Lombard, *op. cit.*, hlm. 210

114 March Bloch, *Feodal Society*, Vol. 2, diterjemahkan oleh L.A. Manyon, University of Chicago, 1968, hlm. 303

115 Denys Lombard, *op. cit.*, hlm. 202–203

116 Denys Lombard, "Jardin A Java", *Arts Asiatiques*, Tome XX, 1969, hlm. 135

karena peraturan-peraturan adat. Tata cara menghadap atau berhubungan dengan raja tidak mudah. Penggunaan pakaian dan lambang-lambangnya, pemakaian kata-kata dalam percakapan dengan raja merupakan faktor keterbatasan pula. Kehidupan sosial ekonomi golongan bangsawan dengan golongan lapisan penduduk lain, baik di kota pusat kerajaan maupun di tempat-tempat lain, merupakan pemisahan antara raja di lapisan atas dan rakyat di lapisan bawah. Dalam masyarakat Indonesia, sekalipun sudah bercorak Islam, pada masa tersebut masih terdapat anggapan bahwa raja atau sultan bersifat magis-religius sebagaimana terbukti dalam pemberian gelar-gelar antara lain *panembahan* dan *susuhunan* yang telah disebut di bagian terdahulu.

Suatu golongan yang bertempat tinggal di dalam atau di luar keraton tetapi erat hubungannya dengan raja karena pertalian darah adalah golongan keluarga raja. Keluarga raja di kerajaan-kerajaan Kalimantan Selatan dinamakan *kadanghaji* atau orang *malalangkah/kaum pamayungan, anang, kadangsanak, sekadang sanakan*.[117] Pada zaman Majapahit, di Jawa, keluarga raja yang terkemuka disebut *ksatria*, misalnya pada zaman Hayam Wuruk yang tergolong kerabat atau keluarga raja yang terkemuka atau ksatria adalah ayah raja, paman raja, mertua raja, suami para putri istana, yaitu saudara-saudara perempuan raja, dan putri-putri dari saudara-saudara perempuan ibu raja. Mereka dianggap sebagai ksatria karena keturunan.[118] Kecuali itu, ada yang disebut *wargahaji* atau *sakaparek*, yaitu keluarga raja yang berasal dari perkawinan dengan anggota keluarga raja. Mereka termasuk keluarga raja tingkat ketiga. Keluarga raja yang berasal dari anak keturunan raja-raja dari dinasti-dinasti yang terdahulu disebut *prawangsa*, yaitu keluarga raja tingkat keempat. Di Mataram Islam, keluarga atau kerabat raja yang dianggap tertinggi tingkatnya adalah kerabat raja yang terakhir, jadi putra-putra dan menantu atau ipar raja yang sedang memerintah. Hubungan yang berasal dari raja-raja terdahulu dianggap lebih rendah tingkatnya dan disebut *sentana dalem*. Disebut demikian adalah menurut mendiang raja yang menjadi nenek moyang mereka.[119]

Di Banten, keluarga raja disebut *warga* dan dalam audiensi mereka juga hadir bersama-sama dengan *ponggawa-ponggawa, mantri-mantri, bebekel, pasudagaran*.[120] Di Aceh, kaum bangsawan yang berasal dari keluarga sultan memakai gelar *tuanku* dan yang berasal dari keturunan *uleebalang* memakai gelar *teungku*.[121] Telah dikatakan dalam uraian terdahulu bahwa sultan atau

117 J.J. Ras, *op. cit.*, hlm. 554
118 A. Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 18
119 *Ibid.*, hlm. 27
120 Zakaria Ahmad, *op. cit.*, hlm. 95
121 R. Hoesein Djajadiningrat, *op. cit.*, hlm. 63

raja mempunyai kebiasaan menempatkan putra-putra, ipar, menantu, paman, atau keluarga lainnya yang mempunyai hubungan pertalian darah, sebagai pejabat-pejabat tingkat tinggi dalam struktur birokrasinya. Keluarga raja yang telah mempunyai jabatan dalam struktur birokrasi biasanya tidak selalu hidup atau bertempat tinggal bersama raja di dalam keraton. Lebih-lebih keluarga raja yang ditempatkan sebagai pati atau dipati, tumenggung, dan penguasa daerah, dengan sendirinya tidak bertempat tinggal di ibu kota kerajaan. Akan tetapi, status sosial dalam lingkungan keluarga raja itu sendiri tidak semua sama, misalnya putra atau putri mahkota akan lebih tinggi kedudukannya daripada putra atau putri *garwa padmi* lain, apalagi dibandingkan dengan putra atau putri selir. Demikian juga mengenai pemberian gelar-gelarnya.

Di kerajaan Mataram Islam, misalnya, putra yang bukan putra mahkota diberi gelar *pangeran putra*, *pangeran sentana*, dan *pangeran sengkan*.[122] Gelar *pangeran adipati anom atau pangeran ratu* untuk putra mahkota juga dipergunakan pada masa kesultanan Banten dan kerajaan di luar Jawa yang sedikit banyak mendapat pengaruh struktur birokrasi dari Jawa, misalnya di kerajaan Banjarmasin, kerajaan Kutai, dan Palembang.[123]

Status putra-putri raja atau sultan dari selir-selir dianggap lebih rendah daripada putra atau putri dari permaisuri atau padmi. Karena itu pula sering terjadi perselisihan dalam perebutan takhta kerajaan. Dalam upacara kenegaraan, keluarga raja, putra-putri, permaisuri, dan keluarga terdekat turut hadir. Dalam hikayat atau babad, sering pula diceritakan turut sertanya putra-putra raja dan anak-anak bangsawan lainnya dalam perayaan seperti *saptonan* dan upacara lainnya. Dalam *Sadjarah Banten* antara lain diceritakan bahwa dalam *sasaptonan*, pangeran dipati sambil menunggang kuda berwarna *layarwaring* yang berasal dari Bali, turut meramaikannya. Demikian pula turut serta ponggawa-ponggawa dan putra-putra bangsawan lainnya.[124]

Hubungan antara keluarga raja dengan masyarakat luas juga agak terbatas, bukan hanya karena mereka mempunyai pertalian darah dengan raja, melainkan karena status sosial ekonominya yang berbeda dengan penduduk umum di dalam kota pusat kerajaan. Bagi keluarga raja yang tinggal di dalam keraton bersama-sama dengan raja, tidaklah mudah untuk berhubungan langsung dengan penduduk umumnya di luar tembok keraton. Secara fisik tembok kompleks keraton sudah merupakan pemisah antara keluarga raja dengan lapisan penduduk kota pusat kerajaan itu.

---

122 A. Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 27

123 Hoesein Djajadiningrat, *op. cit.*, hlm. 66, 189, 190; J.J. Ras, *op. cit.*, hlm. 576, glossary; C.A. Mees, 1935

124 R. Hoesein Djajadiningrat, *op. cit.*, hlm. 65

Pendidikan putra-putri raja dilakukan dalam keraton oleh guru agama khusus untuk keluarga raja. Akan tetapi, adakalanya di antara putra raja itu yang pendidikannya diserahkan kepada keluarga raja yang bertempat tinggal tidak bersama-sama raja. Contoh kita kenal antara lain Pangeran Arya, putra Maulana Hasanuddin di Banten (1552–1570) yang pernah dikirim ke Japara, yaitu bibi Pangeran Arya yang dalam babad-babad terkenal dengan julukan Ratu Kalinyamat.[125] Putra-putri raja yang berdiam di dalam keraton mempunyai tempat masing-masing antara lain yang disebut *keputren* dan *keputran*, yaitu tempat putri-putri dan putra-putra raja. Terpisah dari golongan keluarga raja, di dalam keraton terdapat pula golongan *abdidalem*. Mereka ada yang berfungsi sebagai inang pengasuh, pekerja-pekerja di dapur, penjaga-penjaga keamanan keraton, dan lain sebagainya; semuanya di bawah kepala rumah tangga keraton. Di kerajaan Mataram Islam, kepala-kepala rumah tangga keraton disebut *bupati keparak kiwa* dan *bupati keparak tengen* atau lebih khusus sebagai bupati *gedong tengen*. Di kerajaan-kerajaan Melayu, jabatan tersebut disebut *bentara sebelah kiri* dan *kanan*.[126] Di Banjarmasin disebut *pengiwa* dan *panganan*.[127] Dalam *Sadjarah Banten* ada pula yang disebut *pangiwa*, pada zaman sultan Agung dan jabatan tersebut diserahkan kepada Tubagus Wiratmaja, pembantu mangkubumi, pangeran Madura.[128]

Kerajaan yang bercorak maritim seperti kerajaan-kerajaan pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia (Samudra Pasai, Aceh, Indragiri, Jambi, Demak, Palembang, Banten, Cirebon, Gowa, Banjar, Ternate) dalam kehidupan perekonomiannya tidak mempunyai basis agraria, tetapi perdagangan dan pelayaran. Karena itu pula di kota-kota pantai kekuasaan politik maupun ekonomi dipegang oleh kaum aristokrat yang mendominasi perdagangan sebagai pemberi modal atau kadang-kadang sebagai peserta.[129] Pengawasan terhadap perdagangan dan pelayaran merupakan sendi-sendi kekuasaan mereka yang memungkinkan kerajaan memperoleh penghasilan dan pajak yang besar.[130]

Jelaslah bahwa hubungan antara golongan raja-raja atau sultan-sultan serta keluarganya, para bangsawan, pejabat-pejabat elite birokrat dengan perekonomian dan perdagangan juga sangat erat. Dengan demikian, golongan tersebut bukan hanya mempunyai status yang tinggi di bidang politik dan sosial saja, melainkan juga di bidang ekonomi. Tidak mengherankan apabila golongan raja-raja merupakan golongan orang-orang berada yang mendapat

125 *Ibid.*, hlm. 117
126 Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 28, 29
127 J.J. Ras, *op. cit.*, hlm. 558
128 R. Hoesein Djajadiningrat, *op. cit.*, hlm. 66 catatan 3
129 J.C. van Leur, *op. cit.*, hlm. 66; A. Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 10
130 Sartono Kartodirdjo, *Ibid.*, hlm. 11

penghasilan dari pajak bea cukai, upeti, hadiah-hadiah yang diterima dari utusan-utusan negara-negara asing, hasil tanah yang dikerjakan rakyat, dan dari sumber-sumber lainnya. Untuk memungut semua penghasilan raja di dalam susunan birokrasi kerajaan, dibentuk jabatan-jabatan syahbandar dan penarik-penarik pajak seperti *mantri pemajegan* di Mataram,[131] *keujreun* di Aceh.[132] Hubungan yang paling penting antara raja (penguasa) dengan syahbandar yang biasanya orang asing, mungkin karena fungsi syahbandar diperlukan dalam pengetahuannya tentang bahasa asing.[133] Jabatan penarik pajak tersebut mungkin mengingatkan kita kepada *mangilala dreya haji* pada zaman kerajaan-kerajaan Indonesia-Hindu.[134] Bahkan syahbandar-syahbandar sendiri membuat dirinya sebagai saluran masuknya pengaruh Islam ke dalam lingkungan keraton, baik dengan cara menunjukkan apa yang baik dari luar negeri maupun dengan cara mencegah pihak mereka tentang bahaya ekspansi orang Portugis, dan menunjukkan kepentingan Islam sebagai alat peluasan kekuasaannya sendiri.[135] Demikian pula antara orang-orang yang dianggap keramat, ulama-ulama dengan raja dan keluarga istana dapat kita saksikan dari data-data historis. Hubungan dan peran kaum ulama ini dibicarakan dalam bagian-bagian selanjutnya.

b. Golongan Elite

Dalam masyarakat kerajaan tradisional, baik di kota-kota pusat kerajaan maupun di luar pusat kerajaan, terdapat segolongan masyarakat yang status sosialnya dipandang tinggi karena fungsinya atau terutama karena pekerjaannya, yaitu yang kita sebut golongan elite.[136] Golongan elite yang merupakan kelompok orang yang menempati lapisan atas dalam masyarakat, nominal dapat terjadi dari golongan aristokrasi, tentara, keagamaan, pedagang, dan plutokrasi.[137]

Telah dikatakan bahwa dalam masyarakat kerajaan tradisional pemisahan mutlak di antara golongan elite sendiri adalah relatif. Kaum aristokrat atau kaum bangsawan ada yang menempati suatu jabatan pada pemerintahan sebagai golongan elite birokrat. Kecuali di Mataram Islam ada demarkasi antara elite birokrat (priyayi) dengan kaum bangsawan (*bendara*). Di Mataram, golongan elite birokrat itu disebut *priyayi* yang terbagi atas *priyayi gede* dan *priyayi cilik*.[138]

---

131 Olthof, A. Teeuw, *Babad Tanah Djawi*, hlm. 73–76, 86–89, 107–111
132 Zakaria Ahmad, *op. cit.*, hlm. 93
133 B. Schrieke, *op. cit.*, hlm. 238
134 W.F. Stutterheim, "Een Oorkonde op koper uit het Singasarische", *TBG*, LXV, 1925, hlm. 145
135 B. Schrieke, *op. cit.*, hlm. 238
136 T.B. Cottomore, *Elites and Society*, 1970, hlm. 14
137 Pareto dikutip dari T.B. Bottomore, *Ibid.*, hlm. 10
138 A. Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 32

Di Banten sebutan *priyayi* adalah untuk menyebutkan para pegawai atau mantri.[139] Golongan bangsawan ada pula yang memangku jabatan, antara lain sebagai mangkubumi, perdana menteri, atau orang kaya besar, sebagai menteri, ponggawa, bendahara, laksamana, senapati, adipati, dan tumenggung.

Apabila dalam masyarakat kerajaan tradisional di Indonesia seperti Demak, Banten, Samudra Pasai, Aceh, Palembang, Indragiri, Jambi, Banjarmasin, Kutai, Gowa, Ternate, dan Lombok terjadi kebiasaan kaum bangsawan menempati jabatan-jabatan tinggi dalam pemerintahan, hal itu sesuai dengan tradisinya. Raja atau sultan mempunyai kebiasaan menempatkan keluarga dan kerabatnya dalam struktur birokrasi. Dengan demikian, usaha tersebut dianggap dapat memperkukuh kedudukannya di bidang politik, ekonomi, bahkan kultural di antara golongan raja dan keluarga bangsawan itu. Dalam beberapa hal seseorang dapat menempati kedudukan sebagai elite birokrat, misalnya karena mobilitas vertikal, ia diangkat oleh raja atau sultan karena kecakapannya, menunjukkan kesetiaan kepada raja, dan berjasa dalam perang. Akan tetapi, mungkin juga seseorang dari rakyat lambat laun dapat memasuki golongan elite birokrat karena melalui perkawinan dan kemudian mengikuti cara-cara hidup kaum bangsawan yang termasuk elite birokrat itu.

Jika beberapa kerajaan tradisional di Indonesia pernah menjadikan orang-orang asing sebagai syahbandar, hal itu berarti bahwa orang asing juga dapat menempati kedudukan golongan elite birokrat dalam suatu kerajaan. Orang-orang asing yang pernah menjadi syahbandar, misalnya, di Aceh adalah orang India; di Makassar orang Cina; di Banten orang India, Cina, dan Gujarat; di Batavia seorang Jepang; di Cirebon seorang Belanda. Hal itu mungkin karena orang-orang asing dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas tentang perdagangan dan hubungan internasional. Dalam fungsinya, syahbandar tidak hanya menangani soal-soal yang berhubungan dengan orang-orang asing tetapi juga dalam hubungan antarnegara. Dalam hubungan antarnegara, syahbandar mempunyai fungsi yang mencakup semua bentuk kegiatan umum yang bersifat internasional, misalnya legislasi, yudikasi, kepolisian, dan administrasi.[140] Telah dikatakan pada bagian terdahulu bahwa syahbandar asing juga memiliki pengetahuan bahasa sehingga memudahkan pula dalam hubungan-hubungan internasional. Di antara para syahbandar, ada juga yang memasuki lingkungan aristokrasi atau golongan bangsawan, mungkin melalui perkawinan dengan putri bangsawan, dan kemudian hidup menurut adat kaum bangsawan. Perkawinan antara anggota bangsawan dengan seorang syahbandar, bahkan juga dengan pedagang-pedagang besar yang termasuk elite pedagang

139 Hoesein Djajadiningrat, *op. cit.*, hlm. 60, catatan kaki 3

140 Purnadi Poerbatjaraka, "Shahbandars in the Archipelago", *JSEAH*, Vol. 2, No. 2, Juli 1961, hlm. 1–9

dapat pula terjadi, mengingat status ekonominya. Dalam islamisasi justru terjadi antara lain melalui perkawinan antara beberapa putri adipati dengan beberapa pedagang besar itu.

Di lain pihak para adipati juga merupakan elite birokrat pemerintah pusat. Dari sudut politik, mereka merupakan elite politik di daerahnya. Setelah adipati-adipati tersebut mempunyai kedudukan ekonomi yang kuat mereka muncul sebagai penguasa yang melepaskan diri dari pusat kekuasaan kerajaan yang bercorak Indonesia–Hindu dan akhirnya mendirikan kerajaan bercorak Islam.

Julukan "orang kaya" sering kali kita dapatkan di masyarakat kerajaan Aceh, Malaka, Maluku, Jambi, Indragiri, Jakarta pada zaman Pangeran Jakarta, dan di tempat-tempat lain. Mereka mungkin merupakan golongan elite birokrat atau juga elite pedagang yang mempunyai pengaruh terhadap penguasa atau raja. Dalam *Hikayat Hitu* sering dijumpai sebutan *orang kaya* yang disamakan dengan *orang besar*.[141] Di Aceh, yang dijuluki orang kaya termasuk golongan bangsawan yang turut bertanggung jawab dalam administrasi kota. Mereka berada di bawah perlindungan raja dan sebaliknya harus turut memelihara ketertiban keraton, mereka tidak bersenjata dan dikelilingi oleh budak-budaknya. Apabila di istana diadakan persidangan tentang masalah-masalah kriminal yang tempatnya dekat dengan gerbang istana, persidangan tersebut dihadiri oleh kepala orang kaya.[142]

Dalam masyarakat kota pusat kerajaan sering kali kita ketahui adanya golongan keagamaan yang menempati posisi sosial yang tinggi. Mereka ini antara lain terdiri dari beberapa orang ulama, yaitu orang-orang yang dianggap wali. Kadang-kadang mereka menjadi penasihat para sultan. Di Jawa pada masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam dalam cerita-cerita dikenal adanya Wali Sanga yang mempunyai peran, bukan hanya dalam bidang dakwah islamiah melainkan juga dalam bidang politik dan budaya. Di antaranya bahkan menjadi penguasa atau raja seperti Syarif Hidayatullah yang dikenal sebagai Sunan Gunungjati dengan julukan *ratu-pendeta*.[143] Sunan Giri dalam babad-babad fungsinya sering dihubungkan dengan pemberi restu dalam penobatan raja.[144] Sunan Kudus dalam cerita tersebut dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa politik pula. Sunan Kalijaga terkenal sebagai seorang wali yang berkecimpung di bidang seni.[145] Kita ketahui pula bagaimana pengaruh kaum ulama

---

141 *Hikayat Tanah Hitu*, oleh Imam Rijali, transkripsi Manoesama dari film mikro MS di Bibliotik Universitas Leiden (belum diterbitkan)

142 A.K. Dasgupta, *op. cit.*, hlm. 87

143 J.L.A. Brandes, U.A. Rinkes, *op.cit.*, hlm. 104

144 B. Schrieke, *op. cit.*, hlm. 239, Sultan Agung dan Sultan Pajang yang kekuasaaannya mendapat restu dari Sunan Giri, Sultan Kudus, dan Sunan Kalijaga juga dihubungkan dengan perannya dalam politik, dan masalah-masalah pergantian raja-raja

145 Contoh peran Sunan Kalijaga di bidang budaya misalnya dalam pendirian Masjid Demak (1428 A.J.) di mana ia membuat *saka-tatal* (Olthof, *op. cit.*, hlm. 30)

terkemuka dalam pemerintahan pada masa kemudian setelah tidak ada wali-wali. Syekh Yusuf, seorang ulama dari Makassar pada abad ke-17 pernah menjadi penasihat agama Sultan Ageng Tirtayasa. Demikian pula pengaruh golongan ahli keagamaan di Aceh dan tempat tempat seperti telah dibicarakan pada bagian sebelumnya.

Meskipun demikian, dapat dicatat bahwa pengaruh golongan elite keagamaan misalnya Wali Sanga maupun ulama-ulama terkenal bukan hanya terbatas pada golongan raja dan bangsawan di lingkungan keraton melainkan juga pada golongan atau lapisan penduduk umum. Dengan demikian, pemisahan antara golongan elite keagamaan dengan elite politik sangat relatif. Mereka yang tergolong elite ada yang berada dalam substratum elite politik, elite birokrat, elite pedagang, dan elite keagamaan, dalam jumlahnya masyarakat jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan golongan atau lapisan penduduk lain yang termasuk nonelite.

Kehidupan golongan elite yang jumlahnya terbatas serta menduduki status sosial yang tinggi itu berhubungan erat dengan status ekonomi yang tinggi pula, dibandingkan dengan golongan nonelite. Golongan elite membedakan dirinya dari lapisan atau golongan nonelite bukan karena kehidupan ekonominya saja, melainkan juga kehidupan sosial budaya umumnya. Misalnya, mereka mempunyai corak atau gaya berpakaian sendiri, cara berbahasa, gelar-gelar yang dimilikinya, rumah-rumahnya mempunyai bentuk serta keadaan yang berbeda dengan orang golongan nonelite. Dalam berita asing antara lain dikatakan bahwa rumah-rumah bangsawan dan pejabat-pejabat tinggi pemerintahan dibuat dari bahan-bahan bata dan bahan-bahan yang lebih kuat dan permanen, serta berukuran besar. Menurut Willem Lodewycksz tahun 1596, kota Banten dibagi atas beberapa bagian di mana ditempatkan seorang bangsawan. Di setiap rumah bangsawan ada 10 atau 12 orang penjaga setiap malam. Di bagian depan rumah mereka terdapat *paseban*, tempat beraudiensi orang-orang yang memerlukan atau memintanya. Di bagian depan *paseban* ditempatkan penjaga dengan atap alang-alang atau daun-daun sebangsa palem (mungkin kirai) di mana mereka mendengarkan audiensi. Pada suatu sudut terdapat masjid dan di samping itu sumur tempat mereka mencuci; masuk ke bagian agak dalam terdapat lorong dengan belokan-belokan dan sudut-sudut, tempat tinggal budak-budak atau juga untuk mencegah serangan-serangan musuh di waktu malam hari. Rumah-rumah mereka mempunyai 4, 8, atau 10 tiang terbuat dari kayu yang dikerjakan halus dan bagian atapnya dari daun-daun sejenis palem, sedang di bawahnya (langit-langit) sama sekali terbuka supaya dingin, meskipun terdapat jendela-jendela.[146]

---

146 G.V. Rouffaer, J.W. Ijzerman, *op. cit.*, hlm. 107–108

Orang-orang bangsawan dan orang-orang yang termasuk elite sebagaimana telah digambarkan di atas mempunyai budak-budak seperti halnya juga di Aceh.[147] Galvao menceritakan tentang perbedaan umum antara rumah raja dan bangsawan dengan rumah rakyat di daerah Maluku. Dikatakan bahwa keraton dan rumah-rumah di Maluku merupakan bangunan kecil-kecil dengan dua kamar dan sebuah ruang di tengah-tengah untuk menerima tamu; rumah-rumah tersebut berlantai satu yang diikat dengan tali-tali rotan, atapnya terdiri dari *ola* atau *gamutu*. Rumah-rumah umum dindingnya rotan dan lantainya tanah.[148] Akan tetapi, setelah perang selesai antara orang Portugis dan orang Ternate, di mana tercapai perdamaian sekitar tahun 1537, mulai dibangun kota. Rumah-rumahnya dibuat lebih baik, masjid dan tembok kota dibuat dari tanah liat: tanah-tanah di sekitar kota dijadikan tanah untuk pertanian.[149]

Demikianlah lapisan golongan elite yang jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan golongan penduduk nonelite. Namun, tetap ada hubungan antara satu dengan lainnya dan juga hubungan dengan raja, keluarga raja, dan bangsawan ini adalah hubungan kepentingan masing-masing di bidang sosial, ekonomi, dan politik bahkan kepentingan keagamaan. Meskipun demikian, hubungan itu mempunyai batas tertentu dan agak kaku, disebabkan adat kebiasaan, ikatan darah, dan lain-lain. Akan tetapi, hubungan dengan golongan rakyat kebanyakan atau golongan nonelite, benar-benar menunjukkan perbedaan yang kaku dan terbatas, karena corak kehidupan sosial ekonomi serta adat kebiasaan lainnya merupakan pemisah antara kedua lapisan penduduk itu.

c. Golongan Nonelite

Apabila golongan elite merupakan lapisan masyarakat kota yang jumlahnya kecil dan terbatas, sebaliknya golongan orang kebanyakan yang kita sebut nonelite merupakan lapisan masyarakat yang besar jumlahnya. Golongan yang termasuk nonelite atau rakyat kebanyakan dalam masyarakat kerajaan di Jawa disebut *wong cilik*.[150] Mereka terdiri dari golongan pedagang atau *wong dagang* yang di Maluku disebut *cetti*; golongan petani atau *wong tani*, di Maluku disebut *alifuru*; pekerja-pekerja ahli atau tukang, nelayan yang di Maluku disebut tukang cari ikan.[151] Kecuali itu, orang-orang yang juga termasuk golongan nonelite adalah pejabat-pejabat birokrasi tingkat bawah, golongan keagamaan yang hanya melayani orang-orang biasa, anggota-anggota tentara, artis-artis, dan golongan lain yang termasuk lapisan masyarakat bawah.

147 A.K. Dasgupta, *op. cit.*, hlm. 82
148 Hubert Th. Th. M. Jacobs, S.J. *op. cit.*, hlm. 107
149 *Ibid.*, hlm. 187–1299
150 A. Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 32
151 Hubert Th. Th. M. Jacobs S.J., *op. cit.*, hlm. 103

Kebiasaan golongan elite bertempat tinggal di dalam kota-kota bukan hanya untuk mendapat perlindungan terhadap keamanan mereka, tetapi juga dapat mengadakan hubungan pribadi antarmereka, dan juga memperoleh keuntungan dari golongan pedagang, pelayan-pelayan, tukang-tukang, ahli-ahli astrologi, ahli-ahli musik, dan dari golongan lain yang masing-masing memberikan pelayanan.[152] Jelas bahwa tanpa rakyat kebanyakan atau nonelite, orang-orang golongan elite dan golongan yang termasuk lapisan masyarakat tersebut tidak akan dapat mempertahankan status sosial, ekonomi, dan politik.

Sesuai dengan letak pusat-pusat kerajaan pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam yang terjadi pada umumnya di sepanjang pesisir, kebanyakan penduduk kota termasuk golongan pedagang. Di Banten, Aceh, Gowa-Makassar, Banjarmasin, Ternate, dan di kota-kota pelabuhan lainnya banyak pedagang yang datang berkunjung, baik untuk sementara maupun untuk waktu yang lebih lama. Seperti telah dikatakan, di kota-kota tersebut biasanya mereka mempunyai perkampungan tersendiri. Bagi pedagang asing yang ingin menetap, harus memperoleh izin dari penguasa kerajaan terlebih dahulu.

Golongan pedagang yang tinggal di Banten antara lain orang-orang Melayu, Benggala, Gujarat, dan Abesinia, mereka bertempat tinggal di sepanjang pantai. Pedagang-pedagang Cina juga mempunyai perkampungan sendiri yang terletak di sebelah barat, digabungkan dengan orang-orang Portugis. Kelompok rumah orang-orang Belanda terpisah, berpagar kuat menghadap daratan dan rawa-rawa.[153] Kecuali pedagang-pedagang asing tersebut, masih terdapat pula pedagang-pedagang Arab, Pegu, Turki, dan Parsi.[154] Juga berdatangan para pedagang dari berbagai daerah di Indonesia, seperti dari Maluku, Ambon, Banda Selor, Makassar, dan Sumbawa. Di Jawa antara lain dari Jaratan, Gresik, Pati, dan Juwana. Demikian pula halnya pedagang-pedagang dari daerah Sumatra dan Kalimantan.[155]

Menurut berita orang Belanda (1596) pedagang-pedagang Gujarat yang datang dan akan tinggal di Banten membeli perempuan-perempuan untuk melayani mereka siang dan malam. Akan tetapi, apabila mereka akan kembali ke negerinya, perempuan-perempuan itu dijual lagi. Apabila mereka mempunyai anak, anak-anak itu mereka bawa dan istri-istri bebas tinggal di rumah masing-masing.[156] Pedagang Cina yang menetap di Banten menampung hasil lada dari pedalaman yang dijual oleh para petani.[157] Agaknya pedagang Cina di kota Aceh pun merupakan golongan mayoritas

---

152 Gideon Sjoberg, *op. cit.*, hlm. 115
153 G.P. Rouffaer, J.W. Ijzerman, *op. cit.*, hlm. 108
154 *Ibid.*, hlm. 120–121, gbr. 17
155 *Ibid.*, hlm. 108, 119
156 *Ibid.*, hlm. 121
157 *Ibid.*, hlm. 122

di antara pedagang-pedagang asing lainnya. Mereka mempunyai perkampungan di bagian kota besar Aceh, yaitu di sebelah utara, dekat laut. Pedagang-pedagang asing lainnya yang datang di Aceh berasal dari Konstantinopel, Venisia, daerah-daerah sekitar Laut Merah dan Arab, Gujarat, Dabul, Malabar, Koromandel, Bengal, Arakan, dan Pegu. Pedagang-pedagang lainnya berasal dari Malaya, Siam, Kalimantan, Makassar, Jawa, dan beberapa tempat di Sumatra. Pada abad ke-16 datang orang-orang Portugis, abad ke-17 orang-orang Inggris dan Belanda, selanjutnya orang-orang Prancis dan Denmark. Pedagang-pedagang dari benua Asia berdiam di perkampungan-perkampungan kecil, sendiri-sendiri, yang terdapat sepanjang sungai.[158] Kedatangan golongan pedagang, baik untuk tinggal sementara maupun lebih lama di bagian pusat kota kerajaan, sangatlah diharapkan oleh para raja, karena hal itu berarti masuknya penghasilan, baik untuk raja maupun golongan elite.

Baik perdagangan antardaerah kerajaan di Indonesia maupun dengan negeri-negeri luar lain tidak terlepas dari peraturan wajib membayar bea cukai, terutama apabila perdagangan merupakan monopoli kerajaan.[159] Pelaksanaan pungutan bea cukai tersebut dilakukan oleh pejabat yang diangkat seperti syahbandar dan pejabat-pejabat di bawahnya.

Di Aceh, beberapa piagam yang dikeluarkan oleh raja memuat peraturan tentang pelabuhan, pembagian hasil pungutan cukai untuk pejabat-pejabat tertentu, tarif cukai barang yang diekspor dan diimpor.[160] Di antara kerajaan-kerajaan di Indonesia masalah peraturan bea cukai barang-barang ekspor atau impor tidak lama. Faktor ketidaksamaan jumlah pungutan bea cukai antara satu kerajaan dengan kerajaan lain dapat menimbulkan pengalihan perhatian para pedagang asing untuk lebih banyak mendatangi kota pusat kerajaan dan kota pelabuhan yang bea cukainya lebih rendah. Akan tetapi, perpindahan perhatian para pedagang asing tersebut juga dapat disebabkan oleh faktor politik, misalnya daerah setempat tidak menyukai pedagang-pedagang dari negeri-negeri tertentu. Sebagai contoh, pedagang-pedagang Kompeni Belanda dari Banten memindahkan perhatiannya ke Jakarta karena kota ini lebih suka menerima kedatangan Kompeni Belanda, bahkan sampai diadakan perjanjian perdagangan dengan Pangeran Jakarta Wijayakrama dan pembangunan loji.[161]

Prinsip perdagangan adalah keuntungan, karena itu mereka anggap penting untuk mengusahakan mendapatkan perlindungan dari golongan penguasa dan golongan elite. Akan tetapi, bagi golongan elite politik

---

158 A.K. Dasgupta, *op. cit.*, hlm. 82–83

159 J.C. van Leur, *op. cit.*, hlm. 133–134

160 A.K. Dasgupta, *op. cit.*, hlm. 97; G.W.J. Drewes, "Atjehse Douanetarieven in het Begin van de Vorige Eeuw", *BKI*, 119, 1963, hlm. 406–411

161 J.W. Ijzerman, *op. cit.*, hlm. 574

misalnya, mereka tidak selalu puas dengan apa yang mereka peroleh dari para pedagang melalui cukai. Golongan elite politik kadang-kadang mengawasi hak para pedagang. Ada di antara penguasa meminjam harta milik pedagang dan menolak membayar kembali. Kadang-kadang dengan cara menjaminkan anak laki-laki bangsawan kepada anak-anak perempuan pedagang. Pedagang-pedagang yang kaya juga dapat menyisihkan kekayaannya untuk diberikan kepada raja dan bangsawan sebagai penukaran untuk gelar bangsawan.[162]

Pedagang-pedagang asing pada umumnya lebih sukar untuk melaksanakan perdagangan ke luar kota atau ke pedalaman, dan kemungkinan besar pedagang-pedagang kecil pribumilah yang menjadi perantara. Mereka membawa barang-barang perdagangan dari desa-desa yang diperolehnya dari hasil produksi pertanian, terutama hasil produksi untuk ekspor. Sebaliknya barang-barang impor seperti pakaian yang diperlukan masyarakat perdesaan dapat dibawa pedagang-pedagang kecil tersebut dan menjualnya kepada petani-petani. Akan tetapi, boleh jadi petani sendiri datang ke kota untuk menjual hasilnya, antara lain, petani-petani penjual lada di kota Banten sebagaimana diceritakan oleh Willem Lodewycksz pada masa-masa Cornelis de Houtman di kota ini.[163] Lada atau merica hasil pembelian dari kota dan daerah-daerah sekitarnya itu oleh pedagang-pedagang besar dikumpulkan dalam gudang-gudang,[164] sementara menunggu saatnya diekspor. Di antara pedagang-pedagang lada ini terdapat kaum perempuan. Menarik perhatian bahwa ada di antara pedagang-pedagang Cina yang mendatangi daerah pedalaman kota Banten, langsung membeli lada dari petani.

Di kota pusat kerajaan Aceh juga terdapat pasar-pasar untuk menjual hasil bumi dari daerah sekitarnya, seperti beras, buah-buahan, sayur-mayur, barang-barang, dan ikan. Demikian pula terdapat pedagang-pedagang yang biasanya menyuruh budak-budaknya untuk membeli beras di pasar.[165] Di kota pelabuhan, lada dijual oleh sultan melalui pegawai-pegawainya seperti syahbandar, laksamana, dan orang kaya. Pedagang-pedagang asing seperti dari Gujarat dan rakyat juga turut serta dalam perdagangan di bawah pengawasan orang-orang yang lebih berkuasa.[166]

Peran para pedagang Indonesia sangat penting, terutama dalam arus timbal balik hasil-hasil produksi daerah masing-masing. Hal itu memungkinkan adanya mobilitas horizontal di kalangan pedagang, karena perpindahan dari satu kota ke kota lain untuk mencari keuntungan.

---

162 Gerhard E. Lenski, *op. cit.*, hlm. 252–253
163 G.Y. Rouffaer, J.W. Ijzerman, *op. cit.*, hlm. 110
164 *Ibid.*, hlm. 122, gbr. 19
165 A.K. Dasgupta, *op. cit.*, hlm. 84
166 *Ibid.*, hlm. 103

Contohnya, banyak pedagang Jawa tinggal di Malaka, pedagang Jawa tinggal di kota-kota pelabuhan antara lain di kepulauan Ternate, Hitu, dan Banda. Pedagang-pedagang Makassar tinggal di Banten. Pedagang-pedagang Melayu tinggal di Makassar dan Banten. Pedagang-pedagang Jawa, Melayu, Makassar, dan Sumatra ada yang tinggal di Banjarmasin. Faktor perhubungan perdagangan antardaerah tersebut juga menyebabkan bukan hanya pertukaran hasil produksi antardaerah, melainkan juga pertukaran unsur-unsur budaya antardaerah di Indonesia. Hal tersebut antara lain mengenai penggunaan bahasa Melayu sebagai *lingua franca* (bahasa komunikasi) yang justru diperkenalkan di kota-kota pusat kerajaan maritim dan kota-kota pelabuhan pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam. Melalui bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia itulah dasar kesatuan kultural diletakkan di antara suku-suku bangsa di daerah-daerah Nusantara.

Beberapa hikayat, meskipun dari abad-abad kemudian, seperti *Sejarah Melayu*, *Hikayat Hitu*, *Hikayat Kutai*, dan *Hikayat Banjar*, menggunakan bahasa Melayu.[167] Di daerah Jakarta pada awal abad ke-17 Pangeran Jakarta Wijayakrama, ketika berhadapan dengan van den Broek, menggunakan bahasa Melayu.[168] Jelaslah bahwa golongan pedagang, baik asing maupun pribumi, bukan hanya membawa perubahan-perubahan dalam segi budaya dan kerohanian. Pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam, kota-kota pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat kerajaan maritim jelas mengalami perubahan sosio-kultural, antara lain disebabkan adanya lalu lintas perhubungan dan perdagangan. Agama Islam tersebar ke kota-kota kerajaan maritim antara lain melalui perdagangan.

Golongan petani rupa-rupanya tidak banyak yang bertempat tinggal di kota pusat kerajaan maritim dan kota-kota pelabuhan. Di atas telah dikatakan bahwa di Banten ada beberapa petani perempuan maupun laki-laki yang menjual lada di pasar. Kecuali itu, di dalam *Sadjarah Banten* terdapat pula cerita bagaimana sultan memerintahkan *ponggawa-ponggawa* di Surosowan mengadakan pemeriksaan sawah-sawah (*serangan*) yang tidak jauh dari kota.[169]

Di Banten, di luar puing-puing bekas keraton dapat dilihat banyak persawahan wakaf, terutama sekitar Tasikkardi. Pemilik-pemiliknya mungkin keluarga sultan atau golongan bangsawan, meskipun yang mengerjakan petani-petani yang tinggal di sekitar kota itu.

---

167 J.W. Ijzerman, *op. cit.*, hlm. 613–614

168 J.C. van Leur, *op. cit.*, hlm. 110—116; B. Schrieke, *op. cit.*, hlm. 36; M.A.P. Meilink Roelofsz, "Trade and Islam in the Malay-Indonesia Archipelago Prior to the Arrival of the Europeans", *Islam and the Trade of Asia*: A Colloquium, Editor D.S. Richard, University of Pennsylvania Press, 1970

169 Hoesein Djajadiningrat, *op. cit.*, hlm. 55

Di kota Aceh, menurut berita asing, Sultan Iskandar Muda mempunyai banyak sawah di sekitar kota yang dikerjakan oleh petani. Sebagaimana hasil panen yang diterima dari petani-petani disimpan dalam gudang. Kemudian jika harga beras naik, dijualnya ke pasaran.[170] Beberapa keluarga raja dan golongan elite lainnya mempunyai sawah dan perkebunan lada.[171]

Di kerajaan Gowa, daerah sekitarnya memungkinkan adanya pertanian, tidak mustahil bahwa pemiliknya terdiri dari beberapa orang dari golongan masyarakat lapisan atas yang tinggal dalam kota dan hanya menerima bagian hasil panennya. Hasil bagian yang dibawa ke kota dipergunakan untuk keperluan hidup keluarga mereka dan terutama untuk dijual ke pasar. Pada abad-abad ke-16–17 Gowa–Makassar dikenal sebagai salah satu daerah penghasil dan pengekspor beras.

Di Maluku, golongan *alifuru* atau petani setelah memetik hasil cengkih pada musim-musim panen, yang sekurang-kurangnya terjadi tiga kali per tahun, mengunjungi kota-kota pelabuhan untuk menjual cengkih kepada para pedagang yang berdatangan dari berbagai daerah Indonesia dan dari negeri luar. Bahkan raja atau *kolano* dan keluarganya, *sangaji-sangaji* dan lapisan masyarakat elite lainnya turut berdagang serta menentukan harga rempah-rempah petani.[172] Golongan raja dan bangsawan serta elite jelas bukan hanya dapat mengambil bagian dari hasil saja melainkan juga dapat memungut cukai yang telah ditentukan oleh peraturan. Bahkan beberapa di antara golongan masyarakat atas turut pula dalam kegiatan perdagangan hasil pertanian. Kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya merupakan lanjutan kebiasaan-kebiasaan pada masyarakat kerajaan tradisional sebelum zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia. Bagaimanapun petani-petani yang dapat digolongkan sebagai masyarakat lapisan bawah atau nonelite, merupakan tulang punggung golongan masyarakat lapisan atas atau elite, karena surplus pertanian jatuh kepada golongan masyarakat lapisan atas juga.

Kota-kota pesisir, yang merupakan kota-kota kerajaan dan pelabuhan, adalah tempat-tempat yang sesuai untuk kehidupan nelayan atau pencari ikan. Golongan nelayan ini juga besar artinya bagi kehidupan perekonomian kota-kota tempat mereka menjual hasilnya kepada masyarakat kota, terutama kepada orang-orang lapisan atas yang biasanya memerlukan bahan makanan yang lebih sempurna daripada rakyat kebanyakan. Di Aceh, oleh John Davis diceritakan bahwa pekerjaan mencari ikan merupakan industri yang berkembang dan sebagian besar masyarakat di sana mengerjakan hal itu.[173]

---

170 A.K. Dasgupta, *op. cit.*, hlm. 88
171 *Ibid.*, hlm. 102
172 Hubert Th. Th. M. Jacobs, S.1., *op. cit.*, hlm. 137
173 A.K. Dasgupta, *op. cit.*, hlm. 82

Di daerah Maluku, sebagaimana diceritakan Antonio Galvao, terdapat pula pencari ikan.[174] Hal yang sama terdapat di Jakarta, ketika untuk pertama kali tahun 1596, orang-orang Belanda menceritakan adanya banyak pencari ikan dan daerah tersebut kaya akan ikan. Pada masa selanjutnya, terdapat pasar ikan di sebelah utara kota Jakarta, membuktikan bahwa banyak ikan yang dijual. Tempat-tempat kaum nelayan biasanya di tepi-tepi pantai dan dengan rumah yang kurang begitu sehat kelihatannya. Karena itu, di keluarga nelayan mudah dihinggapi penyakit menular yang dapat menular lagi ke kelompok perumahan penduduk lainnya di kota.[175]

Di antara nelayan tentu saja ada yang tidak memiliki peralatan sendiri, seperti perahu, apalagi perahu nelayan besar dengan kapasitas muatan banyak untuk berlayar serta menampung banyak pekerja-nelayan. Dengan demikian, para pekerja nelayan ini terpaksa harus menyewa alat-alat itu atau mereka hanya berfungsi sebagai pelaksana, karena semua modal milik orang-orang lapisan atas atau elite dan mungkin juga dari keluarga bangsawan. Dengan demikian, para nelayan tersebut hidupnya bergantung dari masyarakat lapisan atas. Kalaupun mereka mempunyai alat-alat penangkap ikan sendiri dan hendak menjual hasilnya ke pasar-pasar, mereka sering kali harus melakukannya melalui tengkulak-tengkulak yang juga dari golongan masyarakat pemilik modal. Demikianlah kehidupan ekonomi nelayan, mereka pada umumnya masih tetap di lapisan bawah. Mobilitas sosial vertikal kurang dan mobilitas hanya mungkin terbatas pada mobilitas horizontal, karena mereka dapat berpindah tempat sesuai dengan ekologi lautan atau pantai yang banyak memberi hasil bagi pekerjaan itu.

Golongan tukang atau mungkin lebih tepat disebut golongan pekerja, juga terdapat dalam kota-kota terutama kota-kota pusat kerajaannya. Mereka antara lain: tukang gerabah; tukang-tukang yang pekerjaannya berhubungan dengan kayu seperti tukang ukir dan pahat; tukang-tukang pembuat perkakas dan perhiasan dari bahan-bahan logam seperti pandai emas dan pandai besi. Tempat tinggal atau perkampungan mereka biasanya juga tersendiri.

Nama-nama bagian kota terutama di pusat kerajaan adalah *Panjunan, Kapandean,* atau *Kampung Pande, Pengukiran,* dan *Pagongan,* yang mengingatkan kita pada tempat-tempat golongan tukang-tukang atau pekarya itu. Nama tempat tradisional Panjunan kita ketahui di kota Cirebon yang mengingatkan kita kepada tempat tukang-tukang *anjun* (gerabah, periuk belanga).[176] Demikian pula pengukiran mengingatkan kita kepada tempat

174 Hubert Th. Th. M. Jacobs, S.J., *op. cit.*, hlm. 103, di mana Antonio Galvao menyebutkan orang-orang cari ikan

175 F. De Haan, *Oud Batavia*, Bandoeng, 1935, hlm. 282

176 Dalam babad Cirebon, *Purwaka Caruban Nagari* dan *Sadjarah Banten*, Maulana Abdulrahman Bagdad semasa dengan Syarif Hidayatullah, mendapat julukan Sunan Panjunan

golongan tukang ukir. Kampung Kapandean ditemukan pula di bekas kota Banten Lama, sedang kampung Pande terdapat di bekas kota Banda Aceh. Kampung-kampung tersebut mengingatkan kita kepada tempat golongan tukang membuat perkakas dari besi, perunggu, dan bahan-bahan logam lainnya. *Pagongan* adalah tempat yang mengingatkan kita kepada tempat tukang-tukang pembuat gong atau juga kepada tempat menabuh gamelan. Biasanya gamelan dipergunakan dan dibunyikan pada waktu perayaan Maulud, misalnya gamelan yang disebut *Sekaten*. Kadang-kadang kehidupan golongan tukang-tukang tidak terlepas dari kepentingan golongan masyarakat elite atau lapisan atas. Bahkan di lingkungan keraton terdapat golongan tukang-tukang ahli yang sengaja dipelihara untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan permintaan pihak raja dan keluarganya. Sedang tukang-tukang di luar keraton untuk kepentingan kaum bangsawan serta kaum elite lainnya.

Menurut berita asing, di lingkungan istana Aceh terdapat sejumlah besar golongan tukang, termasuk 300 orang tukang emas yang bekerja untuk istana.[177] Dalam *Sejarah Banten* dan *Babad Cirebon* diceritakan bahwa setelah Majapahit dikalahkan oleh orang-orang muslim dari Demak, atas permintaan Sunan Gunung Jati, raja Demak mengirim tawanan tukang-tukang dari Majapahit di bawah pimpinan Raden Sepat (Sepet) ke Cirebon untuk membuat bangunan makam wali yang pertama di sana, yakni Pangeran Panjunan.[178] Dalam *Babad Cirebon* dan *Purwaka Caruban Nagari* juga diceritakan Raden Sepat datang ke Cirebon untuk membuat bangunan keraton.[179] Dalam cerita hikayat-hikayat lainnya disebutkan untuk pembangunan keraton juga, misalnya dalam *Hikayat Banjar* diceritakan ketika membangun istana (pra-Islam) di Nagara Dipa, terdapat tukang pemahat patung dari kayu, tukang membuat berhala kayu cendana. Tukang orang asing dari Cina yang disebut *pandai berhala*, didatangkan pula untuk membuat patung dari perunggu sebagai ganti patung kayu.[180]

Dalam *Hikayat Kutai* juga terdapat cerita tentang pembangunan masjid oleh segala tukang dipimpin Mangun di Pura, dan tukang ukir yang mahir sehingga ukirannya "halus bagaikan rambut" dan yang diukir dalam masjid ialah puji-pujian (mungkin dalam kaligrafi). Pembangunan masjid tersebut di pusat kota kerajaan Kutai pada masa pemerintahan Raja Ma'kota, abad ke-16, ketika pelopor Islam Tuan Tunggang di Parangan, teman Tuan di Bandang mengislamkan daerah itu.[181]

---

177 J.C.M. Warnsinck, *op. cit.*, hlm. 213
178 R. Hoesein Djajadiningrat, *op. cit.*, hlm. 33,
179 J.L.A. Brandes, D.A. Rinkes, *op. cit.*, hlm. 112; *Purwaka Caruban Nagari*, (MS), 1720, hlm. 78–79, alinea 232–233
180 J.J. Ras, *op. cit.*, hlm. 238–240, 254–262
181 C.A. Mees, *op. cit.*, hlm. 3, 4, 5, teks (Bijlage XI), 287–296

Dari *Angger gladag*, suatu kitab mengenai peraturan pekerjaan bagi *gladag, kalang*, dan *gowong*, mungkin atas perintah Sultan Agung Mataram, dikumpulkan dan dibawa dari hutan-hutan tempat mereka berkeliaran, ke kota Mataram untuk dijadikan abdi-abdi Sultan dan diberi tugas khusus sebagai tukang-tukang perkayuan. Karena mereka dianggap banyak pengalaman di bidang pengetahuan perkayuan, mereka layak dijadikan tukang-tukang pembuat segala macam bangunan yang dibuat dari kayu.[182]

Di Jakarta, tukang-tukang batu dan pembuat perkakas rumah tangga dari kayu pada masa pemerintahan Kompeni Belanda, terdiri dari berbagai bangsa: Belanda, Cina, dan orang-orang Indonesia sendiri. Mereka membuat antara lain perkakas seperti meja dan kursi, bangunan rumah-rumah dengan gaya campuran sehingga terlihat unsur Eropa (Barat) dan unsur Timur. Karena itu, tidak mengherankan apabila di Jakarta sejak abad ke-17 terdapat bangunan-bangunan gaya campuran unsur Eropa-Indonesia.[183] Di Banten, ketika seorang arsitek Belanda bernama Lucas Cardeel menjadi abdi sultan Banten dan berganti nama Pangeran Wiraguna, unsur bangunan Barat masuk. Hal itu terlihat pada rumah bangunan di samping Masjid Agung, menara, benteng Speelwijk, dan pada beberapa bangunan keraton.[184]

Melalui beberapa tukang ahli orang-orang asing itu, masuklah pengaruh gaya bangunan dan benda-benda lain yang bercorak Eropa ke dalam budaya Indonesia, meskipun semula terbatas pada kota Jakarta saja sejak abad ke-17. Meskipun demikian, budaya Indonesia menurut selera kerajaan masing-masing tetap menjadi dasar perkembangannya. Bahkan sekalipun orang-orang sudah memeluk agama Islam, tampak jelas bahwa unsur bangunan, ukiran, dan hiasan dasarnya mencerminkan budaya pra-Islam, seperti terlihat antara lain pada masjid dan keraton.

Dari uraian di atas, tidak dapat dipungkiri adanya peran golongan tukang dan artis-artis yang hidup di kota-kota pusat kerajaan atau kota-kota di luarnya. Meskipun demikian, golongan tukang-tukang ini yang termasuk nonelite mungkin tidak mudah mencapai mobilitas vertikalnya, hal ini bahkan mungkin menunjukkan kekakuan mobilitas vertikal. Mobilitas horizontal jelas ada karena diketahui bahwa golongan tukang-tukang ini berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, misalnya Raden Sepat dengan tukang-tukang dari Majapahit ke Demak lalu ke Cirebon. Orang-orang *kalang* dan *gowong* dari tempat asalnya di hutan-hutan ke kota Mataram. Orang-orang Cina yang diberitakan datang ke Aceh, membawa tukang-tukang antara lain tukang cat dan tukang ukir menimbulkan gerakan sosial atau mobilitas mendatar. Demikian pula

182 Soeripto, *op. cit.*, hlm. 3–5, teks (Bijlage XI), 287–296
183 F. De Haan, *op. cit.*, hlm. 203
184 V.J. van de Wall, J.A. van der Chijs, suppra catatan 59 dan 60

Kompeni Belanda sejak Jan Pieterszoon Coen di Batavia juga mendatangkan beberapa tukang batu dari negerinya.

Raja-raja dan golongan elite jelas memerlukan golongan tukang-tukang untuk membuat rumah-rumah mereka lebih indah untuk membedakannya dengan rumah-rumah golongan nonelite. Bagi raja dan keluarganya tukang-tukang yang termasuk pandai besi sangat diperlukan karena dapat dipergunakan dalam menambah jumlah persenjataan yang penting bagi pertahanan suatu kerajaan. Lebih-lebih setelah orang-orang Indonesia sendiri mengenal cara membuat meriam-meriam dan senjata-senjata api lainnya, fungsi pandai besi makin penting. Dari beberapa berita asing kita ketahui bahwa di samping ahli-ahli besi pribumi, juga terdapat sejumlah ahli asing dari Turki yang membuat meriam-meriam, seperti di Aceh sebagai bantuan kerajaan tersebut kepada pemerintahan Aceh abad ke-17.[185] Peran pembuat senjata besi dalam hubungannya dengan lingkungan raja-raja dan keluarganya serta golongan masyarakat lapisan atas secara tradisional telah ada sejak zaman Indonesia–Hindu. Empu-empu terkenal, seperti Empu Gandring, Empu Supa adalah pembuat keris untuk raja-raja.

Di kota-kota berdiam pula para seniman di bidang seni tari, seni drama, dan pemukul gamelan yang turut meramaikan upacara-upacara kerajaan. Golongan ini termasuk nonelite, dan di antara golongan itu ada pula yang hidup di lingkungan istana. Golongan ini ada hubungannya dengan raja, golongan bangsawan, dan golongan elite lainnya, terutama dalam meramaikan upacara-upacara perayaan. Mengenai macam upacara akan diuraikan secara khusus pada bagian lain.

Golongan yang termasuk nonelite lainnya adalah tentara bawahan, orang-orang keagamaan (kauman), dan pejabat-pejabat pemerintahan dari golongan bawahan. Apabila di dalam kota-kota pusat kerajaan terdapat *senapati* sebagai panglima angkatan darat dan laksamana sebagai panglima angkatan laut yang termasuk kepala golongan elite birokrat atau khususnya elite tentara, dengan sendirinya terdapat pula sejumlah tentara dan pimpinan golongan bawahan yang pada umumnya dapat dimasukkan dalam golongan nonelite.

Berdasarkan sumber-sumber asing ataupun babad, hikayat, dan cerita tradisional, kerajaan-kerajaan di Indonesia dalam waktu perang biasanya menghimpun sejumlah besar tentara, sedang dalam waktu-waktu biasa jumlahnya tidak begitu banyak. Mereka yang termasuk dalam fungsi tentara yang tetap jumlahnya tidak banyak dan mungkin mereka merupakan tentara

---

185 K.C. Crucq, "Beschrijving der Kanonnen afkomstig uit Atjeh, thans in het Koninklijk Kolonial Militair Invalidenhuis," *TBG*, Jilid LXXXI, 1941, hlm. 545–552

inti atau tentara pengawal kerajaan, prajurit tamtama. Dalam *Babad Tanah Jawi*, Jaka Tingkir dan senapati disebut sebagai lurah prajurit tamtama.[186] Dalam keadaan aman, tugas prajurit-prajurit tersebut hanyalah mengawal raja dan menjaga keamanan kota, terutama keraton.

Di Aceh pada zaman Iskandar Muda dalam istananya terdapat prajurit-prajurit penjaga keamanan siang-malam yang dipimpin oleh empat orang perwira yang disebut *penghulu kawalo*, semuanya di bawah perintah laksamana. Tiap-tiap *penghulu kawalo* bertempat di dalam kampung-kampung tersendiri di sekitar istana. Setiap malam dilakukan ronda keliling kota hingga ke pantai laut oleh 200 prajurit penunggang kuda. Setiap pintu keraton dijaga oleh lebih kurang 150 orang yang berasal dari budak-budak yang umumnya orang-orang asing. Mereka dilatih dalam keprajuritan. Halaman-halaman keraton dijaga oleh lebih kurang 500 orang kebiri.[187]

Di kota pusat kerajaan terdapat prajurit-prajurit, memegang bedil, pedang, dan tombak serta perisai sebagaimana digambarkan dalam buku Willem Lodewycksz (abad ke-16). Di antaranya ada juga yang memakai baju-rante dari besi. Oleh Lodewycksz diceritakan bahwa prajurit-prajurit kerajaan-kerajaan di Jawa tidak mendapat pakaian, senjata, dan ongkos untuk membeli beras dan pakaian.[188] Kebanyakan dari mereka berada di bawah kekuasaan kaum bangsawan atau para pedagang kaya yang memerintahkan untuk berangkat perang atau tidak, sesuai dengan keinginan mereka. Prajurit-prajurit itu sangat baik untuk ekspedisi yang mendadak, dan dapat berhasil baik.[189] Prajurit-prajurit yang terbatas jumlahnya dan lebih merupakan prajurit bayaran, terdapat di pelbagai kota terutama di kota pusat kerajaan di Indonesia.

Dalam perang, raja dapat memobilisasi sejumlah besar rakyat dari berbagai daerah sehingga tidak mengherankan apabila jumlah prajurit dalam waktu singkat dapat dikumpulkan sampai puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Contohnya adalah, menurut berita Residen W. Caeff, dalam suratnya ke pusat pemerintahannya di Batavia tanggal 14 Januari 1673, diceritakan bahwa raja Banten menawarkan kepada setiap orang akan memberikan satu real yang sanggup memegang bedil. Kesatuan tentara yang terkumpulkan dan bersenjata berjumlah lebih dari 55.000 orang.[190] Demikian pula Iskandar Muda di Aceh dalam waktu singkat dapat memobilisasi 40.000 tentara untuk perang. Contoh lain adalah dari kutipan *Hikayat Banjar*:

---

186 B. Schrieke, *op. cit.*, hlm. 128
187 A.K. Dasgupta, *op. cit.*, hlm. 86–88
188 G.Y. Rouffaer, J.W. Ijzerman S, *op. cit.*, hlm. 118, gambar 15
189 *Ibid.*, hlm. 117; B. Schrieke, *op. cit.*, hlm. 128
190 B. Schrieke, *Ibid.*, hlm. 129

> Hatta–banyak tiada tersebut–jadi segala sikap orang desa segala siap serta desa itu datang, yang banyak hampir-hampir itu, dengan senjatanya. Sudah itu Pangeran Tumanggung hilir lawan bala tentaranya itu serta senjatanya, dengan gamalannya serta perhiasannya. Sudah itu datang ke Muara Bahan maka dilihat oleh orang balangkang itu perahu hilir seperti hayam baranakan, sarta lanting kotamara ampat lima buah, orangnya beribu-ribu.[191]

Jelas bahwa dalam menghadapi perang raja dapat mengumpulkan sejumlah besar tentara yang ia kehendaki. Di kerajaan di Jawa setiap bupati atau tumenggung menyediakan sejumlah tentara. Di Aceh menurut adat Aceh setiap *uleebalang* juga diharuskan menyerahkan sejumlah tentara untuk pusat kerajaan dalam menghadapi perang terhadap musuh kerajaan. Seperti telah dikatakan, golongan prajurit bayaran yang jumlahnya sedikit, hidupnya tergantung pada raja, golongan bangsawan, dan golongan elite. Dalam menghadapi perang, semua warga kerajaan yang sudah dewasa diharuskan menjadi tentara untuk mempertahankan kerajaan. Dalam perang senapati-senapati serta pemimpin pasukan mempunyai tanggung jawab besar. Kita ketahui dari berita asing maupun dari babad bagaimana pemimpin pasukan Mataram seperti Tumenggung Sura Agul-agul, Adipati Mandur Reja, dan Kyai Dipati Upa Santa, dihukum mati atas perintah Sultan Agung Mataram karena kegagalannya menyerang Jakarta pada tahun 1628. Sementara itu, Tumenggung Singaranu yang kembali setelah perang kedua kalinya tahun 1629, diturunkan dari jabatannya sebagai mangkubumi.[192] Mengenai teknik perang, persenjataan, dan lain-lain akan diuraikan tersendiri.

Golongan nonelite keagamaan, terdapat bukan hanya di kota-kota pusat kerajaan dan kota-kota pelabuhan, melainkan juga di desa-desa. Di kota-kota mereka yang termasuk golongan keagamaan, di Jawa biasanya kita sebut golongan *putihan*, biasanya tinggal di suatu tempat tertentu yang dinamakan *kauman*. Dari golongan nonelite keagamaan itulah adakalanya muncul seorang atau beberapa orang yang terkemuka. Bahkan ada di antaranya yang memangku suatu jabatan tinggi dalam pemerintahan kerajaan, sehingga karena kedudukan mereka dapat menjadi elite birokrat.

Di Aceh, alim ulama menjadi anggota pengadilan Manggore. Pengadilan kerajaan dipegang oleh seorang yang disebut *kali malikon ade* (*kadi malikul adil*) yang dibantu oleh empat orang *mufti* yang menetapkan hukum-hukum agama. Dalam perkara-perkara besar, anggota-anggotanya ditambah dengan para pembesar dan juga ulama-ulama terkemuka yang menjadi anggota Balai Gadeng.[193] Golongan nonelite keagamaan atau orang-orang biasa yang hidupnya terutama di bidang keagamaan bahkan mungkin pencaharian

---

191 J.J. Ras, *op. cit.*, hlm. 410, teks No. 3038–3044
192 H.J. de Graaf, *op. cit.*, hlm. 162–163
193 Zakaria Ahmad, *op. cit.*, hlm. 91–92; C. Snouck Hurgronje, DeAtjehers, 1, 1893, hlm. 101–104

juga dari itu, antara lain guru-guru agama yang disebut sebagai kiai-ulama (biasa) dan mantri. Mereka berpengaruh besar dalam kehidupan sosial, bahkan kadang-kadang mempunyai pengaruh di bidang politik, lebih-lebih kelak pada zaman kolonial sering kali terjadi aksi-aksi politik di bawah para kiai-kiai atau ulama-ulama ini untuk merongrong kewibawaan pemerintahan kolonial.

Golongan nonelite lainnya yang ada dalam masyarakat kota-kota pusat kerajaan, kota-kota pelabuhan, dan kota-kota di luar pusat kerajaan adalah golongan fungsionaris kerajaan tingkat bawahan (*priyayi cilik*). Di kota pusat kerajaan golongan nonelite birokrat itu pada umumnya mereka yang ada di bawah *mantri-mantri, tumenggung* atau *adipati-adipati*, dan *ponggawa-ponggawa*.

Pejabat birokrat tersebut dalam beberapa hal dapat pula mempunyai kesempatan untuk mobilitas vertikal sehingga menjadi elite birokrat, meskipun jarang sekali terjadi. Karena masyarakat kerajaan tradisional mobilitas vertikal dari lapisan bawah umumnya sangat kaku. Hal itu disebabkan pembatasan-pembatasan yang berhubungan dengan ada-tidaknya pertalian darah dan kekerabatan dengan golongan elite dan bangsawan, gaya kehidupan, dan lain-lainnya yang berbeda dari golongan elite.

d. Golongan Budak

Dalam uraian yang lalu telah kita singgung sedikit tentang budak-budak yang berdiam di rumah-rumah bangsawan atau elite birokrat, dan istana raja-raja, sebagai penjaga-penjaga, dan pesuruh. Orang-orang tersebut biasanya golongan di luar lapisan masyarakat bawah atau nonelite. Beberapa sarjana antara lain Gideon Sjoberg, memasukkan mereka pada golongan "outcast",[194] sedang G.E. Lenski memasukkannya pada "unclean class".[195] Mereka termasuk orang-orang yang melakukan pekerjaan berat, menjual tenaga badaniah, dan mengerjakan pekerjaan kasar. Golongan yang termasuk budak atau abdi, kawula, dan hamba tersebut, tidak hanya terdiri dari kaum laki-laki tetapi juga kaum perempuan.

Adanya golongan budak disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya, karena seseorang tidak dapat membayar utang sehingga anak atau kerabatnya diberikan sebagai pembayaran utang; karena menjadi tawanan perang dan perdagangan budak. Di Kotawaringin (Kalimantan) ada dua macam golongan budak yaitu orang berutang dan budak biasa yang diperoleh karena pembelian atau tawanan perang.[196] Masalah perbudakan tersebut mungkin

---

194 Gideon Sjoberg, *op. cit.*, hlm. 235

195 G.E. Lenski, *op. cit.*, hlm. 281

196 J.J. Ras, *op. cit.*, hlm. 622 diambil dari laporan Gaffron tahun 1853 yang dimuat oleh J. Pijnappel Gzn dalam *BKI*, hlm. 7, 1860

merupakan tradisi jauh sebelum pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia. Pada zaman Majapahit, yaitu sekitar abad ke-14, telah ada *bertya* yang berarti budak. Ketika duta dari Majapahit berkunjung ke negeri Cina, ia membawa budak sebagai persembahannya, di samping membawa mutiara dan lada. Pada tahun 1637 utusan dari Arakan juga mengirim sepuluh orang budak kepada Gubernur Jenderal Kompeni.[197] Di Jawa budak-budak dari Irian/Papua terdapat pada abad-abad ke-10 dan ke-16.[198]

Masalah perbudakan sebenarnya bukan hanya di Indonesia, melainkan juga meliputi berbagai negara di Asia, Eropa, dan Afrika. Di Arab sejak sebelum masa Islam ada perbudakan meskipun pada masa timbulnya Islam ada pembatasan mengenai hak-hak dan perlindungan terhadap budak-budak itu. Demikian pula di negeri-negeri Islam lainnya, seperti Mesir, Iran, dan Turki terdapat perdagangan budak. Meskipun demikian, perdagangan budak masih terus berlangsung, bahkan di Indonesia sampai akhir abad ke-19.[199]

Walaupun orang-orang yang termasuk golongan budak menempati kedudukan sosial yang paling rendah, mereka diperlukan oleh golongan raja, bangsawan, serta elite untuk melayani kepentingan-kepentingan mereka. Pembuatan keraton, bangunan-bangunan kota, pembuatan jalan, dan pekerjaan berat lain yang memerlukan fisik kuat biasanya menggunakan tenaga golongan budak.

Pada abad ke-16, seperti diceritakan Willem Lodewycksz, golongan pedagang besar, bangsawan-bangsawan di Banten mempunyai budak-budak untuk menjaga rumah. Mereka bertempat tinggal pula di rumah orang-orang yang dipertuannya.[200] Diceritakan pula bahwa apabila hari puasa yang lamanya 40 hari (Ramadan) berakhir, budak-budak juga bersama-sama dengan majikan dan seluruh keluarganya, makan-makan di atas tanah; mereka mencontoh atasannya itu. Peristiwa itu terjadi pada setiap tahun pada hari kelima bulan Agustus. Diceritakan bahwa pada saat itu pula dilangsungkan perkawinan di antara mereka dan kadang-kadang juga dengan bukan budak.[201]

Pada waktu orang-orang Belanda berlayar menuju Banten (1596) mereka melihat jung (kapal) yang menyerupai kapal mereka sendiri, kecuali mempunyai emperan belakang tempat budak-budak dan pendayung-pendayung duduk dan tertutup kuat; di atas mereka, di dek, ditempati tentara-tentara agar mereka berperang lebih baik dan bebas.[202] Mungkin budak-budak itu adalah tawanan.

---

197 J.C. van Leur, *op. cit.*, hlm. 192
198 *Ibid.*, hlm. 355 catatan 64
199 Reuben Levy, *op. cit.*, hlm. 73–88
200 G.P. Rouffaer, J.W. Ijzerman, *op. cit.*, hlm. 108
201 *Ibid.*, hlm. 114–115
202 *Ibid.*, hlm. 130; B. Schrieke, *op. cit.*, Part I, hlm. 23

Di kota pusat kerajaan Aceh pada abad ke-17, pintu gerbang ke istana dijaga oleh lebih kurang 150 orang budak, dikatakan bahwa mereka pada umumnya berasal dari orang-orang asing. Budak-budak yang diambil ketika masih muda, dilatih serta dipergunakan untuk tentara. Mereka harus taat kepada peraturan istana dan tidak dibolehkan bercakap-cakap satu dengan lainnya. Penjaga-penjaga bagian-bagian lainnya di keraton terdiri dari lebih kurang 500 orang kebiri, dan di bagian dalam keraton terdapat 3.000 orang perempuan, kebanyakan di antara mereka merupakan penjaga di bawah beberapa orang perwira. Demikian pula orang kaya atau kaum bangsawan mempunyai budak-budak.[203] Bahkan Dampier menceritakan bahwa orang-orang bangsawan dan pedagang-pedagang besar sering menyuruh budak-budaknya pergi ke pasar untuk belanja beras. Orang-orang yang tidak begitu kaya dan tidak mempunyai budak dapat menyewa budak-budak untuk membawa berasnya dari pasar, dan untuk mengambil uang dari penukar-penukar uang.[204]

Menurut C. Snouck Hurgronje, di antara budak-budak di Aceh, terutama berasal dari Nias. Dalam cerita di Aceh, asal usul mereka dianggap turunan anjing seperti halnya cerita orang kalang di Jawa.[205] Lambat laun di antara budak-budak dari Nias itu ada yang melakukan perkawinan dengan budak-budak yang berasal dari daerah lainnya, bahkan kadang-kadang dengan orang-orang merdeka. Budak-budak dari Nias dipergunakan untuk mengerjakan tanah-tanah yang tidak terpelihara menjadi tanah-tanah perkebunan untuk menanam lada, sawah-sawah untuk menanam padi. Tidak hanya itu, budak-budak dari Nias dipakai untuk tentara dalam menghadapi perang yang tidak habis-habisnya. Kecuali orang Nias di Aceh terdapat pula budak-budak berasal dari orang-orang Batak. Budak-budak yang berasal dari Cina terdiri atas budak-budak perempuan dan di antaranya ada yang dikawini orang-orang merdeka, dan menjadi selir. Sering kali terdapat pula budak-budak dari Mekah dan dari daerah Afrika yang oleh orang-orang Aceh disebut orang *Abeuthi* (Abysinia). Perkawinan dengan budak perempuan asal negeri-negeri Afrika sangat jarang. Akan tetapi, mereka dibiarkan kawin dengan budak-budak laki-laki Nias. Budak-budak *Abeuthi* dijadikan pembantu-pembantu rumah tangga.[206]

Gambaran adanya penjaga-penjaga perempuan di keraton Aceh mengingatkan kita pada berita Antonio Galvao abad ke-16 yang menceritakan bahwa pelayan-pelayan di keraton, bahkan penjaga-penjaga pintu keraton di Ternate adalah perempuan, karena menurut berita tersebut,

---

203 A.K. Dasgupta, *op. cit.*, hlm. 82
204 *Ibid.*, hlm. 86
205 C. Snouck Hurgronje, *op. cit.*, Part I, hlm. 21–23
206 *Ibid.*, hlm. 23

tidak diperkenankan seorang pun laki-laki masuk ke dalam keraton.[207] Berita abad ke-17 juga menceritakan bahwa di antara pedagang dari Jawa ke Maluku dan Banda yang tinggal beberapa bulan menunggu angin yang baik untuk kembali ke Jawa Timur, melakukan perkawinan dengan perempuan-perempuan daerah setempat. Budak-budak berasal dari Papua diimpor terutama ke Maluku dan dilakukan oleh orang-orang Goram.[208]

Berita tahun 1638 mengenai Makassar menceritakan tentang pedagang-pedagang Melayu setelah berdiam di Makassar untuk beberapa waktu yaitu bulan Desember, Januari, dan Februari berangkat berlayar menuju Ambon melalui Buton. Dari Makassar mereka membawa banyak pakaian, beras, dan porselin. Di Buton pedagang-pedagang tersebut menukarkan pakaian-pakaian itu dengan budak-budak, karena lebih mudah dibawa. Dari situ terus ke Ambon dan berdiam untuk menunggu perdagangan cengkih sampai bulan Juni, Juli, Agustus, dan September, setelah itu kembali ke Makassar.[209]

Beberapa waktu setelah didirikannya kota Batavia (1619) oleh Kompeni Belanda, karena keadaan yang genting, dirasa perlu menggunakan budak-budak.[210] Sebagian besar budak tersebut diimpor dari Benggala, Arakan, Malabar, dan terutama dari pesisir Koromandel di mana perang, perampokan di laut, dan bahaya kelaparan selalu mengancam. Pada abad ke-17 itu juga budak-budak dari kepulauan Indonesia terutama dari Bali dan Sulawesi Selatan berdatangan ke kota Jakarta. Dalam jumlah kecil budak-budak diimpor dari Timor, Nias, pantai Kalimantan Selatan, dan tempat-tempat lain. Jumlah perdagangan budak pada masa Van der Parra agak jelas, yaitu 4.000 budak setiap tahun. Budak-budak dari berbagai negeri dan daerah yang datang ke Jakarta itu ada yang dijadikan pembantu rumah pejabat-pejabat Kompeni, pekerja-pekerja pada pertukangan, pelayan-pelayan toko di kota, perkapalan dan pelabuhan, pembantu tukang-tukang sepatu, dan sebagainya. Ada juga yang dijadikan tentara Kompeni. Mereka dapat mengadakan perkawinan antara sesama budak; ada pula budak-budak perempuan yang kawin dengan orang-orang merdeka. Anak budak-budak tersebut diizinkan pula memasuki sekolah.

Jika ditarik kesimpulan, dilihat dari sudut status sosial, golongan budak pada umumnya merupakan orang-orang di luar lapisan nonelite. Nasib mereka seperti binatang yang diperjualbelikan. Mereka harus taat, tetapi terpaksa, kepada majikannya, mereka harus menurut kepada kemauan pemiliknya untuk melakukan apa saja. Jelas bahwa nasib mereka tergantung kepada pemiliknya, kalau tidak disenangi suatu waktu dapat dijual lagi kepada orang lain.

---

207 Hubert Th. Th. M. Jacobs, S.J., *op. cit.*, hlm. 117
208 B. Schrieke, *op. cit.*, part one, hlm. 227
209 *Ibid.*, hlm. 66
210 F. De Haan, *op. cit.*, hlm. 349–375

Akan tetapi, ada pula di antara budak-budak tersebut bernasib lebih baik dan dapat bebas dari tekanan hidup. Misalnya karena mereka dijadikan pembantu, antara lain tukang-tukang kayu dan tukang sepatu. Di antara mereka yang mencapai prestasi kerja baik, tentu mendapat kepercayaan majikannya sehingga lambat laun mungkin dapat menggantikan kedudukan majikan. Di kalangan budak belian yang dijadikan tentara, karena bakat serta ketekunannya, dapat mencapai jabatan yang lebih tinggi daripada prajurit. Dalam sejarah Indonesia, Untung Surapati,[211] sebagai budak belian, berhasil menjadi letnan Kompeni Belanda. Namun, karena ketidakpuasan, ia melarikan diri dan memimpin pasukan untuk memberontak terhadap Kompeni Belanda. Kapten Francois Tack meninggal dunia dalam pertempuran di Kartasura melawan Untung Surapati. Dalam sejarah Timur Tengah dan sekitar Laut Tengah, dan India, tidak sedikit budak yang mencapai status sosial–ekonomi dan politik yang tinggi, bahkan di antaranya ada yang berhasil menjadi sultan.[212] Jadi, ternyata ada di antara budak-budak yang dapat menduduki status sosial lebih tinggi karena mobilitas vertikal. Hubungannya dengan bangsawan, elite, dan nonelite, meskipun terbatas pada pelayanan untuk kelancaran hidup sehari-hari golongan atas.

B. Pasar, Pusat Perekonomian Kota

1. Pasar dalam Struktur Birokrasi

Dalam pengertian umum, *pasar* adalah tempat jalinan hubungan antara pembeli dan penjual serta produsen yang turut serta dalam pertukaran itu.[213] Pasar tidak hanya terdapat di kota-kota, tetapi juga di berbagai tempat di desa-desa. Bagaimana terjadinya pasar serta perkembangannya tidaklah perlu kita bicarakan di sini. Akan tetapi, bahwa adanya pasar di dalam kota-kota pusat kerajaan maupun di kota-kota yang bukan pusat kerajaan, sangatlah erat hubungannya dengan sifat corak kehidupan ekonomi kota itu sendiri. Kota, dilihat dari pengertian ekonomi adalah suatu tempat menetap (*settlement*) di mana penduduknya terutama hidup dari perdagangan daripada pertanian.[214]

Hal itu sesuai pula dengan kehidupan kota-kota pusat kerajaan dan kota-kota pelabuhan dari zaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan maritim bercorak Islam di Indonesia. Kota-kota pusat kerajaan dan kota-kota pelabuhan, seperti Samudra Pasai, Aceh, Malaka, Demak, Banten,

---

211 *Ibid.*, hlm. 37

212 Sultan-sultan keturunan budak di India Utara antara lain Qutb-ud-din Aibak

213 Peter O. Steiner, "Market and Industries," *International Encyclopedia of-Social Sciences*, Vol. 9, 1968, hlm. 575–581

214 Max Weber (ed. Don Martindale), *op. cit.*, hlm. 66

Gresik, Jaratan, Japara, Surabaya, Ternate, Banda, Gowa–Makassar, Banjarmasin, dan Palembang banyak dikunjungi pedagang-pedagang besar-kecil dari berbagai negeri asing dan juga dari berbagai kerajaan di Indonesia. Pada pembicaraan terdahulu telah dikatakan bahwa para pedagang di dalam kota-kota mempunyai perkampungan sendiri-sendiri yang penempatannya ditentukan atas persetujuan penguasa kota-kota tersebut. Lebih-lebih bagi serikat dagang asing lokasi loji atau kantor dagang serta perkampungannya tidak terlepas dari ketentuan perjanjian antara raja dengan mereka. Adakalanya di perkampungan mereka juga terdapat pasar, misalnya di Banten terdapat pasar dalam perkampungan Cina.

Meskipun demikian, baik pasar dalam perkampungan pedagang-pedagang asing maupun di pusat kota atau di bagian lain dari kota, tidaklah lepas dari kepentingan ekonomi masyarakat kota. Bagi kepentingan golongan atas, pasar tidak boleh diabaikan, terutama karena merupakan hasil pendapatan bagi raja dan keluarga raja serta bangsawan dan elite. Hubungan kota dan desa di sekitarnya juga tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan perekonomian karena saling tergantung. Golongan petani yang menjual surplus hasil buminya kepada golongan pedagang merupakan faktor yang penting pula dalam kehidupan perekonomian, dan pasar adalah tempat pertukaran barang-barang yang mereka masing-masing perlukan.

Fungsi pasar di kota-kota pelabuhan besar, baik di pusat kerajaan maupun bukan yang dikunjungi oleh pedagang-pedagang asing dari berbagai negeri, di samping untuk melengkapi perdagangan lokal juga untuk perdagangan nasional. Sebagai contoh, pasar-pasar yang bersifat internasional dimiliki Banten, Demak, Malaka, Samudra Pasai, Aceh, Gowa-Makassar, Banjarmasin, Ternate, Tidore, dan kota-kota pelabuhan besar di beberapa kerajaan di kepulauan Indonesia.

Pasar-pasar yang terdapat di kota-kota pusat kerajaan, atau mungkin kota-kota lainnya, merupakan salah satu sumber penghasilan bagi raja atau penguasa setempat lainnya. Sering kali pasar bergantung pula pada konsesi-konsesi serta jaminan-jaminan perlindungan dari penguasa atau raja. Dalam hal ini raja-raja atau penguasa-penguasa selalu tertarik, karena hal itu merupakan bantuan yang teratur dari barang-barang serta produksi yang diperdagangkan, cukai-cukai, uang untuk pasukan dan biaya perlindungan pedagang-pedagang, tarif-tarif pasar dan cukai dari proses hukum. Bagaimanapun juga, penguasa atau raja mengharapkan memperoleh keuntungan dari perkampungan pedagang-pedagang serta kemampuan pedagang untuk membayar cukai pasar yang ada di sekitarnya. Seperti dikatakan Max Weber, kesempatan tersebut adalah penting bagi penguasa atau raja untuk menghasilkan keuangan dan menambah logam-logam berharga.[215]

215 *Ibid.*, hlm. 67

Kecuali itu, menurut John Hicks, campur tangan pemerintahan dalam masalah pasar karena setiap pemerintahan, bahkan sekalipun pemerintahan-pemerintahan premerkantil, harus menghadapi pertengkaran-pertengkaran dan pengacauan. Karena mereka itu menghadapi suatu bahaya yang jelas, yang betul-betul politis. Setiap pertemuan di pasar, katanya, adalah semacam kumpulan dan setiap macam kumpulan potensial adalah berbahaya. Hal itu dapat diterangkan mengapa pemerintah biasa menekan pasar-pasar dengan semacam lisensi.[216] Kepentingan penguasa atau raja dan pemerintahannya dalam campur tangan soal pasar, bukan semata-mata untuk mendapat keuntungan materi, tetapi mungkin juga menyangkut hak milik dan untuk perlindungan kontrak-kontrak antara mereka dengan pedagang-pedagang di pasar. Dengan demikian, jelas ada hubungan kepentingan timbal balik antara pihak penjual dan pembeli dengan pihak penguasa.

Di Indonesia pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam, bukti-bukti tentang pasar sebagai salah satu sumber penghasilan raja dan pemerintahan jelas ada. Menurut berita Cina dari tahun 1618 di Banten, setiap hari raja menarik cukai dari pasar.[217]

Di Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, pasar atau pekan dipungut cukai (*wase*), seperti dikatakan dalam hikayat *Bustanus Salatin* sebagai berikut:

> Dan ialah yang memaknakan Bail um-Mal dan uzur negeri Aceh Dar-us-Salam dan cukai pekan dan ialah yang sangat murah karunianya akan segala rakyat dan mengaruniai sedekah akan segala fakir miskin, pada tiap-tiap berangkat sembahyang Jumat.[218]

Penarikan cukai terhadap pekan di Aceh telah ditentukan pula, yaitu bantuan untuk negeri menurut adat. Dalam adat *wase* antara lain dicantumkan bahwa:

> Adat hariya yang dibayar oleh para pedagang atas barangnya yang disimpan dalam los-los di pasar-pasar; adat peukan yang dibayar oleh orang-orang yang mengunjungi pasar; adat tandi yang dibayar kepada petugas yang menimbang barang-barangnya di pasar.

Lazimnya untuk kepentingan negara, pembayaran iuran-iuran tersebut diserahkan oleh pengutip-pengutipnya, syahbandar dan *hariya*, kepada uleebalang dari wilayah yang bersangkutan dalam kerajaan Aceh Darus Salam. Kemudian, uleebalang memberikan kepada petugas-petugas yang sudah ditentukan dalam wilayahnya. Sebagian uang adat itu ada juga yang dipersembahkan kepada Sultan Aceh di Banda Aceh setiap tahun.[219]

---

216 Sir John Hicks, *A Theory of Economic History*, Oxford Univ, Press, New York, 1969, hlm. 33
217 W.P. Groeneveldt, *op. cit.*, hlm. 56
218 Denys Lombard, *op. cit.*, hlm. 198
219 Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah, 1970, hlm. 116–117

Dalam susunan birokrasi kerajaan ditetapkan pejabat tertentu yang mengurusi pasar, memungut cukai, dan lain-lain. Sebagaimana telah dikatakan, di Aceh, pejabat yang diberi kewajiban untuk mengurus pasar adalah syahbandar dan *hariya*. Di Jawa, pejabat yang berhubungan dengan pengawasan dan pemungutan cukai pasar disebut *tanda* seperti antara lain kita ketahui pada abad ke-18 dari surat *Angger-angger*, putusan antara Adipati Danureja I dengan Sastradiningrat I, antara Yogya dan Sala.[220] Dalam *Pradata* data abad ke-19 disebut pula dengan jelas antara lain:[221]

> ... deno kawulaningsun ingkang pada laku dagangan, adoltinuku ana pasar, iku yen dagangan dituku, asarane diutang marang kacana pada babakul, atawa ing liyane, iku pada saksiya marang ing tandane, kang nguwasane ing pasar kana, atawa aseksiya marang pada babakul, yang sepi salah sahijine, kongsi dadi parkara iya ora dadi papadone ....
>
> Dalam bahasa Indonesia:
>
> ... mengenai rakyat yang melakukan perdagangan dan jual beli di pasar, kalau dagangannya dibeli, barangnya diutang oleh kawannya pedagang perantara, atau oleh orang lainnya, maka mereka harus disaksikan oleh tandanya, yang menguasai pasar, atau disaksikan oleh salah seorang pedagang perantara, apabila salah seorang itu tidak ada, dan akan menjadi perkara maka perkaranya tidaklah diteruskan ....

Pejabat penguasa pasar yang disebut *tanda* itu mungkin sudah ada sejak zaman Majapahit, pada abad ke-14.[222] Di Makassar pejabat semacam itu pada abad-abad kemudian disebut *jannanga pasara*.[223]

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar dalam masyarakat kota pusat kerajaan dan mungkin kota-kota lainnya, berhubungan erat dengan struktur sosial-ekonomi bahkan mungkin dengan struktur politik kerajaan. *Tanda*, syahbandar serta *hariya* dan sebutan lain bagi pejabat yang berhubungan dengan pengawas dan penguasa pasar, memberikan bukti kepada kita bahwa pasar dengan organisasinya erat bertalian dengan struktur birokrasi pemerintahan suatu kerajaan.

2. Penyelenggaraan Hari-Hari Pasar

Penyelenggaraan hari-hari pasar sudah tentu tidak terlepas dari faktor-faktor lain yang memengaruhinya. Arus barang yang akan diperdagangkan, baik barang-barang yang berasal dari negeri-negeri di luar Indonesia maupun barang-barang yang berasal dari daerah-daerah sekitar kota, akan memengaruhi waktu penyelenggaraan hari-hari pasar. Barang-barang yang berasal dari berbagai negeri yang dibawa kapal-kapal dagang ke Indonesia,

220 Soeripto, *op. cit.*, hlm. 77, 236, terjemahan dan teks Pasal 9
221 *Ibid.*, hlm. 54
222 Th. Pigeaud, Vol. IV. *op. cit.*, hlm. 12
223 A.JA.F. Eerdmans, "Het Landschap Gowa", *NBG*, 50, 1897, hlm. 27

juga tergantung pada musim yang disesuaikan dengan arus angin yang memungkinkan untuk keberangkatan dan pelayaran.

Demikian pula barang-barang yang berasal dari daerah-daerah sekitarnya, baik hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, maupun hasil kerajinan tangan "industri" di Indonesia bergantung pada musim. Misalnya, panen padi, cengkih, pala, dan lada, jelas tidak setiap waktu, tetapi ada musim tertentu. Hubungan pertanian sawah, ladang, ataupun kebun dipengaruhi pula oleh faktor-faktor ekologi. Stabilitas terselenggaranya pasar-pasar tidak lepas pula dari faktor-faktor politik suatu negara. Sistem monopoli dalam dunia perdagangan pada waktu itu yang dilakukan kerajaan-kerajaan atau serikat dagang asing dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar-pasar di suatu tempat dalam suatu kerajaan.

Willem Lodewycksz pada tahun 1596 memberikan beberapa gambaran kepada kita tentang pasar di Banten sebagai berikut. Di pasar sebelah timur kota (Karangantu) baik pagi maupun siang terdapat pedagang-pedagang dari berbagai bangsa seperti Portugis, Arab, Turki, Cina Quillin (Keling), Pegu, Malaya, Bengal, Gujarat, Malabar, Abesinia, dan dari berbagai tempat di Indonesia untuk melakukan perdagangan sampai pukul sembilan. Kemudian di pasar yang kedua yang dikatakannya terletak di Paseban di mana segala keperluan untuk hidup dijual, penyelenggaraan waktu pasar itu terbuka sampai siang bahkan seluruh hari. Setelah siang hari juga terdapat pasar di kampung Cina (Pacinan) yang diselenggarakan satu hari sebelum dan sesudah pasar-pasar lain.[224]

Berita Cina dari Tung Hsi Yang K'au (1618) menggambarkan tentang pasar di Banten, antara lain diceritakan bahwa untuk keperluan perdagangan, raja telah menunjuk dua tempat di luar kota di mana dibangun toko-toko. Pada pagi hari setiap orang dapat pergi ke pasar dan pada petang hari semua kegiatan tersebut berhenti. Raja memungut cukai dari pasar itu setiap hari.[225] Di Jakarta pasar-pasar dibuka setiap hari. Dari berita yang dikemukakan diceritakan bahwa ketika di Jakarta akan mengalami serangan dari pihak Kompeni Belanda, orang-orang Banten di Jakarta kelihatan tenang-tenang saja. Meskipun diduga terjadi perang ternyata setiap hari pasar tetap masih dikunjungi banyak orang.[226]

Diberitakan pula pasar ikan yang dipindahkan ke sebelah barat dari kali yang berhadapan dengan lapangan di luar Kasteel Batavia, senantiasa dibuka, dimulai sekitar pukul sembilan dan berlangsung sampai pukul satu siang. Setelah itu dibersihkan untuk kemudian pada pukul tiga mulai dibuka lagi dan ramai dengan jual beli ikan.[227] Kecuali itu, ada juga pasar yang dibuka

224 G.P. Rouffaer, J.W. Ijzerman, *op. cit.*, hlm. 110–113
225 W.P. Groeneveldt, *op. cit.*, hlm. 56
226 F. De Haan, *op. cit.*, hlm. 30
227 *Ibid.*, hlm. 282

petang hari saja, karena itu disebut pasar sore, terletak lebih ke arah selatan yaitu di sebelah timur kali pada parit buatan yang dinamakan *Leeuwengracht*. Pasar itu hingga kini dikenal dengan sebutan Pasar Pisang.[228]

Di kota pusat kerajaan Aceh juga kita ketahui adanya pasar-pasar berlokasi di bagian kota. Dari berita-berita asing dapat diambil kesimpulan bahwa pasar yang terletak di kota-kota tempat para pedagang asing memerlukan kebutuhan sehari-hari, juga dibuka setiap hari. Berdasarkan berita Francois Valentijn,[229] di kota Makassar terdapat berbagai pasar serta bazar, tempat jual beli segala macam keperluan hidup, terutama beras. Dikatakannya bahwa pasar di dalam kota tersebut diselenggarakan setiap hari.

Apabila pasar-pasar tertentu yang terdapat di kota-kota, terutama kota pusat kerajaan, diselenggarakan setiap hari, hal itu dapat dihubungkan dengan fungsinya sebagai pasar kota, bahkan mungkin sebagai pasar bersifat internasional. Hal itu sesuai pula dengan corak dan sifat kehidupan dan ekonomi kota terutama bagi kota-kota pesisir, yang mungkin juga menjadi pusat kota kerajaan maritim, yang penduduknya menitikberatkan mata pencarian di bidang perdagangan.

Penyelenggaraan hari-hari pasar di desa-desa atau mungkin juga di kota-kota kecil di daerah pedalaman tidak setiap hari. Hari-hari pasar ditentukan bergiliran antara satu tempat dengan tempat lain, atau antara desa dan desa lain. Biasanya, giliran hari pasar di desa-desa lima hari sekali. Hal itu mungkin pula ada hubungannya dengan perhitungan hari pasaran, yaitu Wage, Kliwon, Legi, Pahing, dan Pon. Perhitungan tersebut erat pula dengan kehidupan kepercayaan pada masyarakat Jawa dan Sunda.[230] Pembagian lima hari pasar ini mungkin pula mengandung tanggapan kosmologi. Kecuali di Jawa, mungkin di daerah-daerah lain di Indonesia, tradisi itu masih diteruskan. Berita dari akhir abad ke-19 menyebutkan, di Sulawesi Selatan, daerah Gowa, penyelenggaraan pasar diatur secara bergiliran lima hari sekali di Jonggaya, kemudian Jawa, Malingkeri, Sulingka, Sengkalo, Berang, Lamuru, Biringbonto, Padangtaring, Panjangkalang, Kacico, Barombong, Mandala, Soreyang, Karuwisi, dan Rapoocene, untuk menyebut beberapa contoh. Menurut A.J.A.F. Eerdmans cukai pasar di daerah-daerah tersebut 5–10% dipungut oleh *Jannanga pasara*.[231]

Di sekitar kota Jakarta ada tempat-tempat tradisional yang disebut Pasar Senen, Pasar Rabu, Pasar Jumat, dan Pasar Minggu, yang mengingat-

---

228 *Ibid.*, hlm. 278

229 Francois Valentijn, *op. cit.*, hlm. 117

230 H.A. van Hien, *De Javaansche Geestenwereld en de Betrekking die Tusschen de Geesten en de Zinnelijkewereld Bestaat, Verduidelijkt door Petangan's bij de Java*, Jilid I, G. Koff & Co, (tanpa tahun penerbitan), hlm. 405–407; Soebardi, "Camor 1", 1965, hlm. 49–62

231 Lihat catatan 284

kan bahwa mungkin dahulu di tempat-tempat tersebut pasar hanya diselenggarakan pada hari-hari tertentu menurut gilirannya. Di kota pusat, penyelenggaraan pasar dilaksanakan setiap hari.

Mungkin pula penyelenggaraan hari-hari pasar secara bergiliran itu disebabkan oleh arus barang yang datang ke desa-desa di luar kota-kota pusat kerajaan belum begitu lancar. Kedatangan barang-barang dari luar negeri atau luar kerajaan sangat tak tentu. Ketidaklancaran arus barang sampai ke desa-desa atau kota-kota kecil di daerah pedalaman mungkin disebabkan pula oleh faktor prasarana dan perhubungan. Dari bagian terdahulu telah diketahui bahwa sistem jalan yang belum sempurna dan memerlukan waktu yang lama untuk menempuh jarak antara kota-kota pusat maritim, kota-kota pelabuhan, dengan daerah-daerah pedalaman. Alat-alat pengangkutan pada abad-abad ke-15–17 boleh dikatakan belum sempurna. Pedati-pedati yang ditarik kerbau tidak mungkin dapat mencapai semua tempat di pedalaman; kuda beban dan tenaga orang juga terbatas kemampuannya membawa barang-barang dagangan. Alat perhubungan di perairan, seperti perahu, juga sangat terbatas, hanya dipergunakan di tempat-tempat yang dilalui sungai besar dan lautan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua macam penyelenggaraan hari-hari pasar, yaitu yang diselenggarakan setiap hari dan yang diselenggarakan pada hari-hari tertentu berdasarkan giliran. Di kota-kota pusat kerajaan maritim, kota-kota pelabuhan, lebih-lebih yang berfungsi sebagai kota-kota pelabuhan internasional seperti Banda Aceh, Banten, Jakarta, Demak, Makassar, Ternate, Banjarmasin, Palembang, dan kota-kota besar lainnya, penyelenggaraan pasar agaknya dilakukan setiap hari. Di kota-kota kecil, baik di pesisir maupun di daerah pedalaman, desa-desa di sekitar kota-kota dan di daerah pedalaman, hari-hari pasar jatuh pada hari-hari tertentu sesuai dengan gilirannya. Hingga kini tradisi tersebut masih tetap ada pada penyelenggaraan hari-hari pasar di beberapa desa dan kota kecamatan di Indonesia.

3. Barang-Barang Perdagangan

Setelah kita ketahui bagaimana hubungan pasar dalam birokrasi kerajaan dan penyelenggaraan hari-hari pasar, di bagian ini akan diuraikan jenis barang-barang perdagangan. Barang-barang yang diperdagangkan di pasar-pasar dalam kota dapat kita bagi atas dua macam, yaitu, barang-barang yang berasal dari luar negeri dan barang-barang yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia. Barang-barang yang disebut terakhir dapat pula dibagi menurut tempat asalnya yaitu dari daerah sekitar kota dan yang berasal dari daerah-daerah penghasil barang-barang perdagangan antarkerajaan.

Kota-kota pusat kerajaan dan kota-kota pelabuhan yang bersifat internasional seperti Samudra Pasai, Pidie, Aceh, Demak, Gresik, Tuban, Surabaya, Makassar, dan Banjarmasin, sering dikunjungi pedagang-pedagang, baik pedagang bangsa Asia maupun Eropa.

Di antara pedagang-pedagang Asia yang banyak datang di pelabuhan-pelabuhan dan kota-kota pusat kerajaan maritim pada zaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia, adalah pedagang-pedagang dari Cina. Di antara mereka ada pula yang bertempat tinggal dalam perkampungan di bagian kota, misalnya di Banten, Banda Aceh, Jakarta, Makassar, dan kota-kota lain. Mereka ada pula yang mendirikan warung-warung atau toko-toko. Pedagang-pedagang Cina yang sudah lama menetap, umumnya menjadi pedagang perantara dan kadang-kadang mendatangi kampung-kampung atau desa-desa sekitar kota, membeli barang-barang hasil produksi langsung dari para petani. Pedagang-pedagang Cina yang mendatangi beberapa kota pusat kerajaan dan kota-kota pelabuhan itu membawa barang-barang dagangan dari negerinya. Barang-barang dagangan dari Cina yang biasanya diimpor ke kota Malaka antara lain kesturi, *rhubarb* (sejenis sayuran), kapur barus, mutiara, emas, perak, sutra kasar, sutra tenun; produk pabrik yang berharga mahal seperti kain, satin, brokat, bahan-bahan pakaian dari katun; barang-barang seperti tawas, sendawa, belerang, tembaga, besi, perkakas terbuat dari tembaga, ceret terbuat dari cairan besi; kerajinan tangan seperti kotak dari lak, lemari ukir, perhiasan rambut, dan gelang-gelang tembaga. Barang-barang yang banyak diimpor adalah barang-barang porselin dan tembikar, seperti piring besi, cangkir, serta pinggan dan mangkuk. Produksi lain yang dibawa pedagang-pedagang Cina ke Indonesia adalah garam barang yang sangat laku. Mungkin pedagang-pedagang garam Cina dan pembuatnya termasuk orang-orang kaya di antara penduduk negeri itu.[232]

Barang-barang tersebut bukan hanya dibawa ke pasar Malaka tetapi juga dibawa ke pasar-pasar kota pusat kerajaan di Indonesia, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Ternyata ada beberapa jenis barang yang diperdagangkan oleh pedagang-pedagang Cina di pasar Banten di bagian timur kota, mungkin di pasar Karangantu. Barang-barang yang diperdagangkan orang-orang Cina di pasar Banten menurut Willem Lodewycksz (1596) adalah macam-macam sutra dengan warna sangat indah, laken, sutra, beludru, satin, benang emas, piring porselin, taplak indah, bejana dari tembaga, panci besar dan kecil-kecil dari tembaga cor dan tempaan, air raksa, peti yang indah, kertas tulis berwarna, almanak, emas tempaan, cermin, sisir, kacamata, belerang, pedang buatan Cina, sarung pedang dengan lak, akar-akaran dari Cina, kipas angin, dan payung.[233]

---

232 M.A.P. Meilink Roelofsz, *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago Between 1500 and about 1630*, the Haque, 1962, hlm. 76

233 G.P. Rouffaer, J.W. Ijzerman, *op. cit.*, hlm. 112

Di pasar kota pusat kerajaan Aceh, orang-orang Cina juga memperdagangkan peti-peti, lemari-lemari, laci-laci, dan bermacam-macam alat permainan. Kecuali barang-barang dagangan tersebut, di toko-toko dan warung-warung Cina dijual minuman *hoc-ciu*.[234] Mereka juga menjual barang-barang pecah belah yang dibuat dari porselin. Pedagang-pedagang Cina tinggal menetap, berfungsi pula sebagai pedagang perantara. Barang-barang perdagangan berupa barang pecah belah dari negeri Cina dibuat dari bahan porselin dan batu-batuan. Barang-barang tersebut diperdagangkan di berbagai tempat, di kota-kota pelabuhan dan di kota-kota pusat kerajaan, seperti di daerah Kalimantan Barat, Selatan, dan Timur. Di Sulawesi bagian selatan, seperti Makassar, Takalar, Pangkajene Kepulauan, dan Palopo banyak sekali keramik Cina dipasarkan. Hal itu terungkap dengan ditemukannya kembali barang-barang tersebut, baik yang berasal dari penggalian oleh rakyat maupun yang dimiliki turun-temurun. Dari bukti-bukti penggalian kepurbakalaan oleh Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional pada tahun 1970 di Takalar dan di Pangkajene Kepulauan, dapat ditentukan bahwa sebagian keramik-keramik itu dipergunakan sebagai bekal kubur. Akan tetapi, di antara barang-barang keramik berupa mangkuk, guci, basi, cangkir, cepuk tempat bedak, dan piring, ternyata banyak juga yang berasal atau buatan Siam, Annam, dan Tonkin.[235]

Barang-barang keramik buatan Cina dari abad-abad ke-15–17 dari masa dinasti Ming, diperoleh dari Pulau Jawa, kepulauan Maluku, dan tempat-tempat lain. Beberapa piring yang disebut "panjang jimat" yang dimiliki kesultanan Kasepuhan dan Kanoman di kota Cirebon dianggap keramat. Benda-benda tersebut satu tahun sekali dicuci dan diarak dengan upacara, tepat pada tanggal 12 Rabiulawal yang disebut *Gerebeg Mulud*. Benda-benda panjang jimat dari Cirebon itu ada yang berasal dari zaman Ming dan sebagian lagi dari Eropa, hasil pesanan atau hadiah; demikian juga halnya piring-piring kuno yang terdapat pada dinding tembok Masjid Demak dengan gambar-gambar pola Indonesia-Hindu seperti siput, cakra, dan pola hiasan berunsur Islam.[236]

Di sekitar puing keraton Surosowan (Banten) ditemukan banyak pecahan keramik berupa piring, pinggan, basi, botol, dan lain-lain yang berasal dari Cina abad-abad ke-16–17. Demikian pula banyak pecahan keramik yang berasal dari Eropa (Belanda, Jerman, Inggris, dan sebagainya), ditemukan di daerah itu.[237]

---

234 A.K. Dasgupta, *op. cit.*, hlm. 84

235 Uka Tjandrasasmita, *Projek Penggalian di Sulawesi Selatan*, Yayasan Purbakala, 1970

236 F.D.K. Bosch, *OV*, 1930, hlm. 57

237 Penggalian kepurbakalaan di Banten dilakukan tahun 1968–1969 dan pecahan-pecahan keramik tersebut disimpan di museum sementara di Tiamah, dekat Masjid Agung Banten, hlm. 25

Kecuali pedagang-pedagang Cina yang berdiam di beberapa kota menjual barang-barangnya di pasar-pasar kota Indonesia, hal yang sama juga dilakukan pedagang-pedagang dari beberapa daerah di India: Gujarat, Benggala, Malabar, dan Keling. Pedagang-pedagang India di pasar-pasar Banten juga mempunyai warung-warung untuk menjual barang-barang dari bahan-bahan kaca, gading, dan permata. Barang-barang tersebut dibawa dari Cambay.[238]

Barang-barang yang dihasilkan Gujarat terutama tekstil, lebih kurang dua puluh macam. Barang-barang ekspor lainnya ialah batu-batuan, permata, tarum, opium, sabun, barang-barang dari tanah liat, serta bahan-bahan makanan seperti gandum, mentega, daging kering (dendeng), dan daging asinan. Sebagian dari barang-barang perdagangan berasal dari Barat, tetapi sebagian dihasilkan di Gujarat, yaitu tekstil diekspor ke Timur untuk dibarter dengan rempah-rempah yang lebih murah karena dekat dengan sumber produksinya.[239] Para pedagang Gujarat membawa barang-barang ke Aceh yang sebagian besar berupa bahan-bahan pakaian katun, pakaian-pakaian bergambar, selimut tebal, dan permadani.[240]

Pedagang-pedagang dari Malabar dan Koromandel datang ke Aceh membawa antara lain: barang-barang dagangan mentega dan minyak dalam guci-guci, *salapoore*, yaitu semacam pakaian berwarna putih dan biru, pakaian yang bergambar (Chint) indah buatan dari Masulipatnan, pakaian tenunan campur benang emas dan perak, karpet, bantal dan *pintado* (pakaian bergambar), baja, dan budak-budak belian.[241]

Pedagang-pedagang dari Benggala terdapat di beberapa kota, seperti Aceh, Malaka, Banten, Pasai, dan kota-kota pelabuhan yang juga menjadi pusat kerajaan. Pedagang-pedagang Benggala mengekspor barang-barang yang berasal dari daerah mereka sendiri seperti beras, gandum, minyak, mentega, gula, lak, lambaya (semacam pakaian), pakaian sutra, saputangan (*orromal*), kain kasar dan halus, serta budak-budak laki-laki dan perempuan.[242]

Pedagang-pedagang Pegu kecuali datang dari Malaka, mereka mendatangi pula Aceh, dan pelabuhan-pelabuhan seperti Pendir, Pasai, Banten, dan kota-kota lainnya. Mereka membawa beras, guci-guci gaya Martaban, lak, dan genta dari logam (gangsa).[243] Mereka juga memperdagangkan barang-barang mewah seperti: batu-batu berharga, batu delima dari Arakan, perak, kesturi, lak, kemenyan, dan sebagian lagi bahan-bahan

238 G.P. Rouffaer, J.W. Ijzerman, *op. cit.*, hlm. 111
239 M.A.P. Meilink Roelofsz, *op .cit.*, hlm. 62
240 A.K. Dasgupta, *op. cit.*, hlm. 108–109
241 *Ibid.*, hlm. 109
242 *Ibid.*, hlm. 109–110
243 *Ibid.*, hlm. 110

makanan. Bahan-bahan makanan yang mereka perdagangkan adalah mentega, minyak, garam, dan bawang putih. Beras seperti telah disebutkan termasuk produksi yang sangat penting, demikian juga gula tebu.[244]

Orang-orang dari Sri Langka dan Tenasserim yang datang ke kota-kota pelabuhan di Aceh dan beberapa tempat lainnya terutama membawa timah.[245] Dari Siam barang-barang perdagangan yang dimasukkan di beberapa kota di Indonesia, antara lain beras, timah, tembaga, peti-peti ukir dan tidak berukir, dan barang-barang buatan Cina.[246] Orang-orang muslim tidak begitu dikenal di Siam, meskipun pedagang-pedagang muslim tersebut menempati pelabuhan-pelabuhannya. Siam juga mempertahankan hubungan perdagangan dengan tempat-tempat di Indonesia, seperti Palembang, Sunda, dan Jawa,[247] bahkan mungkin dengan pulau-pulau lain di Indonesia.

Dari daratan Asia Tenggara itu, selain orang-orang Siam, pedagang Campa dan lain-lain juga melakukan perdagangan dengan Malaka dan tempat-tempat lain di Indonesia. Dari daerah itu diperdagangkan kayu gaharu, emas, perak, dan beberapa macam barang buatan Cina. Dari Kocin Cina barang-barang yang diperdagangkan adalah sutra-sutra kasar dan sutra-sutra hasil tenunan. Campa merupakan pasar emas yang berasal dari Minangkabau, demikian pula Kocin Cina. Dari kedua tempat itu emas Minangkabau terkadang dibawa ke pasar di kota-kota Malaka.[248]

Berita Cina dan berita orang-orang Arab memberikan bukti bahwa sejak abad ke-7 atau ke-8 perdagangan antara orang-orang Arab-Persia, India, Indonesia, dan Cina sudah ramai. Meskipun demikian, menurut pendapat Rita R. Di Meglio,[249] perkampungan pedagang-pedagang Arab sebelum abad ke-9 dan abad ke-11, baru terdapat di Kalah, Takuapa, Qaqullah, dan Lambri (Aceh). Di antara orang-orang Tashih yang diperkirakan orang-orang muslim dari berbagai asal, antara lain Gujarat, sebagaimana disebut-sebut dalam berita Cina, mungkin di antaranya terdapat beberapa orang Arab yang telah menempati beberapa pelabuhan di India. Berita penulis-penulis Arab dan ahli-ahli geografi abad-abad ke-9 hingga ke-11 yang menceritakan tentang Indonesia dan Semenanjung Melayu, membuktikan bahwa orang-orang Arab mempunyai pengetahuan dan perhatian tentang negeri-negeri tersebut.

Pada abad dan zaman menjelang pertumbuhan serta perkembangan Islam, ternyata banyak pula pedagang-pedagang Arab dan Persia yang

---

244 M.A.P. Meilink Roelofsz, *op. cit.*, hlm. 70
245 A.K. Dasgupta, *op. cit.*, hlm. 110
246 *Ibid.*, hlm. 110
247 Armando Cortesao, *The Suma Oriental of Tomé 'Pires*, 1944, hlm. 108, 226
248 M.A.P. Meilink Roelofsz, *op. cit.*, hlm. 73
249 Rita R. dl Meglio, "Arab Trade with Indonesia and the Malay Peninsula from the 8 th to the 16th century", D.S. Richard (ed.), *op. cit.*, hlm. 123

mengunjungi Indonesia dan di antaranya bertempat tinggal dalam perkampungan sendiri-sendiri di bagian kota seperti di Banten dan Aceh.

Willem Lodewycksz (1596) menceritakan bahwa orang Persia (Corazona) dan Arab menjual bermacam-macam batu-batu delima.[250] Orang Persia juga berdagang obat-obatan. Orang-orang Arab dan Pegu banyak berdagang di perairan dan dari satu kota ke kota lainnya, banyak membeli barang-barang dari pedagang Cina dan mengambil barang-barang dari pulau-pulau sekitarnya. Mereka membeli lada untuk kemudian dijual lagi kepada pedagang-pedagang Cina.[251]

Pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam, pedagang-pedagang Persia dan Arab terdapat pula di berbagai kota pelabuhan dari daerah Aceh sampai Maluku. Kemudian datang pedagang-pedagang Portugis ke Indonesia. Pedagang-pedagang tersebut membawa barang-barang perdagangan terutama barang-barang pakaian. Kedatangan orang-orang Portugis mengingatkan kita kepada strategi pelayaran, hubungan-hubungan perdagangan serta politiknya. Hal ini merupakan peletakan dasar-dasar politik mereka bahkan selanjutnya dipergunakan oleh orang-orang Eropa Utara. Dalam hubungan diplomasi dengan raja-raja pribumi dan dalam cara-cara kontrak, Portugis ditiru oleh Belanda dan Inggris.[252] Meskipun menghadapi saingan dari pedagang-pedagang asing lainnya, orang-orang Portugis mengunjungi tempat-tempat di Indonesia seperti Banten, Malaka, dan Jambi untuk mengimpor bahan-bahan pakaian tenunan.[253]

Pedagang-pedagang Belanda dan Inggris memperdagangkan tekstil dan barang-barang lainnya. Mereka memperdagangkan pula tekstil dari Surat dan Koromandel.[254] Timbullah usaha-usaha monopoli perdagangan yang mengakibatkan timbulnya persaingan di kalangan serikat-serikat dagang Barat sendiri. Barang-barang perdagangan yang diekspor dari Indonesia terutama rempah-rempah, lada, dan cengkih yang sampai abad ke-17 merupakan hasil bumi Indonesia yang sangat diperlukan di pasaran Eropa.

Dari daerah Sumatra, melalui pasar-pasar kota pusat kerajaan dan kota-kota pelabuhan diekspor barang-barang seperti emas, lada, madu, lilin, dan kayu gaharu serta bahan makanan. Emas dan lada yang berasal dari daerah pedalaman Minangkabau dibawa melalui sungai-sungai ke kota-kota seperti Kampar, Siak, Indragiri, dan dari sana dibawa ke Malaka untuk ditukar dengan pakaian.

---

250 G.P. Rouffaer, J.W. Ijzerman, *op. cit.*, hlm. 11, 120
251 *Ibid.*, hlm. 121
252 M.A. P. Meilink Roelofsz, *op. cit.*, hlm. 120
253 *Ibid.*, hlm. 165
254 *Ibid.*, hlm. 186

Dari pasar Pasai, Pedir, dan Aceh, lada banyak diekspor dari Jambi dan Palembang; juga diekspor beras, bawang, daging, tuak, rotan, madu, lilin, kemenyan, kapas, sedikit emas, dan besi. Dari Palembang budak-budak diekspor ke Malaka. Semua barang tersebut ditukar atau dibarter dengan sejumlah besar pakaian kasar yang diimpor orang-orang Gujarat dan Keling. Akan tetapi, tidak jelas apakah beras yang diekspor dari Palembang ke Malaka merupakan produksi sendiri ataukah lebih dahulu dibawa oleh pedagang-pedagang lain, dalam hal ini pedagang-pedagang Jawa, kemudian diekspor lagi ke Malaka.

Pelabuhan pantai barat Sumatra bahkan Aceh mungkin tidak langsung berhubungan dengan Malaka, meskipun demikian, tidak diragukan kalau hasil-hasil produksi dari negeri-negeri tersebut, seperti kamper dari Barus yang dibeli orang-orang Keling, diperdagangkan di pasaran Malaka melalui pedagang-pedagang perantara.[255]

Pedagang-pedagang dari kota-kota pelabuhan di Jawa, seperti Banten, Cirebon, Demak, Japara, Tuban, dan Gresik berhubungan dengan pasaran Malaka. Akan tetapi, sebaliknya dari Jawa, mereka ke Bali, Maluku, Makassar, dan Banjarmasin dengan barang-barang hasil produksi daerah masing-masing. Dari pelabuhan Kalapa sejak zaman Pajajaran banyak diekspor lada yang setiap tahunnya mencapai 1.000 bahar. Budak-budak dan bahan makanan produksi pedalaman Sunda, diekspor pula ke Malaka.

Di pasar Banten kecuali barang-barang impor dari berbagai negeri juga terdapat barang-barang keperluan biasa. Willem Lodewycksz menyebutkan bagian-bagian pasar yang menjual buah-buahan seperti: semangka, mentimun dan kelapa; sayuran, buncis, cabai, gula dan madu dalam guci-guci, gambir, bambu dan atap, senjata seperti keris, klewang, tombak dan peluru, juga ayam, kambing, beras, lada, minyak; garam yang sebagian besar dari daratan dijual di tempat yang sama.[256]

Perdagangan antara Demak, Japara, Tuban, dan Gresik dengan daerah Maluku sejak abad-abad sebelum dan sesudah pertumbuhan Islam, sudah ramai. *Hikayat Hitu* dan *Hikayat Ternate* banyak menceritakan hubungan lalu lintas perdagangan antara Maluku dengan tempat-tempat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu lintas perdagangan antara Maluku dengan kota-kota lain di Indonesia diketahui dari berita Tomé Pires (1513), Antonio Galvao, Willem Lodewycksz (1596), dan berita asing lainnya.

Dari pelabuhan-pelabuhan Jawa diekspor beras ke daerah Maluku dan sebaliknya dari Maluku diimpor rempah-rempah untuk kemudian diperdagangkan lagi. Kecuali Demak, Japara, Tegal, dan Semarang

255 *Ibid.*, hlm. 82
256 G.P. Rouffaer, J.W. Ijzerman, *op. cit.*, hlm. 110–113, gbr. 12

merupakan daerah pengekspor beras. Dari Cirebon yang daerah pedalamannya menghasilkan bahan makanan juga beras, diekspor ke Malaka dan tempat-tempat lainnya. Hubungan Cirebon dengan Malaka pada abad ke-16 diberitakan oleh Tomé Pires bahwa Pate Katir yang berasal dari Cirebon berdiam di kampung Upih.[257]

Kota-kota di Malaka, Ternate, Tidore, Hitu, dan Banda di daerah Maluku merupakan pasar rempah-rempah yaitu cengkih, pala, dan fuli. Daerah-daerah ini justru menjadi perebutan pedagang-pedagang asing karena rempah-rempahnya. Ke tempat ini diekspor pakaian, beras, dan bahan-bahan makanan yang kurang sekali dihasilkan di daerah itu. Bahkan alat-alat perkakas pertanian juga didatangkan dari Jawa.

Daerah Makassar, salah satu pusat lalu lintas pelayaran dan perdagangan, juga dikunjungi pedagang-pedagang asing. Dari daerah ini yang diperdagangkan keluar adalah beras yang dibawa oleh pedagang-pedagang ke daerah Maluku. Di pasar Makassar, dijual pula keperluan hidup sehari-hari, seperti beras, ayam, ikan, sayuran, dan buah-buahan.[258] Barang-barang yang diperdagangkan di pasar-pasar berbagai kota sudah tentu bergantung pada kebutuhan masyarakatnya. Hal itu sesuai pula dengan lingkungan alam sekitarnya dan bergantung pada barang-barang impor baik dari negeri-negeri di Indonesia sendiri maupun dari negeri-negeri luar.

4. Sistem Jual Beli Barang-Barang

Barang-barang yang diperdagangkan di pasar-pasar telah dibahas dan kini akan diuraikan sistem jual beli barang-barang itu.

Pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam, agaknya jual beli barang-barang masih melanjutkan sistem tradisi sebelumnya, yaitu dengan cara barter atau tukar-menukar barang-barang yang diperlukan. Ada pula dengan mempergunakan alat penukar konvensional yang lazim kita namakan mata uang.

Biasanya sistem barter tersebut dilakukan antara pedagang-pedagang dari daerah-daerah pesisir dengan daerah-daerah pedalaman bahkan kadang-kadang langsung dengan petani-petani. Di antara barang-barang yang dibawa dari daerah-daerah pesisir adalah garam dan barang-barang impor dari luar negeri seperti pakaian dan barang-barang dari porselin buatan Cina. Sebaliknya barang-barang yang diperlukan masyarakat pesisir, terutama masyarakat kota adalah hasil-hasil pertanian, misalnya beras dan buah-buahan. Bahkan hasil-hasil hutan dan pertanian untuk keperluan ekspor

257 M.A.P. Meilink Roelofsz, *op. cit.*, hlm. 112
258 Francois Valentijn, *op. cit.*, hlm. 117

sangat diperlukan oleh pedagang-pedagang pesisir yang oleh pedagang-pedagang perantara itu dijual lagi kepada pedagang asing.

Pasar seperti di kota-kota sewaktu-waktu dapat diselenggarakan di desa-desa, misalnya setahun sekali atau secara tidak resmi. Dalam perjalanan petani-petani dapat pula mengadakan barter dengan garam, dan sebagainya. Tradisi jual beli dengan sistem barter hingga kini pun masih dilakukan oleh beberapa masyarakat sederhana dan masyarakat yang terpencil jauh dari kota. Akan tetapi, di pasar beberapa kota pada zaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam, sistem jual beli barang-barang agaknya sudah menggunakan mata uang. Yang menarik perhatian adalah bahwa pada waktu itu mata uang asing juga berlaku di pasar kota-kota Indonesia.

Sebenarnya pada zaman Indonesia–Hindu di Jawa telah kita ketahui adanya peredaran mata uang, baik mata uang pribumi maupun mata uang asing seperti diberitakan oleh berita-berita Cina dan beberapa prasasti dari zaman tersebut. Pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam juga banyak beredar mata uang baik berasal dari kerajaan-kerajaan di Indonesia sendiri maupun mata uang asing: Cina, India, Arab, Persia, Portugis, Belanda, dan Inggris. Hal itu diketahui selain dari berita-berita asing juga dari bukti-bukti penemuan yang sebagian besar telah disimpan di bagian Numismatik, Museum Nasional Jakarta.[259]

Sekitar tahun 1513–1515 Tomé Pires telah menceritakan pula tentang peredaran mata uang di beberapa kerajaan yang dipergunakan sebagai alat penukar dalam perdagangan di beberapa kota pusat kerajaan. Dikatakan bahwa di Pedir terdapat mata uang dari timah seperti *ceiti*, yaitu mata uang kecil, dan mata uang dari emas yang disebut *drama*. Perbandingan nilai mata uang *drama* dengan *cruzado* adalah 9:1. Di Pedir juga didapatkan uang perak yang disebut *tanga* yang menyerupai uang Siam, Pegu Benggala. Untuk perdagangan banyak digunakan mata uang emas. Tomé Pires juga menceritakan bahwa di Pasai ada pula mata uang emas yang disebut *drama*. Mata uang tersebut bentuknya kecil dan setiap drama bernilai 500 *cash*. Dikatakan pula bahwa setiap kapal yang membawa barang-barang dari Barat dikenakan pajak sebesar 6%; sedang setiap budak belian yang membawa serta untuk dijual dengan nilai 5 *maze* emas dan setiap barang yang diekspor, seperti lada harus membayar pajak satu *maze* per bahar.[260] Apa yang disebut Tomé Pires dengan *drama* mungkin *dirham* sebagaimana dimaksud oleh orang-orang daerah di bekas kerajaan itu hingga kini. Berita asing tersebut

---

259 Mata uang yang disimpan di bagian Numismatik Museum Nasional Jakarta sebagian telah ditelaah oleh E. Netscher dan Mr. J.A. van der Chijs, "Munten van Nederlandsch–Indie, heschreven en afgebeeld", *VBG*, XXXI, 1864

260 Armando Cortesao, *op. cit.*, hlm. 140–147

dibuktikan pula dengan temuan beberapa buah mata uang dari daerah bekas kota pusat kerajaan Samudra Pasai di Kabupaten Aceh Utara. Di antara mata uang dirham emas dari Samudra Pasai itu pernah ditelaah oleh H.K.J. Cowan dalam menunjang bukti-bukti sejarah raja-raja Pasai, karena ternyata mata uang tersebut menggunakan nama-nama Sultan Ala'uddin, Sultan Mansur Malik az-Zahir, Sultan Abu Zaid, dan Sultan Abdullah.[261] Kemudian pada awal tahun 1973, telah ditemukan pula 11 buah mata uang dirham di antaranya memuat nama Sultan Muhammad Malik az-Zahir, Sultan Ahmad, dan Sultan Abdullah, semuanya adalah raja-raja Pasai yang dikenal pada abad-abad ke-14–15. Ada dua mata uang yang dibuat dari timah tetapi nama Sultan sudah tak terbaca. Benda-benda tersebut kini tersimpan di Lembaga Purbakala.[262]

Uang yang disebut *tanga* dipergunakan pula di Indonesia dan negeri-negeri Timur lain dibuat dari berbagai logam dan mempunyai nilai yang bervariasi.[263] Di Sunda juga terdapat mata uang kecil yang disebut *cash* seperti *ceiti* yang diberi lubang hingga dapat diikat dengan benang. Setiap 1.000 *cash* sama dengan 5 *calai* mata uang Malaka; dan mata uang dengan nilai nominal besar dipergunakan emas yang bernilai 9 *mate*, sama dengan 300 *calai* atau 9 *cruzado*. Ada pula mata uang yang disebut *tumdaya* dengan berat 15 gram. Menurut d'Albuquerque mata uang emas yang beratnya seperempat *tundai* sama dengan seribu *reis* mata uang Portugis. Di Jawa, sebagaimana diberitakan Tomé Pires juga mempunyai mata uang *tumdaya* yang disebut *tael*.[264]

Tomé Pires menceritakan bahwa mata uang yang dipergunakan di Jawa adalah *cash* Cina dan apabila mencapai seribu buah disebut *puon*. Setiap seribu *cash* dikenakan pajak sebesar 3% atau 40 *cash* diserahkan kepada penguasa kerajaan, Tomé Pires menyatakan bahwa semua perdagangan menggunakan mata uang *cash*. Dikatakannya bahwa di Jawa terdapat pula *tumdaya* atau *tael*, yang seperempat bagian lebih dari mata uang di Malaka. Mata uang Cina yang disebut *cash* atau *cara*, atau oleh orang Melayu disebut *cas*, dalam bahasa Jawa mungkin disebut *pitis* (picis). Di Banten mata uang Cina itu juga berlaku dan dipakai untuk membeli lada. Menurut berita Willem Lodewycksz (1596), pedagang-pedagang lada, di antaranya perempuan dan petani-petani, menjual ladanya berdasarkan ukuran gantang atau sama dengan 3 pon. Harga satu gantang adalah 800–900 *caxa* (*cash*).[265]

---

261 H.K.J. Cowan, "Bijdrage tot de kennis der Geschiedenis van het rijk Samoedra Pase," *TBG*, LXXVIII, 1938, hlm. 204–214

262 Mata uang dirham tersebut dibeli dari penduduk pada waktu dilakukan inventarisasi kepurbakalaan Islam oleh Uka Tjandrasasmita di kompleks Samudra Pasai, Januari 1973

263 Armando Curtesao, *op. cit.*, hlm. 140, catatan kaki 2

264 *Ibid.*, hlm. 270, catatan 1

265 G.P. Rouffaer, J.W. Ijzerman, *op. cit.*, *Appendix*, hlm. 213–238

Jan Jansz Karel, di Banten pada abad ke-16 menceritakan bahwa ia pergi setiap hari ke pasar-pasar untuk membeli lada dengan *cash* (*caxa*). Ia menceritakan bahwa harga 58 pon lada bersih pada tanggal 8 Agustus 1596 di pasar Banten hanya seribu cash. Pada tanggal 10 Agustus harganya tidak kurang 1.100 *cash*. Pada hari tersebut dikatakan bahwa 2 karung lada dapat ditukar dengan satu *elo* bahan pakaian yang bernilai 7 *shilling*.[266] Dari berita Jansz Karel itu dapatlah diperoleh kesan bahwa agaknya harga lada di pasar Banten, dan mungkin pula di pasar-pasar kota-kota lainnya, tidak tetap. Bukan harga lada saja yang tidak tetap, tetapi mungkin pula harga-harga barang lainnya. Tidak adanya harga patokan dapat menyebabkan ketidakstabilan harga-harga. Kebiasaan tersebut secara tradisional masih berlaku hingga kini. Tahun 1612 orang-orang Portugis berdagang pakaian dan mata uang *cash* ke Surabaya yang dilakukan dengan sistem perdagangan *commenda* untuk membeli rempah-rempah dan dibebaskan dari kewajiban membayar. Dalam hal ini mereka memperoleh harga rempah-rempah yang lebih murah daripada jika membeli dari Gresik.[267]

Emas dan perak meskipun tidak berupa uang juga dipakai sebagai alat penukar seperti diceritakan Tomé Pires.[268] Di Malaka mata uang yang diterima adalah yang dibuat dari timah. Emas dan perak juga dipergunakan sebagai alat penukar transaksi-transaksi, bukan sebagai mata uang melainkan sebagai barang dagangan di pasar-pasar. Di Malaka terdapat pula mata uang dari Hormuz, Cambay dan beredar sebagai alat pembeli barang-barang dagangan. Memang itu tidak hanya dipakai sebagai alat penukar dengan barang-barang hasil produksi tetapi juga sebagai alat penukar mata uang lainnya. Di Malaka menurut pendapat Meilink Roelofsz penukaran mata uang mungkin sudah ada sejak masa Warthema yang pernah melihat lebih kurang 500 orang menukar mata uang di sebuah jalan di Pidie.[269]

Dampier menceritakan pula tentang penukar uang yang kebanyakan terdiri dari perempuan, yang duduk-duduk di pasar-pasar, di sudut-sudut jalan dengan tumpukan uangnya yang disebut *cash* dibuat dari timah.[270]

Dari penemuan-penemuan mata uang dapat diketahui bahwa pembuatan mata uang bukan hanya di Pasai, melainkan antara lain juga di Aceh, Banten, Cirebon, Banjarmasin, dan Gowa-Makassar. Di Banten dengan ditemukannya mata uang bertulisan huruf Jawa Kuno pada bagian pinggir dan memuat nama "Pangeran Ratu" serta mata uang yang bertulisan Arab dan berbunyi "Pangeran Ratu ing Banten", memberikan bukti kepada

---

266 J.C. van Leur, *op. cit.*, hlm. 163
267 M.A.P. Meilink Roelofsz, *op. cit.*, hlm. 273
268 Armando Cortesao, *op. cit.*, hlm. 144
269 M.A.P. Meilink Roelofsz, *op. cit.*, hlm. 40
270 A.K. Dasgupta, *op. cit.*, hlm. 82

kita tentang adanya pembuatan mata uang sendiri. Mata uang tersebut diduga berasal dari zaman Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir.[271] Dalam babad atau *Sadjarah Banten* diceritakan pula bahwa Sultan Ageng Tirtayasa menjanjikan hadiah 10 real bagi yang dapat membawa kepala seorang Belanda dan 5 real bagi setiap orang yang membawa telinga orang Belanda.[272] Berita ini menyatakan bahwa pada waktu itu di kerajaan Banten mungkin dibuat mata uang real. Setelah pemerintahan Sultan Tirtayasa, mata uang real tetap dibuat seperti terbukti dari temuan tahun 1149 H (1736/1737 M) dengan nama Muhammad Banten, atau lengkapnya Sultan Abu'l Fathah Muhammad Syafazin ul Arifin.[273]

Di Cirebon setelah perjanjian dengan Belanda tanggal 8 September 1688, mata uang diperlukan untuk transaksi-transaksi perdagangan. Di tempat itu kemudian ada larangan membuat mata uang *picis* yang terlalu kecil, kecuali dibuat oleh Raksa Negara dari pihak Sultan Sepuh, dan oleh Suradi Nata dari pihak Sultan Kanoman. Akan tetapi, setelah kedua orang itu meninggal, pembuatan uang digadaikan kepada Gina sejak tanggal 1 Januari 1710 atas persetujuan Pangeran Panembahan, Pangeran Dipati Anom, Pangeran Arya Cirebon, Pangeran Raja, kapten Cina, dan Syahbandar Cirebon Tan Siongko.[274]

Di Aceh pun dibuat mata uang kerajaan seperti ternyata dari bukti-bukti temuan, dan berita-berita asing. John Davis tahun 1598 menyebutkan ada *casha*, *mass*, *koupan*, *pardaw*, dan *tael*. Mata uang emas dari Aceh sudah terkenal sejak masa pemerintahan raja-raja Ali Riayat, Ali Mughayat Syah, dan seterusnya.[275]

Kecuali itu, di Palembang dan Sulawesi sekitar abad ke-17 telah dibuat mata uang sendiri. Dari Palembang terdapat mata uang bertulisan Arab 1061 H atau 1650/1 M. Di Sulawesi dari masa pemerintahan Tumabicara atau perdana menteri Gowa dibuat mata uang dari emas dan timah disebut *dinara* yang berbentuk besar dan *kupa* yang berbentuk kecil, semua menggunakan tulisan Arab. Mata uang dari timah disebut *benggolo*. Di Gowa pembuat uang pada waktu itu mungkin Karaeng Pole. Mungkin sekitar pertengahan abad ke-17 pembuatan mata uang yang ditempa berhenti, tetapi kemudian dibuat lagi pada masa dan atas nama Hasanuddin. Menurut berita Dirk de Haas, tanggal 21 Juli 1691, harga makanan di pasar sangat murah.[276] Dengan disebut-sebut adanya *stuiver* pada waktu itu di Makassar, mata uang kecil dibuat pula oleh Kompeni.

---

271 E. Netcher, Mr. J.A. van der Chijs, *op. cit.*, hlm. 149–151
272 R. Hoesein Djajadiningrat, *op. cit.*, hlm. 69 (pupuh LXI)
274 E. Netcher, Mr. J.A. van der Chijs, *op. cit.*, hlm. 152
274 *Ibid.*, hlm. 154–155
275 *Ibid.*, hlm. 161
276 *Ibid.*, hlm. 187

Setelah Kompeni Belanda di Jakarta berkuasa dan di tempat-tempat lain, seperti Surabaya, pembuatan mata uang Kompeni Belanda di Makassar diperlukan oleh pemerintahannya. Kecuali itu, mereka juga membawa mata uang yang dicetak di negeri Belanda.

Perlu diterangkan di sini bahwa dalam sistem jual beli di pasar-pasar mata uang yang berlaku tidak hanya buatan kerajaan di Indonesia tetapi juga buatan beberapa negeri di Eropa dan Asia. Tukar-menukar mata uang, seperti telah diterangkan di atas, jelas berlaku di pasar-pasar. Yang menarik perhatian bahwa jual beli di kalangan pedagang-pedagang tidak selalu jujur. Suatu contoh digambarkan oleh Willem Lodewycksz, di Banten bahwa adakalanya dijual lada basah atau lada yang dicampur dengan batu-batu kecil sehingga bebannya menjadi berat.[277] Transaksi-transaksi baik antara pedagang dengan penguasa maupun antar-pedagang perseorangan dilakukan dengan tertulis ataupun lisan. Bahkan seperti telah dikatakan, pengurus pasar dalam transaksi antarpedagang dapat menjadi saksi. Lebih-lebih transaksi antara serikat dagang dengan kerajaan yang dibuat tertulis, dapat merupakan perjanjian dagang. Kecuali itu, dalam perdagangan dikenal pula timbangan-timbangan antara lain *gantang*, *dacing gedeng*, dan *kati bahar*, seperti diceritakan oleh berbagai orang asing antara lain Tomé Pires, Willem Lodewycksz, dan John Davis.[278]

C. Tempat Peribadatan dan Upacara

1. Tempat Peribadatan dan Fungsinya

Dalam uraian tentang kota dan bagian-bagiannya telah dibicarakan lokasi tempat peribadatan yang disebut masjid. Letak bangunan tersebut biasanya di sebelah barat alun-alun dan tidak terpisahkan dari komposisi tata kota inti di mana terdapat keraton. Dengan adanya masjid yang letaknya di sebelah barat alun-alun pusat kota itu, tidak berarti bahwa dalam sebuah kota hanya didirikan sebuah masjid. Berdasarkan data sejarah ternyata dalam sebuah kota pusat kerajaan terdapat beberapa buah masjid. Kecuali bangunan yang disebut masjid di beberapa bagian kota terdapat pula *surau*, *tajug*, *langgar*, atau *meunasah* (di Aceh) yang juga dipakai sebagai tempat peribadatan umum.[279] Pendirian masjid, *surau*, *tajug* lebih dari satu dalam suatu masyarakat sudah tentu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang makin lama berkembang.

---

277 G.P. Rouffaer en J.W. Ijzerman, *op.cit.*, hlm. 113

278 Lihat tentang ukuran-ukuran timbangan (G.P. Rouffaer J.W. Ijzerman, 1915); *Ibid.*, hlm. 212–221

279 L.W.C. van den Berg, "Moskee", dalam *Encyclopaedie Nederlandsch India*, Ile deal, Leiden, samengesteld door P.A. van der Lith, hlm. 584

Dilihat dari sudut arsitektur, masjid-masjid kuno di Indonesia menunjukkan kekhasan yang membedakannya dengan arsitektur masjid-masjid di negeri-negeri Islam lainnya. Kekhasan gaya arsitektur itu dinyatakan oleh atapnya yang bertingkat 2, 3, dan 5, denahnya persegi empat atau bujur sangkar dengan serambi di depan atau di samping; fondasinya pejal dan tinggi; pada bagian depan atau samping terdapat parit berair (*kulah*). Masjid-masjid kuno yang atapnya bertingkat dua antara lain Masjid Agung di Cirebon dari abad ke-16, masjid Katangka di Sulawesi Selatan abad ke-17. Masjid-masjid di Jakarta yang berasal dari abad ke-18 umumnya beratap dua tingkat (Angke Marunda). Masjid yang atapnya bertingkat tiga antara lain Masjid Demak dari awal abad ke-16, Masjid Agung Banten dari abad ke-16, Masjid Bait ar-Rahman dari masa Iskandar Muda di kota Banda Aceh, Masjid Japara yang diceritakan oleh W. Schouten abad ke-17, masjid di Ternate yang kita ketahui fotonya dari tahun + 1870.[280]

Mengenai asal pengaruh yang terdapat pada masjid-masjid yang mempunyai corak atau gaya Indonesia itu ada dua pendapat. *Pertama*, pendapat yang menyatakan pengaruh gaya masjid di India dari daerah Malabar seperti dikemukakan oleh H.J. de Graaf,[281] dan *kedua* pendapat bahwa gaya masjid dengan atap bertingkat berasal dari Indonesia sendiri, yaitu merupakan tradisi seni bangunan candi yang telah dikenal pada zaman Indonesia–Hindu. Pendapat yang terakhir dikemukakan antara lain oleh G.F. Pijper, dan Hidding.[282] W.F. Stutterheim berpendapat bahwa bangunan masjid yang atapnya bertingkat adalah pengaruh dari seni bangunan di Bali seperti dipertunjukkan oleh bangunan *wantilan* tempat menyabung ayam.[283] Akan tetapi, sebenarnya kalau kita perhatikan pada beberapa relief candi dari abad ke-14 dari zaman Majapahit,[284] ternyata sudah dikenal bangunan atap bertingkat, yaitu bangunan yang dinamakan *meru*, sebuah gunung kahyangan tempat para dewa. Antara candi dan *meru* atau gunung kahyangan itu erat hubungannya, karena candi pun dianggap lambang rumah kedewaan dan replika *meru*.[285]

---

280 H.J. de Graaf, "De Oorsprong der Javaanse Moskee", *Indonesia*, 1947–1948, 1, kg., hlm. 289–235; H.J. de Graaf, "De Moskee van Japara," *Jawa*, 16e jrg, 1936, hlm. 160–162; *Masjid dan Makam Dunia Islam*, Terbitan Balai Pustaka, Weltevreden, 1926

281 H.J. de Graaf, *op., cit.*

282 G.F. Pijper, "The Minaret in Java", *India Antiqua*, Leiden, 1947, hlm. 274–238; K. Hidding, "Het Bergmotif in eenige godsdienstige verschijnselen op Java", *TBG*, 1933, hlm. 469

283 W.F. Stutterheim, *Cultuur Gechiedenis van Indonesie. De Islam en Ziin Komst in III deal Archipel*, 2 druk J.B. Wolters, Groningen, Djakarta, 1952, hlm. 145

284 Contoh pada candi Surawana, Jawi, Panataran, Kedaton, Jago; lihat Th.P. Galestin, *Houtbouw op Oost Javaansche tempel relief.* (Disc). Leiden, 1936, hlm. 26, J.L.A. Brandes, *Tjandi Djago: Monographie*, Batavia, 1904, hlm. 59, bgr. 147; W.F. Stutterheim, "Tjandi Djawi op een Relief?" *TBG*, 81, 1941, hlm. 1–25.

285 W.F. Stutterheim, *"The Meaning of the Hindu–Javanese candi"*, Reprinted from *Journal of the American Oriental Society*, volume 51, No. 1, hlm. 1–15

Gaya khas masjid-masjid kuno Indonesia itu sesuai dengan gaya bangunan keraton dan bagian-bagian lainnya. Pusat kota kerajaan terdiri dari bangunan-bangunan, alun-alun, dan jalan-jalan utama yang memuat ke inti kota. Di Jawa pohon beringin yang ditanam di alun-alun, yang disebut *wringin-kurung*, senantiasa menjadi lambang pusat pemerintahan di mana terdapat keraton, baik tempat raja besar maupun kecil.

Gaya masjid-masjid kuno di Indonesia menimbulkan pertanyaan: Mengapa bangunan tersebut dibuat demikian? Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pembuat-pembuat bangunan itu adalah orang-orang muslim Indonesia sendiri sehingga seni bangunan bahkan seni ukir yang sudah ada sebelumnya, secara tradisional masih dilanjutkan. Raden Sepat misalnya, seperti diceritakan dalam babad adalah kepala tukang atau arsitek asal Majapahit yang membuat kota di Cirebon.[286] Masjid Demak didirikan atas pimpinan dan petunjuk para wali dan dilaksanakan oleh tukang-tukang dari Majapahit; bahkan menurut cerita dalam babad dikatakan serambi masjid itu sendiri berasal dari kota Majapahit. Bangunan keraton dan masjid-masjid di Banjarmasin, Kutai, dan Sulawesi berdasarkan berita-berita dalam hikayat-hikayat didirikan orang-orang setempat.[287] Dari bukti-bukti tersebut jelas pula bahwa pembangunan masjid dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Dorongan besar untuk bergotong royong dalam mendirikan tempat peribadatan masjid juga mungkin karena pengaruh *hadis* yang antara lain mengatakan:

> Barang siapa membina masjid karena Allah dan mengharapkan keridaan-Nya, maka Allah akan membuat rumah baginya dalam surga.

Hal itu diperkuat pula oleh isi Alquran Surat at-Taubah ayat 18 dan 19, mengenai orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, dianggap orang-orang yang beriman.[288]

Bahwa inisiatif mendirikan masjid di Indonesia mula-mula timbul dari sultan atau wali, diperkuat oleh unsur-unsur tradisional yang memandang raja atau sultan dan wali sebagai orang-orang magis. Menurut babad, masjid-masjid kuno yang didirikan di bawah pimpinan Wali Sanga secara gotong royong adalah Masjid Demak dan Masjid Agung di Cirebon. Bahkan di kedua masjid itu terdapat *saka guru* (tiang utama) yang dibuat dari *tatal*, yaitu pecahan-pecahan kayu kecil-kecil yang disatukan sehingga kuat untuk menjadi salah satu tiang utama. Karenanya disebut *saka-tatal* dan menurut cerita dibuat oleh Sunan Kali Jaga.[289] Kemungkinan *saka-tatal* itu melambangkan kesatuan atau kegotongroyongan, suatu pekerjaan yang

---

286 Lihat catatan 239, 240; J.L.A. Brandes, D.A. Rinkes, "Babad Tjerbon", *VBG*, 1911, hlm. 109, tentang prabayaksa yang disajikan serambi Masjid Demak

287 Lihat catatan 241, 242

288 Mahmud Junus, *Tafsir al-Qur'an al-karim Indonesia*, Al Ma'arif, Bandung–Djakarta, 1951, hlm. 171

289 W.L. Olthof, *op. cit.*, hlm. 30

bukan karena hanya pengaruh *hadis* dan ayat Alquran melainkan juga karena dasar gotong royong yang merupakan suatu unsur yang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia.

Faktor lain mengenai latar belakang gaya bangunan dan beberapa ukiran yang menunjukkan kelanjutan tradisi sebelum Islam disebabkan pembuatannya mempunyai maksud-maksud yang lebih dalam daripada itu. Maksud tersebut antara lain untuk menarik perhatian masyarakat yang belum masuk Islam atau yang baru saja masuk Islam sehingga mereka senang mengunjungi masjid yang gayanya masih mengingatkan unsur bangunan candi. Perubahan kepercayaan dari agama Hindu-Buddha ke Islam memerlukan penyesuaian perlahan-lahan dan penuh kebijakan. Dalam cerita, hikayat, dan babad, cara-cara tersebut dilakukan oleh Wali Sanga. Misalnya Sunan Kali Jaga dalam mengislamkan masyarakat lapisan atas dan bawah menggunakan unsur-unsur budaya yang sudah ada seperti pertunjukan wayang yang sedikit demi sedikit tokohnya diganti oleh tokoh Islam.

Masjid dan *langgar* atau *tajug* mempunyai fungsi yang berbeda. Masjid adalah tempat peribadatan yang dapat dipergunakan untuk salat Jumat, sedangkan *tajug* atau langgar umumnya dipergunakan untuk salat berjamaah sehari-hari dan bukan untuk salat Jumat. Oleh karena itu, ukuran serta bangunannya juga berbeda. Masjid umumnya dibangun dalam ukuran besar sedang *tajug* cukup untuk menampung beberapa orang saja. Masjid-masjid besar terutama didirikan di pusat-pusat kerajaan, seperti di Samudra Pasai, Demak, Banten, Cirebon, Aceh, Gowa–Makassar, Banjarmasin, dan Ternate. Di daerah-daerah kerajaan Melayu biasanya masjid besar dinamakan Masjid Raya, di Jawa disebut Masjid Agung. Sebutan lainnya untuk masjid besar ialah Masjid Jami.

Masjid, *langgar*, *surau*, *meunasah* dalam arti luas bukan hanya terbatas sebagai tempat untuk melakukan sembahyang atau salat, melainkan juga sebagai pusat kegiatan-kegiatan budaya masyarakat muslim. Karena itu, di dalam masjid, *langgar*, dan *meunasah* diucapkan khotbah-khotbah, *tablig-tablig* mengenai keagamaan-kemasyarakatan untuk kehidupan masyarakat muslim di dunia dan akhirat. Secara tradisional serambi dipergunakan untuk kenduri-kenduri seperti mauludan dan lain-lain yang bersifat semiprofan.

Dalam babad diberitakan bahwa Wali Sanga menyelenggarakan musyawarah mengenai soal-soal kemasyarakatan dan keagamaan di dalam Masjid Demak dan Cirebon.[290] Dalam *Hikayat Kutai* diceritakan bahwa

---

290 D.A. Rinkes, "De Heiligen van java VI. Het graf te Pamleten en de Hollandsche heerschappij", *TBG*, IV, 1913, hlm. 1–200, khususnya hlm. 22, 23 menurut teks *Babad Tanah Djawi*, Poerworedjo; J.L.A. Brandes, D.A. Rinkes, VBA, 1911, *op. cit.*, hlm. 118

pengijaban-pernikahan Raja Aji Raden Wijaya dengan anak Permata Alam dilakukan oleh Tuan Parangan di dalam langgar,[291] yang dimaksud mungkin sama dengan masjid. Masjid, *langgar*, *surau*, dan *meunasah* dipakai juga untuk madrasah dan sewaktu-waktu dipakai untuk menginap dan bahkan untuk tempat pengadilan.[292] Di Jawa masjid-masjid kuno mempunyai bagian yang dinamakan *pawestren* (pa-istri-an–yaitu ruangan sebelah selatan yang terpisah oleh dinding. G.F. Pijper berpendapat bahwa hal itu khusus ditemukan di Jawa yang membuktikan pula bahwa pada zaman dahulu di Jawa kaum perempuan turut serta mengambil bagian dalam melakukan sembahyang di masjid-masjid bersama-sama kaum laki-laki.[293]

Di bagian belakang dan samping halaman masjid kuno di Indonesia biasanya terdapat pula tempat makam raja-raja atau sultan-sultan, beberapa anggota keluarganya, dan orang-orang yang dianggap keramat. Masjid-makam tersebut dapat digolongkan sebagai *masyhad*.[294] Contohnya masjid Demak, masjid Kadilangu, masjid Ampel, masjid Kuto Gede, dan masjid Banten.

Yang menarik perhatian pula adalah latar belakang raja-raja atau sultan-sultan dan keluarga orang-orang yang dianggap keramat dimakamkan di halaman masjid. Masjid di Indonesia mengandung unsur-unsur budaya dari masa sebelumnya yang mengingatkan pada gaya beberapa bangunan suci seperti candi. Candi di antaranya dipakai untuk tempat penjenazahan abu raja-raja yang dianggap sebagai dewaraja. Demikian pula raja atau sultan oleh masyarakat dianggap sebagai orang keramat yang mempunyai unsur-unsur magis. Gelar yang dia pakai seperti pangeran, panembahan, dan susuhunan membuktikan ke arah pengeramatan terhadap raja-raja atau sultan-sultan. Unsur tanggapan masyarakat terhadap dewa-raja pada zaman Indonesia-Hindu mengingatkan pada tanggapan pandita-raja pada zaman perkembangan Islam. Jadi, jelas hubungan antara makam sultan dengan Masjid Agung tidak terpisahkan dalam masyarakat Indonesia dahulu. Masjid Demak, Cirebon, Banten, dan Ampel sering kali dianggap keramat, karena berhubungan dengan pendiri-pendirinya. Di masjid-masjid tersebut masyarakat yang menyebut dirinya kaum muslimin tetap berkunjung pada waktu-waktu tertentu untuk berziarah ke makam raja-raja dan mengunjungi pula masjid-masjid yang dianggap keramat itu.

Masjid-masjid Agung, Raya, atau Jami yang ada di pusat kota-kota kerajaan, pada hari-hari Jumat dan hari-hari tertentu lainnya seperti

---

291 C.A. Mees, *op. cit.*, hlm. 245

292 L.W.C. van den Berg, *Encyclopaedie Neaerlandsch–Indie*, *op. cit.*, hlm. 584

293 G.F. Pijper, *Fragmenta Islamica, Studien voor het Islamisme in Nederlandsch Indie*, Leiden, E.J. Brill, 1934, hlm. 16–17

294 H.A.R. Gibb and Kramers, *Shorter Encyclopaedie of Islam*, Leiden, E.J. Brill, 1953, hlm. 334

Idul Fitri, Idul Adha, dihadiri pula oleh sultan. *Babad Banten* dan *Babad Tanah Jawi*, menyebut-nyebut kehadiran sultan di masjid. Kehadiran sultan di samping melakukan ibadah bersama-sama dengan seluruh tokoh masyarakat kota pusat kerajaan, mungkin dipergunakan pula untuk memerhatikan bagaimana loyalitas penguasa-penguasa di bawah raja dan juga tokoh-tokoh ulama serta masyarakat umumnya terhadap sultan. Di beberapa masjid dari abad ke-18 terdapat bagian yang disebut *maksura*, suatu tempat yang dikhususkan untuk raja atau sultan pada waktu sembahyang Jumat, misalnya terdapat di Masjid Agung Yogyakarta dan Masjid Jami Sumenep.

2. Organisasi Tempat-Tempat Peribadatan

Dari uraian di atas telah diketahui jenis-jenis tempat peribadatan dan fungsinya. Fungsi masjid sangatlah luas, tidak hanya menyangkut tempat sembahyang tetapi juga berhubungan dengan urusan *wakaf*, urusan pendidikan keagamaan, urusan peradilan, hukum Islam, zakat, dan lain-lain. Dengan demikian, masjid dapat dianggap sebagai pusat kehidupan masyarakat yang mengilhami kehidupan masyarakat umum di luar masjid. Karena itu, masjid, lebih-lebih yang terdapat di pusat kota kerajaan, biasanya mempunyai suatu organisasi yang memberi wadah bagi pejabat-pejabatnya untuk mengurus segala sesuatu mengenai masjid dan urusan-urusan keagamaan.

Di Aceh kepala-kepala *mukim*, mula-mula mungkin seluruh atau sebagian besar bertugas mengurus soal-soal keagamaan. Nama jabatan *imeum* (Arab; imam) dekat hubungannya dengan masjid (*meuthigit*) yang merupakan pusat wilayah serta pusat peribadatan.[295] Di Aceh terdapat beberapa masjid raya (*meuthigit* raya) yang didirikan pada masa Makuta Alam (1607–1636) dan beberapa nama masjid raya pada setiap *segi* yang didirikan pada masa itu. Masjid-masjid sekitar daerah keraton antara lain masjid raya Indrapuri untuk 22 mukim, masjid raya Indrapurawa untuk 25 mukim, masjid raya Indrapatra untuk 26 mukim. Di daerah lainnya yaitu di Pedie juga terdapat sisa masjid raya dari masa Makuta Alam atau Iskandar Muda. Kedudukan *imeum-imeum* selalu ditentukan di bawah *uleebalang*, sedang dalam hal-hal tertentu mereka ada di atas kepala-kepala *gampong*.[296]

Di dalam babad, hikayat, dan berita-berita asing kadang-kadang kita menemukan sebutan *kadi* atau *kali*, penghulu. Jabatan ini sering kali dihubungkan dengan jabatan pimpinan pengurus peradilan dan hal-hal yang berkenaan dengan keagamaan. Di Aceh peradilan keagamaan selalu dihadiri

295 C. Snouck Hurgronje, *op. cit.*, Ie dl, hlm. 86
296 *Ibid.*, hlm. 87

oleh *kadi*.[297] Di Banten, seperti diceritakan dalam babad, kali (kadi) juga berperan dalam penobatan seorang raja atau putra mahkota.[298] Contohnya adalah pergantian almarhum Maulana Muhammad oleh putranya yang masih kecil. Akan tetapi, seperti dikatakan di atas, kadi memutuskan perkara-perkara yang bersifat umum, dan apabila tidak berhasil pada taraf terakhir perkara tersebut dapat diputuskan oleh sultan sendiri.[299]

Kecuali sebutan *kadi* atau *kali* di Jawa, dan daerah-daerah yang mendapat pengaruh Jawa, ada pula sebutan *penghulu*. Di dalam *Hikayat Banjar* pada masyarakat kerajaan Banjarmasin terdapat sebutan *tuan kadi* dan *penghulu* yang dihubungkan fungsinya sebagai kepala yang mengurus administrasi hukum keagamaan atau kepala yang mengurus administrasi masjid di ibu kota kerajaan.[300]

Di Jawa, kepala pengurus masjid, yaitu penghulu, mempunyai banyak kewajiban dan kegiatan sebagai penasihat untuk dewan daerah dan menentukan semua pengaduan yang berhubungan dengan keagamaan dan persoalan keluarga. Dalam hubungan ini C.K. Nicholson berpendapat bahwa penghulu beserta pejabat-pejabat masjid lainnya menjalankan peran kekuasaan yang terpandang dan menguatkan Islam melalui daerah sekitarnya.[301]

Dalam *Pepakem Cerbo*n dari tahun 1768 perbedaan fungsi *penghulu* dengan *jaksa* diungkapkan sebagai berikut:

> *drigama pangangge ning jaksa pipitu agama panganggening para panghulu sekawan, toyagama punika silem.*[302]

Dari kutipan tersebut jelas bahwa fungsi penghulu dihubungkan hanya dengan peradilan keagamaan, sedangkan jaksa dengan peradilan umum (*dirgama*). Hazeu berpendapat bahwa istilah penghulu baru timbul pada masa setelah kedatangan Islam, tetapi fungsinya dihubungkan dengan zaman Hindu-Jawa di mana pendeta-pendeta juga memutuskan perkara-perkara yang tidak dapat diputuskan oleh jaksa. Dalam hubungan ini, buku-buku hukum dari abad ke-17 memberikan bukti adanya pengaruh Islam yang lambat laun memasuki kehidupan rakyat dan raja serta juga memengaruhi hukum, atau disebut *surambi* dalam kerajaan-kerajaan.[303] Soeripto berpendapat bahwa hukum atau *surambi* menunjukkan hakim

---

297 A.K. Dasgupta, *op. cit.*, hlm. 87
298 R. Hoesein Djajadiningrat, *op.cit.*, hlm. 40
299 *Ibid.*, hlm. 54
300 J.J. Ras, *op. cit.*, hlm. 554, 578
301 C.K. Nicholson, *The Introduction of Islam into Sumatra and Java: A Study in Culture Change*, Disertasi University of California, 1965, hlm. 75
302 G.A.J. Hazeu, "Tjeribonsche Wetboeck, (Pepakem Tjerbon) van het jaar 1768, in tekst en vertaling", *VBG*, LV 22–stuk, 1905, hlm. 142
303 *Ibid.*, hlm. 144–145

keagamaan dari kewibawaan raja.[304] C. Snouck Hurgronje mengatakan bahwa pada permulaan islamisasi di Indonesia, ahli-ahli agama biasanya berada di bawah kepegawaian masjid. Oleh karena itu, peradilan keagamaan erat hubungannya dengan masjid, dan ini berjalan tentu setelah rakyat dan penguasa-penguasa menerima Islam. Di Jawa *surambi* adalah ruang pengadilan untuk pengaduan-pengaduan di mana hukum agama dapat memutuskannya. Di suatu daerah hal ini mempunyai peran hukum yang lebih besar daripada di daerah lain, tetapi soal-soal keluarga dan soal-soal warisan di mana pun cukup dimasukkan di sini. Di *surambi*, penghulu atau kepala masjid, terutama pada hari Kamis dan Senin, mengadakan persidangan yang dihadiri juga oleh ahli-ahli masjid untuk meneliti dan menyelesaikan segera hal-hal yang telah diajukan masyarakat kepada mereka.[305]

Kemungkinan besar *kadi*, *kali*, atau penghulu merupakan pimpinan keagamaan dan pengadilan keagamaan, yang membawahkan pegawai-pegawai pengurus masjid. Pegawai-pegawai yang termasuk pengurus harian masjid, biasanya terdiri tidak kurang dari empat orang imam yaitu yang berkewajiban memimpin sembahyang atau salat setiap hari, setiap Jumat, dan setiap tahun (Idul Fitri, Idul Adha). Kemudian *khatib*, seorang pegawai masjid yang biasanya berkhotbah atau berpidato pada perayaan, juga menangani sebagian tugas imam. Kecuali *khatib*, ada pegawai yang bertugas untuk berazan pada waktu sembahyang akan dimulai, disebut *bilal* di Sumatra atau *modin* di Jawa. Ada pula pegawai yang disebut *merbot* (di Jawa) yang berkewajiban memukul *bang* atau *beduk* sebagai tanda pemberitahuan waktu dimulainya sembahyang, mengurus kebersihan masjid, membersihkan tikar, alat-alat perkakas masjid, mengisi air *kulah*, dan sebagainya.

Masjid bukan milik perseorangan, untuk pemeliharaannya memerlukan dana. Karena itulah masjid mempunyai lembaga yang disebut *bait-al-mal* (kas-harta). Dananya antara lain diperoleh dari hasil tanah-tanah *wakaf*, *perdikan*, uang zakat dan fitrah, amal; pemberian orang-orang pengunjung makam-makam yang berdekatan dengan masjid, biasanya berupa uang, makanan, dan lain-lain; upah atau ongkos perkawinan, ongkos perkara (biasanya 1/10 dari denda perkara keagamaan), dan lain-lain.[306] Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, diperlukan pula pegawai-pegawai.

3. Upacara-Upacara

Dalam kehidupan masyarakat kota, terutama yang berfungsi sebagai pusat kerajaan, upacara-upacara yang bersifat keagamaan dan yang bersifat umum serta berhubungan dengan kerajaan, telah menjadi adat kebiasaan.

304 Soeripto, hlm. 21 catatan kaki 3
305 C. Snouck Hurgronje, "De Islam in Nederlandsch–Indie", 1, 1913, *VG*, IV, II, hlm. 367
306 P.A. van der Lith, *Encyclopaedia van Nederlandsch–Indie, H–M, op. cit.*, hlm. 583–586

Dalam babad-babad, hikayat-hikayat, dan berita-berita asing disebutkan bahwa upacara dan pesta-pesta dihubungkan dengan kerajaan, seperti penobatan raja atau putra mahkota, khitanan, pernikahan putra-putri raja, kelahiran putra-putri raja, dan lain-lainnya yang berkenan dengan kehidupan raja dengan keluarga; upacara dan pesta dengan penerimaan utusan-utusan kerajaan asing, upacara Maulud Nabi, hari raya, dan hari-hari besar lainnya. Upacara-upacara dan pesta-pesta tersebut biasanya dimeriahkan oleh bermacam-macam keramaian.

Gambaran tentang pernikahan raja serta penobatan raja dapat kita ambil contohnya pada *Hikayat Banjar* yang menggambarkan cara raja dan putri berdandan, kemudian diarak di atas *jempana* (tandu) dengan diiringi bunyi-bunyian gamelan dan bedil serta sorak-sorai orang-orang di sepanjang jalan.[307] Pengiringnya para patih dan *tumenggung*, istri-istri menteri, pujangga dan penghulu, keluarga raja, dan rakyat banyak. Setelah keduanya menginjakkan kaki di atas kepala kerbau disusul berturut-turut oleh Lambu Mangkurat Aria Megat Sari dan Tumenggung Tatah Jiwa, Patih Baras, Patih Pasi, Patih Luhu, dan lain-lain; tidak ketinggalan istri para menteri dan pujangga dan penghulu bersama-sama meresmikan pernikahan raja. Setelah dimandikan, dihamburkan beras kuning dan segala bunyi-bunyian diperdengarkan. Selanjutnya dalam upacara itu dipergelarkan segala macam tontonan antara lain: *marakit, wayang wong, topeng, wayang gadogan, wayang purwa babaksaan, baksa tombak, baksa panah, baksa dadap, baksa tameng*, dan *berjoget*. Para parakan yang terdiri dari empat puluh anak dara juga turut serta dalam perayaan. Tiap hari Sabtu raja dihadap segenap menteri dan rakyatnya pada *sitilohor* dengan diramaikan oleh gamelan *si Rabut Paradah, si Rarasati*, dan *bende* bernama *si Macan*.

Hikayat Raja-Raja Pasai memberi suatu gambaran kepada kita bagaimana upacara kelahiran putra-putri Ganggang, permaisuri sultan Malik as-Salih, sebagai berikut:

> ... Maka dititahkan baginda orang memalu genderang dan segala bunyi-bunyian berjaga jaga seperti adat segala raja-raja beranak. Setelah genaplah tujoh hari tujoh malam baginda berjaga-jaga bersuka-sukaan makan-minum masing-masing membawa kesukaannya, maka pada hari berjijak tanah beraqiqa maka segala rakyat dan menteri hulubalang pun berhimpunlah makan-minum. Setelah sudah-sudah maka baginda memberi derma kurnia akan segala menteri dan hulubalang dan rakyat besar dan kecil dan segala fakir miskin sekaliannya. Setelah sudah maka sultan menamai anakanda baginda itu Sultan Maliku'l Tahir. Setelah sampai umur baginda akil balig, maka ia dirayakan dalam negeri Samudra itu.[308]

---

307 J.J. Ras, *op. cit.*, hlm. 87

308 A.H. Hill, "Hikayat Raja-Raja Pasai: A Revised Romanisation & English Translation", *IMBRAS*, Vol. XXXIII, Part 2, June, 1960, hlm. 63

Dalam *Sajarah Banten* ada pula gambaran tentang pertunangan serta perkawinan seorang putra mahkota Pangeran Pekik, yaitu Sultan Abu'l Ma'ali Ahmad dengan Martakusuma, putri Pangeran Jakarta. Dalam upacara pernikahan tersebut diselenggarakan pesta besar yang dihadiri oleh orang-orang Cina, Keling, Inggris, dan Belanda. Yang mengurus pesta besar tersebut adalah pamannya, seorang mangkubumi, yaitu Pangeran Rana Manggala.[309]

Seperti halnya pada *Hikayat Raja-Raja Pasai* tentang perayaan berjejak tanah putra sultan, maka dalam *Sajarah Banten* pun ada contohnya yaitu pada putra Pangeran Dipati, yang kelak terkenal dengan julukan Sultan Ageng Tirtayasa. Upacara pesta diselenggarakan atas pimpinan Pangeran Madura. Dalam perayaan tersebut dipertontonkan permainan *raket*; orang-orang laki-laki yang turut dalam perayaan tersebut ternyata juga mempertunjukkan permainan yang diambil dari siklus cerita Panji. Pada pesta itu orang-orang Belanda dan Inggris turut mengambil bagian dan mempertunjukkan macam-macam permainan.[310]

Dalam upacara-upacara tersebut *saptonan* (*sasaptonan*) sering pula dilakukan dan diselenggarakan tiap hari Sabtu.

---

309 R. Hoesein Djajadiningrat, *op. cit.*, hlm. 46–47, pupuh XXXII
310 *Ibid.*, hlm. 66–67, pupuh LV

Bab VII
Reaksi Kerajaan-Kerajaan Islam terhadap Penetrasi Barat

A. Situasi Kerajaan-Kerajaan dan Penetrasi Bangsa-Bangsa Eropa

1. Situasi dan Kondisi Kerajaan-Kerajaan Masa Kedatangan Orang-Orang Barat

Kota Malaka dikenal sebagai pintu gerbang Nusantara. Agaknya julukan itu diberikan karena perannya sebagai pintu masuk bagi pedagang-pedagang asing yang hendak masuk dan keluar pelabuhan-pelabuhan di kepulauan Indonesia.

Malaka pada akhir abad ke-15 dikunjungi oleh para saudagar yang datang dari jazirah Arab, Asia Selatan (India), Asia Tenggara, Cina, dan dari wilayah Nusantara sendiri. Pada waktu itu daerah ini merupakan pusat perdagangan di Asia. Dengan demikian, tidak aneh jika penduduk Malaka pada akhir abad ke-15 ini bercampur dengan anasir-anasir asing.[1]

Penduduk asli dan para pendatang tinggal di daerah-daerah khusus.[2] Angin-angin yang bertiup di daerah kepulauan memungkinkan pedagang-pedagang bertemu pada waktu yang sama di Malaka. Semua kapal-kapal, baik yang datang dari Asia Barat maupun yang datang dari Asia Timur, menggunakan sistem angin ini untuk pelayaran mereka. Saat-saat yang sangat ramai di Malaka adalah antara bulan Desember dan Maret.[3]

Sebagai daerah penghasil, Malaka sebenarnya tidak begitu berarti, akan tetapi letak geografisnya sangat menguntungkan. Malaka menjadi jalan silang antara Asia Timur dan Asia Barat karena itu Malaka dapat menjadi kerajaan yang berpengaruh atas daerah sekitarnya. Dari daerah sekitarnya itu juga Malaka memungut upeti.

Daerah-daerah yang berada di bawah pengaruhnya kebanyakan terletak di Sumatra, di antara yang terpenting adalah daerah Sungai Kampar. Dari sinilah Malaka menjalankan pengawasannya terhadap

---

1 M.A.P. Meilink–Roelofsz, *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1962, hlm. 36
2 *Ibid.*, 1963, hlm. 37
3 *Ibid.*, hlm. 38

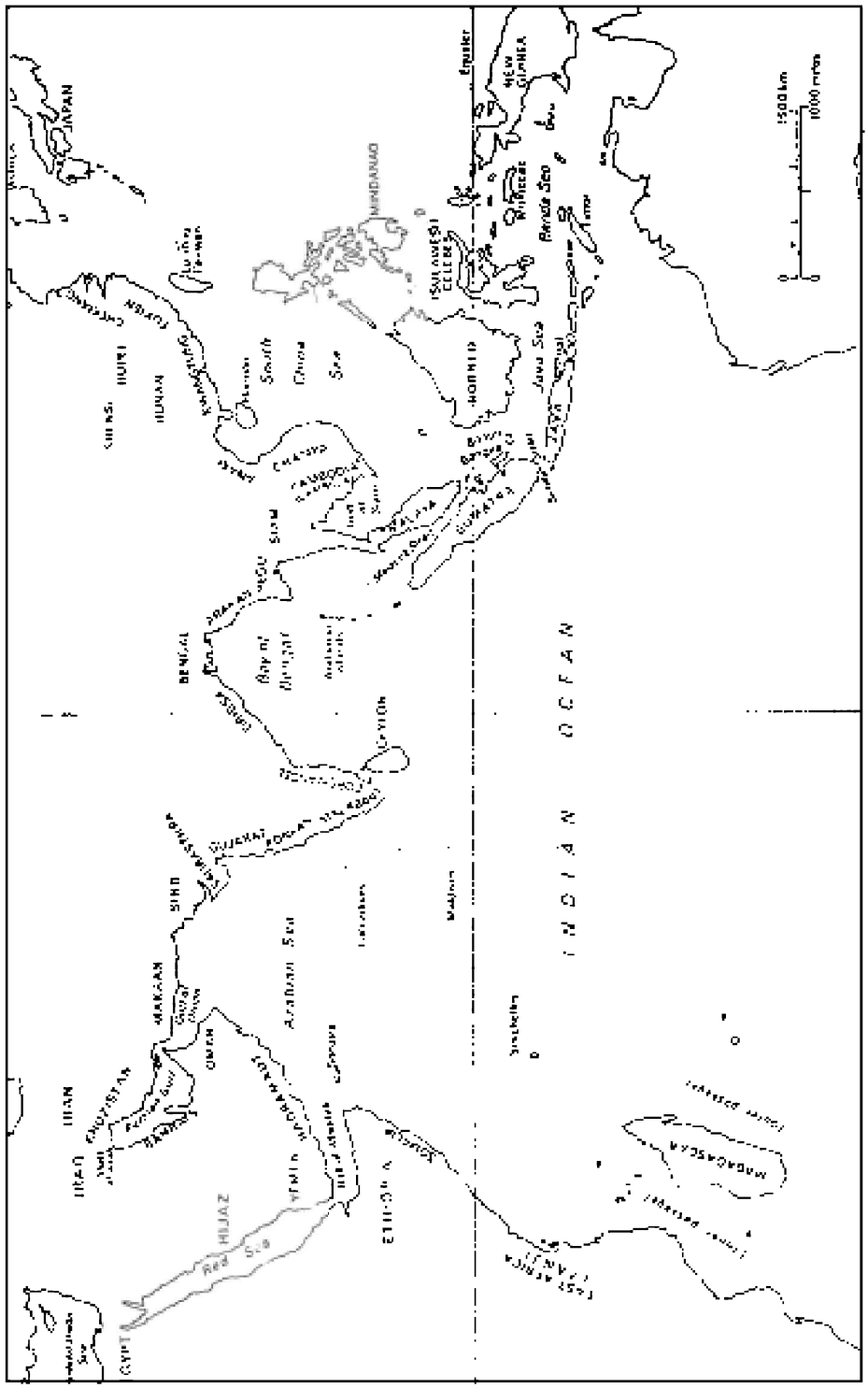

Gambar 7.1 Wilayah-wilayah perdagangan di Samudra Hindia

daerah di bawah pengaruhnya yang lain, yakni Minangkabau. Dari daerah ini pula Malaka dapat mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan mengadakan ekspansinya ke utara dan ke selatan Sumatra.

Di samping daerah Kampar, Siak pun jatuh di bawah pengaruhnya sehingga Malaka dapat memengaruhi perdagangan emasnya.[4] Daerah itu masih tetap membayar upeti kepada Malaka hingga kedatangan orang-orang Portugis. Upeti yang dibayar oleh Siak kepada Malaka berupa emas. Di samping perluasan pengaruh kekuasaannya ke daerah-daerah di Sumatra, Malaka dapat juga menaklukkan kepulauan Riau-Lingga. Sebagai upeti yang diberikan daerah yang dikuasai Malaka adalah bahan pangan untuk diekspor. Tenaga-tenaga manusia pun diambil dari sini. Penduduk daerah ini terkenal sebagai orang-orang yang suka berperang.

Terhadap daerah-daerah lain, selain yang disebut di atas, Malaka tidak meluaskan pengaruhnya lagi. Pada abad ke-16, Malaka merasa perlu mengambil sikap ini karena adanya ancaman dari utara. Malaka merasa bahwa Siam lebih berbahaya daripada Cina. Di samping itu, Malaka masih tergantung dari Siam dalam persediaan beras. Orang-orang dari Siam banyak juga yang datang dan menetap di Malaka.

Hubungan yang dijalin antara Malaka dan Jawa sangat baik dan hati-hati. Hubungan yang baik ini perlu karena Malaka juga tergantung akan bahan-bahan pangan dari Jawa. Ketika hubungan dengan Siam memburuk, hubungan dengan Jawa makin membaik. Di samping ketergantungan Malaka pada bahan pangan dari luar untuk kerajaannya sendiri, Malaka juga memerlukan pangan bagi kapal-kapal dagang asing yang datang ke Malaka. Persediaan dalam bidang pangan dan rempah-rempah harus selalu cukup supaya dapat melayani semua pedagang. Para pedagang Jawa juga membawa rempah-rempah dari Maluku ke Malaka.

Pada abad ke-15 Malaka mengirimkan upeti kepada raja-raja yang beragama Hindu di Jawa untuk mendapat bantuan dan hasil-hasil pangan dari Jawa. Hubungan ini mengendur pada abad ke-16 karena kekuasaan kerajaan-kerajaan yang dikuasai raja-raja yang beragama Hindu mulai mundur. Majapahit mulai terdesak oleh kerajaan-kerajaan di pantai utara Jawa, sebaliknya kerajaan di pantai utara Jawa mulai berkembang karena perdagangan. Malaka yang pada abad ke-15 telah memeluk agama Islam mulai mencari sahabat yang seagama di pantai utara Jawa sehingga membawa kemunduran bagi Majapahit.

Hubungan Malaka dengan Pasai sangat hati-hati karena Pasai juga mempunyai hubungan baik dengan Jawa. Hubungan perdagangan antara

4 *Ibid.*, hlm. 30

Jawa dengan Pasai ini tidak diganggu oleh Malaka. Namun, dengan cara halus Malaka berhasil juga menarik orang-orang Jawa datang ke Malaka tanpa merusak hubungan dengan pedagang-pedagang Pasai yang juga datang ke Malaka untuk berdagang. Para pedagang Pasai membawa lada di pasar Malaka. Dengan kedatangan pedagang Jawa dan Pasai, perdagangan di Malaka menjadi lebih berarti bagi pedagang-pedagang Cina. Dengan demikian, pelabuhan Malaka menjadi lebih ramai, banyak pedagang-pedagang Islam yang sebelumnya menetap di Pasai pindah ke Malaka sehingga perdagangan yang semula dilaksanakan di Pasai, sekarang beralih ke Malaka. Meskipun banyak orang pindah dari Pasai ke Malaka untuk berdagang, hubungan antara Malaka dengan Pasai tetap baik. Beras dan lada merupakan tali pengikat hubungan Malaka dengan Pasai.

Di samping Malaka maju dalam bidang ekonomi, bidang keagamaan juga demikian. Dengan kemajuan Malaka, banyak alim ulama datang dan ikut mengembangkan agama Islam di kota ini. Penguasa dengan sendirinya mendorong perkembangan. Meskipun penguasa belum memeluk agama Islam, pada abad ke-15 mereka telah mengizinkan agama Islam berkembang di Malaka. Penganut-penganut agama Islam diberi hak-hak istimewa bahkan untuk mereka dibangun sebuah masjid.

Pedagang-pedagang yang singgah di Malaka yang berasal dari Jawa dan pulau-pulau lain di Indonesia, banyak di antara mereka yang menjadi penyebar agama yang baru ini ke seluruh kepulauan di mana mereka mengadakan perdagangan.

Dari keterangan-keterangan yang telah disebut di atas dapat dikatakan bahwa kemajuan-kemajuan yang dialami Malaka tidak dapat dicapai jika kerajaan itu tidak mempunyai peraturan-peraturan tertentu, yang memberi jaminan lumayan kepada keamanan perdagangan.[5] Untuk ini terdapat aturan bea cukai, aturan tentang kesatuan ukuran, sistem pemakaian uang logam, dan sebagainya. Selain aturan-aturan tersebut, pemerintahannya juga sangat baik dan teratur.

Setelah melihat situasi daerah Malaka, bagaimanakah dengan daerah Aceh yang letaknya berdekatan?

Pada abad ke-16, Aceh mulai memegang peran penting di bagian utara Pulau Sumatra. Pengaruh Aceh ini meluas dari Barus di sebelah utara hingga sebelah selatan di daerah Indrapura. Indrapura sebelum di bawah pengaruh Aceh merupakan daerah pengaruh Minangkabau.[6]

Ketika orang-orang Portugis mulai datang ke Malaka pada permulaan abad ke-16, status politik Aceh masih merupakan suatu kerajaan takluk

5 *Ibid.*, hlm. 40

6 J. Karthirithamby–Wells, "Achenese control over West Sumatra up the treaty of 1663", *Journal of Southeast Asian History*, Vol. X. No. 3, Desember 1969, hlm. 453

dari kerajaan yang ada di Sumatra Utara, yaitu Pidie. Akan tetapi, Aceh kemudian melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Pidie berkat seorang tokoh kuat yang menjadi penguasa Aceh pada waktu itu, yaitu Sultan Ali Muqhayat Syah (1514–1528).[7] Sultan inilah yang menjadi pendiri kerajaan Aceh. Kemajuan Aceh pada waktu itu sangat terpengaruh oleh kemunduran kerajaan Malaka yang mengalami pendudukan orang-orang Portugis. Orang-orang Portugis datang ke Malaka karena mereka telah mengetahui bahwa pelabuhan Malaka merupakan pelabuhan transito yang banyak didatangi pedagang dari segala penjuru angin. Hal ini sangat menarik perhatian orang-orang Portugis. Keadaan Malaka yang mulai mundur itu telah memberi kesempatan kepada Aceh untuk berkembang, dan ini masih mungkin, karena orang-orang Portugis belum menaruh perhatian penuh kepada Aceh pada waktu itu.

Ketika pada tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis, daerah-daerah pengaruhnya yang terdapat di Sumatra mulai melepaskan diri dari Malaka. Keadaan ini sangat menguntungkan kemakmuran kerajaan Aceh yang mulai berkembang. Di bawah pimpinan Sultan Ali Muqhayat Syah, Aceh mulai melebarkan kekuasaannya ke daerah-daerah sekitarnya. Operasi-operasi militer diadakan terhadap wilayah-wilayah ini tidak saja dengan tujuan agama dan politik, tetapi juga dengan tujuan ekonomi.

Ke utara Sultan Ali Muqhayat Syah memulai perangnya terhadap Pidie, Pasai, dan Daya. Dalam pertempuran dan pendudukan terhadap ketiga kerajaan ini, ia berhasil merebut senjata-senjata dari orang-orang Portugis yang terdapat di benteng-benteng mereka di Pidie. Di samping penyerbuan-penyerbuan yang sukses ini, tujuan ekonominya pun tercapai.[8]

Perang melawan Pidie yang tadinya semata-mata kelihatan bermotivasi politik, ternyata bagi Aceh mempunyai arti ekonomis yang lebih besar. Motif perluasan daerah kekuasaan ke sebelah selatan akan membuktikan bahwa motif ekonomi merupakan faktor yang tidak dapat disangkal, tetapi faktor agama pun memegang peran penting, karena Sultan Aceh menyerbu Pidie yang bersahabat dengan orang-orang Portugis, yang tidak beragama Islam. Dalam periode perluasan daerah kekuasaan Aceh yang terjadi antara tahun 1537 dan 1568, faktor politis, ekonomi, dan agama kelihatan sekali saling berkaitan. Kadang-kadang salah satu faktor yang disebut di atas, yaitu politik, ekonomi, atau agama menjadi kabur dalam menjalankan ekspansi karena salah satu faktor tampak lebih diutamakan. Kadang-kadang Aceh menganggap daerah yang bukan Islam, seperti daerah Batak sama

7 *Ibid.*, hlm. 455
8 *Ibid.*, hlm. 455

dengan daerah Indragiri dan Johor, yang telah bercorak Islam. Jadi, yang terpenting di dalam menjalankan ekspansi ini adalah faktor ekonomi. Untuk mengadakan ekspansi ke daerah-daerah, Aceh juga memakai pasukan asing, yang terdiri dari pasukan Turki, Arab, dan Abesinia. Ternyata pasukan ini sangat membantu sehingga peran kerajaan Aceh betul-betul menonjol.

Hubungan politis antara Aceh dan Minangkabau pada periode itu tidak begitu jelas, yang diketahui hanyalah bahwa Aceh mengambil penghasilan Minangkabau yang menuju pantai barat.[9] Sejak tahun 1511 banyak hasil perdagangan yang sedianya menuju Malaka pada waktu itu diangkut ke pantai barat. Di situlah pedagang-pedagang Gujarat datang dengan perahu dagangnya.

Hubungan politik antara Aceh dengan pantai barat berasal dari pemerintahan Alauddin Riayat Syah. Perluasan ke daerah Barus dijalankan oleh suami dari saudara perempuan Alauddin Riayat Syah. Karena ia berhasil menaklukkan Barus, ia diangkat oleh Alauddin Riayat Syah sebagai Sultan Barus. Dua putra Alauddin kemudian diangkat menjadi Sultan Aru dan Sultan Pariaman dengan nama resmi Sultan Ghori dan Sultan Mughal. Untuk menjaga keutuhan Aceh, di daerah-daerah pengaruh kekuasaan Aceh terdapat wakil-wakil dari Aceh.[10] Untuk menjalankan pemerintahan di wilayah yang begitu besar ternyata tidak mudah, apalagi bila rajanya sendiri tidak mempunyai wibawa yang kuat.

Ketika Sultan Alauddin meninggal, ia digantikan oleh seorang putranya yang bernama Husain. Sultan Husain ternyata tidak disukai oleh saudara-saudaranya yang telah menjadi sultan dari Pariaman dan Aru. Ia tidak disenangi oleh Sultan Fansur di Barus walaupun iparnya sendiri. Perang terjadi ketika ketiga sultan ini mengadakan perlawanan terhadap Husain. Mereka bertiga ini dibantu oleh *dato-dato*[11] dari Batak. Dalam pertempuran ini Sultan Aru dan Sultan Husain wafat sehingga yang tertinggal adalah Sultan Mughal dari Pariaman. Salah satu turunan sultan Pariaman menjadi Raja Bujang yang memerintah di Aceh dengan nama Sultan Ali Riayat Syah yang memerintah antara tahun 1586 hingga 1588.[12] Baru ketika Iskandar Muda memerintah didapat lagi berita tentang Aceh. Iskandar Muda berhasil membawa kembali daerah-daerah yang telah melepaskan diri dari Aceh ke dalam kekuasaannya. Daerah-daerah itu adalah Deli (1612), Johor (1613), Pahang (1618), Kedah (1619), Perak (1620), dan Nias (1624–1625).

---

9 *Ibid.*, hlm. 456
10 *Ibid.*, hlm. 457
11 *Ibid.*, hlm. 457
12 *Ibid.*, hlm. 458

Daerah Sumatra Barat bagi Aceh pada zaman itu selalu menarik karena daerah ini merupakan sumber komoditas perdagangan emas dan lada. Pada waktu itu permintaan akan emas dan lada dari para pedagang Gujarat dan Cina sangat tinggi, kemudian juga dari orang-orang Portugis, Belanda, dan Inggris. Dalam perluasan daerah Aceh, Sultan Iskandar Muda sangat pandai. Ia segera melihat pentingnya lada. Oleh sebab itu, ia berusaha untuk pertama-tama menaklukkan daerah-daerah penghasil lada di sekitar Aceh. Setelah daerah-daerah ini berada di bawah kekuasaannya, dengan mudah ia memerintahkan untuk membawa lada ini ke Kutaraja, dan menawarkannya kepada para pembeli dengan harga tinggi. Suatu ucapan yang terkenal dari Iskandar Muda adalah: "Barang siapa hendak membeli lada, harus datang dan memakannya dari tangannya." Ucapan ini ternyata bukan bualan.[13]

Di bawah pemerintahannya yang ketat, Iskandar Muda menuntut 15% dari produksi emas dan lada sebagai upeti. Sisa dari produksi itu dapat dijual dengan harga yang telah ditetapkan olehnya. Di bawah sistem monopoli perdagangan ini orang-orang asing hanya dapat berdagang di Kutaraja setelah mendapat izin dari Raja.[14] Izin untuk berdagang dengan orang asing di daerah lain yang berada di bawah pengaruh Aceh hanya pernah diberikan dua kali, yaitu pada Cornelis de Houtman dan James Lancaster dengan suatu tujuan politik.

Dengan pemberian izin ini ia mencari sekutu melawan orang Portugis di Johor. Yang diberi prioritas untuk datang berbelanja atau berdagang di Kutaraja adalah orang-orang Gujarat, yang membawa bahan-bahan ke Aceh, seperti pakaian dan sebagainya.

Jika keadaan Malaka dan Aceh dilihat sebagai kerajaan yang bercorak Islam yang menonjol pada abad ke-16, Demak merupakan salah satu kerajaan yang juga bercorak Islam yang berkembang di pantai utara Pulau Jawa pada abad ke-15. Orang yang berkuasa di Demak pada permulaan abad ke-16 adalah Raden Patah. Raden Patah ini adalah Pangeran dari Palembang yang kawin dengan seorang putri (cucu) Sunan Ampel. Raden Patah juga terkenal dengan nama Panembahan Jimbun.[15] Pate Rodim adalah Raden Patah, ayahnya adalah Angka Wijaya dari Palembang.[16] Raden Patah atau Pangeran Jimbun atau Rodim adalah raja yang pertama yang menganut agama Islam di Jawa. Sebelum Raden Patah berkuasa penuh di Demak, Demak masih menjadi daerah

---

13 *Ibid.*, hlm. 459
14 *Ibid.*, hlm. 461
15 Armando Cortessao, *The Suma Oriental of Tomé Pires*, Translated from the Portuguese MS in the Biblioteque de la Chambre des Deputes, Paris, Vol. I, Hakluyt Society, London, 1944, 185 note
16 *Ibid.*, hlm. 185

Majapahit. Akan tetapi, pada suatu ketika ia berontak terhadap Majapahit dan ia didukung oleh alim ulama.[17] Menurut babad-babad, pertempuran terjadi antara pasukan kerajaan Majapahit bercorak Hindu di daerah Majapahit dengan pasukan Demak. Kota Majapahit dimusnahkan, semua peralatan kebesaran Majapahit dibawa ke Demak. Sejak kemenangan ini Raden Patah menjadi Raja Demak. Namun, berdasarkan prasasti Jiu tahun 1486 yang terletak dekat Majasari (Jawa Timur), keruntuhan kota Majapahit tersebut diakibatkan oleh dinasti Girindrawardana dari Daha (Kadiri). Demikian pula berita Tomé Pires yang menyebutkan ibu kota kerajaan yang masih beragama Hindu di Dayo yang dapat disamakan dengan Daha, memperkuat dugaan bahwa pada masa Pate Rodim Sr. (Raden Patah) ibu kota kerajaan sudah pindah ke Daha atau Kadiri.

Japara juga berada di bawah pengaruh Demak. Dikatakan oleh Tomé Pires bahwa masih ada hubungan keluarga dengan Pate Rodim atau Raden Patah. Daerah Tegal yang terletak di sebelah barat Semarang adalah daerah takluk. Daerah ini juga menghasilkan bahan pangan. Semarang juga merupakan daerah pengaruh Demak yang diberikan kepada ayah mertua Raden Patah. Di samping mempunyai daerah takluk di pantai utara Jawa, masih ada daerah-daerah lain yang berada di bawah pengaruhnya, seperti di Sumatra, di daerah Palembang dan Jambi, dan di pulau-pulau yang terletak antara Kalimantan dan Sumatra.

Perdagangan yang dijalankan antara Demak dan Malaka terutama adalah beras dan bahan pangan yang lain. Hubungan perdagangan tersebut mulai terganggu sejak Malaka pada tahun 1511 dikuasai Portugis. Untuk mencegah bahaya dari orang-orang Portugis, Pati Unus mengadakan serangan ke Malaka pada tahun 1513 meskipun mengalami kegagalan. Dapat dikatakan bahwa pada pertengahan abad ke-16 Demak telah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Bagian pedalaman dari kerajaan Majapahit hampir semua telah menjadi daerah takluknya, sedangkan di bagian barat sebagian daerah Pajajaran telah menjadi daerah yang ada di bawah pengaruhnya. Meskipun tidak mutlak, Cirebon juga ada di bawah Demak.

Pelabuhan-pelabuhan penting yang telah berada di bawah pengaruh Demak adalah Tuban, Japara, Sedayu dan Kota Kembar, Jaratan, dan Gresik.[18] Tak jauh dari kedua tempat terakhir ini terdapat tempat kediaman Sunan Giri yang mempunyai pengaruh keagamaan hingga ke daerah Maluku, yaitu Ternate dan Hitu di Pulau Ambon.

---

17 E.S. de Klerck, *History of the Netherlands East Indies*
18 Tidak terbaca

Ekspansi yang diadakan Demak ke Jawa Barat pada tahun 1522 dan 1526 adalah dengan tujuan untuk mendahului orang Portugis, yang sebelum itu telah singgah ke daerah ini, tetapi belum mendirikan suatu kantor dagang.[19]

Setelah Sultan Trenggono meninggal, yang mungkin terjadi pada tahun 1546[20], di kerajaan Demak timbul keguncangan politik yang menyebabkan pembunuhan di kalangan keluarga Sultan itu sendiri.

Sunan Prawata merasa dirinya sebagai ahli waris yang sah atas takhta kerajaan Demak, tetapi ia kemudian dibunuh oleh putra pamannya. Setelah itu, Sultan Kalinyamat merasa berhak atas kerajaan itu, tetapi ia mengalami nasib yang sama seperti Sunan Prawata. Pembunuh ini dapat dimusnahkan oleh Adiwijaya yang bersekutu dengan Kalinyamat. Setelah itu Adiwijaya mengangkat dirinya menjadi sultan Demak.

Pada tahun 1522 seorang Portugis bernama Jorge d'Albuquerque yang menjabat sebagai Gubernur Malaka mengirim seorang utusan ke Raja Samian (Raja Sunda) untuk mencari hubungan dagang. Orang Portugis yang diutus ini adalah Henrique Leme yang diterima dengan baik oleh Raja Sunda. Sikap baik terhadap kedatangan orang-orang Portugis ini diambil dengan alasan, *pertama* untuk hubungan dagang dan yang *kedua* adalah mendapat sahabat dalam menghadapi kekuatan Demak yang pada waktu itu sedang mengadakan ekspansi ke Jawa Barat.

Kepada orang-orang Portugis raja memberi izin untuk membuat kantor dagang dan hubungan dagang yang bebas, setelah seorang wakil dari kerajaannya, Syahbandar Bengar, memutuskan pembuatan kontrak itu. Orang-orang Portugis diberi suatu tempat di muara sungai yang diberi nama Kalapa. Izin untuk mendirikan kantor dagang itu tidak sampai terpakai, karena, sementara orang Portugis sibuk mengurus keadaan di negerinya sendiri, daerah Jawa Barat telah dimasuki pengaruh dari Demak, yang membawa agama baru, yaitu Islam.

Jika kita kembali ke tahun 1511, kita dapat mengerti mengapa Banten sebagai suatu kerajaan dapat maju dengan pesat. Kejadian-kejadian di sekitar Selat Malaka merupakan suatu berkah bagi perkembangan Banten.

Seperti diketahui sejak Malaka pada tahun 1511 jatuh ke tangan Portugis, pedagang-pedagang dari Persia, India, Cina, dan daerah-daerah lain yang biasanya datang pada musim angin tertentu bertemu di Malaka, mulai menghindari kota itu. Hal ini disebabkan politik Portugis yang hendak memaksakan sistem monopoli kepada pedagang-pedagang yang sudah terbiasa dengan sistem perdagangan bebas.

---

19 R.A. Hoesein Djajadiningrat, *Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten, Bijdrage terkenschetsing van de Javaansche Geschiedschrijving*, Diss., 1923, Leiden, Haarlem Yoh. Enschede en Zonen, 1913, hlm. 87

20 E.S. de Klerck, *op. cit.*, hlm. 154

Pedagang-pedagang yang datang ke Malaka harus mendapat izin dahulu dari pemerintah Portugis di Malaka. Untuk menghindarkan diri dari keadaan yang tidak menyenangkan ini para pedagang mencari jalan tanpa izin dari Portugis, yaitu melalui Selat Sunda. Dengan demikian, ditemukan jalan lain untuk dapat melaksanakan perdagangan rempah-rempah. Dengan itu Banten mulai berkembang karena terletak di tengah jalan perdagangan rempah-rempah ke dan dari Maluku. Banten menjadi tempat untuk membeli bekal perjalanan ke tempat perdagangan rempah-rempah dan barang dagangan lain dari luar negeri.

Daerah Jawa Barat yang berada langsung di bawah pengaruh Banten adalah Jakarta yang dikuasai oleh Tubagus Angke, suami Ratu Pembayum, putri Sultan Hasanuddin. Jakarta kemudian dikuasai oleh Pangeran Jakarta yang memperistrikan cucu Hasanuddin, putri Pajajaran. Cucu Hasanuddin ini juga bernama Pembayum. Jakarta pada masa pemerintahan Pangeran Jakarta Wijayakrama dirampas oleh Kompeni.[21] Daerah pengaruh Banten di luar Jawa Barat adalah Lampung, yang sejak pemerintahan Hasanuddin telah berada di bawah kekuasaan Banten.[22] Oleh karena Banten merupakan persinggahan pedagang-pedagang baik Eropa maupun Asia dan Indonesia, Banten harus mempunyai persediaan lada yang cukup yang pada waktu itu merupakan barang perdagangan utama. Lada ini diperoleh dari daerah kekuasaannya di Lampung dan Jakarta.[23] Perkebunan lada di daerah-daerah itu diperluas untuk memenuhi kebutuhan perdagangan yang berkembang. Akan tetapi, kemudian situasi politik dan ekonomi perdagangan terganggu oleh kedatangan orang Belanda pada tahun 1619 yang berhasil menjadikan Batavia pusat politik dan perdagangan.

Setelah membicarakan daerah-daerah di sebelah barat Nusantara, baiklah kita tinjau daerah Indonesia bagian timur. Raja-raja tertua di Maluku adalah raja-raja dari Jailolo, akan tetapi karena penduduk Ternate, Tidore, dan Bacan lebih banyak daripada Jailolo, para penguasa dari ketiga daerah ini lebih menonjol. Kerajaan Ternate terjadi kira-kira pada abad ke-13, dan ibu kota kerajaan ini ditempatkan di Sampalu. Di tempat ini pada abad-abad kemudian orang-orang Portugis ikut mencampuri masalah takhta kerajaan.[24] Pada permulaan abad ke-14 kerajaan Ternate mulai maju karena berkembangnya perdagangan rempah-rempah. Perdagangan rempah-rempah dijalankan oleh orang-orang Jawa dan Melayu yang datang ke kepulauan Maluku, khususnya ke Ternate dan

---

21 R.A. Hoesein Djajadiningrat, *op. cit.*, hlm. 90
22 *Ibid.*, hlm. 90
23 M.A.P. Meilink–Roelofsz, *op. cit.*, hlm. 24
24 Mr. de Jonge, *Opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost–Indie*, 2 de deel, 's-Gravenhage, Martinus Nyhoff, MDCCLXIC, hlm. 167

Tidore. Perdagangan rempah-rempah yang dijalankan oleh orang-orang Ternate, Jawa, dan Melayu kemudian menjadi lebih ramai lagi dengan datangnya orang-orang Arab.

Tidak jarang di antara para pedagang ini ada yang menetap di pulau-pulau ini. Kemajuan yang dialami kesultanan Ternate menimbulkan iri hati kerajaan-kerajaan sekelilingnya, yaitu Tidore, Bacan, dan Obi. Mereka juga ingin maju seperti Ternate. Oleh sebab itu, mereka menamakan dirinya raja.[25] Karena kecemburuan yang ada antara kerajaan-kerajaan ini, sering timbul perang antara ketiga kerajaan tersebut di satu pihak dan Ternate di lain pihak. Hal ini dapat diselesaikan dengan cara keempat raja ini mengadakan perundingan di Pulau Motir untuk mencapai suatu persetujuan sehingga tidak lagi timbul perang di antara mereka. Persetujuan ini kemudian terkenal dengan nama Persetujuan Motir.[26] Dalam persetujuan ini diputuskan bahwa raja Jailolo akan menjadi raja kedua, karena pentingnya, Tidore yang ketiga, dan Bacan yang keempat. Akan tetapi, persetujuan ini tidak berlangsung lama, karena urutan ini kemudian berubah pada akhir abad ke-15. Sultan Ternate kemudian dapat menempatkan diri lagi sebagai raja utama di Maluku.

Selain orang-orang yang telah disebut datang ke Ternate, datang juga orang-orang Cina untuk mengadakan perdagangan rempah-rempah.

Ternate tidak saja mengalami kedatangan penduduk baru, tetapi penduduknya sendiri juga mengadakan perpindahan yaitu ke daerah gula. Karena adanya pertambahan penduduk baru ini, pulau ini kemudian mengakui kekuasaan Ternate. Dengan demikian, dapat dikatakan kekuasaan kerajaan Ternate bertambah.

Dengan menetapnya orang Melayu, Jawa, dan Arab di Ternate, agama Islam pun masuk ke daerah ini. Ketika Raja Zainal Abidin memerintah di Ternate ia mengambil kesempatan untuk belajar agama di Gresik. Di sini ia bertemu dengan kepala daerah Hitu dari Pulau Ambon yang beragama Islam, yaitu Pate Putih, yang datang ke Gresik dengan tujuan yang sama yaitu untuk belajar di pesantren. Antara keduanya diadakan persetujuan yang berakibat bahwa raja-raja Ternate kemudian mengklaim sebagian dari Pulau Ambon ini.

Mengenai Pulau Ternate juga telah diberitakan oleh Tomé Pires bahwa penduduk pulau ini merupakan orang-orang baik yang terbuka terhadap agama lain. Ia juga menyebutkan bahwa Ternate merupakan kerajaan yang terbesar di antara kerajaan-kerajaan lain karena Ternate memiliki jumlah perahu (yang disebut *kora-kora*) yang banyak.[27] Perahu-perahu yang dimiliki

25 *Ibid.*, hlm. 167
26 *Ibid.*, hlm. 168
27 Armando Cortessao, *op. cit.*, hlm. 214

Ternate sekitar seratus buah.[28] *Kora-kora* ini dipakai untuk mengadakan perang dengan tetangga-tetangganya dalam rangka perebutan pengaruh. Hasil rempah-rempah Ternate juga tidak sedikit terutama cengkih yang hasilnya sekurang-kurangnya 50 bahar setahun.

Seperti diketahui, kerajaan yang bercorak Islam di semenanjung selatan Sulawesi adalah Gowa–Tallo, Bone, Wajo, dan Soppeng. Kerajaan Wajo, Bone, dan Soppeng bersatu dalam persekutuan Tellum Pocco (tiga kerajaan), sedangkan antara Gowa–Tallo dan Tellum Pocco terjadi persaingan dengan hegemoni di semenanjung ini.

Letak kerajaan kembar Gowa-Tallo di semenanjung barat daya pulau Sulawesi sangat strategis dilihat dari sudut perdagangan rempah-rempah di kepulauan Nusantara ini. Dari buku *Wetboek voor Zeevarende van het Koninkrijk Mangkasar en Bougis op het eiland Celebes* dapat diketahui bahwa orang-orang Makassar dan Bugis sebagai pelaut telah mengarungi lautan Nusantara dan telah berlayar ke Semarang, Sumbawa, Timor, Bengkulu, Aceh, Perak, Malaka, Johor, Palembang, Banjarmasin, dan Manila.[29]

Karena perdagangan antara Malaka dan Makassar pada abad ke-16 sudah ramai, agama Islam dengan mudah juga disebar di Gowa–Tallo. Kerajaan ini menerima Islam pada tahun 1605. Raja yang terkenal dengan nama Tumaparisi–Kallona, adalah Raja Gowa yang berkuasa pada akhir abad ke-15 dan permulaan abad ke-16. Ia adalah raja yang memerintah kerajaannya dengan peraturan-peraturan dan memungut cukai dan juga mengangkat kepala-kepala daerah.[30] Pada saat pemerintahannyalah orang-orang Makassar mulai mencatat sejarah mereka.[31]

Gowa–Tallo adalah kerajaan yang biasanya juga disebut Kerajaan Makassar. Makassar sebetulnya adalah kotanya, sedang Gowa–Tallo nama kerajaannya. Tallo merupakan kerajaan yang berbatasan dengan Gowa, tetapi selalu bersatu dengan Gowa sehingga merupakan kerajaan kembar. Istana dari raja Gowa yang tertua, kerajaan Goa, tersebut terletak di Sombaopu. Orang-orang asing menamakan raja ini Raja Makassar atau Sultan Makassar.[32]

Tumaparisi Kallona, raja Gowa, melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah yang bertetangga, Selayar, Bulukumba, Maros, Mandar, Sulawesi Utara, dan Luwu ditaklukannya. Semua kerajaan yang baru direbut membayar pajak kepala kepada kerajaan Gowa–Tallo. Hanya kerajaan Bone yang tidak dapat ditaklukkan pada tahun 1562–1565.

---

28 *Ibid.*, hlm. 214
29 F.W. Stapel, *Het Bongaaisch Verdrag*, J.B. Wolters UM Groningen, Den Haag, 1922
30 *Ibid.*, hlm. 3
31 *Ibid.*, hlm. 3
32 C. Skinner, "Sjair Perang Makasar by Entje Amin", edited and translated by Skinner, *VKJ*, dee 40, 1963, 2 note 5

Hubungan kerajaan Gowa–Tallo dengan kerajaan Ternate sangat baik, dan pada tahun 1580 kedua kerajaan tersebut mengadakan persekutuan. Ternate pada waktu itu berada di bawah Sultan Baabullah.[33] Sultan Baabullah mencoba untuk membuat raja Gowa–Tallo menganut agama Islam, tetapi tidak berhasil. Islam baru berhasil masuk di Gowa–Tallo pada waktu seorang Melayu, yaitu Dato'ri Bandang, datang ke Gowa–Tallo. Raja Alauddin (1591–1638)[34] adalah raja pertama yang memeluk agama Islam. Setelah Gowa–Tallo menerima agama Islam (1605), Bone mengikutinya pada tahun 1606.

Sebetulnya kerajaan Gowa–Tallo tidak mempunyai banyak komoditas untuk diperdagangkan. Hanya beras yang banyak terdapat di sana. Kerajaan Gowa–Tallo hanya penting sebagai sebuah pelabuhan transito. Di sini banyak pedagang-pedagang yang datang dari barat ke Maluku, mereka singgah untuk mengisi bekal untuk perjalanan selanjutnya. Kerajaan ini kemudian menjadi penting karena di sini terdapat juga rempah-rempah dari Maluku, yang diambil orang-orang Makassar dari daerah itu.

Selain itu, upeti-upeti yang harus dibawa ke Gowa–Tallo dari daerah takluknya ternyata juga menjadi incaran pedagang-pedagang asing. Pedagang-pedagang Jawa, Bugis, dan Melayu membawa barang-barang ke Gowa–Tallo untuk diperdagangkan di sana atau ditukar dengan rempah-rempah sehingga mereka tidak perlu lagi ke Maluku. Karena sikap raja yang sangat bijaksana yang tidak pandang agama, kerajaan Gowa–Tallo disinggahi oleh bermacam-macam bangsa Asia maupun bangsa Eropa.

Pada kira-kira tahun 1600 Sombaopu–Makassar atau pelabuhan dari kerajaan Gowa–Tallo yang oleh orang-orang Makassar disebut Ujungpandang merupakan pelabuhan yang sangat ramai yang menyediakan perbekalan bagi kapal-kapal yang hendak melanjutkan perjalanan, baik ke timur maupun ke barat. Rempah-rempah yang dapat diperoleh di pelabuhan ini kadang-kadang lebih murah daripada di Maluku sendiri.

Pada tahun 1611 kerajaan Gowa–Tallo mengadakan ekspansi ke daerah Bone. Ekspansi kerajaan ini menimbulkan tantangan dan permusuhan antara Gowa dan Bone. Untuk beberapa waktu kerajaan Gowa mendapat upeti dari Solor yang sebenarnya adalah daerah pengaruh kekuasaan kerajaan Ternate. Dalam mengadakan ekspansi ke Solor, orang-orang Makassar mendapat bantuan orang-orang Portugis yang datang berdagang ke pelabuhan kerajaan Gowa–Tallo.

Hasrat untuk ekspansi ini mungkin diakibatkan oleh dorongan untuk menyebarkan agama Islam yang baru masuk, dan juga mungkin karena

---

33 F.W. Stapel, *op. cit.*, hlm. 3
34 *Ibid.*, hlm. 4

kekayaan yang diperoleh dari perdagangan yang ramai di pelabuhannya yang merupakan pelabuhan transito.[35] Dengan modal pelabuhan transito yang pada waktu itu paling besar di Indonesia, kerajaan Gowa–Tallo ini juga dikenal oleh orang Belanda yang sudah mulai datang ke Indonesia.

2. Penetrasi Politik Barat

Faktor yang memengaruhi orang-orang Portugis mencari jalan ke kepulauan rempah-rempah pertama-tama adalah faktor ekonomi dan agama, di samping petualangan. Faktor petualangan inilah yang menimbulkan keinginan untuk menjelajah lautan ke tempat-tempat yang belum dikenal.[36] Dengan dorongan ketiga faktor itu mereka mulai melakukan perjalanan menyusuri pantai barat Afrika ke selatan lalu membelok ke pantai timur Afrika kemudian menuju utara. Di daerah Babel-mandep mereka bertemu dengan pedagang-pedagang Islam yang sejak berabad-abad telah melakukan perdagangan antara kepulauan Indonesia, Persia, dan Laut Merah.

Dengan semangat Perang Salib mereka tidak dapat menoleransi perdagangan ini. Oleh sebab itu, timbul bentrokan-bentrokan dengan pedagang-pedagang Islam. Bagi orang-orang Portugis, raja-raja di Asia yang bukan beragama Islam dapat dijadikan kawan, tetapi tidak demikian halnya dengan pedagang-pedagang atau raja-raja yang beragama Islam. Bentrokan-bentrokan timbul antara armada-armada Islam dan armada-armada Portugis. Pemusnahan terhadap perdagangan orang Islam tidak dapat dilaksanakan dengan mudah oleh orang-orang Portugis.

Sementara itu, orang-orang Portugis berhasil mendirikan suatu kantor dagang di Goa (India). Di Gowa, Albuquerque mendengar kabar tentang Malaka sudah bercorak Islam dan menjadi pelabuhan transito yang ramai. Di pelabuhan ini para pedagang Islam dari Gujarat dan Arab datang membeli rempah-rempah yang dibawa oleh para pedagang pribumi ke sini. Orang-orang Gujarat membawa bahan pakaian yang ditukar dengan hasil bumi Nusantara.

Setelah mendapat informasi tentang pelabuhan Malaka, Albuquerque bermaksud untuk mengadakan hubungan dengan Malaka. Suatu utusan dikirim pada tahun 1509. Utusan Portugis yang bernama Lopez Squeira pada tahun itu tiba di Malaka untuk memberi surat-surat kepercayaan kepada Sultan Mahmud Syah.[37] Akan tetapi, sultan tidak begitu berhasrat

---

35 C. Skinner, *op, cit.*, hlm. 2

36 B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies. Selected Writings of H. Schrieke*, Part One, A. Mantenau N.V. Brussel, N.V. van Hoeve's Gravenhage, 1959, hlm. 37

37 D.R. Sar Desai, "The Portuguese Administration in Malacca", *Journal of South East Asian History*, Vol. 3, No. 3, Special issue: International Trade and Polities in South East Asia 1500–1800, Desember 1960, hlm. 502

untuk menerima Lopez Squeira tersebut karena raja pada waktu itu telah mendengar hal-hal yang tidak menguntungkan bagi orang-orang Portugis. Raja Malaka pada waktu itu sebenarnya tidak begitu menginginkan berhubungan dengan orang-orang Portugis, bahkan orang-orang Malaka menyerang orang-orang Portugis itu. Serangan terhadap orang-orang Portugis ini mengakibatkan orang-orang Portugis itu mengancam keselamatan Mahmud Syah.

Setelah pendudukan Malaka pada tahun 1511, Albuquerque membuat suatu benteng yang sangat strategis untuk memperkuat kedudukan Portugis di Malaka dan sekitarnya. Meskipun segi agama tidak lagi memainkan peran yang begitu penting dalam ekspansi komersial, sebagai akibat permusuhan-permusuhan yang dialami pedagang-pedagang Islam yang berlangsung antara Malaka dan Persia serta Laut Merah dan India, kehadiran orang-orang Portugis di Malaka merupakan suatu bahaya bagi perdagangan mereka.

Sejak tahun 1511 itulah pedagang-pedagang Islam mulai mencari pelabuhan-pelabuhan dan jalan lain untuk mendapatkan lada dan rempah-rempah untuk melanjutkan perdagangan mereka secara aman antara kepulauan Indonesia dan Laut Merah.

Setelah berhasil menduduki Malaka, orang-orang Portugis tidak tinggal diam, mereka melanjutkan petualangan mereka dengan mengadakan pelayaran ke timur ke kepulauan rempah-rempah. Pelayaran dilanjutkan di bawah pimpinan De Abreu. Dalam perjalanannya ini, ia singgah di Gresik dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke Maluku, yaitu ke Pulau Banda. Pulau ini merupakan tempat pengumpulan rempah-rempah Maluku. Di Banda orang Portugis membeli pala, cengkih, dan fuli. Rempah-rempah ini ditukar dengan bahan pakaian dari India. Dengan ini suasana perdagangan yang ramai timbul di pulau ini.

Setelah selesai mengadakan perdagangan ke Banda, kapal-kapal Portugis kembali ke Malaka. Akan tetapi, satu di antara kapal-kapal itu kehilangan arah sehingga tiba di Hitu. Awak kapal itu diterima dengan baik karena dalam perang antara Hitu dan Seram orang-orang Portugis memihak Hitu. Dari Hitu kapal ini menuju Ternate dan mereka mendapat sambutan baik. Dengan perjalanan ke Maluku ini terbuka lembaran baru bagi orang-orang Portugis dalam perdagangan mereka.

Untuk beberapa lama perdagangan antara kedua pihak ini, yaitu Portugis dan Ternate, berjalan dengan tenteram. Ternate meminta kepada pihak Portugis mendirikan suatu benteng di Ternate untuk melindungi diri dari serangan-serangan musuh. Permohonan ini diterima dengan sangat baik oleh pihak Portugis, dan kesempatan ini dipakai oleh pihak Portugis untuk mengajukan pula keinginan mereka, yaitu monopoli perdagangan cengkih.

Keinginan ini kemudian dituangkan ke dalam suatu perjanjian. Dengan adanya perjanjian ini, mulailah masuk pengaruh-pengaruh baru yang membawa bermacam-macam akibat. Rakyat Ternate merasa tertekan karena tidak ada lagi persaingan bebas. Mereka harus menjual rempah-rempah mereka dengan harga sangat rendah kepada Portugis. Karena hubungan yang merugikan ini timbullah perlawanan. Ternyata orang-orang Portugis yang baru dikenal sebagai sahabat berubah menjadi pemeras dan musuh.

Pada tahun 1521 orang-orang Spanyol datang dengan dua buah kapal melalui Filipina–Kalimantan Utara ke Tidore, Bacan, dan Jailolo. Mereka diterima dengan baik. Ketika mereka pulang, beberapa pedagang mereka tinggal di Tidore. Akan tetapi, nasib mereka kurang baik karena orang-orang Portugis kemudian menyerang mereka.

Kedatangan orang-orang Spanyol di Maluku tidak menggembirakan orang-orang Portugis karena mereka tidak mau mendapat saingan dari orang Eropa yang lain yang dapat mengganggu politik monopoli perdagangan rempah-rempah mereka. Akan tetapi, kapal-kapal Spanyol tetap berlayar ke tempat itu. Karena sikap mereka yang baik, mereka lebih disukai daripada orang-orang Portugis. Kapal-kapal Spanyol mengunjungi Maluku hingga tahun 1534. Setelah itu, karena suatu perjanjian dengan orang-orang Portugis, pada tahun itu pula, mereka meninggalkan daerah Maluku.[38] Sekali lagi orang-orang Portugis mendapat kebebasan penuh bagi dirinya sendiri untuk melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah.

Setelah mendapat tempat untuk menetap di Maluku dan Malaka, orang-orang Portugis berusaha mendapat tempat di Sumatra yang merupakan daerah yang kaya akan lada. Mereka tidak berhasil menanamkan kekuasaan di Sumatra karena kerajaan Aceh begitu kuat mengontrol semua daerah pengaruhnya terhadap kerajaan-kerajaan yang terletak di sebelah selatan.

Di Jawa orang-orang Portugis hanya diterima dengan baik di Pasuruan dan Balambangan. Daerah-daerah Jawa lain telah berada di bawah pengaruh Demak, yang tidak begitu menyenangi orang-orang Portugis, setelah pengalaman-pengalaman mereka dengan orang-orang Portugis pada tahun 1513. Di daerah Jawa Barat hanya untuk waktu yang singkat mereka diterima dengan baik karena perluasan pengaruh Demak yang bercorak Islam pun masuk ke sini.

Di tempat-tempat lain di kepulauan Indonesia di mana mereka berhasil menetap adalah di Timor saja. Kehadiran mereka di Ternate untuk beberapa waktu hanya dimungkinkan karena pertentangan-pertentangan yang sering timbul antara Ternate dan Tidore. Meskipun demikian, karena kehadiran mereka merugikan rakyat Ternate, timbul suatu pemberontakan pada tahun 1533. Pemberontakan ini dikenal sebagai *Moluccan Vampire*

38 E.S. De Klerck, *op. cit.*, hlm. 169

(binatang pengisap darah).[39] Antonio Galvao yang menjadi Gubernur Portugis di Maluku antara tahun 1536–1540 berhasil meredakan situasi.

Karena perdagangan cengkih kemudian lebih berkembang di Hitu, orang-orang Portugis menuju Hitu. Akan tetapi, karena mereka sudah terkenal melakukan sistem monopoli mereka tidak disenangi.

Di samping faktor ekonomi yang membuat mereka tidak simpatik, faktor agama pun memegang peran. Seperti diketahui daerah Hitu telah memeluk agama Islam. Suatu bentrokan tidak terhindarkan dan mengakibatkan jatuhnya korban. Orang-orang Portugis terpaksa meninggalkan Ambon dan pindah ke Lei Timor.

Sikap Hitu yang tidak mau berhubungan dengan orang-orang Portugis mendorong mereka untuk mengganggu perdagangan orang-orang Hitu dengan para pedagang Jawa dan Makassar. Sekitar tahun 1537 armada dagang yang datang ke Hitu dirusak oleh orang-orang Portugis.[40]

Keadaan makin memburuk bagi orang-orang Portugis karena tindakan-tindakan mereka di Ternate, yang mau memaksakan kekuasaannya baik terhadap Ternate, Tidore, maupun Jailolo. Seperti telah diketahui, di samping faktor ekonomi, faktor agama bagi orang Portugis juga memainkan peran penting sehingga terkadang tidak dapat dipisahkan. Ekspansi ekonomi tidak jarang berkaitan dengan ekspansi agama. Hal ini terjadi di Ternate dan Tidore, di mana penduduk merasa bahwa dengan menerima agama yang baru ini berarti menerima atau mengakui kekuasaan asing yang akan merugikan mereka. Memang bila ditinjau dari sudut orang-orang Portugis, daerah yang seagama dengan mereka merupakan jaminan perlindungan bagi mereka terhadap orang-orang yang beragama Islam.[41]

Orang-orang Portugis yang telah kehilangan popularitas di Maluku tidak mudah mempertahankan kepentingan dagangnya, apalagi di daerah Maluku Utara. Situasi pada waktu itu telah begitu berubah sejak kedatangan mereka untuk pertama kali. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengalihkan perhatian ke kepulauan Nusa Tenggara, yaitu ke Timor. Kedatangan orang-orang Belanda ke wilayah ini membuat mereka juga mulai terdesak.

Sejak akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 adalah giliran orang-orang Belanda, Inggris, Denmark, dan Prancis datang ke Indonesia. Di samping orang-orang Portugis yang berperan dalam perdagangan dan cenderung menjalankan politik monopoli perdagangan, orang-orang Belanda pun tidak kalah berperan dalam usaha-usaha menjalankan monopoli perdagangan di Nusantara. Orang-orang Inggris saat itu hanya mencoba mengikuti orang-

39 *Ibid.*, hlm. 169
40 *Ibid.*, hlm. 170
41 *Ibid.*, hlm. 171

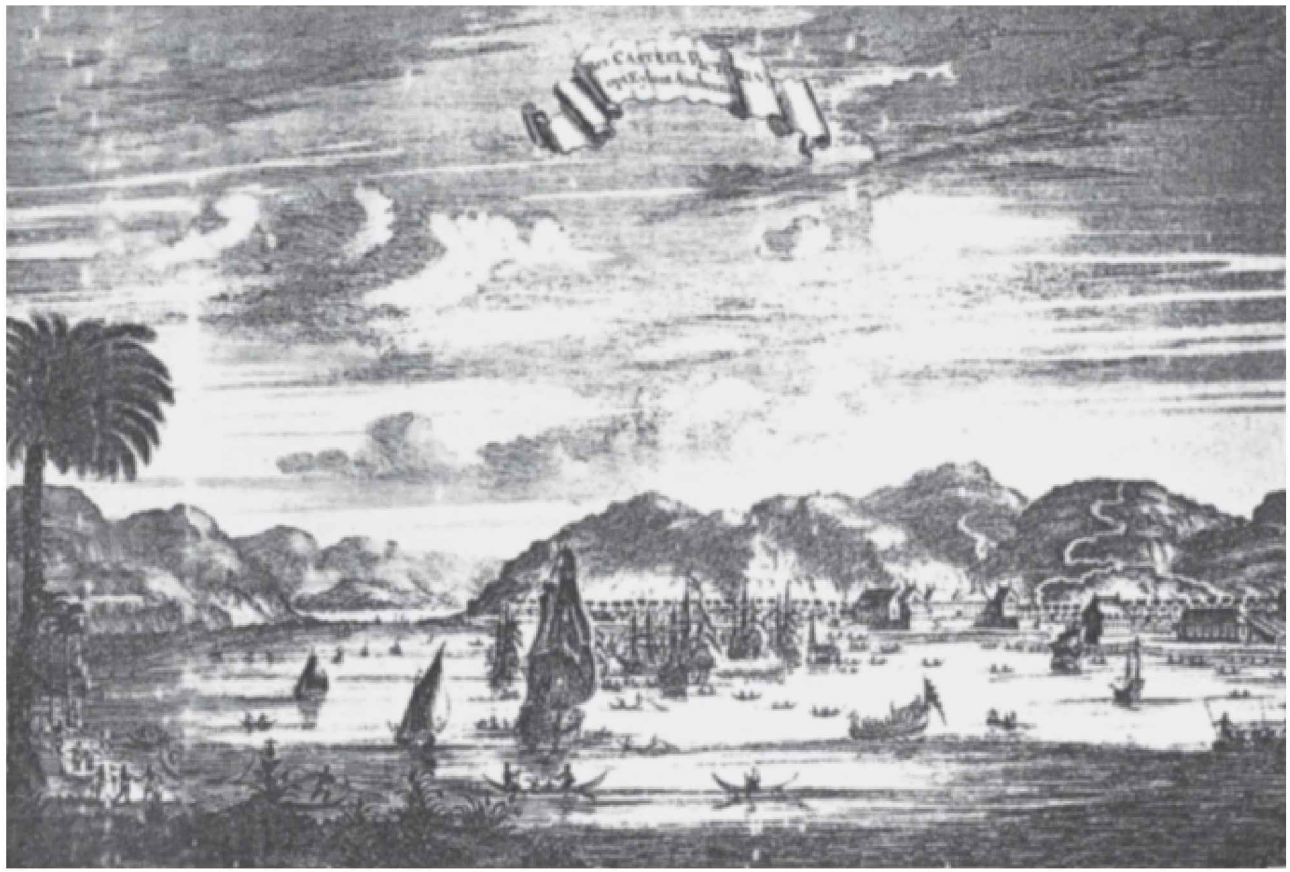

Gambar 7.2 Benteng Victoria di Pulau Ambon, Teluk dilindungi oleh Jazirah Hitu (sebelah kiri)
(Sumber: *Gechiedems van Nederlandch Indie*)

orang Belanda. Misalnya, orang-orang Belanda mendirikan sebuah kantor dagang di suatu tempat, orang-orang Inggris juga mengikutinya. Apabila timbul ketegangan-ketegangan antara orang-orang atau penguasa-penguasa pribumi dengan orang-orang Belanda, biasanya Inggris mengambil sikap berpihak kepada orang-orang pribumi.

Motif kedatangan orang-orang Belanda ini hampir serupa dengan motif orang-orang Portugis. Jika motif kedatangan orang-orang Portugis ada tiga, yaitu agama, ekonomi, dan petualangan, kedatangan orang-orang Belanda mempunyai dua motif yaitu ekonomi dan petualangan.

Pada tahun 1585 ketika Portugal menguasai Spanyol, tamatlah peran orang-orang Belanda yang biasanya menjadi pengangkut dan penyebar rempah-rempah di Eropa itu. Karena penguasaan Portugal atas Spanyol ini, mata pencaharian orang-orang Belanda dalam bidang tersebut hilang dan oleh sebab itu mereka memutuskan untuk mengambil atau membeli rempah-rempah langsung dari negeri asalnya yaitu di kepulauan Maluku.

Pada tahun 1595 orang-orang Belanda dengan suatu armadanya yang terdiri dari empat buah kapal dagang berangkat menuju kepulauan Maluku. Pelayaran pertama yang dipimpin Cornelis de Houtman itu mengalami kesulitan dan penderitaan karena belum mempunyai pengalaman untuk pelayaran jauh. Akibatnya, pelayaran tersebut memakan waktu lama yaitu empat belas bulan. Ketika mereka tiba di Banten tahun 1596 mereka disambut baik oleh penguasa-penguasa Banten karena pada waktu itu orang-orang Belanda masih menunjukkan sikap yang baik terhadap orang-orang pribumi. Pada pertemuan pertama mereka ingin bersahabat dan melakukan perjanjian dagang dengan Banten. Jadi, sasaran utama orang-orang Belanda ialah pasar Banten tempat perdagangan rempah-rempah yang ketika itu juga telah menghimpun hasil-hasil dari daerah-daerah sekitarnya dan juga Maluku. Bagi Banten kedatangan orang-orang asing yang tujuannya akan berdagang semata-mata tentu saja menguntungkan perkembangan ekonominya. Bagi raja atau penguasa-penguasa Banten hal itu berarti menambah penghasilan dari cukai barang-barang perdagangan baik yang diimpor maupun yang diekspor. Makin banyak orang-orang asing yang berdagang makin membawa untung meskipun di kalangan orang-orang asing itu timbul persaingan.

Keadaan orang-orang Belanda di Banten lambat laun tidak menguntungkan akibat sikap mereka sendiri yang tidak dapat diterima oleh orang-orang Banten. Terdorong oleh keinginan untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya orang-orang Belanda minta agar Banten memberikan sejumlah besar lada, tetapi mereka tidak mampu membayar. Keadaan ini menimbulkan ketegangan, dan orang-orang Belanda menembaki kota Banten dari kapal-kapal dan kemudian meninggalkan

pelabuhan tersebut. Tindakan kasar orang-orang Belanda itu tersebar beritanya ke daerah-daerah sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Karena itu, ketika mereka sampai di pelabuhan-pelabuhan lainnya mereka mendapati pelabuhan-pelabuhan tertutup dan tidak mudah untuk memasukinya dan berhubungan dengan penguasa-penguasanya.

Pelayaran pertama orang-orang Belanda ke Indonesia hanya sampai Pulau Bali karena mereka terpaksa harus kembali ke negerinya. Pengalaman-pengalaman yang telah diperolehnya pada pelayaran kedua merupakan pelajaran yang baik, mereka mengubah sikap dalam menghadapi orang-orang pribumi. Ketika Jacob van Neck, Waerwijck, dan Heemskerck datang di Banten pada tahun 1598, mereka diterima dengan baik oleh penguasa-penguasa Banten. Sikap ini pada waktu itu kecuali dikarenakan sikap orang-orang Belanda yang sudah dapat menyesuaikan diri juga karena Banten baru saja mengalami kerugian besar akibat tindakan orang-orang Portugis.

Kedatangan orang-orang Belanda di pelabuhan Tuban dan Maluku juga mendapat sambutan yang baik dari penguasa-penguasa serta rakyatnya. Hampir setiap pulau di Maluku disinggahi oleh kapal-kapal Belanda untuk mengadakan perdagangan dengan penduduk. Di beberapa tempat mereka menempatkan orang-orangnya untuk menampung hasil-hasil panen rempah-rempah dari penduduk. Kedatangan orang-orang Belanda di Ternate diterima dengan baik karena pada waktu itu sultan Ternate sedang memusuhi orang-orang Portugis dan Spanyol. Sikap baik orang-orang Belanda terhadap para penguasa dan rakyat di Nusantara sangat menguntungkan Belanda. Hal ini tampak ketika mereka pulang ke negeri Belanda kapal-kapal mereka membawa muatan rempah-rempah yang banyak sehingga mereka mendapat keuntungan besar.

Untuk menyaingi pelayaran dan perdagangan orang-orang Eropa lainnya itu, orang-orang Belanda mendirikan serikat dagang yang disebut *Verenigde Oost Indische Compagne* (VOC) pada tahun 1602 yang antara lain bertujuan menjalankan politik monopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Pada tahun-tahun pertama setelah pembentukan VOC hubungan antara mereka dengan penguasa-penguasa kerajaan di Nusantara boleh dikatakan baik karena orang-orang VOC sendiri sedang menghadapi saingan dari orang-orang Portugis. Sebaliknya, beberapa kerajaan muslim waktu itu sedang melakukan reaksi bahkan ada di antaranya telah mengadakan beberapa perlawanan terhadap penetrasi politik Portugis.

Di beberapa kerajaan lainnya seperti di Aceh dan Madura, orang-orang VOC pun mengalami tantangan karena tingkah laku mereka yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehendak raja-raja setempat.

Pada tahun-tahun setelah J.P. Coen menjadi Gubernur Jenderal VOC, arah politiknya jelas bukan hanya untuk perdagangan biasa, melainkan untuk melaksanakan monopoli perdagangan serta politik kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan di Indonesia, sehingga muncullah reaksi-reaksi yang besar bahkan sampai terjadi perang.

Perang merebut Jakarta dari tangan Pangeran Wijayakrama, sekitar tahun 1618–1619, juga menimbulkan reaksi dari Banten yang merasa akan lebih terancam baik kedudukan ekonomi maupun politiknya. Kecuali itu, Jakarta sejak sebelum dikuasai oleh VOC merupakan daerah yang dianggap bagian dari kerajaan Banten. Reaksi Banten ini memuncak menjadi perang yang terus-menerus memuncak pada zaman pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (1651–1682). Penguasaan VOC atas Jakarta tahun 1619 itu juga mengakibatkan ketidaksenangan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung yang sedang meluaskan pengaruhnya ke seluruh Jawa dan daerah-daerah di luar Jawa.

Setelah VOC memaksakan monopoli perdagangannya di pesisir utara Jawa, reaksi-reaksi Mataram makin meningkat. Serangan besar-besaran oleh Mataram pada tahun 1618 dan 1629 terhadap Batavia merupakan bukti-bukti perlawanan terhadap penetrasi politik VOC.

Timbulnya perang di Sulawesi Selatan pada tahun 1666–1669, pemberontakan Untung Surapati tahun 1686–1703, serta pemberontakan pada abad-abad berikutnya di berbagai daerah pada umumnya merupakan perlawanan terhadap penetrasi politik dan monopoli perdagangan VOC terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara.

B. Reaksi dan Perang

1. Malaka dan Aceh Menghadapi Portugis dan Belanda

Dari uraian sebelumnya telah diketahui adanya hubungan antara Turki dan beberapa kerajaan Islam di Asia Tenggara khususnya Indonesia bagian barat, baik berupa hubungan militer maupun hubungan diplomasi. Yang banyak membuat catatan mengenai hubungan ini adalah orang-orang Portugis, antara lain Couto dan Pinto.[42]

Di kepulauan Indonesia raja Turki telah lama dikenal dengan julukan raja Rum dan ia merupakan raja Islam terkuat pada abad ke-16. Menurut tradisi yang sampai kepada kita, yang dimaksud dengan raja Rum adalah raja Turki dari Asia Barat, sedangkan raja Cina dari Asia Timur. Seperti

42 Anthony Reid, "Sixteen Century Turkish influence in Western Indonesia", *Journal of South East Asian History*, Vol. 3, No. 3, Special issue: "International Trade and Politics in South East Asia 1500–1800", Desember 1969, hlm. 395

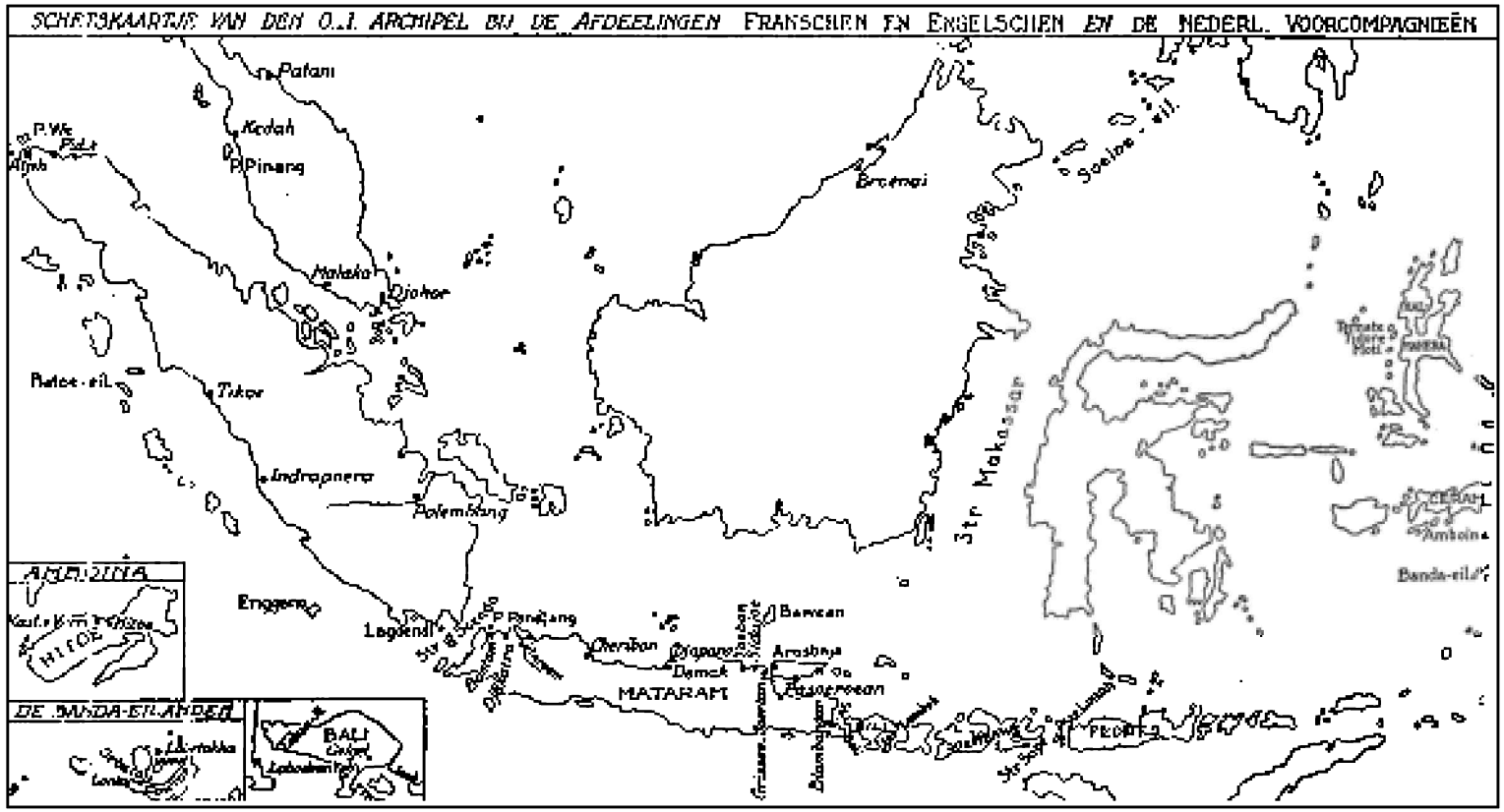

Gambar 7.3 Peta Sketsa Nusantara sebelum terbentuk perusahaan-perusahaan dagang Eropa

cerita tentang Iskandar Dzulkarnain yang dikatakan mempunyai tiga putra yang dilahirkan oleh seorang putri dari samudra. Ketiga putra itu masing-masing menjadi raja Rum, raja Cina, dan raja Johor, dan mereka berasal dari keluarga kesultanan Minangkabau.[43]

Kedatangan orang-orang Portugis di bawah pimpinan Diego Lopez de Squeira ke Malaka atas perintah raja Portugis, bertujuan untuk membuat perjanjian-perjanjian dengan penguasa-penguasa di Malaka. Perjanjian-perjanjian ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu izin perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, semboyan orang-orang Portugis untuk meluaskan daerah pengaruhnya tidak hanya bermotif penyebaran agama, tetapi yang utama adalah motif ekonomi. Ini adalah sebenarnya motif yang memengaruhi politik Portugal pada waktu itu. Hal ini pun terbukti dari keadaan yang dialami St. Francis Xaverius ketika ia datang di Malaka. Ia menyangka bahwa setelah kedatangan orang-orang Portugis ke sana, mereka telah melaksanakan tujuan pertama ekspansinya, yaitu penyebaran agama. Akan tetapi, yang didapatinya di Malaka adalah yang sebaliknya, yaitu keadaan kemerosotan moral. Keadaan ini membuat ia meninggalkan tempat itu selekas mungkin.

Maksud utama Portugis menduduki Malaka adalah untuk menguasai perdagangan yang melalui Selat Malaka atau yang melakukan perdagangan dengan Malaka semata-mata. Seperti diketahui orang-orang Gujarat beramai-ramai datang berdagang ke Malaka, sementara orang-orang Portugis hendak menguasai perdagangan antara pelabuhan-pelabuhan di India yaitu di Gujarat, Benggala, dan Golkonda dengan Malaka yang tentu saja pengangkutan komoditas ini melalui Selat Malaka. Seperti sudah diuraikan terdahulu, Sultan Malaka pada waktu itu adalah Mahmud Syah. Karena usaha orang-orang Portugis untuk menguasai Malaka, terjadilah perang dengan Sultan Mahmud Syah dan rakyatnya.

Serangan Mahmud Syah terhadap orang-orang Portugis merupakan suatu alasan yang baik sekali bagi Albuquerque yang lebih suka menguasai Malaka daripada membuat suatu perjanjian yang tidak begitu kukuh dengan sultan. Pada tahun 1511 ia pun berangkat ke Malaka untuk membalas serangan Mahmud Syah. Meskipun Mahmud Syah mencoba menghindari malapetaka, tetap ia tidak berhasil. Mahmud Syah menyadari bahwa orang-orang Portugis pasti akan menyerang Malaka. Oleh sebab itu, ia mempersiapkan diri karena ia sadar, bahwa bilamana ia memberi izin kepada orang-orang Portugis untuk mendirikan sebuah benteng, hal itu berarti akhir dari kerajaannya. Ternyata Albuquerque tidak dapat diajak berunding, raja pun tidak lagi berupaya untuk mengadakan perundingan. Serangan orang-

43 William Marsden, *The History of Sumatra*, erd Edition, London, Longman, 1811, hlm. 341

orang Portugis tidak terelakkan, dan suatu pertempuran yang sangat dahsyat pun terjadi, yang banyak menumpahkan darah. Banyak senjata seperti pedang, tombak, perisai, panah, dan panah beracun dapat dirampas oleh orang-orang Portugis dari pihak Malaka. Di samping senjata-senjata itu Malaka juga menggunakan bola-bola besi yang diimpor dari Cina. Senjata-senjata kecil yang dipakai Malaka melawan orang-orang Portugis dibuat di Pegu dan Siam. Di samping senjata-senjata kecil itu mereka juga memakai meriam yang dibeli dari Kalikut yang dibuat oleh dua orang pelarian Portugis yang bekerja di bengkel untuk membuat senjata ini.[44]

Sultan Malaka terpaksa harus meninggalkan Malaka setelah ia menyadari bahwa ia tidak dapat mengimbangi senjata-senjata besar orang-orang Portugis. Oleh karena itu, mencari perlindungan di Pulau Bintan.

Sejak Portugis menduduki Malaka pada tahun 1511, agama yang merupakan salah satu faktor penting dalam mengadakan ekspansi mulai menjadi samar-samar, karena ternyata faktor ekonomilah yang memegang peran terpenting. *"Service to Man to takes precedence over the service to God"*.[45]

Ketika Albuquerque berangkat ke Goa, terjadi perlawanan oleh seorang Jawa bernama Katir. Pertempuran-pertempuran sengit terjadi di luar kota Malaka. Beras yang harus datang dari Jawa untuk memenuhi kebutuhan Malaka diblokade oleh Katir sehingga pihak Portugis mengalami kekurangan makanan. Akan tetapi, kadang-kadang pihak Katir juga mengalami kekurangan makanan sehingga perang sekali-sekali dihentikan. Bilamana bahan makanan yang berupa beras yang diimpor dari Jawa jatuh ke tangan pihak Katir, pertempuran dilanjutkan. Katir kemudian mengalami kekalahan dan meminta bantuan dari Japara yang merupakan negara asalnya. Japara memberi bantuan dengan mengirim 100 kapal dan banyak prajurit ke Malaka untuk melawan orang-orang Portugis yang dianggap kafir. Bantuan ini datang dari Pati Unus. Pertempuran sengit pun berkobar pada tanggal 1 Januari 1513, dan armada Jawa mengalami kekalahan, hanya kira-kira 7 buah perahu yang kembali ke Jawa.

Karena orang-orang Jawa membantu musuh-musuh Portugis di Malaka, orang-orang Portugis berniat untuk menundukkan Jawa. Setelah tidak mendapat gangguan lagi dari Katir, orang-orang Portugis mulai mencari daerah lain untuk mengembangkan perdagangan mereka. Daerah di mana mereka berhasil memperluas pengaruh dagangnya adalah di bagian utara Sumatra, yaitu di daerah Pasai. Akan tetapi, usaha mereka untuk mendapat perdagangan monopoli lada tidak berhasil. Kapal-kapal dagang yang membawa berita bahwa Malaka diduduki Portugis, ketika datang di Pasai mulai mencurigai maksud-maksud orang-orang Portugis yang datang

44 M.A.P. Melink-Roelofsz, *op. cit.*, hlm. 123
45 D.R. Sar Desai *op. cit.*, hlm. 503

berdagang ke kota tersebut. Karena politik monopoli dagang Portugis ini, pedagang-pedagang lain meninggalkan Pasai dan mencari pelabuhan yang lain di Aceh.[46]

Orang-orang Portugis berhasil menanam pengaruhnya di Pasai untuk beberapa waktu. Daerah Aceh yang dahulu menjadi daerah takluk Pedir mulai berkembang dan berhasil melepaskan diri dari Pedir. Aceh, bahkan berhasil menguasai Pasai juga. Aceh kemudian menjadi pusat pedagang-pedagang yang dahulu biasa singgah di Malaka dan mereka melancarkan permusuhan terhadap orang Portugis di sekitar Selat Malaka. Kemudian orang-orang Portugis mengalami permusuhan tidak saja dari Aceh tetapi juga dari Johor. Sultan Malaka yang melarikan diri ketika Malaka diserbu oleh orang-orang Portugis yang melarikan diri ke Johor dan kemudian pindah dari Johor ke Pulau Bintan. Kerajaan Aceh dan Johor melancarkan serangan-serangan terhadap Portugis yang pada waktu itu menduduki Malaka. Sementara pihak Johor atau Aceh sekali-sekali dibantu oleh kerajaan-kerajaan di pantai utara Jawa. Bantuan yang diberikan Jawa kepada Aceh atau Johor melawan orang-orang Portugis di Malaka tidak kecil dan berupa perbekalan perang. Kekalahan yang dialami Aceh dan Johor karena kapal-kapal Portugis mempunyai peralatan perang yang lebih unggul, yaitu antara lain dalam teknik pembuatan kapal-kapal yang lebih besar daripada kapal-kapal atau perahu-perahu Indonesia. Perlengkapannya jauh lebih baik. Perahu-perahu yang dipakai orang-orang Indonesia kecil-kecil dan untuk menjalankannya sangat tergantung pada angin, meskipun ada juga pendayungnya.

Pada waktu itu Malaka tidak dapat direbut kembali dari orang-orang Portugis. Meskipun demikian, orang-orang Portugis sendiri tidak dapat merebut dan menguasai daerah-daerah lain di Semenanjung Malaka maupun di Sumatra.

Ketika Aceh didatangi orang-orang Belanda pada tahun 1599, Malaka berada dalam keadaan yang sangat lemah sehingga tidak dapat membantu kerajaan-kerajaan yang terancam oleh Aceh. Dengan demikian, beberapa kerajaan kemudian dapat direbut oleh Aceh. Politik pemerintah Aceh pada waktu itu adalah membawa sultan dari daerah yang kalah ke Aceh dan menggantikannya dengan seorang anggota keluarga Sultan Aceh. Dengan demikian, keutuhan kekuasaan dapat terjamin karena hubungan keluarga.

Ketika orang-orang Belanda menetap di Malaka setelah merebutnya dari tangan Portugis pada tahun 1641, orang-orang Belanda terbentur pada dua keinginan. Pertama adalah untuk membuat Malaka menjadi pelabuhan yang ramai yang dikunjungi oleh pedagang-pedagang dengan menyediakan barang dagangan dari daerah sekitarnya. Mereka berharap dapat menjual

46 E.S. de Merck *op. cit.*, hlm. 173

semua barang dagangan yang dibawa para pedagang India, dan mereka juga ingin menghidupkan kembali perdagangan seperti yang pernah dialami oleh Malaka. Sebelum kedatangan Belanda, Selat Malaka mengalami kemunduran dan menjadi tidak aman dan karena permusuhan-permusuhan yang berlangsung antara kerajaan-kerajaan di Semenanjung Malaka dan Aceh.

Permusuhan-permusuhan ini membuat para pedagang yang biasa datang ke Malaka menghindari Selat Malaka dan berdagang di Sumatra atau pelabuhan-pelabuhan di Semenanjung Malaka yang letaknya lebih ke utara. Untuk menghidupkan kembali perdagangan di Malaka, izin-izin dagang ke Malaka diberikan Kompeni kepada perusahaan-perusahaan di India. Pesanan-pesanan diadakan melalui perusahaan-perusahaan ini untuk menyediakan barang dagangan di Malaka, sehingga dapat menarik pedagang-pedagang dari wilayah-wilayah lain. Yang menjadi pemikiran politik perdagangan Kompeni Belanda di Malaka adalah monopoli perdagangan, mereka ingin menguasai komoditas pokok dan menetapkan harganya dengan tujuan mendapat keuntungan sebesar mungkin dengan sistem monopoli itu.

Ternyata keinginan pertama untuk menghidupkan pelabuhan Malaka dengan memberi izin berdagang tidak berhasil karena mereka lebih mementingkan monopoli perdagangan.

Mereka lebih melihat keuntungan dalam monopoli lada, rempah-rempah, kayu cendana, dan bahan pakaian dengan mutu tinggi.[47] Dengan dipilihnya sistem monopoli ini, Malaka sebagai kota dagang sangat menderita. Upaya untuk mengatasinya dengan kompromi, gagal. Suatu sistem baru coba diterapkan, yaitu dengan mengadakan suatu sistem tarif. Pada mulanya diusulkan untuk mengenakan bea 10% atas barang impor, sedangkan untuk barang ekspor 5%, bea ini ternyata lebih tinggi daripada apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Portugis.[48] Sistem tarif ini hendak dijalankan dengan mengajak paksa para pedagang yang datang ke pelabuhan-pelabuhan di Semenanjung Malaka. Kompeni hendak mencoba tradisi yang dijalankan kerajaan Malaka pada waktu yang silam dan orang-orang Portugis pun telah mencoba sistem ini sebenarnya, akan tetapi kedua bangsa Eropa itu tidak berhasil. Yang diinginkan oleh orang-orang Belanda bukan keuntungan langsung dari perdagangan dengan para pedagang asing, melainkan mereka ingin mengarahkan dan menyalurkan perdagangan itu sendiri melalui Malaka.

---

47 S. Arasaratnam, "Some Notes on the Dutch in Malacca and the Indo-Malayan Trade 1641–1670", *Journal of South East Asian History*, Vol. 3, No. 3, Special issue: International Trade and Politics in South East Asia 1500–1800, Desember 1969, hlm. 482

48 *Ibid.*, hlm. 482

Politik perdagangan yang hendak diciptakan Kompeni di Malaka ternyata tidak seperti mereka harapkan. Oleh karena itu, orang-orang Belanda merasa perlu untuk mengadakan perjanjian-perjanjian dengan sultan-sultan di daratan Semenanjung Melayu untuk mendapatkan monopoli atas beberapa macam barang dagangan, di antaranya yang terpenting adalah timah. Di samping meminta monopoli atas timah, pihak Belanda juga ingin supaya pedagang India dibatasi.

Perjanjian pertama diadakan pada tanggal 18 Juni 1642 dengan Sultan Kedah, dalam perjanjian itu disetujui bahwa setengah hasil timah dari Kedah akan dijual kepada pihak Belanda dengan harga yang telah ditentukan dan pihak Belanda akan membayar timah ini dengan uang tunai atau dengan bahan pakaian.[49]

Di dalam mempertahankan perjanjian ini, setiap kapal yang memuat timah yang akan diekspor akan diperiksa muatannya oleh Belanda dan hasil laporan ini akan menentukan setengah dari hasil itu akan diberikan kepada pihak Belanda. Bilamana ada kekurangan yang belum dibayar kepada Belanda, Sultan harus memenuhi pembayaran ini dalam waktu 5 sampai 6 hari. Dalam sistem monopoli ini, semua kapal yang datang dari India hanya boleh masuk pelabuhan bilamana mereka dapat memperlihatkan izin dari kantor dagang di India. Bilamana dalam izin yang mereka peroleh di India harus datang dahulu ke Malaka dan tidak melakukan hal ini, mereka harus ditolak oleh petugas-petugas Sultan untuk boleh berlabuh di Kedah.

Selain perjanjian yang ditandatangani dengan Kedah, pihak Belanda juga mengadakan perjanjian dengan penguasa dari Jung Ceylon, yaitu orang-orang Jawa, Perak, Kedah, Koromandel, Bengal, dan dari daerah lain tidak boleh datang berdagang ke sana bilamana mereka tidak dapat memperlihatkan izin dari Belanda. Mereka diharuskan singgah di Malaka dan harus membayar bea di situ. Selain persetujuan yang tersebut di atas masih ada lagi persetujuan yang diadakan dengan penguasa dari Bangery pada tanggal 1 Januari, yaitu ditetapkan bahwa semua penghasilan/produksi timah harus diberikan kepada Belanda dan penguasa Bangery, juga harus mencegah penduduk dari sana untuk menjual kepada orang lain selain kepada orang-orang Belanda. Semua timah yang dibawa oleh para pedagang harus dijual kepada orang-orang Belanda.[50] Kepada semua kantor-kantor dagang di India dikirim perintah bahwa kepada kapal-kapal India hanya diberi izin bilamana mereka akan ke Malaka. Kapal-kapal dagang ini harus datang ke Malaka dahulu sebelum mereka pergi ke pelabuhan-pelabuhan lain di semenanjung itu.

---

49 S. Arasaratnam, *ibid.*, hlm. 483
50 S. Arasaratnam, *ibid.*, hlm. 483

Sementara itu, Aceh masih dapat bertahan terhadap persaingan dari orang Barat. Aceh lama merupakan suatu kerajaan pantai. Meskipun banyak daerah pedalaman merupakan taklukannya, Aceh lebih merupakan suatu kerajaan laut. Perdagangan yang ramai antara Sumatra dan India hanya mengalami kemacetan sebentar, ketika orang-orang Portugis merebut Malaka.[51] Pedir merupakan pelabuhan yang terpenting dalam ekspor lada dari Sumatra dan mungkin juga Aceh telah mengambil bagian dalam perdagangan tersebut sebelum Aceh menguasai daerah ini. Akan tetapi, menurut C.R. Boxer berdasarkan sumber yang tertua Portugis, Aceh mengadakan perdagangan lada mulai tahun 1534. Pada tahun ini Diego da Siveira mendapatkan perahu-perahu Gujarat dan Aceh di Bab el Mandib, pintu masuk Laut Merah.[52] Ada banyak berita mengenai orang-orang Aceh yang membawa lada ke India. Menurut Boxer, dapat diterima, bahwa Aceh telah mengambil bagian dalam perdagangan lada pada akhir abad ke-15 dan hingga kira-kira 1540 Aceh juga mengambil bagian di dalam perdagangan rempah-rempah di Laut Merah.

Pada tahun 1554–1555 kapal-kapal Portugis dikirim ke Laut Merah untuk dapat menangkap kapal-kapal Aceh dan Gujarat, tetapi mereka tidak berhasil. Alasan orang-orang Portugis agar dianggap sah dalam menangkap kapal-kapal ini adalah bahwa kapal-kapal itu tidak mempunyai pas atau izin yang dikeluarkan pemerintah Portugis. Dua kali orang-orang Portugis mencoba untuk menangkap kapal-kapal Aceh, tetapi gagal. Orang-orang Aceh telah terkenal sebagai prajurit-prajurit yang perkasa dan mutu kemiliterannya tinggi, dan orang-orang Portugis mengakui ketangkasan orang-orang Aceh ini. Sekitar seabad semenjak kedatangan orang-orang Portugis di Mataram, mereka membuat Selat Malaka tidak aman.[53] Hal ini juga diceritakan sendiri oleh orang Portugis yang terlibat dalam pertempuran yang terjadi ketika mereka hendak menahan kapal-kapal Aceh yang membawa rempah-rempah ke Laut Merah.

Aceh pada pertengahan abad ke-16 betul-betul merupakan ancaman bagi Malaka yang pada waktu itu ada di tangan Portugis. Oleh sebab itu, orang-orang Portugis selalu merasa cemas mengenai Aceh yang setiap waktu dapat menyerang Malaka. Pada tahun 1564 raja muda Portugis di Goa diberi tahu bahwa Aceh mengirim suatu utusan ke Turki, ke Konstantinopel untuk meminta bantuan militer. Permintaan khusus mengenai pengiriman meriam-meriam, pembuat-pembuat senjata api, dan

---

51 C.R. Boxer, "A note on Portuguese reactions to the Revival of the Red Sea Spice trade and the Rise of Acheh", *Journal of South East Asian History*, Vol. 10, No. 3, Special issue: International Trade and Politics in South East Asia 1500–1800, Desember 1969, hlm. 416

52 *Ibid.*, hlm. 416

53 C.R. Boxer, *ibid.*, hlm. 417

penembak-penembak. Utusan ini membawa banyak emas, lada, dan memberi gambaran mengenai kekayaan-kekayaan atau keuntungan yang akan didapatnya dari kepulauan Indonesia yang dapat diperoleh dari perdagangan rempah-rempah, jika orang-orang Portugis telah dapat diusir dari Malaka. Bantuan yang diminta tidak segera datang karena ada halangan-halangan yang terjadi di Turki. Pada akhirnya hanya dua kapal yang berangkat dengan 500 orang Turki termasuk ahli-ahli senjata api, penembak-penembak, dan ahli-ahli teknik yang berangkat menuju Aceh dan mereka tiba pada tahun 1566 atau 1567. Selain bantuan yang diminta dari Turki, bantuan-bantuan dari kerajaan-kerajaan lain pun diminta, seperti dari Kalikut dan Japara; dengan bantuan-bantuan ini Aceh mengadakan serangan terhadap Malaka pada tahun 1568.

Aceh begitu memusingkan orang-orang Portugis sehingga uskup dari Gowa, yaitu Jorge Temudo, mengusulkan kepada raja Portugal pada tahun 1569 untuk memblokade Aceh selama tiga tahun berturut-turut. Ia merasa bahwa strategi yang dijalankan orang-orang Portugis sebelumnya kurang efektif terhadap Aceh yang dengan segala kecerdikannya selalu mencari kawan di Sri Lanka dan India yang menjadi lawan orang-orang Portugis. Di dalam hal ini ia mengakui bahwa orang-orang Aceh adalah musuh yang paling berbahaya di Asia. Untuk menjalankan strategi Jorge Temudo, Malaka memerlukan dua kali lipat kekuatan kapal dengan awak-awaknya di bawah suatu pimpinan yang khusus. Kapal-kapal ini ditempatkan di Malaka yang dapat menghadapi tiap kapal Aceh yang akan mengadakan perdagangan lewat laut dan untuk menangkap kapal-kapal Turki yang akan datang ke Aceh dari Laut Merah. Menurut Jorge Temudo sistem ini lebih murah dan efektif.[54] Dengan blokade ini ekonomi Kesultanan Aceh akan mengalami kerugian, yang berakibat melemahnya kerajaan ini dan pada akhirnya lebih mudah untuk direbut. Strategi yang dianjurkan oleh Jorge Temudo begitu baik kelihatannya, tetapi ternyata tidak terwujud. Malah sebaliknya yang terjadi, bukan orang-orang Portugis yang memblokade Aceh dan mengadakan penyerbuan terhadap Aceh yang telah terkepung, melainkan Acehlah yang mengadakan penyerbuan ke Malaka beberapa kali, meskipun mereka mengalami perlawanan.[55]

Aceh tetap merupakan ancaman bagi orang-orang Portugis yang hendak memiliki monopoli perdagangan rempah-rempah. Untuk dapat menundukkan Aceh orang-orang Portugis membuat peta Banda Aceh untuk memudahkan penyerbuan terhadap kota ini. Dalam peta ini secara teliti diusut bagaimana meriam-meriam ditempatkan. Hal ini mereka buat dengan dasar pemikiran bahwa Malaka tidak akan berkembang bilamana Aceh

54 C.R. Boxer, *ibid.*, hlm. 421
55 *Ibid.*, hlm. 422

belum menjadi daerah takluk mereka. Aceh memang menjadi pokok pembicaraan baik di Goa maupun di Malaka selama tahun 1585 di kalangan para penguasanya. Mereka semua menyadari bahwa Aceh harus dibuat lemah untuk kepentingan Portugis. Akan tetapi, meskipun banyak orang-orang Portugis seperti Don Joao Ribeiro Gaio, uskup Malaka Jorge Lemos, dan banyak lagi yang mengusulkan penyerbuan terhadap Aceh dengan perhitungan-perhitungan mereka akan keperluan-keperluan untuk penyerbuan ini, dan bilamana Aceh di tangan mereka, begitu besar keuntungan yang akan diperoleh. Ternyata semua perhitungan-perhitungan itu sia-sia karena Portugis tidak mempunyai kekuatan armada yang cukup untuk melakukan penyerbuan terhadap Aceh. Hal ini diakui oleh orang-orang Portugis sendiri.[56]

Pada akhir abad ke-16, keadaan di Eropa membuat orang-orang Portugis tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Aceh, karena uang dan tenaga manusia yang diperlukan, dibutuhkan di Eropa sendiri. Di pihak lain, Aceh yang berada di bawah pemerintahan Alauddin Riayat Syah juga mengalami kesukaran dalam kerajaannya, karena mereka terdesak oleh Johor, sehingga tidak mempunyai kesempatan yang baik untuk menyerang Malaka.[57]

Pada akhir abad ke-16 antara Aceh dan Portugis terdapat suatu masa yang kelihatannya damai, karena kedua pihak tidak saling menyerang. Periode ini dianggap orang Portugis sebagai masa istirahat sebelum mengadakan suatu serangan terhadap Aceh yang dianggap sebagai pengganggu utama perdagangan monopoli rempah-rempahnya. Meskipun demikian, orang-orang Portugis tidak mampu lagi menahan perdagangan Aceh, khususnya perdagangan rempah-rempah Aceh ke Laut Merah.[58]

Kapal-kapal atau perahu-perahu yang dipakai oleh orang-orang Aceh dalam peperangan di lautan terdiri dari perahu-perahu kecil yang sangat gesit dan juga oleh perahu-perahu yang didayung. Perahu-perahu layar yang kecil bentuknya seperti *lancara*. Kapal-kapal atau jung yang besar berasal dari luar Indonesia.[59] Kapal-kapal besar yang mengarungi lautan hingga Jedah berasal dari India, Arab, atau Turki. Akan tetapi, kebanyakan dari kapal-kapal besar berasal dari Gujarat, daerah yang telah lama mengadakan perdagangan dengan Aceh. Menurut Cout kapal-kapal India cukup besar, berukuran 500 sampai 2.000 ton.

Setelah beberapa lama Aceh tidak begitu giat berperang, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah dari tahun 1607

---

56 C.R. Boxer, *ibid.*, hlm. 425
57 C.R. Boxer, *ibid.*, hlm. 421
58 *Ibid.*, hlm. 422
59 *Ibid.*, hlm. 525

hingga 1636 kegiatan perang dimulai lagi. Akhir abad ke-16 untuk Aceh adalah suatu periode kemunduran, banyak daerah yang tadinya ada di bawah pengaruhnya, telah melepaskan diri. Akan tetapi, Sultan Iskandar Muda dapat mengembalikan kekuasaannya di daerah-daerah yang sebelumnya pernah berada di bawah pengaruh Aceh, hingga tahun 1625 ia bahkan dapat memperluas daerahnya dan menaklukkan Deli, Johor, Bintan, Pahang, Kedah, Perak, dan Nias.[60]

Iskandar Muda menyadari bahwa daerah Sumatra Barat sangat penting untuk perdagangan lada dan emas, yang begitu dicari-cari oleh para pedagang Gujarat dan Cina, maupun para pedagang Belanda dan Inggris. Hal ini meningkatkan nilai dari kedua barang ekspor itu.

Pada permulaan abad ke-17, hasil-hasil ekspor Aceh diambil dari Indrapura. Karena pelabuhan Indrapura tidak begitu baik, ekspor itu dilakukan dari Silebar yang terletak di sebelah selatan Indrapura atau dari Tiku dan Pariaman di utara. Untuk dapat mengontrol jalan perdagangan dengan baik, Iskandar Muria mengirimkan panglima-panglima ke daerah penghasil bahan ekspor itu dan ke pelabuhan-pelabuhan dari mana bahan ekspor itu dikirimkan. Tempat-tempat ini adalah Tiku, Pariaman, Salida, dan Indrapura. Panglima-panglima yang menjaga keamanan terdiri dari orang-orang Aceh. Percobaan-percobaan pelanggaran akan ketentuan-ketentuan dari Aceh sekali-sekali terjadi juga, akan tetapi usaha tersebut tidak pernah berhasil, karena penjagaan amat ketat dan saksama. Panglima-panglima ini sangat baik dalam melaksanakan tugasnya karena mereka mendapat keuntungan yang cukup lumayan. Hanya I5% yang mereka kirim ke Aceh dari hasil emas dan lada, sedangkan sisanya dijual dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Iskandar Muda. Panglima-panglima itu diangkat selama tiga tahun. Mereka berhak untuk mendapat upeti dari daerah setempat dan oleh sebab itu mereka sangat setia kepada Sultan. Karena keuntungan-keuntungan ini, timbul persaingan yang keras di antara para panglima yang ditunjuk oleh Sultan.[61]

Bagi para pedagang asing hanya Banda Acehlah tempat yang didatangi untuk berdagang. Izin yang pernah diberikan kepada seorang Belanda yaitu Cornelis de Houtman pada tahun 1599 dan James Lancaster pada tahun 1602 hanya mempunyai tujuan untuk mencari sekutu dalam melawan orang-orang Portugis dan juga melawan Johor, yang pada waktu itu belum masuk daerah pengaruh Aceh. Pedagang-pedagang yang paling disukai Aceh adalah orang-orang Gujarat yang membawa bahan pakaian.

---

60 *Ibid.*, hlm. 425
61 *Ibid.*, hlm. 426

Ketika Sultan Iskandar Muda memerintah, ia hanya hendak memberi izin kepada salah satu, Inggris atau Belanda, untuk berdagang, atas dasar siapa yang paling besar memberi keuntungan kepadanya. Pendek kata orang-orang Belanda dan Inggris dipersukar untuk mengadakan perdagangan dengan Aceh. Karena mengalami kesukaran ini, para pedagang Eropa mulai memikirkan mengadakan suatu perdagangan penyelundupan, akan tetapi hal ini tidak berhasil.[62] Karena menyadari adanya kesukaran ini, orang-orang Inggris mengajukan permintaan untuk berdagang dengan Aceh. Mereka agaknya berhasil, karena pada waktu itu Aceh mendapat masalah yang tidak menguntungkan dari pihak Belanda yang membantu Johor, dalam mempertahankan diri terhadap penyerangan-penyerangan Iskandar Muda. Sikap Aceh bersahabat terhadap Inggris, bahkan Thomas Best, seorang Inggris, kemudian diberi gelar Orang Kaya Putih oleh Iskandar Muda.[63] Ia juga diberi izin untuk berdagang di Pariaman, Tiku, dan Barus, tetapi hanya untuk dua tahun. Izin dagang ini tidak berarti termasuk pembebasan dari cukai, karena Iskandar Muda tidak berniat untuk memberi terlalu banyak konsesi.

Orang-orang Belanda yang tidak berhasil untuk berdagang di pantai barat Sumatra, memindahkan kantor dagangnya dari Aceh ke Banten. Hal ini terjadi pada tahun 1615. Mereka bermaksud mengadakan perdagangan dari Banten dengan Indrapura. Pada tahun 1616 Belanda mengirim sebuah kapal yang bernama *Enckhuyssen* ke Indrapura di mana mereka diterima dengan ramah oleh penguasa Indrapura. Namun, orang-orang Belanda ini tidak berhasil untuk membeli lada, karena orang-orang Silebar tidak menunjukkan sikap persahabatan. Dari Silebar ini sebenarnya orang-orang Belanda mengharapkan kapal *Enckhuyssen* akan memuat lada, tetapi yang terjadi adalah kapal terpaksa mengangkat sauhnya dari sini. Percobaan berikutnya di bawah pimpinan Abraham Rasiera juga mengalami nasib yang sama.

Setelah berakhirnya izin orang-orang Inggris untuk berdagang di Tiku, Pariaman, dan Barus, orang-orang Belanda mendapat izin untuk berdagang di Tiku dan Pariaman untuk 2 tahun, dengan syarat bahwa minimum perdagangan adalah 6.000 tael, yaitu 24.00 real dikirim ke Tiku dan Pariaman. Di samping itu, orang-orang Belanda seperti orang-orang Inggris juga dipersukar dan harga-harga lada dinaikkan.

Iskandar Muda selama 20 tahun berhasil menekan perdagangan yang dijalankan dengan orang-orang Eropa. Yang membuatnya mundur adalah kekalahan yang dialami ketika ia menyerang Malaka pada tahun 1629.

---

62 *Ibid.*, hlm. 427
63 *Ibid.*, hlm. 462

Kekalahan ini mungkin merupakan suatu pukulan terhadap rasa percaya dirinya. Karena kekalahan ini ia mengadakan perjanjian dengan orang-orang Belanda dan memberi kepada mereka izin selama 4 tahun berdagang di seluruh kerajaannya terbebas dari bea dan diberi izin untuk ikut dalam perdagangan timah di Perak.[64]

Pada akhir pemerintahan Iskandar Muda di daerah pantai barat Sumatra pemerintahan setempat mulai merasakan kelonggaran dari pengawasan pusat sehingga panglima-panglima mengambil keuntungan bagi diri sendiri dalam mengadakan perdagangan dengan pedagang-pedagang asing.

Kesukaran-kesukaran yang dialami oleh orang-orang Belanda dalam perdagangan di pantai barat Sumatra, dijadikan alasan untuk menuntut kepada sultan memberi penjelasan tentang sikap panglima-panglima ini yang tidak sejalan dengan izin yang diberi Sultan. Akan tetapi, mereka tidak mendapat jawaban yang mereka inginkan. Sultan telah memalingkan persahabatannya kepada orang-orang Portugis karena orang-orang Belanda memberi bantuan kepada Johor.[65]

Keadaan inilah yang menjadi pemicu bagi Belanda untuk menyerang Malaka pada tahun 1641, serangan ini sangat merugikan supremasi dagang dan peranan politik Aceh.[66]

2. Maluku Menghadapi Portugis, Spanyol, dan Belanda

Fernao Magelhaes oleh raja Spanyol diberi suatu armada untuk pergi ke Maluku. Pada tanggal 10 Agustus 1519 Magelhaes meninggalkan Seirle. Tiga buah kapal yang masing-masing dipimpin oleh Louis de Mendoza, Juan de Cartagena, dan Gaspar de Quesada kemudian berontak. Ternyata Magelhaes tidak sampai di Maluku karena ia dibunuh di Mactan pada tanggal 27 April 1527, dan yang meneruskan perjalanan adalah Duarte Barbosa yang juga dibunuh. Pada tanggal 8 November 1521 yang tiba di Maluku adalah Carvalhinho dan Goncalo Gomes. Ia dan anak buahnya memasuki pelabuhan Tidore, dan mereka diterima dengan sangat ramah.[67] Mulai saat itu keadaan orang-orang Portugis di Maluku berkembang. Antonio de Brito mendirikan benteng di Ternate yang disebut Saint John pada tahun 1522. Pada waktu itu yang memerintah Ternate adalah Kaitjil Darus yang mewakili raja yang masih di bawah umur yang bernama Boleife.

Raja Bacan membantu orang-orang yang kandas yang menjadi sahabat Portugis. Permusuhan antara Portugis dan Tidore dimulai ketika Antonio

---

64 J. Karthirithambi–Wells, *Ibid.*, hlm. 464
65 *Ibid*, hlm. 465
66 *Ibid*, hlm. 465
67 Jacobs: A Treatis, on the Moluccos 1970, *op. cit.*, hlm. 201, 203

de Brito mendengar tentang kedatangan jung-jung dari Banda yang hendak membeli cengkih. Ia mengirim sebuah *galai* (perahu besar) untuk melawan jung-jung ini. Namun, *galai* ini dapat ditenggelamkan dekat Tidore, orang-orang Tidore kemudian memenggal 16–17 kepala orang Portugis. Peristiwa inilah yang mencetuskan dimulainya perang antara Portugis dan Tidore.[68] Perang antara orang Portugis dan Tidore berlangsung untuk beberapa waktu, di mana Tidore mendapat bantuan dari orang-orang Spanyol yang datang lewat Amerika Selatan. Dengan demikian, dalam perang itu terdapat di satu pihak Tidore yang dibantu orang-orang Spanyol dan di pihak lain Ternate yang dibantu orang-orang Portugis. Untuk beberapa waktu orang Portugis dapat mempertahankan kedudukannya di Ternate.

Pada tahun 1529 Dom Jorge de Meneses dengan sekutu-sekutunya Ternate dan Bacan menyerbu Tidore dan mengalahkan Tidore dan orang-orang Kastilia (Spanyol).

Kapten-kapten Portugis yang bergantian ke Ternate untuk mempersingkat waktu tidak lagi berlayar melalui jalan laut Jawa, akan tetapi melalui Kalimantan Utara.

Dom Jorge de Meneses Goncalo Pereira dibunuh oleh orang-orangnya sendiri karena memaksa orang-orang Ternate untuk menyetor $^1/_3$ hasil cengkih mereka untuk raja Portugal.[69]

Tristoa de Altaida, pada tahun 1533, karena tindakannya yang kasar menimbulkan pemberontakan, sehingga raja Ternate yang biasanya menjadi sekutu memusuhinya. Penduduk dari Papua sampai Jawa telah dimobilisasi atau diminta bantuannya untuk mengusir Tristoa Altaida dan orang-orang Portugis lainnya. Orang-orang Ternate kemudian membakar benteng Portugis dan sebagian kota Ternate. Mereka menempatkan Dajalo kembali ke takhta dan membuat pertahanan yang kuat untuk melawan Portugis. Tidore dan Bacan pun dipertahankan dan pertempuran melawan Portugis dimulai dengan sengit. Seluruh Maluku boleh dikatakan bangkit melawan Portugis. Sebuah *brigantine* (kapal dagang dengan dua tiang dan layar yang dapat berlayar cepat) dirampas dan Balthasar Vogado dan anak buahnya dibunuh dan mereka pun merebut beberapa *kalulues*,[70] membunuh dan melukai orang-orang Portugis beserta budak-budaknya. Mereka pun berhasil merampas senjata api dan senjata lainnya dari orang-orang Portugis.

Orang-orang Maluku pun berjanji bahwa bilamana mereka tidak berhasil mengusir Portugis, mereka akan menebang pohon cengkih dan merusak negerinya. Perang ini sangat sengit sehingga mengakibatkan penderitaan sangat besar.

68 *Ibid.*, hlm. 211
69 *Ibid.*, hlm. 217, 218
70 Semacam sampan

Tristoa de Altaida kemudian mendapat bantuan, dan dengan bantuan ini Altaida hendak menyerang Tidore. Akan tetapi, ia terpaksa menyembunyikan armadanya karena orang-orang Maluku keluar untuk mengadakan pertempuran di laut. Ketika ia mengubah arah ke Jailolo, nasib yang tidak menguntungkan juga menyambutnya di situ. Kekalahan-kekalahan yang dialami oleh Altaida, mengharuskannya meminta bantuan kembali ke Malaka, tempat Antonio Galvao menderita sakit. Ketika Antonio Galvao mendengar tentang keadaan di Maluku yang sangat gawat bagi kepentingan Portugis, ia menyiapkan dua buah kapal yang kuat, senjata yang banyak dan juga bahan peledak. Di samping itu, atas biaya sendiri ia memperlengkapi suatu kapal untuk memuat banyak orang dan perlengkapannya. Ia pun berangkat tanpa persetujuan Kapitan Malaka.

Galvao tiba di Maluku pada tanggal 27 Oktober 1556. Ia mendapatkan benteng Portugis dalam keadaan yang sangat menyedihkan sehingga pertahanannya lemah, sementara orang-orang Ternate telah meninggalkan pulaunya. Meskipun Galvao menderita sakit ia mempersiapkan diri untuk berperang kembali. Orang-orang Portugis yang berada di Ternate khawatir akan keamanan mereka, karena merasa Tidore dengan sekutunya sangat kuat. Oleh sebab itu, mereka mempertimbangkan dua kemungkinan, meminta bantuan dari India atau tidak melakukan perang terbuka melainkan gerilya.

Pihak Maluku mempersiapkan diri dengan sejumlah besar pasukan, senjata api, dan meriam yang berjumlah antara 500–600. Untuk melindungi badannya mereka memakai lapisan kulit, *baju zirah, barut dadgesper*, jas-jas dari lempeng tembaga, topi baja, pedang, tombak, dan *bucklers*[71] dan perisai. Senjata tersebut adalah hasil rampasan senjata dari orang Portugis atau yang diberi orang Spanyol. Di samping senjata Eropa mereka juga mempunyai senjata pribumi buatan negerinya sendiri.

Antonio Galvao kemudian membawa armadanya ke depan kota Tidore, di sana ia mengatakan bahwa ia tidak datang untuk berperang. Namun, orang-orang Tidore yang sudah siap-siap tidak begitu saja mau mempercayainya, karena telah mempunyai pengalaman yang pahit. Sahut-menyahut diadakan antara kedua belah pihak. Ini dimungkinkan karena armada Galvao merapat sekali ke kota Tidore. Maksud Galvao untuk mencapai perdamaian gagal. Orang-orang Tidore mulai menembaki armadanya, sehingga Galvao memerintahkan pada malam hari semua lampu harus dimatikan dan tidak boleh ada tembakan balasan.[72] Hari kedua setelah malam tersebut di atas Galvao memberanikan diri untuk

71 Perisai bundar
72 Jacobs, *op. cit.*, hlm. 243

mendarat di Tidore. Pada suatu ketika ia berhadapan dengan Dajalo raja Ternate yang memusuhi Portugis. Dajalo bersenjata lengkap dan memakai baju *zirah*. Sial bagi Dajalo, ia dapat dikalahkan dalam suatu duel pedang sehingga Galvao berhasil memasuki benteng Tidore. Dari sini ia berhasil merebut kota.

Meskipun telah mengalami kekalahan, Tidore masih mencoba untuk mengadakan perlawanan dengan melakukan penyerbuan di laut dengan *kora-kora*. Ketika ternyata *kora-kora* bukan tandingan bagi perlengkapan dan perkapalan Portugis, suatu taktik yang lain direncanakan lagi, yaitu penyerangan dari darat yang dibantu dari laut. Akan tetapi, sebelum niat ini dapat dilaksanakan, orang-orang dikejutkan oleh tembakan pihak Portugis. Perlawanan dilancarkan terhadap penyerbu mereka, yang menggugurkan salah seorang pemimpin yang berpengaruh, sehingga semangat perlawanan orang-orang menjadi kendur. Tidak lama kemudian raja-raja Maluku menyadari bahwa Galvao benar-benar bukan lawan mereka.

Ketika Galvao berkuasa kembali di Maluku (1536–1540) daerah itu kembali menjadi korban pegawai-pegawai Portugis yang menindas rakyat setempat dan bertindak sebagai lintah darat. Akibatnya rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Khairun berontak terhadap kesewenang-wenangan orang-orang Portugis. Serangan-serangan terhadap kedudukan benteng-benteng Portugis terus dilancarkan terutama pada tahun 1565. Rakyat Ternate makin marah setelah sultannya yaitu Khairun ditipu dan dengan diam-diam dibunuh dengan dalih untuk berunding yaitu pada tahun 1570. Pimpinan perlawanan diambil oleh Babullah sehingga benteng-benteng Portugis direbut rakyat Ternate. Pada tanggal 28 Desember 1577, rakyat Ternate berhasil mengusir mereka dari negerinya. Orang-orang Portugis pindah ke pulau lain dekat Tahula, tidak berapa jauh dari Tidore. Di sini pun mereka terus-menerus diganggu oleh orang Jawa dan Melayu yang biasanya mengangkut cengkih, maupun oleh orang-orang Ternate sendiri.

Pada tanggal 15 November 1582 Portugal dan Spanyol disatukan di bawah Raja Felipe II, dan raja ini menyuruh Gubernur Jenderal Spanyol yang berkedudukan di Filipina untuk memberi bantuan kepada orang-orang Portugis di Maluku. Orang-orang Spanyol mencoba merebut Ternate kembali, tetapi tidak berhasil, karena tidak lama kemudian Maluku menjadi ajang perebutan antarbeberapa bangsa Eropa.

Orang-orang Belanda mulai muncul di perairan Maluku di mana Steven van der Haghen merebut benteng Portugis di Amboina pada tanggal 23 Februari 1605. Cornelis Bastians merebut benteng Tidore. Benteng Tidore karena dijaga hanya oleh sekelompok kecil tentara Belanda, dengan mudah diserbu oleh armada Spanyol pada tahun 1606 di bawah pimpinan Acuna.

Benteng Gamulamu di Ternate direbut, dan Sahid Barkat, Raja Ternate, dipaksa menyerahkan semua benteng dari sekutu-sekutunya dan melepaskan semua tawanan Kristen. Kecuali itu, ada juga larangan Sultan untuk beralih ke agama Kristen dan bahwa orang Kristen yang hendak beralih agama harus dilaporkan kepada penguasa Spanyol. Jelaslah Sultan Ternate sangat dirugikan dengan ketentuan tersebut, karena tidak hanya benteng tetapi juga daerah pengaruh kekuasaannya jatuh ke tangan Spanyol. Sultan dan beberapa putranya serta beberapa Kaicil diangkut ke Manila sebagai sandera, sementara yang memihak Spanyol dibebaskan kembali.

Pada tahun 1607 orang-orang Belanda kembali dan mereka mendapat bantuan Ternate yang memusuhi Spanyol karena telah membawa sultan dan putra-putranya ke Manila sebagai sandera. Dengan bantuan Ternate orang-orang Belanda menduduki kembali Ternate, dan kemudian mendirikan benteng-benteng, dan menyerang orang-orang Spanyol di Tidore. Belanda kemudian berhasil pula merebut Makian dan Motir, sehingga di tempat-tempat ini pun mereka mendirikan benteng-bentengnya.

Sekitar tahun 1624–1639 sering terjadi pertempuran di antara orang-orang Spanyol dan Belanda di daerah Maluku, dan pihak Spanyol biasanya mengalami kekalahan. Karena mempunyai pengalaman yang pahit dengan orang-orang Portugis dan Spanyol akhirnya pada tahun 1639 antara Ternate dan Tidore terjadi suatu persetujuan persahabatan.

Dalam perebutan monopoli rempah-rempah, VOC menghadapi tantangan-tantangan bukan hanya dari pedagang-pedagang Barat, melainkan juga dari kerajaan-kerajaan di daerah Maluku bahkan dari para pedagang Jawa dan Melayu. Pedagang-pedagang yang oleh Kompeni Belanda dianggap sebagai penyelundup itu, oleh Sultan Ternate diberi bantuan dengan tujuan dapat meluaskan pengaruhnya dalam menghadapi Kompeni Belanda.

Pada tahun 1635 timbul perlawanan di mana-mana di bawah pimpinan Kakiali, kapten Hitu. Setelah itu, Gubernur Jenderal van Diemen dua kali menuju Maluku, yaitu tahun 1637 dan 1638, untuk menegakkan kekuasaan Belanda di sana dan agar Sultan Ternate mengakui Kompeni. Dalam pada itu, Kompeni menjanjikan akan memberikan hadiah kepada siapa yang dapat membunuh Kakiali. Pembunuhan terhadap Kakiali ini terjadi pada tahun 1643 dengan cara ditusuk golok pada malam hari di tempat tidurnya. Dengan meninggalnya Kakiali, orang-orang Kompeni dapat menumpas perlawanan orang-orang Maluku itu. Kemudian muncul kembali perlawanan dari orang-orang Hitu yang dipimpin Telukabesi. Perlawanan ini baru berhasil ditumpas oleh Kompeni pada tahun 1646. Selanjutnya, agar tidak lagi muncul perlawanan-perlawanan, banyak di antara para pemimpin Hitu yang diasingkan ke Batavia untuk lebih mudah diawasi oleh pemerintah tinggi Kompeni.

Untuk beberapa tahun perlawanan rakyat Maluku terhadap Kompeni boleh dikatakan reda, tetapi sejak tahun 1650 timbul lagi perlawanan yang lebih meluas, yaitu dari daerah Ambon sampai Ternate. Sultan Mandarsyah yang oleh rakyatnya dianggap dekat dengan Kompeni, diusir dan diganti oleh saudaranya yang juga tidak bijaksana. Pemimpin perlawanan rakyat Maluku adalah Saidi, sementara Sultan yang diturunkan dari takhtanya melarikan diri ke Batavia dan menyerah kepada Kompeni. Perlawanan yang dipimpin Saidi sangat mencemaskan Kompeni Belanda karena seluruh daerah penghasil rempah-rempah dibakar, di mana-mana timbul perlawanan terhadap Kompeni Belanda. Ketika perang sedang berkobar datanglah de Vlamingh van Oosthoorn membawa bala bantuan. Dengan adanya bantuan itu terjadilah pertempuran yang hebat di Huwamohel. Sembilan benteng yang terletak di sana diserang Kompeni di bawah komando de Vlamingh yang datang ke sana sejak tanggal 22 Juli 1655. Tidak lama kemudian Saidi tertangkap dan ditusuk belati oleh de Vlamingh, sehingga gugur. Dengan demikian, perlawanan rakyat di daerah Maluku itu dapat ditumpas.

Selanjutnya, Sultan Ternate yang sah harus membuat suatu perjanjian baru di mana sultan Ternate tidak perlu lagi menempatkan wakilnya di kepulauan Ambon karena segala urusan ditangani Kompeni sendiri. Agar sultan-sultan Ternate dan Tidore mendapat kompensasi, Kompeni mengajukan permintaan untuk memberi mereka uang setiap tahun, misalnya untuk Sultan Ternate 12.000 ringgit, dan kerajaannya diminta agar tidak menanam pohon-pohon rempah-rempah lagi. Dengan demikian, Kompeni tidak perlu khawatir akan adanya perdagangan gelap rempah-rempah di bagian utara kepulauan Maluku, karena di daerah itu tidak ada lagi pohon-pohon rempah-rempah.

Pada masa pemerintahan "Sultan Amsterdam" tahun 1675, timbul lagi perlawanan terhadap Kompeni yang berada di bawah gubernur yang bernama Padbrugge. Perlawanan rakyat dilakukan dengan cara gerilya dari daerah Jailolo. Perlawanan itu tidak berhasil dan Sultan Amsterdam terpaksa menyerahkan diri dan kemudian diasingkan ke Batavia. Dengan demikian, kebijakan VOC menegakkan monopoli perdagangan rempah-rempah di daerah Maluku berhasil, berarti bahwa VOC berhasil menanamkan kekuasaan politik kolonialnya di daerah Maluku. Pada abad berikutnya politik kolonial Belanda selalu mendapat perlawanan dari sultan-sultan dan rakyat Maluku.

3. Banten dan Mataram Menghadapi Belanda

Banten merupakan kerajaan Islam yang mulai berkembang pada abad ke-16, setelah pedagang-pedagang dari India, Arab, dan Persia mulai menghindari Malaka yang pada tahun 1511 telah dikuasai Portugis. Orang-

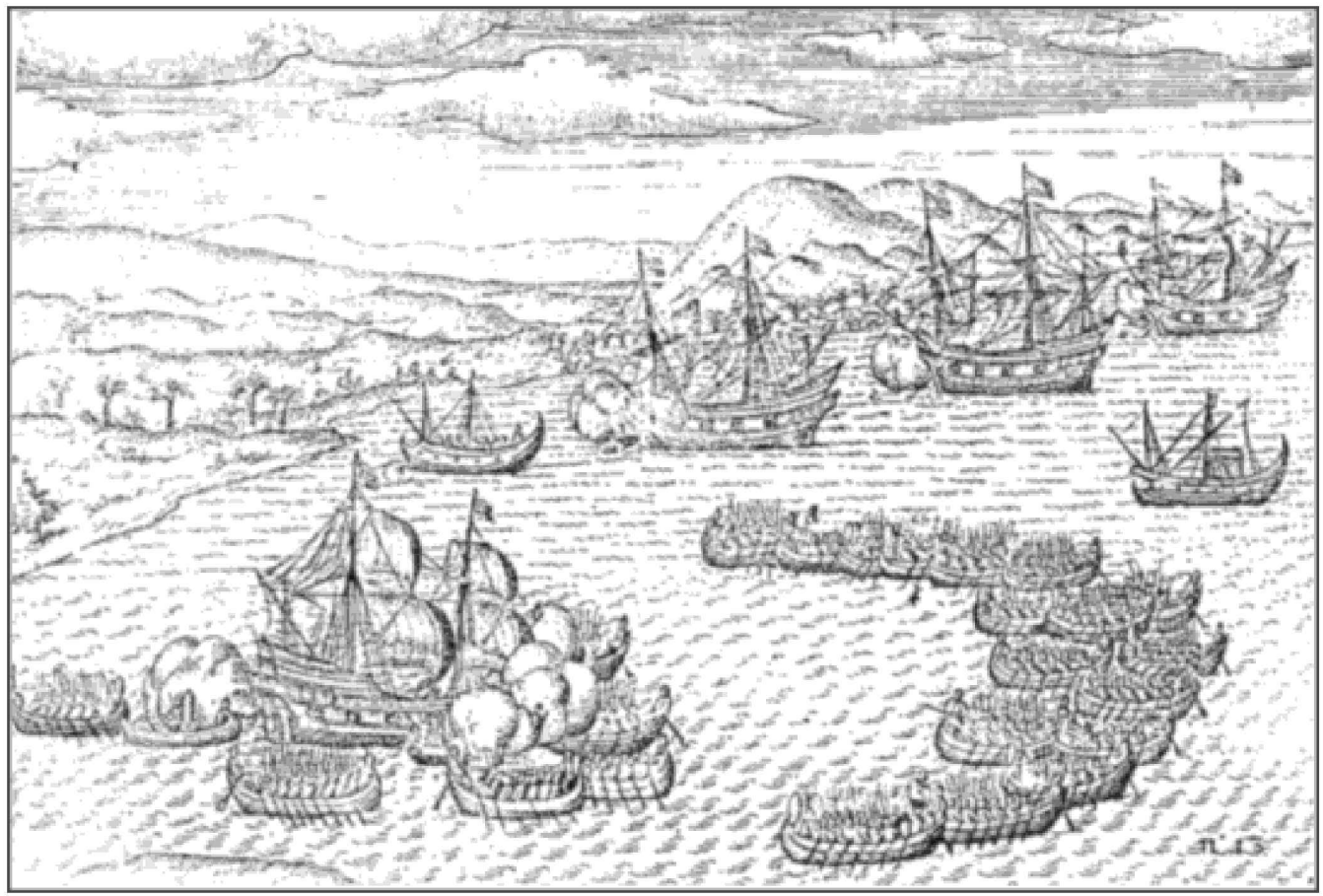

Gambar 7.4 Pada tanggal 7 September 1596 sekitar dua puluh perahu berawak masing-masing sekitar lima puluh orang menyerang kapal "Duyfken" di teluk Banten, kapal Duyfken termasuk dalam armada Cornelis de Houtman. Di latar belakang kelihatan tiga kapal dari armada de Houtman

orang Belanda dicurigai ketika datang untuk pertama kali pada tahun 1596. Akan tetapi, setelah mereka menerangkan maksud kedatangannya, mereka pun diterima dengan baik. Mangkubumi Banten yang juga memangku wali raja datang ke kapal di mana antara Mangkubumi dan Cornelis de Houtman dibuat suatu perjanjian persahabatan yang mengatakan bahwa Belanda boleh berdagang dengan bebas di Banten.

Kompeni kemudian diberi tempat untuk menyimpan barang dagangan mereka dan tempat untuk berdagang. Suasana perdamaian ini tidak berlangsung lama, karena di antara orang-orang Eropa yang datang ke Banten timbul persaingan, dan sikap orang Belanda yang kasar menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sikap yang kasar ini menyebabkan beberapa orang Belanda ditangkap antara lain de Houtman sendiri. Barang dagangan mereka disita. Orang-orang Belanda yang berada di kapal-kapal mulai menembak ke arah kota sehingga situasi memburuk. Orang-orang Belanda mengerti bahwa setelah mengambil sikap permusuhan itu mereka tidak dapat memperoleh perbekalan dari Banten. Oleh sebab itu, mereka berlayar ke Sumatra Selatan.

Mereka kemudian kembali lagi ke Banten pada tanggal 2 Oktober tahun itu juga dan mengadakan suatu perjanjian kembali. Untuk melepaskan orang-orang Belanda yang ditangkap itu, mereka harus membayar sejumlah uang. Setelah perjanjian itu disetujui, mereka diberi hak yang sama lagi seperti pedagang-pedagang asing lainnya. Perjanjian ini pun berlangsung tidak lama, karena pada tanggal 28 Oktober sudah timbul ketegangan lain, yaitu antara Belanda dan Portugis timbul persaingan terus-menerus sebagaimana dapat dilihat di beberapa daerah di Indonesia. Sebagai akibat dari persaingan ini, kedua belah pihak saling mencoba merusak hubungan antara pihak musuh dan raja Banten. Orang-orang Portugis berhasil merusak hubungan antara Belanda dan Banten. Sebagai balas dendam orang-orang Belanda menembaki kapal-kapal Portugis dan juga merusak perahu-perahu Banten.[73] Tindakan ini tidak menguntungkan hubungan Belanda dengan Banten, karena sepanjang pantai utara Jawa nama mereka menjadi rusak.

Suatu rombongan baru dari negeri Belanda pada tanggal 28 November 1598 di bawah pimpinan van Neck dan van Waerwyck dengan kapalnya berjumlah 8 buah tiba di Banten. Kunjungan kapal-kapal Belanda kedua kali ini beruntung, karena hubungan Banten dengan orang-orang Portugis sedang berubah menjadi permusuhan, sehingga mereka diterima dengan baik. Sikap van Neck yang sangat hati-hati dan dapat mengambil

73 de Klerck. *op. cit.*, hlm. 198

hati pembesar-pembesar Banten, juga sangat menguntungkan Belanda. Tiga buah kapal dikirim kembali ke negeri Belanda penuh dengan muatan, sedangkan kelima kapal lainnya melanjutkan perjalannya ke Maluku.

Van Waerwyck tiba kembali di Banten pada tahun 1602 di mana ia mencoba mendapat izin berdagang, tetapi sia-sia. Ia hanya diberi izin mendirikan suatu kantor dan menempatkan seorang pegawai. Kepada pegawai ini ia beri wewenang di bidang perdagangan, hukum warisan, dan untuk memperoleh monopoli perdagangan.[74]

Seperti telah disebut di atas, persaingan antara Portugis dan Belanda dalam bidang perdagangan pada abad ke-17 membawa ke suatu arena perang kerajaan-kerajaan. Semuanya hendak mengambil keuntungan dari perdagangan rempah-rempah. Sebenarnya sebelum kedatangan van Waerwyck ke Banten pada tahun 1602, Eropa mengalami suatu perubahan politik. Portugis dan Spanyol bersatu di bawah mahkota Spanyol. Dengan perubahan ini Spanyol merasa berkewajiban melindungi kepentingan Portugis di mana-mana, juga yang ada di kepulauan Indonesia.

Untuk tugas ini Raja Felipe III dari Spanyol menginstruksikan Andrea Furtado de Mendoa dengan suatu armada berangkat ke pantai utara Jawa untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya. Pada tahun 1601 Furtado de Mendoza memblokade Banten untuk menghalang-halangi kapal-kapal Belanda menghubungi kantor dagang mereka. Armada Belanda yang tiba di bawah pimpinan Walpert Harmansz menyerang armada Spanyol yang mengalami kerusakan kecil dan meninggalkan Banten. Pertunjukan kekuatan Belanda terhadap armada Spanyol ini menguntungkan Belanda yang akhirnya dapat memuat rempah-rempah dan lada dari pelabuhan Banten.

Pada tahun 1602 orang-orang Belanda mencapai hasil yang memuaskan karena berhasil mengusir orang-orang Spanyol dan Portugis yang telah berada di bawah satu raja. Keadaan yang menguntungkan ini tidak selalu ada. Pada tahun 1602 di Inggris pun orang mulai memerhatikan perdagangan ke kepulauan rempah-rempah. Suatu badan perdagangan langsung didirikan pada akhir tahun tersebut yaitu pada bulan Desember utusan kerajaan Inggris Kapten James Lancaster pun tiba di Banten dengan membawa surat dan hadiah-hadiah dari Ratu Inggris.[75] Utusan ini pun diterima dengan baik oleh Banten dan diberi izin untuk mendirikan suatu kantor dagang.

Tahun 1603 Wybrand van Waerwyck dengan armadanya mengunjungi Banten untuk berdagang. Keadaan tidak begitu baik lagi, syahbandar menuntut bea yang tinggi untuk perdagangan dan untuk

---

74 *Ibid.*, hlm. 207

75 P.J. Veth, *Java geograpisch, ethnologisch, historisch*, Tweede Druk, bewerkt door Yoh F. Snelde Erven, F. Bohn, 1896, hlm. 334

berlabuh. Harapan untuk mendapat keuntungan besar dari perdagangan ini gagal, meskipun beberapa kapal pulang ke negeri Belanda dengan membawa rempah-rempah.

Pada tahun 1603 pula orang-orang Belanda telah mendirikan kantor dagang VOC di Banten, dan ini merupakan kantor dagang pertama di seluruh kepulauan Indonesia. Yang menjadi kepalanya adalah Francois Wittert. Hubungan baik berlangsung untuk beberapa waktu, karena terjalinnya hubungan dagang yang sehat antara Banten, Inggris, dan Belanda. Kemudian persaingan antara Inggris dan Belanda menjadi-jadi karena kedua-duanya mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga Banten sering menjadi arena permusuhan antara kedua bangsa itu.

Situasi ini makin lama makin buruk karena baik pihak Inggris maupun pihak Belanda mencoba memengaruhi pemerintah Banten dan pembesar-pembesarnya, akibatnya perdagangan VOC mengalami kemunduran. Keadaan dalam negeri Banten pada tahun 1608 juga tidak menguntungkan, karena pertikaian-pertikaian yang timbul di antara keluarga raja yang mencari-cari sekutu untuk mempertahankan kepentingan masing-masing.

Melihat keadaan ini VOC menjalin hubungan lain, yaitu membuat kontrak dengan wali raja Banten. Mereka mengadakan perundingan-perundingan dengan Pangeran Jakarta yang berdiri di pihak lawan raja Banten. Di Banten orang Inggris dan Belanda merasa terkatung-katung, karena raja tidak merasa penting untuk memperbarui kontrak. Karena keadaan ini, Hermite berusaha terus mendekati Pangeran Jakarta untuk mendirikan sebuah kantor dagang. Hasilnya dicapai pada bulan November 1610, sementara keadaan kantor VOC di Banten tidak berkembang justru makin mundur, karena hubungan antara VOC dan raja tidak baik.

Pada tahun 1603 VOC memutuskan untuk mengangkat Jan Pieterszoon Coen sebagai kepala tata buku yang mempunyai wewenang atas kantor dagang di Banten dan Jakarta. Orang inilah yang berhasil memajukan kepentingan VOC. Ialah yang menaruh perhatian utama pada Jakarta. Pada tempatnyalah bilamana Pangeran Jakarta tidak memberi izin kepada VOC untuk membuat suatu benteng. Banten sebenarnya juga tidak memberi izin untuk pembangunan benteng oleh VOC, karena menurut mereka akan mengancam kepentingan perdagangan masing-masing (Banten dan Jakarta).

Peran yang dimainkan Jan Pieterszoon Coen adalah membuat Banten dan Jakarta saling curiga. Beralasan apabila Mangkubumi Banten berniat untuk memecat Pangeran Jakarta dan menempatkan kedudukan Jakarta di bawah Banten. Mangkubumi menganggap bahwa Pangeran Jakarta terlalu memberi hati kepada orang-orang Eropa. Selain kepada orang-orang Belanda, kepada orang-orang Inggris pun diberi izin mendirikan

kantor dagang di Jakarta. Selain kecurigaan antara Jakarta dan Banten, antara VOC dan Inggris pun timbul persaingan yang sering meletus dalam perang kecil-kecil di perairan Banten. Permusuhan antara Inggris dengan Belanda dan Banten dengan Belanda membuat Coen mengambil kesimpulan bahwa jalan perundingan untuk mendapat izin perdagangan tidak ada manfaatnya. Ia lebih suka tindakan tegas.

Peristiwa kapal Prancis St. Michel yang berlabuh di Banten pada tahun 1619 memberi alasan kepada Kompeni untuk sama sekali meninggalkan Banten. Kompeni hendak memusatkan kepentingan-kepentingannya di Jakarta dan telah mempunyai benteng-benteng yang kuat. Bagi Kompeni menjelang tahun 1602 keadaan sangat gawat, sikap permusuhan dinyatakan hampir bersamaan oleh Mataram dan Banten. Selain musuh kerajaan-kerajaan di Jawa, Kompeni pun harus menghadapi Inggris yang juga mempunyai kepentingan-kepentingan dagang yang sama dengan Kompeni yaitu mencari kemungkinan-kemungkinan dan kesempatan-kesempatan untuk meraih keuntungan.

Mau tidak mau karena persaingan kepentingan pertempuran pasti akan terjadi antara Belanda dan Inggris. Pada tahun 1618 Kompeni terpaksa harus mengambil bantuan dari Maluku. Pangeran Jakarta yang melihat keadaan Kompeni memburuk, tidak tinggal diam. Ia mendekati Inggris yang telah mendirikan benteng untuk menyerang benteng Belanda. Antara Belanda dan Inggris terjadi pertempuran laut yang dahsyat; kemenangan ada di pihak Inggris. Coen dan armadanya melarikan diri ke Maluku untuk mengambil bantuan. Sementara itu, benteng Kompeni di Jakarta dalam keadaan bertahan. Dengan suatu siasat, Pangeran Jakarta dapat menangkap komandan benteng Kompeni van den Broeck. Melihat keadaan di Jakarta yang sangat tidak menguntungkan Banten, pihak Banten merasa perlu mencampuri keadaan ini. Tumenggung Banten tidak suka penguasa Jakarta memberi tempat kepada Inggris maupun Belanda. Oleh sebab itu, ia mengirim seorang Tumenggung ke Jakarta dengan kurang lebih 4.000 prajurit.[76] Tahanan Belanda diambil alih oleh Banten. Kekuasaan Pangeran Jakarta yang memberi izin kepada Inggris dan Belanda diambil alih dan daerah Jakarta secara langsung diperintah dari Banten.

Sementara itu, keadaan benteng Kompeni di Jakarta tetap dalam keadaan lemah dan mereka terpaksa mengibarkan bendera perdamaian sampai kedatangan Coen dari Maluku. Ini terjadi pada tanggal 28 Mei 1619. Sejak itu, Coen memutuskan untuk membangun benteng Kompeni di daerah Jakarta akan menjadi tempat pertemuan kapal-kapal Kompeni yang berlayar di kepulauan Nusantara.

---

76 P.J. Veth *op. cit.*, hlm. 346

Kedatangan Coen dari Maluku ternyata menjadi malapetaka bagi penduduk Jakarta karena kota mereka dimusnahkan sama sekali. Berita mengenai pemusnahan kota Jakarta menjadi ancaman bagi benteng Kompeni di Banten dengan cepat terdengar di Banten. Setelah Kompeni mengadakan pameran kekuatan terhadap Jakarta ini tuntutan dikirim ke Banten untuk melepaskan semua tawanan Belanda. Sambil mengajukan tuntutan ini Coen mengancam akan menyerang Banten bilamana dalam waktu 24 jam tuntutannya tidak dipenuhi. Tawanan Belanda dilepaskan, tetapi bagi Banten ini bukan berarti persahabatan. Usaha-usaha untuk merongrong perdagangan VOC tetap dilakukan sehingga Kompeni menjadi kewalahan. Mereka mengirim van den Broeck yang pernah menjadi tawanan Banten untuk menanyakan apakah yang diinginkan Banten. Jawaban raja Banten adalah terserah yang mana tidak menjadi soal.[77] Karena jawaban yang acuh tak acuh ini, Kompeni merasa perlu untuk meninggalkan kantor dagangnya di Banten mengangkut semua harta bendanya untuk diangkut ke Jakarta dan suasana permusuhan dimulai kembali.

Setelah mengangkut semua harta bendanya, Kompeni memblokade Banten. Banyak perahu-perahu dirampas dan orang-orang Cina yang ada di perahu-perahu itu dibawa ke Batavia.

Keadaan antara Kompeni dan Banten menjadi agak tenang selama lebih kurang 30 tahun. Namun, keadaan ini berubah setelah Sultan Banten yang tua meninggal pada tahun 1651. Penggantinya adalah cucunya yang bernama Abu'l Fath Abdulfattah yang terkenal sekali dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan ini mempunyai pandangan yang lain terhadap Kompeni, tidak seperti kakek neneknya. Ia sangat memusuhi Kompeni, yang menghalang-halangi perkembangan perdagangan Banten. Selain itu, ia adalah seorang yang sangat taat terhadap agama Islam. Pada tahun-tahun pertama pemerintahannya ia berhasil mengembangkan kembali perdagangan Banten yang sangat merugikan perdagangan VOC di Jakarta. Selain itu, ia mulai mengadakan penyerangan-penyerangan dengan sistem gerilya terhadap Jakarta lewat darat, sedangkan serangan-serangan kecil diadakan pula melalui laut.

Pada tahun 1656 dua kali kapal Kompeni berhasil dirampas oleh orang-orang Banten, dan dilakukan pula perusakan-perusakan terhadap perkebunan tebu Kompeni. Bahkan sultan menolak menerima utusan Belanda. Sikap ini menyebabkan orang-orang Belanda merasa tidak aman di Banten, sehingga mereka meninggalkan Banten dengan diam-diam. Ketika tidak ada lagi orang-orang Kompeni di Banten, Kompeni memblokade pelabuhan Banten, sehingga merugikan perdagangan Banten. Sultan terpaksa mendekati

77 *Ibid.*, hlm. 162

Belanda untuk mengadakan perundingan yang sangat sulit, karena Belanda tetap mempertahankan keinginan perdagangan monopoli di Maluku dan Malaka yang sangat sukar disetujui oleh Banten. Karena tidak dapat menerima tuntutan Belanda ini, Belanda memblokade kembali pelabuhan Banten. Pada tahun 1659 tercapai suatu persetujuan antara Banten dan VOC. Keinginan Banten untuk tetap mengadakan perdagangan dengan Maluku tidak dapat ia pertahankan, akan tetapi Belanda akan membayar kerugian-kerugian yang diderita Banten.

Perdagangan Banten mulai berkembang pesat dengan Persia, Surat, Mekah, Koromandel, Benggala dan Siam, Tonkin, dan Cina.[78] Bantuan diberi orang-orang Denmark dan Inggris dalam perdagangan Banten.

Keadaan Banten di bawah Sultan Ageng Tirtayasa berkembang dengan lebih baik sehingga menjadi ancaman bagi Batavia. Orang-orang Eropa yang datang untuk membeli rempah-rempah banyak yang mempunyai kantor dagang di Banten. Suasana yang aman ini berlangsung hingga tahun 1676 ketika putra sulung Sultan kembali dari Mekah dan mendapat gelar Sultan Haji. Sultan Haji ini tidak begitu senang terhadap orang-orang yang dekat pada ayahnya, ia lebih berpihak kepada Kompeni.

Ketegangan antara Sultan Ageng dan Kompeni tetap ada. Namun, orang-orang Banten tanpa menyatakan perang secara terbuka terus-menerus mengganggu Kompeni di daerah antara Cirebon dan Citarum. Kompeni tidak sanggup mengatasi serbuan-serbuan Banten yang sampai pada dinding kota Batavia. Untuk mempertahankan kota Batavia, kota ini diperkuat. Perdagangan Kompeni sangat menderita karena keadaan dibuat tidak aman bagi mereka hingga pada tahun 1680.

Sejak tahun 1680, keadaan berubah bagi Banten, kesibukan Kompeni yang dialihkan ke arah timur dalam menyerbu Trunojoyo berakhir sehingga Kompeni dapat mengalihkan perhatiannya secara penuh ke Jawa Barat, antara lain ke Banten, yang bagi Kompeni adalah musuh yang sangat berbahaya. Keadaan itu bagi Sultan Haji yang menaruh simpati terhadap Kompeni merupakan kesempatan yang sangat baik. Memang sejak tahun 1680 keadaan Sultan Ageng menjadi sulit, terutama karena putranya, Sultan Haji, memotong politiknya.

Akan tetapi, meskipun keadaan bagi Sultan Ageng Tirtayasa telah menjadi agak berat, Sultan yang telah mulai lanjut usia itu tidak mudah dapat ditundukkan, meskipun harus menghadapi putranya sendiri. Perlawanan terhadap Kompeni tetap diadakan. Pengikut-pengikutnya yang terbesar di daerah Jawa Barat hingga Sumatra Selatan membuat daerah sampai Sungai Tanggerang yang merupakan perbatasan Banten, dan

78 H.T. Colenbrandes, *Koloniale Geschiedenis*, Tweede Deel, 's-Gravenhage, 1925, hlm. 181

daerah pengaruh Kompeni, tidak aman. Sultan Haji yang sebenarnya telah memegang tampuk kekuasaan tidak mendapat pengakuan.[79] Andaikata Sultan Haji tidak mendapat bantuan dari Kompeni untuk mempertahankan kekuasaannya, mungkin kekuasaannya telah berakhir pada tanggal 27 Februari 1682, ketika istananya, Surosowan, diserbu oleh pengikut-pengikut Sultan Ageng.[80]

Dengan susah payah dan dengan bantuan Kompeni Sultan Haji berhasil mengembalikan kekuasaannya, yang sebenarnya sudah merupakan kekuasaan Kompeni, di Banten. Ini terbukti dari keinginan-keinginan Kompeni yang dengan sangat mudah dituruti oleh Sultan Haji. Salah satu keinginan Kompeni yang segera dipenuhi adalah larangan bagi bangsa Eropa lainnya untuk menetap di Banten. Mereka semuanya harus meninggalkan Banten.

Bagi Sultan Ageng yang terusir dari Banten, harapan belum habis. Ia masih dapat mengepung kota Banten dan mempersukar kehidupan di Banten. Sultan Ageng mengadakan reaksi terhadap Kompeni sampai ia tertawan. Pada bulan Agustus 1682, putranya sendiri yang menandatangani suatu perjanjian yang mengakhiri kekuasaan mutlak sultan atas daerahnya. Sejak itu penguasa Banten yang sebenarnya adalah Kompeni.

Apabila tindakan-tindakan Belanda dalam menjalankan penetrasi politik monopoli perdagangannya mendapat reaksi bahkan menimbulkan perang dengan Banten, demikian pula halnya ketika mereka menghadapi reaksi-reaksi serta perang dari Mataram yang pada waktu itu juga tengah meluaskan pengaruhnya di bawah pimpinan Sultan Agung.

Penyerbuan pasukan Mataram ke kantor dagang VOC terjadi pada tanggal 18 Agustus 1618. Sebelum penyerbuan ini pemimpin kantor dagang yaitu Balthasar van Eynthoven dan Cornelis Maseuck dipanggil oleh raja hulubalang dan kemudian ditahan. Seperti telah disebut di atas, alasannya adalah perampokan-perampokan yang dilakukan kapal-kapal Belanda terhadap *jung-jung* Japara. Namun, di samping ini juga karena tingkah laku dan tindakan Balthasar van Eynthoven yang tidak baik. Kedua alasan yang baru disebut adalah jelas, tetapi alasan yang sebenarnya adalah janji-janji yang sudah berlangsung empat tahun yang tidak ditepati terhadap Mataram. Di pihak lain Belanda mencoba menuntut raja supaya memenuhi janji-janji yang telah disampaikan oleh utusan pertama VOC van Surck. Oleh sebab itu, VOC juga mencoba-coba membatalkan janji-janji yang telah diberikan van Surck kepada Mataram.

---

79 P.J. Veth, *op.cit.*, hlm. 69
80 *Ibid.*, hlm. 70

Dalam penyerbuan ini dari pihak Mataram jatuh beberapa korban, tiga orang terbunuh, beberapa luka-luka, dan sisanya dijadikan tawanan.[81] Sultan Agung mensinyalir adanya bahaya dari kantor dagang di Japara karena mendengar bahwa kantor dagang Jakarta telah diperkuat, dan ada juga kemungkinan bahwa kantor dagang yang ada di Japara juga dapat membahayakan kerajaannya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya Mataram mau berdagang dengan orang asing asal orang asing tersebut tidak merebut daerah kekuasaannya. Sementara pihak VOC di bawah Jan Pieterzoon Coen merasa bahwa Kompeni memerlukan beras, tetapi kejadian di Japara sangat mengganggu pikirannya. Oleh sebab itu, ia mengirim utusan Jacob van der Marct ke Japara untuk menemui raja Hulubalang. Kepada Jacob van der Marct diperintahkan untuk bertindak sebaik mungkin dalam usaha pembelian beras. Usaha pembelian beras ini berhasil. Akan tetapi, setelah beras ini diterima ia mengadakan pembalasan terhadap penyerbuan kantor dagang Kompeni di Japara. Kantor dagang ini diserang oleh 160 orang Kompeni, rumah-rumah di sekitar kantor dagang ini dibakar, kira-kira tiga puluh orang Jawa terbunuh dalam serangan ini; jung-jung yang berada di sekitar Japara dan Demak juga dibakar. Dalam penyerbuan ini mereka berhasil merebut beras yang terdapat di atas jung-jung.

Coen yang belum puas dengan penyerangan ke Japara pada tahun 1619 telah mengerahkan 400 orang Kompeni. Akan tetapi, pertahanan Japara ternyata lebih baik, sehingga tidak mudah bagi Kompeni untuk merebut kota itu.

Ada beberapa alasan untuk mengadakan penyerangan ini, selain untuk membalas penyerangan orang-orang Mataram pada tahun 1618 terhadap kantor dagang VOC juga untuk merusak kantor dagang Inggris dan untuk membuat orang-orang Cina pindah ke Jakarta.[82] Dalam penyerbuan ini, kantor dagang Inggris dibakar dan beberapa puluh orang Jawa terbunuh. Situasi antara Kompeni dan Mataram antara 1620 hingga 1628 dalam keadaan bermusuhan. Bagi para raja, Batavia merupakan kota yang merugikan kerajaannya. Hubungan antara Mataram dan Malaka dipersukar oleh Batavia.

Bagi raja, hanya ada satu cara untuk melepaskan diri dari Batavia yaitu dengan menghancurkan kota tersebut. Sudah berkali-kali ia mengirim utusan kepada VOC untuk mengirim wakil kepadanya tetapi hal ini tidak dilakukan Kompeni. Inilah yang mendorong Raja Mataram mengadakan

---

81 H.J. de Graaf, "De regering van Sultan Agung vorst van Mataram 1613–1645 en die van zijn voorganger Panembahan Sedang–Krapyak", *VKL*, 's-Gravenhage, 1958, hlm. 60

82 H.J. de Graaf, *op. cit.*, hlm. 63

persiapan untuk menyerbu Batavia. Pantai utara tertutup bagi pedagang asing. Mereka yang datang ke Mataram ditahan bahkan kantor dagang Inggris pun ditutup.

Pada bulan April 1628, Kyai Rangga dikirim ke Batavia dengan 14 perahu yang memuat beras. Rangga ini datang untuk meminta kepada VOC agar membantu Mataram menyerbu Banten. Akan tetapi, VOC menolak memberi bantuan atas dasar ditutupnya pelabuhan-pelabuhan di pantai utara.

Pada tanggal 22 Agustus 1628, 50 kapal muncul di depan Batavia dengan perbekalan yang sangat banyak. Hal ini membuat Kompeni menjadi sangat prihatin. Setelah 2 hari muncul lagi 7 buah perahu yang singgah untuk meminta izin perjalanan ke Malaka. VOC mencoba untuk tidak mempertemukan kapal-kapal yang tiba dahulu dan yang belakangan karena khawatir kapal-kapal yang baru datang akan memberi senjata-senjata kepada perahu lainnya. Usaha ini gagal. Pada pagi hari 20 buah perahu menyerang pasar dan benteng yang tidak siap. Orang-orang Mataram yang datang dengan perahu-perahu itu naik ke darat. Mereka berhasil mencapai benteng. Mereka menyerbu benteng VOC dan penyerbuan ini berlangsung sampai pagi. Banyak korban jatuh.[83] Tujuh perahu yang datang pada tanggal 24 Agustus, ketika melihat hasil penyerbuan ke benteng yang meminta banyak korban, tidak mau mendekati Batavia tetapi mendekati Marunda di mana pada keesokan harinya suatu pasukan di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa mendarat. Dalam menghadapi kekuatan Mataram, Kompeni mengorbankan daerah sekitar benteng. Kampung di sekitarnya dibakar dan diratakan dengan tanah. Pada waktu tentara Mataram hendak mendekati benteng, bagi Kompeni tidak sulit untuk mengusir mereka karena tidak ada tempat persembunyian. Terpaksa pasukan Mataram menarik diri ke daerah-daerah yang agak jauh ada pepohonan dan yang membuat benteng-benteng mereka dari bambu anyaman. Meskipun demikian mereka berhasil maju juga karena mereka menggali parit-parit dan membuat benteng seperti yang disebut di atas. Taktik VOC untuk menghadapi pasukan yang telah maju sekali adalah dengan mengirim sejumlah tentara Kompeni ke parit-parit ini yang dilindungi oleh 150 penembak sehingga orang-orang ini berhasil mengusir tentara Mataram dari parit-parit ini. Korban yang tercatat pada peristiwa ini diperkirakan antara tiga puluh sampai empat puluh orang.

Pada tanggal 21 September 1628 tentara Mataram menyerang benteng Hollandia. Mereka mencoba menaiki benteng tersebut dengan tangga. Sambil melakukan penyerangan ini, di bagian lain mereka membunyikan alarm untuk mengurangi perhatian pada penyerbuan atas benteng Hollandia. Akan tetapi, orang Belanda dapat mencium taktik

83 H.J. de Graaf, *op. cit.* hm. 63

mereka, yaitu bahwa tujuan pasukan Mataram hanya benteng Hollandia. Oleh sebab itu, VOC mengubah sikap pertahanan menjadi penyerangan. Dengan segala kekuatan, mereka menyerang parit-parit dan pusat bagian kanan tentara Mataram sehingga menimbulkan banyak korban, terutama di pihak Mataram. Dari para tawanan yang ditahan Kompeni didapat keterangan bahwa masih terdapat kira-kira 4.000 prajurit Mataram yang berkeliaran di hutan mencari makan. Berdasarkan keterangan ini, Kompeni mengutus Jacques Lefebres untuk menyerang sisa-sisa laskar ini. Dengan jumlah yang tidak kecil, yaitu 2.866 orang, Jacques Lefebres mengadakan penyerbuan. Ia memulai dengan menyusuri sungai di lokasi perkampungan tentara Mataram. Di perkampungan kedua terdapat Tumenggung Baureksa. Dari penyerbuan terhadap perkampung laskar Mataram ini Baureksa mendapat perlawanan yang hebat, dan pertempuran berlangsung satu lawan satu.

Kompeni akhirnya berhasil memusnahkan isi perkampungan ini, tetapi mereka lupa merusak benteng. Tumenggung Baureksa dan putranya gugur dalam pertempuran ini dan banyak perahu Mataram yang berlabuh di Sungai Marunda dimusnahkan.

Setelah penyerbuan ke perkampungan pasukan Mataram sepanjang sungai Marunda selesai, tentara Kompeni pulang. Api mesiu belum habis terbakar ketika bantuan baru datang. Dengan segera pasukan Mataram dapat mempersiapkan diri kembali. Andaikan pada waktu itu tidak ada tembakan yang berasal dari dua perahu Kompeni Belanda dan andaikan kota Batavia tidak mempunyai tembok yang tinggi, pastilah seluruh kota Batavia sudah jatuh ke tangan laskar Mataram.

Pemimpin baru bantuan Mataram adalah Tumenggung Sura Agul-Agul dan dua bersaudara Kyai Dipati Mandurareja dan Upasanta.[84] Mereka menyangka bahwa pasukan yang pertama datang telah berhasil menguasai kota Batavia. Ketika ia melihat bahwa kota masih dalam tangan Kompeni, timbul suatu akal seperti yang pernah dilakukan terhadap Surabaya, yaitu dengan membendung sungai. Akan tetapi, cara ini hanya cocok untuk Surabaya, tidak untuk Batavia.

Suatu usaha untuk menyerbu benteng Hollandia gagal dan oleh sebab itu sebagai hukuman terhadap gagalnya usaha menundukkan musuh, Mandurareja dan Upasanta bersama-sama dengan anak buahnya dibunuh dengan keris atau tombak. Dengan kegagalan Mataram menduduki Batavia pada akhir tahun 1628, penyerbuan Mataram yang pertama berakhir pula.

Meskipun Mataram tidak berhasil merebut benteng Batavia dan menundukkan Kompeni, mereka tidak begitu saja menyerah. Tahun

84 H.J. de Graaf, *op. cit.*, 147

berikutnya, yaitu pada tahun 1629, tentara Mataram berangkat lagi menuju Batavia dengan perlengkapan senjata api. Keberangkatan mereka dari ibu kota Mataram adalah pada bulan Juni. Pada akhir bulan Agustus penjaga-penjaga Kompeni yang ditempatkan beberapa kilometer di sungai Ciliwung telah melihat barisan depan.[85] Sebagian pasukan Mataram mencoba mengusir ternak Kompeni, tetapi hal itu dapat dicegah oleh Kompeni.

Pada tanggal 31 Agustus 1629 hampir keseluruhan pasukan Mataram tiba di daerah sekitar Batavia. Mereka datang berkuda membawa bendera, panji-panji, dan juga membawa gajah. Cara yang dipakai Mataram untuk membawa beras ke sekitar Batavia sebagai bekal bagi prajurit-prajuritnya adalah mengirim seorang yang bernama Warga untuk minta maaf kepada Kompeni mengenai penyerbuan yang telah terjadi. Kompeni menerima Warga dengan baik. Sementara itu, orang-orang Mataram mengumpulkan padi di Tegal. Padi itu akan ditumbuk di Tegal untuk diperdagangkan ke Batavia. Siasat ini kemudian dibocorkan oleh seorang anak buah dari salah satu perahu Warga, sehingga ketika Warga tiba di Batavia untuk kedua kalinya ia ditangkap dan ditanyai tentang kebenaran berita bahwa Mataram kembali hendak menyerang Batavia. Hal ini dibenarkan oleh Warga dan rahasia bahwa Tegal menjadi gudang persediaan beras bagi tentara Mataram pun terbongkar. Setelah mendapat keterangan ini Kompeni mengirimkan armadanya ke Tegal, di mana perahu-perahu Mataram, rumah-rumah, dan gudang-gudang beras bagi tentara Mataram dibakar habis. Setelah Tegal mengalami kerusakan, Kompeni mengarahkan perhatiannya ke Cirebon. Kota ini juga mendapat gilirannya dan persediaan padi di sini pun habis dibakar oleh VOC. Akibat dari dimusnahkan gudang beras Mataram, usaha pengepungan Batavia tidak berlangsung lama. Meskipun demikian, mereka tetap mendekati benteng Hollandia, dengan melalui parit-parit para prajurit Mataram berhasil merusak benteng Hollandia. Setelah berhasil, mereka menuju benteng Bommel, tetapi di sini mereka gagal.

Pada hari-hari berikutnya para prajurit Mataram maju ke Benteng VOC, dan pada tanggal 21 September 1629 tembakan dimulai terhadap benteng VOC. VOC membiarkan penembakan bentengnya hingga persediaan mesiu habis. Sementara tembakan-tembakan dilancarkan terhadap benteng Belanda, Jan Pieterszoon Coen mendadak meninggal diserang suatu penyakit.

Dari beberapa tawanan diketahui bahwa pasukan Mataram menderita kelaparan, dan hal ini memang melemahkan pertahanan mereka. Setelah berusaha untuk menyerang selama kurang lebih 10 hari, pada akhir bulan September 1629 mereka mulai menarik diri dengan meninggalkan banyak korban. Setelah gagal menduduki Batavia, perundingan antara Mataram

85 H.J. de Graaf, *op. cit.*, hlm. 149

dan VOC dibuka kembali pada tahun 1630, tetapi utusan-utusan yang dikirim Kompeni tidak memenuhi syarat Mataram. Desas-desus bahwa Mataram akan melancarkan suatu serangan lagi terhadap Batavia terdengar oleh Kompeni. Dengan cepat mereka mengirim armada yang terdiri dari 8 buah kapal dengan awak 693 orang. Mereka mendapat perintah untuk memusnahkan semua perahu-perahu Mataram dan memusnahkan gudang-gudang perbekalan sepanjang pantai utara Jawa. Pelayaran ke Timur tidak begitu berhasil.[86] Akan tetapi, sementara itu hubungan dengan Mataram diusahakan. Antara tahun 1630–1634 Mataram sering mengadakan penyerbuan terhadap kapal-kapal Kompeni. Armada Mataram diperkuat dengan pembuatan perahu baru di Japara. Dengan perahu-perahu ini Mataram membuat perairan antara Banten dan Batavia tidak aman dan mereka sangat berhasil membuat Kompeni pusing dengan serangan kecil-kecilan yang dilancarkan terhadap kapal-kapal Kompeni setelah perang tahun 1629. Mataram terus-menerus mencari bantuan dari Malaka yang ada di bawah kekuasaan Portugis. Harapan akan bantuan ini kemudian hilang karena pada tahun 1641 VOC menguasai Malaka dan orang-orang Portugis kehilangan tempat berpijak di Nusantara.

Pemerintahan Mataram tahun 1641 mengadakan perpindahan penduduk dari Jawa Tengah ke Jawa Barat di daerah Sumedang. Tindakan ini ternyata sangat mengkhawatirkan VOC. Sebenarnya perpindahan penduduk ini adalah sebagai persiapan untuk menyerang Banten yang tidak mau tunduk kepada Mataram.

Hubungan antara Kompeni dan Mataram, setelah tahun 1642, tidak begitu baik karena tawanan-tawanan Belanda tidak dilepaskan oleh Mataram. Oleh sebab itu, Kompeni selalu mencari jalan untuk memaksa Mataram mengembalikan para tawanan Belanda itu. Keadaan menjadi tegang ketika Inggris menawarkan membawa seorang utusan Mataram ke Mekah, yang sebenarnya suatu kesempatan bagi Belanda, untuk melepaskan tawanannya bilamana sultan meminta kapal Belanda untuk membawa utusan ini. Oleh karena itu, Kompeni mencegat kapal Inggris yang membawa utusan Mataram, dan hadiah untuk ke Mekah dan menahannya dan dibawa ke Batavia. Peristiwa lain adalah ketika VOC merasa bahwa Jambi dan Palembang mengancam keamanan VOC sehingga VOC mencegat suatu armada Mataram yang terdiri dari 80 perahu yang sedang mengantar kembali Raja Palembang.

Hubungan VOC dan Mataram hingga meninggalnya Sultan Agung pada tahun 1645 tidak mengalami perbaikan.

---

86 *Ibid.*, hlm. 178

4. Banjar dan Gowa Menghadapi Belanda

Demak pada akhir abad ke-16 mempunyai pengaruh kekuasaan atas kerajaan Banjar. Tradisi ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari tradisi Majapahit yang telah mempunyai pengaruh atas beberapa daerah di Kalimantan. Akibat pengaruh itu kebudayaan dan sistem pemerintahan kerajaan Banjar banyak memiliki persamaan dengan Jawa. Pada akhir abad ke-16 kerajaan Banjar telah mempunyai daerah pengaruh di Sukadana, Kotawaringin, dan Lawe. Ketiga daerah ini telah mengirim upeti secara tetap kepada Banjarmasin.[87]

Ketika kedudukan Demak mulai lemah, kerajaan Banjar menghentikan pengiriman upeti ke Demak walaupun hubungan dengan Jawa tetap ada. Sesekali timbul juga perselisihan dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, misalnya pada tahun 1615 Banjar berselisih dengan Tuban dan Surabaya karena dua daerah itu ingin menguasai Banjarmasin.

Sikap tidak bersahabat juga ditunjukkan oleh Banjar terhadap Mataram. Antara tahun 1622–1637 hubungan Banjar dan Mataram tidak baik. Namun, pada tahun 1637 dibuatlah perjanjian persahabatan antara kerajaan Banjar dan Mataram karena ada pihak ketiga yang lebih berbahaya yakni VOC.

Banjar telah dikenal Belanda sejak tahun 1596. Pada tahun itu Belanda telah menangkap kapal yang berasal dari Banjar. Orang-orang Portugis juga telah mengenal Banjar sejak abad ke-16, mereka telah membeli kapur barus, berlian, dan batu *bezoar*.[88] Yang menarik perhatian Belanda terhadap daerah ini adalah produksi ladanya. Daerah Kalimantan juga merupakan daerah penghasil lada yang besar dan hasilnya dikumpulkan di Banjarmasin untuk diperdagangkan. Belanda datang ke Banjarmasin dan minta kepada Raja Banjar untuk monopoli perdagangan lada. Maksud perjalanan Belanda ke Banjarmasin ternyata tidak dapat dipenuhi karena monopoli lada di Banjar dikehendaki dalam satu kontrak.[89]

Upaya pertama Belanda untuk memperoleh monopoli lada dilakukan pada tahun 1606 dan upaya-upaya berikutnya telah berhasil membawa raja untuk menandatangani kontrak. Namun, dalam kenyataannya bukan raja yang menguasai lada, melainkan para pangeran yang dalam praktiknya menjual lada kepada siapa saja dan raja tidak dapat ikut campur. Kejadian tersebut membuat pihak Belanda gusar, apalagi ditambah peristiwa tahun 1638 ketika terjadi pembunuhan pada orang Belanda di kantor dagangnya. Kompeni tidak berani mengambil tindakan apa-apa karena takut perdagangan mereka akan rusak sama sekali.

---

87 A.A. Cense, *De Kroniek van Banjarmasin*, Proefschrift MCMXXVIII, Uitgeverij, C.A. Mees Santpoort (NH), hlm. 109

88 *Ibid.*, hlm. 92

89 *Ibid.*, hlm. 93

Orang Belanda yang pertama kali datang ke Banjarmasin pada tahun 1606 adalah Gilles Michielszoon yang kemudian terbunuh di Banjarmasin. Orang-orang Belanda yang datang ke Sambas pada tahun 1610 juga terbunuh. Alasan pembunuhan terhadap mereka adalah karena Kompeni mengirim 4 kapalnya untuk merusak kota Banjarmasin. Untuk beberapa waktu lamanya Belanda tidak datang ke Banjarmasin, dan baru pada tahun 1626 mereka muncul kembali untuk mencari lada. Selain orang Belanda datang pula orang-orang Inggris dan Demak ke Banjarmasin untuk berdagang. Pada tahun 1635 dibuat kontrak baru antara Belanda dan Banjar yang ditandatangani oleh Syahbandar kerajaan Banjar bernama Retnady Ratya dari Gadja Babauw, seorang Gujarat.[90] Dengan kontrak ini berarti pula monopoli perdagangan lada ada di tangan Belanda.

Setelah penandatanganan kontrak dengan Banjar, orang Belanda tidak hanya membatasi diri pada perdagangan, tetapi juga turut campur tangan dalam persoalan politik dalam negeri kerajaan Banjar. Ketika ada pertikaian di antara keluarga raja sehingga menimbulkan perpecahan, raja yang didukung Kompeni akhirnya tidak dapat menguasai keadaan. Sementara itu, Martapura telah membuat perjanjian damai dengan Mataram. Di pihak lain, akibat campur tangan Kompeni dalam urusan dalam negeri, semua penghuni kantor dagang Belanda di Martapura dibunuh. Orang-orang Belanda di Kotawaringin juga mengalami nasib yang serupa.[91]

Ancaman-ancaman Kompeni terhadap kerajaan Banjar karena banyak pembunuhan terhadap pegawai-pegawai kantor dagang Belanda tidak digubris. Pada tahun 1660 suatu kontrak dengan Martapura berhasil ditandatangani. Namun, kenyataannya kesepakatan itu hanya di atas kertas karena perdagangan tetap berjalan seperti semula, lada tetap dijual dengan bebas kepada orang-orang Makassar yang datang ke Banjarmasin.

Selain orang-orang Makassar, juga datang orang-orang Cina ke Banjarmasin membeli hasil bumi di sini. Karena merugikan kerajaannya, raja Banjarmasin meminta Belanda meninggalkan kantor dagangnya dan kembali ke Batavia. Sultan Banjar juga meminta bantuan Banten dalam mengantisipasi kemungkinan pembalasan dari Belanda agar dapat memberi perlindungan kepada Banjarmasin.[92] Demikianlah reaksi-reaksi kerajaan di Banjar dalam menghadapi Kompeni Belanda.

Orang-orang Belanda ketika datang ke Nusantara pada mulanya tidak menaruh perhatian kepada kerajaan Gowa yang terletak di kaki barat daerah Sulawesi Selatan. Belanda pada mulanya dalam perjalanannya ke kepulauan bagian timur Nusantara sesudah berangkat dari pelabuhan-pelabuhan Jawa mereka langsung meneruskan pelayarannya ke Maluku.

---

90 *Ibid.*, hlm. 94
91 *Ibid.*, hlm. 96
92 *Ibid.*, hlm. 99

Tentang pentingnya kedudukan pelabuhan Gowa baru diketahui Belanda setelah mereka merampas kapal Portugis di dekat Perairan Malaka yang ternyata memiliki seorang awak kapal Makassar. Dari orang Makassar ini mereka mengetahui bahwa pelabuhan Gowa merupakan pelabuhan transito bagi kapal-kapal yang berlayar dari atau ke Maluku. Selain itu, ketika mereka bertemu dengan kapal Gowa yang memuat orang-orang Portugis, kapal itu tidak diserang, untuk memberi kesan yang baik kepada Raja Gowa.[93]

Dari keterangan-keterangan ini, Belanda dapat menarik kesimpulan bahwa pelabuhan Gowa sangat strategis selain terletak antara Malaka dan Maluku, pelabuhan ini tidak mendapat gangguan dari orang-orang Portugis. Kemudian Belanda menjajaki hubungan dengan terlebih dahulu mengirim sepucuk surat yang dikirim dari Banda kepada Sultan Gowa. Di dalam surat tersebut dinyatakan bahwa tujuan kedatangan Kompeni semata-mata untuk berdagang. Isi surat yang demikian adalah untuk memberi kesan yang baik karena diketahui bahwa orang-orang Portugis dan Belanda memiliki senjata.

Raja Gowa mengundang Belanda untuk berkunjung ke pelabuhan Gowa dan mengingatkan bahwa mereka hanya diperbolehkan berdagang. Ia tidak ingin kerajaannya menjadi tempat adu senjata antara orang-orang asing yang datang berdagang di sana.[94]

Atas undangan raja, orang-orang Belanda mulai mengirim beberapa utusan ke Gowa dengan pesan-pesan khusus, selain berupa tanda persahabatan juga ajakan agar Gowa ikut menyerang Banda yang menjadi gudang rempah-rempah. Ajakan Belanda itu ditolak oleh Raja Gowa.[95]

Kunjungan-kunjungan para anggota Kompeni Belanda mulai sering dilakukan ke kerajaan Gowa. Mereka selalu berusaha membujuk Raja Gowa untuk tidak lagi menjual beras kepada orang-orang Portugis. Akan tetapi, Raja Gowa tidak mau begitu saja merugikan dirinya sendiri dengan memutuskan hubungan dagang yang baik dengan orang-orang Portugis. Raja bahkan mengeluh bahwa kapal-kapal Kompeni telah menyerang sampai Maluku. Hubungan kerajaan Gowa dan Kompeni memburuk karena kedua-duanya mempunyai kepentingan yang sama dalam bidang perdagangan. Ini berarti bahwa pada suatu ketika pasti akan terjadi bentrokan.

Beberapa hal yang menimbulkan suasana permusuhan adalah karena kelicikan orang-orang Belanda dalam menagih utang dari pembesar-pembesar Gowa. Pembesar-pembesar ini diundang untuk dijamu, tetapi setibanya di kapal mereka dilucuti sehingga timbulah perkelahian yang meminta korban. Peristiwa ini menimbulkan kebencian pada orang-orang

93 F.W. Stapel, *op. cit.*, hlm. 9
94 *Ibid.*, hlm. 10
95 *Ibid.*, hlm. 10

Makassar terhadap Kompeni yang dengan berbagai upaya hendak memaksakan kehendaknya kepada Raja Gowa.

Sebagai balas dendam, pada tahun 1616 awak sebuah kapal Belanda yang tidak tahu-menahu tentang insiden ini, ketika turun di Sumba tanpa menaruh curiga, dibunuh oleh orang-orang Makassar. Peristiwa ini membuat Jan Pieterszoon Coen menaruh dendam terhadap orang-orang Makassar yang mempersulit mereka di mana-mana.

Antara Kompeni dan orang Makassar tidak ada lagi ampun-mengampuni jika salah satu jatuh ke tangan yang lainnya. Hal ini memperuncing keadaan. Kedua belah pihak berlomba-lomba untuk menyebarkan pengaruhnya. Karena Kompeni menginginkan bagian terbesar dalam perdagangan rempah-rempah di Maluku, sedangkan pada waktu itu perdagangan ini ada di tangan orang-orang Makassar, dengan sendirinya timbul permusuhan. Keinginan Kompeni tidak mudah berhasil karena para pedagang Makassar sangat berani. Perdagangan orang-orang Makassar sudah berlangsung lama dan Kompeni menyebutnya sebagai "perdagangan penyelundupan".[96] Bentuk perahu, *jung*, dan *kora-kora* Makassar mempunyai banyak keuntungan karena dengan mudah dapat mendekati pantai dan dapat melewati pantai karang yang dangkal, sedangkan kapal-kapal Kompeni tidak dapat mendekati pantai yang tidak dalam. Karena merasa kepentingannya memonopoli rempah-rempah terus-menerus terganggu bilamana kerajaan Gowa-Tallo tidak ditundukkan, Kompeni bertekad untuk menundukkan kerajaan di kaki barat Sulawesi Selatan.

Sebagai suatu kerajaan maritim Gowa harus dilumpuhkan di laut. Oleh karena itu, blokade terhadap kerajaan Gowa diadakan pada tahun 1634. Kompeni mengirim suatu armada ke Martapura. Armada ini terdiri dari 6 buah kapal yang berawak dan perlengkapan cukup. Dari sini mereka harus menghadang perahu-perahu Makassar yang berdagang lada sambil mengajak sebuah kapal Kompeni di sana dan menunggu 4 buah kapal dari Batavia yang akan memperkuat armada tersebut untuk memblokade pelabuhan Sombaopu.

Di sini mereka menerima perintah untuk tidak membuang-buang waktu. Mereka langsung merusak, merongrong, dan merebut kapal-kapal Portugis dan India yang berada di Perairan Sombaopu, juga perahu-perahu Makassar.

Selain merusak dan merongrong musuh mereka, desa-desa dan kota-kota kerajaan Gowa juga dimusnahkan. Akan tetapi, tugas yang diberikan kepada armada itu tidak mengenai sasaran, karena raja Gowa telah mendapat berita dari Japara tentang rencana VOC dan tiga minggu

96 *Ibid.*, hlm. 16

sebelumnya kapal-kapal Portugis telah berangkat menuju Makao. Perahu dagang kaum pribumi telah berangkat.[97] Armada Belanda hanya berhasil memblokade suatu armada kecil yang akan ke Maluku untuk memberi bantuan kepada Maluku melawan Belanda. Armada kecil itu kemudian lolos, karena rampingnya dapat menyusuri pantai karang tanpa dapat menghindari Kompeni dengan kapal besarnya. Armada Makassar dengan lajunya menuju Ambon. Ketika sudah berada di laut terbuka mereka berhasil dikejar oleh armada Kompeni yang berhasil merusakkan sebagian kecil perahu. Armada perahu Makassar ini yang berkekuatan 2.000 orang menuju Cambelo untuk membantu orang-orang Maluku yang berontak terhadap Kompeni. Sementara itu, orang-orang Portugis memakai kesempatan berdagang di pelabuhan Sombaopu, dan orang-orang Makassar itu berhasil membuat armada yang baru. Armada Makassar berhasil menyerang Buton, Tembuku, Gorontalo, dan beberapa daerah sepanjang pantai timur Sulawesi. Pemimpin armada VOC yang gagal melaksanakan tugasnya mengusulkan agar Kompeni membuat armada yang terdiri dari perahu-perahu yang dapat mengejar perahu Makassar di pantai yang dangkal atau di karang-karang.[98] Pada bulan September 1634 suatu armada berangkat kembali ke perairan sekitar pelabuhan Sombaopu.

Pada tahun berikutnya Kompeni memperkuat lagi armadanya untuk memblokade kerajaan lama Tallo. Akan tetapi, kekuatan ini tidak dapat menghindari lolosnya perahu-perahu Makassar. Orang-orang Makassar melalui darat menyeberang ke timur ke pantai yang berbatasan dengan Bone dan dari sana mereka berlayar ke Maluku untuk berdagang.

Untuk beberapa waktu keadaan menyulitkan Kompeni. Buton juga tidak dapat membantu Kompeni karena berada di bawah pengaruh kerajaan Gowa, di Buton ini banyak terjadi penyerbuan dan pembunuhan terhadap orang-orang Belanda. Karena keadaan ini Kompeni mengambil jalan lain, yaitu mendekati Gowa kembali. Suatu utusan dikirim untuk mengadakan perdamaian. Utusan ini diterima baik dan raja menyambut maksud ini. Akan tetapi, pelayaran antara Malaka dan Seram adalah untuk kehidupan bangsanya. Kompeni tidak setuju akan hal ini dan raja kemudian menyetujui bilamana orang-orang Makassar masuk perairan kekuasaan Kompeni dapat dianggap sebagai musuh, jadi dapat diserang tanpa memutuskan kontrak antara Gowa dan Kompeni.[99]

Perjanjian perdamaian berlangsung dari tahun 1637 hingga 1654. Antara kedua angka tahun ini banyak terdapat hal-hal yang sering membawa keduanya ke jurang permusuhan, umpamanya kejadian pada tahun

97 *Ibid.*, hlm. 27
98 *Ibid.*, hlm. 28
99 *Ibid.*, hlm. 34

1638, ketika Kompeni merampok angkutan kayu cendana yang telah dijual oleh orang-orang Makassar kepada orang-orang Portugis. Orang-orang Portugis yang berlayar dengan bendera kerajaan Gowa memprotes, pembesar-pembesar Gowa membela mereka dan raja pun membela rakyat. Ganti rugi dituntut kepada Kompeni. Semula Kompeni tidak mau mengganti sehingga Karaeng Patengaloan dan Buraung mengancam akan mengusir orang-orang Belanda dari Sombaopu. Atas ancaman itu Kompeni terpaksa membayar apa yang dituntut oleh pembesar-pembesar Gowa. Sebab-sebab lain yang mengancam perdamaian antara Kompeni dan Gowa adalah hak-hak istimewa yang diberikan Raja Gowa kepada orang Denmark, Portugis, dan Inggris dalam pengiriman bantuan manusia dan senjata kepada Hitu dan Seram. Raja Gowa merasa sebagai pelindung orang-orang seagama di daerah-daerah ini. Oleh sebab itu, bantuan-bantuan yang diminta daerah ini selalu diberikan bilamana ada kemungkinan dan kesempatan meskipun Kompeni selalu mengancam dengan perang. Akhirnya kedua belah pihak bersiap-siap, Gowa menyiapkan suatu armada perang dengan kekuatan 5.000 orang bersenjata untuk berlayar ke Maluku. Ini terjadi pada bulan Oktober 1653, sedangkan pada akhir 1653 perang telah berada di ambang pintu.

Perang terbuka pecah pada awal 1654 dan berlangsung hingga 1655. Pertempuran terjadi di beberapa tempat. Blokade diadakan terhadap pelabuhan Sombaopu, pertempuran di Buton dan Maluku, terutama di Ambon. Orang-orang Makassar yang berada di Asahudi mendapat bantuan secara teratur dari Gowa ataupun dari Majira, seorang pemimpin Maluku. Bagi Kompeni perang yang harus dijalankan sekaligus di beberapa tempat yang berjauhan sangat merepotkan. Oleh sebab itu, mereka beberapa kali mencoba membuat pendekatan kepada Gowa untuk membuat perjanjian.

Gowa menolak dengan gigih dan meneruskan perang meskipun menghadapi kekurangan makanan dan senjata.[100]

Pada bulan Maret 1655 Majira menyerbu benteng Luku di Seram kecil. Penyerbuan ini gagal sehingga ia harus menarik diri ke Loala, tempat ia membangun benteng dan mengumpulkan bekal. Meskipun Kompeni mengalami kemenangan, perang yang terjadi di beberapa tempat sekaligus sangat berat. Musuh mereka, yaitu Gowa dan orang-orang Maluku yang menentang perdagangan monopoli, melawan mereka dengan gigih. Bagi Kompeni pengeluaran uang untuk perang sangat tinggi, sehingga kompeni mengirim utusan dari Batavia untuk membuat perdamaian. Hal ini terlaksana pada tanggal 27 Februari 1656. Isi perjanjian itu menurut Kompeni sangat menguntungkan Makassar karena boleh dikatakan utusan menyetujui tuntutan Gowa, seperti membolehkan Gowa menagih utangnya di Ambon, melepaskan tawanan

100 *Ibid.*, hlm. 51

masing-masing, musuh Kompeni bukan musuh raja Gowa, Kompeni tidak akan ikut campur dengan perselisihan intern orang Makassar. Kompeni telah menangkap orang-orang Makassar yang ada di Maluku dan raja akan mendapat ganti rugi atas penyitaan barang-barangnya di atas sebuah kapal Portugis.[101]

Bagi Kompeni isi perjanjian ini tidak menguntungkan. Di samping itu, perahu-perahu Makassar dengan sangat gesit dapat saja lolos dari kapal-kapal Belanda dalam perdagangan di Maluku. Oleh sebab itu, Kompeni mengirim sebuah ultimatum kepada raja, yang dibalas oleh raja dengan ultimatum yang lain. Keadaan yang menegangkan ini membuat VOC menyiapkan diri kembali untuk berperang. Pada tahun 1660 suatu ekspedisi yang terdiri dari 31 buah kapal dan 2.600 awak dikirim ke Sulawesi. Baris terdepan dari armada ini berhasil mengalahkan 6 buah kapal Portugis yang terdapat di pelabuhan Gowa. Perang mulai berkobar ketika pasukan armada ini tiba di depan Sombaopu dan mereka diarahkan ke utara kota tersebut untuk mengalihkan kekuatan terbesar kerajaan Gowa, sehingga memberi kesempatan kepada Belanda untuk menyerang ke selatan Sombaopu di mana mereka berhasil merebut benteng Penakukang. Atas kekalahan ini Sultan Gowa menandatangani suatu perjanjian yang sangat merugikan karena ia harus melepaskan Buton, Manado, dan kepulauan Maluku, sedang orang-orang Portugis harus meninggalkan kerajaannya. Ia dibebani dengan membayar kerugian perang. Bilamana ia telah melaksanakan perjanjian itu, benteng Panakukang akan dikembalikan kepadanya.[102] Untuk sultan isi perjanjian ini sangat memberatkannya. Hubungan-hubungan dengan orang Portugis sangat menguntungkan kerajaan apalagi setelah Malaka direbut orang-orang Belanda sejak tahun 1641, orang-orang Portugis pun memindahkan perhatian mereka dari Maluku yang telah mulai mundur ke Selat Malaka, di mana pelabuhan transitonya kerajaan Gowa mulai berkembang. Gowa menjadi pusat perdagangan orang-orang Portugis. Perdagangan memang menguntungkan kedua belah pihak.

Setelah kemenangan Kompeni terhadap kerajaan Gowa, orang-orang Portugis terpaksa meninggalkan pelabuhan kerajaan Gowa ini. Hanya ada beberapa pedagang besar Portugis yang tinggal. Keadaan tetap tegang karena pihak Belanda memberi bantuan kepada orang yang dianggap menentang Raja Gowa, yaitu Aru Palaka, sementara pihak Gowa mempergunakan setiap kesempatan untuk merampas senjata api Kompeni. Akhirnya perang baru tidak dapat dihindarkan. Peristiwa yang menyebabkan perang, yaitu ketika kapal VOC, De Leeuwin, terdampar di sekitar Gowa, 16 meriamnya diambil.

---

101 *Ibid.*, hlm. 54

102 C. Skinner, *Syair Perang Mengkasar*

Penyelidikan atas peristiwa kapal ini oleh VOC ditolak pihak Gowa. Meskipun demikian, VOC mengirim seorang pegawainya ke kapal tersebut, tetapi ia dibunuh. Sejak kejadian ini semua utusan yang dikirim oleh VOC ke Sultan Gowa mengalami kegagalan. VOC memutuskan untuk menonjolkan kekuatannya dan mempersiapkan diri untuk menyerang kerajaan Gowa. Armada Belanda terdiri dari kira-kira 19 buah kapal di bawah pimpinan Speelman. Armada ini tiba di Barombong suatu kampung sebelah selatan kota Makassar. Ketika diketahui tentang kedatangan armada VOC diadakanlah suatu rapat di istana sultan. Mereka memutuskan bilamana Belanda hendak berperang, mereka pun bersedia berperang. Genderang perang pun dibunyikan dan orang-orang dari seluruh lapisan masyarakat mulai berkumpul.[103] Meskipun demikian, mereka mengirim seorang utusan ke armada Belanda yang membuang jangkar di lepas pantai Barombong. Utusan ini diberi balasan dengan sepucuk surat untuk sultan yang isinya adalah meminta agar sultan menyerahkan kerajaan. Tentu saja permintaan tersebut tidak dapat diterima sultan.

Sementara menunggu reaksi Gowa, kapal-kapal VOC diinstruksikan untuk mengadakan perampokan-perampokan terhadap perahu-perahu Makassar, membakar dan memusnahkan kampung-kampung sepanjang pantai. Kepada Speelman diinstruksikan pula untuk menuju Buton, Ternate, Bacan, dan Banda untuk mengunjunginya dalam jabatan sebagai komisaris dan *superintendent* dan untuk mendamaikan Tidore dan Ternate. Setelah kunjungan ini, ia harus ke pelabuhan Sombaopu lagi memblokade dan menembakinya bilamana kerajaan Gowa tidak mau menyerah.

Keinginan VOC untuk menyelesaikan permusuhan dengan kerajaan Gowa selekas mungkin tidak tercapai karena Raja Gowa tidak mau tunduk kepada tuntutan Kompeni.[104] Perang pecah, armada Kompeni berlayar ke Bonthain dan di sana diadakan pendaratan, termasuk pasukan Bugis di bawah pimpinan Aru Palaka. Suatu perkelahian terjadi di sana pada pertempuran itu Aru Palaka terluka.

Bonthain kemudian harus ditinggalkan oleh pasukan-pasukan Gowa dan Kompeni, kota ini kemudian dimusnahkan sama sekali oleh VOC. Bonthain dianggap kota yang penting oleh sebab itu, tidak saja kotanya yang dimusnahkan secara keseluruhan tetapi 30 buah kampung di sekitarnya pun dimusnahkan dan persediaan beras pun dibakar.

Setelah meninggalkan Bonthain armada Kompeni tiba di Buton, tetapi dikepung oleh pasukan Gowa yang sangat besar yang terdiri dari 15.000 orang prajurit dan 450 perahu. Pemimpin Gowa dalam pertempuran di

---

103 *Ibid.*, hlm. 83
104 F.W. Stapel, *Cornelis Janszoon Speelman*, 's-Gravenhage, 1936, hlm. 39

Buton adalah Bontomarano. Tidak sedikit korban yang jatuh dalam pertempuran yang berlangsung satu hari itu[105] dari kedua belah pihak.

Setelah mengadakan perlawanan yang maksimal terhadap Kompeni, pasukan-pasukan Gowa terpaksa menyerah. Sebagian ditawan ke suatu pulau dekat Buton dan sebagian yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dibawa ke Maluku. Speelman dengan armadanya pun ke Maluku. Dalam perang ini sejumlah bendera (*vaandel*) dirampas Kompeni. Perahu-perahu disita lengkap dengan meriam-meriamnya. Dua buah perahu Gowa yang mempunyai 18 dan 23 buah meriam dimasukkan dalam armada Kompeni untuk kemudian digunakan untuk berperang melawan Gowa. Aru Palaka dan raja Buton pun mendapat beberapa meriam sitaan.

Meskipun keadaannya tidak menguntungkan kerajaan Gowa, mereka tidak tinggal diam menunggu kedatangan Kompeni di bawah komando Speelman. Mereka memperkuat diri dengan mendirikan benteng-benteng di sepanjang pantai kerajaan. Selain persiapan fisik ini persiapan diplomatik juga diadakan yaitu persahabatan dengan Banten yang juga menjadi musuh Kompeni di Jawa Barat. Dengan Bone raja menjalankan politik lain, yaitu mencegah keberhasilan Aru Palaka membuat suatu pemberontakan rakyat Bone terhadap Gowa. Bone dimerdekakan di bawah pimpinan Bugis yang telah lama berada di Gowa. Ketika Speelman kembali dari Maluku, keadaan yang diharapkan tidak terealisasi karena Aru Palaka menghilang dalam suatu angin ribut, sedangkan pemberontakan orang-orang Bugis terhadap Gowa berhasil ditindas. Jadi, bahwa Gowa akan mudah menyerah benar-benar merupakan perkiraan yang keliru. Perang terpaksa meletus kembali dan ini dimulai pada tanggal 7 Juli 1667 di mana Kompeni menyerbu Bonthain yang dipertahankan oleh 7.000 orang. Untung baginya karena Aru Palaka yang telah disangka hilang ternyata masih hidup. Speelman langsung berlayar menuju pelabuhan Gowa. Keadaan berulang seperti waktu kedatangannya pada bulan Desember 1666 di mana utusan Raja Gowa datang ke kapalnya untuk meredakan keadaan. Akan tetapi, utusan ini tidak berhasil karena ada kabar bahwa Inggris yang membantu kerajaan Gowa telah memperkuat bentengnya, dan bahwa di Sombaopu suasana perang telah terasa. Keadaan tegang telah berlangsung untuk beberapa waktu, hingga pada tanggal 19 Juli tembakan dilepaskan dari Sombaopu ke arah kapal Speelman.[106] Tembakan-tembakan sengit kemudian terdengar sepanjang hari. Kemudian Speelman mengambil taktik lain yaitu berlayar ke selatan dan merampok kampung sepanjang pantai untuk menyibukkan kerajaan

105 *Ibid.*, hlm. 36
106 *Ibid.*, hlm.42

Gowa terus-menerus. Kampung yang menjadi sasaran adalah Galesong. Di Galesong mereka membuat benteng, Aru Palaka kemudian tiba di sana dengan 6.000 prajurit. Meskipun telah kuat, keadaan pada pihak Belanda menyedihkan, karena mereka pun mengalami kesukaran, yaitu penyakit yang merajalela dan persenjataan yang menipis. Aru Palaka berhasil mengalahkan pos-pos kerajaan Gowa. Dalam peristiwa Speelman ini hampir tewas.

Pada bulan September Speelman memutuskan untuk menyerang Barombong yang merupakan benteng Selatan dalam lingkaran perbentengan kerajaan Gowa. Dalam perlawanan sengit terhadap pasukan Kompeni, pihak Gowa menggunakan meriam-meriam besar.

Suatu ketika Speelman khawatir bahwa prajurit Gowa akan menuju Bone. Speelman khawatir bahwa bantuan Bugis akan menjadi buyar bilamana mereka harus kembali ke daerahnya untuk mempertahankan sanak keluarganya.

Bila Aru Palaka tidak mendapat kemenangan atas pos-pos perbentengan Makassar, mungkin situasi tidak terkuasai oleh Kompeni. Suatu penyerbuan mendadak oleh Aru Palaka terhadap istana Barombong merupakan suatu obat terhadap kelesuan yang sudah ada di kalangan prajurit Bugis dan Kompeni.

C. Teknik Perang

1. Meluasnya Kekuasaan Belanda di Nusantara

Setelah Sultan Iskandar Muda wafat di Aceh pada tahun 1636, penggantinya adalah menantunya, Sultan Iskandar Thani. Di bawah sultan baru ini Aceh mulai mengalami kemunduran. Hal itu disebabkan Iskandar Thani yang memerintah antara tahun 1636–1641 mempunyai sikap yang lunak terhadap orang Barat baik terhadap Portugis maupun Belanda dan Inggris. Kemunduran Aceh lebih dirasakan lagi sejak Sultan Iskandar Thani wafat dan digantikan oleh istrinya yang bernama Tajul Alam Syafiatuddin Syah yang memerintah antara tahun 1641–1675. Kemunduran kerajaan Aceh di bidang politik maupun perdagangan sejak wafatnya Iskandar Muda itu tidak hanya akibat kelemahan sultan-sultan pengganti raja, tetapi juga mungkin akibat perang yang terus-menerus dilakukan Aceh melawan Portugis.

Ketika orang-orang Inggris datang ke Aceh pada tahun 1636, mereka diterima Sultan dengan sangat ramah. Mereka dibebaskan dari bea perdagangan yang pernah ditetapkan oleh Iskandar Muda. Selain itu, mereka diberi kantor dagang. Bagi orang Inggris kebaikan sultan sangat menguntungkan perdagangan mereka dengan Cina. Kehadiran mereka di

Aceh tidak menyenangkan orang-orang Belanda yang menganggap orang-orang Inggris ini sebagai perampok-perampok.[107]

Hubungan baik antara orang-orang Inggris dan Sultan Iskandar Thani tidak berlangsung lama karena adanya hubungan baik Inggris dengan orang-orang Portugis yang merupakan musuh Aceh. Keadaaan ini menguntungkan Kompeni yang juga bermusuhan dengan Portugis yang waktu itu masih menduduki Malaka.

Aceh yang memerangi Portugis di Malaka meminta bantuan dari Kompeni dengan mengirimkan utusan-utusannya ke Batavia pada tahun 1638. Untuk mendapat bantuan Kompeni, Aceh terpaksa memberi hak-hak istimewa kepada Kompeni seperti bebas bea masuk dan keluar, ditambah dengan monopoli perdagangan lada di Sumatra Barat. Di samping itu, pengangkutan lada dari daerah Sumatra Barat ke Aceh diberikan pula kepada Kompeni. Kapal Gral kepunyaan Kompeni dibebaskan dari semua bea selama masih berlayar.[108] Hal-hal yang baru disebutkan di atas ini membuat makin dalamnya campur tangan Kompeni ke dalam perdagangan Aceh. Campur tangan ini sangat menguntungkan Belanda.

Meskipun sudah banyak yang diberikan oleh Sultan Iskandar Thani kepada Kompeni, Kompeni masih menyangsikan persahabatan Aceh, karena musuh Kompeni yaitu Portugis masih berusaha mendekati Aceh. Usul Kompeni untuk memerangi Malaka pada tahun 1638 oleh sultan diminta agar diundurkan, sebab utusannya sedang berada di Pahang dan Johor. Antara Sultan Aceh dan Johor ada percekcokan mengenai Pahang, tempat asal sultan. Bagi Kompeni sangat sukar memilih antara Johor dan Aceh, karena Aceh telah memberi banyak keuntungan bagi perdagangannya, sedangkan Johor telah memberi bantuan pada tahun 1639 dalam penyerbuan terhadap kapal-kapal Portugis. Ketika Kompeni tahun 1640 minta bantuan untuk menyerbu Malaka, Aceh menolak dan menuntut Kompeni menghentikan hubungannya dengan Johor.[109] Kompeni dengan bantuan Johor berhasil merebut Malaka pada tanggal 14 Januari 1641.

Aceh dalam bidang politik dan perdagangan sangat menderita, setelah Malaka diduduki pada tahun 1641. Raja yang sedang berkuasa di Aceh, Sultan Iskandar Thani, meninggal pada tahun itu pula dan digantikan oleh istrinya, yaitu Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Syah. Selama pemerintahan Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Syah, kerajaan Aceh lebih banyak mengalami kemunduran. Daerah-daerah pengaruh Aceh

---

107 A.K. Dasgupta, *Acheh in Indonesian Trade and Politics 1600–1641* (Disertasi Cornell Univ), 1962, hlm. 181

108 *Ibid.*, hlm. 184

109 N. Macheod, De Oost–Indische Compagnie als Zeemogen-heid in Azie, Tweede deel van 1632 tot 1652 Rejs wijk, (Z-H) Blankwaart, Schoon haven 1927, hlm. 1

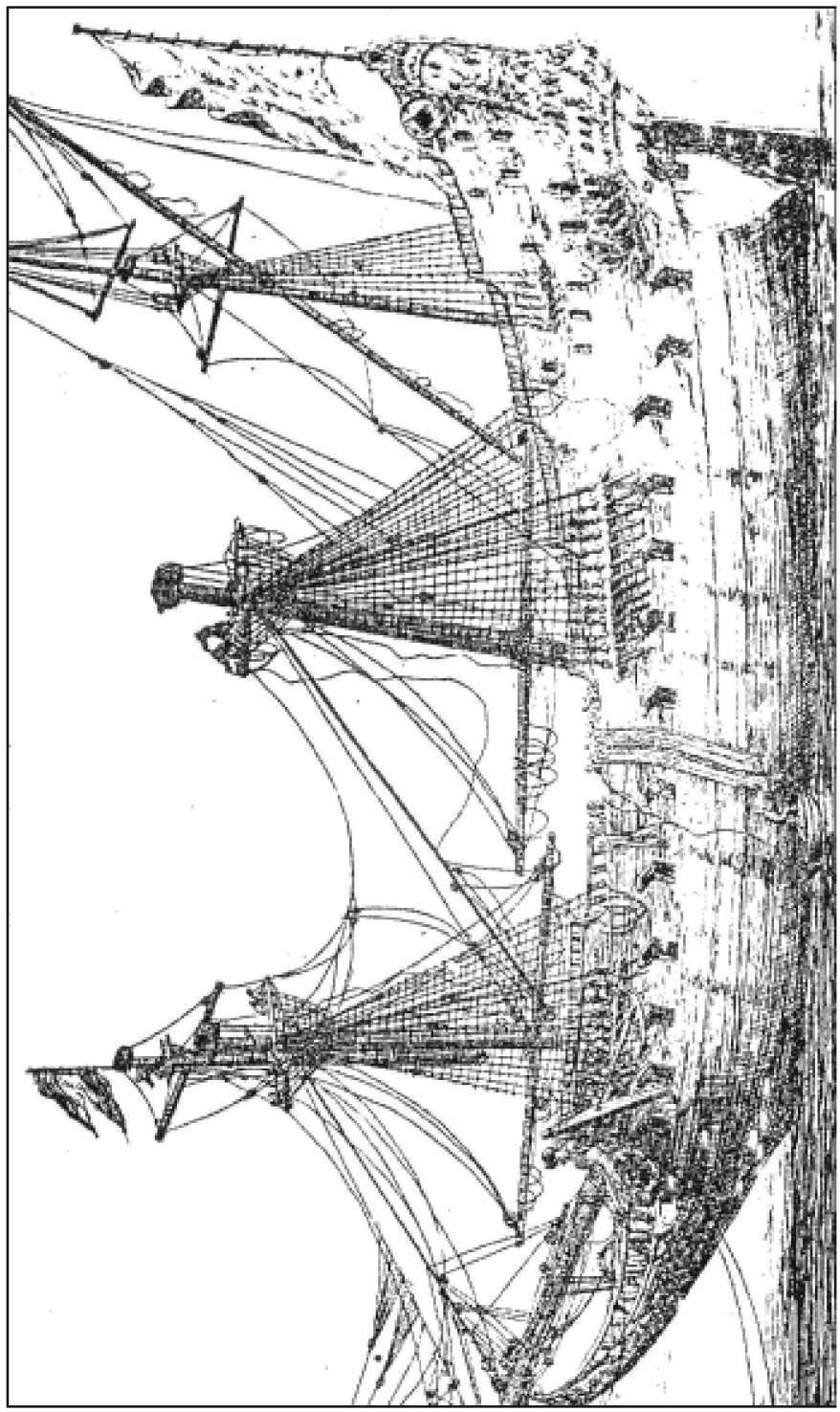

Gambar 7.5 Sebuah kapal Kompeni dari abad ke-17

di luar Sumatra mulai melepaskan diri sedangkan di dalam negeri orang-orang kaya menambah kekuasaan mereka masing-masing. Kerajaan Aceh yang mempunyai daerah yang begitu luas tidak dapat lagi dikuasai oleh Sultanah Aceh. Kekuasaan ini tidak dirasakan lagi atau hilang sama sekali.[110]

Aceh terpaksa menerima suatu politik damai, dan tidak dapat lagi mengadakan tawar-menawar mengenai barang dagangannya. Di pantai barat Sumatra, orang-orang Belanda yang pada tahun 1638 diberi hak istimewa untuk berdagang, pada masa pemerintahan Sultanah Tajul Alam tetap diberi hak tersebut. Dalam bidang ekonomi Aceh mengalami kemunduran karena orang-orang Belanda mulai memperlihatkan kekuasaannya. Suatu kejadian yang dialami Aceh ialah ketika Perak menolak untuk berdagang timah dengan Belanda, orang-orang Belanda mengambil tindakan melarang pedagang-pedagang Islam untuk datang berdagang di Aceh, Perak, dan juga Kedah.

Karena politik yang dijalankan Belanda begitu mengganggu keamanan Aceh, pada tahun 1648 Sultanah Tajul Alam mengirim utusan ke Batavia dan menjanjikan akan memberikan hak perdagangan timah. Tindakan ini dipandang orang Belanda sebagai kelemahan Sultanah Tajul Alam. Dengan demikian, mereka mengambil kesempatan untuk memaksa supaya harga lada yang harus diserahkan oleh daerah pantai barat yang masih di bawah pengaruh Aceh itu tidak boleh melebihi harga yang telah ditentukan oleh Kompeni. Aceh menerima permintaan ini, tetapi mengalami kesukaran dalam pelaksanaannya, karena panglima-panglima yang ditempatkan di daerah pantai barat memperlihatkan kekuasaannya masing-masing. Mereka mempunyai tuntutan dalam penyerahan lada kepada orang-orang Belanda yang harus dipenuhi jika tidak kapal-kapal Belanda itu pulang dengan muatan kosong. Meskipun Belanda telah mendapat begitu banyak hak-hak istimewa dari Sultanah Tajul Alam, masih banyak rintangan yang didapat di daerah-daerah pengaruh Aceh, sehingga berkali-kali Sultanah Tajul Alam harus memberi konsesi bilamana orang-orang Belanda merasa dirugikan dalam posisi perdagangannya.

Inggris mencoba mencari peruntungan di Sumatra Barat, juga mencoba-coba mendapatkan lada untuk perdagangan mereka dari daerah Indrapura yang oleh Sultanah Tajul Alam telah diperintahkan agar mengirimkan lada itu ke Salida untuk dijual kepada orang-orang Belanda. Akan tetapi, karena ada permusuhan antara Salida dan Indrapura, lada itu tidak diambil oleh Belanda di Indrapura melainkan oleh Inggris tanpa menghiraukan risikonya.

Karena pantai barat masih didatangi oleh orang-orang Inggris, Belanda menduduki Malaka tahun 1641 dan memblokade kembali Aceh dan Perak.

---

110 J. Kathirithamby–Wells, *op. cit.*, hlm. 465

Karena tindakan ini Aceh membalas dan menangkap orang-orang Belanda yang ada di Salida, Pariaman, dan Tiku. Akan tetapi, keadaan Aceh mulai lebih parah, banyak daerah-daerah takluk Aceh meminta kepada Belanda untuk membantu mereka membebaskan diri dari Aceh.

Blokade Belanda terhadap Aceh dan Perak tidak dapat dipertahankan karena Belanda tidak mempunyai cukup orang dan kapal untuk melakukan hal itu dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, pada tahun 1659 Belanda mengajukan suatu perjanjian kepada Aceh.[111] Sultan Aceh berusaha sekuat tenaga mempertahankan kerajaaannya meskipun ia sudah mulai lanjut usia. Ia mencoba untuk memberi kehormatan-kehormatan tertentu kepada Kompeni untuk mengamankan negaranya.

Melihat usaha-usaha Sultanah Tajul Alam ini, Belanda makin mempergunakan kesempatan-kesempatan yang menguntungkan baginya. Untuk hal itu mereka mulai minta hak perdagangan emas dan lada. Pada bagian pertama abad ke-17 mereka mengadakan perdagangan emas secara kecil-kecilan baik di pantai timur maupun di pantai barat Sumatra. Akan tetapi, setelah tahun 1650 yakni setelah mereka mendapat begitu banyak keuntungan karena melemahnya Aceh, perdagangan emas yang ada di pantai barat juga menjadi incarannya. Untuk menjaga jalan perdagangan ini Kompeni hendak mendirikan kantor dagang di Padang, tetapi mendapat tantangan dari Panglima yang takut akan pengaruh Kompeni. Oleh sebab itu, Kompeni mendirikan kantor dagangnya di sebelah Salida. Mendengar maksud Belanda untuk mendirikan kantor dagang di Padang atau di Salida, Sultanah Tajul Alam sangat cemas. Ia merasa curiga terhadap maksud Belanda ini dan ia lebih suka bilamana kantor dagang Belanda didirikan di kota-kota lebih ke utara, sehingga untuk permintaan pusat lebih mudah mengadakan pengawasan terhadap kantor dagang ini. Akan tetapi, hal itu tidak dipatuhi oleh orang-orang Belanda. Bahwa akan timbul pemberontakan terhadap Aceh dari pihak daerah-daerah pengaruhnya yang berada di pantai barat dapat diramalkan, karena utusan Belanda di sana telah mengadakan suatu perjanjian rahasia dengan kepala-kepala daerah ini. Penguasa-penguasa daerah-daerah ini beralasan bahwa pajak mereka yang harus dibayar kepada Aceh terlalu berat dan oleh sebab itu mereka meminta perlindungan Belanda, akibatnya Belanda juga mencampuri urusan dalam negeri Indrapura.

Dengan mencampuri urusan dalam negeri daerah-daerah di Sumatra Barat, Kompeni Belanda berhasil mendapat keuntungan dan hak-hak perdagangannya di Sumatra Barat. Dengan demikian, kekuasaan Aceh atas daerah-daerah yang dilaksanakan oleh panglima-panglimanya sendiri pengaruhnya digantikan Belanda.

---

111 J. Kathirithamby–Wells, *ibid.*, hlm. 470

Sejak Belanda menyelamatkan kedudukan Sultan Haji, kerajaan Banten praktis dikuasai oleh Kompeni. Perjanjian antara Sultan Haji dengan pihak Kompeni merupakan kunci utama untuk mencapai tujuan politiknya. Benteng Speelwijk yang didirikan sejak tahun 1685 mengingatkan kepada nama Gubernur Jenderal Cornelis Speelman, dan merupakan perlambang kekuasaan Kompeni atas politik Banten. Perdagangan internasional Banten di dunia mengalami kemunduran dan beralih ke pelabuhan Batavia. Meskipun Banten sejak itu mengalami kemunduran, pada waktu-waktu tertentu terjadi perlawanan rakyat akibat ketidakpuasan terhadap tindakan tindakan Kompeni Belanda yang terlalu mencampuri urusan intern kesultanan Banten. Contohnya antara lain perlawanan yang dipimpin oleh Ratu Bagus dan Kyai Tapa, tahun 1750–1751.

Setelah Mataram gagal menyerang Kompeni di Batavia pada tahun 1628–1629 perlawanan-perlawanan terhadap Kompeni diteruskan, dengan cara mencegat kapal-kapalnya, yaitu antara tahun 1630–1634. Sejak tahun 1641 Mataram mengadakan pemindahan penduduk dari Jawa Tengah ke daerah Sumedang di Jawa Barat sampai Sultan Agung Mataram wafat tahun 1645 dengan maksud meluaskan pengaruhnya dalam menghadapi persaingan dari Banten. Usaha-usaha Mataram dalam menghadapi Kompeni Belanda boleh dikatakan berjalan terus. Setelah Sultan Agung pengaruh Kompeni mulai dirasakan di daerah kerajaan itu.

Perlawanan Trunojoyo yang dibantu Pangeran Kajoran dan kerja samanya dengan Karaeng Galesung dari Makassar, dalam melawan kekuasaan mutlak dari Amangkurat I pada hakikatnya juga melawan Kompeni yang membantu Amangkurat I. Setelah pemimpin-pemimpin perlawanan itu satu demi satu tertangkap dan gugur, jelaslah akibatnya bagi Mataram. Kemenangan Amangkurat I yang kemudian digantikan Amangkurat II, sebenarnya berkat bantuan Kompeni meskipun harus ditebus dengan biaya yang sangat tinggi sesuai dengan kontrak hasil campur tangannya itu. Dengan gugurnya Trunojoyo akibat tusukan keris oleh Amangkurat II tanggal 2 Januari 1690, dalam memerintah Mataram, Amangkurat II merasa tidak akan ada rintangan lagi.[112]

Perlawanan Untung Surapati seperti telah diuraikan di atas juga merupakan akibat dari reaksi terhadap politik Kompeni Belanda. Perjuangan Untung Surapati yang terus-menerus sampai gugur pada tanggal 12 Oktober 1706 di Pasuruan, berpengaruh pula kepada masyarakat di Jawa, tentunya di daerah-daerah yang pernah dijadikan medan pertempuran. Kepahlawanan Untung Surapati tidak diragukan lagi dan usaha untuk

112 F.A. Soetjipto, "Perang Trunojoyo" dalam *Sejarah Perlawanan-perlawanan terhadap Kolonialisme*, Editor Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, Departemen Pertahanan Keamanan, 1973, hlm. 23

menanamkan kesadaran kebangsaan dapat diteliti dalam laporan G. Kinol, pada saat penyerbuan benteng-benteng di Penanggungan, Derma, dan Bangil di mana anak buah Untung mengajak pasukan-pasukan Kompeni yang sebenarnya orang Indonesia, untuk menggabungkan diri dengan pasukan Untung Surapati.[113]

Kematian Kapten Francois Tack di Kartasura yang bagi Kompeni dianggap seorang perwira yang sangat berpengalaman, merupakan kerugian besar bagi VOC. Perang dengan Untung Surapati sebenarnya juga menghabiskan tenaga dan pikiran Kompeni karena Kompeni juga telah menghadapi perang dengan Banten. Di luar Jawa, antara lain di Sulawesi Selatan, Kompeni baru saja menghadapi perlawanan dari kerajaan Gowa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin.

Meskipun Perjanjian Bongaya telah ditandatangani pada tanggal 18 November 1667 antara kerajaan Gowa dan Kompeni, keadaan yang diharapkan Kompeni tidak terlaksana begitu saja. Gowa merasa sangat tertekan oleh isi perjanjian ini sehingga mengajukan protes kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Gowa pun tetap mempersiapkan diri untuk kembali melawan Kompeni karena merasa sangat dirugikan. Pada tanggal 12 April 1668, Gowa memulai penyerangan terhadap pendudukan Belanda di wilayahnya yang mengakibatkan banyak korban. Aru Palaka pun tidak luput dari serangan itu, ia menderita luka-luka. Kompeni sangat menderita akibat serangan ini sehingga Speelman memutuskan meninggalkan Gowa untuk beberapa waktu.

Pada tanggal 5 Agustus, Gowa mencoba lagi untuk memulai perang. Pasukan Sultan Hasanuddin berhasil mengepung Aru Palaka. Akan tetapi, Kompeni dan orang-orang Ternate berhasil memberi bantuan kepada Aru Palaka. Meskipun demikian, Speelman memuji Sultan atas keberaniannya. Bagi Sultan ini adalah kemenangan terakhir karena Speelman mulai melakukan penyerangan total terhadap Gowa sehingga Gowa dapat ditundukkan. Para penanda tangan Perjanjian Bongaya kemudian datang ke Batavia untuk menyerah kepada Gubernur Jenderal. Kompeni menyadari bahwa bilamana mereka bertindak keras terhadap tokoh-tokoh ini, berarti mereka akan tetap mendapat kesukaran dalam perdagangan di daerah Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, untuk tidak menyakiti hati mereka, Kompeni memperlakukan tokoh-tokoh ini dengan sangat hati-hati.

Banyak orang Makassar yang merasa sangat dirugikan oleh Perjanjian Bongaya meninggalkan Gowa dan mengembara serta memberi

---

113 Djoko Sukiman, "Pejuang Untung Surapati" dalam *Sejarah Perlawanan-perlawanan terhadap Kolonialisme*, Editor Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, 1973, hlm. 52

bantuan-bantuan kepada musuh Kompeni misalnya kepada Trunojoyo dari Madura. Orang-orang Makassar yang mulai mengembara di bawah pimpinan Karaeng Montemara Monmaranu dan Karaeng Galesung ternyata tidak mau tunduk kepada Kompeni. Orang-orang Makassar ini merebut Surabaya dan Gresik kemudian menyerahkannya kepada Trunojoyo. Kegiatan orang-orang Makassar ini sangat merugikan kepentingan Kompeni sehingga Kompeni perlu memberi peringatan. Akan tetapi, dengan sangat gesit mereka berhasil memperkuat persahabatan dengan Madura. Mereka memberi bantuan kepada Trunojoyo melawan pasukan Mataram di bawah Adipati Anom, putra sulung Amangkurat sehingga daerah pantai jatuh ke tangan Madura. Bagi Kompeni karaeng-karaeng yang melarikan diri ini merupakan sesuatu yang sangat mengganggu keamanan monopolinya. Kecuali itu, setelah penandatanganan perjanjian, Gowa yang semula sebagai kerajaan yang bebas dalam perdagangan menjadi tidak bebas, karena diambil alih oleh Kompeni.

Bantuan tenaga-tenaga yang diberi Wajo kepada Gowa untuk perang antara Gowa dan Kompeni berjumlah 10.000 orang. Setelah perjanjian, tenaga bantuan itu dikirim kembali ke Wajo. Bone yang menjadi sekutu Kompeni ditundukkan pada tahun 1670. Daerah-daerah yang tadinya di bawah kekuasaan Wajo melepaskan diri. Setelah Wajo dapat ditundukkan oleh sekutu Kompeni, barulah raja Wajo datang ke Fort Rotterdam untuk menandatangani perjanjian dengan Kompeni. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Wajo sebagai pihak yang kalah, berjanji mematuhi syarat-syarat yang tercantum di dalam perjanjian itu.

Keadaan di Kalimantan Selatan yaitu dalam kerajaan Banjar setelah perjanjian antara Kompeni dengan sultan di Martapura ditandatangani pada tahun 1660 perlawanan terhadap Kompeni Belanda menurun. Dari pihak kerajaan Banjar perjanjian tersebut tidaklah menyebabkan terhentinya usaha-usaha kebebasan berdagang dengan siapa pun yang akan memberikan keuntungan lebih banyak. Di pihak Kompeni waktu itu tidak banyak kegiatan untuk mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dari daerah itu. Bahkan pada tahun 1668 Kompeni Belanda menarik diri sama sekali dari Banjarmasin. Baru pada tahun 1733 Kompeni menampakkan lagi dirinya di bandar itu. Selama hampir 75 tahun orang-orang Inggrislah yang menggantikannya, dan dengan kekuatan senjatanya mereka berhasil memaksakan suatu perjanjian. Monopoli perdagangan orang-orang Inggris di daerah kerajaan Banjar itu sangat merugikan rakyat karenanya timbul lagi reaksi dan perang dari rakyat melawan orang-orang Inggris. Rakyat menyerang benteng *faktorij* dan kapal-kapal yang sedang

berlabuh. Orang-orang Inggris diusir dari kerajaan Banjar. Lenyapnya orang-orang Inggris merupakan kesempatan lagi bagi orang-orang Kompeni Belanda untuk berhubungan kembali dengan Banjar. Kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh politik monopoli berdagang Belanda pada abad-abad berikutnya terutama pada abad ke-19 menimbulkan pula reaksi dan perang antara lain perang Banjar pada sekitar tahun 1859–1862 di bawah pimpinan Pangeran Antarasari.[114]

2. Teknik Perang di Nusantara

Teknik perang di daratan yang biasanya dilakukan oleh prajurit-prajurit bangsa-bangsa di Nusantara adalah dengan mengadakan serangan mendadak. Musuh ditunggu pada suatu tempat persembunyian dan bilamana musuh telah dekat barulah serangan dilakukan. Serangan semacam itu termasuk salah satu cara bergerilya. Taktik lain adalah untuk memperlambat penghampiran musuh. Pohon-pohon besar ditebang dan diletakkan di jalan sedemikian rupa sehingga mempersukar perjalanan musuh. Bilamana musuh datang dengan mempergunakan cikar, rintangan tersebut merupakan cara yang baik untuk mengulur-ulur kedatangannya, sehingga dapat memenangkan waktu bagi musuh yang akan diserang. Untuk mempersukar musuh ada lagi cara lain, yaitu jalan utama untuk perbekalan dipotong. Tempat-tempat atau daerah-daerah yang mungkin dapat merupakan sumber perbekalan seperti kampung-kampung, sawah-sawah, dan kebun-kebun sepanjang perjalanan musuh dibakar sehingga kekurangan perbekalan. Musuh menjadi lemah baik fisik maupun mentalnya sehingga menjadi kacau dan tidak terkendalikan. Cara ini lazim dilakukan jika permusuhan diharapkan akan berlangsung lama. Cara-cara ini pula yang dilakukan untuk meletakkan rintangan-rintangan yang mungkin akan dapat mengatasi atau dapat meluputkan diri dari serangan musuh.

Bagi yang mempersiapkan perang yang penting adalah persiapan perbekalan yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan pada waktu berlangsungnya perang itu di mana kegiatan berproduksi akan terganggu. Persediaan beras harus cukup untuk masa perang. Di samping penimbunan beras, dari rakyat ditarik pajak-pajak khusus berupa uang atau bahan keperluan lainnya. Muara-muara sungai ditutup untuk mencegah keluarnya beras dari daerah-daerah yang menghasilkan bahan makanan tersebut. Bilamana musuh tergantung dari air suatu sungai, usaha untuk membendung sungai ini dilakukan agar kekeringan terjadi di daerah musuh.[115]

---

114 Soeri Soeroto dalam *Sejarah Perlawanan-perlawanan terhadap Kolonialisme*, "Perang Banjar", Editor Prof. Sartono Kartodirdjo, Departemen Pertahanan Keamanan, 1973, hlm. 202

115 B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies, Selected Writings*, Part Two, 1959, hlm. 139

Penyerangan dilakukan dengan berbagai macam cara. Seperti yang telah dikatakan di atas penyerangan biasanya dilakukan dengan penyerangan tiba-tiba secara gerilya. Terhadap penyerangan-penyerangan ini orang-orang Belanda sangat takut. Pasukan berkuda juga telah lazim dipakai di waktu lampau dalam penyerangan-penyerangan. Hal ini misalnya terjadi di waktu sedang berkobar perang antara Madura dan Mataram di mana pasukan berkuda Madura menyerang pasukan Mataram dengan cara yang sangat menakutkan. Mereka berlaku seperti orang-orang yang tidak waras dengan tombak di tangan. Penyerangan berkuda ini biasanya diadakan terutama terhadap pengangkut-pengangkut senjata dan perbekalan untuk menimbulkan kekacauan di pihak musuh. Cara-cara demikian berkali-kali diadakan di dalam perang-perang darat di daerah Jawa Timur, ketika kerajaan Mataram hendak memperluas kekuasaan ke bagian ini.[116] Cara-cara demikian pernah pula dilakukan terhadap orang-orang Belanda yang menjadi begitu bingung melihat keberanian dan amukan pihak lawan sehingga dua pasukannya menjadi kacau dan yang ketiga melarikan diri.[117]

Cara-cara lain untuk melawan musuh adalah dengan pengepungan. Bilamana daerah yang hendak diserbu sudah dicapai seperti kota Batavia pada tahun 1628, prajurit pribumi itu membuat parit-parit untuk mendekati benteng. Parit-parit itu dibuat hingga cukup dekat pada benteng-benteng itu, kemudian diberi perisai bambu yang dibelah atau kayu-kayu. Bambu-bambu atau kayu-kayu perisai ini dibuat tebal dengan tanah agar cukup memberi perlindungan pada mereka untuk menangkis serangan. Muntahan-muntahan peluru dari senjata-senjata api dari benteng tidak dapat menembus perisai parit-parit ini. Para prajurit juga membuat benteng-benteng kecil di pinggir sungai yang ditutup dengan daun kelapa. Di samping itu, mereka mencoba mengalihkan arus air sungai.

Jika pengepungan dan serangan akan dimulai, bunyi-bunyian yang membisingkan terdengar untuk menakut-nakuti musuh. Orang yang mengepung membunyikan beduk, tongtong, dan berteriak-teriak tanda bahaya sehari semalam. Keributan ini merupakan tanda penyerangan. Di dalam keributan ini tangga-tangga bambu atau kayu dibawa ke benteng musuh untuk memungkinkan para penyerang menaiki dan memasuki benteng musuh. Di samping mengadakan usaha perusakan terhadap tembok benteng musuh, mereka mencoba membakar benteng itu dan memusnahkan musuh yang berada di dalam benteng. Di sungai blokade dijalankan sehingga kapal-kapal musuh tidak dapat keluar masuk. Di

116 A. Sartono Kartodirdjo, *op. cit.*, hlm. 18
117 A. Sartono Kartodirdjo, *ibid.*, hlm. 27

samping pemakaian senjata tradisional, senjata-senjata api pun dipakai meskipun hanya untuk memberi bantuan moril karena penggunaannya belum sempurna. Bilamana senjata-api dipakai, biasanya penembaknya adalah tawanan bangsa Eropa. Intimidasi terhadap musuh juga dibuat dengan mengirim surat-surat ancaman.[118]

Penggunaan armada perahu kerajaan-kerajaan di Indonesia dalam pengepungan-pengepungan di laut lain daripada penggunaan armada orang-orang Eropa. Armada-armada ini tidak mempunyai kapal-kapal besar seperti armada-armada orang Eropa. Akan tetapi, dengan pengalaman-pengalaman perang di laut sepanjang abad ke-16 dan ke-17 pertempuran-pertempuran dengan orang-orang Portugis yang hendak memaksakan monopoli perdagangan, membuat orang-orang Indonesia pun mulai memikirkan tentang armada perang yang perlu ditingkatkan mutunya.

Perang-perang di daerah Kalimantan Selatan terutama Banjarmasin antara kerajaan, biasanya dilakukan di sungai-sungai. Di sungai, di tempat yang akan diadakan perang, dibuat benteng-benteng rakit dari balok-balok kayu. Benteng ini biasanya sebesar rumah, diberi atap dan pagar. Di dalam benteng terdapat segala perlengkapan perang sampai pada perbekalan-perbekalan. Kapasitas benteng tersebut dapat memuat sampai 150 orang. Untuk menahan musuh pada jarak tertentu dibuat *cerucuk*, yaitu balok-balok besar yang ditanam dalam air.

Balok-balok ini kelihatan, sedangkan yang kecil dan tajam ditanam dalam air pula, tetapi tidak kelihatan di permukaan air. Benteng-benteng yang dibuat di daratan juga dibuat dari kayu ulin, di sekelilingnya dibuat lubang-lubang perangkap. Di samping penghalang-penghalang musuh, perahu juga menjadi alat perang seperti *lalanang.*

Pada abad ke-16 dan ke-17 musuh-musuh kerajaan-kerajaan di Nusantara sering bukan saja orang-orang Eropa, melainkan juga kerajaan-kerajaan lain di Nusantara.

Di samping *lalanang* ada pula *guraka*, perahu, dan jung-jung perahu-perahu yang sangat gesit yang dengan cepat dapat didayung melawan angin. Perahu-perahu ini dipakai di Pulau Jawa. Perahu-perahu tersebut dibuat di beberapa tempat di pantai utara Jawa, terutama di Japara. Kapal *lancara* yang dipakai memerangi orang-orang Portugis merupakan perahu-perahu yang didayung. *Lancara* ini sangat gesit.[119]

Di samping jung-jung, *lancara, lalanang, guraka,* dan *kora-kora* yang dibuat di Nusantara, pada abad ke-16–17, kapal-kapal besar yang diperlengkapi meriam dan senjata-senjata lainnya dipergunakan juga.

---

118 B. Schrieke, *op. cit.*, hlm. 137

119 C.R. Boxer, "A Note on Portuguese Reaction to the Revival of the Red Sea Spice Trade and Rise of Aceh, 1500–1600", JFAH. Vol. 3, No. 3, 1669, hlm. 427

Kapal-kapal besar ini di antaranya pernah didatangkan dari Turki oleh Aceh untuk memerangi orang-orang Eropa yang hendak merebut perdagangan pribumi. Perbekalan dengan teknik perahu-perahu besar Eropa yang baru kemudian dipakai juga di Nusantara. Beberapa perubahan dalam pembuatan perahu-perahu dibuat untuk meningkatkan mutu dan penggunaannya. Perahu-perahu yang dipakai di Kalimantan Selatan untuk berperang di sungai disebut *jukung*. Perahu-perahu ini dibawa oleh prajurit-prajurit yang menuju medan perang terbuka di sungai-sungai. Di samping *jukung* ini terdapat perahu yang disebut *talangkasan* yang dapat melaju dengan cepat. Setelah ada pengaruh dari Eropa dan Cina, perahu-perahu di daerah Kalimantan Selatan juga mengalami pembaruan, baik dalam ukuran maupun dalam penggunaannya.

Bahan-bahan pembuatan perahu ini adalah terutama kayu ulin yang sangat baik kualitasnya bagi bahan pembuatan kapal. Bengkel-bengkel perahu-perahu ini adalah di tepi sungai.

Perahu *juangka* dipakai di daerah Maluku untuk berperang.[120] Perahu-perahu ini juga disebut *lakafunu* atau *kora-kora*. Perahu-perahu ini selalu siap sedia di pantai dan diperlengkapi dengan keperluan-keperluan perang. Perahu ini didayung. Kalau tidak dalam keadaan perang, perahu-perahu ini disimpan di *sabuah*.[121] Perahu-perahu di Maluku ini mempunyai pemimpin yang tahu mengenai kekuatan awaknya. Bilamana ada rencana perang mereka ini diberi tahu sebelumnya. Kepada awak perahu ini diberi waktu untuk mengumpulkan cukup perbekalan sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan untuk perjalanan kampanye yang akan ditempuh. Mereka selalu siap-siap *hongi*, yaitu suatu ekspedisi hukuman yang dilancarkan pihak Belanda atas Portugis. Bagi Maluku yang merupakan kepulauan, perang yang terjadi biasanya di lautan, apakah melawan tetangganya atau orang Eropa. Serangan-serangan mereka terjadi kecil-kecil saja. Menurut kode etik mereka tidak diizinkan untuk masuk ke dalam perahu lawan yang lebih lemah. Bilamana mereka menyerbu suatu pelabuhan atau kampung, mereka menetap di sana sampai yang diduduki mengirimkan upeti.[122] Upeti ini disebut *buah*. Bilamana ada anggota musuh tertangkap, mereka biasanya dijadikan budak. Mereka kemudian dimanfaatkan sebagai pengangkut barang di samping *cikar* pada waktu perang. Mereka mengangkut perbekalan dan senjata bagi prajurit. Bilamana tawanan itu bangsa Eropa, mereka dipergunakan untuk melayani senjata api yang dirampas. Di Maluku para tawanan membawa semua harta miliknya yang

120 Hubert Jacobs Th. Th. M.S.J., "Source and Studies for the history of the Jesuits", Vol. III. *A Treatise on the Moluccaa* (C. 1544). 's-Probably the preliminary version of Anthony Galvao's lost historia das Molucas, 1971

121 *Sabuah* adalah suatu ruangan beratap rumbai

122 Hubert Th. Th. M. Jacobs S.J., *op. cit.*, hlm. 170

dapat ditukarkan untuk membebaskan diri mereka.[123] Berdasarkan kode etik perang di Maluku, bilamana seorang raja tertangkap ia tidak bola dilukai atau dibunuh.[124]

Mengenai prajurit-prajurit profesional pada abad ke-16 atau ke-17 jumlahnya sangat kecil dan biasanya mereka merupakan milik raja atau seorang saudagar kaya atau pangeran. Mereka biasanya tidak diberi gaji atau dibayar. Hanya waktu perang mereka diberi perlengkapan, senjata, beras, dan ikan. Pangeran, raja, atau saudagar kaya itu yang memberi perintah kepada mereka untuk berperang. Di samping perintah ini mereka juga dapat dilucuti sesuai dengan perintah pemiliknya.

Prajurit-prajurit yang bukan milik seseorang biasanya direkrut dari berbagai tempat bilamana dianggap perlu. Di samping menjadi tawanan mereka juga pengangkut. Mereka yang melarikan diri biasanya bilamana terjadi kekurangan makanan atau apabila mereka melihat bahwa pihak lawan mulai mendapat kemenangan atau bilamana mereka ketakutan akan dikuasai oleh musuh.[125] Prajurit-prajurit pribumi berani-berani seperti sering disebut dalam berita-berita asing. Contohnya apa yang dikatakan orang-orang Portugis mengenai tentara Aceh yang menurut mereka merupakan prajurit yang sangat berani.[126] Berita Belanda juga menyebut prajurit Bali, Bugis, Makassar, dan Madura yang sangat berani.[127] Seperti diketahui, prajurit Madura biasanya menyerang dengan membabi buta, hal yang sangat ditakuti musuh.

Di Maluku, bilamana ada perang prajurit-prajurit telah tahu sebelumnya di bawah komando siapa mereka itu. Dengan membunyikan *tifa* sebangsa beduk, dan meniup kulit kerang, mereka menunggu perintah untuk bergerak.[128]

Mengenai prajurit di Sumatra, terutama di Aceh, komposisinya tidak hanya terdiri dari orang-orang Aceh, tetapi terdapat pula prajurit-prajurit dari Turki, Abesinia, dan India. Prajurit-prajurit ini pada umumnya tidak diberi bayaran, tetapi bilamana mereka mendapat barang rampasan maka itu menjadi miliknya.[129]

Di Jawa, kerajaan-kerajaan ada yang telah mempunyai prajurit-prajurit berkuda. Mereka sangat mahir dan gesit mempergunakan senjata di tangan, sementara menunggangi kuda, prajurit berkuda ini mengendalikan kudanya dengan kaki dan badannya sedangkan kedua tangannya bebas untuk

123 *Ibid.*, hlm. 170
124 *Ibid.*, hlm. 171
125 H. Schrieke, *op. cit.*, hlm. 128
126 Cr. Boxer. *op. cit.*, hlm. 418
127 B. Sehrieke, *op. cit.*, hlm. 128
128 Hubert Th. M. Jacobs S.J. 1971. s, *op. cit.*, hlm. 169
129 William Marsden, *op. cit.*, hlm. 349

memegang tombak. Mereka lebih sering berada di atas kuda dalam penyerbuan-penyerbuan daripada di tanah.[130]

Menurut sumber orang-orang Eropa yang pernah melihat kecekatan prajurit berkuda, orang akan terheran-heran melihat mereka beraksi.[131] Di Sumatra terdapat juga prajurit-prajurit berkuda tetapi hal ini tidak begitu lazim. Ini disebabkan untuk menunda-nunda pendekatan pihak musuh mereka menanam bambu-bambu runcing sebagai penghadang.

Di Sumatra cara berperang diadakan dalam kelompok-kelompok dan menyerang cara bergerilya. Mereka biasanya menyerang dari tempat persembunyian mereka.

Permusuhan antara kerajaan-kerajaan biasanya berlaku dalam waktu yang sudah ditentukan. Suatu sistem pernyataan perang di Sumatra adalah dengan menombak ke arah kampung musuh tanpa mengakibatkan kerusakan. Tiga hari dilewatkan untuk menunggu jawaban dari pihak musuh, bilamana tidak ada jawaban hal ini merupakan pernyataan perang. Perang besar-besaran dan terbuka biasanya tidak dilakukan. Tempat musuh tidak diserang sesuai kesepakatan. Akan tetapi, bilamana lewat dari waktu-waktu yang ditentukan baru boleh diserang. Dalam memerangi musuh ranjau-ranjau ditanam antara musuh dan pihak sendiri sehingga memperlambat pengejaran atau pendekatan.[132]

Senjata-senjata yang umum dipakai di Jawa di dalam perang adalah tombak panjang dan perisai untuk melindungi diri. Di samping tombak, sumpitan yang memakai panah beracun pun dipakai. Tombak itu mempunyai ujung yang dipanaskan.[133] Dalam perang dipergunakan perisai yang dibuat dari kayu atau kulit kerbau yang dibentangkan pada suatu lingkaran. Mereka juga memakai pakaian pelindung yang dibuat dari cincin-cincin yang disambung-sambung.[134] Pisau pendek yang dipakai sebagai senjata, di samping alat tersebut terdapat tombak pendek, keris, dan kelewang. Pemakaian baju perisai (*harnas*) yang dibuat dari besi atau rantai-rantai besi atau dari kulit kerbau adalah untuk melindungi badan dari serangan-serangan senjata kuat dan tajam. Di Sulawesi Selatan pakaian perisai ini dibuat dari tembaga. Ada yang berbentuk rok pendek dari besi dan ada pula yang bentuknya seperti setengah rok bagian depan.

Perisai-perisai ini selain digunakan untuk melindungi badan juga untuk menghias badan dan diberi warna-warna seperti di Banten. Pedagang-pedagang dari dua puluh lima kapal kerajaan memakai pakaian perisai

---

130 B. Schrieke, *op. cit.*, hlm. 122
131 *Ibid.*, hlm. 122
132 William Marsden, *op. cit.*, hlm. 378
133 G.P. Rouffaer en J.W. Ijzerman, *De eerste Schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indie onder Cornelis de Houtman 1595–1597*, I. De eerste Boeck van Williem Lodewycksz, hlm. 117
134 *Ibid.*, hlm. 117

yang berwarna-warna.[135] Sebagaimana telah disebut di atas senjata kelewang telah lama dikenal di kepulauan Indonesia. Macam-macam kelewang seperti pedang *rudus, pemandap,* dan lain-lain. Senjata ini biasanya dipakai di sisi pinggang. *Siwar* merupakan senjata berbentuk golok kecil yang khusus dipakai untuk membunuh.

Keris adalah senjata yang umumnya dikenal di seluruh Indonesia. Senjata ini merupakan golok yang mempunyai bentuk khusus. Biasanya di depan bagian kiri pinggang. Ada juga yang memakainya di belakang. Bentuk keris ini berbelok-belok, tidak lurus atau rata.

Senjata yang dinamakan *jono* berasal dari daerah Batak, bentuknya hampir seperti kelewang. Senjata lain yang juga dikenal di daerah ini adalah tombak yang berkepala besi. Sumpitan meskipun dipakai juga di Jawa, akan tetapi daerah asalnya adalah Sulawesi, Kalimantan, dan Bali.

Senjata api, juga sudah dikenal di kepulauan Indonesia pada abad ke-16 dan ke-17, meskipun kemahiran untuk mempergunakan senjata ini belum begitu baik. Dalam pemakaian senjata-senjata seperti meriam-meriam, orang Indonesia biasanya mempekerjakan tawanan-tawanan Eropa yang telah mengerti cara-caranya. Hal ini terjadi pada tahun 1602 pada saat Adipati Demak mempergunakan tawanan-tawanan Inggris dan Belanda untuk menembakkan meriam melawan musuh.[136] Di samping tombak panjang dan tombak-tombak pendek yang dilemparkan ke arah lawan di Ternate terkenal juga alat senjata yang dilemparkan dan dibuat dari besi. Alat ini diikat dengan tali dan bila menemui sasaran, tali itu ditarik sehingga sasaran dapat ditangkap dan diambil kembali. Dengan senjata yang sederhana ini mereka berkelahi dengan Portugis yang bersenjata api lebih sempurna dan tentu dapat mengalahkan orang-orang Ternate.[137]

Dalam perang yang diadakan di kepulauan ini bendera-bendera merupakan lambang kesaktian orang-orang yang penting. Pada bendera ini sering terdapat gambar-gambar yang melambangkan tanda-tanda kesaktian itu. Penyerangan-penyerangan selalu disemarakkan dengan bendera-bendera dan kain panjang yang berwarna-warna yang diikat memanjang pada bambu.

Bendera yang dibawa Trunojoyo melawan Belanda di Kadiri berwarna biru yang diberi hiasan-hiasan yang berwarna emas, perak, dan sutra. Orang-orang Makassar mempunyai bendera berwarna hijau. Dalam menghadapi serangan bendera merahlah yang mereka kibarkan. Bendera yang bergambar naga ini dibawa mereka di garis paling depan. Bilamana bendera itu di gulung ini merupakan tanda bahwa ada orang penting yang gugur.[138]

---

135 B. Schrieke, *op. cit.*, hlm. 127
136 *Ibid.*, hlm. 124
137 *P.A. Tiele Europeers in de Maleischen Archipel*, hlm. 391
138 B. Schrieke, *op. cit.*, hlm. 124

Penyerangan atas kota Batavia oleh pasukan-pasukan Makassar juga disertai pengibaran-pengibaran bendera dan kain memanjang yang diikat pada bambu-bambu panjang. Beberapa di antara bendera itu ada yang berwarna merah darah ada yang bergambar bintang emas dan ada pula yang mencantumkan huruf-huruf. Bilamana tanda-tanda itu terdapat pada bendera-bendera itu, dapat diketahui bahwa dalam pasukan itu terdapat orang-orang penting.[139]

139 *Ibid.*, hlm. 127

Daftar Pustaka

Abdul Rasak Daeng Patunru, *Sedjarah Gowa*, Makassar, Sulawesi Selatan, Yayasan Kebudayaan, 1969.

Abdullah, Taufik, "Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau", *Indonesia*, II, New York, Ithaca, Modern Indonesian Project, Cornell University, 1961, hlm. 13, 14.

———, (Editor), *Syasah Ummat Islam Indonesia*, diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 90–91.

Al-Attas, Syed Naguib, *Preliminary Statement on a General Theory on the Islamization of the Malay–Indonesian Archipelago*, Kementerian Malaysia, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1969.

———, *The Origin of the Malay Shair*, Kementerian Pelajaran Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1968.

Amir Sutaarga, Moch, *Prabu Siliwangi*, Bandung, PT Duta Rakyat, 1965.

Arasaratnam, S, "Some Notes on the Dutch in Malacca and the Indo–Malayan Trade 1641–1670", *JSEAH*, Vol. 3, No. 3, Special Issue, Desember, 1969.

Arnold, T.W., *The Preaching of Islam: A History of the Muslim Faith*, London, 1935.

Arya Carbon, Pangeran, Purwaka Caruban Nagari (MS), manuskrip ada pada Penanggung Jawab Sejarah Cirebon di Cirebon; kopi ada pada kantor Pusat Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional di Jakarta.

Atmodarminto R., *Babad Demak dalam Tafsir Sosial Politik* (Penerjemah Sandi Zaelani, Millenium Publisher PT Dyatama Azyumardi Azra, Jaringan Ulama ..., Mizan, Jakarta, Bandung, 1994.

Bendix, Reinhard, "Bureaucracy", dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Vol. 2, David L. Sills (ed.), The MacMillan Company & The Free Press, 1968, hlm. 206–217.

———, "Moskee", *Encyclopaedia Nederlandsch–Indie*, Ile dl samengesteld door P.A. van der Lith, Leiden, 's-Gravenhage, Martijnus Nijhoff.

Berg, L.W.C. van den, *De Inlandsche Rangen en Titels op Java en Madoera*, Tweede, Herziene Druk, Uitgegeven op last van Z.E. Den Minister van Kolonien, Martinus Nijhoff, 1902.

Bloch, Marc. *Feudal Society*, diterjemahkan oleh L.A. Manyon, Vol. 1, Cat. VIII, 1970, Vol. 2, Cat. VII, The University of Chicago Press, 1968.

Boechari, "A Preliminary Note on the Study of the Old Javanese Civil Administration", *MIST*, Jilid I, 1963, hlm. 122–133.

Bosch, F.D.K., "Het Lingga Heiligdom van Dinaja", *TBG*, 1924, hlm. 227–288; *OV*, 1930, hlm. 54–58.

Bosscher, C., "Bijdragen tot de Kennis van de Keij-eilanden", *TBG*, Jilid 4, 1855, hlm. 23–33.

Bottomore, T.B. *Elites and Society*, Penguin Books, 1970.

Boxer, C.R., "A Note on Portuguese Reaction to the Revival of the Red Sea Spice Trade and Rise of Atjeh: 1540–1600," *JSEAH*, Vol. X, No. 3, Desember 1969, hlm. 415–428.

———, "Francisco Vieria de Figueredo: A Portuguese Merchant Adventurer in South East Asia 1624–1667", *VKI*, 52, 1967.

———, *The Portuguese Sea-born Empire 1415–1825*, London, Hutchinson, 1969.

Brandes, J.L.A., D.A. Rinkes, "Babad Tjerbon: Uitvoering in Houdsopgaven Noten", *VBG*, Jilid LIX, 1911, h. 3 =144.

———, *Tjandi Djago*, Batavia: Monografi, 1904.

Brascamp, E.H.B. "Houtleveranties onder de 0.1. Compagnie", *TBG*, Jilid 60, 1921, hlm. 132–160, 345–372; *TBG*, Jilid 61, 1922, hlm. 150–179.

Bruinessen, Martin van, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, Mizan, 1995.

Casparis, J.G. de. 1950. "Inscripties uit de Cailendra–Tijd," *Prasasti Indonesia*, I, Bandung, Jawatan Purbakala RI. A.C. Nix & Co.

Cense, A.A., "Sanggalea: An Old Word for 'Chinese' in South Celebes," *BKI*, Jilid III, 1955, hlm. 107–108.

———, "Old Buginese and Macassarese Diaries", *BKI*, Jilid 122, 1966, hlm. 416–428.

———, *Kronik van Bandjarmasin*, Disertasi, Leiden, Mees, Sanpoort (NH), 1928.

———, dan H.J. Heeren, *Pelayaran dan Pengaruh Kebudayaan Makassar-Bugis di Pantai Utara Australia*, Jakarta, Bhratara, 1972.

Chijs, J.A. van der, "Oud Bantam", *TBG*, Jilid 26, 1881; hlm. 1–62.

Colenbrander, H.T., *Jan Pietersz Coen: Bescheiden omtrent zijn berdrijf in Indie*, Denhaag, Martinus Nijhoff, 1919–1923.

Collis, Maurice, *The Grand Peregrination: Being the Life and Adventures of Fernao Mendez Pinto*, London, Faber and Faber, 1949.

Cortesao, Armando, *The Sunlit Oriental of Tome' Fires: An Account of the East*, Seri Kedua, Jilid XXXIX dan XL, Hakluyt Society, London, 1944.

———, *Cartografia e Cartografos Portuguese dos Seculos XV e XVI*, Edicao da "Serra Nova," Lisboa, 1935.

Coulagnes, Fustel de, *"The Ancient City": A Classic Study of the Religious and Civil Institutions of Ancient Greece and Rome*, A Doubleday Anchor Book, 1889.

Cowan, H.K.J., "Bijdrage tot de Kennis der Geschiedenis van het Rijk Samoedra–Pase", *TBG*, Jilid LXXVIII, 1938, hlm. 204–214.

Crucq, R.C., "Beschrijving der Kanonnen Afkomstig uit Atjeh, thans in het Koninklijk Koloniaal Militair Invalidenhuis Bronbeek", *TBG*, 1941, hlm. 545–552.

Daghregister Gehouden in Castel Batavia 1631–1634, Den Haag, 1898.

Damais, L-Ch., "Etudes Javanaises I: Les Tombe Musulmans datees de Tralaja", *BEFEO*, Jilid XLVIII, Face 2, Paris, 1957, hlm. 391–399.

Dam, H. Ten, "Verkenningen Rondom Padjadjaran", *Indonesie*, 10e jrg., 1957, hlm. 290–310.

Dasgupta, A.K., *Acheh in Indonesian Trade and Politics: 1600–1641*, Disertasi, Cornell University, 1962.

Day, Clive, *The Policy and Administration of the Dutch in Java*, Oxford University Press, 1972.

De Haan, F. *Oud Batavia*, dl. I, Gedenkboek, Uitgegeven door het Bataviasch van Kunsten en Wetenschappen, naar aan leiding van het drie honderdjarigbestaan der stad in 1919, Batavia, 1922.

———, *Oud Batavia*, Tweede herziene druk, Bandung, A.C. Nix & Co., MCMXXXV.

———, *Oud Batavia*, Platen Album, Tweede herziene druk, Bandung, A.C. Nix & Co., MCMXXXV.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terdjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, Dicetak oleh Jamunu, Jakarta, 1969.

Dion, Mark, *Sumatra Through Portuguese Eyes*, Excerpts from Joao de Barros Decada Da Asia ...

Drewes, G.W.J., "De Herkomst van Nuruddin ar-Raniri", *BKI*, Jilid III, 2e alf., 1955, hlm. 150.

———,"Indonesia, Mysticism and Activism", dalam Gustave E. von Grunebaum (ed.), *Unity and Variety in Muslim Civilization*, Cet. III, The University of Chicago Press, 1963, hlm. 284–310.

———, "Atjehse Douanetarieven in het Begin van de Vorige Eeuw", *BKI*, Jilid 119, 1963, hlm. 406–411.

———, *New Light on the Coming of Islam to Indonesia?*, Jilid 124, afl. 4, 1968, hlm. 433 – 459.

Drewes G.W.J.; R. Ng. Poerbatjaraka, "De Mirakelen van Abdoelkadir Djaelani", Bibliotheca Javanica, *KBG*, Jilid 8, Bandung, 1938.

Duyvendak, J.J.L., "Lets Over Zeereisen der Chinezen", *Varia Historica Aangeboden aan Prof. Dr. A.W. Byvank*, Assen, 1954.

Eerde, J.C. van, "Onpersoonlijk Ruilverkeer in den Indischen Archipel", *Feestbundel uitgegeven door her Koninklijk Bataviasch Genootschap .... bit gelegenheid van zijn 150 jarig bestaan: 1778–1928*, Jakarta, 1929, hlm. 93–119.

Eerdmans, A.J.A.F., "Het Landschap Gowa", *VBG*, L, 1897, hlm. 1–121.

Erkelens, G., "Geschiedenis van het Rijk Gowa", *VBG*, L, 1897, hlm. 81–121.

Erp, Th. van, *oorstellingen van vaartuigen op reliefs ven den Boroboedoer*, Den Haag, Adi–Poestaka, 1923.

E.S. Hadimuljo, Ny., *Bahan Kepustakaan Sekitar Kedudukan Raja dalam Masa Pengaruh Tradisi Besar Hindu-Buddha*, Panitia Penyusun Buku Standard Nasional Indonesia, 1972.

Fatimi, S.Q., *Islam Comes to Malaysia*, Singapore, Malaysian Sosiological Research Institute Ltd., 1963.

Ferrand, G., "L'Element Person dans les Textes Nautiques Arabes des XIV et XVe Siccles", *JournalAsiatiques*, CCIV, 1924, hlm. 193–257.

———, *Relations de Voyages et Textes Geographiques, Persans et Turks Relatifs a L Extreme–Orient du VIIIe Siecles*, Jilid 2, Paris, 1913–1914.

Ferreira Reis Thomas, L.F., *De Malaca as Pegu, Viagens de urn Fietor Portuguese: 1512–1515*, Lisboa, Institute de Alta Culture, 1966.

Fruin-Mees, W., *Geschiedenis van Java*, II, De Mohammedaansche Rijken tot de Bevestiging van de Nacht der Compagnie, Commisie voor de Vokkalectuur, Weltevreden, 1920.

Galestine, Th. P., *Houtbouw op Oost–Javaansche Tempel Relief*, Disertasi, Leiden, 1936.

Geertz, C., *Peddlers and Princess: Sosial Change and Economic Modernization in Two Indonesian Towns*, Chicago, University of Chicago Press, 1968.

———, *The Religion of Java*, cet. II, New York, The Free Press, 1969.

———, *Islam Observed: Religious Development in Marocco and Indonesia*, The University of Chicago Press, 1971.

Geldern, Roberto Heine, *Conception of State and Kingship in South East Asia*, Ithaca, New York, South East Asia Program, Dept. of Asian Studies, Cornell University, 1956.

Gibb, H.A.R., J.H. Kremer, *Shorter Encyclopaedia of Islam*, Leiden, E.J. Brill, 1953.

Goens, R. van, "Reisbeschrijving van den weg uit Camarangh nar de Koninklijke Hoofdplaats Mataram", *BKI*, Jilid 4, 1856, hlm. 307–350.

Graaf, H.J. de, "De Moskee van Japara", *Djawa*, 16e jrg., 1936, hlm. 160–162.

———, "Oorsprong der Javaanse Moskee", *Indonesia*, le jrg., 1947/1948, hlm. 289–325.

———, "Tomé Pires, Suma Oriental, en het Tijdperk van Goddienst Overgang op Java", *BKI*, Jilid 108, 1952, hlm. 152–171.

———, "Titels en Namen van Javaanse Vorsten en Groten uit de 16e en 17e eeuw", *BKI*, Jilid 109, 1953, hlm. 62–82.

———, "De Regering van Sultan Agung, Vorst van Mataram 1613–1645, en die van zijn voorganger Panembahan Seda-ing-Krapjak 1601–1613", *VKI*, xxiii, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1958.

———, "The Origin of the Javanese Mosque", *JSEAH*, Vol. 4, No. 1, Maret 1963, hlm. 1–5.

———, "South-East Asian Islam to the Eighteenth Century", *The Cambridge History of Islam*, Vol. 2, The Further Islamic Lands, Islamic Society and Civilization, Editor P.M. Holt, Ann K.S. Lambton, Bernard Lewis, Cambridge University Press, 1970, hlm. 123–154.

Groeneveldt, W.P., *Historical Notes on Indonesia and Malaya: Compiled from Chinese Sources*, Bhratara, Jakarta, 1960.

Hamka dan Muhammad Sa'id, Risalah Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia, Medan, Bandingan utama Dr. Hamka, *Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Daerah Pesisir Sumatera Utara*, hlm. 72–95. Prasaran Haji Muhammad Sa'id, Mencari Kepastian tentang Daerah, Mula dan Cara Masuknya Agama Islam di Indonesia", hlm. 177–229.

Harun Hadiwijono, *Man in the Present Javanese Mysticism*, Amsterdam, Bosch & Keuning, NV Baarn, 1967.

Hazue, G.A.J., "Tjeribonsch Wetboek (Pepakem Tjerbon) van het Jaar 1768, in Tekst en Vertaling", *VBG*, LV, 2e stuk, 1905.

Hicks, Sir John, *A Theory of Economic History*, London, Oxford, New York, Oxford University Press, 1969.

Hidding, K., "Het Bergmotief in Eenige Godsdienstige Verschijnselen op Java", *TBG*, LXXIII, 1953, hlm. 469–475.

Hien, H.A. van, *De Javaansche Geestenwereld en de Betrekking die Tusschen de Geesten en Zinnelijkewereld Bestaat, Verduidelijkt door Petangan's bij de Java*,'De Geschie denis der Goldsdiensten op Java zesde en verbetede druk, Batavia, G. Koff & Co., (t.t.)

Hill, H.K., "Hikayat Raja-raja Pasai: A Revised remisce Version of Raffles", MS 67, dst., *JMBRAS*, XXXIII, Singapore, 1960.

———, *Critische beschouwing van de Sadjarah Banten: Bijdrage ter Kenstschetsing van de Javaansche Geschiedschrijving*, Leiden, John Enschede en Zenen, Haarlem, 1913.

Hoesein Djajadiningrat, R.A., *Critische beschouwing van de Sadjarah Banten: Bijdrage ter Kenstschetsing van de Javaansche Geschiedschrijving*, Leiden, John Enschede en Zenen, Haarlem, 1913.

———, "De Naam van den Eerste Mohammedaansche vorst in West Java", *TBG*, LXXIII, Java", *TBG*, LXXIII, 1933, hlm. 401–404.

———, "Islam di Indonesia," dalam Kenneth W. Morgan (ed.), *Islam Djalan Mutlak*, II, Jakarta, PT Pembangunan, 1963.

———, *Adat Atjeh*, Penerbitan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970.

Hourani, George Fadlo, *Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient* and Early Medieval Times, Princeton, New Jersey University Press, 1951.

Hurgronje, C. Snouck, *De Atjehers*, dl. I, Uitgegeven op Last der Regeering, Batavia, Leiden, E.J. Brill, 1893.

———, "De Hadji–politiek der Indische Regeering: 1909", VG, IV, II, Kurt Schroeder, Bonn and Leipzig, 1924, hlm. 173–198.

———, "De Islam in Nederlandsch–Indie: 1913", VG, IV, II, Kurt Schroeder, Bonn and Leipzig, 1924, hlm. 359–391.

Ibrahim Bochari, S., *Sedjarah Masuknya Islam dan Proses Islamisasi di Indonesia*, Jakarta, 1971.

Ibrahim al-Geyoushi, Muhammad, "Al-Tirmi'dhis: Theory of Saint and Sainthood", *The Islamic Quarterly*, Vol. V, No. 1, Januari–Maret 1971, The Islamic Culture Center, London, 1971.

Ijzerman, J.W., "Over de Begering van het Fort Jacarta", *BKI*, dl. 73, 1977, 22 Desember 1618–1 Februari 1819, hlm. 558–679.

Intenerario, *Vojage op te Schripvaert van Jan Huygen van Lins Choten Oost ofte Portugaelslndiens*: 1579–1592, Jilid 3, Den Haag, 1955/1957.

Jacobs, S.J., M. Hubert Th. Th., *A Treatise on the Moluccas (c 1544): Probably the Preliminary Version of Antonio Galvao's Lost Historia das Molucas*, Source and Studies for the History of the Jesuits, Vol. III, Jesuit Historical Institute, Rome, 1971.

Johns, A.H., "Sufism as a Catagory in Indonesian Literature and History", *JSEAH*, Vol. 2, No. 2, Juli 1961, hlm. 10–23.

Jones, Emrys, *Human Geography: An Introduction to Man and His World*, Praeger Publisher, New York, Washington, Cet. VI, 1970.

Jonge, J.K.J., *De Opkomst van het Nederlandsche Gezag in Oost-Indie*, Jilid 6, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, MDCCCLXXII.

———, *De Opkomst van het Nederlandsche Gezag in Oost-Indie*, Jilid 4, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, MDCCCLXIX.

Junus, Mahmud, *Tafsir al-Qur'anul Karim Indonesia*, Bandung, Jakarta, Al-Ma'arif, 1951.

Juynbol, H.H., *Oud Javaansch-Nederlands Woordenlijst*, Leiden, E.J. Brill, 1923.

Juynbol, Th. W., *Handleiding tot de kennis van de Muhammadaansche wet volgens de leer Syafiitische–school*, Leiden, E.J. Brill, 1930.

Kamma, F. Ch., *Koreri Messianic Movement in the Biak-Numfor Culture Area*, Den Haag, Martinur Nijhoff, 1972.

Kern, R.A., "De Verbreiding van den Islam", dalam H.W. Stapel (ed.), *Geschiedenis van Nederlandsch–Indie*, Jilid I, NV Uitgeversmaatschappij Joost van den Vondel, Amsterdam, 1938, hlm. 305–365.

Kamma, F. Ch., "Pati Unus en Sunda", *BKI*, Jilid 108, 1952, hlm. 124–131.

Kraemer, Hendrik, *Een Javaansche Primbon uit Zestiende Eeuw*, Leiden, Firma F.W.W. Trap, 1921, hlm. 69–86.

Kraemer, J., "De Groote Moskee te Koeta-Radja", *NION*, 1920–1921, hlm. 69–87.

Kuningen, J., *Sejarah Ambon Sampai pada Akhir Abad 17*, Jakarta, Bhratara, 1973.

———, Lapidus, I.M., "Muslim Cities and Islamic Societies", dalam Ipa Marvin Lapidus (ed.),

———, *Middle Eastern Cities: A Symposium on Ancient Islamic and Contemporary Middle Eastern Urbanism*, Cambridge, Maasachusetts, University of California Press, 1967.

La Side, Peranan Kerajaan Gowa sebagai Maritim Abad 16–17, Seminar Sejarah Nasional II, Yogyakarta, 1970.

Lenski, Gerhard E., *Power and Privilege: A Theory of Social Stratification*, New York, McGraw–Hill Book, 1966.

Leur, J.C. van, *Indonesian Trade and Society: Essay in Asian Social Economic History*, Bandung, van Hoeve, The Hague, 1955.

Levy, Reuben, *The Social Structure of Islam*, Cambridge at the University Press, 1969.

Ligtvoet, A., "Transcriptie van het Dagboek der Vorsten van Gowa an Tallo", *BKI*, Jilid 28, 1880, hlm. 1–259.

Lombard, Denys, Le Sultanat d'Atjeh an 'IskandarMuda: 1607–1636, Ecole Francaise d'Extreme Orient, Paris, 1967.

———, "Jardin a Java", *Arts Asiatique*, Tome XX, 1969, hlm. 135–172.

MacKinnon, Edwar, *Melayu Jambi Interlozal and International Trade*, Ibid., 1992, hlm. 125–141

Manguin, Y.Y., *Les Portugais sur les Cotes du Viet-Nam et du Cam pa Etuda sur les Routes Marines e4las Relations Commerciales d'apres les Sources Portugaises (X VI-e, XVIIe, XVIIIe Siecles)*, Ecole Francaise d'Extreme-Orient, Paris, 1972.

Matthes, B.F., "De Makasaarsche Kotika 'is'", *TBG*, Jilid 18, 1972, hlm. 1–138.

Milleed, J.V.G., *Ma Huan Ying-yai Sheng-lan: The Overall Survey of the Ocean's Shores* (1433), The Hakluyt Society, Extra Series No. 42, Cambridge, 1970.

Meersma, O.F.M., Fr. Achilles, *The Franciscans in the Indonesian Archipelago: 1300–1775*, Nauwelaerts, Louvain, Belgium, 1967.

Mees, C.A., "De Kroniek van Koetai", Disertasi, Leiden, 1935.

Meglio, Rita Rosedi, "Arab Trade with Indonesia and the Malay, Peninsula from the 8th to the 16th Century", dalam D.S. Richard (ed.) *Papers on Islamic History II, Islamic and the Trade of Asia: A Colloqium*, Bruno Cassier, Oxford, University of Pennsylvania Press, 1970, hlm. 105–135.

Meilink-Roelofsz, M.A.P., *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago Between 1500 and About 1630*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1962. Trade and Islam in the Malay–Indonesia Archipelago Prior to the Europeans", dalam

D.S. Richard (ed.), *Papers on Islamic History II, Islamic and the Trade of Asia: A Colloqium*, Bruno Cassier, Oxford, University of Pennsylvania Press, 1970, hlm. 137–157.

Mellema, R.L., *Een interpretatie van de Islam*, Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mededeling No. CXXXV, Afdeling Culturele en Physische Anthropologis No. 60, Amsterdam, 1958.

Moertono, Soemarsaid, *State and Statcraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period 16 to 19th*, Monograph Series, Cornell University Press, 1958.

Moquette, J.Y., "De Grafsteen te Pase en Grissee Vergeleken met dergelijk monumenten uit Hindoestan", *TBG*, Jilid LIV, 1912, hlm. 536–553.

———, "Fabriekswerk", *NBG*, Jilid LVII, 1920, hlm. 44–47.

Muhammad Syamsu As, H, *Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya*, Lentera, 1999.

Mukti Ali, A., *An Introduction to the Government of Acheh's Sultanate*, Yogyakarta, Yayasan Nidia, 1970.

———, *The Spread of Islam in Indonesia*, Yogyakarta, Yayasan Nidia, 1970.

Mumford, Lewis, *The City in History: Its Origin, Its Transformation and Its Prospects*, New York, Harcourt Brace & World Inc., 1961.

———, Gideon Sjoberg, Robert C. Wood, Theodore R. Anderson, "City", dalam *International Encyclopaedia of the Social Science*, Vol. 2 (C), The MacMillan Co., The Free Press, 1968, hlm. 447–473.

Netscher, E., Mr. J.A. van der Chijs, "Munten van Nederlands–Indie Beschreven en of Gebeeld", *VBG*, Jilid XXXI, 1864.

Nicholson, C.K., *The Introduction of Islam into Sumatera and Java: A Study in Cultural Change*, Disertasi, Syracuse University, 1965.

Noorduyn, J., *Een Achtiende Eeuwse Kroniek van Wajo*, Leiden, De Nederlandse Boek en Steendrukkerij v/h H.L. Smits, 's-Gravenhage, 1955.

———, "De Islamisering van Makasar", *BKI*, Jilid 112, 3e aflevering, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1956, hlm. 247–266.

———, "Origin of South Celebes Historical Writing", dalam Soedjatmoko, dkk. (ed.), *An Introduction to Indonesian Historiography*, Ithaca, New York, Cornell University Press, 1965.

———, "Further Topographical Notes on the Ferry Charter of 1358 with Appendixes on Jipang and Bojonegoro", *BKI*, Jilid 1924, 1968, hlm. 460–480.

Islamisasi Makasar, Bhratara, Jakarta, 1972.

Nooteboom, C., *De Boomstamkano in Indonesia*, Leiden, E.J. Brill, 1932.

Olthof, W.L., *Poenika Serat Babad Tanah Djawi Wiwit Saking Nabi Adam Doemoegi ing Taoen 1647*, dengan register oleh A. Reeuw, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1941.

Pardessus, J.M., *Collection de Lois Maritimes Anterieures au XVIIIe Siecle*, Jilid VI, Paris, Imprimerie Royale, 1845.

Paul Peliot, *Notes on Marco Polo I*, Paris, Impremirei Nationale Librairie Adrien Maisoneuve, 1959.

Pegafetta, A., *Premier Voyage Autour du Monde*, Paris, 1801.

Pigeaud, Th., *Java in the 14th Century: A Study in Cultural History, The Nagara–*

Kertagama by Rakawi Prapantja of Madjapahit, 1365 AD, Vol. III, The Hague, Martinus Nijhoff, 1960.

———, *The Literature of Java*, Vol. II, Descriptive list of Javanese manuscript, The Hague, Martinus Nijhoff, 1968.

Pijper, G.F., *Pragmenta Islamica: Studien voor het Islamisme in Nederlandsch-Indie*, Leiden, E.J. Brill, 1934.

———, "The Minaret in Java", *India Antiqua*, Leiden, E.J. Brill, 1947, hlm. 274–283.

Pirene, Henri, *Mediavel Cities: Their Origins and the Revival of Trade* (Diterjemahkan dari bahasa Prancis oleh Frank D. Halsey), New York, Garden City, Double Anchor Books, 1956.

Porgengen, J.A., "Lets Over de Doodengrotten en de Rotsteekeningen die op de Keieilanden Gevonden Woeden", *TAG*, Seri 2, Jilid 6, 1888, hlm. 258–260.

Poerbatjaraka, Purnadi, "Shahbandars in the Archipelago", *JSEAH*, Vol. 2., Juli 1961, hlm. 1–9.

Ras, J.J., *Hikajat Bandjar: A Study in Malay Historiography, Leiden*, 's-Gravenhage, NV De Nederlandsche Boek en Steedrukkerij v/h H.L. Smits, 1968.

Reid, Anthony, "Sixteen Century Turkish Influences in Western Indonesia", *JSEAH*, Vol. 3, Special Issue International Trade and Politics in South East Asia 1500–1800, Desember 1969.

Rijali, Imam, *Hikayat Tanah Hitu*, Transkripsi Drs. Manoesama dari film mikro MS, Bibliotheek Universiteit, Leiden (tidak diterbitkan).

Romli, Inayati Adrisijanti, Anggraeni (Peny.), *Mosaik Pusaka Budaya Yogyakarta*, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta, 2003.

———, Arkeologi Perkotaan Mataram Islam, Yayasan Akikarya IKAPI dan The Food Foundation, Jendela Yogyakarta, 2000.

———, "Banten sebagai Pusat Kekuasaan dan Niaga Antarbangsa", dalam Banten Kota Pelabuhan Jalan Sutra, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumen Sejarah Nasional, Jakarta, 1995.

Rinkes, D.A., "De Heiligen van Java I: De Makam van Sjech Abdoelmoehji", *TBG*, Jilid III, 1910, hlm. 556–589.

Rouffaer, G.P., "Het Tijdperk van Godsdienstovergang (1400–1600) in den Maleischen Archipel: le Bijdragen", *BKI*, Jilid 50, 1899, hlm. 111–199.

Rouffaer, G.P.; J.W. Ijzerman, *De Eerste Schipvaart der Nederlanders naar East-Indie onder Cornelis de Houtman, 1595–1597: De Eerste Boek van Willem Lodewijcksz*, Martinus Nijhoff, 1915.

Roux, C.C.F.M. le, "Boegineesche Zeekarten van den Indischen Archipel", *TAG*, Seri 2, Jilid III, 1935, hlm. 687–714.

Sartono Kartodirdjo, A., "Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisionil dan Kolonial", *Lembaran Sedjarah*, No. 4, Seksi Penelitian Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, 1969.

Sartono Kartodirdjo (ed.), *Sejarah Perlawanan-perlawanan terhadap Kolonialisme*, Departemen Pertahanan Keamanan, 1973.

Sauders, John J. (ed.), *The Muslim World on the Eve of Europe's Expansion*, New Jersey; Englewood, Prentice-Hall Inc., 1966.

Schurz, W.L., *The Manila Galleon Studies*, Dutton, New York, 1939.
Schrieke, B., *Indonesian Sociological Studies*, I, Bandung, The Hague, W. van Hoeve, Ltd., 1955.
Schrieke, B.J.O., *Het Boek van Bonang*, Disertasi Universitas Leiden, Utrecht, 1916.
Serrurier, Mr. L., "Kaart van Oud-Banten (Bantam) in Gereeeceid Gebracht door Wijlen Mr. L. Serrurier (met eene inleiding van Dr. J. Brandes)", *TBG*, Jilid 45, 1902, hlm. 257–262
Sjoberg, Gideon, *The Pre-Industrial City: Past and Present*, New York, The Free Press, 1965.
Sirjamaki, Hohn, *The Sociology of Cities*, New York, Random House, 1964.
Skinner, C., "Syair Orang Mengkasar by Entje Amin", *VKI*, Jilid 40, 1963.
Soebardi, "Calendrical Traditions in Indonesia", *MISI*, Jilid II, No. 1, 1965, hlm. 49–62.
Soeripto, *Ontwikkeelingsgang dan Vorstenlandsche Wetboeken*, Disertasi, Universitas Leiden, 1929.
Stapel, F.W., *Cornelis Janzoon Speelman*, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1936.
Steiner, Peter O., "Market and Industries", dalam *International Encyclopedia of Social Sciences*, Vol. 9, 1968, hlm. 575–581.
Stein Callenfels, P.V. van, "Bijdragen tot de Topographic van Jawa in de Middleeeuwen", *KBG*, II, Weltevreden, G. Kolf, 1929, hlm. 370–392.
Stein Callenfels, P.V. van; L. van Vuuren, "Bijdrage tot de Topographic van de Residentie Soerabaia in de 14de Eeuw", *TAG*, Jilid XII, 1924, hlm. 67–81.
Steller, K.G.F.; W.E. Aibersolid, *Sangirees–Nederlands Woordenboek* (Met Nederlands–Sangirees Register), Den Haag, Martinus Nijhoff, 1959.
Stokking, N.J., "Gebruiken der Talaoerezen bij Zeeveert", *Mededeelingen Tijdschrift voor Zendingswetenschap*, Jilid 66, 1922.
———, *Cultuur Geschiedenis van Indonesia: De Islam en Zijn Komst in de Archipel*, III, Groningen-Jayakarta, J.B. Wolters, 1952.
———, "The Meaning of Hindu–Javanese Candi", *Journal of the American Oriental Society*, Vol. 51, hlm. 1-15.
Stuterheim, W.F., "Tjandi Djawi op een Relief", *TBG*, Jilid 81, 1941, hlm. 1–25.
Sutjipto, F.A., "Some Remarks on the Harbour of Japara in the Seventeenth Century", Kertas Kerja Seminar IAHA, Manila, 1971.
Teeuw, A.; D.K. Wyaat, *Hikayat Patani: The Story of Patani*, Den Haag, Bibliotheca Indonesia, Martinus Nijhoff, 1970.
Teixeira, M., "Early Portuguese and Spanish Contacts with Borneo", *Boletin da Soceiedade de Geografia de Lisboa*, 1964, hlm. 229–335.
Terpstra, H., "De Nederlandsche voor Compagnien", dalam F.W. Stapel (ed.), *Geschiedenis van Nederlandsche Indie*, Jilid II, Amsterdam, 1938, hlm. 273–475.
Tibbets, G.R., "Comparison Between Arab and Chinese Navigational Technique", *Bulletin of the SOAS*, Jilid XXXVI, 1973, hlm. 97–108.
Tiele, P.A.; J.E. Heeres, *Bouwstoffen voor de Geschiedenisfder Nederlanders in den Maleischen Archipel*, Jilid 3, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1886–1895.
Tirtakoesoema, R. Soedjana, "De Besaran ter Regentschapshoofdplaats Demak", *Djawa*, 17e jrg., 1937, hlm. 133–136.
———.Tobing, Ph. O.L., *Hukum Pelajaran dan Perdagangan Amanna Gappa*, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, 1961.

Tudjimah, *Asrar allnsan fi Ma'rifa al-Ruh wa 'l-Rahman*, Jakarta, PT Penerbitan Universitas, 1960.

Tjandrasasmita, Uka, "Untung Surapati: Lukisan Sejarah Visual Museum Sejarah Tugu Nasional", Bagian III, B, 1964, XIV (tidak diterbitkan).

———, *Sultan Agung Tirtajasa Musuh Besar Kompeni Belanda*, Yayasan Nusalarang Jakarta, 1967.

———, *Projek Penggalian di Sulawesi Selatan (The South Sulawesi Excavation Final Report)*, Jakarta, Yayasan Purbakala, 1970.

———, Beberapa Catatan tentang Perdagangan di DAS Batanghari Hubungannya dengan Jaringan Perdagangan Internasional pada Abad-Abad Pertama Sampai Abad XVI, dalam Seminar "Sejarah Melayu Kuno", Jambi, 7–8 Desember 1992, Pemda Tk I Jambi - Kanwil Depdikbud Jambi.

———, "The International Trade of Sunda Pajajaran Kengdom in The XIV–XVI th Contunies", Paper disampaikan dalam seminar *International Association af Historians of Asia (IAHA)*, Jakarta, 1988.

Valentijn, Francois, *Oud en Nieuw Oost–Indien met Aanteekeningen*, Jilid III, 's-Gravenhage, 1858.

Vermeulen, J. Th., *De Chineezen te Batavia an de Troebelen van 1740*, Disertasi, Universitas Leiden, 1938.

Veth, P.J., *Java: Geographisch. Ethnologisch, Historisch*, Cet. II, Haarlem, 1896.

Voorhoeve, P., "Atjeh", dalam *Encyclopaedia of Islam*, Vol. I, A–B, Leiden, E.J. Brill, 1960.

Wall, V.J. van de, "Bouwgeschiedenis van het Fort Speelwijk te Banten", *OV*, 1928, hlm. 137–157.

Warnsinck, J.C.M., *Reisen van Nicolaus de Graaff Gedaan naar alle Gewesten des Werelds: Beginnende 1639 tot 1687 Incuis*, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1930.

Weber, Max, *The City* (Diterjemahkan dan diedit oleh Don Martindal dan Gertrud Neuwirth), New York, The Free Press, 1966.

———, *The Sociology of Religion* (Diterjemahkan oleh Ephrhaim Fischoff), Ct. V, Boston, Beacon Press, 1969.

Wetheim, W.F., *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*, Sumur Bandung, 1956.

Wolters, O.W., *Early Indonesian Commerce : A Study of the Origins of Sriwijoya*, Ithaca, New York, Cornell University Press, 1967.

Zainuddin, H.M., *Tarich Atjeh dan Nusantara*, Cet. I, Medan, Pustaka Iskandar Muda, 1961.

Zakaria, Ahmad, *Sekitar Keradjaan Atjeh dalam Tahun 1520-1675*, Medan, Monora, 1972.

Indeks

A

A.A. Cense 11
Adat Makuta Alam 180, 182, 209, 226, 227
ajaran Syafi'i 179
Ali Mughayat Syah, 256
Albuquergue 107
Antonio d'Abreu 119
Antonio Galvao 10, 17, 18, 75, 76, 101, 208, 264, 269, 293, 301, 315, 347, 365
Amanna Gappa 115, 124, 129, 130, 132, 136, 139
Ampu Jatmika 211
arung-arung 14
Arung Palaka 82
Arung Pitu'E 213, 232
Aru Palaka 389, 390, 391, 397

B

B. Schrieke 270
Babad Demak 201
Babad Sangkala 54
Babad Sengkala 249
Babad Tanah Jawi 171, 172, 201, 214, 215, 231, 236, 257, 297, 326
Babad Tjerbon 171, 176, 199, 255, 294
Babad Tuban 171
baileo 103, 104, 105
baju zirah 366
Banu Umayyah 1, 203
barter 317
Batu Aceh 28
bende 236, 329
bertya 300
biduk 97
Bhre Wirabumi 5
brigantine 364

C

cabiles 208
cafre 15
campana 105
cangalha 103, 104, 105
cantaar 135
ceiti 317, 318
calai 318
cash 317, 318, 319
ceitis 26
Central Islands 208
cerucuk 401
Charles M. Cooley 254
clientship 222
comanomi 104
commenda 120, 122, 139, 158
Cornelis de Houtman 68, 105, 290, 337, 349, 361, 370
corpus diplomaticum 242
crusade 26
cruzado 26, 134, 153, 317, 318
C. Snock Hurgronye 176, 301, 328

D

Cut Nyak Din 33, 37
Daha 6, 10, 14, 52
Dato'ri Bandang 164, 167
de Albuquerque 107, 108, 112, 268, 318, 339, 344, 353
Demak 12, 13, 108
Dinasti T'ang 1, 2, 47, 161
Diego Lopez 353
drama 26, 317

E

ekspansi 339
ekspedisi Pamalayu 3
elite birokrat 283, 284, 285, 296, 299
elite politik 285, 286, 289, 290

F

Empu Gandring 296
Faletehan (Fatahillah) 7, 223, 255
Francois Valentijn 271, 272, 308
Fransico Rodrigues 95

G

Gajah Mada 5
galai 364
Garcia Henriques 119
gerakan Padri 168
Gerebeg Mulud 311
Giri 9, 10
gold rush 139
Gowa 12, 13, 78, 272, 273
golongan elite 283, 287, 289, 296, 303
golongan nonelite 286, 287, 288, 296, 303
Gujarat 48, 112, 123, 136, 139, 148, 153, 163, 288, 312, 313, 337, 361

H

Hadat 220, 221
hadis 323, 324
Hamka 175
Hamzah Fansuri 174, 183, 184, 185, 191, 197, 199
Hang Tuah 94
Harimau nan Salapan 49
Hayam Wuruk 5, 209
Hazeu 327
hegemoni 224
Hendrik van Gart
Hikayat Aceh 263
Hikayat Banjar 10, 85, 110, 167, 175, 211, 215, 219, 229, 233, 245, 246, 269
Hikayat Banjarmasin 231, 236
Hikayat Bustan as-Salatin 30, 34, 155, 279, 305
Hikayat Hitu 72, 175, 285, 291, 315
Hikayat Kutai 11, 12, 88, 175, 291,294,324
Hikayat Patani 26, 145
Hikayat Tanah Hitu 232
Hikayat Raja-Raja Pasai 23, 172, 197, 207, 209, 216, 221, 222, 225, 329, 330
Hikayat Wajo 79, 257
H. J. de Graaf 6, 52, 322
Hindia-Belanda 21, 34, 39, 49, 71
Hi-Tsung, Kaisar 2
hongi 402

I

Ibn Battutah 162
I.J. Brugmans 193
Imogiri 57
islamisasi 161, 162, 169, 170, 228, 328
Iskandar Dzulkarnain 353

J

Jaka Tingkir 228
James Lancaster 278, 337, 361
Jan Pieterszoon Coen 108, 157, 252, 296, 372, 373, 374, 377, 380
Jayanegara 5
J.C. van Leur 8, 15, 16, 166
J. Noorduyn 13
J.P Moquette 163
John Hicks 305

K

Kadiri 6, 7, 52
kakoya 104
Kalula 125
Kalimasada 174
kalulues364
kapal lesung 99
kapal papan 99, 100
kapal sekunar 109
Kasuwiyang Salapangan 213
Kedah 1, 2
kerajaan Aceh Darussalam 28, 31, 33
kerajaan Banten 65
kerajaan Bone 83, 84
kerajaan Cirebon 59
kerajaan Gowa 72, 79, 82, 85, 263, 292, 383, 387, 388, 390, 397
kerajaan Gowa - Tallo 79, 82, 83, 84, 276, 342, 343, 385
kerajaan Johar 44
kerajaan Kutai 88
kerajaan Malaka 37, 39
kerajaan Mataram 55, 57
kerajaan Melayu 3
kerajaan Singasari 3
kerajaan Sriwijaya 2, 3, 19, 23
Kesultanan Banten 71
Kesultanan Cirebon 59, 60, 65
kerajaan Demak 7, 52, 54, 59
kerajaan Jambi 44
kerajaan Pontianak 89
kerajaan Wajo 14, 83, 85, 276
Kitab Adat Aceh 31
kiwi 129, 131
Kubilai Khan 3
Kutai 11, 12, 14
Kompeni 340, 357, 367, 368, 373, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 392, 398
kora-kora 104, 119, 135, 341, 342, 366, 385, 401

L

lakafunu 104, 402
lalanang 401
Lambung Mangkurat 211, 212
Lambuti 109
lancmara 116, 360, 401
langgar 321, 324, 325
Laut Cina Selatan 92
Leeuwengracht 308
limpo-limpo 14
Lingua Franca 18, 175, 198, 291
lontara bilang 106, 107
Lontara Warjo 208
Lopez Squera 344, 345, 353

M

Maclaine Pont 263
Majapahit 4, 6, 10, 14, 19, 52
Mahabharata 174
Ma-huan 4
mahzab 175
Malahayati 278
Malaka 331, 333, 334, 335, 336, 339, 344, 353, 370, 394
Malik as-Saleh 207, 224, 226
Marco Polo 3, 224, 225
martabat tujuh 192, 162, 163, 215
mastaka 173
masyhad 325
Maulana Malik Ibrahim 275
Max Weber 304
mayang 97
maze 317, 318
mazhab Syafi'i 175, 176
meru 259, 322
mollah 169
Moluccan Vampire 346
monopoli 347, 351, 356, 357, 359, 368, 371, 375, 401
meunasah 321, 324, 325
M. Siling Roelof 52, 319

N

Nagarakartagama 10, 11, 28, 74, 85, 265
ngaju 103
Nicolaus de Graff 142, 261
Nuruddin ar- raniri 176, 186, 197
Nusantara 331, 340, 342, 351, 381, 383, 399, 402

P

padrao 265
Padri 48, 49
Pajang 13
paguron 194
pancawara 18
panembahan 275, 277
Panembahan Senapati 238
Pangeran Arya 282
Pangeran Jayakarta 261
Pangeran Jakarta 372, 373
Pangeran Samudra 219, 220, 229, 230, 236, 256, 277
Pangeran Trenggana 223, 225, 227
papajangga 104
paseban 286
Pate Putih 341
Pati Unus 7, 338, 354
Pei-hu-lu 40
pekojan 170, 262
Pepakem Cerbon 327
Perang Banjar 399
Perang Sabil 33
Perang Salib 344
Perjanjian Gianti 252
Pigatetta 208
priyayi 283, 284
Perjanjian Bongaya 245, 252, 397
Persetujuan Motir 341
Portugis 7, 14, 30, 31, 54, 76, 77, 114, 115, 121, 122, 137, 154
puon 318
prasasti Ligor 1
prawangsa 280
primbon 189
proto tipe 17
Purwaka Curuban Nagari 233, 256, 294
P.V. Van Stein Callenfels 15

R

Raden Patah (Pate Rodim) 7, 52, 255, 257, 337, 338
Raja Ampat 232
Raja Zainal Abidin 341
Ramayana 174
Ratu Siwa 161
rempah-rempah 341, 344, 345, 349, 356, 371
relief 101, 144
retoiros 95

riekke ponna 136
Rijckloff van Goens 120, 277
rorehe 104
R. Von Heine Geldern 15, 256

S

Saka Total 201, 323
samatula 124
Samudra Hindia 55
Samudra Pasai 3, 21, 22, 23, 26, 161, 207, 209
saptawara18
Sartono Kartodirjo 206, 273
seba 230, 231, 232
Sejarah Banten 46, 47, 172, 173, 234, 277, 281, 291, 294, 320, 330
Sejarah Gowa 213
Sekaten 294
Selat Malaka 1, 3, 4, 7, 22, 23, 37, 40, 111, 115, 255, 353, 356
Selat Sunda 8, 113, 114, 115
Semenanjung Malaya 139, 223, 356
Senapati ing Alaga 214
sentana dalem 280
Serat Centhini 192, 194, 195
Serat Rembang Anggeranggeran 235
shilling 318
Sila-Sila Keturunan Raja Jambi 43
Singasari 3
singenjei 44
sistem angin 91
Siti Jenar 189
sitinggil 278
Soa 263
sorogan 194, 195
Sriwijaya 2, 3
strolabe 96
Sultan Ageng Tirtayasa 217, 286, 320, 330, 351, 375, 376
Sultan Agung 57, 58, 376 120, 122, 157, 139, 148, 250, 282
Sultan Haji 375, 396
Sultan Hasanuddin 72, 340
Sultan Iskandar Muda 33, 142, 146, 155, 182, 185, 197, 215, 216, 222, 259, 292, 305362, 363, 391
Sultan Pajang 56
Sultan Paku Buwono II 193, 194
Sultan Alauddin Syah 121
Sultan Malik as Saleh 162, 153, 215
Sultan Muzaffar Syah 121
Sultanah Nahirsyah 203
Suma Oriental 107
Sunan Ampel 172
Sunan Bonang 188, 189
Sunan Gunungjati 59, 60, 67, 166, 176, 257, 285
Sunan Kalijaga 285
Sunda Kelapa 8, 116, 126, 136
sungkala 221
surambi 327, 328
surau 321, 325
sure bilang 106
susuhunan 275, 277
Suryaragi 279
Syair Kerajaan Bima 73
Syamsuddin Al-Samantrani 183, 184, 185, 191, 197, 199
Syaif Hidayatullan 285

T

Taj -us-Salatin 34
tajug 321, 325
Taman Sari 279
tanah lungguh 237
Tanjung Harapan 113
tanga 318
Tarekat Syattariyah 192
Tasikkardi 279, 291
Tellum Pocco 244, 245
Teluk Persia 111, 112
Ternate 9, 14, 76, 111, 118, 120, 134, 144, 273
Teuku Umar 33, 37
Tidore 9, 14, 76, 111, 118, 120, 134, 144, 268
tiwah 18
Tome Pires 4, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 26, 37, 45, 50, 52, 75, 76, 78, 89, 107, 116, 118, 137, 149, 152, 164, 205, 208, 255, 268, 315, 341, 317
Troloyo 4, 50
Trowulan 4, 6, 50, 264
Tuanku Imam Bonjol 49
tundan desa 234, 235, 236
Tung Hsi Yang Kau 307
tuwengke 218

U

Untung Surapati 351, 396
upeti 233, 234, 283, 331, 332, 337, 402
urban-rural 267

V

vasal 242, 243, 247
Vasco da Gama 96, 134
VOC 57, 68, 71, 72, 73, 76, 77, 80, 82, 85, 89, 107, 120, 123, 137, 138, 148, 149, 150, 151, 159, 238, 239, 350, 351, 372, 376, 389,
Vongi 209, 210

W

waktu telu 179, 182
Wali Sanga 166, 167, 286, 323, 324
wedana bupati 151, 152
W.F. Stutterdheim 322
Willem Lodewycksz 105, 106, 298, 300, 307, 310, 314, 321
W.P. Geonevelat 47

Pahlawan Nasional Indonesia
BHINNEKA TUNGGAL IKA
Abdoel Moeis (1883–1959)
Ki Hadjar Dewantara (1889–1959)
Raden Mas Soerjopranoto (1871–1959)
Mohammad Hoesni Thamrin (1894–1941)
K.H. Samanhoedi (1868–1956)
Raden H. Oemar Said Tjokroaminoto (1883–1934)
Danoedirdja Setiaboeddhi (1897–1950)
Raja Si Singamangaradja XII (1849–1907)
Dr. G.S.S.J. Ratulangi (1890–1949)
dr. Soetomo (1888–1938)
K.H. Ahmad Dahlan (1868–1923)
H. Agus Salim (1884–1954)
Jend. Gatot Soebroto (1907–1962)
Sukarjo Wirjopranoto (1903–1962)
Dr. Ferdinand Lumban Tobing (1899–1962)
K.H. Zainul Arifin (1909–1963)
Tan Malaka (1884–1949)
Mgr. Albertus Soegijapranata, S.J. (1896–1963)
Ir. R. Djuanda Kartawidjaja (1911–1963)
Dr. Sahardjo, S.H. (1909–1963)
Tjoet Nja' Dhien (1848–1908)
Tjoet Nja' Meutia (1870–1910)
Raden Adjeng Kartini (1879–1904)
dr. Tjipto Mangoenkoesoemo (1886–1943)
K.H. Fakhruddin (1890–1929)
K.H. Mas Mansoer (1896–1946)
Alimin bin Prawirodirdjo (1889–1964)
dr. Moewardi (1907–1948)
K.H. Abdul Wahid Hasjim (1914–1953)
Sri Sunuhunan Paku Buwono VI (1807–1849)
K.H. Mohammad Hasjim Asj'arie (1875–1947)
RMT Ario Soerjo (1896–1948)
Jend. Besar Soedirman (1916–1950)
Jend. Oerip Soemohardjo (1893–1948)
Prof. Dr. Mr. Soepomo (1903–1958)
Dr. Soetomo (1888–1938)
Dr. Soeleiman Effendi Koesoemah Atmadja (1898–1952)
Jend. Ahmad Yani (1922–1965)
Letjen R. Soeprapto (1920–1965)
Letjen Mas Tirtodarmo Harjono (1924–1965)
Letjen Siswondo Parman (1918–1965)
Mayjen Donald Isaac Pandjaitan (1925–1965)
Mayjen Soetojo Siswomihardjo (1922–1965)
Kapten Pierre Tendean (1939–1965)
Aipda Karel Satsuit Tubun (1928–1965)
Brigjen Katamso Darmokusumo (1923–1965)
Kol. Sugijono Mangunwijoto (1926–1965)
Soetan Sjahrir (1909–1966)
Laks. R. Edy Martadinata (1921–1966)
Raden Dewi Sartika (1884–1947)
Prof. Dr. Wilhelmus Zakaria Johannes (1895–1952)
Pangeran Antasari (1809–1862)
Sersan Usman alias Djanatin bin H. Ali (1943–1968)
Kopral Harun alias Tohir bin Said (1947–1968)
Jend. Basoeki Rachmat (1921–1969)
Arie Frederik Lasut (1918–1949)
Martha Christina Tiahahu (1800–1818)
Maria Walanda Maramis (1872–1924)
Supeno (1916–1949)
Sultan Ageng Tirtajasa (1631–1683)
Wage Rudolf Soepratman (1903–1938)
Nyai Hj. Siti Walidah Ahmad Dahlan (1872–1946)
K.H. Zainal Moestafa (1907–1944)
Sultan Hasanuddin (1631–1670)
Kapitan Pattimura (1783–1817)
Pangeran Diponegoro (1785–1855)
Tuanku Imam Bondjol (1772–1864)
Teungku Tjik di Tiro (1836–1891)
Tenku Oemar (1854–1899)
dr. Wahidin Soedirohoesodo (1852–1917)
Raden Otto Iskandar di Nata (1897–1945)
Robert Wolter Monginsidi (1925–1949)
Prof. Mr. Mohammad Yamin (1903–1962)
Laksda Josaphat Soedarso (1925–1962)
Prof. dr. R. Soeharso (1912–1971)
Marsda Prof. dr. Abdurrachman Saleh (1909–1947)
Marsda Mas Agustinus Adisutjipto (1916–1947)
Tenku Njak Arief (1899–1946)
Nji Ageng Serang (1752–1828)
Hj. Rangkayo Rasuna Said (1910–1965)
Marsda Abdul Halim Perdana Kusuma (1922–1947)
Marsma R. Iswahjudi (1918–1947)
Brigjen I Gusti Ngurah Rai (1917–1946)
Soeprijadi (1923–1945)
Sultan Agung Anyokrokusumo (1593–1645)
Untung Surapati (1660–1706)
Teungku Amir Hamzah (1911–1946)
Sultan Thaha Sjaifuddin (1816–1904)
Sultan Mahmud Badaruddin II (1767–1852)
Dr. Ir. H. Soekarno (1901–1970)
Dr. H. Mohammad Hatta (1902–1980)
Raden Pandji Soeroso (1893–1981)
Radin Inten II (1834–1856)
KGPAA Mangkunegara I (1725–1795)
Sri Sultan Hamengku Buwono IX (1912–1988)
Sultan Iskandar Muda (1593–1636)
I Gusti Ketut Jelantik (????–1849)
Frans Kaisiepo (1921–1979)
Silas Papare (1918–1978)
Martha Tiahey (1912–1986)
Sultan Nuku Muhammad Amiruddin (1738–1805)
Tuanku Tambusai (1784–1882)
Syekh Yusuf Tajul Khalwati (1626–1699)
R.A. Hj. Fatimah Siti Hartinah Soeharto (1923–1996)
Raja Haji Fisabilillah (1727–1784)
H. Adam Malik (1917–1984)
Marsma Tjilik Riwut (1918–1987)
La Maddukelleng (1700–1765)
Sultan Syarif Kasim II (1893–1968)
H. Ilyas Yacoub (1903–1958)
Prof. Dr. Hazairin, S.H. (1906–1975)
Abdul Kadir (1771–1875)
Hj. Fatmawati Soekarno (1923–1980)
Ranggong Daeng Romo (1915–1947)
Brigjen H. Hasan Basry (1923–1984)
Jend. Besar Abdul Haris Nasution (1918–2000)
Jend. GPH Djatikoesoemo (1917–1992)
Andi Djemma (1901–1965)
Pong Tiku alias Ne' Baso (1846–1907)
Prof. Mr. R. H. Iwa Koesoema Soemantri (1899–1971)
H. Nani Wartabone (1907–1986)
Maskoen Soemadiredja (1907–1986)
Andi Mappanyukki (1885–1967)
Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad (1808–1873)
K.H. Ahmad Rifa'i (1786–1870)
Gatot Mangkoepradja (1898–1968)
Ismail Marzuki (1914–1958)
Kiras Bangun alias Garamata (1852–1942)
Baginda Azizchan (1910–1947)
Andi Abdullah Bau Massepe (1918–1947)
Dr. Mr. H. Teuku Mohammad Hasan (1906–1997)
R.M. Djokomono Tirto Adhi Soerjo (1880–1918)
K.H. Noer Ali (1914–1992)
H. Pajonga Daeng Ngalle (1901–1958)
Opu Daeng Risadju (1880–1964)
Izaak Huru Doko (1913–1985)
Sri Sultan Hamengku Buwono I (1717–1792)
H. Andi Sultan Daeng Radja (1894–1963)
Mayjen dr. Adenan Kapau Gani (1905–1968)
Mr. dr. Ide Anak Agung Gde Agung (1921–1999)
Mayjen Prof. Dr. Moestopo (1913–1986)
Brigjen Ignatius Slamet Rijadi (1927–1950)
Dr. Mohammad Natsir (1908–1993)
K.H. Abdul Halim (1887–1962)
Soetomo alias Bung Tomo (1920–1981)
Laksda Jahja Daniel Dharma alias Johan Lie (1911–1988)
Prof. Dr. Ir. Herman Johannes (1912–1992)
Prof. Mr. R. Achmad Soebardjo (1896–1978)
Dr. Johannes Leimena (1905–1977)
Mayor Dr. Johannes Abraham Dimara (1916–2000)
Mr. Sjafruddin Prawiranegara (1911–1989)
K.H. Idham Chalid (1921–2010)
H. Abdul Malik Karim Abdullah (1908–1981)
Ki Sarmidi Mangunsarkoro (1904–1957)
I Gusti Ketut Pudja (1908–1977)
Sri Susuhunan Paku Buwono X (1866–1939)
Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahjono (1900–1986)
dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat (1879–1957)
Lambertus Nicodemus Palar (1900–1981)
Letjen Tahi Bonar Simatupang (1920–1990)
Letjen Djamin Ginting (1921–1974)
Soekarni Kartodiwirjo (1916–1971)
H. R. Mohamad Mangundiprodjo (1905–1988)
K.H. Abdul Wahab Hasbullah (1888–1971)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

Buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) Edisi Pemutakhiran ini terbit dalam cetakan ketujuh. Sejak awal penerbitan SNI pada tahun 1975, buku SNI ini belum pernah dimutakhirkan sesuai dengan temuan-temuan baru dan perkembangan teori sejarah yang baru. Sudah hampir tiga puluh tiga tahun, banyak naskah perbaikan masih tersimpan di laci para penulis sejarah Indonesia. Keunikan dari SNI adalah bahwa buku merupakan hasil karya bangsa Indonesia sendiri, ilmuwan/wati Indonesia yang sebagian besar masih hidup.

Keunikan kedua dari buku SNI ini adalah dia ditulis dengan latar belakang Indonesia atau bersifat Indonesia sentris. Untuk mengetahui latar belakang penulisan buku SNI sebanyak enam jilid ini perlu membaca Prakata Editor Umum pada edisi pertama yang ditulis oleh Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo.

Buku SNI telah mendapat julukan dari masyarakat Indonesia sebagai "buku standar" sejarah Indonesia. Oleh karena itu, isi buku SNI sering dipakai sebagai sumber rujukan penulisan dan pembicaraan tentang sejarah Indonesia, baik secara langsung dikatakan maupun secara tersirat.

Balai Pustaka sebagai pemegang hak penerbitan buku SNI telah berusaha keras untuk menghidupkan kembali semangat nasional para pencetus dan penulis awal buku SNI. Dengan menghimpun semua mereka yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam penulisan buku SNI, Balai Pustaka berhasil memutakhirkan isi buku SNI. Kepada para penulis buku SNI, baik yang masih hidup dan terus terlibat dalam pemutakhiran buku SNI ini dan kepada yang telah meninggal, Balai Pustaka mengucapkan terima kasih dan penghormatan besar atas karya dan jasa mereka.

Dengan ini, SNI Edisi Pemutakhiran ini hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga SNI Edisi Pemutakhiran ini menyadarkan bangsa Indonesia akan sejarah bangsanya dan buku ini berguna bagi bangsa Indonesia.

Buku ini telah dinilai oleh Panitia Penialaian Buku Nonteks Pelajaran (PPBNP) dan dinyatakan layak sebagai buku nonteks pelajaran (buku pengayaan, buku referensi, dan/atau buku panduan pendidik) berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Perbukuan Depdiknas Nomor: 3610/A8/LL/2009, Tahun 2009, Tanggal 21 Desember, dengan kategori*

Penerbitan dan Percetakan
PT Balai Pustaka
Jalan Bunga No. 8 – 8A Matraman
Jakarta 13140
Telepon : (+6221) 8583369
Faks : (+6221) 29622129
Http : //www.balaipustaka.co.id

ISBN: 979-407-409-8
EAN 13 : 978-979-407-409-1